



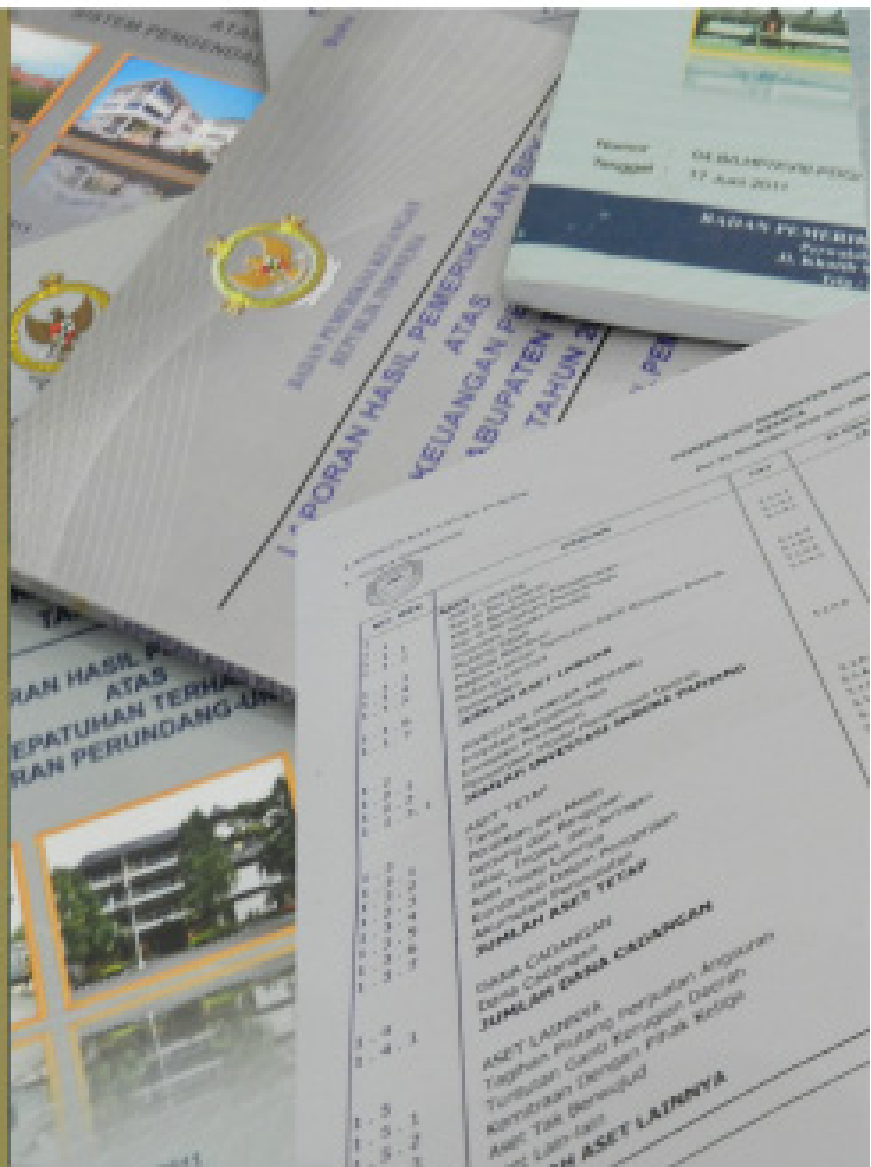
**Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia**

**Ikhtisar  
Hasil Pemeriksaan  
Semester I  
Tahun 2011**



**Jakarta, September 2011**

**Ikhtisar  
Hasil Pemeriksaan  
Semester I  
Tahun 2011**



## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iv
Daftar Lampiran	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	ix
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	xi
<b>PEMERIKSAAN KEUANGAN</b>	1
BAB 1      Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	5
BAB 2      Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)	11
BAB 3      Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	31
BAB 4      Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya	53
<b>PEMERIKSAAN KINERJA</b>	59
BAB 5      Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M	61
BAB 6      Kinerja Rumah Sakit	65
BAB 7      Kinerja Bea dan Cukai	73
BAB 8      Pemeriksaan Kinerja Lainnya	77
<b>PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>	85
BAB 9      Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan	87
BAB 10     Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja	99
BAB 11     Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan	125
BAB 12     Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus	137
BAB 13     Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	151
BAB 14     Sistem Pengendalian Intern Badan Usaha Milik Negara	161
BAB 15     Operasional Badan Usaha Milik Negara	167
BAB 16     Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	177
<b>HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN</b>	183
<b>HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH</b>	191
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM</b>	197
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2011
2. Temuan Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2011
3. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006-2010
4. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2005-2010
5. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Penyetoran Kas/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006-2010
- 2.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKKL Tahun 2010
- 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2005-2010
- 3.2. Opini LKPD Tahun 2005-2010 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKPD Tahun 2010
- 4.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BHMN dan Badan Lainnya
- 4.2. Opini atas Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya
- 4.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya
- 9.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan
- 10.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat
- 10.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah
- 12.1. Pembagian Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 12.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus
- 13.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
- 15.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN
- 16.1. Cakupan Pemeriksaan PDDT Lainnya
- 17.1. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011
- 17.2. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011
- 17.3. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011

- 17.4. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011
- 18.1. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Pusat
- 18.2. Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN
- 18.3. Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah
- 18.4. Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Kerugian/Pidana

## DAFTAR GRAFIK

1. Persentase Kasus Kerugian
2. Persentase Kasus Potensi Kerugian
3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 17.1. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 17.2. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 17.3. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 17.4. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2006-2010
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010
3. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010
4. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010
5. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2005-2010
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
8. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya
11. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan
14. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan
15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Pusat
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Pusat
17. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Pusat

18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Daerah
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Daerah
20. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Daerah
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan
23. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus
25. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus
26. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus
27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah
28. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah
29. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah
30. Simpulan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Sistem Pengendalian Intern Badan Usaha Milik Negara
31. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara
32. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara
33. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara



- 34.1 Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 34.2 Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada BUMN
- 34.3 Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada BUMD
- 35.1 Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 35.2 Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada BUMN
- 35.3 Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada BUMD
36. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
37. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011
38. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011
39. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, dan Otorita Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011
40. Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan pada Instansi Pusat
41. Kerugian Negara dengan Status Dalam Proses Penetapan pada Instansi Pusat
42. Indikasi Kerugian Negara pada Instansi Pusat
43. Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan pada BUMN
44. Indikasi Kerugian Negara pada BUMN
45. Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Daerah
46. Kerugian Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan pada Pemerintah Daerah
47. Indikasi Kerugian Negara pada Pemerintah Daerah
48. Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011
49. Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011

50. Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011
51. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2011

## Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Selanjutnya, BPK menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) yang merupakan informasi secara menyeluruh dari seluruh LHP yang diterbitkan oleh BPK dalam satu semester tertentu. IHPS tersebut disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 yang mengharuskan BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan, Presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS ini merupakan ikhtisar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK pada Semester I Tahun 2011 atas 682 objek pemeriksaan, yaitu 460 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 208 objek PDTT.

Atas hasil pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2011, sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah telah menindaklanjuti kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan, dengan menyetor ke kas negara/daerah atau penyerahan aset, yaitu senilai Rp136,77 miliar selama proses pemeriksaan masih berlangsung. Penyetoran tersebut terdiri atas kasus kerugian negara/daerah senilai Rp82,59 miliar, kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp4,33 miliar, serta kasus kekurangan penerimaan senilai Rp49,83 miliar. Hal ini membuktikan bahwa respon instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat positif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan peran BPK dalam penyelamatan uang negara.

Akhir kata, dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, IHPS I Tahun 2011 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Buku IHPS I Tahun 2011 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selanjutnya, BPK berharap Buku IHPS I Tahun 2011 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholders* dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah. Informasi rinci dan lengkap hasil pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2011 dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan atas tiap-tiap entitas yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat/*digital video disc* (DVD) bersama penyampaian IHPS ini.

Jakarta, 30 September 2011





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

## **RINGKASAN EKSEKUTIF IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2011**

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. IHPS disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta kepada Presiden dan gubernur/bupati/walikota agar yang bersangkutan memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

IHPS I Tahun 2011 merupakan ikhtisar dari 682 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Jenis pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan keuangan dilakukan atas laporan keuangan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), revidu, atau prosedur yang disepakati.

Mengingat waktu pemeriksaan keuangan sangat sempit sesuai ketentuan undang-undang yaitu dua bulan sejak laporan keuangan diterima BPK untuk diperiksa, maka pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan atas akun-akun tertentu melalui pemeriksaan kinerja atau PDTT sebelum pemeriksaan keuangan untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. Jika dalam pemeriksaan keuangan ditemukan hal-hal yang diduga terjadi penyimpangan atas kepatuhan dan/atau kepatutan, sementara waktu pemeriksaan keuangan sangat terbatas dan prosedur alternatif tidak dapat dilakukan, maka pemeriksa dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDTT setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

Pada Semester I Tahun 2011, pemeriksaan BPK diprioritaskan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2010 dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 dan LK badan lainnya (termasuk BHMN). Selain prioritas pemeriksaan pada laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dan PDTT.

IHPS I Tahun 2011 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/tindak pidana, yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (penegak hukum).

Objek pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2011 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU seperti yang disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2011**

Entitas Yang Diperiksa	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah
Pemerintah Pusat	89*	8	61	158
Pemerintah Daerah	363**	4	92	459
BUMN	-	2	44	46
BUMD	-	-	9	9
B H M N / B L U / B a d a n Lainnya	8	-	2	10
<b>Jumlah</b>	<b>460</b>	<b>14</b>	<b>208</b>	<b>682</b>

\*) termasuk LKPP, LK BUN, dan objek BA 999 pada lima kementerian yang mendukung LK BA 999 pada Kementerian Keuangan

\*\*) termasuk lima LKPD TA 2009

Total objek pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2011 sebanyak 682 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek pemeriksaan, pemeriksaan kinerja sebanyak 14 objek pemeriksaan, dan PDTT sebanyak 208 objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan keuangan meliputi LKPP, LKKL, LKPD, dan LK badan lainnya (termasuk LK BHMN).

Cakupan pemeriksaan keuangan atas LKKL, LKPD, dan LK badan lainnya meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rincian neraca adalah aset senilai Rp4.926,54 triliun, kewajiban senilai Rp2.946,94 triliun, serta ekuitas senilai Rp1.979,58 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.361,93 triliun, belanja senilai Rp1.422,33 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp127,26 triliun, serta laba/rugi atau surplus/defisit badan lainnya senilai negatif Rp20,53 triliun.

Cakupan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan tersebut tidak secara spesifik menunjuk nilai tertentu, sedangkan cakupan PDTT atas 208 objek pemeriksaan senilai Rp207,64 triliun.

## Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 mengungkapkan sebanyak 11.430 kasus senilai Rp26,68 triliun, dengan rincian Rp26,57 triliun, USD12.11 juta (ekuivalen Rp104,19 miliar) dan EUR212.87 ribu (ekuivalen Rp 2,65 miliar). Rincian temuan tersebut disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Temuan Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2011**

No	Kelompok Temuan	Pemeriksaan Keuangan			Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				Total				
		Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Nilai (ribu USD)	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Nilai (ribu USD)	Nilai (ribu EUR)	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Nilai (ribu USD)	Nilai (ribu EUR)	Jumlah Nilai (miliar Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3 + 6	11 = 4 + 7	12 = 5 + 8	13 = 9	14 = 11 + 12 + 13
1	Kerugian	1.438	672,59	200.00	414	290,36	-	-	1.852	962,95	200.00	-	964,67
2	Potensi Kerugian	353	3.713,59	11.720.00	75	715,66	-	24.20	428	4.429,25	11.720.00	24.20	4.530,31
3	Kekurangan Penerimaan	984	901,43	1.05	199	1.321,26	198.44	-	1.183	2.222,70	199.49	-	2.224,41
	<b>Sub Total I</b>	<b>2.775</b>	<b>5.287,62</b>	<b>11.921.05</b>	<b>688</b>	<b>2.327,28</b>	<b>198.44</b>	<b>24.20</b>	<b>3.463</b>	<b>7.614,90</b>	<b>12.119.49</b>	<b>24.20</b>	<b>7.719,40</b>
4	Administrasi	2.059	-	-	348	-	-	-	2.407	-	-	-	-
5	Ketidakhematan	173	172,94	-	53	85,04	-	188.67	226	257,99	-	188.67	260,34
6	Ketidakefisienan	2	1,37	-	4	59,77	-	-	6	61,14	-	-	61,14
7	Ketidakefektifan	314	15.227,54	-	158	3.416,88	-	-	472	18.644,42	-	-	18.644,42
8	SPI	3.957	-	-	899	-	-	-	4.856	-	-	-	-
	<b>Sub Total II</b>	<b>6.505</b>	<b>15.401,86</b>	<b>-</b>	<b>1.462</b>	<b>3.561,70</b>	<b>-</b>	<b>188.67</b>	<b>7.967</b>	<b>18.963,57</b>	<b>-</b>	<b>188.67</b>	<b>18.965,92</b>
	<b>Total</b>	<b>9.280</b>	<b>20.689,48</b>	<b>11.921.05</b>	<b>2.150</b>	<b>5.888,99</b>	<b>198.44</b>	<b>212.87</b>	<b>11.430</b>	<b>26.578,48</b>	<b>12.119.49</b>	<b>212.87</b>	<b>26.685,32</b>

Keterangan: 1. Nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2011 USD1=Rp8.597,00 dan EUR1=Rp12.461,78

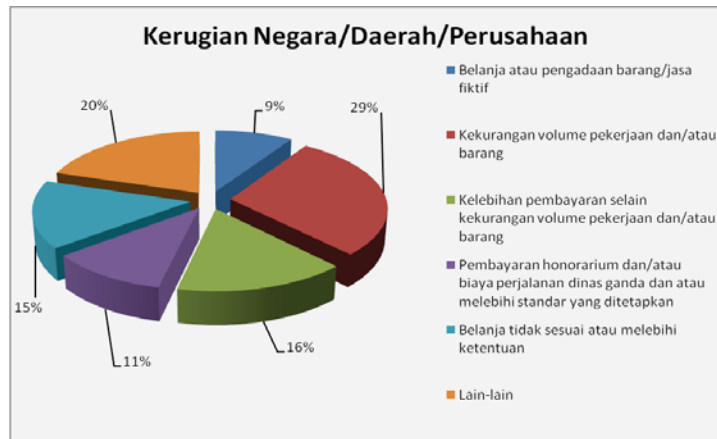
2. Diolah dari Lampiran 48, Lampiran 49, dan Lampiran 50.

Tabel 2 (Sub Total I) menunjukkan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.463 kasus senilai Rp7,71 triliun, dengan rincian Rp7,61 triliun, USD12.11 juta (ekuivalen Rp104,19 miliar), dan EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp301,57 juta). Rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut adalah penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset. Selebihnya adalah temuan kelemahan SPI, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekomendasi BPK atas temuan tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif (Tabel 2 Sub Total II).

Tabel 2 (Sub Total II) menunjukkan temuan kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan serta kelemahan SPI sebanyak 7.967 kasus. Nilai temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp18,96 triliun dengan nilai temuan terbesar yaitu temuan ketidakefektifan senilai Rp18,64 triliun di antaranya senilai Rp13,90 triliun terjadi di Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dana investasi yang dicairkan pada TA 2010, dana investasi dari DIPA tahun-tahun sebelumnya, dan surplus pendapatan yang diperoleh belum dimanfaatkan sesuai rencana bisnis dan anggaran secara optimal mengakibatkan adanya *idle cash* per 31 Desember 2010 senilai Rp13,90 triliun.

Temuan kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 1.852 kasus senilai Rp964,67miliar, dengan rincian Rp962,95 miliar dan USD200.00 ribu (ekuivalen Rp1,71 miliar), disajikan dalam Lampiran 49. Kerugian negara/daerah/perusahaan antara lain belanja fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi. Persentase kasus kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1. Persentase Kasus Kerugian



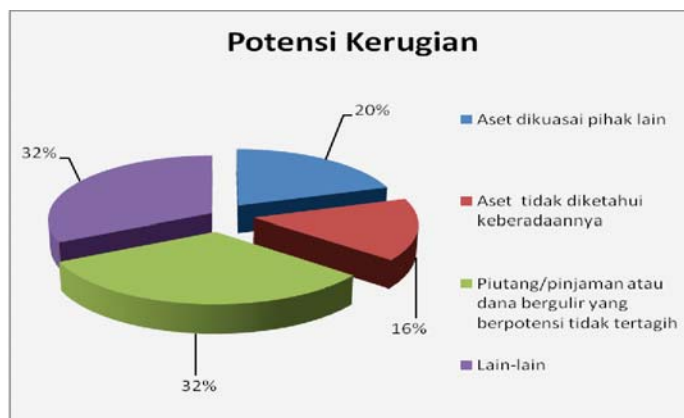
Grafik 1 menyajikan kasus-kasus kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 532 kasus (29% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp188,78 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDDT Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 290 kasus (16% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp73,73 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDDT Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 285 (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp153,93 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan LKKL;
- kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 203 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp90,48 miliar, dengan rincian Rp88,76 miliar dan USD200.00 ribu (ekuivalen Rp1,71 miliar) banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan LKKL; dan
- kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif sebanyak 169 kasus (9% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp132,83 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan LKKL.



Temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 428 kasus senilai Rp4,53 triliun, dengan rincian Rp4,42 triliun, USD11.72 juta (ekuivalen Rp100,75 miliar) dan EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp301,57 juta), disajikan dalam Lampiran 49. Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan di antaranya terjadi karena rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.

Grafik 2. Persentase Kasus Potensi Kerugian

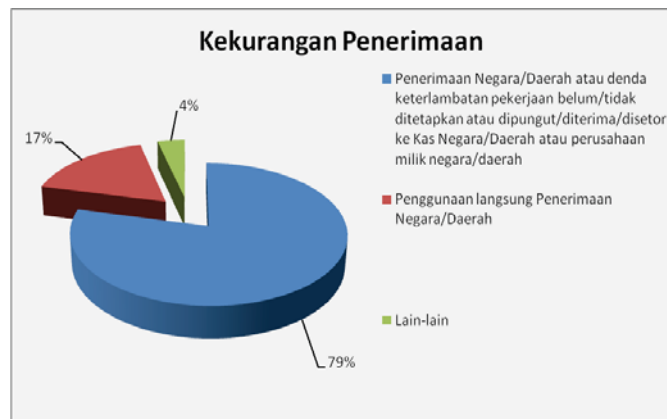


Grafik 2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 137 kasus (32% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp979,74 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan LKKL.
- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 86 kasus (20% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1,40 triliun, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan LKKL.
- kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 67 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1,72 triliun, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan LKKL.

Temuan kekurangan penerimaan sebanyak 1.183 kasus senilai Rp2,22 triliun, dengan rincian Rp2,22 triliun dan USD199.49 ribu (ekuivalen Rp1,71 miliar), disajikan dalam Lampiran 50. Kekurangan penerimaan di antaranya terjadi karena penerimaan negara/daerah belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan dan pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 3.

**Grafik 3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan**



Grafik 3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi, yaitu

- Kasus penerimaan negara/daerah denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 933 kasus (79% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp712,03 miliar, dengan rincian Rp710,32 miliar dan USD199.49 ribu (ekuivalen Rp1,71 miliar), banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan LKKL.
- Kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 206 kasus (17% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp666,03 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan LKKL.

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (Tabel 2 Sub Total I) senilai Rp7,71 triliun (Rp7,61 triliun, USD 12.11 juta=Rp104,19 miliar, EUR24.20 ribu=301,57 juta), selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp136,77 miliar (Rp136,47 miliar, EUR24.20 ribu=Rp301,57 juta), dengan rincian temuan kerugian senilai Rp82,59 miliar (Lampiran 48), potensi kerugian senilai Rp4,33 miliar (Rp4,03 miliar dan EUR24.20 ribu=Rp301,57 juta), disajikan dalam Lampiran 49, dan kekurangan penerimaan senilai Rp49,83 miliar (Lampiran 50).

Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2011 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

### **Pemeriksaan Keuangan**

Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 1 LKPP Tahun 2010, 83 LKKL Tahun 2010 (termasuk objek BA 999 pada 5 kementerian yang mendukung LK BA 999 pada Kementerian Keuangan), dan 363 LKPD yang meliputi 358 LKPD Tahun 2010 dan 5 LKPD Tahun 2009, serta 8 laporan keuangan BHMN/badan lainnya.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2010. Opini tersebut sama dengan opini LKPP Tahun 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.

Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2010 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan antara lain (a) adanya permasalahan penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan. Data yang ada tidak memungkinkan BPK untuk menguji kewajaran penerimaan perpajakan; (b) pencatatan uang muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai; (c) adanya permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak; dan (d) terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap.

## Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian negara, lembaga negara, dan lembaga pemerintah non kementerian. Pada Semester I Tahun 2011 ini BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 52 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 29 LKKL, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 2 LKKL Tahun 2010.

Perkembangan opini LKKL Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 – 2010

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2005*									
Tahun 2006	7	9%	36	46%	0	0%	36	46%	79
Tahun 2007	14	18%	32	40%	1	1%	33	41%	80
Tahun 2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
Tahun 2009	44	56%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83

\* BPK telah memeriksa LKKL Tahun 2005 tetapi belum memberikan opini

Cakupan pemeriksaan atas 83 LKKL tersebut meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Rekapitulasi nilai neraca dengan rincian aset senilai Rp2.420,05 triliun, kewajiban senilai Rp1.798,03 triliun, dan ekuitas senilai Rp622,01 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp995,27 triliun, belanja senilai Rp1.042,11 triliun, dan pembiayaan netto senilai Rp91,55 triliun.

Jumlah LK Tahun 2010 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LK 2009 disebabkan adanya penambahan pemeriksaan bagian anggaran yang diperiksa baik KL, non KL, maupun BUN.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa opini LKKL Tahun 2010, secara persentase menunjukkan adanya kenaikan proporsi opini WTP dan WDP serta penurunan proporsi opini TMP dibandingkan opini LKKL tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan usaha KL menuju arah perbaikan dalam menyusun laporan keuangannya.

Selain opini, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKKL juga mengungkapkan temuan tentang kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK atas 83 LKKL menemukan 519 kasus kelemahan SPI dan 731 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,50 triliun, dengan rincian Rp1,40 triliun dan USD11.72 juta (ekuivalen Rp100,75 miliar).

Selama proses pemeriksaan 83 LKKL tersebut, temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp35,51 miliar, yaitu temuan kerugian senilai Rp24,76 miliar (Lampiran 48) dan temuan kekurangan penerimaan senilai Rp10,75 miliar (Lampiran 49).

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa LKPD Tahun 2010 pada 358 atau 69% dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan LKPD Tahun 2009 pada lima pemerintah daerah yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku, Mamberamo Raya di Provinsi Papua, dan Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat. Cakupan pemeriksaan atas 358 LKPD tersebut meliputi neraca dan LRA. Rincian neraca yaitu aset senilai Rp1.281,03 triliun, kewajiban senilai Rp8,26 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.272,75 triliun. Sedangkan rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp345,22 triliun, belanja (termasuk transfer) senilai Rp338,25 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp35,71 triliun.

BPK memberikan opini **WTP** atas 32 LKPD, opini **WDP** atas 271 LKPD, opini **tidak wajar** (TW) atas 12 LKPD, dan opini **TMP** atas 43 LKPD. Sedangkan terhadap lima LKPD Tahun 2009 BPK memberikan opini **TMP**. Perkembangan opini LKPD Tahun 2005 s.d. 2010 dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2005–2010

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2005	18	5%	307	85%	13	3%	24	7%	362
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111*)	22%	504
2010	32	9%	271	76%	12	3%	43	12%	358**)

\*) Termasuk LKPD Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Mamberamo Raya, dan Kab. Teluk Wondama yang baru diperiksa Tahun 2011.

\*\*\*) Jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2011

Dari Tabel 4 di atas diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2010 menunjukkan kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun-tahun sebelumnya kecuali Tahun 2005. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Masih banyaknya opini TMP dan TW (15%) yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah yang bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian. Pada umumnya kelemahan tersebut meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat dan tepat waktu.

Kelemahan dalam pengendalian intern tersebut terlihat dari banyaknya kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, penganggaran/perencanaan tidak memadai, pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya melalui mekanisme APBD dan tidak diatur dengan mekanisme yang memadai, serta belum adanya *standard operating procedure* (SOP) yang memadai.

Pemeriksaan terhadap 358 LKPD juga menemukan 3.397 kasus kelemahan SPI. Selain opini dan temuan SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.551 kasus senilai Rp5,28 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan, temuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp73,81 miliar, yaitu temuan kerugian senilai Rp50,64 miliar (Lampiran 48), potensi kerugian senilai Rp3,26 miliar (Lampiran 49), dan kekurangan penerimaan senilai Rp19,89 miliar (Lampiran 50).

### **Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya**

Selain pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKPD, BPK juga telah memeriksa delapan laporan keuangan BHMN dan badan lainnya. BPK memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Tahun 2008, Laporan Keuangan Bank Indonesia (BI) Tahun 2010, Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2010 *Project Management Office of Asian Development Bank on Earthquake and Tsunami Emergency Support Project* (PMO ADB ETESP) Tahun 2010, Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun 2010, Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun 2010, dan Laporan Keuangan *Loan ADB 2575-INO* pada *Rural Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2*, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (*Loan ADB 2575-INO*) Tahun 2010. Opini TMP diberikan terhadap Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) pada Badan Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M dan Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2010.

## Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan, terdiri atas 8 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 4 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 2 objek di BUMN.

Hasil pemeriksaan BPK dapat dikelompokkan dalam beberapa tema pemeriksaan sebagai berikut:

- penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1431 H/2010 M;
- kinerja rumah sakit; dan
- kinerja bea dan cukai.

Selain tema pemeriksaan di atas terdapat lima pemeriksaan kinerja yang tidak dapat dikelompokkan dalam tema-tema tersebut di atas.

Hasil pemeriksaan kinerja atas tema-tema di atas antara lain sebagai berikut.

### Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M

- Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M telah meningkatkan pelayanan pemondokan, transportasi darat, dan catering. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan antara lain penetapan jarak pemondokan ke Masjidil Haram di Mekkah yang dibagi dalam Ring I dan Ring II pada Tahun 1429 H/2008 M, 1430 H/2009 M, dan 1431 H/2010 M mengalami perubahan, akan tetapi perubahan jarak tersebut belum disosialisasikan kepada calon jemaah haji.

### Kinerja rumah sakit

- Pengelolaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan pada RSAB Harapan Kita, Jakarta belum efisien dan efektif dalam rangka menunjang tercapainya tujuan RSAB Harapan Kita.
- RSUD Langsa, Provinsi Aceh belum efektif dalam merencanakan, memenuhi kebutuhan infrastruktur, menetapkan prosedur dan standar pelayanan, serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelayanan rawat inap.
- Pelayanan kesehatan pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh belum sepenuhnya mencapai Standar Pelayanan Minimum.
- Struktur pengendalian intern RSUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku masih belum memadai, belum efektif dalam merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang ada dalam mencapai SPM dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

### Kinerja bea dan cukai

- Kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta cukup efektif untuk mendukung peningkatan pengamanan penerimaan negara, sementara itu kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang dilakukan Kanwil DJBC Jawa Timur I kurang efektif untuk dapat mendukung rencana strategis dalam pengamanan atas penerimaan negara.
- Kegiatan pelayanan dan penatausahaan penyelesaian impor barang kiriman melalui PJT dan Kantor Tukar Pos Udara pada KPPBC Soekarno Hatta Tangerang serta kegiatan pelayanan dan penatausahaan pengeluaran barang impor untuk dipakai dari TPS pada KPPBC Belawan Medan kurang efektif dalam rangka mendorong kelancaran arus barang dan kepatuhan PJT/penerima barang kiriman dalam memenuhi kewajiban kepabeanannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Kinerja lainnya

- Efektivitas pengelolaan kajian atas program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada LAN tidak tercapai secara optimal.
- Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Kementerian PPN/Bappenas telah dilaksanakan secara efektif.
- Pemerintah Kota Ambon belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan pendidikan.
- Pelaksanaan transportasi dan antaran kiriman pos yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pada PT Pos (Persero) belum sepenuhnya efisien dan efektif.
- Pelaksanaan kegiatan penerimaan iuran wajib pesawat udara (IWPU) dan pengeluaran biaya administrasi (BA) dalam menghasilkan penerimaan IWPU dari semua operator pesawat udara pada PT Jasa Raharja (Persero) belum sepenuhnya efisien dan efektif.

### **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**

Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan PDDT atas 208 objek pemeriksaan, terdiri atas 61 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 92 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 44 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 9 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 2 objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan;

- pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban dana alokasi khusus bidang pendidikan;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus;
- pelaksanaan subsidi pemerintah;
- pengendalian intern badan usaha milik negara; dan
- operasional badan usaha milik negara.

Selain tema pemeriksaan di atas, terdapat 16 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang tidak dapat dikelompokkan dalam tema-tema tersebut sehingga dikelompokkan dalam bab pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil PDTT mengungkapkan 899 kasus kelemahan SPI dan 1.251 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp5,89 triliun, dengan rincian Rp5,88 triliun, USD198.44 ribu (ekuivalen Rp1,70 miliar), dan EUR212.87 ribu (ekuivalen Rp2,65 miliar). Nilai temuan tersebut merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai uang. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan kelemahan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Selama proses PDTT tersebut, temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp27,43 miliar, dengan rincian Rp27,13 miliar dan EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp301,57 juta). Penyetoran tersebut terdiri atas penyetoran temuan kerugian senilai Rp7,17 miliar (Lampiran 48), potensi kerugian senilai Rp1,07 miliar (Rp771,29 juta, EUR24.20 ribu=Rp301,57 juta), disajikan dalam Lampiran 49, dan kekurangan penerimaan senilai Rp19,18 miliar (Lampiran 50).

Hasil PDTT antara lain sebagai berikut.

- Pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan  
Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Postel, Sistem Informasi Manajemen Frekuensi, tidak dapat menghitung denda keterlambatan pembayaran BHP frekuensi radio TA 2009 dan 2010, sehingga denda dihitung manual yang mengakibatkan denda keterlambatan belum ditetapkan senilai Rp31,04 miliar.
- Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja  
Di Kementerian Kesehatan, kekurangan fisik dan kesalahan perhitungan volume dalam kontrak pengadaan obat dan alat kesehatan TA 2007 s.d. 2009, mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp4,78 miliar.



- Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana alokasi khusus bidang pendidikan

Di Kementerian Pendidikan Nasional, terdapat kerugian negara atas kesalahan penyaluran dana subsidi tunjangan guru TA 2009 dan 2010 masing-masing senilai Rp3,53 miliar dan Rp616,39 juta antara lain karena adanya pemberian tunjangan profesi, fungsional, dan tambahan penghasilan secara ganda; pemberian tunjangan fungsional meskipun telah menerima tunjangan profesi; pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada guru yang belum bersertifikat; serta pemberian subsidi tunjangan tambahan penghasilan kepada non guru.

- Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus

Di Provinsi Papua, terjadi pemahalan harga atas pengadaan *solar cell*, televisi, radio, dan parabola TA 2010 pada Biro Pemerintahan Kampung yang berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp20,25 miliar.

- Pelaksanaan subsidi pemerintah

Pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada tiga BUMN (PT PLN, Pertamina, dan PT PKT) penerima subsidi senilai Rp5,56 triliun dari yang telah ditetapkan dan Pemerintah lebih bayar kepada empat BUMN (PT PK, PT PIM, PT Pusri Palembang, dan PT PG) senilai Rp796,73 miliar.

- Pengendalian intern badan usaha milik negara

PT Batan Teknologi (Persero) tidak membuat perhitungan harga pokok produksi (HPP) berdasarkan pesanan atau berdasarkan jenis produk mengakibatkan perusahaan tidak memiliki data tentang HPP per pesanan ataupun per jenis produk yang akurat sehingga tidak dapat menghitung margin penjualan masing-masing produk.

- Operasional badan usaha milik negara

Di Perum Peruri, terdapat pekerjaan *upgrade control of thermoregulating unit* yang dibatalkan namun tidak dituangkan dalam klausul adendum kontrak, mengakibatkan pemborosan senilai EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp3,89 miliar).

- PDDT lainnya

Di Kementerian Pekerjaan Umum, rekanan yaitu PT MJS telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran atas perjanjian kerja sama (kontrak) yang mengakibatkan pembangunan irigasi tersier Blok-C (Paket 13: LCB 7) Muncak Kabau terbengkalai dan uang muka untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dikembalikan dan jaminan uang muka atas pelaksanaan pekerjaan tersebut senilai Rp6,85 miliar tidak bisa dicairkan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

## Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011, BPK telah memberikan 191.757 rekomendasi senilai Rp103,19 triliun dengan rincian Rp76,13 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp27,05 triliun). Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan perbaikan SPI, tindakan administratif, dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut menunjukkan sebanyak 106.058 rekomendasi senilai Rp37,87 triliun, dengan rincian Rp25,40 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp12,46 triliun) telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 40.841 rekomendasi senilai Rp40,41 triliun, dengan rincian Rp30,66 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp9,74 triliun) ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 44.858 rekomendasi senilai Rp24,91 triliun, dengan rincian Rp Rp20,06 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp4,84 triliun) belum ditindaklanjuti.

Entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 berupa penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/ daerah/perusahaan senilai Rp25,57 triliun, dengan rincian seperti disajikan pada Tabel 5. berikut.

**Tabel 5. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Penyetoran Kas/Penyerahan Aset ke Negara/ Daerah/Perusahaan**

No.	Entitas	Nilai (miliar Rp)	Valas			Total (miliar Rp)
			Nilai (ribu valas)	Kurs Tengah 30 Juni 2011 (Rp)	Nilai Ekuivalen (miliar Rp)	
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7
1	Pemerintah Pusat	8.664,74				8.664,74
			USD 64,110.44	8.597,00	551,15	551,15
			EUR 580.39	12.461,78	7,23	7,23
			SAR 110.41	2.294,03	0,25	0,25
			SGD 117.75	6.984,61	0,82	0,82
			GBP 396.10	13.834,73	5,47	5,47
	<b>Jumlah Pemerintah Pusat</b>					<b>9.229,68</b>
2	Pemerintah Daerah	8.997,15				8.997,15
			USD 449.96	8.597,00	3,86	3,86
	<b>Jumlah Pemerintah Daerah</b>					<b>9.001,01</b>
3	BUMN Induk	6.335,96				6.335,96
			USD 82.344.35	8.597,00	707,91	707,91
			EUR 24.20	12.461,78	0,30	0,30
			JPY 270,977.12	10.671,57*	28,91	28,91
	<b>Jumlah BUMN Induk</b>					<b>7.073,09</b>
4	BUMN Anak Perusahaan	228,88				228,88
			USD 4,295.29	8.597,00	36,92	36,92
			MYR 525.00	2.845,99	1,49	1,49
	<b>Jumlah BUMN Anak Perusahaan</b>					<b>267,30</b>
<b>Total (miliar Rp)</b>						<b>25.571,09</b>

\* JPY 100 = Rp10.671,57

Keterangan: diolah dari Lampiran 37 s.d. Lampiran 39

## **Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2011 menunjukkan bahwa kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2004 sampai dengan Semester I Tahun 2011 adalah sebanyak 85.139 kasus senilai Rp17,93 triliun, dengan rincian Rp12,92 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp5,01 triliun). Penyelesaian berupa angsuran terpantau sebanyak 18.297 kasus senilai Rp1,81 triliun, dengan rincian Rp1,72 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp91,57 triliun). Pelunasan sebanyak 22.992 kasus senilai Rp4,84 triliun, dengan rincian Rp1,29 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp3,54 triliun). Penghapusan kerugian negara/daerah telah dilakukan atas 117 kasus senilai Rp10,20 miliar, dengan rincian Rp9,50 miliar dan sejumlah valas (ekuivalen Rp701,12 juta).

## **Pemantauan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana/ Kerugian Negara yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang**

Selama Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2011, jumlah LHP BPK berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 305 kasus senilai Rp33,66 triliun, dengan rincian Rp29,51 triliun dan USD480.88 juta (ekuivalen Rp4,15 triliun). Dari 305 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindaklanjuti 166 kasus yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 41 kasus, telaahan, gelar perkara dan penelitian sebanyak 21 kasus, penyelidikan sebanyak 24 kasus, penyidikan sebanyak 10 kasus, proses sidang 1 kasus, penuntutan sebanyak 11 kasus, vonis/banding sebanyak 47 kasus, dan SP3/ dihentikan sebanyak 11 kasus. Sisa kasus yang belum ditindaklanjuti atau tidak ada data tindak lanjutnya yaitu sebanyak 139 kasus.

**Jakarta, 30 September 2011**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**



## PEMERIKSAAN KEUANGAN

Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- Opini **Wajar Tanpa Pengecualian** – WTP (*unqualified opinion*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Wajar Dengan Pengecualian** – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Tidak Wajar** – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Pernyataan **Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat** – TMP (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

## Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Salah satu kriteria pemberian opini atas laporan keuangan adalah efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. SPI didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

## Kepatuhan

Pemberian opini atas laporan keuangan juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
- Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

- Temuan penyimpangan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

## Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBD (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan

Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2011 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 1 LKPP Tahun 2010, 83 LKKL Tahun 2010 (termasuk objek BA 999 pada 5 kementerian yang mendukung LK BA 999 pada Kementerian Keuangan). BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 358 LKPD Tahun 2010 dan 5 LKPD Tahun 2009. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 kepada DPR pada 1 Juni 2011. Namun, pada tingkat daerah masih terdapat LKPD yang belum diperiksa oleh BPK karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam Semester I Tahun 2011, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas satu laporan keuangan BHMN dan tujuh laporan keuangan badan lainnya. Untuk BHMN, pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan BP Migas Tahun 2008. Sedangkan untuk badan lainnya, pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 pada Bank Indonesia (BI), Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) 1431 H/2010 M, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), *Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project* (PMO ADB ETESP) Bappenas Jakarta dan Loan ADB 2575 INO pada *Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project 2* Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.



## BAB 1

### Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

- 1.1 Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010. Pemeriksaan keuangan ini merupakan yang ketujuh atas LKPP yang disusun Pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004.
- 1.2 Tujuan pemeriksaan LKPP adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu; (c) sistem pengendalian intern instansi tersebut baik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.
- 1.3 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK) dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Rincian nilai neraca adalah aset senilai Rp2.423,68 triliun, kewajiban senilai Rp1.796,07 triliun, dan ekuitas senilai Rp627,61 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp995,27 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.042,11 triliun, pembiayaan neto senilai Rp91,55 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp46,84 triliun.

#### Hasil Pemeriksaan

- 1.4 BPK memberikan opini **wajar dengan pengecualian (WDP)** atas LKPP Tahun 2010 atau sama dengan opini Tahun 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.
- 1.5 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2010 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
  - Adanya permasalahan penagihan, pengakuan, dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu: (1) pengakuan pendapatan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) senilai Rp11,28 triliun tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) PPN; (2) penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas (PBB Migas) senilai Rp19,30 triliun tidak menggunakan surat tagihan yang diatur dalam UU PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid; dan (3) transaksi pembatalan penerimaan (*reversal*) senilai Rp3,39 triliun tidak dapat ditelusuri ke data pengganti. Data yang ada tidak memungkinkan BPK untuk menguji kewajaran penerimaan perpajakan di atas.

- Pencatatan uang muka BUN tidak memadai, yaitu: (1) saldo uang muka dari rekening BUN yang disajikan pada neraca senilai Rp1,88 triliun tidak didukung rincian baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana talangan maupun dokumen usulan penggantinya (*reimbursement*); (2) nilai dana talangan dan penggantian Tahun 2009 s.d. 2010 masing-masing senilai Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun yang tidak dapat diidentifikasi; dan (3) nilai pengajuan penggantian lebih kecil senilai Rp2,92 triliun dibandingkan *reimbursement*-nya. Catatan yang ada tidak memungkinkan BPK menguji kewajaran uang muka BUN dan pengaruhnya terhadap catatan saldo anggaran lebih (SAL).
  - Adanya permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak yaitu: (1) penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda senilai Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat tagihan pajak (STP); dan (2) pengurangan piutang PBB berbeda senilai Rp1,03 triliun dengan penerimaannya. Data dan catatan yang ada tidak memungkinkan BPK untuk menguji kewajaran piutang pajak.
  - Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap yaitu: (1) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN senilai Rp12,95 triliun; (2) aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp5,34 triliun pada tujuh KL belum dilakukan IP; (3) hasil IP pada empat KL senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan; dan (4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sampai saat ini belum dapat mengukur umur manfaat untuk setiap aset tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap aset tetap. Nilai aset tetap yang dilaporkan bisa berbeda secara signifikan jika pemerintah menyelesaikan IP, mencatat seluruh hasil IP, dan memberlakukan penyusutan.
- 1.6 Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yaitu sebagai berikut.
- 1.7 Terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) Migas yaitu: (1) tidak ada instansi yang merekonsiliasi selisih kewajiban PPh Migas antara laporan gabungan satu wilayah kerja dengan laporan bulanan Tahun 2009; (2) belum adanya mekanisme penetapan dan penagihan PPh Migas; dan (3) ketidakjelasan kewenangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kurang bayar PPh Migas untuk tahun buku sebelum 2009 yang belum diselesaikan KKKS. Permasalahan tersebut mengakibatkan selisih kewajiban PPh Migas senilai Rp1,25 triliun tidak dapat dipantau dan kekurangan PPh Migas senilai Rp2,60 triliun belum dapat ditagih.
- 1.8 Setidaknya terdapat 29 KKKS yang tidak konsisten dalam menggunakan tarif PPh. KKKS tersebut tidak menggunakan tarif PPh sesuai pokok-pokok kerja sama yang disusun untuk menentukan bagi hasil migas, tetapi menggunakan

tarif PPh berdasarkan *tax treaty*. Akibatnya pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih kecil selama Tahun 2010 senilai USD159.33 juta atau setara Rp1,43 triliun.

- 1.9 Penerimaan hibah secara langsung pada 18 KL minimal senilai Rp868,43 miliar belum dikelola di dalam mekanisme APBN, sehingga tidak dilaporkan dalam LRA.
- 1.10 Terdapat kelemahan dalam penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) yaitu: (1) penyaluran bansos pada enam KL senilai Rp2,25 triliun tidak ada pertanggungjawaban keuangannya; (2) dana bansos pada empat KL senilai Rp175,63 miliar belum disalurkan dan masih disimpan oleh pihak ketiga yaitu bank/lembaga-kelompok penerima/koperasi; dan (3) penyaluran bansos pada tiga KL senilai Rp4,94 miliar tidak sesuai peruntukannya atau tidak tepat sasaran.
- 1.11 Anggaran belanja minimal senilai Rp4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya) sehingga dapat memberikan informasi yang tidak tepat, yaitu sebagai berikut.
  - Anggaran belanja modal pada 35 KL direalisasikan sebagai belanja barang senilai Rp660,00 miliar dan belanja bansos Rp16,62 miliar.
  - Anggaran belanja barang pada 53 KL direalisasikan sebagai belanja modal senilai Rp118,26 miliar dan belanja bansos Rp988,95 miliar.
  - Pembiayaan pada satu KL senilai Rp17,00 miliar dianggarkan dari belanja barang.
  - Anggaran belanja lainnya pada BA 999.08 senilai Rp2,90 triliun bukan merupakan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak berulang sehingga seharusnya dianggarkan di bagian anggaran masing-masing KL sebagai belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal.
  - Selain itu terdapat realisasi belanja lainnya pada Tahun 2010 senilai Rp1,79 triliun yang ditujukan untuk biaya operasional lima entitas yang belum memiliki bagian anggaran tersendiri yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengelola Kawasan (BPK) Sabang, dan BPK Batam.
- 1.12 Terdapat kelemahan dalam pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS yaitu sebagai berikut.
  - Data Harmoni III yang digunakan sebagai dasar IP aset KKKS tidak divalidasi, dianalisis, dan diklasifikasi ulang sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan IP.
  - Pengendalian atas pelaksanaan IP belum memadai, di antaranya: (1) beberapa pelaksanaan IP aset KKKS yang telah dinyatakan 100% selesai, tidak seluruhnya dilakukan inventarisasi secara sensus sehingga laporan

IP tidak seluruhnya menggambarkan keberadaan dan kondisi aset; (2) nilai perolehan tidak divalidasi ke dokumen sumbernya; dan (3) tidak ada tanda (*IP trail*) pada setiap aset yang sudah disensus.

- Nilai wajar hasil IP belum dapat diyakini, di antaranya karena penilaian aset belum memperhitungkan status aset, menggunakan kurs tanggal penilaian (bukan tanggal perolehan), serta belum memperhitungkan PPN.

Hasil IP aset KKKS yang sudah divalidasi ulang senilai Rp54,44 triliun, dicatat di Neraca LKPP Tahun 2010.

- 1.13 Terdapat kelemahan dalam penatausahaan atas aset kredit tim koordinasi senilai Rp6,18 triliun yaitu: (1) proses pemetaan atas 16.244 amplop aset kredit ke dalam masing-masing debitur belum seluruhnya dilakukan dan adanya reklasifikasi debitur *asset transfer kit* dalam debitur Non *asset transfer kit*, mempersulit penatausahaan aset kredit eks BPPN; dan (2) aset properti eks BPPN yang berasal dari aset yang dikelola tim koordinasi minimal senilai Rp532,09 miliar dan aset properti hasil verifikasi Tahun 2010 sebanyak 244 unit belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
- 1.14 Pemerintah belum menyempurnakan aturan mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun sehingga status dana senilai Rp28,76 triliun dan penggunaannya untuk *sharing* pembayaran pensiun Tahun 1994 – 2008 senilai Rp36,26 triliun belum jelas.
- 1.15 Pengelolaan PNBPN belum memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu: (1) PNBPN pada 23 KL terlambat disetor ke kas negara minimal senilai Rp312,50 miliar dan (2) PNBPN pada 18 KL senilai Rp56,64 miliar yang belum disetor dan Rp213,75 miliar yang digunakan langsung (di luar mekanisme APBN).
- 1.16 Penetapan alokasi atas dana penyesuaian Tahun 2010, khususnya untuk dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah (DPDF PPD), dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD), dan dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP) tidak berdasarkan kriteria yang jelas melainkan langsung ditetapkan dalam rapat panitia kerja DPR.
- 1.17 BPK menemukan permasalahan realisasi belanja barang pada 44 KL senilai Rp110,47 miliar dan USD63.45 ribu yaitu: (1) realisasi belanja barang tidak dilaksanakan kegiatannya pada 23 KL senilai Rp16,66 miliar; (2) pembayaran ganda pada sembilan KL senilai Rp1,29 miliar; (3) realisasi yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban pada 39 KL senilai Rp72,31 miliar dan USD63.45 ribu; dan (4) realisasi yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pada dua KL senilai Rp20,21 miliar.

## Rekomendasi

- 1.18 Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar
- menyempurnakan sistem penetapan, pencatatan, dan penagihan penerimaan serta piutang perpajakan;
  - melakukan inventarisasi dan memperhitungkan pada tahun tahun berikutnya atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembayaran-pembayaran PBB Migas serta menagih kekurangan PPh Migas;
  - mengupayakan amandemen atas klausul *production sharing contract* (PSC) yang belum memperhitungkan penerapan *tax treaty*;
  - menyempurnakan peraturan terkait pencatatan hibah yang diterima langsung oleh KL;
  - menertibkan dan menyempurnakan pengelolaan reksus dan dana talangan dari Rekening BUN;
  - menyempurnakan pencatatan dan pengelolaan aset tetap;
  - memperbaiki metode IP dan penatausahaan Aset KKKS dan Aset Eks BPPN;
  - menyempurnakan regulasi dana pensiun PNS;
  - menertibkan klasifikasi belanja dalam penyusunan anggaran;
  - menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran PNBP dan penggunaannya di luar mekanisme APBN;
  - membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai penentuan alokasi dana penyesuaian; dan
  - mengkaji kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas.
- 1.19 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 kepada DPR, DPD, dan Presiden/Pemerintah pada tanggal 30 Mei 2011.
- 1.20 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 2

### Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

- 2.1 Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) Tahun 2010 pada 75 bagian anggaran kementerian negara/lembaga (KL), tujuh bagian anggaran non KL, dan satu Bendahara Umum Negara (BUN).
- 2.2 Untuk laporan keuangan Sekretariat Jenderal BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Wisnu B. Soewito & Rekan" sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP "Wisnu B. Soewito & Rekan" ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/DPR RI/III/2010-2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK Tahun 2010.
- 2.3 Pemeriksaan atas LKKL bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 2.4 Cakupan pemeriksaan atas 83 LKKL/LK BUN tersebut meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Rekapitulasi nilai neraca dengan rincian aset senilai Rp2.420,05 triliun, kewajiban senilai Rp1.798,03 triliun, dan ekuitas senilai Rp622,01 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp995,27 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.042,11 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp91,55 triliun.

#### Hasil Pemeriksaan

- 2.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu LHP opini, LHP sistem pengendalian intern (SPI), dan LHP kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

## Opini

- 2.6 Terhadap 83 LKKL Tahun 2010, BPK memberikan opini **wajar tanpa pengecualian (WTP)** atas 52 KL, opini **wajar dengan pengecualian (WDP)** atas 29 KL, dan opini **tidak memberikan pendapat (TMP)** pada 2 KL.
- 2.7 Perkembangan opini LKKL Tahun 2006 sampai dengan LKKL Tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel 2.1. berikut ini. Rincian opini tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 – 2010

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2005*									
Tahun 2006	7	9%	36	46%	0	0%	36	46%	79
Tahun 2007	14	18%	32	40%	1	1%	33	41%	80
Tahun 2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
Tahun 2009	44	56%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83

\* BPK telah memeriksa LKKL Tahun 2005 tetapi belum memberikan opini

- 2.8 Dari Lampiran 1 terlihat bahwa secara bertahap opini Tahun 2010 pada 16 KL meningkat, yaitu dari sebelumnya memperoleh opini TMP menjadi opini WDP, serta dari sebelumnya opini WDP menjadi opini WTP. Namun ada empat KL yang opininya menurun yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, dari sebelumnya memperoleh opini WDP menjadi opini TMP, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, serta Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga opininya menurun dari WTP menjadi opini WDP.
- 2.9 Jumlah LKKL Tahun 2010 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL 2009 disebabkan adanya penambahan pemeriksaan bagian anggaran yang diperiksa baik KL, non KL maupun Bendahara Umum Negara. Penambahan LKKL yang diperiksa yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan SAR Nasional, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sedangkan penambahan pemeriksaan bagian anggaran non KL disebabkan belanja anggaran subsidi dan belanja lainnya (BA 999.06) pada Tahun 2010 dipecah menjadi belanja anggaran subsidi (BA 999.07) dan belanja lainnya (BA 999.08). BPK juga memeriksa LK BUN Tahun 2010 yang sebelumnya belum diberikan opini secara utuh, melainkan parsial pada BA tertentu.
- 2.10 Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa opini LKKL Tahun 2010, secara persentase menunjukkan adanya kenaikan proporsi opini WTP dan WDP serta penurunan opini TMP dibandingkan opini tahun-tahun sebelumnya.
- 2.11 Kenaikan proporsi opini WTP dan WDP, serta penurunan TMP menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah KL yang menyajikan laporan keuangannya



secara wajar semakin meningkat. Peningkatan tersebut meliputi semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan tersebut dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan. Kondisi ini juga menggambarkan usaha KL menuju arah perbaikan dalam menyusun laporan keuangannya.

### **Sistem Pengendalian Intern**

- 2.12 Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 2.13 Pengendalian intern pada pemerintah pusat termasuk KL dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 2.14 SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2.15 Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 2.16 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.
- 2.17 Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya yang terkait dengan SPI adalah efektivitas SPI.
- 2.18 Untuk itu, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI KL dapat diuraikan sebagai berikut.

### **Hasil Evaluasi SPI**

- 2.19 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya pengendalian intern telah memadai. Adapun LKKL

yang memperoleh opini TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

- 2.20 Sebagian besar KL atau 98% memperoleh opini WTP dan WDP. Terdapat peningkatan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya perbaikan tindakan dan kegiatan baik pimpinan maupun seluruh pegawai KL untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Adapun LKKL yang opininya menurun dari WDP menjadi TMP atau WTP menjadi WDP, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus-kasus SPI.
- 2.21 Kelemahan lingkungan pengendalian tercermin dari lemahnya penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, komitmen terhadap kompetensi, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia (SDM), serta perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari lemahnya pengendalian fisik atas aset, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, serta pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- 2.22 Secara umum unsur pemantauan pada 52 KL yang mendapat opini WTP telah memadai, yaitu telah dilakukannya upaya pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah, namun masih terdapat rekomendasi BPK yang tindak lanjutnya belum selesai.
- 2.23 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
  - kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
  - kelemahan struktur pengendalian intern.
- 2.24 Hasil evaluasi SPI atas 83 LKKL menunjukkan terdapat 519 kasus kelemahan SPI, yang terdiri dari 226 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 134 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 159 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada Lampiran 2, rincian temuan berdasarkan KL disajikan dalam Lampiran 4.
- 2.25 Sebanyak 226 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 113 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
  - sebanyak 63 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;

- sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
- sebanyak 40 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
- sebanyak 7 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain, yaitu hasil kajian dan penelitian belum seluruhnya dinilai.

2.26 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Perhubungan, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, hasil inventarisasi penilaian aset Ditjen Perkeretaapian belum dapat dijadikan dasar untuk melakukan koreksi penyesuaian aset tetap sehingga aset tetap senilai Rp8,35 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kementerian Kesehatan, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, pendapatan jasa pelayanan badan layanan umum (BLU) RSCM tidak didukung dengan pencatatan yang memadai sehingga penyajian realisasi pendapatan jasa pelayanan senilai Rp613,47 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kementerian Kehutanan, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, piutang provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tidak didukung dengan dokumen yang memadai senilai Rp247,35 miliar sehingga penyajian nilai piutang tersebut dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kementerian Kesehatan, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, piutang senilai Rp138,47 miliar tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai sehingga saldo piutang yang dilaporkan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, inventarisasi, dan penilaian aset belum optimal sehingga aset tetap senilai Rp93,88 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

2.27 Sebanyak 134 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 63 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 22 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;

- sebanyak 10 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 6 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
- sebanyak 23 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 8 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain, yaitu aset yang dikuasai pihak lain tidak bisa diketahui kondisi fisiknya dan peminjaman aset tidak dilengkapi dengan berita acara peminjaman.

2.28 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, perencanaan kegiatan tidak memadai, pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan senilai Rp3,76 triliun.
- Di Kementerian Pekerjaan Umum, perencanaan kegiatan tidak memadai, alokasi belanja lain-lain BA 999.08 senilai Rp335,78 miliar digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan definisi dan peruntukannya.
- Di Kementerian Kesehatan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, penerimaan dana hibah senilai Rp98,17 miliar belum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN.
- Di Kementerian Pendidikan Nasional, perencanaan kegiatan tidak memadai, terdapat tunjangan profesi dan tagihan beasiswa Tahun 2010 kurang dibayar senilai Rp79,83 miliar sehingga membebani anggaran untuk tunjangan profesi Tahun 2011 dan mempengaruhi proses belajar mengajar penerima beasiswa.
- Di Kementerian Pertanian, mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan. Penerimaan hibah tidak melalui mekanisme DIPA APBN 2010 minimal senilai Rp20,80 miliar, EUR1.32 juta, USD64.09 juta, AUD4.87 juta, CNY12.27 juta, dan JPY1.03 miliar. Sebagian besar hibah berupa kas diterima langsung oleh masing-masing satker yang ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran satker dan tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2010.

- 2.29 Sebanyak 159 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 107 kasus karena entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
  - sebanyak 43 kasus karena SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
  - sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
  - sebanyak 6 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
  - sebanyak 2 kasus karena tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

2.30 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kesehatan, entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, belum ada aturan yang jelas batas akhir pembayaran gaji dokter/bidan PTT yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia sehingga terjadi keterlambatan penyaluran dana kekurangan gaji dan insentif Tahun 2010 senilai Rp396,83 miliar.
- Di Kementerian Kesehatan, entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, monitoring penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkungan Ditjen Binkesmas belum maksimal sehingga laporan pertanggungjawaban dana tersebut belum diterima senilai Rp141,91 miliar.
- Di Kementerian Pertanian, entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, pengendalian atas pengelolaan jasa alih teknologi hasil penelitian di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian belum memadai sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut terhambat dan lisensi yang telah diberikan kepada mitra kerjasama serta pendapatan royalti dari kerjasama alih teknologi berpotensi disalahgunakan.
- Di Kementerian Pendidikan Nasional, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, penggunaan rekening yang tidak memiliki izin Kementerian Keuangan sebanyak 43 rekening dengan saldo per 31 Desember 2010 senilai Rp26,43 miliar.

### **Penyebab**

- 2.31 Kasus-kasus kelemahan SPI di KL pada umumnya terjadi karena pencatatan tidak/belum atau tidak akurat, SDM tidak memadai, perencanaan yang tidak memadai, KL tidak menaati ketentuan dan prosedur, penetapan kebijakan

yang tidak tepat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, belum ditetapkannya prosedur kegiatan, belum adanya koordinasi dengan pihak terkait, serta lemahnya pengawasan maupun pengendalian.

### Rekomendasi

- 2.32 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pembinaan terhadap SDM di KL serta dengan pihak terkait, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

### Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 2.33 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 83 LKKL Tahun 2010 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 731 kasus senilai Rp 1,50 triliun, dengan rincian senilai Rp1,40 triliun dan USD11.72 juta (ekuivalen Rp100,75 miliar) sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 3 dan rincian temuan berdasarkan KL disajikan dalam Lampiran 4.

**Tabel 2.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKKL Tahun 2010**

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1.	Kerugian Negara	235	294.196,65
2.	Potensi Kerugian Negara <sup>*)</sup>	39	530.720,05
3.	Kekurangan Penerimaan	118	420.818,59
4.	Administrasi	269	-
5.	Ketidakhematan/Pemborosan	25	11.318,48
6.	Ketidakefektifan	45	249.726,18
	<b>Jumlah</b>	<b>731</b>	<b>1.506.779,98</b>

\*) pada kelompok potensi kerugian negara terdapat valas senilai USD11.72 juta (ekuivalen kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2011 senilai Rp8.597,00)

- 2.34 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

## Kerugian Negara

- 2.35 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
- 2.36 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*). Kasus kerugian negara juga meliputi penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian negara.
- 2.37 Hasil pemeriksaan atas 83 LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 235 kasus senilai Rp294,19 miliar, yang terdiri atas
- sebanyak 31 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp70,22 miliar;
  - sebanyak 4 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp56,58 miliar;
  - sebanyak 41 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp13,41 miliar;
  - sebanyak 57 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp17,69 miliar;
  - sebanyak 10 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp32,93 miliar;
  - sebanyak 5 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp2,71 miliar;
  - sebanyak 40 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp63,85 miliar;
  - sebanyak 12 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp4,57 miliar;
  - sebanyak 27 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp24,59 miliar; dan
  - sebanyak 8 kasus lain-lain senilai Rp7,58 miliar di antaranya adalah proses tuntutan ganti rugi (TGR).
- 2.38 Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan Nasional, pengadaan barang/jasa pada tiga satker tidak selesai dilaksanakan senilai Rp55,91 miliar di antaranya

Program Pembelajaran Perakitan Alat Praktik Otomotif Paket 3 oleh PT AIK senilai Rp33,63 miliar.

- Di Kepolisian RI, terdapat duplikasi pendanaan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit*). Duplikasi tersebut adalah penggunaan dana APBN dan non APBN sebagai talangan untuk operasional pasukan *Formed Police Unit* yang di-reimburs oleh UNAMID yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp22,48 miliar.
- Di Kementerian Kesehatan, terdapat pemahalan harga dalam pengadaan alat bantu belajar mengajar pendidikan dokter dan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan TA 2010 antara PT BRG dengan vendor yang mengakibatkan kerugian negara minimal senilai Rp28,55 miliar.
- Di Kementerian Dalam Negeri, belanja barang dan perjalanan dinas tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp18,52 miliar.
- Di Kementerian Kesehatan, belanja perjalanan dinas senilai Rp13,09 miliar merugikan keuangan negara dengan rincian berupa pemahalan harga tiket pesawat senilai Rp653,25 juta dan sebanyak 5.149 tiket pesawat senilai Rp12,43 miliar tidak sesuai dengan data manifes penerbangan.
- Di Kementerian Kehutanan, terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri pada enam satker yang menggunakan penerbangan komersial senilai Rp7,95 miliar.

2.39 Dari total kasus kerugian negara senilai Rp294,19 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp24,76 miliar, di antaranya Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp4,59 miliar, Kementerian ESDM senilai Rp3,34 miliar, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp2,11 miliar.

### **Penyebab**

2.40 Kasus-kasus kerugian negara di KL pada umumnya terjadi karena ketidakmampuan rekanan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugasnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta kuasa pemegang anggaran satker tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

2.41 Atas kasus-kasus kerugian negara, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan KL memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkannya dengan menyetor sejumlah uang ke kas negara atau mengembalikan/menyerahkan barang ke negara melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.



## Potensi Kerugian Negara

- 2.42 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 2.43 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara yaitu adanya rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya. Selain itu kasus potensi kerugian juga dikarenakan adanya pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian negara.
- 2.44 Hasil pemeriksaan atas 83 LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 39 kasus senilai Rp530,72 miliar, dengan rincian senilai Rp429,96 miliar dan USD11.72 juta (ekuivalen Rp100,75 miliar), yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp1,68 juta;
  - sebanyak 17 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp316,54 miliar;
  - sebanyak 7 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp96,28 miliar;
  - sebanyak 1 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai USD11.72 juta;
  - sebanyak 2 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara senilai Rp2,98 miliar;
  - sebanyak 6 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp12,15 miliar; dan
  - sebanyak 5 kasus lain-lain senilai Rp1,99 miliar di antaranya pembayaran sudah dilakukan untuk pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, jaminan pelaksanaan belum dapat dicairkan, dan perjalanan dinas dalam proses klarifikasi bukti pertanggungjawaban.
- 2.45 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan Nasional, pemanfaatan aset tanah seluas 198.843 m<sup>2</sup> senilai Rp137,07 miliar serta gedung dan bangunan seluas 3.807 m<sup>2</sup> senilai Rp2,93 miliar milik Universitas Negeri Malang oleh

sekolah negeri berpotensi terjadi sengketa, sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

- Di Kementerian Kesehatan, aset tanah pada satker-satker Poltekkes Maluku, RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang dan RSUP Persahabatan minimal senilai Rp111,69 miliar digunakan untuk kepentingan pihak ketiga/pribadi.
- Di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), investasi dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menyalurkan dana bergulir sejak Tahun 2006 sampai 2010 yang berpotensi tidak tertagih/*non performing loan* (NPL) senilai Rp6,07 miliar atau 12,28% dari total dana *outstanding* KLH senilai Rp49,44 miliar.
- Di Kementerian ESDM, selama Tahun 2009 dan 2010 terdapat tujuh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dari 42 KKKS bentuk PSC (*product sharing contract*) dan 16 KKKS *Coal Bed Methan* yang telah melakukan tanda tangan kontrak, masih belum menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai minimal USD11.72 juta (ekuivalen Rp100,75 miliar).

### Penyebab

- 2.46 Kasus-kasus potensi kerugian negara di KL pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan pengamanan atas pengelolaan aset negara, kurang menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan kepala satker lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### Rekomendasi

- 2.47 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan instansi memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan pengamanan aset, mengupayakan penagihan jaminan pelaksanaan kepada tujuh KKKS untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

### Kekurangan Penerimaan

- 2.48 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 2.49 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan yaitu adanya penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, penerimaan diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

- 2.50 Hasil pemeriksaan atas 83 LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 118 kasus senilai Rp420,81 miliar, terdiri atas
- sebanyak 95 kasus penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp143,91 miliar;
  - sebanyak 17 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp257,81 miliar;
  - sebanyak 3 kasus penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp16,63 miliar;
  - sebanyak 2 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp61,31 juta; dan
  - sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi pemerintah senilai Rp2,40 miliar
- 2.51 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pertahanan, terdapat sejumlah paket pekerjaan yang penyerahannya terlambat tidak sesuai dengan jatuh tempo kontrak dan tidak dapat terselesaikan sampai dengan akhir TA 2010 namun tetap dilakukan pembayaran dan tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan senilai Rp11,33 miliar, yaitu denda keterlambatan pada 1) Ditpalad minimal senilai Rp4,60 miliar; dan 2) Puspenerbad minimal senilai Rp6,72 miliar, belum dipungut dan disetorkan ke kas negara.
  - Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) masih memiliki tunggakan nilai tambah dan denda per 31 Desember 2010 yang terutang kepada Badan Layanan Umum – Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) senilai Rp21,28 miliar.
  - Di Kementerian Kehutanan, penerimaan hasil pengelolaan gedung Manggala Wanabakti senilai Rp48,70 miliar digunakan untuk biaya operasional senilai Rp45,84 miliar. Temuan ini merupakan temuan berulang penggunaan langsung penerimaan negara sejak pemeriksaan LK Tahun 2005.
  - Di Kepolisian RI, PNBP minimal senilai Rp38,75 miliar tidak disetorkan ke kas negara, tidak dilaporkan dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN. PNBP tersebut berupa pendapatan sewa (pemanfaatan aset oleh pihak ketiga), pendapatan pengamanan objek vital, pendapatan pelatihan dasar satpam, pendapatan kartu tanda anggota satpam, pendapatan *sharing traffic short message service*, dan pendapatan pelayanan rumah sakit.

- Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PNBP yang bersumber dari Izin Kerja Perpanjangan Sementara dan Mendesak bagi TKWNAP Tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur disetorkan ke kas daerah senilai Rp14,68 miliar.
- Di Badan SAR Nasional, pendapatan jasa sewa atas ruangan yang telah digunakan oleh penyewa pada Tahun 2010 minimal senilai Rp8,94 miliar tidak dilakukan penagihan sampai dengan akhir Tahun 2010.

2.52 Dari sejumlah kasus kekurangan penerimaan senilai Rp420,81 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp10,75 miliar, antara lain Kepolisian RI senilai Rp4,20 miliar, Badan SAR Nasional senilai Rp1,63 miliar, dan Kementerian Pertanian senilai Rp1,57 miliar.

### **Penyebab**

2.53 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena tidak dipatuhinya ketentuan berkaitan dengan PNBP, adanya peraturan daerah yang mengklaim PNBP tersebut sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung.

### **Rekomendasi**

2.54 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan negara, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan KL agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara.

### **Administrasi**

2.55 Temuan kelemahan atas penyimpangan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

2.56 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara.

2.57 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/

penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, serta penyimpangan administrasi lainnya.

2.58 Hasil pemeriksaan atas 83 LKKL menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 269 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 52 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 33 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- sebanyak 6 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
- sebanyak 87 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
- sebanyak 14 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- sebanyak 26 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 12 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 8 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara;
- sebanyak 25 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 4 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain di antaranya proses penjualan barang rampasan berlarut-larut.

2.59 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di Kementerian Pendidikan Nasional, penggunaan dana bantuan sosial pada beberapa satker pusat maupun daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan yang berada di lingkungan Kemendiknas menunjukkan sebanyak 45.219 lembaga/

sekolah/perorangan penerima bantuan senilai Rp1,42 triliun belum menyampaikan laporan penggunaan dana.

- Di Kementerian Pertahanan, terdapat kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaan/prestasinya belum selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun/per 31 Desember 2010. Namun demikian anggaran yang tersedia dicairkan dengan menggunakan pertanggungjawaban keuangan (wabku) antara lain dengan menggunakan berita acara penyerahan/komisi barang formalitas dengan tingkat penyelesaian pekerjaan pengadaan seolah-olah selesai 100%, untuk dapat mencairkan dana. Kemudian dana hasil pencairan tersebut dikelola secara *off-budgeter* pada rekening yang dibuka tanpa izin Menteri Keuangan. Rekening tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga sesuai realisasi fisik pekerjaan sebenarnya dan/atau arahan pimpinan sesuai kesepakatan senilai Rp870,86 miliar.
- Di Kementerian Sosial, penyaluran dana bantuan sosial senilai Rp209,83 miliar untuk program subsidi panti, bantuan operasional RPSA, bantuan penumbuhan taman penitipan anak, kelompok bermain dan taman balita sejahtera, bantuan telepon sahabat anak, bantuan program jaminan sosial lanjut usia, serta dana monitoring dan evaluasi senilai Rp825,53 juta belum dipertanggungjawabkan secara memadai.
- Di Kementerian Perhubungan, aset tetap pada satker-satker di Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp174,06 miliar dan persediaan senilai Rp11,86 miliar di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara seluruhnya telah dimanfaatkan oleh pemda setempat namun belum dilakukan serah terima operasional dari pihak Ditjen Perhubungan Darat kepada pemda setempat.
- Di Kementerian Agama, terdapat aset yang digunakan oleh satker di lingkungan Kementerian Agama belum didukung bukti kepemilikan, yaitu: 1) tanah wakaf seluas 65.183 m<sup>2</sup> senilai Rp9,80 miliar belum didukung dokumen Akte Ikrar Wakaf; 2) kepemilikan tanah atas nama Kementerian Agama seluas 1.212.465 m<sup>2</sup> senilai Rp156,15 miliar belum didukung bukti kepemilikan; dan 3) kepemilikan 291 unit kendaraan bermotor senilai Rp4,99 miliar belum didukung bukti kepemilikan.
- Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan yaitu : 1) beberapa pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50,00 juta tidak diikat dengan kontrak, melainkan hanya dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian kerjasama; 2) kontrak pengadaan barang/jasa masih memuat klausul tentang pembatasan sanksi denda keterlambatan sebesar lima persen dari nilai kontrak; dan 3) kontrak pengadaan barang dan jasa yang tidak menggunakan harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai acuan panitia pengadaan barang dan jasa dalam menentukan pemenang lelang terhadap rekanan penyedia barang/jasa.

### Penyebab

- 2.60 Kasus-kasus administrasi di KL pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung jawabnya, kurang mematuhi ketentuan yang berlaku, dan kuasa pengguna anggaran tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan serta pengendalian.

### Rekomendasi

- 2.61 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk mempertanggungjawabkan secara administratif, mengelola dan menatausahakan aset sesuai ketentuan, serta memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang bertanggung jawab.

### Ketidakhematan

- 2.62 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 2.63 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 2.64 Hasil pemeriksaan atas 83 LKKL menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat ketidakhematan sebanyak 25 kasus senilai Rp11,31 miliar, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp2,87 miliar; dan
  - sebanyak 23 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp8,44 miliar.
- 2.65 Kasus ketidakhematan di antaranya adalah sebagai berikut.
- Di Kementerian Dalam Negeri, pengadaan blangko surat pemberitahuan nomor induk kependudukan (SPNIK) penduduk per keluarga pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) melebihi kebutuhan senilai Rp2,84 miliar.
  - Di BPOM, addendum kontrak pekerjaan rehabilitasi dan perluasan gedung pelayanan publik BBPOM Bandung menambah biaya pelaksanaan pekerjaan senilai Rp810,37 juta dan addendum kontrak pekerjaan peningkatan dan perluasan laboratorium BBPOM Manado menambah biaya pelaksanaan pekerjaan senilai Rp428,92 juta.
  - Di Kementerian Sosial, realisasi pembayaran biaya permakanan kepada Satuan Tugas Kota Tanjung Pinang lebih besar senilai Rp637,78 juta dari plafon yang ditetapkan dalam RKA/KL.

### Penyebab

- 2.66 Kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

### Rekomendasi

- 2.67 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan instansi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan.

### Ketidakefektifan

- 2.68 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 2.69 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

- 2.70 Hasil pemeriksaan atas 83 LKKL menunjukkan adanya kasus ketidakefektifan sebanyak 45 kasus senilai Rp249,72 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 10 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp16,57 miliar;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp7,34 miliar;
- sebanyak 26 kasus barang yang dibeli belum/tidak dimanfaatkan senilai Rp127,62 miliar;
- sebanyak 6 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai 98,18 miliar; dan
- sebanyak 2 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

- 2.71 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di Kementerian Pendidikan Nasional, barang milik negara (BMN) hasil pengadaan Tahun 2010 senilai Rp18,14 miliar belum dimanfaatkan.



- Di Kementerian Kesehatan, pengadaan aset Tahun 2010 di antaranya *CT Scan Multislice* senilai Rp65,90 miliar belum dimanfaatkan.
- Di Kementerian Dalam Negeri, aset hasil pengadaan TA 2010 senilai Rp3,99 miliar belum dapat dimanfaatkan yaitu: 1) pengadaan 25 unit mesin *fingerprint* pada Setjen senilai Rp158,51 juta; 2) rehabilitasi jaringan irigasi bendungan dan saluran irigasi hasil tugas pembantuan prakarsa pembaharuan tata pemerintahan daerah (P2TPD)/*initiative local government reform* (ILGR) pada Ditjen Otda senilai Rp3,17 miliar; 3) pengadaan pencetakan buku pada Ditjen KD senilai Rp38,05 juta; 4) pekerjaan pengadaan trafo 630 KVA pada Balai Diklat Semplak Bogor senilai Rp538,49 juta; dan 5) pekerjaan panel SDP-4 pada pengadaan *power plant genset* Balai Diklat Semplak Bogor senilai Rp84,95 juta.
- Di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, hasil kegiatan pengadaan senilai Rp2,14 miliar yaitu peralatan hotel praktik senilai Rp168,46 juta dan peralatan *spa* senilai Rp1,97 miliar belum dimanfaatkan.

### Penyebab

- 2.72 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena kekurangan cermatan bagian perencanaan, kurangnya koordinasi, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

### Rekomendasi

- 2.73 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar membuat perencanaan yang memadai, memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan pengawasan, dan segera memanfaatkan hasil pengadaan.
- 2.74 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 3

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2011 BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2010 pada 358 dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 3.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 3.3 Cakupan pemeriksaan atas 358 LKPD tersebut meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.281,03 triliun, kewajiban senilai Rp8,26 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.272,75 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp345,22 triliun, belanja (termasuk transfer) senilai Rp338,25 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp35,71 triliun.
- 3.4 Selain itu, pada Semester I 2011 BPK juga telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas lima LKPD Tahun 2009, yaitu tiga LKPD di wilayah Provinsi Maluku yang meliputi LKPD Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, LKPD Kabupaten Mamberamo Raya (Provinsi Papua), serta LKPD Kabupaten Teluk Wondama (Provinsi Papua Barat). LHP tersebut baru dapat diselesaikan pada Semester I 2011 karena LKPD tiga kabupaten di Provinsi Maluku dan LKPD Kabupaten Mamberamo Raya baru diterima BPK pada Semester II 2010, sedangkan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Teluk Wondama diselesaikan setelah ditunda dengan alasan *force majeure* (banjir Wasior).

#### Hasil Pemeriksaan

- 3.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

## Opini

- 3.7 Terhadap 358 LKPD Tahun 2010, BPK memberikan opini **wajar tanpa pengecualian** (WTP) atas 32 entitas, opini **wajar dengan pengecualian** (WDP) atas 271 entitas, opini **tidak wajar** (TW) atas 12 entitas, dan opini **tidak memberikan pendapat** (TMP) atas 43 entitas. Sedangkan terhadap lima LKPD Tahun 2009 BPK memberikan opini **tidak memberikan pendapat** (TMP).
- 3.8 Perkembangan opini LKPD Tahun 2005 s.d. 2010 dapat dilihat dalam Tabel 3.1. berikut ini. Rincian opini tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2005-2010

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2005	18	5%	307	85%	13	3%	24	7%	362
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111*)	22%	504
2010	32	9%	271	76%	12	3%	43	12%	358**)

\*) Termasuk LKPD Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Mamberamo Raya, dan Kab. Teluk Wondama yang baru diperiksa Tahun 2011

\*\*\*) Jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2011

- 3.9 Dari Tabel 3.1. di atas opini LKPD Tahun 2005 telah diberikan kepada 362 LKPD, Tahun 2006 kepada 463 LKPD, Tahun 2007 kepada 469 LKPD, Tahun 2008 kepada 485 LKPD, dan Tahun 2009 kepada 504 LKPD. Adapun Tahun 2010 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD-nya. Dalam Semester I Tahun 2011, opini baru diberikan kepada 358 LKPD Tahun 2010.
- 3.10 Dari Tabel 3.1. diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2010 yang dalam persentase, menunjukkan **kenaikan** proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan dibandingkan opini LKPD tahun-tahun sebelumnya, kecuali untuk LKPD Tahun 2005.
- 3.11 Kenaikan proporsi opini WTP dan WDP yang diikuti penurunan opini TW dan TMP menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.
- 3.12 Dilihat dari tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, opini LKPD Tahun 2005 s.d. 2010 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Opini LKPD Tahun 2005-2010 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP
2005	2	28	1	1	32	14	213	10	20	257	2	66	2	3	73
	6%	88%	3%	3%	100%	5%	83%	4%	8%	100%	3%	90%	3%	4%	100%
2006	0	25	4	4	33	2	236	21	85	344	1	66	3	16	86
	0%	76%	12%	12%	100%	1%	68%	6%	25%	100%	1%	77%	3%	19%	100%
2007	1	21	3	8	33	1	201	45	103	350	2	61	11	12	86
	3%	64%	9%	24%	100%	1%	57%	13%	29%	100%	2%	71%	13%	14%	100%
2008	0	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	20	0	2	28	15	200	10	35	260	11	51	2	6	70
	22%	71%	0%	7%	100%	6%	77%	4%	13%	100%	16%	73%	3%	8%	100%
Rata-rata untuk 2005-2010 (N*/6)	2	24	2	4	32	8	221	25	72	326	5	63	5	10	83
	6%	75%	6%	13%	100%	2%	68%	8%	22%	100%	6%	76%	6%	12%	100%

N\* : Jumlah Opini

- 3.13 Dari Tabel 3.2. di atas terlihat bahwa rata-rata opini LKPD Tahun 2005 s.d. 2010 pada pemerintahan tingkat provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan tingkat kabupaten. Pemerintah provinsi dan kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 81% dan 82% dari keseluruhan entitas provinsi dan kota, dibandingkan pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP hanya sekitar 70%.

### Sistem Pengendalian Intern

- 3.14 Pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 3.15 Pengendalian intern pada pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 3.16 SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3.17 Standar pemeriksaan keuangan negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 3.18 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemerintah daerah.

- 3.19 Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya yang terkait dengan SPI adalah efektivitas SPI.
- 3.20 Untuk itu, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

### **Hasil Evaluasi SPI**

- 3.21 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian intern pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP pada umumnya telah memadai sedangkan yang opininya WDP cukup memadai. Adapun pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 3.22 Masih banyaknya opini TMP dan TW (15%) yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian.
- 3.23 Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. Namun, hal tersebut masih sulit untuk tercapai karena terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terutama karena kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan SDM serta kurangnya komitmen terhadap kompetensi.
- 3.24 Kelemahan lingkungan pengendalian terlihat pula dari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang kurang tepat, kurangnya penegakan integritas dan nilai etika, peran aparat pengawasan intern yang kurang efektif, serta kepemimpinan yang kurang kondusif.
- 3.25 Penilaian risiko dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mendukung hal tersebut, pimpinan instansi pemerintah daerah harus menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Hal tersebut masih sulit untuk terwujud karena pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan kegiatan penilaian risiko yang terdiri atas kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko.
- 3.26 Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang akurat dan tepat waktu, pendokumentasian yang baik atas SPI, transaksi, dan kejadian

penting, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, serta penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.

- 3.27 Unsur informasi dan komunikasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah terutama perlunya upaya pengembangan dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus.
- 3.28 Unsur pengawasan pada pemerintah daerah belum optimal. Hal tersebut terlihat dari upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan yang belum memadai sehingga masih ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat ditindaklanjuti.
- 3.29 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
  - kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
  - kelemahan struktur pengendalian intern.
- 3.30 Hasil evaluasi atas 358 LKPD terdapat 3.397 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 1.401 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 1.368 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 628 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan disajikan pada Lampiran 6, rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.31 Sebanyak 1.401 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 784 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
  - sebanyak 371 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
  - sebanyak 24 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
  - sebanyak 204 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
  - sebanyak 17 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai; dan
  - sebanyak 1 kasus lain-lain, yaitu belum digunakannya aplikasi simda/simbada.

3.32 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, aset hasil revaluasi senilai Rp12,72 triliun belum dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim sensus sehingga aset tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, pencatatan aset tetap tanah senilai Rp104,23 miliar tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai sehingga penyajian aset tersebut dalam Neraca Tahun 2010 tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyajian aset tetap belum berdasarkan hasil inventarisasi dan rekonsiliasi sehingga aset tetap senilai Rp1,03 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, nilai aset tetap pada neraca awal belum ditentukan dan nilai aset tetap merupakan nilai akumulasi aset tetap yang diperoleh dari realisasi belanja modal, sehingga nilai aset tetap senilai Rp1,17 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pengendalian intern atas pengelolaan aset masih lemah, yaitu buku aset daerah belum menyajikan informasi yang cukup sebagai dasar penyajian aset tetap dalam neraca, saldo aset tetap belum termasuk aset yang bersumber dari APBN dan belum dibuatkan berita acara serah terima dengan masing-masing instansi vertikal, belum menetapkan batas nilai yang dikapitalisasi, belum melakukan perhitungan penyusutan atas aset tetap, sehingga saldo aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2010 senilai Rp2,21 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.

3.33 Sebanyak 1.368 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 499 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 170 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 375 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 63 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
- sebanyak 173 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;



- sebanyak 70 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 18 kasus lain-lain, di antaranya kasus kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme swakelola tidak tertib.

3.34 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, penganggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tidak tepat senilai Rp32,51 miliar.
- Di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah belum memenuhi kewajiban untuk membayar subsidi dan iuran asuransi kesehatan sejak TA 2004 sampai dengan 2010 kepada PT Askes sehingga akan membebani APBD TA selanjutnya senilai Rp29,08 miliar.
- Di Provinsi Bali, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana bantuan sosial pasca bencana tidak sepenuhnya melalui mekanisme APBD yaitu belanja tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD TA 2010 ditetapkan senilai Rp10,39 miliar.
- Di Provinsi Sulawesi Selatan, manajemen kas bendahara umum daerah (BUD) Kabupaten Sidrap belum tertib sehingga penerimaan kas yang telah ditentukan penggunaannya digunakan untuk kepentingan lain pada TA 2010 dan akan membebani APBD TA berikutnya senilai Rp22,99 miliar.
- Di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, penetapan tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tidak sesuai peraturan daerah sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan daerah senilai Rp7,89 miliar.

3.35 Sebanyak 628 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 265 kasus karena entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 326 kasus karena SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 3 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 17 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 17 kasus karena tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.36 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Riau, investasi jangka panjang program pemberdayaan desa-dana usaha desa tidak diatur dengan mekanisme yang memadai sehingga berpotensi tidak tertagih senilai Rp73,64 miliar.
- Di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah belum memiliki SOP yang memadai untuk pengelolaan penerimaan sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses penerimaan kas pada bendahara penerimaan.

### **Penyebab**

3.37 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

3.38 Selain itu, para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas.

3.39 Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

### **Rekomendasi**

3.40 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- pejabat yang berwenang segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- kepala daerah meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait;
- pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

### **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan**

3.41 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 358 LKPD Tahun 2010 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.551 kasus senilai Rp5,28 triliun sebagaimana disajikan

dalam Tabel 3.3. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada Lampiran 7 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 8.

**Tabel 3.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKPD Tahun 2010**

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<b><i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i></b>			
1	Kerugian Daerah	1.197	376.965,01
2	Potensi Kerugian Daerah	313	3.283.343,78
3	Kekurangan Penerimaan	857	478.101,00
4	Administrasi	1.774	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	144	73.215,37
6	Ketidakefisienan	2	1.370,03
7	Ketidakefektifan	264	1.068.576,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.551</b>	<b>5.281.571,22</b>

- 3.42 Berdasarkan Tabel 3.3. di atas, temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

### **Kerugian Daerah**

- 3.43 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3.44 Kasus-kasus kerugian daerah meliputi permasalahan belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan.
- 3.45 Selain itu, kasus kerugian daerah juga meliputi permasalahan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan, dan lain-lain kasus kerugian daerah.
- 3.46 Kasus kerugian daerah lain yang sering terjadi yaitu kekurangan volume pekerjaan dan atau barang serta belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

3.47 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2010 menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1.197 kasus senilai Rp376,96 miliar terdiri atas

- sebanyak 100 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp31,73 miliar;
- sebanyak 30 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp3,69 miliar;
- sebanyak 340 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp74,99 miliar;
- sebanyak 147 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp30,97 miliar;
- sebanyak 47 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp7,76 miliar;
- sebanyak 94 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp65,83 miliar;
- sebanyak 131 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp21,90 miliar;
- sebanyak 37 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp8,19 miliar;
- sebanyak 217 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp68,90 miliar;
- sebanyak 10 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp25,43 miliar;
- sebanyak 2 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp52,50 juta;
- sebanyak 4 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp990,61 juta;
- sebanyak 1 kasus pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan senilai Rp16,06 juta; dan
- sebanyak 37 kasus lain-lain senilai Rp36,44 miliar di antaranya adanya tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan.

3.48 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pemberian panjar kas belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2010. Panjar kas tersebut di antaranya diberikan kepada pihak ketiga tanpa

mekanisme surat perintah pencairan dana (SP2D), digunakan untuk penyelesaian kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK, serta digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD TA 2010 sehingga merugikan keuangan daerah seluruhnya senilai Rp11,87 miliar.

- Di Provinsi Kalimantan Timur, pencairan insentif pemungutan pajak daerah TA 2010 didasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan bukan menggunakan rencana penerimaan pajak daerah sehingga merugikan daerah senilai Rp10,88 miliar.
- Di Provinsi Riau, terdapat ketekoran kas senilai Rp7,40 miliar pada Sekretariat DPRD yang merupakan akumulasi Tahun 2008–2010. Ketekoran yang terjadi pada Tahun 2010 disebabkan kas pada bendahara pengeluaran di antaranya digunakan untuk membayar pengembalian kepada pihak ketiga senilai Rp2,35 miliar, pinjaman pribadi Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Riau senilai Rp437,04 juta, dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Tahun 2010 kepada Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Riau yang tidak dianggarkan senilai Rp1,45 miliar.
- Di Provinsi Sulawesi Barat, perjalanan dinas luar daerah dengan moda transportasi angkutan darat dipertanggungjawabkan dengan moda transportasi pesawat udara senilai Rp237,65 juta dan berindikasi fiktif senilai Rp4,80 miliar.
- Di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan menyalahgunakan uang kas berupa pungutan pajak Tahun 2008 senilai Rp2,05 miliar yang tidak disetorkan ke kas negara dan dana tunjangan profesi guru Dinas Pendidikan TA 2010 senilai Rp2,90 miliar.

3.49 Dari 1.197 kasus kerugian daerah senilai Rp376,96 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp50,64 miliar, di antaranya penyetoran dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5,71 miliar dan Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp5,56 miliar seperti disajikan dalam Lampiran 8.

#### **Penyebab**

- 3.50 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3.51 Selain itu, kerugian daerah tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### Rekomendasi

- 3.52 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 3.53 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

### Potensi Kerugian Daerah

- 3.54 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.55 Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah meliputi permasalahan adanya aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 3.56 Selain itu, kasus potensi kerugian daerah juga meliputi permasalahan kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pembelian aset yang berstatus sengketa, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah.
- 3.57 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 313 kasus senilai Rp3,28 triliun yang terdiri atas
- sebanyak 29 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp20,01 miliar;
  - sebanyak 13 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp26,18 miliar;
  - sebanyak 63 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp1,03 triliun;
  - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp93,78 miliar;
  - sebanyak 57 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1,62 triliun;

- sebanyak 9 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp100,96 miliar;
- sebanyak 3 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp1,65 miliar;
- sebanyak 110 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp330,68 miliar; dan
- sebanyak 28 kasus lain-lain senilai Rp46,31 miliar di antaranya pertanggungjawaban belum lengkap dan sah dan entitas disarankan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah.

3.58 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Sulawesi Selatan, status kepemilikan 12 bidang tanah milik pemerintah provinsi senilai Rp93,78 miliar sampai dengan Tahun 2010 masih menjalani proses hukum sehingga menimbulkan potensi kehilangan aset.
- Di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 107 persil tanah seluas 583.960 m<sup>2</sup> senilai Rp50,02 miliar sampai dengan TA 2010 bersertifikat atas nama pihak lain sehingga tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan melemahkan posisi Pemerintah Kabupaten Agam apabila terjadi gugatan atas kepemilikan tanah tersebut.
- Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL) perusahaan tambang senilai Rp36,18 miliar belum memenuhi persyaratan sebagai jaminan untuk reklamasi dan penutupan tambang karena bentuk jaminan berupa rekening bank nama perusahaan dan bukan deposito atas nama bupati qq perusahaan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi perusahaan tambang untuk mencairkan jaminan tanpa izin dari Bupati Karimun.
- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp26,59 miliar, kendaraan dinas operasional senilai Rp3,88 miliar dikuasai oleh mantan-mantan pejabat dan sembilan bidang tanah seluas 40.220 m<sup>2</sup> senilai Rp6,00 atas nama pribadi dan instansi lain sehingga berpotensi merugikan daerah seluruhnya senilai Rp30,47 miliar.
- Di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga *build operate and transfer* (BOT) senilai Rp23,03 miliar berbeda dengan nilai yang tertera dalam perjanjian kemitraan yang hanya mencantumkan nilai Rp5,50 miliar. Selain itu, aset BOT berupa bangunan ruko dan los pasar di atas tanah Pemerintah Kabupaten Jombang dikuasai pihak ketiga sehingga kepemilikan atas aset tersebut berisiko hilang.

- 3.59 Dari 313 kasus potensi kerugian senilai Rp3,28 triliun telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp3,26 miliar, di antaranya dari Provinsi DKI Jakarta senilai Rp2,27 miliar dan Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp750,00 juta seperti disajikan dalam Lampiran 8.

#### **Penyebab**

- 3.60 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3.61 Selain itu, potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

#### **Rekomendasi**

- 3.62 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 3.63 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mengupayakan penagihan dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

#### **Kekurangan Penerimaan**

- 3.64 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.65 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah yaitu adanya penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 3.66 Selain itu, kasus kekurangan penerimaan juga meliputi permasalahan dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan kasus lain-lain kekurangan penerimaan.
- 3.67 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak 857 kasus senilai Rp478,10 miliar terdiri atas
- sebanyak 648 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/



diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah senilai Rp188,30 miliar;

- sebanyak 179 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp260,68 miliar;
- sebanyak 4 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp4,37 miliar;
- sebanyak 8 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp5,16 miliar;
- sebanyak 15 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp11,95 miliar;
- sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp69,25 juta; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain kekurangan penerimaan senilai Rp7,55 miliar.

3.68 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, hasil eksploitasi marmer dari 19 perusahaan pemegang surat izin usaha pertambangan (SIUP) belum dikenakan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C mengakibatkan penerimaan daerah TA 2010 kurang diterima senilai Rp30,55 miliar.
- Di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, prosedur perhitungan dan penetapan pajak tidak sesuai dengan peraturan daerah mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak sampai dengan 31 Desember 2010 senilai Rp10,22 miliar, terdiri atas pajak hiburan senilai Rp9,92 miliar, pajak parkir senilai Rp74,06 juta, dan pajak restoran senilai Rp220,46 juta.
- Di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan TA 2010 yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan melalui Program Askes Sosial, Jamkesmas, dan Jamkesda pada puskesmas-puskesmas dan RSUD dr. M. Zein Painan senilai Rp10,03 miliar tidak disetorkan ke kas daerah, tetapi digunakan langsung.
- Di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bantuan dana keuangan TA 2010 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu senilai Rp4,00 miliar dan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara senilai Rp5,00 miliar belum diterima sehingga berpotensi mengganggu proses transisi pemerintah daerah otonomi baru.
- Di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Kuasa BUD belum menyetorkan PPN dan PPh TA 2010 yang berada dalam rekening penampungan pajak beserta jasa gironya, serta Bendahara Pengeluaran

SKPD belum memungut dan menyetorkan PPN dan PPh mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp4,21 miliar.

- 3.69 Dari 857 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp478,10 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp19,89 miliar di antaranya penyetoran dari Provinsi Riau senilai Rp7,00 miliar dan Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp2,93 miliar seperti disajikan dalam Lampiran 8.

### **Penyebab**

- 3.70 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3.71 Selain itu, kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

- 3.72 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab serta menetapkan surat ketetapan pajak, memungut, dan/atau menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

### **Administrasi**

- 3.73 Temuan kelemahan atau penyimpangan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.74 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.
- 3.75 Kasus lain penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun

anggaran belum disetor ke kas daerah, dan pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah.

- 3.76 Selain itu, penyimpangan yang bersifat administratif yaitu pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus administrasi.
- 3.77 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 1.774 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 526 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
  - sebanyak 16 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
  - sebanyak 69 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
  - sebanyak 8 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
  - sebanyak 4 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
  - sebanyak 317 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
  - sebanyak 156 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
  - sebanyak 1 kasus koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum;
  - sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
  - sebanyak 250 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
  - sebanyak 122 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
  - sebanyak 84 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;

- sebanyak 59 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 138 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 9 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 14 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

3.78 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Sulawesi Selatan, aset tanah yang dimiliki pemerintah provinsi sebanyak 442 persil dengan luas 5.855.277 m<sup>2</sup> senilai Rp1,18 triliun sampai dengan TA 2010 belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi disalahgunakan dan diklaim atau diserobot oleh pihak lain.
- Di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten senilai Rp961,62 miliar sampai dengan TA 2010 belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi disalahgunakan dan diklaim atau diserobot oleh pihak lain.
- Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hibah barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral TA 2010 senilai Rp149,19 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi DIY belum didukung dengan berita acara serah terima sehingga aset tersebut masih diakui sebagai milik Pemerintah Provinsi DIY.
- Di Provinsi Sumatera Barat, belanja bantuan hibah dan bantuan sosial TA 2010 terlambat dipertanggungjawabkan senilai Rp59,52 miliar, belum dipertanggungjawabkan senilai Rp1,40 miliar, dan dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan senilai Rp33,38 miliar sehingga tidak dapat dievaluasi dan diyakini apakah telah digunakan sesuai ketentuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, realisasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa berupa pencairan dana motivasi kepada masyarakat senilai Rp50,42 miliar diberikan secara langsung kepada kelompok masyarakat tanpa melalui pemerintah desa atau tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

### Penyebab

- 3.79 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3.80 Selain itu, kasus administrasi terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### Rekomendasi

- 3.81 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid dan segera melengkapi dokumen kepemilikan aset daerah.
- 3.82 BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

### Ketidakhematan

- 3.83 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.84 Pada umumnya kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga.
- 3.85 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 144 kasus senilai Rp73,21 miliar terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp182,96 juta;
  - sebanyak 7 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp2,94 miliar; dan
  - sebanyak 134 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp70,08 miliar.
- 3.86 Kasus-kasus ketidakhematan di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Lampung, realisasi belanja bantuan sosial TA 2010 melebihi ketentuan besaran maksimal sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp6,47 miliar.
  - Di Provinsi Riau, belanja barang TA 2010 senilai Rp3,05 miliar digunakan untuk tambahan biaya perjalanan dinas di luar biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan gubernur dengan besaran yang kurang mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan.
  - Di Provinsi Sulawesi Barat, analisis standar belanja penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2010 belum ditetapkan sehingga pada beberapa kegiatan terdapat belanja pendukung yang tidak wajar dan memboroskan keuangan daerah senilai Rp3,01 miliar.

- Di Provinsi Bali, harga pengadaan vaksin anti rabies (VAR) oleh Dinas Kesehatan dan RSUP Sanglah TA 2009 dan 2010 lebih mahal senilai Rp2,68 miliar jika dibandingkan dengan harga apabila Pemerintah Provinsi Bali melakukan penunjukan langsung kepada PT SC yang merupakan perusahaan pemegang izin distribusi VAR untuk *public sector* (*government*).
- Di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan *workshop* dalam rangka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2010 dilaksanakan di luar kota sehingga membutuhkan biaya tambahan senilai Rp1,25 miliar dibandingkan kebutuhan biaya jika kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam kota.

### **Penyebab**

- 3.87 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas.
- 3.88 Selain itu, kasus ketidakhematan terjadi karena pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

- 3.89 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memedomani ketentuan yang berlaku dan menghindari pemborosan.

### **Ketidakefektifan**

- 3.90 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.91 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 3.92 Kasus ketidakefektifan yang lain yaitu pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

3.93 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 264 kasus senilai Rp1,06 triliun yang terdiri atas

- sebanyak 153 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp207,67 miliar;
- sebanyak 16 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp20,84 miliar;
- sebanyak 39 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp71,79 miliar;
- sebanyak 6 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp439,64 juta;
- sebanyak 35 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp763,91 miliar;
- sebanyak 6 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp868,07 juta; dan
- sebanyak 9 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp3,03 miliar.

3.94 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, bantuan sosial TA 2010 senilai Rp11,59 miliar tidak sesuai peruntukan, yaitu diberikan kepada organisasi masyarakat yang tidak termasuk kategori organisasi yang berhak menerima bantuan.
- Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelaksanaan pembangunan rumah toko pada TA 2010 di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp11,42 miliar terlambat sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk segera menghasilkan pendapatan asli daerah.
- Di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil pengadaan TA 2010 senilai Rp9,94 miliar berupa alat kesehatan di RSUD Sejiran Setason dan rumah dinas yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaannya.
- Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, realisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan TA 2010 senilai Rp6,36 miliar digunakan untuk membiayai kegiatan beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang tidak dianggarkan sebelumnya.
- Di Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan TA 2010, pembangunan Bandara Pulau Panjang terbengkalai dan tidak pernah dilakukan penanganan untuk menjaga kondisi fisik aset sehingga belum memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaan dan berpotensi terjadi penurunan fungsi aset.

### **Penyebab**

- 3.95 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan tugas, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian kegiatan.

### **Rekomendasi**

- 3.96 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memedomani ketentuan yang berlaku dan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan serta memperhatikan asas efektivitas dalam melaksanakan kegiatan.

### **LKPD Tahun 2009**

- 3.97 Dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2009 terdapat kerugian daerah di antaranya terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, yaitu pekerjaan pembangunan kantor bupati dan sekretariat daerah senilai Rp5,93 miliar dan pekerjaan pembangunan Kantor DPRD TA 2008 senilai Rp7,09 miliar tidak dilaksanakan dan dikontrakkan kembali dari awal kegiatan di TA 2009 kepada rekanan yang sama.
- 3.98 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 4

### Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas satu laporan keuangan (LK) BHMN dan tujuh laporan keuangan badan lainnya. LHP tersebut terdiri atas LK Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Tahun 2008, LK Bank Indonesia (BI) Tahun 2010, LK Konsolidasi *Project Management Office of Asian Development Bank on Earthquake and Tsunami Emergency Support Project* (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010, LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2010, LK Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun 2010, LK Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun 2010, LK *Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2*, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (*Loan ADB 2575-INO*) Tahun 2010, dan LK Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1431 H/2010 M.
- 4.2 Pemeriksaan laporan keuangan BHMN dan badan lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 4.3 Cakupan pemeriksaan atas LK BHMN dan badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK BHMN dan badan lainnya tersebut disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

**Tabel 4.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BHMN dan Badan Lainnya**

(dalam miliar rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi/Laporan Surplus (Defisit)/Laporan Aktivitas/Laporan Kinerja Keuangan/Laporan Realisasi Proyek		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (rugi)/ Surplus (defisit)
1	BPMIGAS	514,54	578,68	(64,13)	634,39	531,72	102,67
2	Bank Indonesia	1.180.012,32	1.111.213,52	68.798,80	12.875,17	34.034,36	(21.159,18)
3	Penyelenggaraan Ibadah Haji	29.097,26	27.772,05	1.325,21	7.079,43	6.945,07	134,35
4	Lembaga Penjamin Simpanan	22,54	11,11	11,43	5,32	4,38	0,93
5	Pusat Investasi Pemerintah	15.079,17	1.070,43	14.008,74	362,14	12,43	349,70
6	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	737,12	1,42	735,70	104,60	63,94	40,65
7	PMO ADB ETESP				0,86	0,86	-
8	<i>Loan ADB 2575-INO</i>	-	-	-	374,65	374,65	-

## Hasil Pemeriksaan

- 4.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK BHMN dan badan lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

## Opini

- 4.6 BPK memberikan opini WTP terhadap LK BPMIGAS Tahun 2008, LK BI Tahun 2010, LK Konsolidasi PMO ADB ETESP Tahun 2010, LK PIP Tahun 2010, LK STAN Tahun 2010, dan LK *Loan* ADB 2575-INO Tahun 2010. Opini TMP diberikan terhadap LK PIH Tahun 1431 H/2010 M dan LK LPS Tahun 2010. Perkembangan opini delapan entitas tersebut untuk Tahun 2008, 2009, dan 2010 disajikan pada Tabel 4.2. berikut.

**Tabel 4.2. Opini atas Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya**

No	Entitas	OPINI		
		2008	2009	2010
1	BPMIGAS	WTP	--	--
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP
3	Penyelenggaraan Ibadah Haji	TMP	TMP	TMP
4	Lembaga Penjamin Simpanan	WTP	TMP	TMP
5	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	WTP	WTP
6	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	--	WDP	WTP
7	PMO ADB ETESP	--	--	WTP
8	Loan ADB 2575-INO	--	--	WTP

## Sistem Pengendalian Intern

- 4.7 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.
- 4.8 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK BHMN dan badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

## Hasil Evaluasi SPI

4.9 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BHMN dan badan lainnya menunjukkan adanya 41 kasus kelemahan SPI, terdiri atas

- sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- sebanyak 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

4.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di BPMIGAS, kantor perwakilan BPMIGAS tidak melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi, dan hanya melaporkan penerimaan dan penggunaan dana dari kantor pusat. Di sisi lain, kantor pusat BPMIGAS mencatat dana yang dikirim ke kantor perwakilan sebagai beban operasional tetapi tidak melakukan penyesuaian atas beban operasional kantor perwakilan pada akhir tahun. Dinas Keuangan Internal kantor pusat BPMIGAS dan Kantor Perwakilan Jawa Timur, Papua, dan Maluku (Japalu) juga tidak melakukan rekonsiliasi atas biaya-biaya yang sudah dibebankan dan biaya-biaya yang masih harus dibayar pada tahun bersangkutan. Hal tersebut mengakibatkan penyajian beban operasional pada LK BPMIGAS Tahun 2008 menjadi tidak wajar.
- Di BI, beberapa kegiatan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) belum diatur secara jelas pendanaannya dalam Keputusan Gubernur BI mengakibatkan adanya kegiatan yang seharusnya tidak dibiayai dari anggaran BSBI menjadi beban BI.
- Di PIH, penerapan aturan pengembalian pemondokan Makkah tidak konsisten, yaitu adanya persetujuan pembayaran kompensasi kepada jemaah yang tidak berhak senilai SAR905.40 ribu (ekuivalen Rp2,18 miliar).
- Di *Loan* ADB 2575-INO, dalam proses penyusunan LK terdapat transaksi pada rekening khusus tidak tercatat pada laporan manajemen keuangan (LMK), penyusunan LMK tidak menggunakan data hasil rekonsiliasi antara BI dan Kementerian Keuangan, serta pengakuan realisasi dalam LMK berbeda dengan jumlah realisasi menurut rekening khusus dan realisasi menurut rekening dana talangan Bendahara Umum Negara (BUN) sehingga pengakuan realisasi senilai Rp3,30 miliar tidak jelas.

### Penyebab

4.11 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan BUMN dan badan lainnya.

## Rekomendasi

- 4.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan BHMN dan badan lainnya memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.13 Selain opini dan evaluasi atas SPI, BPK masih menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan milik negara, potensi kerugian negara/perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan negara/perusahaan milik negara, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan meliputi 41 kasus senilai Rp14,00 triliun dan USD201.05 ribu (ekuivalen Rp1,72 miliar) yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya**

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp/ribu USD)
<b><i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	6	1.430,11 USD200.00
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	1	285,45
3	Kekurangan Penerimaan	9	2.519,47 USD1.05
4	Administrasi	16	-
5	Ketidakhematan	4	88.414,43
6	Ketidakefektifan	5	13.909.244,23
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>14.001.893,70</b> <b>USD201.05</b>

- 4.14 Berdasarkan Tabel 4.3. di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 41 kasus senilai Rp14,00 triliun dan USD201.05 ribu (ekuivalen Rp1,72 miliar) sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas satu LK BUMN dan tujuh badan lainnya. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada Lampiran 10 dan rincian per entitas dapat dilihat pada Lampiran 11.
- 4.15 Di antara temuan signifikan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut.
- Di BI, ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, pembayaran penghasilan kepada pegawai yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan BI senilai Rp1,05 miliar untuk Tahun 2009 dan Rp158,38 juta untuk Tahun 2010.

- Di PIH, ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan, bunga deposito pada Bank Mandiri senilai Rp1,17 miliar belum diterima PIH, terdiri atas perhitungan bunga yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp438,44 juta dan bunga deposito yang belum dibayarkan senilai Rp736,58 juta.
- Di PIH, ketidakpatuhan yang mengakibatkan pemborosan, perhitungan harga satuan biaya konsumsi di Armina tidak jelas perhitungannya mengakibatkan pemborosan senilai Rp2,59 miliar. Selain itu, pembayaran biaya kebersihan dan keamanan (kontrak logistik) kepada *Muassasah* (badan-badan yang khusus melayani jemaah haji) di Armina tumpang tindih dengan pembayaran beban *Maslahat Ammah (general service)* yang sudah dibayar sendiri oleh jemaah mengakibatkan pemborosan senilai Rp28,58 miliar.
- Di PIP, ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan, dana investasi yang dicairkan pada TA 2010, dana investasi dari DIPA tahun-tahun sebelumnya, dan surplus pendapatan yang diperoleh belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran (RBA) secara optimal mengakibatkan adanya *idle cash* per 31 Desember 2010 senilai Rp13,90 triliun. Hal tersebut menunjukkan masih banyak *idle cash* belum dapat diinvestasikan oleh PIP sehingga belum dapat memberikan manfaat yang maksimal.

### Penyebab

- 4.16 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam menaati ketentuan yang berlaku, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

### Rekomendasi

- 4.17 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan BHMN dan badan lainnya memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 4.18 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan kasus kerugian negara/perusahaan dan kekurangan penerimaan negara/perusahaan dengan menyetor ke kas negara/perusahaan.
- 4.19 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan, terdiri atas 8 objek di lingkungan pemerintah pusat, 4 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 2 objek di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan atas:

- penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1431 H/2010 M;
- kinerja rumah sakit;
- kinerja bea dan cukai; dan
- kinerja lainnya (2 entitas pusat, 1 entitas daerah, dan 2 BUMN).





## BAB 5

### Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M

- 5.1 Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada calon/jemaah haji melalui Kementerian Agama.
- 5.2 Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji antara lain ditentukan oleh kualitas pemondokan jemaah haji di Makkah, Madinah, dan hotel transito di Jeddah, pelayanan transportasi darat, dan pelayanan konsumsi/katering kepada jemaah haji.
- 5.3 Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1431 H/2010 M.

#### Tujuan Pemeriksaan

- 5.4 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan pemondokan, transportasi darat, dan katering yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji.

#### Hasil Pemeriksaan

- 5.5 Penyelenggara Ibadah Haji telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemondokan jemaah haji di Arab Saudi, khususnya di Makkah, antara lain melakukan penyewaan lebih awal dari tahun sebelumnya agar mendapatkan pemondokan yang letaknya di dekat Masjidil Haram dengan harga terjangkau sesuai plafon, dan memenuhi kriteria pemondokan.
- 5.6 Tahun 1431 H/2010 M penyewaan pemondokan di Ring I Makkah telah dioptimalkan menjadi 62,94% atau meningkat 35,69% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 27,25%. Jarak pemondokan terjauh menjadi 4.000 m dari tahun sebelumnya sejauh 7.000 m. Sedangkan penempatan jemaah haji di wilayah sentral (*markaziah*) Madinah Tahun 1431 H/2010 M menjadi 94,47% atau meningkat 10,95% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 83,52%.
- 5.7 Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M telah meningkatkan pelayanan pemondokan, transportasi darat, dan katering, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang antara lain diuraikan sebagai berikut.

#### Pelayanan Pemondokan

- 5.8 Pada musim haji Tahun 1431 H/2010 M, proyek perluasan Masjidil Haram di Makkah yang telah dimulai sejak musim haji tahun-tahun sebelumnya masih terus berlangsung dan telah menggusur cukup banyak bangunan

gedung dan hotel-hotel yang biasa digunakan untuk menampung jemaah haji. Kondisi ini berdampak pada melambungnya harga sewa pemondokan sehingga Penyelenggara Ibadah Haji mengalami kesulitan untuk memperoleh pemondokan di wilayah Ring I (berjarak di bawah 2.000 m dari Masjidil Haram). Hal ini karena terbatasnya plafon harga sewa perumahan yang telah ditetapkan pemerintah.

- 5.9 Keterbatasan jumlah rumah yang dekat Masjidil Haram dan tingginya persaingan dengan negara lain telah diantisipasi dengan melakukan proses persiapan pelayanan pemondokan lebih awal. Namun demikian saat tim perumahan melakukan penyewaan rumah, plafon pemondokan masih bersifat perkiraan karena plafon resmi belum ditetapkan oleh DPR.
- 5.10 Penetapan jarak pemondokan ke Masjidil Haram di Makkah yang dibagi dalam Ring I dan Ring II pada Tahun 1429 H/2008 M, 1430 H/2009 M, dan 1431 H/2010 M mengalami perubahan, akan tetapi perubahan jarak tersebut belum disosialisasikan kepada calon jemaah haji.

### **Penyebab**

- 5.11 Hal tersebut disebabkan Direktur Pelayanan Haji belum mengusulkan
- pedoman penyewaan yang mengatur lebih rinci mekanisme pengambilan keputusan penyewaan perumahan pada saat proses peninjauan lapangan (*kasyfiah*), proses negosiasi, dan penetapan harga akhir yang menetapkan komposisi maupun jumlah tim yang harus hadir; dan
  - pembentukan tim untuk menyusun *database* perumahan.

### **Rekomendasi**

- 5.12 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji agar memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk:
- menyempurnakan pedoman penyewaan perumahan/pemondokan;
  - membentuk tim penyusun *database* perumahan di wilayah Makkah dan Madinah; dan
  - menetapkan dan mensosialisasikan petunjuk/edaran kepada jemaah haji terkait dengan perubahan jarak pemondokan berikut hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi jemaah haji.

### **Pelayanan Transportasi Darat**

- 5.13 Tugas pengendalian dan pengawasan angkutan jemaah haji di Makkah oleh Tim Penyiapan Angkutan Jemaah Haji di Makkah tumpang tindih dengan tugas Bidang Transportasi Daerah Kerja (Daker) Makkah.

- 5.14 Petunjuk pelaksanaan pelayanan transportasi belum disusun dan ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan peran dan tanggung jawab petugas transportasi tidak dapat diukur dan menyulitkan petugas transportasi dalam memahami tugasnya yang berpotensi terjadinya ketidakseragaman dalam pelayanan transportasi kepada jemaah.
- 5.15 Pelayanan transportasi terhadap perumahan yang lokasinya jauh dari titik penjemputan belum optimal. Hal ini mengakibatkan terganggunya pelayanan yang diberikan kepada jemaah dan menimbulkan kelelahan fisik khususnya bagi jemaah usia lanjut/sakit.

### **Penyebab**

- 5.16 Ketidakjelasan pembagian tugas dan belum adanya petunjuk pelaksanaan transportasi darat.

### **Rekomendasi**

- 5.17 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk memerintahkan Dirjen PHU agar
- menyempurnakan uraian tugas tim penyiapan angkutan jemaah haji di Makkah;
  - menyusun petunjuk pelaksanaan pelayanan transportasi darat dan memberikan pelatihan kepada para petugas secara intensif; dan
  - meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan transportasi darat dengan memperhatikan beban kerja petugas transportasi.

### **Pelayanan Katering**

- 5.18 Untuk melaksanakan pengadaan katering di Arab Saudi, Ditjen PHU Kementerian Agama belum memiliki pedoman formal yang merinci tata cara tentang
- pembentukan dan pembagian tugas tim pengadaan beserta tim pendukungnya; dan
  - evaluasi dan penilaian penyedia katering.
- 5.19 Hal tersebut menimbulkan potensi terbentuknya tim dengan susunan anggota yang tidak sesuai dengan tujuannya, adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan pembagian tugas antar personel tim, serta penunjukan perusahaan penyedia katering kurang dapat diyakini.

- 5.20 Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tidak konsisten menerapkan pemberian sanksi *blacklist* terhadap perusahaan catering yang wanprestasi. Hal ini mengakibatkan adanya potensi terulangnya pelanggaran/wanprestasi di kota lain.

#### **Rekomendasi**

- 5.21 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji agar memerintahkan Dirjen PHU untuk:
- menetapkan pedoman tatacara pembentukan dan pembagian tugas tim pengadaan beserta tim pendukungnya, tatacara evaluasi dan penilaian penyedia catering, serta petunjuk pelaksanaan petugas catering; dan
  - memberikan sanksi *blacklist* yang berlaku untuk seluruh kota perhajian bagi penyedia catering yang wanprestasi.
- 5.22 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

## BAB 6

### Kinerja Rumah Sakit

- 6.1 Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja rumah sakit pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa, Kota Langsa, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan RSUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

#### Tujuan Pemeriksaan

- 6.2 Pemeriksaan kinerja pada BLU RSAB Harapan Kita bertujuan menilai aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk TA 2009 dan Semester I TA 2010.
- 6.3 Pemeriksaan kinerja pelayanan rawat inap pada RSUD Langsa TA 2009 dan Semester I TA 2010 bertujuan menilai efektivitas manajemen RSUD Langsa dalam mengelola pelayanan rawat inap.
- 6.4 Pemeriksaan atas kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, RSUD Cut Dhien Meulaboh, dan satuan kerja lainnya yang menangani bidang kesehatan Kabupaten Aceh Barat bertujuan menilai keberhasilan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan, tingkat ekonomi penggunaan sumber daya, dan tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- 6.5 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Buru serta instansi terkait lainnya bertujuan untuk menilai sistem pengendalian intern (SPI) atas pelayanan kesehatan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; pencapaian terhadap SPM; tingkat ekonomi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan; tingkat efisiensi pelaksanaan dan efektivitas hasil pelayanan kesehatan; serta menilai pelaksanaan anggaran dan pelayanan kesehatan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Hasil Pemeriksaan

##### RSAB Harapan Kita

- 6.6 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan pada RSAB Harapan Kita belum efisien dan efektif dalam rangka menunjang tercapainya tujuan RSAB Harapan Kita. Tujuan RSAB antara lain meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai moto "FACT" (*Fast, Accurate, Convenient and Safe by Teamwork*), dan mengembangkan manajemen rumah sakit secara efektif dan efisien, bersih dan berwibawa dengan melaksanakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) di segala bidang. Temuan-temuan signifikan terkait kinerja pengelolaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan antara lain diuraikan sebagai berikut.

- 6.7 Direksi RSAB Harapan Kita belum menetapkan pemetaan atas jenis, jumlah, serta nilai sarana prasarana dan peralatan kesehatan dalam periode rencana strategis (Renstra) 2006-2010. Direksi juga belum menetapkan standar sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang harus dipenuhi selama kurun waktu Renstra 2006-2010. Hal tersebut terjadi karena direksi kurang peduli terhadap risiko apabila tidak mempunyai pemetaan dan perencanaan pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan. Akibatnya program pemenuhan dan pengembangan sarana prasana dan peralatan kesehatan tidak mempunyai arah.
- 6.8 Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan rumah duka senilai Rp11,50 juta atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Selain itu, gedung parkir senilai Rp43,25 miliar, rumah duka senilai Rp1,42 miliar, serta peralatan kesehatan minimal senilai Rp929,62 juta belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pembangunan dan pengeluaran dana kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena manajemen RSAB Harapan Kita tidak cermat dalam menyusun perencanaan.
- 6.9 Pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan tidak sesuai dengan SPM rumah sakit. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peralatan kesehatan minimal sebanyak 126 unit yang tidak dikalibrasi ulang. Selain itu pemeliharaan yang dilakukan bersifat menunggu laporan kerusakan, tidak ditujukan untuk mencegah kerusakan. Hal tersebut terjadi karena petugas instalasi tidak melaksanakan tugas secara optimal khususnya terkait kalibrasi peralatan medis.

### **Rekomendasi**

- 6.10 BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama RSAB Harapan Kita agar
- menyusun dan menetapkan pemetaan dan perencanaan pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan;
  - menyetorkan ke kas negara atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai Rp11,50 juta;
  - memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal; dan
  - melakukan pendataan dan perencanaan peralatan yang wajib dikalibrasi, serta berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna melaksanakan kalibrasi.

## Pelayanan Kesehatan RSUD Langsa

- 6.11 Hasil pemeriksaan atas kinerja rawat inap RSUD Langsa menunjukkan bahwa dalam TA 2009 dan Semester I TA 2010 RSUD Langsa belum efektif dalam merencanakan, memenuhi kebutuhan infrastruktur, menetapkan prosedur dan standar pelayanan, serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelayanan rawat inap. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut.
- 6.12 Perencanaan pemberian pelayanan rawat inap RSUD Langsa belum optimal, hal ini terlihat dari program/kegiatan pengembangan RSUD Langsa belum sepenuhnya berpedoman pada renstra yang telah ditetapkan. Selain itu, struktur organisasi rawat inap RSUD Langsa tidak jelas sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelayanan rawat inap secara keseluruhan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada mekanisme koordinasi yang memadai antar unit kerja dalam penyusunan program dan keterbatasan anggaran yang disediakan Pemerintah Kota Langsa. Selain itu, Direktur RSUD Langsa belum melaksanakan tugas manajerial rumah sakit secara cermat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6.13 Infrastruktur serta sarana dan prasarana ruang rawat inap RSUD Langsa tidak memadai. Hasil cek fisik atas sarana dan prasarana pendukung layanan ruang inap pada 15 ruang rawat inap yang dimiliki RSUD Langsa dalam kondisi kurang layak digunakan dan kurang memenuhi standar kesehatan sebagai rumah sakit tipe B. Hal tersebut terjadi karena manajemen RSUD Langsa tidak menetapkan skala prioritas dalam memperbaiki fasilitas rawat inap dan Pemerintah Kota Langsa kurang memberikan perhatian atas penyediaan sarana dan prasarana RSUD Langsa.
- 6.14 RSUD Langsa belum menetapkan SPM Rumah Sakit tingkat Kota Langsa dan belum sepenuhnya melaksanakan SPM standar nasional. Hal tersebut terjadi karena manajemen RSUD Langsa lalai menindaklanjuti keputusan Menteri Kesehatan untuk menyusun SPM RSUD tingkat Kota Langsa dua tahun setelah SPM standar nasional ditetapkan dan lalai mensosialisasikan SPM kepada seluruh pegawai. Manajemen juga belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian SPM dalam menetapkan perencanaan.
- 6.15 Mekanisme pelaporan atas kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan rawat inap belum disusun secara memadai. RSUD Langsa belum memiliki prosedur tertulis mengenai mekanisme pelaporan untuk pelayanan rawat dan laporan dari pelayanan rawat inap tidak mengungkapkan pencapaian kinerja rawat inap. Selain itu, informasi hasil penilaian kinerja pelayanan yang selama ini telah dilaporkan belum didukung data yang lengkap, akurat, dan valid serta belum dilaporkan tepat waktu dan secara periodik. Hal tersebut terjadi karena Direktur RSUD Langsa lalai dalam menyusun petunjuk dan prosedur tentang mekanisme pelaporan monev serta lemah dalam melaksanakan monev atas pelayanan rawat inap.

## Rekomendasi

- 6.16 BPK telah merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Langsa untuk memprioritaskan dana peningkatan pelayanan RSUD Langsa khususnya rawat inap dan Direktur RSUD Langsa agar
- menciptakan mekanisme koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan program/kegiatan;
  - menetapkan skala prioritas dalam meningkatkan fasilitas rawat inap supaya memenuhi SPM dan mengupayakan agar Pemerintah Kota Langsa memberi perhatian lebih baik atas penyediaan sarana prasarana RSUD Langsa terutama terkait fasilitas pelayanan rawat inap;
  - segera menyusun SPM RSUD tingkat Kota Langsa dan menetapkan perencanaan yang mengarah pada pencapaian SPM serta melakukan sosialisasi SPM secara menyeluruh kepada seluruh pegawai RSUD Langsa; dan
  - segera menyusun petunjuk dan prosedur mekanisme pelaporan atas monev pelayanan rawat inap dan meningkatkan kegiatan monev pelayanan rawat inap.

## Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh

- 6.17 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh belum sepenuhnya mencapai SPM:
- Dinas Kesehatan, TA 2009 terdapat 16 indikator, terdiri atas 6 indikator pelayanan kesehatan dasar, 2 indikator pelayanan kesehatan rujukan, dan 8 indikator tambahan yang belum memenuhi SPM. TA 2010 terdapat 25 indikator, terdiri atas 12 indikator pelayanan kesehatan dasar, 2 indikator pelayanan kesehatan rujukan, 1 indikator promosi kesehatan dan pemberdayaan, dan 10 indikator tambahan yang belum memenuhi SPM. Hal tersebut terjadi karena Bupati Aceh Barat kurang maksimal dalam memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
  - Bupati Aceh Barat belum menetapkan SPM untuk RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sehingga dalam melakukan penilaian kinerja digunakan SPM rumah sakit yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Hasil penilaian terhadap pencapaian SPM tersebut diketahui terdapat indikator belum mencapai SPM yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena Bupati Aceh Barat kurang maksimal memberi perhatian untuk menetapkan SPM dan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien kurang memberikan perhatian terhadap capaian kinerja unit kerja yang dipimpinnya.



- 6.18 Hasil pemeriksaan lain yang perlu mendapat perhatian pada pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh antara lain diuraikan sebagai berikut.
- 6.19 Terdapat harga pengadaan obat generik yang melebihi harga patokan tertinggi (HPT) maksimal yang ditetapkan Menteri Kesehatan sehingga terjadi kerugian daerah senilai Rp133,28 juta. Hal tersebut terjadi karena panitia pengadaan barang dan jasa dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam meneliti penawaran yang masuk tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6.20 Pejabat pengelola teknis kegiatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh TA 2009 tidak mengenakan denda senilai Rp61,37 juta atas keterlambatan pengadaan alat-alat kedokteran umum. Keterlambatan tersebut karena perubahan kontrak dengan alasan terjadinya gempa di Sumatera Barat, namun alasan tersebut tidak tepat. Hal tersebut terjadi karena PPTK RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh TA 2009 lalai memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam memberikan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

#### **Rekomendasi**

- 6.21 Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Aceh Barat untuk
- memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan supaya membuat rencana aksi yang nyata dan realistis dalam rangka memperbaiki capaian indikator SPM yang di bawah standar;
  - menetapkan target capaian SPM pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sesuai ketentuan yang berlaku;
  - memberikan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di unit kerjanya;
  - melalui Kepala Dinas Kesehatan agar memerintahkan PPTK dan rekanan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan harga pengadaan obat generik dari harga patokan tertinggi yang ditetapkan Menteri Kesehatan senilai Rp133,28 juta dan disetorkan ke kas daerah, selanjutnya salinan bukti setornya disampaikan ke BPK; dan
  - memerintahkan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk memungut denda keterlambatan kepada PT Indofarma Global senilai Rp61,37 juta sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Buru

- 6.22 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa SPI RSUD Kabupaten Buru masih belum memadai, belum efektif dalam merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang ada dalam mencapai SPM dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
- 6.23 Renstra RSUD Kabupaten Buru Tahun 2007-2012 belum disusun secara memadai, antara lain renstra tidak memuat target tahunan maupun akhir Tahun 2012 serta visi dan misi yang ditetapkan dalam renstra juga tidak sinkron. Dari hambatan yang telah ditelaah melalui *strengths, weaknesses, opportunities, threats* (SWOT) *analysis* tidak diketahui target dan bentuk pelaksanaan strategi penanggulangan hambatan tersebut. Selanjutnya diketahui bahwa renstra tidak dievaluasi dan adanya realisasi kegiatan tanpa penganggaran. Hal tersebut terjadi karena Plt. Direktur RSUD Kabupaten Buru kurang cermat dalam menyusun renstra dan tidak melakukan evaluasi mendalam terhadap tingkat pencapaian kinerja.
- 6.24 Pelayanan RSUD Kabupaten Buru belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini antara lain tampak dari belum dimilikinya fasilitas pelayanan serta sarana prasarana yang memadai, di antaranya RSUD Kabupaten Buru baru memiliki 8 (dari seharusnya 26) jenis pelayanan dan 9 (dari seharusnya 28) sarana prasarana yang dipersyaratkan untuk RSUD tipe D. Selain itu, perbandingan jumlah tenaga perawat, paramedik non perawatan dan non medis belum optimal. Hal tersebut terjadi karena dukungan, perhatian dan upaya pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana oleh Direktur RSUD Kabupaten Buru dan Pemerintah Kabupaten Buru belum optimal.
- 6.25 Pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Buru belum diselenggarakan secara tertib dan memadai, antara lain pengelolaan retribusi di tiap-tiap instalasi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk secara lisan oleh bendahara penerimaan dan tidak ada bukti pemungutan retribusi. Bendahara penerimaan menyetorkan penerimaan lebih dari satu hari kerja dan tanpa ada bukti setor. Selain itu, penerimaan atas retribusi jasa pelayanan langsung dibagikan pada dokter dan perawat tanpa disetor dahulu ke kas daerah. Hal tersebut terjadi karena Plt. Direktur RSUD Kabupaten Buru belum menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta prosedur pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Plt. Direktur RSUD Kabupaten Buru lemah dalam pengawasan dan pengendalian penerimaan retribusi serta kurang memahami prosedur penatausahaan penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan.
- 6.26 Pemungutan retribusi pada instalasi farmasi dan instalasi unit gawat darurat (UGD) tidak memiliki dasar hukum yang sah dan digunakan langsung minimal senilai Rp393,98 juta, serta terdapat saldo hasil penjualan obat-obatan per 24 November 2010 senilai Rp54,56 juta yang tidak disetor ke kas daerah. Hal tersebut terjadi karena peraturan daerah mengenai tarif dan jenis

penerimaan yang ada belum mengakomodasi semua sumber penerimaan. Bendahara Penerimaan, Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Instalasi UGD tidak mematuhi ketentuan penggunaan dana penerimaan, dan Plt. Direktur RSUD Kabupaten Buru lemah dalam pengawasan dan pengendalian atas dana penerimaan.

### **Rekomendasi**

- 6.27 BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Buru agar
- mengoptimalkan pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit yang baik sesuai dengan ketentuan dan kemampuan daerah;
  - merevisi peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan kesehatan agar mengakomodasi seluruh penerimaan RSUD Kabupaten Buru; dan
  - melakukan proses penyelesaian indikasi penyalahgunaan uang daerah senilai Rp393,89 juta dan menyetorkan saldo penjualan obat-obatan senilai Rp54,56 juta ke kas daerah dan bukti setor disampaikan ke BPK.
- 6.28 BPK juga telah merekomendasikan kepada Bupati Buru agar memerintahkan Plt. Direktur RSUD Kabupaten Buru untuk
- mengevaluasi renstra RSUD Kabupaten Buru Tahun 2007-2012 dan merevisi serta menetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Buru;
  - menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta prosedur pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Buru; dan
  - memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.
- 6.29 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 7

### Kinerja Bea dan Cukai

7.1 Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas

- kegiatan audit kepabeanan dan cukai TA 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta di Jakarta dan Kanwil DJBC Jawa Timur I di Surabaya;
- pelayanan dan penatausahaan penyelesaian impor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan (PJT) dan kantor tukar pos udara TA 2009 dan 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta di Tangerang; dan
- pelayanan dan penatausahaan pengeluaran barang impor untuk dipakai dari tempat penimbunan sementara (TPS) TA 2009 dan 2010 pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan di Medan.

#### Tujuan Pemeriksaan

7.2 Tujuan pemeriksaan untuk menilai efektivitas

- kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang dilakukan Kanwil DJBC Jakarta dan Kanwil DJBC Jawa Timur I dalam rangka pengamanan atas penerimaan negara;
- kegiatan pelayanan dan penatausahaan penyelesaian impor barang kiriman melalui PJT dan kantor tukar pos udara pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta dalam rangka kelancaran arus barang dan kepatuhan PJT/penerima barang kiriman dalam memenuhi kewajiban kepabeanannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- kegiatan pelayanan dan penatausahaan pengeluaran barang impor untuk dipakai dari TPS pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, dalam rangka meningkatkan kecepatan penyelesaian dokumen kepabeanan dan cukai, serta kelancaran arus barang dan penumpang.

#### Hasil Pemeriksaan pada Kanwil DJBC Jakarta

7.3 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Jakarta cukup efektif untuk mendukung peningkatan pengamanan penerimaan negara. Namun, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain diuraikan sebagai berikut.

- 7.4 Kebijakan dan prosedur belum diatur secara tertulis, antara lain peraturan batas waktu penyelesaian audit, dan batas waktu maksimal penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean.
- 7.5 Implementasi kebijakan dan prosedur tentang audit belum sepenuhnya dilaksanakan, antara lain adanya pembatalan surat tugas atau penghentian pelaksanaan audit karena sedang diaudit oleh kanwil DJBC yang lain, dan adanya laporan hasil audit (LHA) yang diterbitkan lebih dari 18 bulan sejak tanggal surat tugas. Hal tersebut terjadi karena belum ada petunjuk teknis atau mekanisme yang jelas mengenai pembagian kewenangan objek audit, dan reviu atas pelaksanaan audit untuk menjamin kualitas hasil audit, serta belum ada ketentuan yang mengatur batas waktu penyelesaian LHA.

### **Rekomendasi**

- 7.6 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Bea dan Cukai agar
- menetapkan batas waktu penagihan untuk kekurangan penerimaan dari penetapan tarif dan nilai pabean; dan
  - menetapkan petunjuk teknis dan mekanisme yang jelas mengenai pembagian wewenang pelaksanaan audit oleh kanwil, serta batas waktu penyelesaian LHA.

### **Hasil Pemeriksaan pada Kanwil DJBC Jawa Timur I**

- 7.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Timur I kurang efektif untuk mendukung rencana strategis dalam pengamanan atas penerimaan negara. Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain diuraikan sebagai berikut.
- 7.8 Pelaksanaan audit pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Namun, beberapa proses yang belum dilaksanakan sesuai kebijakan yang berlaku, antara lain LHA belum didukung dengan kertas kerja audit (KKA) yang memadai serta adanya kesimpulan dan rekomendasi yang tidak jelas. Hal tersebut terjadi karena kelemahan pengendalian atas pelaksanaan audit dan tidak adanya petunjuk teknis tentang pendokumentasian KKA, serta pelaksanaan audit yang belum memenuhi standar audit.
- 7.9 Monitoring dan tindak lanjut hasil audit pada Kanwil DJBC Jawa Timur I pada umumnya berlangsung baik. Namun masih ada kelemahan pada pemantauan tagihan baik pada KPPBC terkait maupun atas keberatan/banding, antara lain tidak ada pemantauan tindak lanjut atas tagihan berdasarkan hasil audit senilai Rp5,34 miliar dan terdapat kekurangan pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan hasil audit senilai Rp93,96 juta. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya SOP yang jelas mengatur pemantauan tindak lanjut terhadap tagihan dari hasil audit.

### **Rekomendasi**

- 7.10 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direktur Bea dan Cukai agar
- menetapkan petunjuk teknis tentang pendokumentasian KKA, dan SOP pemantauan tindak lanjut atas tagihan dari hasil audit; dan
  - meningkatkan pengendalian dan kualitas audit dengan melakukan pelatihan bagi pengendali mutu audit (PMA), pengendali teknis audit (PTA), dan auditor.

### **Hasil Pemeriksaan pada KPPBC Soekarno Hatta**

- 7.11 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan dan penatausahaan penyelesaian impor barang kiriman melalui PJT dan kantor tukar pos udara kurang efektif dalam rangka mendorong kelancaran arus barang dan kepatuhan PJT/penerima barang kiriman dalam memenuhi kewajiban kepabeanannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain diuraikan sebagai berikut.
- 7.12 Pelayanan penyelesaian impor barang kiriman belum didukung kebijakan, sistem, dan prosedur yang jelas dan memadai. Hal tersebut terjadi karena belum adanya sistem otomasi pelayanan untuk barang kiriman melalui PJT yang terintegrasi dengan sistem pengawasan.
- 7.13 Pelayanan importasi barang melalui PJT belum didukung oleh sistem otomasi dan teknologi yang memadai. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan eksternal yakni PJT, pengusaha TPS, dan importir bersikap resisten terhadap penerapan sistem aplikasi dan teknologi bagi pelayanan pemberitahuan impor barang khusus (PIBK).

### **Rekomendasi**

- 7.14 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar
- menyusun prosedur pengendalian yang memadai dan diintegrasikan dengan sistem otomasi pelayanan untuk barang kiriman melalui PJT; dan
  - membuat sistem otomasi pelayanan PIBK yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan manifes dan memerintahkan kepada Kepala KPPBC Soekarno Hatta untuk memberikan pemahaman kepada pengguna jasa tentang pentingnya sistem otomasi yang dapat mempercepat pelayanan.

## Hasil Pemeriksaan pada KPPBC Belawan

- 7.15 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan dan penatausahaan pengeluaran barang impor untuk dipakai dari TPS kurang efektif dalam meningkatkan pelayanan importasi barang dan kepatuhan importir dalam memenuhi kewajiban kepabeanannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain diuraikan sebagai berikut.
- 7.16 KPPBC tidak memiliki prosedur terkait tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja, serta prosedur penutupan pos manifes atas barang impor angkut terus. Hal tersebut terjadi karena DJBC belum menetapkan SOP mekanisme tindak lanjut atas laporan evaluasi kinerja yang dibuat seksi kepatuhan internal (KI) dan mekanisme penatausahaan penutupan pos manifes atas barang impor angkut terus.
- 7.17 Penyelesaian penetapan tarif dan nilai pabean atas 1.757 dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) jalur hijau dan atas 3.700 dokumen jalur merah Tahun 2009 dan 2010 melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan standar pelayanan. Hal tersebut terjadi karena pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) lalai menjalankan ketentuan yang berlaku dan lemahnya pengawasan atasan langsung maupun pengawasan seksi KI.

### Rekomendasi

- 7.18 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar
- menyusun dan menetapkan SOP yang jelas dan spesifik yang mengatur mekanisme tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi kinerja yang dibuat seksi KI dan mekanisme penatausahaan penutupan pos manifes atas barang impor angkut terus;
  - membuat *warning system* ke dalam aplikasi impor agar PFPD cepat mengetahui dokumen PIB yang belum diselesaikan penetapannya dan memudahkan pengawasan oleh atasan langsung dan seksi KI;
  - membuat mekanisme reviu penetapan dokumen jalur merah dan melaksanakannya secara periodik; dan
  - memerintahkan Kepala KPPBC Belawan untuk melakukan pembinaan kepada PFPD terkait.
- 7.19 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 8

### Pemeriksaan Kinerja Lainnya

- 8.1 Selain tema-tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada 5 objek pemeriksaan sebagai berikut.
- 8.2 Dua objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, yaitu
- efektivitas pengelolaan kajian pada program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Bandung, dan Makassar; dan
  - kinerja program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- 8.3 Satu objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, yaitu kinerja pelayanan pendidikan pada Pemerintah Kota Ambon dan instansi terkait TA 2008, 2009, dan 2010.
- 8.4 Dua objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu
- kinerja kegiatan transportasi dan antaran kiriman pos PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) di Bandung dan Jakarta; dan
  - kinerja pada PT Jasa Raharja (Persero) (PT JR) Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

### Lembaga Administrasi Negara

- 8.5 Tujuan pemeriksaan untuk menilai apakah pengelolaan kajian pada program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan telah efektif menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan kajian, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kajian dan pemanfaatannya.
- 8.6 Hasil pemeriksaan menunjukkan efektivitas pengelolaan kajian atas program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada LAN tidak tercapai secara optimal. Permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan ketidakefektifan antara lain diuraikan sebagai berikut.
- 8.7 Koordinasi perencanaan antara LAN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) kurang maksimal, sehingga kajian yang dihasilkan oleh LAN kurang dimanfaatkan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai pembuat kebijakan.

- 8.8 Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil kajian belum dilaksanakan sehingga LAN tidak mempunyai informasi tentang pemanfaatan hasil kajian, tidak ada *feedback* yang memadai untuk perbaikan mutu kajian di masa yang akan datang, dan tidak bisa menilai efektivitas kegiatan pembuatan kajian. Hal tersebut terjadi karena mekanisme monitoring tentang pemanfaatan hasil kajian belum ditetapkan.
- 8.9 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala LAN agar
- menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Kedepuyan bidang Litbang untuk mengintensifkan pelaksanaan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan terkait substansi kajian dengan kebijakan di bidang administrasi negara yang akan dibuat oleh Kementerian PAN dan RB pada tiap periode; dan
  - membuat mekanisme monitoring pemanfaatan hasil kajian LAN oleh *stakeholder* serta menggunakan hasil monitoring yang dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan pembuatan kajian.

### **Kementerian PPN/Bappenas**

- 8.10 Tujuan pemeriksaan untuk menilai apakah
- struktur organisasi dan pengelolaan keuangan telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
  - proses pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan;
  - pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara ekonomis dan efektif; dan
  - pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
- 8.11 Hasil pemeriksaan menunjukkan program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Kementerian PPN/Bappenas telah dilaksanakan secara efektif. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain diuraikan sebagai berikut.
- 8.12 Kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan *database* belum sepenuhnya didukung perencanaan yang memadai. Permasalahan tersebut antara lain penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) tidak sesuai dengan kerangka yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No.PER.08/M.PPN/12/2006. Hal tersebut terjadi karena penanggung jawab kegiatan belum sepenuhnya menyadari pentingnya KAK sebagai pedoman pelaksana kegiatan serta proses penilaian usulan kegiatan Deputy Ekonomi dan Deputy Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM oleh tim anggaran belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

- 8.13 Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan antara lain penyusunan output dan laporan pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya dibuat dan dilaksanakan tepat waktu sehingga hasil kegiatan yang telah dilakukan tidak dapat digunakan secara optimal. Permasalahan tersebut disebabkan Biro Perencanaan Organisasi dan Tatalaksana (Renotala) tidak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan secara optimal terutama terhadap penyampaian laporan pada tahun berjalan (selain laporan akhir). Selain itu, belum ada ketentuan yang mengatur tentang batas akhir penyampaian laporan kegiatan dan sanksi jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan dan jika direktorat tidak menyampaikan laporan kemajuan.
- 8.14 Biro Renotala belum sepenuhnya melakukan evaluasi capaian kinerja kegiatan koordinasi, kajian, pemantauan, evaluasi, dan *database* sehingga efektivitas kegiatannya tidak dapat diketahui dan dinilai. Permasalahan tersebut disebabkan unit kerja eselon (UKE) I dan UKE II tidak memperhatikan kewajibannya membuat laporan evaluasi kinerja. Selain itu Biro Renotala, dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan (IBKK) tidak memperhatikan kewajibannya melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan.
- 8.15 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar
- penanggung jawab kegiatan melakukan reviu terhadap usulan kegiatan yang disampaikan oleh direktorat sebelum disampaikan ke Biro Renotala dan agar tim anggaran lebih teliti dalam melakukan penilaian KAK sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Biro Renotala melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan pada tahun berjalan, dan mengatur ketentuan tentang batas akhir penyampaian laporan kegiatan beserta sanksi jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan dan jika direktorat tidak menyampaikan laporan kemajuan; dan
  - UKE I, UKE II, Biro Renotala, dan IBKK lebih memperhatikan kewajibannya dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan dan membuat laporannya.

### **Pemerintah Kota Ambon**

- 8.16 Tujuan pemeriksaan untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) atas kegiatan pelayanan pendidikan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
  - pencapaian terhadap standar nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan;

- tingkat ekonomi penggunaan sumber daya pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan
  - pelaksanaan anggaran dan kegiatan telah mengikuti peraturan yang berlaku.
- 8.17 Hasil pemeriksaan menunjukkan pemerintah Kota Ambon belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan pendidikan. Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
- 8.18 Sarana dan prasarana pendidikan di Kota Ambon belum memadai, antara lain terdapat 115 SD menempati 55 gedung dan 25 lokasi sekolah yang sama, 12 SMP menempati 6 gedung dan 6 lokasi sekolah yang sama, serta beberapa sekolah belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana sekolah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini terjadi karena Kepala Dinas Pendidikan tidak cermat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Ambon serta *database* sarana dan prasarana sekolah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan tidak memadai.
- 8.19 Pemerintah Kota Ambon belum melakukan penilaian atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan secara memadai, antara lain Pemerintah Kota Ambon belum menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang SPM Bidang Pendidikan. Hal tersebut terjadi karena Walikota Ambon sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan masih lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.
- 8.20 Pengadaan jaringan internet untuk kebutuhan sekolah-sekolah di Ambon pada TA 2009 tidak efektif dan berindikasi pemborosan keuangan daerah. Hal tersebut terjadi karena Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon tidak cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan pengadaan jaringan internet untuk kebutuhan sekolah-sekolah khususnya terkait capaian program (output) dan pengalokasian anggaran (input).
- 8.21 Dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD TA 2009 terlambat disalurkan, dan sebelum disalurkan pada Tahun 2010 telah digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan lain. Hal tersebut terjadi karena Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) dan Dinas Pendidikan Kota Ambon lalai dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja guru PNSD secara tepat waktu dan kebijakan Kepala BPKK menggunakan dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD untuk menutupi defisit Pemerintah Kota Ambon TA 2009.

- 8.22 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar
- memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memutakhirkan *database* sarana dan prasarana sekolah di Kota Ambon;
  - meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan SPM Bidang Pendidikan;
  - memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak cermat dalam menyusun kegiatan perencanaan pengadaan jaringan internet untuk kebutuhan sekolah-sekolah khususnya terkait capaian program (output) dan pengalokasian anggaran (input); dan
  - memberikan sanksi kepada Kepala BPKK dan Kepala Dinas Pendidikan yang lalai dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja guru PNSD dengan tepat waktu serta menetapkan kebijakan untuk menutup defisit tidak mengambil dana dari tambahan penghasilan guru.

### **PT Pos (Persero)**

- 8.23 Tujuan pemeriksaan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan transportasi dan antaran kiriman pos yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.
- 8.24 Hasil Pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan kegiatan pada PT Pos (Persero) belum sepenuhnya efisien dan efektif. Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.
- 8.25 Kegiatan transportasi kiriman pos oleh Perum Damri belum sepenuhnya efisien dan efektif, antara lain terdapat selisih lebih jarak tempuh sejauh 1.253,49 km untuk rute Jawa dan Jambi, kapasitas pemakaian angkutan trayek *Mail Processing Center* (MPC) Bandung–MPC Yogyakarta–MPC Surabaya tidak optimal, dan terdapat hak klaim keterlambatan kepada Perum Damri yang tidak ditagihkan. Hal tersebut terjadi karena Direksi PT Pos (Persero) dan *Vice President* Jaringan serta Manajer Transportasi belum sepenuhnya melaksanakan fungsi dan tugas pokok pengelolaan kegiatan transportasi sesuai ketentuan organisasi dan tata kerja kantor pusat.
- 8.26 Biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk pengantar kiriman pos di *Delivery Center* (DC) Jakarta Pusat, DC Tangerang, dan DC *Express* MPC Jakarta belum efisien, terdapat selisih lebih alokasi BBM dengan estimasi kebutuhan berdasarkan jarak tempuh antaran pertama. Hal tersebut terjadi karena Direksi PT Pos (Persero), Kepala Divisi Regional IV Jakarta dan Kepala MPC Jakarta belum menetapkan kebijakan dan aturan yang memadai mengenai BBM untuk antaran kiriman pos.

- 8.27 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Pos (Persero) agar
- meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok pengelolaan kegiatan transportasi antara lain, membuat analisis kebutuhan dan pemilihan jenis, kapasitas, jumlah armada, frekuensi, serta biaya transportasi pada jaringan primer darat; dan
  - mengevaluasi dan menetapkan kebijakan penggunaan BBM untuk antaran kiriman pos.

### **PT Jasa Raharja (Persero)**

- 8.28 Tujuan pemeriksaan untuk menilai efisiensi kegiatan penerimaan iuran wajib pesawat udara (IWPU) dan pengeluaran biaya administrasi dalam menghasilkan penerimaan IWPU dari semua operator pesawat udara dengan tepat waktu dan tepat jumlah serta keefektifan penerimaan IWPU.
- 8.29 Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan kegiatan pada PT JR belum sepenuhnya efisien dan efektif. Permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan antara lain sebagai berikut.
- 8.30 Kegiatan penerimaan IWPU dan pengeluaran biaya administrasi belum efisien dalam menghasilkan penerimaan IWPU secara tepat waktu dan tepat jumlah, antara lain pembebanan biaya administrasi IWPU tidak konsisten yang mengakibatkan pembebanannya melebihi ketentuan operasional minimal senilai Rp11,82 miliar. Hal tersebut terjadi karena Direksi PT JR tidak cermat dan konsisten dalam menetapkan dan menerapkan ketentuan operasional biaya administrasi yang berlaku serta tidak optimal melakukan pengendalian atas kegiatan pengelolaan IWPU, khususnya pembebanan biaya administrasi.
- 8.31 Kegiatan pemanfaatan IWPU secara optimal belum efektif sehingga PT JR berpotensi kehilangan hasil investasi senilai Rp33,58 miliar antara lain senilai Rp28,36 miliar dari piutang macet, Rp1,23 miliar dari IWPU yang terlambat diterima Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Semester I), serta senilai Rp3,99 miliar dari kekurangan IWPU selama Tahun 2009 dan 2010 (Semester I). Hal tersebut terjadi karena Direksi PT JR belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) dan uraian tugas yang jelas dalam struktur organisasi untuk penyelesaian piutang IWPU yang macet dan bermasalah, serta kantor cabang (KC) dan Kabag IWPU PT JR belum menagih dan menerima IWPU secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- 8.32 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT JR agar
- merevisi ketentuan mengenai biaya administrasi dan diselaraskan dengan kebijakan anggarannya serta secara konsisten membayar/membebankan biaya administrasi dengan mengacu kepada pedoman/ketentuan yang berlaku; dan

- membuat SOP dan uraian tugas yang jelas atas penyelesaian piutang IWPU yang macet dan bermasalah serta menginstruksikan kepada pengelola data IWPU untuk melaksanakan penerimaan IWPU secara tepat waktu dan tepat jumlah.

8.33 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.





## PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati.

- Eksaminasi ialah pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Dalam prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*), pemeriksa menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan PDTT atas 208 objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 61 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 92 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 44 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 9 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 2 objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 208 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp207,64 triliun.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan;
- pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bidang pendidikan;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus;
- pelaksanaan subsidi pemerintah;
- sistem pengendalian intern badan usaha milik negara;
- operasional badan usaha milik negara; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.



## BAB 9

### Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan

- 9.1 Pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi pendapatan perpajakan termasuk bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD).
- 9.2 Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan negara/daerah TA 2008-2010 pada 9 kementerian/lembaga (KL) di lingkungan pemerintah pusat dan dua entitas pada pemerintah daerah. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan PNBP yang dilakukan pada 9 KL yaitu Kementerian Luar Negeri, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BLU GBK/Setneg, BLU Kemayoran dan pemeriksaan PAD pada dua entitas yaitu Provinsi Maluku dan Kota Ambon.
- 9.3 Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan adalah senilai Rp16,77 triliun atau 97,61% dari realisasi pendapatan senilai Rp17,18 triliun. Total temuan pemeriksaan pengelolaan pendapatan senilai Rp813,10 miliar dan USD198.44 ribu (ekuivalen Rp1,70 miliar) merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai uang. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

#### Tujuan Pemeriksaan

- 9.4 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pendapatan negara/daerah adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait pendapatan negara/daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
  - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pendapatan negara/daerah telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hasil Pemeriksaan

- 9.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

## Sistem Pengendalian Intern

- 9.6 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan negara/daerah adalah untuk menilai apakah SPI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 9.7 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan pendapatan negara/daerah menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
  - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
  - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 9.8 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan pendapatan negara/daerah menunjukkan terdapat 67 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 40 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 21 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada lampiran 12.
- 9.9 Sebanyak 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 4 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
  - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
  - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 9.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AU, Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara, Lakespra, Lakesgilut dan Rumkitmun serta instansi terkait, terdapat perbedaan pencatatan penerimaan dari pasien yang dibuat oleh sekretariat medik dan bagian marketing dengan penerimaan pasien yang dibuat oleh Bendahara Lakespra Saryanto TA 2009 dan 2010 senilai Rp301,26 juta.
  - Di TNI AL, pelaksanaan pencatatan Yanmasum oleh Bendaharawan Yanmasum Rumkit TNI AL Dr. Ramelan TA 2009 dan 2010 tidak memadai yaitu kurang catat penerimaan Yanmasum, piutang dan hutang senilai Rp3,22 miliar.

- Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Postel, sistem informasi manajemen frekuensi tidak dapat menghasilkan output berupa laporan piutang TA 2009 dan 2010.

9.11 Sebanyak 40 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 12 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 11 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 11 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 5 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

9.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PPK Kemayoran, Perum Perumnas tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian TA 2008 s.d. 2010 sehingga BLU PPKK kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan senilai Rp111,27 miliar dan menanggung beban biaya air bersih rumah susun Perum Perumnas senilai Rp989,94 juta.
- Di PPK Kemayoran, pengenaan tarif sewa lahan TA 2008 s.d. 2010 tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang formula tarif sewa barang milik kekayaan negara sehingga BLU PPKK kehilangan potensi pendapatan senilai Rp11,14 miliar.
- Di Provinsi Maluku, terdapat penerimaan jasa pelayanan pada RSUD Dr. M. Haulussy, RSUD Tulehu, RSKD, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Laboratorium Kesehatan yang langsung dibagikan kepada dokter, perawat dan petugas pelaksana pelayanan kesehatan TA 2009 dan 2010 tanpa melalui mekanisme APBD senilai Rp3,19 miliar.

9.13 Sebanyak 21 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 14 entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 7 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

9.14 Kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Postel, prosedur pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) dan Direktorat Standardisasi (Ditstand) belum optimal pada TA 2009 s.d. 2010.
- Di TNI AD, Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi (UO) TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Kesdam dan Rumah Sakit di lingkungan Kodam VII/Wirabuana dan Kodam IV/Diponegoro di Makassar dan Semarang, pembentukan apotek unit khusus belum didasarkan pada hasil kajian dan belum mendapat persetujuan Kasad.
- Di Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku belum memiliki peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada badan diklat dan terdapat rekening untuk operasional kegiatan diklat yang tidak dilaporkan pada TA 2009 dan 2010.

#### **Penyebab**

9.15 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas dan kepala daerah belum membuat atau memperbaiki SOP yang mengatur secara tegas mengenai pengelolaan pendapatan negara/daerah.

#### **Rekomendasi**

9.16 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar pimpinan entitas dan kepala daerah memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan segera menyusun SOP pengelolaan pendapatan negara/daerah.

#### **Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan**

9.17 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 9.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 13 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 14.

**Tabel 9.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan**

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu valas)
<b><i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>			
1	Kerugian Negara/Daerah	7	589,92
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	4	604.782,84
3	Kekurangan Penerimaan	36	202.441,14
			USD198.44
4	Administrasi	11	-
5	Ketidakhematan	5	3.713,76
6	Ketidakefektifan	4	1.581,57
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>813.109,25</b>
			<b>USD198.44</b>

- 9.18 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 67 kasus senilai Rp813,10 miliar dan USD198.44 ribu (ekuivalen Rp1,70 miliar) sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada sembilan kementerian/lembaga dan dua entitas pemerintah daerah.

### **Kerugian Negara/Daerah**

- 9.19 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 9.20 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara/daerah meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- 9.21 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara/daerah menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 7 kasus senilai Rp589,92 juta yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp97,90 juta;
  - sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp117,26 juta;
  - sebanyak 2 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp321,63 juta; dan
  - sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp53,11 juta.

- 9.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AL, Rumkital Dr. Mintohardjo dan Ladokgi R.E. Martadinata, beberapa pertanggungjawaban keuangan pengeluaran dana Yanmasum TA 2009 dan 2010 tidak sesuai kondisi senyatanya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp273,23 juta.
  - Di TNI AL, Rumkital Dr. Mintohardjo dan Ladokgi R.E. Martadinata, pengadaan beberapa jenis barang cetak TA 2009 dan 2010 senilai Rp55,32 juta dan material kesehatan senilai Rp42,57 juta tidak dilaksanakan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp97,90 juta.
  - Di TNI AD, pembinaan kesehatan UO TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Kesdam dan Rumah Sakit di lingkungan Kodam VII/Wirabuana dan Kodam IV/Diponegoro di Makassar dan Semarang, terdapat kesalahan perhitungan uang lauk pauk pasien umum pada Rumah Sakit Tk. III Bhakti Wira Tamtama dan Wijayakusuma serta pembayaran peningkatan gizi pasien dinas dari dana Yanmasum pada Rumah Sakit Tk.III Pelamonia sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp67,62 juta.
- 9.23 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara/daerah senilai Rp589,92 juta tersebut, di antaranya telah ditindaklanjuti oleh TNI AL dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp79,63 juta.

#### **Penyebab**

- 9.24 Kasus-kasus kerugian negara/daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana kurang cermat melaksanakan tugas dan membuat pertanggungjawaban keuangan hanya sebagai sarana pencairan anggaran, serta kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian.

#### **Rekomendasi**

- 9.25 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan melakukan penyetoran atas kerugian negara/daerah melalui mekanisme ganti kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **Potensi Kerugian Negara/Daerah**

- 9.26 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 9.27 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara/daerah menunjukkan adanya potensi kerugian negara yaitu piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 4 kasus senilai Rp604,78 miliar.



9.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AD - Kodam III dan Kodam VI, terdapat piutang bermasalah pada Rumah Sakit Tk. III Ciremai, Rumah Sakit Tk. II Dustira, dan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Hardjanto TA 2009 dan 2010 minimal senilai Rp1,39 miliar.
- Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Postel, penyelesaian piutang PT Smart Telecom TA 2009 dan 2010 berlarut-larut senilai Rp603,16 miliar.
- Di TNI AU, Diskesau, RSPAU dr. Esnawan Antariksa, Lafiau, dan RSAU dr. Hardjolukito, terdapat klaim piutang RSPAU dr. Esnawan Antariksa sampai dengan Maret 2010 belum dibayarkan oleh para mitra kerja sama TA 2009 dan 2010 senilai Rp188,49 juta.

#### **Penyebab**

9.29 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana kurang optimal dalam melakukan penagihan dan proses penagihan piutang kepada pihak ketiga yang terlalu lama.

#### **Rekomendasi**

9.30 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan penagihan piutang lebih optimal dan menyampaikan laporan perkembangannya kepada BPK RI.

#### **Kekurangan Penerimaan**

9.31 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

9.32 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

9.33 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara/daerah menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 36 kasus senilai Rp202,44 miliar dan USD198.44 ribu (ekuivalen Rp1,70 miliar) yang terdiri atas

- sebanyak 27 kasus kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/ diterima/disetor ke kas negara senilai Rp54,92 miliar dan USD198.44 ribu (ekuivalen Rp1,70 miliar);

- sebanyak 7 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, senilai Rp146,51 miliar; dan
- sebanyak 2 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp1,00 miliar.

9.34 Kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Postel, Sistem Informasi Manajemen Frekuensi tidak dapat menghitung denda keterlambatan pembayaran BHP frekuensi radio TA 2009 dan 2010, sehingga denda dihitung manual yang mengakibatkan denda keterlambatan belum ditetapkan senilai Rp31,04 miliar.
- Di TNI AD, Kesda dan Rumkit di Lingkungan Kodam III/Siliwangi dan Kodam VI/Mulawarman, sisa PNBP TA 2009 dan 2010 senilai Rp774,11 juta tidak disetorkan ke kas negara sebagai PNBP tetapi digunakan untuk operasional RS.
- Di Provinsi Maluku, pengelolaan retribusi minuman beralkohol tidak memadai dan pada Tahun 2009 terjadi kurang penetapan senilai Rp1,00 miliar.

9.35 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara/daerah senilai Rp202,44 miliar dan USD198.44 ribu (ekuivalen Rp1,70 miliar) tersebut, di antaranya telah ditindaklanjuti oleh kementerian/ lembaga dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp9,36 miliar, tiga terbesar diantaranya adalah penyetoran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp6,57 miliar, Kementerian Luar Negeri senilai Rp1,32 miliar, dan TNI AD senilai Rp814,78 juta.

#### **Penyebab**

9.36 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan pengendalian dan kurangnya koordinasi antara para penanggungjawab kegiatan.

#### **Rekomendasi**

9.37 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

## Administrasi

- 9.38 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 9.39 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah), pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan .
- 9.40 Kasus penyimpangan administrasi juga meliputi penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 9.41 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara/daerah menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 11 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
  - sebanyak 4 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah);
  - sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
  - sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan; dan
  - sebanyak 3 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 9.42 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Luar Negeri, PNBK KJRI Kota Kinabalu terlambat disetor ke kas negara pada TA 2008 dan 2009 senilai Rp1,46 miliar.
  - Di TNI AD - Kodam III dan Kodam VI, pengadaan alat kesehatan NICU PICU TA 2010 senilai Rp394,06 juta dilakukan tidak melalui prosedur pelelangan umum.
  - Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, pengelolaan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon tidak tertib yaitu penyetoran retribusi Dinas Tenaga Kerja TA 2009 dan 2010 ke kas daerah tidak tepat waktu yakni dilakukan 1 s.d. 2 bulan berikutnya senilai Rp298,12 juta.

### Penyebab

- 9.43 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurangnya komitmen pimpinan entitas yang diperiksa untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaannya.

### Rekomendasi

- 9.44 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

### Ketidakhematan

- 9.45 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 9.46 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 9.47 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara/daerah menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan ketidakhematan sebanyak 5 kasus senilai Rp3,71 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp1,42 miliar; dan
  - sebanyak 4 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp2,28 miliar.
- 9.48 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AL- Binkes Ramelan, pengadaan obat non lafial TA 2009 dan 2010 di lingkungan Diskesal tidak memaksimalkan penggunaan obat generik dan menimbulkan pemborosan senilai Rp1,42 miliar.
  - Di TNI AD, Pembinaan Kesehatan UO TNI AD TA 2009 dan 2010 pembayaran jasa, transport, dan honor pada rumkit di lingkungan Kesdam IV/Diponegoro dan Kesdam VII/Wirabuana tidak mempunyai landasan hukum yang mengakibatkan pemborosan senilai Rp1,25 miliar.

### Penyebab

- 9.49 Permasalahan ketidakhematan terjadi karena belum adanya kebijakan di lingkungan TNI AL untuk menggunakan obat generik dan lemahnya pengawasan dan pengendalian di lingkungan masing-masing.

## Rekomendasi

- 9.50 Atas kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memaksimalkan penggunaan obat generik di jajarannya dan mengkaji obat-obat generik yang kualitasnya sebanding dengan obat spesialistiknya dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian di lingkungan TNI AD dan TNI AL.

## Ketidakefektifan

- 9.51 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 9.52 Kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 9.53 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan negara/daerah menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan sebanyak 4 kasus senilai Rp1,58 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp294,04 juta;
  - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp1,28 miliar; dan
  - sebanyak 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 9.54 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AD, Kesdam dan Rumkit di Lingkungan Kodam III/Siliwangi dan Kodam VI/Mulawarman, terdapat penggunaan dana pemeliharaan alat canggih TA 2009 dan 2010 senilai Rp270,00 juta di Rumkit Tk. IV Salak yang tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk keperluan operasional rumah sakit.
  - Di TNI AL, Dinas Kesehatan TNI AL, Lembaga Farmasi TNI AL Drs. Mochamad Kamal, Rumah Sakit Dr. Ramelan, penggunaan dana pemeliharaan alat canggih tidak sesuai peruntukan dan pengelolaannya untuk TA 2010 masih dipisahkan dari Yanmasum senilai Rp1,28 miliar yaitu untuk pengaspalan dan pemasangan *paving* di jalan rumah sakit.

**Penyebab**

- 9.55 Kasus-kasus ketidakefektifan terjadi karena adanya ijin dari Asrena Kasal perihal persetujuan pengalihan penggunaan anggaran dan Karumkit Tk. IV Salak tidak melaksanakan anggaran sesuai ketentuan.

**Rekomendasi**

- 9.56 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan penyimpangan penggunaan anggaran dengan meminta persetujuan perubahan alokasi anggaran kepada KPNK setempat.
- 9.57 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

## BAB 10

### Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja

- 10.1 Pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

#### Belanja Pemerintah Pusat

- 10.2 Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah pusat TA 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada 31 kementerian/lembaga (KL) yang meliputi 47 objek pemeriksaan.
- 10.3 Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat pada 31 KL adalah senilai Rp23,37 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp78,83 triliun. Total temuan pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp3,19 triliun merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kurang penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

#### Tujuan Pemeriksaan

- 10.4 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- SPI atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
  - penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - pelaksanaan kegiatan yang terkait pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku dengan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan
  - informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

## Hasil Pemeriksaan

- 10.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPs ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

## Sistem Pengendalian Intern

- 10.6 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah SPI atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 10.7 Hasil evaluasi atas SPI belanja menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
  - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
  - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 10.8 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 78 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 16 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 40 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 22 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 15.
- 10.9 Sebanyak 16 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 11 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
  - sebanyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
  - sebanyak 2 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
  - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.



10.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Chicago, *security deposit* sewa gedung kantor TA 2010 senilai USD207.52 ribu (ekuivalen Rp1,85 miliar) belum dicatat.
- Di Kementerian Sosial, persediaan buku cetakan dan majalah hasil pengadaan TA 2010 senilai Rp120,54 juta belum dimasukkan ke aplikasi persediaan.
- Di Kementerian Kominfo, Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.07 TA 2010 bukan merupakan kompilasi dari Laporan Keuangan Eselon I dan CaLK atas neraca tidak menjelaskan penyebab kenaikan/penurunan per pos realisasi anggaran dan pos neraca.

10.11 Sebanyak 40 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 11 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 18 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 1 kasus pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN/APBD;
- sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 5 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

10.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pertahanan, penganggaran BA 999.06 Belanja Lain-lain digunakan untuk kegiatan operasi pengamanan daerah rawan/pengamanan daerah perbatasan dan pengamanan pulau terluar TA 2009 senilai Rp399,99 miliar tidak sesuai ketentuan karena kegiatan operasi tersebut merupakan kegiatan rutin yang tiap tahun selalu dianggarkan dalam RKA-KL.
- Di Kementerian Kesehatan, rekanan tidak menginformasikan bahwa vaksin BCG yang diserahkan merupakan vaksin impor senilai Rp43,38 miliar, sehingga vaksin BCG tersebut tidak sesuai syarat kandungan lokal.
- Di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dana Belanja Lain-lain TA 2010 senilai Rp4,23 miliar digunakan untuk kegiatan TA 2011.

- 10.13 Sebanyak 22 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
  - sebanyak 16 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
  - sebanyak 2 kasus Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.
- 10.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Agama, proses dan realisasi pemberian bantuan sosial TA 2009 dan 2010 tidak sesuai proposal dan petunjuk teknis senilai Rp3,34 miliar.
  - Di Kementerian Luar Negeri, pengeluaran biaya representasi TA 2009 dan 2010 pada KJRI Sydney senilai AUD62.86 ribu (ekuivalen Rp528,96 juta) tidak sesuai SK Menlu No.011/KU/II/2000/02 tanggal 5 Januari 2000 tentang penggantian uang representasi bagi diplomat yang bertugas pada perwakilan RI di luar negeri.
  - Di TNI AD, rumah sakit di lingkungan Kodam IV dan VII belum menerima restitusi pelayanan kesehatan terintegrasi TA 2009 dan 2010 dari Puskesmas TNI senilai Rp457,05 juta.

### Penyebab

- 10.15 Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta SOP belum memadai.

### Rekomendasi

- 10.16 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

### Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 10.17 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 10.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 16 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 17.

Tabel 10.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	110	63.055,75
2	Potensi Kerugian Negara	5	1.105,22
3	Kekurangan Penerimaan	49	82.074,92
4	Administrasi	94	-
5	Ketidakhematan	18	34.163,66
6	Ketidakefisienan	2	2.703,95
7	Ketidakefektifan	31	3.014.095,62
<b>Jumlah</b>		<b>309</b>	<b>3.197.199,16</b>

10.18 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 309 kasus senilai Rp3,19 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada delapan KL.

### Kerugian Negara

10.19 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

10.20 Kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara, juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.

10.21 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 110 kasus senilai Rp63,05 miliar, yang terdiri atas

- sebanyak 11 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp1,60 miliar;
- sebanyak 2 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp44,01 juta;
- sebanyak 25 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp4,85 miliar;
- sebanyak 32 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp17,87 miliar;

- sebanyak 3 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp30,16 miliar;
- sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp543,16 juta;
- sebanyak 15 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp1,77 miliar;
- sebanyak 10 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5,07 miliar;
- sebanyak 9 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1,02 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain kerugian negara senilai Rp102,59 juta.

10.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kesehatan, kekurangan fisik dan kesalahan perhitungan volume dalam kontrak pengadaan obat dan alat kesehatan TA 2007 s.d. 2009, mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp4,78 miliar.
- Di Mabes TNI-Babek TNI, bekal minyak dan pelumas yang diterima tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak TA 2009, mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2,66 miliar.

10.23 Terhadap kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara tersebut, senilai Rp4,91 miliar telah ditindaklanjuti oleh KL dengan penyetoran ke kas negara, di antaranya dua terbesar dalam penyetoran ke kas negara adalah penyetoran oleh Mabes TNI senilai Rp2,98 miliar, dan Kepolisian RI senilai Rp718,32 juta.

### **Penyebab**

10.24 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, dan penerima barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang yang diterima. Selain itu, para pelaksana lalai dalam pelaksanaan tugas dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

10.25 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Potensi Kerugian Negara

- 10.26 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 10.27 Kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara.
- 10.28 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp1,10 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;
  - sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp754,20 juta;
  - sebanyak 1 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp351,02 juta;
  - sebanyak 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah; dan
  - sebanyak 1 kasus lain-lain potensi kerugian negara.
- 10.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di BKKBN, tanah seluas 1.257 m<sup>2</sup> senilai Rp754,20 juta di Jalan Perjuangan, Samarinda dikuasai oleh pihak lain.
  - Di Kementerian Kesehatan, alat kesehatan hasil pengadaan TA 2007, 2008, dan 2009 senilai Rp351,02 juta tidak diketahui keberadaannya.
  - PPK Gelora Bung Karno, aset yang dikelola secara karjasama dengan PT Putt-Putt dari Tahun 1999 s.d. 2009 belum diserahkan.

## Penyebab

- 10.30 Kasus-kasus potensi kerugian negara disebabkan entitas tidak memprioritaskan penyelesaian tanah sengketa dan mengelola barang secara tertib, PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

### Rekomendasi

- 10.31 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menyelesaikan tanah sengketa, mengelola barang inventaris secara tertib, dan memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

### Kekurangan Penerimaan

- 10.32 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 10.33 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi penerimaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 10.34 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 49 kasus senilai Rp82,07 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 46 kasus kekurangan penerimaan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp80,91 miliar;
  - sebanyak 2 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp967,67 juta; dan
  - sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp196,07 juta.
- 10.35 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Kesehatan, denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa TA 2007-2009 belum dipungut senilai Rp61,04 miliar.
  - Di DPR, denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan renovasi Rumah Jabatan Anggota DPR TA 2009 belum dipungut senilai Rp5,22 miliar, dan pajak penghasilan atas pembayaran tunai tunjangan kredit pembelian kendaraan bermotor perorangan Anggota DPR belum dipungut senilai Rp4,46 miliar.
  - Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PNBP fungsional dari kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan PNBP atas kegiatan pemeriksaan/pengujian hygiene perusahaan, keselamatan, dan kesehatan kerja TA 2009 dan 2010 kurang disetor ke kas negara senilai Rp1,40 miliar.

- 10.36 Terhadap kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara tersebut, senilai Rp1,05 miliar telah ditindaklanjuti oleh KL dengan penyetoran ke kas negara. Penyetoran terbesar dilakukan oleh Kepolisian RI senilai Rp789,69 juta.

#### **Penyebab**

- 10.37 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena rekanan tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, bendahara pengeluaran dan panitia penerima barang tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku, penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

#### **Rekomendasi**

- 10.38 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan bendahara pengeluaran dan panitia penerima barang untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan melakukan upaya penarikan atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkannya ke kas negara.

#### **Administrasi**

- 10.39 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 10.40 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
- 10.41 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara.

10.42 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 94 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 27 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 3 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 23 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara;
- sebanyak 4 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 2 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 19 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 4 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 7 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

10.43 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Sosial, penyaluran dana bantuan untuk rumah korban konflik TA 2010 senilai Rp174,76 miliar belum diterima penerima bantuan.
- Di Kementerian Kesehatan, hasil pengadaan barang TA 2009 senilai Rp79,85 miliar disimpan di gudang rekanan tanpa berita acara penitipan, dasar penagihan klaim biaya distribusi obat dan bahan habis pakai TA 2009 oleh PT PI (Persero) senilai Rp27,89 miliar belum dapat dipertanggungjawabkan, proses pengadaan kendaraan khusus ambulans dan peralatan kesehatan TA 2009 senilai Rp22,20 miliar tidak transparan.



- Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), proses penentuan penyedia barang/jasa TA 2009 senilai Rp26,00 miliar belum sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.

### Penyebab

- 10.44 Kasus-kasus penyimpangan administrasi terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para penanggung jawab kegiatan.

### Rekomendasi

- 10.45 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

### Ketidakhematan

- 10.46 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 10.47 Kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 10.48 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 18 kasus senilai Rp34,16 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 4 kasus pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan senilai Rp24,74 miliar; dan
  - sebanyak 14 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp9,42 miliar.
- 10.49 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di DPR, kemahalan harga renovasi Rumah Jabatan Anggota DPR TA 2009 senilai Rp3,13 miliar sehingga membebani keuangan negara. Kemahalan harga pengadaan foto copy, *filling cabinet*, dan mesin penghancur TA 2009 senilai Rp483,04 juta.
  - Di TNI AU, Kepala Lembaga Farmasi Angkatan Udara (Kalafiau) menerima bahan baku obat senilai Rp184,85 juta dari Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Kadiskesau) untuk produksi Tahun 2010, sedangkan sisa persediaan bahan baku di gudang masih mencukupi, sehingga persediaan bahan baku obat melebihi kebutuhan yang sebenarnya.

- Di Kementerian Kesehatan, pengadaan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP ASI) TA 2007 tidak tersalurkan dan kedaluwarsa senilai Rp168,73juta.

### Penyebab

- 10.50 Kasus-kasus ketidakhematan terjadi karena adanya kecenderungan memanfaatkan anggaran tanpa memperhatikan prinsip ekonomis, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

### Rekomendasi

- 10.51 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

### Ketidakefisienan

- 10.52 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 10.53 Kasus-kasus ketidakefisienan meliputi penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya, dan penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya.
- 10.54 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan 2 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefisienan senilai Rp2,70 miliar yakni penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya.
- 10.55 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AL-RS Dr. Ramelan, pembuatan obat jadi standar lafial TA 2009 yang dilaksanakan secara swakelola menghabiskan biaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga obat generik untuk jenis yang sama menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 302/ Menkes/SK/III/2008, sehingga pembuatan OJSL tidak efisien senilai Rp2,21 miliar.
  - Di TNI AU-RS Dr. Salamun, pemberian uang lauk pauk (ULP) pasien TA 2009 dan 2010 melebihi tarif senilai Rp490,61 juta.

### Penyebab

- 10.56 Kasus-kasus ketidakefisienan terjadi karena entitas menetapkan kebijakan pengadaan obat secara swakelola, dan merencanakan anggaran ULP yang cenderung diperbesar dengan memperhitungkan jumlah penderita berdasarkan hasil perkalian jumlah tempat tidur dengan indeks ULP dan jumlah hari dalam setahun.

### Rekomendasi

- 10.57 Terhadap kasus-kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar membuat kajian komprehensif mengenai peningkatan efisiensi dalam pembuatan obat jadi secara swakelola dan membuat rencana anggaran ULP pasien sesuai ketentuan.

### Ketidakefektifan

- 10.58 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 10.59 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 10.60 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan 31 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp3,01 triliun terdiri atas
- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp22,63 miliar;
  - sebanyak 6 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp13,05 miliar;
  - sebanyak 17 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp264,49 miliar;
  - sebanyak 4 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,71 triliun; dan
  - sebanyak 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp594,16 juta.
- 10.61 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perumahan Rakyat, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan TA 2010 senilai Rp2,68 triliun belum disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan masyarakat berpenghasilan rendah.

- Di Kementerian Kesehatan, alat kesehatan hasil pengadaan TA 2007 s.d. 2010 senilai Rp216,49 miliar dan vaksin reguler hasil pengadaan TA 2007 s.d. 2009 senilai Rp3,30 miliar belum dimanfaatkan.
- Di Mabes TNI-Babek, bekal alat perlengkapan satuan TA 2009 senilai Rp30,26 miliar terlambat didistribusikan kepada Denma Pasukan Pemukul Reaksi Cepat.
- Di BNPB, dana bantuan bencana senilai Rp22,63 miliar digunakan untuk kegiatan operasional dan pengadaan barang/jasa.

### **Penyebab**

- 10.62 Kasus-kasus ketidakefektifan terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai, menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan anggaran, PPK dan penanggung jawab kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pengawasan dan pengendalian belum optimal.

### **Rekomendasi**

- 10.63 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

### **Belanja Pemerintah Daerah**

- 10.64 Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2008, 2009, dan 2010 pada 29 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas 19 objek pemeriksaan pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, pemeriksaan atas belanja daerah juga meliputi 1 objek pemeriksaan atas belanja infrastruktur TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 9 objek pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada partai politik TA 2010 pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
- 10.65 Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 29 objek pemeriksaan adalah senilai Rp5,52 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp10,09 triliun. Total temuan pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp187,39 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

## Tujuan Pemeriksaan

- 10.66 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
  - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

## Hasil Pemeriksaan

- 10.67 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

## Sistem Pengendalian Intern

- 10.68 Pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah bertujuan antara lain menilai apakah SPI entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 10.69 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
  - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
  - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 10.70 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada 29 objek pemeriksaan menunjukkan adanya 27 kasus kelemahan SPI, yaitu 10 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 15 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 18.

- 10.71 Sebanyak 10 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
  - sebanyak 7 kasus proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai ketentuan.
- 10.72 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Bungo, Kerinci, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Kota Jambi, Provinsi Jambi, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik TA 2010 belum dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak informatif dan akuntabel.
- 10.73 Sebanyak 15 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, terdiri atas
- sebanyak 6 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
  - sebanyak 4 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
  - sebanyak 1 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD; dan
  - sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
- 10.74 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, APBD TA 2009 dan 2010 disusun berdasarkan pada perencanaan yang tidak realistis dan tidak berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak dapat mendukung pengeluaran daerah.
- 10.75 Sebanyak 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kasus berupa permasalahan entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
- 10.76 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tata cara pemberian bantuan sosial dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD belum ditetapkan dalam suatu keputusan kepala daerah.

### **Penyebab**

- 10.77 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, kurang cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas, pengawasan dan pengendalian kegiatan lemah, serta kepala daerah kurang cermat dalam membuat aturan pelaksanaan anggaran.

## Rekomendasi

- 10.78 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta segera membuat aturan pelaksanaan anggaran.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 10.79 Hasil pemeriksaan atas belanja pada 29 objek pemeriksaan menunjukkan adanya 370 kasus ketidakpatuhan senilai Rp187,39 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan pada Tabel 10.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 19 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 20.

Tabel 10.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	155	52.248,55
2	Potensi Kerugian Daerah	28	17.398,81
3	Kekurangan Penerimaan	44	17.163,86
4	Administrasi	87	-
5	Ketidakhematan	15	16.885,53
6	Ketidakefektifan	41	83.700,26
<b>Jumlah</b>		<b>370</b>	<b>187.397,02</b>

## Kerugian Daerah

- 10.80 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 10.81 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- 10.82 Kerugian daerah juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

10.83 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 155 kasus senilai Rp52,24 miliar, terdiri atas

- sebanyak 10 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp3,64 miliar;
- sebanyak 3 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp327,22 juta;
- sebanyak 67 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp34,40 miliar;
- sebanyak 41 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp5,84 miliar;
- sebanyak 12 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp5,21 miliar;
- sebanyak 7 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,62 miliar;
- sebanyak 8 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp394,13 juta;
- sebanyak 2 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp50,96 juta;
- sebanyak 4 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp528,16 juta; dan
- sebanyak 1 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp206,77 juta.

10.84 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Kalimantan Timur, kekurangan volume pada pelaksanaan 48 paket pekerjaan infrastruktur di Dinas PU TA 2009 dan 2010 senilai Rp5,87 miliar yang telah direalisasikan pembayarannya. Selain itu, terdapat pemahalan atas harga satuan pekerjaan pengadaan tiang pancang pengembangan poliklinik dan pengembangan gedung *private wings* dibandingkan dengan harga satuan pokok kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2009 senilai Rp4,00 miliar.
- Di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, terdapat kekurangan volume tiga pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas PU TA 2010 senilai Rp2,40 miliar.
- Di Provinsi Riau, kekurangan volume Pekerjaan Laston Lapis Aus (*asphalt concrete wearing course*), Laston Lapis Antara (*asphalt concrete binder course*), dan Lapis Agregat Kelas B pada pekerjaan pembangunan Jalan Bagan Jaya-Enok-Kuala Enok TA 2009 dan 2010 senilai Rp1,76 miliar.



- 10.85 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, senilai Rp1,31 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah, yaitu di antaranya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp500,00 juta, Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp497,58 juta, dan Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp177,10 juta.

#### **Penyebab**

- 10.86 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan dengan sengaja membuat berita acara prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tidak cermat dalam penyusunan HPS, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

#### **Rekomendasi**

- 10.87 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Potensi Kerugian Daerah**

- 10.88 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 10.89 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, serta pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah.
- 10.90 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 28 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp17,39 miliar, terdiri atas
- sebanyak 21 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp9,80 miliar;

- sebanyak 2 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp95,37 juta;
- sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain;
- sebanyak 1 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp36,58 juta;
- sebanyak 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp887,01 juta; dan
- sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp6,57 miliar.

10.91 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, terdapat rekening penerima dana pada Dinas PU TA 2010 yang tidak sesuai kontrak sehingga pencairan SP2D senilai Rp5,97 miliar berpotensi diterima oleh pihak yang tidak berhak dan berisiko adanya klaim oleh rekanan di kemudian hari.
- Di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, terdapat pekerjaan lapis agregat kelas C untuk kegiatan peningkatan jalan aspal ke hotmix pada Dinas PU TA 2010 senilai Rp2,05 miliar tidak sesuai spesifikasi kontrak namun baru dilakukan pembayaran sebesar 35% dari harga kontrak. Selain itu, terdapat kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi TA 2010 senilai Rp1,77 miliar yang belum sepenuhnya dibayarkan.

10.92 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan potensi kerugian daerah tersebut, senilai Rp278,21 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah, yaitu di Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp271,46 juta dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir senilai Rp6,75 juta.

### **Penyebab**

10.93 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

### **Rekomendasi**

10.94 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana dan

mempertanggungjawabkan uang/barang yang berpotensi hilang, serta melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

### **Kekurangan Penerimaan**

- 10.95 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 10.96 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu penerimaan negara/daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah.
- 10.97 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat 44 kasus kekurangan penerimaan daerah, yaitu penerimaan daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp17,16 miliar.
- 10.98 Kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp3,31 miliar dan jaminan pelaksanaan yang belum ditarik ke kas daerah senilai Rp1,68 miliar pada 22 paket pekerjaan dan 5 paket jasa konsultansi TA 2009 dan 2010 pada Dinas Bina Marga.
  - Di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sanksi keterlambatan pembangunan Pasar Tradisional Modern Bumi Salewangang TA 2009 dan 2010 belum dikenakan, sehingga denda senilai Rp2,59 miliar belum diterima.
  - Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, pelaksanaan tiga kegiatan dalam program peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Pulau Seribu TA 2010 belum selesai dan atas keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp2,55 miliar.
- 10.99 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara/daerah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp836,34 juta, yaitu di antaranya di Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp426,50 juta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp127,37 juta, dan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp121,16 juta.

### **Penyebab**

- 10.100 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan SKPD.

## Rekomendasi

- 10.101 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas daerah.

## Administrasi

- 10.102 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 10.103 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma.
- 10.104 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 10.105 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 87 kasus penyimpangan administrasi, terdiri atas
- sebanyak 57 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
  - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
  - sebanyak 19 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah;
  - sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
  - sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
  - sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
  - sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;

- sebanyak 1 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 3 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
- sebanyak 1 kasus penyimpangan administrasi lainnya.

10.106 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, proses perpanjangan waktu penyelesaian pelaksanaan 26 kontrak pekerjaan pada Dinas PU TA 2009 dan 2010 senilai Rp54,41 miliar belum didukung dengan dokumen yang memperkuat alasan diterbitkannya adendum sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, terdapat realisasi belanja daerah pada 16 SKPD TA 2009 senilai Rp15,77 miliar yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai.
- Di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua terdapat penggunaan anggaran belanja daerah TA 2008 dan 2009 senilai Rp7,57 miliar belum dipertanggungjawabkan.
- Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat proses pelelangan berindikasi dilakukan secara proforma dimana peserta pelelangan atas tiga paket pekerjaan pada RSUD AW Sjahranie TA 2009 dan 2010 merupakan satu grup perusahaan.

### **Penyebab**

10.107 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

10.108 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya masing-masing.

### **Ketidakhematan**

10.109 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

10.110 Ketidapatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya meliputi penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

10.111 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 15 kasus ketidakhematan senilai Rp16,88 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 5 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp898,83 juta; dan
- sebanyak 10 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp15,98 miliar.

10.112 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, terdapat perbedaan spesifikasi dan harga yang signifikan antara RAB dengan HPS pada paket kegiatan pengadaan bus Busway (*articulated bus*) untuk jenis pekerjaan *articulated joining* TA 2010 sehingga menimbulkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp9,15 miliar.
- Di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, terdapat pemborosan keuangan daerah senilai Rp2,63 miliar yang berasal dari pembayaran yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak lebih besar dari nilai daya produksi pada kegiatan penyediaan tenaga listrik TA 2009 dan 2010.
- Di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, harga satuan 16 paket pekerjaan konstruksi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga TA 2010 melebihi Standar Nasional Indonesia senilai Rp175,78 juta.

### **Penyebab**

10.113 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, panitia pengadaan kurang cermat dalam merencanakan kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

### **Rekomendasi**

10.114 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

### **Ketidakefektifan**

10.115 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

10.116 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

10.117 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 41 kasus ketidakefektifan senilai Rp83,70 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 19 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp27,06 miliar;
- sebanyak 10 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp9,89 miliar;
- sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp863,31 juta;
- sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp611,91 juta;
- sebanyak 7 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp45,26 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

10.118 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, bantuan keuangan alokasi dana desa (ADD) kepada pemerintah desa TA 2007 s.d. TA 2010 belum disalurkan senilai Rp31,13 miliar sehingga pemerintah desa se-Kabupaten Maros tidak dapat segera memanfaatkan dana ADD.
- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terdapat hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum Kota Ternate TA 2009 senilai Rp2,03 miliar belum dapat dimanfaatkan akibat kurangnya pasokan listrik dari PLN.
- Di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, dua pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan TA 2009 senilai Rp1,24 miliar belum digunakan karena belum memiliki SDM/petugas untuk ditempatkan sehingga tujuan pengadaan tidak tercapai.

**Penyebab**

- 10.119 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya disebabkan entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penetapan skala prioritas pembangunan, pelaksana proyek/kegiatan kurang tegas kepada rekanan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

**Rekomendasi**

- 10.120 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar kepala daerah menegur secara tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi kepada rekanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
- 10.121 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 11

### Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan

- 11.1 Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa tiga objek pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bidang pendidikan. Objek-objek pemeriksaan tersebut adalah dana pendidikan yang bersumber dari APBN terkait rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan dana tambahan penghasilan guru, serta dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan.

#### **Dana Pendidikan yang Bersumber dari APBN Terkait Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)**

- 11.2 Sekolah berstandar internasional adalah sekolah/madrasah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota *Organization for Economic Development (OECD)* dan/atau negara tertentu yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.
- 11.3 Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dijabarkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mensyaratkan bahwa delapan unsur yang harus dipenuhi adalah: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
- 11.4 Sekolah sasaran yang ditetapkan sebagai RSBI dan akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sumber dana APBN yang terkait RSBI adalah sejumlah sekolah yang ditetapkan sebagai RSBI oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, RSBI harus mengembangkan rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS).
- 11.5 Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Sumber Dana APBN TA 2008, 2009, dan 2010 yang terkait dengan RSBI pada SMPN 1 Jambi, SMPN 7 Jambi, SMKN 3 Jambi, dan SMKN 4 Jambi. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada empat sekolah tersebut senilai Rp3,40 miliar dan telah direalisasikan senilai Rp3,08 miliar. Adapun cakupan pemeriksaan BPK adalah senilai Rp2,92 miliar atau 95% dari realisasi anggaran dan temuan senilai Rp192,39 juta atau 6,5% dari cakupan pemeriksaan.

## Tujuan Pemeriksaan

11.6 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana RSBI adalah untuk

- menilai apakah SPI atas pengelolaan dana pendidikan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- menilai apakah dana pendidikan disalurkan dan diterima oleh sekolah penerima secara tepat jumlah, waktu, dan sasaran;
- menilai apakah penerimaan dan penggunaan dana pendidikan yang telah diterima oleh sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban dana pendidikan telah dibuat dan dilaporkan kepada entitas pemberi dana serta aset-aset hasil pelaksanaan kegiatan oleh sekolah telah dikelola sesuai ketentuan.

## Hasil Pemeriksaan

11.7 Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Di antara temuan tersebut adalah

- Manajemen sekolah belum menerapkan penilaian risiko terhadap akuntabilitas pengelolaan RSBI seperti monitoring potensi tumpang tindih pembiayaan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan dana masyarakat yang ditampung dalam satu rekening penampungan belum dilaksanakan, seperti melakukan revisi atas RKAS. Kenyataan di lapangan, RKAS langsung disesuaikan ketika ada perubahan tanpa melalui mekanisme persetujuan secara berjenjang.
- Sekolah tidak memiliki monitoring dan pengawasan atas penggunaan dana dalam bentuk laporan realisasi kegiatan sekolah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban masing-masing sumber pendanaan masih terpisah-pisah dan tidak ada koordinator yang ditunjuk untuk mengawasi keseluruhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada SMPN dan SMKN RSBI di Kota Jambi belum memadai mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp189,29 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,09 juta.

## Penyebab

11.8 Permasalahan SPI di antaranya terjadi karena Pimpinan Dinas Pendidikan kurang melakukan pembinaan dan koordinasi dalam menyusun RKAS serta kepala sekolah tidak mematuhi ketentuan penyusunan RKAS.

- 11.9 Kasus-kasus kerugian negara dan kekurangan penerimaan terjadi karena Pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Jambi kurang melakukan pengawasan atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana RSBI. Selain itu, kasus tersebut juga terjadi karena Kepala Sekolah SMKN 4 Jambi belum mengenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan.

#### **Rekomendasi**

- 11.10 Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Jambi agar memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan dan meningkatkan pengawasan.
- 11.11 Terhadap temuan kerugian negara dan kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Jambi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai melaksanakan tugasnya serta menyetorkan ke kas negara atas penggunaan uang untuk kepentingan pribadi dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

#### **Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru**

- 11.12 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 11.13 Kemendiknas telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru. Untuk meningkatkan kualifikasi guru antara lain dengan memberikan bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S-1/D-IV, sedangkan untuk meningkatkan kompetensi dilakukan melalui program sertifikasi profesi guru yang dimulai pada Tahun 2007 setelah diterbitkannya Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru.
- 11.14 Peningkatan profesionalisme guru harus diikuti peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, selanjutnya Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan prestasi.

- 11.15 Tunjangan profesi guru sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 36 Tahun 2007 menyatakan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Kemendiknas diberikan tunjangan profesi dengan ketentuan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan beban kerja yang sesuai dengan peraturan.
- 11.16 Tunjangan fungsional adalah pemberian dana tunjangan fungsional kepada guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri dan swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 11.17 Tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang dimaksud adalah penambahan penghasilan bagi guru PNSD yang masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru pada TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK guna meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya.
- 11.18 Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan dana tambahan penghasilan guru TA 2009 dan 2010 pada Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan instansi terkait. Jumlah anggaran yang dialokasikan masing-masing senilai Rp1,20 triliun dan Rp839,82 miliar serta telah direalisasikan masing-masing senilai Rp1,17 triliun dan Rp306,66 miliar.

### **Tujuan Pemeriksaan**

- 11.19 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2009 dan 2010 adalah untuk
- menilai apakah pelaksanaan kegiatan penyaluran tunjangan pada Eselon 1 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional telah didukung dengan penerapan sistem pengendalian intern yang memadai; dan
  - menilai apakah penyaluran tunjangan pada Eselon 1 PMPTK Kemendiknas dan Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari penganggaran, penetapan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

### **Hasil Pemeriksaan**

- 11.20 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- Terdapat kerugian negara atas kesalahan penyaluran dana subsidi tunjangan guru TA 2009 dan 2010 masing-masing senilai Rp3,53 miliar

dan Rp616,39 juta antara lain karena adanya pemberian tunjangan profesi, fungsional, dan tambahan penghasilan secara ganda; pemberian tunjangan fungsional meskipun telah menerima tunjangan profesi; pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada guru yang belum bersertifikat; serta pemberian subsidi tunjangan tambahan penghasilan kepada non guru.

- Terdapat indikasi kerugian negara senilai Rp3,22 miliar atas pemberian subsidi tunjangan profesi kepada 140 guru yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan karena tidak memenuhi persyaratan mengajar 24 jam tatap muka.
- Terdapat sisa dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD TA 2009 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Depok yang tidak disetor ke kas negara senilai Rp1,33 miliar.

### **Penyebab**

- 11.21 Kasus-kasus tersebut antara lain disebabkan pengelola dana dekonsentrasi tidak cermat dalam melakukan verifikasi data guru penerima subsidi tunjangan guru, Dirjen PMPTK tidak menaati ketentuan tentang penyaluran dana subsidi tunjangan fungsional. Selain itu, kasus tersebut juga terjadi karena bendahara lalai dengan tidak segera mengembalikan sisa dana subsidi tunjangan tambahan penghasilan ke kas negara.

### **Rekomendasi**

- 11.22 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai melaksanakan tugasnya serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas negara.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan**

- 11.23 DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah.
- 11.24 DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu. Kegiatannya diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar, meubelair serta pengadaan buku dan alat peraga pendidikan. Penetapan kebijakan penggunaan DAK Bidang Pendidikan melalui subsidi ke sekolah didasarkan pada pertimbangan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut (1) DAK dapat memperbaiki layanan publik di Bidang Pendidikan khususnya sarana dan prasarana belajar; (2) DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional,

dan akuntabel; (3) DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan; (4) DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat; dan (5) DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui jalur pendidikan.

11.25 Arah kebijakan DAK adalah sebagai berikut

- membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional;
- menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perbatasan, tertinggal/ terpencil, rawan banjir dan longsor kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata;
- mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi;
- meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
- meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai DAK dengan anggaran kementerian/lembaga (KL) serta kegiatan yang didanai dari APBD; dan
- program DAK Bidang Pendidikan difokuskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas yang rusak dan pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar.

11.26 Pengalokasian DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan data teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional. DAK disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) ke kas daerah. Organisasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di daerah melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, sekolah, dan komite sekolah. Pemerintah kabupaten/kota terlibat dalam penyaluran dana dari kas daerah ke rekening sekolah, sedangkan Dinas Pendidikan merupakan SKPD yang diberi delegasi wewenang untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan DAK. Sekolah bersama komite sekolah melaksanakan pekerjaan rehabilitasi fisik dan/atau pengadaan barang peningkatan mutu di sekolah.

11.27 Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban DAK Bidang Pendidikan TA 2007, 2008, 2009, dan Triwulan III 2010 yang dilakukan pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, dan 39 pemerintah kabupaten/kota pada 32 provinsi.

11.28 Anggaran DAK yang telah direalisasikan dalam TA 2008, 2009, dan 2010 (Triwulan III) masing-masing senilai Rp21,20 miliar, Rp24,70 miliar, dan

Rp12,02 miliar, sedangkan data total realisasi DAK TA 2007 tidak dapat disajikan oleh DJPK karena untuk DAK TA 2007 disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masing-masing daerah. Pelaksanaan DAK tersebut dilakukan dengan menggunakan metode swakelola, namun sejak TA 2010 metode pelaksanaan DAK tersebut diubah dengan mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Tujuan Pemeriksaan**

- 11.29 Pemeriksaan atas DAK Bidang Pendidikan bertujuan untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern atas pengelolaan DAK Bidang Pendidikan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
  - kebijakan DAK Bidang Pendidikan terkait dengan alokasi dan perencanaan sampai dengan metode penyaluran dan penggunaan dana cukup memadai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
  - pengalokasian DAK Bidang Pendidikan telah direncanakan melalui tahapan yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan didukung dengan penyediaan anggaran dana pendamping oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan;
  - DAK Bidang Pendidikan disalurkan dan diterima oleh sekolah penerima secara tepat jumlah, waktu, dan sasaran; dan
  - DAK Bidang Pendidikan telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai pedoman/ketentuan, serta aset-aset hasil pelaksanaan kegiatan dari DAK Bidang Pendidikan oleh sekolah negeri telah dimanfaatkan dan dikelola sesuai ketentuan.

### **Hasil Pemeriksaan**

- 11.30 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum dirancang dan dilaksanakan secara memadai sehingga kebijakan DAK Bidang Pendidikan belum sepenuhnya dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan juga masih ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui dari temuan pemeriksaan berikut ini.

### **Kebijakan Pemerintah**

- 11.31 Penetapan alokasi DAK Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2009 tidak didukung data teknis yang valid dan mutakhir antara lain berupa data jumlah ruang kelas yang rusak dan data jumlah SD yang tidak memiliki ruang perpustakaan. Selain itu, kriteria umum, khusus, dan teknis dalam pengalokasian DAK tidak diterapkan secara konsisten oleh pemerintah dan DPR. Hal ini berdampak pada alokasi DAK ke masing-masing daerah yang tidak tepat sasaran.

- 11.32 Dalam TA 2010, dengan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang APBN-P, terjadi perubahan kebijakan atas pelaksanaan DAK dari yang sebelumnya menggunakan metode swakelola menjadi metode pengadaan yang berpedoman pada ketentuan pengadaan barang dan jasa. Perubahan metode tersebut tidak segera diikuti dengan penetapan juknis. DAK yang telah disalurkan pada akhir Tahun 2010 sebagian besar tidak digunakan dan masih mengendap di kas daerah sehingga berpotensi digunakan untuk keperluan lain di luar DAK Bidang Pendidikan. Dengan demikian sebagian besar program DAK Bidang Pendidikan TA 2010 tidak tercapai.

### **Penyebab**

- 11.33 Kasus-kasus tersebut terjadi antara lain karena Mendiknas tidak cermat dalam menerapkan kriteria teknis yang telah ditetapkan, belum memiliki mekanisme yang memadai dalam mengumpulkan dan mengelola data terkait kondisi sekolah di setiap kabupaten/kota. Petunjuk teknis (juknis) DAK Bidang Pendidikan dan spesifikasi teknis alat peraga pendidikan yang ditetapkan terlambat juga menjadi penyebab tidak tercapainya program DAK Bidang Pendidikan.

### **Rekomendasi**

- 11.34 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Mendiknas untuk memperbaiki pengelolaan data teknis. BPK juga telah merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR agar meninjau kembali kebijakan yang mewajibkan Juknis DAK Bidang Pendidikan harus dikonsultasikan dan disetujui DPR.

### **Perencanaan dan Alokasi**

- 11.35 Alokasi dana pendamping pada 18 kabupaten/kota dan biaya administrasi umum pada 66 kabupaten/kota untuk DAK Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2009 lebih kecil dari ketentuan, sehingga cakupan kegiatan DAK Bidang Pendidikan menjadi terbatas, target penuntasan rehabilitasi gedung sekolah tidak maksimal dan kegiatan perencanaan, sosialisasi, serta pengawasan kurang memadai.
- 11.36 Alokasi DAK Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2009 pada 39 kabupaten/kota tidak sepenuhnya tepat sasaran karena terdapat sekolah rusak yang tidak mendapat alokasi DAK Bidang Pendidikan, sebaliknya sekolah yang berkondisi baik mendapat alokasi DAK Bidang Pendidikan. Hal ini mengakibatkan penuntasan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak belum tercapai.

### **Penyebab**

- 11.37 Kasus-kasus tersebut disebabkan
- kurangnya komitmen bupati/walikota untuk menyediakan dana pendamping dan biaya umum untuk kegiatan DAK Bidang Pendidikan; dan



- kelalaian bupati/walikota dan Kepala Dinas Pendidikan terkait dalam menentukan prioritas penerima DAK Bidang Pendidikan.

### **Rekomendasi**

- 11.38 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk berkoordinasi dengan Mendagri dan Mendiknas agar menyusun dan menerapkan kebijakan yang mengatur sanksi kepada pemda yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyediakan dana pendamping dan biaya administrasi umum.

### **Penyaluran**

- 11.39 Penyaluran DAK Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2009 dari kas daerah ke sekolah terlambat karena: (1) penyalurannya pada tujuh kabupaten/kota tidak secara langsung ke rekening sekolah; (2) terlambatnya penerbitan SP2D yang terjadi pada 28 kabupaten/kota; dan (3) terlambatnya pencairan SP2D yang terjadi pada 18 kabupaten/kota.
- 11.40 Penyaluran DAK Bidang Pendidikan ke 87 sekolah pada tujuh kabupaten/kota tidak sesuai dengan SK Penetapan Kepala Daerah, yaitu: (1) penyaluran yang lebih kecil dari SK Penetapan Kepala Daerah; (2) pemotongan PPN dan PPh yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang di antaranya senilai Rp668,18 juta belum disetor ke kas negara; dan (3) pemotongan biaya pengadaan buku, pembelian meubelair, dan administrasi senilai Rp11,12 miliar yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo dan Melawi.

### **Penyebab**

- 11.41 Kasus-kasus tersebut terjadi karena Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota tidak maksimal dalam penyaluran DAK Bidang Pendidikan dan tidak memedomani Juknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan.

### **Rekomendasi**

- 11.42 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati dan walikota agar memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan karena kurang memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. BPK juga merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar memberikan sanksi kepada para pelaksana kegiatan yang tidak memedomani Juknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan.

### **Pelaksanaan**

- 11.43 Kekurangan volume pekerjaan dalam pengadaan pekerjaan rehabilitasi pada 29 kabupaten/kota mengakibatkan adanya indikasi kerugian daerah senilai Rp4,20 miliar.

- 11.44 Terdapat pungutan minimal senilai Rp778,73 juta oleh pihak-pihak tertentu kepada sekolah dan potongan harga/rabat/bonus senilai Rp1,33 miliar yang diterima pengelola DAK Bidang Pendidikan dari pengadaan sarana peningkatan mutu pada beberapa kabupaten/kota yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah.

#### **Penyebab**

- 11.45 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena para pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan.

#### **Rekomendasi**

- 11.46 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati dan walikota agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menarik kembali pungutan dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan serta menyetorkan ke kas daerah, dan mempertanggungjawabkan/menyetorkan potongan harga/rabat/bonus.

#### **Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

- 11.47 Hasil pelaksanaan DAK TA 2007, 2008, dan 2009 pada 30 kabupaten/kota senilai Rp15,01 miliar belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya kebijakan penetapan jumlah minimal pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan tanpa mempertimbangkan kondisi/kebutuhan riil sekolah. Selain itu, beberapa kepala daerah tidak menyampaikan laporan triwulanan dan/atau laporan akhir DAK Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. TA 2009 kepada Menteri Pendidikan Nasional sehingga pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan DAK secara berjenjang tidak dapat dilakukan secara optimal dan berpengaruh pada pengalokasian DAK tahun anggaran berikutnya.
- 11.48 Pertanggungjawaban penggunaan DAK Bidang Pendidikan di 283 sekolah pada 12 kabupaten/kota senilai Rp11,55 miliar tidak didukung bukti yang lengkap sehingga tidak memenuhi asas pengelolaan keuangan negara/daerah berupa tertib administrasi, transparan dan akuntabel.

#### **Penyebab**

- 11.49 Kasus-kasus tersebut disebabkan
- juknis DAK Bidang Pendidikan menetapkan jumlah minimal pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan; dan
  - kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Daerah tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pertanggungjawaban dan pelaporan DAK Bidang Pendidikan.

**Rekomendasi**

- 11.50 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Mendiknas berkoordinasi dengan Mendagri dalam memberikan sanksi kepada daerah yang tidak menyampaikan laporan akhir.
- 11.51 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 12

### Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus

- 12.1 Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Papua sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.
- 12.2 Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya masyarakat Papua. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain.
- 12.3 Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.
- 12.4 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan otonomi khusus (Otsus) bagi Aceh dan Irian Jaya, maka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000 membuat Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam Ketetapan ini disebutkan undang-undang Otsus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai juga dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001.
- 12.5 Menindaklanjuti amanat kedua Ketetapan MPR tersebut DPR RI tanggal 22 Oktober 2001 menyetujui dan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Presiden Republik Indonesia sesuai kewenangan yang dimiliki tanggal 21 November 2001 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4151.

- 12.6 Untuk Provinsi Papua Barat pemberlakuan Otsus diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk pelaksanaan Otsus agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta infrastruktur. Hal tersebut disebabkan Provinsi Papua Barat telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak Tahun 2003, namun belum diberlakukan Otsus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- 12.7 Sesuai data Kementerian Keuangan diketahui dana Otsus dan tambahan infrastruktur yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat dari Tahun 2002 s.d. 2010 dengan penetapan senilai Rp28,84 triliun dan realisasi penyaluran senilai Rp28,84 triliun. Dari jumlah tersebut dialokasikan pada Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp14,52 triliun dan pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua senilai Rp10,84 triliun, serta pada Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010 pada pemerintah provinsi dialokasikan senilai Rp1,94 triliun dan pada pemerintah kabupaten/kota senilai Rp1,53 triliun. Rincian pengalokasian, disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 12.1. Pembagian Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

No.	Tahun	Papua		Papua Barat		Jumlah
		Digunakan Provinsi	Didistribusikan Ke Kabupaten/Kota	Digunakan Provinsi	Didistribusikan ke Kabupaten/Kota	
1	2002	829.512.500.000	552.770.000.000	Papua Barat baru mendapatkan alokasi dana otsus mulai Tahun 2009		1.382.282.500.000
2	2003	934.047.731.000	605.512.386.000			1.539.560.117.000
3	2004	657.417.943.000	985.200.000.000			1.642.617.943.000
4	2005	920.312.000.000	855.000.000.000			1.775.312.000.000
5	2006	1.839.353.200.000	1.648.930.800.000			3.488.284.000.000
6	2007	2.315.139.200.000	1.730.608.800.000			4.045.748.000.000
7	2008	2.021.142.897.420	1.899.000.000.000			3.920.142.897.420
8	2009	2.813.919.741.000	1.265.877.659.000	857.559.380.000	860.925.220.000	5.798.282.000.000
9	2010	2.196.154.788.000	1.298.710.000.000	1.083.182.615.600	671.759.436.400	5.249.806.840.000
		<b>14.527.000.000.420</b>	<b>10.841.609.645.000</b>	<b>1.940.741.995.600</b>	<b>1.532.684.656.400</b>	<b>28.842.036.297.420</b>

- 12.8 Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Otsus Tahun 2002-2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus dilaksanakan pada 15 entitas di Provinsi Papua, meliputi Provinsi Papua, Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura.
- 12.9 Sedangkan di Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada enam entitas meliputi Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan.

- 12.10 Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus adalah senilai Rp6,27 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp20,34 triliun. Total temuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus senilai Rp281,07 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

### **Tujuan Pemeriksaan**

- 12.11 Pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus bertujuan untuk menilai apakah
- SPI dalam pengelolaan dana Otsus telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
  - kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan dana Otsus telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - mengetahui apakah dana Otsus yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Papua dan Papua Barat serta penyaluran ke seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat telah tepat jumlah, tepat waktu dan tepat rekening;
  - penggunaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Otsus, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - terdapat temuan-temuan yang berulang dan belum ditindaklanjuti pada tahun sebelumnya.

### **Hasil Pemeriksaan**

- 12.12 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

### **Sistem Pengendalian Intern**

- 12.13 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;

- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
  - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.14 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus menunjukkan terdapat 75 kasus kelemahan SPI. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 24.
- 12.15 Sebanyak 75 kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut, terdiri atas
- 8 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
  - 42 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
  - 25 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 12.16 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, penganggaran dalam APBD TA 2007-2009 tidak mengacu pada rencana definitif senilai Rp13,17 miliar.
  - Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, penggunaan dana otsus TA 2010 pada Kabupaten Manokwari senilai Rp94,65 miliar tidak dilaporkan ke Provinsi Papua Barat.
  - Di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana otsus tidak tertib dan laporan yang dihasilkan tidak pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua (TA 2008) dan Provinsi Papua Barat (TA 2009).
  - Di Provinsi Papua dan Papua Barat, hasil pemeriksaan BPK sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal mengakibatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik yang belum sesuai rekomendasi atau dalam proses rekomendasi senilai Rp420,16 miliar dan yang belum ditindaklanjuti senilai Rp136,92 miliar menjadi berlarut-larut dan semakin bertambahnya permasalahan yang tidak diselesaikan setiap tahun, serta cenderung timbul permasalahan yang sama di tahun mendatang.

### **Penyebab**

- 12.17 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan serta belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.



## Rekomendasi

- 12.18 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 12.19 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam Tabel 12.2.

**Tabel 12.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus**

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	102	124.191,99
2	Potensi Kerugian Daerah	5	5.039,28
3	Kekurangan Penerimaan	19	5.350,11
4	Administrasi	36	-
5	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	4	1.258,88
6	Ketidakefektifan	52	145.235,12
	<b>Jumlah</b>	<b>218</b>	<b>281.075,41</b>

- 12.20 Dari tabel di atas dapat diungkapkan bahwa terdapat 218 kasus senilai Rp281,07 miliar sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada Lampiran 25 dan rincian per entitas dapat dilihat pada Lampiran 26.

## Kerugian Daerah

- 12.21 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 12.22 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

12.23 Hasil pemeriksaan atas dana otsus menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 102 kasus senilai Rp124,19 miliar terdiri atas

- sebanyak 16 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp25,51 miliar;
- sebanyak 4 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp1,65 miliar;
- sebanyak 49 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp54,94 miliar;
- sebanyak 7 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp264,69 juta;
- sebanyak 9 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp20,83 miliar;
- sebanyak 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp438,00 juta;
- sebanyak 4 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp268,23 juta; dan
- sebanyak 12 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp20,26 miliar.

12.24 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua, terjadi pemahalan harga atas pengadaan *solar sell*, televisi, radio, dan parabola TA 2010 pada Biro Pemerintahan Kampung yang berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp20,25 miliar.
- Di Provinsi Papua, terdapat indikasi kelebihan pembayaran atas pekerjaan *detail engineering design* PLTA Sungai Urumuka tahap I dan II di TA 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi senilai Rp8,64 miliar dan pekerjaan yang tidak dilakukan (fiktif) untuk tahap III di TA 2010 senilai Rp9,67 miliar.
- Di Provinsi Papua Barat, terdapat kekurangan volume pada pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan makanan tambahan (MP-ASI) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dan *buffer stock* TA 2010 pada Dinas Kesehatan senilai Rp8,14 miliar dan Rp1,79 miliar.
- Di Provinsi Papua, terdapat tiket perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, serta Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan manifes penerbangan Tahun 2010 dari PT Merpati Nusantara mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp1,16 miliar.

- 12.25 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, senilai Rp260,75 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah, yaitu pada Provinsi Papua Barat senilai Rp156,75 juta dan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua senilai Rp104,00 juta.

#### **Penyebab**

- 12.26 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, kurang cermat, belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

#### **Rekomendasi**

- 12.27 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 12.28 Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah melalui mekanisme ganti kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Potensi Kerugian Daerah**

- 12.29 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 12.30 Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah yaitu adanya kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 12.31 Hasil pemeriksaan atas dana otsus menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 5 kasus senilai Rp5,03 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 3 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp4,00 miliar;
  - sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp60,00 juta; dan
  - sebanyak 1 kasus lain-lain senilai Rp977,15 juta.

12.32 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua, kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan gedung Kantor Distamben tahap I dan pekerjaan pembangunan dermaga Depapre tahap V TA 2010 tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan senilai Rp3,88 miliar namun pembayaran atas pekerjaan baru dilaksanakan sebesar 74,79%.
- Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terdapat kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi fisik gedung (4 ruang kelas) SMAN 02 Manokwari TA 2010 senilai Rp103,74 juta dan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi fisik gedung (7 ruang kelas) SMAN 01 Manokwari TA 2010 senilai Rp10,92 juta.

#### **Penyebab**

12.33 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tugas, kurang menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

#### **Rekomendasi**

12.34 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan instansi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kekurangan volume pekerjaan dengan memperhitungkan pembayaran berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah atau menyelesaikan pekerjaan.

#### **Kekurangan Penerimaan**

12.35 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

12.36 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan yaitu adanya penerimaan daerah dan/atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah.

12.37 Hasil pemeriksaan atas dana otsus menunjukkan adanya kekurangan penerimaan daerah sebanyak 19 kasus senilai Rp5,35 miliar yaitu berupa kekurangan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah.

12.38 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua, denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan TA 2009 dan 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi, Biro Pemerintahan

Kampung Sekretariat Daerah, dan Dinas Perhubungan Provinsi belum ditetapkan dan dipungut senilai Rp3,59 miliar.

- Di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan TA 2008 dan 2009 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum belum disetor ke kas daerah senilai Rp438,25 juta.
- Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, denda keterlambatan atas kegiatan pengadaan obat TA 2008 dan 2009 di RSUD Kabupaten Manokwari belum ditetapkan dan disetorkan ke kas daerah senilai Rp163,14 juta.

### **Penyebab**

- 12.39 Kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu sesuai syarat-syarat yang diperjanjikan dalam kontrak, pejabat yang bertanggung jawab lalai, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

- 12.40 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah.

### **Administrasi**

- 12.41 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 12.42 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll, serta pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.

12.43 Hasil pemeriksaan atas dana otsus menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 36 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 21 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
- sebanyak 7 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dll.; dan
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.

12.44 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua, terdapat penggunaan dana otsus oleh lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial TA 2010 belum dipertanggungjawabkan senilai Rp47,66 miliar.
- Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terdapat penggunaan dana Otsus TA 2010 pada SKPD yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp13,16 miliar sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan pengadaan barang dan jasa TA 2008 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran dilakukan dengan cara pemilihan langsung senilai Rp5,32 miliar.

### **Penyebab**

12.45 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak menaati ketentuan serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

12.46 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid dan kepala daerah agar memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

### **Ketidakhematan**

- 12.47 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 12.48 Pada umumnya kasus ketidakhematan yaitu adanya pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 12.49 Hasil pemeriksaan atas dana otsus menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 4 kasus senilai Rp1,25 miliar yaitu berupa pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 12.50 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, terdapat perkiraan kuantitas yang tidak sesuai standar yang seharusnya, adanya perhitungan sewa alat yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dan peralatan yang tidak digunakan mengakibatkan terjadinya ketidakhematan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari dana otsus TA 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp741,12 juta.
  - Di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah TA 2008 dan 2009 melebihi standar harga bupati pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp133,11 juta.
  - Di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, pada TA 2008 terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh rekanan karena masalah transportasi alat berat ke lokasi tujuan sehingga dikategorikan *force majeure* mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp312,75 juta.

### **Penyebab**

- 12.51 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam perencanaan, pelaksanaan tugas dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

- 12.52 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di satuan kerjanya.

### Ketidakefektifan

- 12.53 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 12.54 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 12.55 Hasil pemeriksaan atas dana otsus menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 52 kasus senilai Rp145,23 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 13 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp69,04 miliar;
  - sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp320,00 juta;
  - sebanyak 18 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp35,60 miliar;
  - sebanyak 18 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp40,26 miliar; dan
  - sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 12.56 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sepatutnya dibiayai dari dana otsus sehingga penggunaan dana otsus TA 2008 dan 2009 belum sepenuhnya tepat sasaran senilai Rp14,32 miliar.
  - Di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, hasil kegiatan pembangunan sektor perhubungan TA 2008 berupa 1 unit bus air kapasitas 50 penumpang dan 1 unit kapal tipe *Landing Craft Tank* ukuran 200 GRT senilai Rp9,29 miliar belum dimanfaatkan.
  - Di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, hasil kegiatan program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah TA 2009 pada Dinas Pendidikan senilai Rp1,34 miliar belum dimanfaatkan.



- Di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdapat realisasi belanja bantuan keuangan TA 2008 dan 2009 belum disalurkan ke kampung-kampung mengakibatkan dana bantuan senilai Rp17,34 miliar belum dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan kampung/kelurahan.

### **Penyebab**

- 12.57 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam merencanakan dan lalai dalam melaksanakan kegiatan, tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

### **Rekomendasi**

- 12.58 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan memedomani ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 12.59 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 13

### Pelaksanaan Subsidi Pemerintah

- 13.1 Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan subsidi pada tujuh entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi jenis BBM tertentu (subsidi JBT) dan subsidi LPG tabung gas 3 kg pada PT Pertamina (Persero), subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN), dan subsidi pupuk pada PT Pupuk Sriwidjaya Palembang (PT Pusri Palembang), PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT Pupuk Gresik (PT PG), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM). Selain itu BPK juga memeriksa bantuan langsung benih unggul (BLBU) pada Kementerian Pertanian (Kementan), PT Sang Hyang Seri (Persero) (PT SHS), dan PT Pertani (Persero).
- 13.2 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah pada tujuh BUMN dan Kementerian Pertanian senilai Rp148,06 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp166,30 triliun. Total temuan pemeriksaan pelaksanaan subsidi pemerintah senilai Rp905,40 miliar dan koreksi subsidi senilai Rp1,45 triliun merupakan temuan kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

#### Tujuan Pemeriksaan

- 13.3 Pemeriksaan atas subsidi JBT dan subsidi tabung 3 kg pada PT Pertamina (Persero), dan badan usaha lainnya yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan JBT yaitu PT Petronas Niaga Indonesia (Petronas) dan PT Aneka Kimia Raya Corporindo (PT AKR), bertujuan untuk menilai kewajaran volume penjualan jenis BBM tertentu yang didistribusikan kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia selama Tahun 2010, menilai kewajaran nilai subsidi JBT dan subsidi LPG tabung 3 kg yang layak dibayar oleh Pemerintah, dan menilai ketaatan badan usaha pada peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang diterapkan.
- 13.4 Pemeriksaan atas subsidi listrik bertujuan untuk menguji dan menilai kewajaran nilai subsidi listrik TA 2010 yang layak dibayarkan pemerintah kepada PT PLN (Persero).
- 13.5 Pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PKT, PT Pusri Palembang, PT PK, PT PG, dan PT PIM, bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan jumlah subsidi pupuk TA 2010 dan menilai penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan tingkat pengecer resmi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 13.6 Pemeriksaan atas BLBU bertujuan untuk menilai penyaluran BLBU TA 2009 yang ditagihkan oleh pelaksana *Public Service Obligation* (PSO) (PT SHS dan PT Pertani) dan biaya pembinaan serta pendampingan telah memenuhi syarat untuk dibayar.

### Hasil Pemeriksaan

- 13.7 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Hasil pemeriksaan atas subsidi pemerintah selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga mengungkapkan SPI dan ketidakpatuhan pelaksanaan subsidi terhadap ketentuan perundang-undangan.

### Koreksi Subsidi

- 13.8 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi menunjukkan bahwa pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada tiga BUMN penerima subsidi senilai Rp5,56 triliun dari nilai yang telah ditetapkan dan Pemerintah lebih bayar kepada empat BUMN senilai Rp796,73 miliar, secara rinci diuraikan dibawah ini.
- 13.9 Hasil pemeriksaan atas subsidi JBT pada PT Pertamina (Persero), PT Petronas, dan PT AKR, menunjukkan bahwa jumlah subsidi JBT yang dihitung oleh PT Pertamina (Persero) senilai Rp61,07 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp6,25 miliar, sehingga jumlah subsidi JBT menjadi senilai Rp61,06 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT Pertamina (Persero), PT Petronas dan PT AKR senilai Rp60,60 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT Pertamina (Persero), PT Petronas dan PT AKR senilai Rp456,36 miliar.
- 13.10 Hasil pemeriksaan atas subsidi LPG tabung 3 kg pada PT Pertamina (Persero) menunjukkan bahwa jumlah subsidi yang dihitung oleh PT Pertamina (Persero) senilai Rp14.926,88 miliar dan dikoreksi kurang senilai Rp217,31 juta, sehingga jumlah subsidi LPG 3 kg menjadi senilai Rp14.926,66 miliar. Pemerintah sudah membayar kepada PT Pertamina (Persero) senilai Rp14.676,14 miliar. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT Pertamina (Persero) senilai Rp250,52 miliar.
- 13.11 Hasil pemeriksaan atas subsidi listrik pada PT PLN (Persero), menunjukkan bahwa semula PT PLN (Persero) menghitung subsidi listrik senilai Rp59,03 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp925,85 miliar, sehingga jumlah subsidi listrik menjadi senilai Rp58,10 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT PLN (Persero) senilai Rp53,33 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT PLN (Persero) senilai Rp4,77 triliun.
- 13.12 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PKT, menunjukkan bahwa semula PT PKT menghitung subsidi pupuk senilai Rp1,89 triliun dan dikoreksi positif senilai Rp59,07 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai

Rp1,95 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PKT senilai Rp1,87 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT PKT senilai Rp84,22 miliar.

- 13.13 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT Pusri Palembang, menunjukkan bahwa semula PT Pusri Palembang menghitung subsidi pupuk senilai Rp1,78 triliun dan subsidi pasokan (PT PKT, PT PIM, dan PT PK) senilai Rp891,36 miliar, dikoreksi kurang senilai Rp333,49 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp2,34 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT Pusri Palembang senilai Rp2,77 triliun. Dengan demikian subsidi lebih diterima PT Pusri Palembang senilai Rp431,55 miliar.
- 13.14 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PG, menunjukkan bahwa semula PT PG menghitung subsidi pupuk senilai Rp5,79 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp30,28 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp5,76 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PG senilai Rp 6,07 triliun. Dengan demikian subsidi lebih diterima PT PG senilai Rp305,86 miliar.
- 13.15 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PK, menunjukkan bahwa semula PT PK menghitung subsidi pupuk senilai Rp952,89 miliar dan dikoreksi kurang senilai Rp59,43 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp893,45 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PK senilai Rp905,25 miliar. Dengan demikian subsidi lebih diterima PT PK senilai Rp11,79 miliar.
- 13.16 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PIM, menunjukkan bahwa semula PT PIM menghitung subsidi pupuk senilai Rp241,73 miliar dan dikoreksi kurang senilai Rp43,55 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp198,18 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PIM senilai Rp245,70 miliar. Dengan demikian subsidi lebih diterima PT PIM senilai Rp47,52 miliar.
- 13.17 Hasil pemeriksaan atas bantuan langsung benih unggul (BLBU) pada Kementerian Pertanian, PT SHS, PT Pertani (Persero), dan Dinas Pertanian pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Kementan memperoleh alokasi anggaran BLBU pada TA 2009 senilai Rp1,08 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN murni TA 2009 senilai Rp791,99 miliar dan APBN-P TA 2009 senilai Rp291,35 miliar, dan direalisasikan masing-masing senilai Rp774,35 miliar dan Rp269,68 miliar. Pelaksanaan BLBU TA 2009 yang bersumber dari APBN-P TA 2009 terdapat tagihan dari pelaksana PSO senilai Rp9,00 miliar yang belum disetujui dan belum dibayarkan. Selain itu, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan BLBU, mengungkapkan adanya ketidakpatuhan oleh pelaksana PSO (PT SHS dan PT Pertani), karena belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pembayaran atas penyaluran BLBU dan biaya pembinaan serta biaya pendampingan.

## Sistem Pengendalian Intern

13.18 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 35 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada delapan entitas terdiri atas

- sebanyak 6 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
- sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai;
- sebanyak 4 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 1 kasus penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 19 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain.

13.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- PT PIM, pengendalian pembebanan biaya kantong pupuk bersubsidi kurang memadai, mengakibatkan kelebihan pembebanan senilai Rp1,15 miliar.
- PT Pertamina (Persero), terdapat ketidakakuratan pencatatan volume penerimaan dan penjualan BBM pada Pemasaran BBM Retail Region I dan II, mengakibatkan volume premium dan solar yang dilaporkan Pertamina tidak sesuai dengan data beberapa penyalur dan tidak menggambarkan jumlah penjualan sebenarnya.
- PT Pertamina (Persero), Pemasaran Industri dan Marine Region II menyalurkan solar bersubsidi kepada beberapa kapal dengan manifes yang tidak terinci, mengakibatkan subsidi JBT tidak tepat guna dan berisiko melampaui kuota yang telah ditetapkan.

### Penyebab

13.20 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan Bagian Akuntansi Biaya dan Material lalai dalam melakukan pengecekan *unit price* pada sistem logistik (*Maveric System*) pada saat membebaskan biaya kantong pupuk bersubsidi,

agen penyalur tidak mencatat dan mendokumentasikan data pembelian dan penjualan secara tertib dan akurat serta Pertamina BBM Retail Region I dan II tidak merekonsiliasi secara rutin antara data dari lembaga penyalur dengan data dalam sistem *Business Intelligent (back up data transaksi)* Pertamina, dan perusahaan pemilik kapal/perusahaan bongkar muat kapal menyajikan laporan rencana kegiatan bongkar muat (*manifest*) tidak lengkap dan jelas.

### Rekomendasi

- 13.21 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bagian Akuntansi Biaya dan Material, melakukan sosialisasi ulang tentang pembuatan pelaporan yang baik dan tertib, serta kapal/agen kapal melampirkan manifes bongkar dan muat secara rinci.

### Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 13.22 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan atas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan.
- 13.23 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan meliputi 39 kasus senilai Rp905,40 miliar sebagaimana disajikan dalam Tabel 13.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 28 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 29.

**Tabel 13.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO**

No.	Rincian Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<b><i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	2	384,78
2	Kekurangan Penerimaan	5	822.550,03
3	Administrasi	29	-
4	Ketidakefektifan	3	82.467,05
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>905.401,86</b>

- 13.24 Berdasarkan Tabel 13.1, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

### **Kerugian Negara/Perusahaan**

- 13.25 Kerugian negara (termasuk kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara) adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.26 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat dua kasus mengenai kerugian negara senilai Rp384,78 juta. Kasus tersebut terjadi di Kementerian Pertanian di antaranya mengenai kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada kegiatan pembinaan dan pendampingan BLBU TA 2009, mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp367,13 juta.

### **Penyebab**

- 13.27 Kasus kerugian negara karena petugas pelaksana perjalanan dinas lalai memperhatikan ketentuan yang berlaku, pejabat penandatanganan SPM dan pejabat pembuat komitmen (PPK) kurang cermat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pembinaan dan pendampingan dan tim verifikasi pelaksanaan BLBU tidak cermat memverifikasi atas bukti pendukung tagihan biaya pembinaan dan pendampingan dari PT SHS dan PT Pertani.

### **Rekomendasi**

- 13.28 Terhadap kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan agar melakukan tuntutan ganti rugi/pengembalian kerugian negara atas kelebihan biaya perjalanan senilai Rp367,13 juta, memberikan sanksi kepada petugas/pejabat/tim verifikasi yang melaksanakan kegiatan.

### **Kekurangan Penerimaan**

- 13.29 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan milik negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 13.30 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan, meliputi penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum atau tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ perusahaan dan adanya kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
- 13.31 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat lima kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan senilai Rp822,55 miliar. Kasus tersebut terjadi kelebihan pembayaran subsidi di PT Pusri Palembang senilai Rp431,55 miliar, PT PG senilai Rp305,86 miliar, dan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sultanbatara) belum menagih denda keterlambatan konstruksi, denda daya mampu, dan denda *specific fuel consumption* kepada PT Cogindo Daya Bersama (PT CDB) atas sewa pembangkit senilai Rp25,81 miliar.



### Penyebab

- 13.32 Kasus-kasus kekurangan penerimaan di antaranya karena PT Pusri Palembang dan PT PG kurang tepat dalam menghitung HPP pupuk subsidi dan nilai subsidi dalam laporan perhitungan *unaudited* dan Manajer Pembangkitan PT PLN (Persero) Wilayah Sultanbatara kurang cermat dalam memverifikasi tagihan sewa dan menghitung denda kepada PT CDB.

### Rekomendasi

- 13.33 Atas kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Pusri dan PT PG antara lain agar menyetor kelebihan pembayaran subsidi tersebut ke kas negara masing-masing senilai Rp431,55 miliar dan senilai Rp305,86 miliar serta Direksi PT PLN (Persero) memerintahkan GM PLN Wilayah Sultanbatara untuk menagih keterlambatan konstruksi, denda daya mampu, dan denda SFC kepada PT CDB atas sewa pembangkit.

### Administrasi

- 13.34 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/perusahaan milik negara, tidak mengurangi hak negara/perusahaan milik negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 13.35 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 29 kasus penyimpangan administrasi. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- perjanjian pinjam meminjam pupuk antara PT PIM dan PT Pusri Palembang untuk memenuhi kewajiban pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Wilayah NAD tidak disertai surat penugasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, mengakibatkan biaya angkut dan biaya bongkar atas pupuk yang di pinjam oleh PT PIM dari PT Pusri Palembang tidak dapat dibebankan sebagai biaya HPP pupuk bersubsidi;
  - asersi manajemen PT PKT dalam Laporan Subsidi Pupuk TA 2010 disajikan belum sepenuhnya berdasar informasi yang objektif, mengakibatkan laporan subsidi pupuk PT PKT TA 2010 tidak akurat dan tidak objektif serta adanya koreksi positif yang cukup material atas perhitungan HPP pupuk bersubsidi khususnya pupuk urea TA 2010 dan volume penyaluran pupuk urea dan zeorganik bersubsidi; dan
  - PT Pusri Palembang melaporkan volume penyaluran pupuk bersubsidi tidak berdasarkan laporan bulanan pengecer dan tidak memisahkan volume penyaluran berdasarkan sumber produk, mengakibatkan laporan volume penyaluran pupuk bersubsidi PT Pusri Palembang belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

### Penyebab

- 13.36 Kasus-kasus penyimpangan administrasi antara lain disebabkan Kompartemen Pemasaran PT PIM belum sepenuhnya memahami prosedur pemenuhan pasokan pupuk dari produsen lain, manajemen PT PKT belum cermat dalam membuat laporan subsidi, khususnya dalam perhitungan HPP pupuk bersubsidi, Direktorat Komersil d.h.i Departemen Renbangsar PT PKT belum cermat dalam membuat laporan jumlah penyaluran pupuk bersubsidi serta tidak melakukan rekonsiliasi data penyaluran seluruh KP secara rutin, Direktorat Pemasaran PT Pusri Palembang tidak memperhatikan ketentuan dalam membuat laporan volume penyaluran pupuk bersubsidi, dan Area Manajer Pusri Pemasaran Daerah Banten belum melaksanakan pengawasan dengan baik.

### Rekomendasi

- 13.37 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar setiap pemenuhan pasokan pupuk dari produsen lain memperhatikan ketentuan yang berlaku, memperbaiki metode perhitungan HPP termasuk biaya yang tidak diperkenankan (*undeductible cost*) dan penyusunan laporan subsidi pupuk sesuai ketentuan yang berlaku, mengadakan rekonsiliasi secara berkala data penyaluran pupuk bersubsidi, menyajikan volume penyaluran dalam laporan subsidi pupuk dengan formula perhitungan sesuai ketentuan, dan melakukan pemisahan pencatatan penjualan antara isi pupuk produksi sendiri dan pupuk produksi produsen lain.

### Ketidakefektifan

- 13.38 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.39 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan, meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai rencana yang ditetapkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.
- 13.40 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tiga kasus ketidakefektifan yang terjadi. Kasus-kasus tersebut antara lain terjadi pada PT PLN (Persero) yaitu PT Indonesia Power (PT IP) belum dapat mengoptimalkan persediaan *Marine Fuel Oil* (MFO) sebanyak 50,33 juta liter atau senilai Rp81,61 miliar di Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Suralaya.

### Penyebab

- 13.41 Kasus-kasus ketidakefektifan disebabkan manajemen PT IP belum mengkaji pemanfaatan persediaan MFO di UBP Suralaya ke unit pembangkit lain.

**Rekomendasi**

- 13.42 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT IP untuk melakukan analisis kebutuhan atas persediaan MFO di UBP Suralaya, dan segera mengalihkan ke pembangkit PT IP lainnya yang masih membutuhkan bila hasil analisis tersebut mengungkapkan bahwa UPB Suralaya tidak membutuhkan MFO.
- 13.43 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 14

### Sistem Pengendalian Intern Badan Usaha Milik Negara

- 14.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas sistem pengendalian intern (SPI) BUMN pada 33 entitas yaitu PT Pertamina, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang, PT Batan Teknologi (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kawasan Industri Medan, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Inhutani II (Persero), Perum Peruri, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PT Inhutani I (Persero), Perum Perhutani, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), PT Askrido (Persero), Perum Bulog, Perum Jamkrindo, PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Surveyor Indonesia (Persero), Perum Pegadaian, PT Sucofindo (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pos Indonesia (Persero).
- 14.2 Sasaran pemeriksaan SPI BUMN meliputi siklus atau kegiatan perusahaan yang menjadi aktivitas utama (*core bussines*) pada masing-masing BUMN yang diperiksa.

#### Tujuan Pemeriksaan

- 14.3 Tujuan pemeriksaan SPI pada 33 BUMN tersebut untuk menilai apakah SPI perusahaan telah dirancang dan diterapkan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN pasal 22 dan *Integrated Framework of Internal Control* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Khusus untuk BUMN Perbankan, selain dua peraturan tersebut di atas tujuan pemeriksaan meliputi juga kesesuaian atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 23 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

#### Hasil Pemeriksaan

- 14.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil penilaian atas SPI BUMN dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu berupa pernyataan tingkat kesesuaian SPI dengan kriteria yang ditetapkan dan temuan pemeriksaan yang merupakan hasil reuiu SPI yang dapat dikelompokkan pada temuan sesuai dengan *Integrated Framework of Internal Control* yang diterbitkan oleh *COSO*.

## Simpulan

- 14.5 Terhadap 33 BUMN yang direviu sistem pengendalian internnya, BPK memberikan simpulan **sesuai dengan kriteria yang ditetapkan** atas 11 BUMN, **sesuai dengan pengecualian atas kriteria yang ditetapkan** atas 13 BUMN, dan **tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan** atas 9 BUMN. Rincian simpulan tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 30.

## Hasil Reviu SPI

- 14.6 Hasil reviu SPI menunjukkan bahwa secara umum rancangan dan terapan SPI dalam segala hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Namun untuk beberapa BUMN terdapat kasus-kasus yang menyebabkan rancangan dan terapan SPI disimpulkan mendapatkan pengecualian dan beberapa disimpulkan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- 14.7 Sesuai dengan *COSO Framework*, pengendalian intern entitas direviu berdasarkan lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (*monitoring*). Pengendalian intern diobservasi dan direviu baik rancangan maupun penerapannya dan disimpulkan dengan berpedoman pada unsur-unsur tersebut.

## Lingkungan Pengendalian

- 14.8 Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap semua pihak (manajemen puncak, direktur, dan pemegang saham) terhadap pengendalian dan pentingnya organisasi. Hal tersebut diharapkan akan menciptakan budaya organisasi dan mempengaruhi kesadaran anggota organisasi/pegawai atas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian menjadi dasar dari empat komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian mencakup unsur integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, kebijakan dan praktik sumber daya manusia, kegiatan pengawasan, serta peran komite audit.
- 14.9 Hasil reviu terhadap lingkungan pengendalian ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.
- Di Perkebunan Nusantara VIII (Persero), manajemen tidak membuat *Statement of Corporate Intent* dan kontrak manajemen serta belum menerapkan *Key Performance Indicator* untuk masing-masing bagian atau unit kerja dan personal mengakibatkan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi pengelolaan perusahaan tidak terlaksana secara efektif.
  - Di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), perubahan struktur organisasi belum diikuti dengan penyesuaian uraian tugas dan *standard operating*

*procedure* (SOP) sehingga berpotensi mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaan tanpa didasari SOP yang jelas.

- Di PT Sucofindo (Persero), manajemen karir dan pemberian fasilitas bagi pejabat perusahaan serta pemberian insentif tidak dikaitkan dengan penilaian kinerja sehingga berpotensi menurunkan motivasi pegawai dalam bekerja, dan pemberian *car ownership program* dan insentif berpotensi tidak tepat sasaran.
- Di PT Batan Teknologi (Persero), tidak membuat perhitungan harga pokok produksi (HPP) berdasarkan pesanan atau berdasarkan jenis produk mengakibatkan perusahaan tidak memiliki data tentang HPP per pesanan ataupun per jenis produk yang akurat sehingga tidak dapat menghitung margin penjualan masing-masing produk.
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, manajemen tidak memiliki aturan mengenai pengambilan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan (di luar operasional penerbangan) sehingga tidak adanya pedoman yang pasti bagi manajemen dalam pengambilan tindakan yang menyimpang dari ketentuan.

## Penaksiran Risiko

- 14.10 Penaksiran risiko adalah identifikasi dan analisis atas risiko-risiko pencapaian tujuan, sebagai dasar untuk menentukan langkah dalam menangani risiko tersebut. Risiko merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian kejadian dan/atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian organisasi. Penaksiran risiko mencakup unsur penetapan tujuan perusahaan, penetapan tujuan operasional entitas, identifikasi risiko, analisis risiko, dan mengelola risiko akibat perubahan.
- 14.11 Hasil reviu terhadap penaksiran risiko ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), tidak terdapat kebijakan tertulis mengenai manajemen risiko dan identifikasi risiko mengakibatkan pengendalian risiko di lingkungan perusahaan belum memadai.
  - Di Perum Perhutani, identifikasi risiko yang terjadi akibat perubahan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan belum dilakukan sehingga pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan berpotensi tidak optimal.
  - Di PT Batan Teknologi (Persero), tidak memiliki rencana jangka panjang yang mengakibatkan perusahaan tidak mempunyai rencana strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
  - Di PT Jasa Marga (Persero), Tbk., pelaksanaan identifikasi risiko tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan risiko serta belum diterapkan pada

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sehingga perusahaan tidak memiliki rencana tindak lindung yang dapat mencegah timbulnya kerugian perusahaan akibat faktor-faktor di luar program kerja unit/divisi/biro.

- Di PT Sucofindo (Persero), perusahaan belum menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh mengakibatkan perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan, menanggung kerugian, menimbulkan piutang tak tertagih dan mengeluarkan beban/biaya yang sesungguhnya tidak diperlukan, sehubungan kurangnya alat kendali.

### Aktivitas Pengendalian

- 14.12 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat meyakinkan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mencakup unsur pelaksanaan reuiu oleh *top level management*, pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi, reuiu pengelolaan SDM, pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi, menetapkan dan memantau indikator serta ukuran kinerja, pemisahan tugas atau fungsi, otorisasi kepada personil tertentu dalam melakukan suatu transaksi, pencatatan atas transaksi, batasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan, serta pendokumentasian.
- 14.13 Hasil reuiu terhadap aktivitas pengendalian ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Penempatan *deposito on call* senilai Rp70,65 miliar dan USD930.00 ribu (ekuivalen Rp7,99 miliar) tanpa otorisasi dari direksi mengakibatkan pengendalian direksi berupa izin penempatan deposito setelah transaksi dilakukan, menjadi tidak efektif.
  - Di PT Jasa Raharja (Persero), pedoman investasi non belanja modal masih lemah karena mengatur perangkapan fungsi divisi investasi sebagai pelaksana investasi dan penyimpanan dokumen investasi mengakibatkan pengendalian terhadap hasil kegiatan investasi pada divisi investasi lemah dan berisiko terjadi penyalahgunaan aset investasi di divisi tersebut.
  - Di PT Inhutani II (Persero), belum memiliki SOP proses bisnis yang komprehensif sehingga ketidakjelasan mengenai kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas karena perbedaan antara struktur organisasi yang baru dengan yang terdapat dalam SOP lama yang belum diperbarui.
  - Di PT Askrido (Persero), kebijakan direksi tentang pencadangan piutang bermasalah atas akun tagihan pemulihan deposito senilai Rp50,36 miliar tidak mempunyai dasar yang memadai sehingga saldo beban penyisihan cadangan piutang berpotensi tidak akurat.



- Di Perum Bulog, pengelolaan aset tetap belum memadai mengakibatkan nilai aset belum sepenuhnya andal dan berpotensi rusak/hilang.

## Informasi dan Komunikasi

- 14.14 Informasi dan komunikasi merupakan sistem yang digunakan entitas untuk meyakinkan bahwa informasi diidentifikasi, diproses, dan dilaporkan oleh sistem informasi dan komunikasi meliputi penyediaan dan penyampaian informasi secara jelas dan seragam kepada semua pegawai entitas yang terlibat dalam pelaporan keuangan. Informasi dan komunikasi mencakup unsur informasi, komunikasi internal, komunikasi eksternal, serta bentuk dan alat komunikasi.
- 14.15 Hasil reviu terhadap informasi dan komunikasi ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., implementasi manajemen risiko dan sistem informasi komunikasi terkait perubahan teknologi sistem informasi belum memadai mengakibatkan operasional penerbangan terganggu, perusahaan kehilangan potensi pendapatan dan mengeluarkan biaya tambahan sebagai kompensasi bagi para calon penumpang yang tertunda atau batal diterbangkan.
  - Di PT Inhutani I (Persero), cetak biru (*blue print*) atas teknologi informasi belum dimiliki sehingga pengembangan/perbaikan sistem informasi perusahaan tidak mendukung rencana dan strategis serta aktivitas entitas.
  - Di PT Jasa Marga (Persero), Tbk., mekanisme pelaporan penyimpangan dan jalur komunikasi kepada pihak yang lebih tinggi di luar atasan langsung belum memadai sehingga karyawan takut atau sungkan untuk melaporkan adanya penyimpangan dan saluran komunikasi untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan menjadi tidak efektif.
  - Di PT Jasa Raharja (Persero), belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan direviu oleh pihak independen yang mengakibatkan informasi dan laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi kurang andal dan tepat waktu.
  - Di PT Batan Teknologi (Persero), rapat direksi dan dewan komisaris belum dilaksanakan secara rutin mengakibatkan kegiatan pengawasan dewan komisaris kepada direksi melalui rapat dewan komisaris dengan direksi tidak optimal dan pengambilan keputusan terkait kegiatan perusahaan dan permasalahan yang muncul tidak dapat diantisipasi dengan optimal sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

## Pemantauan (*Monitoring*)

- 14.16 Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, meliputi penilaian atas desain dan pengoperasian pengendalian. Pemantauan yang efektif meliputi pemantauan berkelanjutan (*on going monitoring*), evaluasi terpisah (*separate evaluation*), dan pelaporan atas kelemahan/kekurangan kepada komite audit/aparat pengawas.
- 14.17 Hasil reviu terhadap monitoring ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Inhutani I (Persero), *action plan* atas penilaian kinerja pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) untuk Unit Manajemen Hutan (UMH) Sambarata oleh Lembaga Penilaian Independen belum sepenuhnya dilaksanakan mengakibatkan perusahaan belum memperoleh sertifikat PHAPL dan berpotensi tidak memperoleh PHAPL jika *action plan* belum sepenuhnya dilaksanakan.
  - Di PT Jasa Marga (Persero), Tbk., mekanisme pemantauan terhadap realisasi program kerja, anggaran, dan kinerja unit kerja pada kantor pusat, belum ditetapkan dalam prosedur yang baku dan memadai, serta terintegrasi dengan *job description* unit kerja perusahaan sehingga ketidakjelasan mekanisme pemantauan dan evaluasi pencapaian realisasi program kerja, anggaran dan kinerja unit kerja serta pengendalian aktivitas internal tidak dapat berjalan secara efektif.
  - Di PT Batan Teknologi (Persero), perusahaan belum memiliki prosedur pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan oleh divisi terkait sehingga hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern belum efektif.
  - Di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., fungsi pemantauan dan evaluasi atas penetapan harga dan alokasi *seat* belum dilaksanakan mengakibatkan setiap hasil penerapan dan pelaksanaan strategi *tactical pricing* dan *seat allocation* yang dilakukan oleh *Unit Revenue Management* tidak teruji dan terukur efektivitasnya.

### Penyebab

- 14.18 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan karena para direksi dan pelaksana belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku dan kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

### Rekomendasi

- 14.19 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada para direksi agar membuat dan menerapkan SOP, meningkatkan pengendalian dan melakukan pemisahan fungsi, serta para pelaksana untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas.
- 14.20 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

## BAB 15

### Operasional Badan Usaha Milik Negara

- 15.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional BUMN pada tiga entitas yaitu PT Perikanan Nusantara Persero (PT Perinus), PT Pupuk Sriwidjaya Persero (PT Pusri), dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).
- 15.2 Cakupan pemeriksaan operasional atas tiga BUMN adalah senilai Rp3,23 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp4,64 triliun. Total temuan pemeriksaan operasional BUMN senilai Rp35,70 miliar dan EUR212.87 ribu (ekuivalen Rp2,65 miliar) yang merupakan temuan potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.
- 15.3 Secara umum tujuan pemeriksaan pada tiga BUMN tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan kegiatan investasi serta kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Hasil Pemeriksaan

- 15.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan atas operasional BUMN dapat dikelompokkan pada temuan yang berkaitan dengan SPI dan temuan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

#### Sistem Pengendalian Intern

- 15.5 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN mengungkapkan adanya 36 kasus kelemahan SPI pada tiga BUMN, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
  - sebanyak 7 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
  - sebanyak 11 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
  - sebanyak 7 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja;
  - sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
  - sebanyak 6 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
  - sebanyak 2 kasus lain-lain.

15.6 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Perum Peruri, pengadaan mesin *Super Orlof Intaglio* (SOI) produksi KBA Giori tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan Perum Peruri tidak dapat mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan berpotensi menanggung biaya penggantian *spare part* setelah *Certificate Of Acceptance* ditandatangani.
- PT Perinus (Persero), kelemahan sistem pengendalian dalam pengelolaan persediaan ikan di kantor Cabang Makasar yang menimbulkan biaya persediaan ikan hilang dan rusak senilai Rp547,21 juta, sehingga perusahaan mencadangkan biaya penyisihan kerugian persediaan ikan hilang dan rusak senilai Rp547,21 juta.
- Di PT Pusri (Persero), penetapan harga jual pupuk urea non subsidi Tahun 2009 tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga PT Pusri (Persero) kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan minimal senilai Rp5,68 miliar.

#### **Penyebab**

15.7 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan karena

- Perum Peruri, Direksi Perum Peruri kurang cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan mesin SOI serta tidak mengatur jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak;
- PT Perinus (Persero) Cabang Makasar tidak memiliki standar operasional penyimpanan yang baku dan tidak melakukan monitoring atas penyimpanan dan pengeluaran ikan dari gudang; dan
- PT Pusri (Persero), direksi tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan harga jual pupuk urea.

#### **Rekomendasi**

15.8 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- Direksi Perum Peruri, mempertanggungjawabkan pengadaan mesin SOI pada RUPS, yang dilakukan dengan perencanaan yang kurang cermat dan lalai mengatur jangka waktu penyelesaian pengadaan;
- Direksi PT Perinus (Persero), menyusun standar operasional penyimpanan dan perdagangan ikan, serta melakukan inventarisasi dan penilaian kembali persediaan secara periodik; dan
- PT Pusri (Persero), memperbaiki ketentuan tentang harga jual pupuk urea non subsidi dan melaksanakan secara konsisten.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 15.9 Selain kelemahan SPI hasil pemeriksaan operasional BUMN juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan meliputi 40 kasus senilai Rp35,70 miliar dan EUR212.87 ribu (ekuivalen Rp2,65 miliar) sebagaimana disajikan dalam Tabel 15.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 32 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 33.

Tabel 15.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Potensi kerugian perusahaan	6	3.890,85 EUR24.20
2	Kekurangan penerimaan	5	1.517,21
3	Administrasi	19	-
4	Ketidakhematan	4	10.113,34 EUR188.67
5	Ketidakefektifan	6	20.188,54
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>35.709,95 EUR212.87</b>

- 15.10 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam kelompok temuan potensi kerugian perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

### Potensi Kerugian Perusahaan

- 15.11 Potensi kerugian perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 15.12 Kasus-kasus potensi kerugian perusahaan yaitu adanya kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain.

- 15.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat enam kasus mengenai potensi kerugian perusahaan senilai Rp3,89 miliar dan EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp301,57 juta) terdiri atas
- sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp720,00 juta dan EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp301,57 juta);
  - sebanyak 2 kasus piutang/pinjaman berpotensi tidak tertagih senilai Rp1,31 miliar; dan
  - sebanyak 2 kasus lain-lain potensi kerugian perusahaan senilai Rp 1,85 miliar berupa penurunan nilai aset perubahan pekerjaan dalam kontrak.
- 15.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Perinus (Persero), piutang usaha PT Perinus Cabang Makasar senilai Rp1,10 miliar tidak tertagih berpotensi merugikan perusahaan.
  - Di PT Pusri (Persero), terdapat perubahan *drawing* pekerjaan pengadaan Gas Turbine Generator (GTG) *Retrofit* tanpa diikuti dengan perubahan *Purchase Order (PO)*, sehingga PT Pusri menderita kerugian atas sisa material (*cable*) dari pengadaan GTG *Retrofit* minimal USD129.36 ribu setara dengan senilai Rp1,21 miliar (USD1=Rp9.384,01).
  - Di Perum Peruri, terdapat pekerjaan *upgrade control of thermoregulating unit* yang dibatalkan namun tidak dituangkan dalam klausul addendum kontrak, sehingga pemborosan senilai EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp301,57 juta).
- 15.15 Kasus-kasus potensi kerugian perusahaan pada umumnya disebabkan
- PT Perinus (Persero), adanya tindakan penghilangan pendapatan perusahaan oleh Kepala Cabang Makasar periode sebelum Februari 2008;
  - PT Pusri (Persero), Kepala Proyek Pekerjaan Pemasangan beberapa peralatan instrumen dan Departemen Rancang Bangun dan Perekayasaan lalai tidak mengkomunikasikan adanya perubahan spesifikasi pekerjaan kepada bagian pengadaan atau unit yang bertanggung jawab atas aspek legal (penerbitan PO) dan itikad tidak baik dari rekanan yang merugikan perusahaan; dan
  - Perum Peruri, Bagian Pengadaan lalai mengurangi biaya instalasi atas pembatalan pekerjaan *upgrade control of thermoregulating unit*.

### Rekomendasi

- 15.16 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direksi PT Perinus (Persero) agar aktif mengupayakan penyelesaian melalui jalur hukum;
  - Direksi PT Pusri (Persero), meminta pertanggungjawaban dan mengenakan sanksi kepada Kepala Proyek Pekerjaan Pemasangan Peralatan Instrumen Pusri IB dan Departemen Rancang Bangun dan Perekayasaan; dan
  - Direksi Peruri segera meminta pengurangan biaya instalasi pada KBA Giori senilai EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp301,57 juta).
- 15.17 Atas kasus yang mengakibatkan potensi kerugian tersebut, telah ditindaklanjuti dengan memasukkan pengurangan biaya instalasi pada KBA Giori senilai EUR24.20 ribu (ekuivalen Rp301,57 juta).

### Kekurangan Penerimaan

- 15.18 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara d.h.i. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- 15.19 Kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 15.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat lima kasus penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp1,51 miliar.
- 15.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Perinus (Persero), perusahaan belum membayar pajak dan bea perolehan hak (BPHTB) atas pengadaan tanah tambak seluas 97,416 m<sup>2</sup> senilai Rp106,89 juta;
  - Di PT Pusri (Persero), pelaksanaan pengadaan DCS *Ammonia* dan PGRU P3 belum sepenuhnya sesuai kontrak, sehingga status pengadaan material menjadi berlarut-larut dan belum dikenakan denda senilai Rp81,48 juta; dan
  - Di Perum Peruri, terdapat kekurangan pembayaran PPN jasa luar negeri dan PPh Pasal 26 atas pekerjaan jasa pengadaan *wiping solution recovery system* dan denda atas keterlambatan pengiriman senilai Rp980,08 juta belum disetor ke kas negara.

- 15.22 Atas kasus kekurangan penerimaan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran oleh Perum Peruri ke kas negara senilai Rp451,76 juta.

### **Penyebab**

- 15.23 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan karena
- PT Perinus (Persero), Tim Teknis Cabang tidak teliti menyelesaikan kewajiban atas perolehan tanah lahan tambak;
  - PT Pusri (Persero), tidak serius menyelesaikan status pengadaan material; dan
  - Perum Peruri, Bagian Keuangan lalai dengan tidak menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN Jasa Luar Negeri dan PPh Pasal 26 dan tidak menagih denda keterlambatan pengiriman WSRS.

### **Rekomendasi**

- 15.24 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada
- PT Perinus (Persero), agar melunasi kewajiban pembayaran pajak dan BPHTB senilai Rp106,89 juta;
  - Direksi PT Pusri (Persero), segera mengenakan denda kepada PT Invesys Indonesia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
  - Direksi Perum Peruri, agar memerintahkan Bagian Keuangan untuk menyetor PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp451,76 juta dan menagih denda keterlambatan pengiriman senilai Rp528,32 juta.

### **Administrasi**

- 15.25 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 15.26 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll., dan penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.



15.27 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 19 kasus mengenai penyimpangan administrasi terdiri atas

- sebanyak 2 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 14 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya; dan
- sebanyak 2 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

15.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Perinus (Persero), kontrak pekerjaan *due diligence* dan penilaian *asset & liabilities* oleh PT Magna Transforma Utama (MTU) sebesar Rp671,00 juta belum sesuai ketentuan, sehingga PT Perinus tidak memperoleh harga kontrak yang terbaik atas pekerjaan tersebut;
- Di Perum Peruri, pengadaan mesin SOI produksi KBA Giori tidak sesuai ketentuan senilai Rp319,18 miliar, mengakibatkan mesin SOI tidak dapat diyakini sebagai mesin baru; dan
- Di Perum Peruri, proses pengadaan dan pemasangan *generator set* dan *transformer* senilai Rp12,91 miliar tidak sesuai ketentuan, sehingga kewajaran kualitas dan harga diragukan serta harga kontrak yang disepakati tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan harga perhitungan sendiri (HPS).

### Penyebab

15.29 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya disebabkan karena

- PT Perinus (Persero), tim pengadaan barang dan jasa *due diligence* tidak mampu melengkapi dokumen harga perhitungan sendiri dan Direksi kurang tegas melaksanakan ketentuan dalam perjanjian;
- Perum Peruri, Bagian Pengadaan tidak melakukan pengecekan mesin dan pengetesan fisik dan fungsinya; dan
- Perum Peruri, Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa (P3LPBJ) tidak melakukan evaluasi teknis dalam menentukan pemenang dan Direksi lalai memberikan persetujuan kontrak pengadaan yang tidak didasari dengan pertimbangan HPS.

### Rekomendasi

- 15.30 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direksi PT Perinus (Persero) agar memberikan sanksi kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa *due diligence* sesuai ketentuan ;
  - Direksi Perum Peruri agar mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait tidak dilakukannya pengecekan mesin dan pengetesan fisik dan fungsi; dan
  - Direksi Perum Peruri agar mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas tidak dilakukannya evaluasi teknis dan persetujuan kontrak tidak didasari HPS.

### Ketidakhematan

- 15.31 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 15.32 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan mengenai pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga.
- 15.33 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat empat kasus ketidakhematan, di Perum Peruri senilai Rp10,11 miliar dan EUR188.67 ribu (ekuivalen Rp2,35 miliar) di antaranya terdapat pengadaan bahan tinta *cartax CXDP* dan bahan tinta *intaglio* belum dimanfaatkan.

### Penyebab

- 15.34 Perum Peruri, kurang adanya koordinasi antara unit Seksi Batanta dan Bagian Pemasaran terkait adanya perubahan kebutuhan bahan tinta.

### Rekomendasi

- 15.35 Direksi Perum Peruri agar segera memanfaatkan sisa bahan tinta *cartax CXDP* dan bahan tinta *intaglio* dan memerintahkan Bagian Pemasaran meningkatkan fungsi koordinasi dengan Seksi Batanta.

### Ketidakefektifan

- 15.36 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.

15.37 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat enam kasus mengenai ketidakefektifan terdiri atas

- sebanyak 3 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp17,45 miliar; dan
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,73 miliar.

15.38 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- PT Perinus (Persero), pengadaan Kapal Princtara 01 oleh PT Sarana Fiberindo Marina (PT SFM) senilai Rp2,73 miliar belum sesuai spesifikasi kontrak dan terlambat penyelesaiannya, sehingga penyelesaian pembangunan kapal berlarut-larut dan perusahaan belum dapat memanfaatkan kapal untuk usaha.
- Pengadaan *air blast freezer cold storage* berkapasitas empat ton per hari yang pembiayaannya berasal dari PMN sebesar Rp335,00 juta belum dimanfaatkan untuk menyimpan hasil produksi *fish jelly*.
- Di PT Pusri (Persero), barang eks pembelian *direct charge* senilai Rp16,85 miliar disimpan di gudang titipan, sehingga dana yang tersimpan dalam bentuk barang eks pembelian *direct charge* belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan.

#### **Penyebab**

15.39 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut terjadi karena

- Direksi PT Perinus (Persero) banyak memberikan kelonggaran kepada PT SFM dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan kapal;
- PT Perinus (Persero) dalam merencanakan pengembangan usaha tidak memperhitungkan hambatan status lahan pabrik; dan
- Unit terkait dengan pengadaan belum melakukan perencanaan dengan baik dan pelaksanaan pengadaan material yang belum sepenuhnya memperhitungkan jangka waktu pengadaan dan kebutuhan material di PT Pusri (Persero). Selain itu, Komite Pengendalian dan Standarisasi Material & Peralatan (KPSMP) dan *user* belum secara rutin melakukan evaluasi keberadaan barang titipan yang sudah tersimpan lama di gudang.

#### **Rekomendasi**

15.40 Terhadap kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Direksi PT Perinus (Persero), agar meminta kepada PT SFM untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan kapal dan melengkapi

kekurangan perlengkapan kapal sesuai dengan perjanjian dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham atas realisasi investasi kapal tersebut;

- Direksi PT Perinus (Persero), agar mengkaji kembali kelayakan dari pengembangan usaha *fish jelly*; dan
- Direksi PT Pusri (Persero), agar memanfaatkan barang-barang *direct charge* yang tersimpan di gudang titipan.

15.41 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

## BAB 16

### Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

16.1 Selain tema-tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester I Tahun 2011 BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya pada 16 objek pemeriksaan yaitu 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, dan 10 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD.

#### Pemerintah Pusat

16.2 Lima objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah pusat, rinciannya adalah sebagai berikut.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, Pembangunan Irigasi Tersier Blok-C (Paket 13: LCB 7) Muncak Kabau.
- Di Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tahun 2009 dan 2010.
- Di Kementerian Keuangan dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Pengelolaan Sisa Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

#### Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16.3 Satu objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan BUMN adalah di PT Kereta Api Indonesia (Persero), Pengelolaan Aset Non Produksi TA 2008 dan TA 2009.

#### Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

16.4 Sepuluh objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan BUMD, rinciannya adalah sebagai berikut.

- Di PD Pasar Kota Medan, Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan untuk Tahun Buku 2009 dan 2010.
- Di PT Bank Riau Kepri, Operasional PT Bank Riau Kepri Tahun 2008, 2009, dan 2010.
- Di PT Bumi Laksamana Jaya, Kegiatan Operasional PT Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2007, 2008, 2009, dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Di PT Permodalan Ekonomi Rakyat, Kegiatan Operasional PT Permodalan Ekonomi Rakyat Tahun Buku 2009 dan 2010 di Pekanbaru.

- Di PT Bank Papua, Pengelolaan Operasional PT Bank Papua Tahun 2009 dan 2010 (Semester I).
- Di RSUD Dok II Jayapura, Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD Dok II Jayapura Tahun 2008, 2009, dan 2010 sampai dengan November.
- Di PD Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Jakarta Tourisindo, Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2009 dan 2010 di Jakarta.
- Di PD Sarana Pembangunan Muara Enim, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pengelolaan Lapangan Selo dan Betun.

16.5 Cakupan pemeriksaan atas 16 objek pemeriksaan tersebut, disajikan pada Tabel 16.1. di bawah ini.

**Tabel 16.1. Cakupan Pemeriksaan PDDT Lainnya**

Entitas yang Diperiksa	Cakupan Pemeriksaan (miliar Rp)	Total Temuan (miliar Rp)	% Temuan
1	2	3	4 = 3/2 x 100%
Pemerintah Pusat	1.373,16	14,00	1,02%
BUMN	-	209,73	-
BUMD	986,82	197,65	20,03%
<b>Jumlah</b>	<b>2.359,98</b>	<b>421,39</b>	<b>17,86%</b>

### Hasil Pemeriksaan

16.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

### Pemerintah Pusat

16.7 Hasil pemeriksaan atas lima objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan adanya 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp14,00 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakhematan.

### Kementerian Pekerjaan Umum

16.8 Pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan irigasi tersier Blok-C (Paket 13: LCB 7) Muncak Kabau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 s.d. 2010 bertujuan untuk menilai apakah proses pengadaan jasa konstruksi, pelaksanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 16.9 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya rekanan yaitu PT MJS telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran atas perjanjian kerja sama (kontrak) yang mengakibatkan pembangunan irigasi tersier Blok-C (Paket 13: LCB 7) Muncak Kabau terbengkalai dan uang muka untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dikembalikan dan jaminan uang muka atas pelaksanaan pekerjaan tersebut senilai Rp6,85 miliar tidak bisa dicairkan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

**Penyebab**

- 16.10 Permasalahan tersebut disebabkan PT MJS tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dan sengaja menghalangi proses pencairan jaminan uang muka.

**Rekomendasi**

- 16.11 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum agar menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Air segera menyelesaikan masalah ini sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam kontrak.

**Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara, Badan Pertanahan Nasional, dan Mahkamah Agung**

- 16.12 Pemeriksaan atas Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) pada BKN, BPN dan MA antara lain bertujuan menilai apakah BKN, BPN, dan MA telah mengelola sistem informasi kepegawaian secara memadai untuk menghasilkan informasi kepegawaian yang andal.

- 16.13 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut. Menurut *database* BKN, PNS di BPN per 30 Juni 2010 sebanyak 23.085 pegawai dan PNS di MA sebanyak 31.069 pegawai. Namun menurut *database* BPN, jumlah PNS BPN sebanyak 21.899 pegawai atau lebih kecil sebanyak 1.186 pegawai (5,14%). Menurut *database* MA, jumlah PNS MA sebanyak 33.281 pegawai atau lebih besar 2.212 pegawai (7,12%). Hal ini terjadi karena SIK yang dibangun oleh BPN dan MA tidak terintegrasi dengan SIK di BKN.

**Penyebab**

- 16.14 Kasus-kasus ketidaksesuaian data PNS tersebut disebabkan karena tidak ada proses rekonsiliasi data pegawai antara BKN dengan MA dan BPN, serta MA dan BPN belum menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang dibangun BKN.

**Rekomendasi**

- 16.15 BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan Lembaga agar segera melakukan klarifikasi dan rekonsiliasi data PNS, dan BKN hendaknya segera mensosialisasikan penggunaan SAPK kepada MA dan BPN.

## PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

- 16.16 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Sisa Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) antara lain bertujuan :
- menilai apakah pengelolaan sisa aset eks BPPN telah dikelola sesuai dengan ketentuan serta kebijakan yang ditetapkan; dan
  - menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan sisa aset eks BPPN.
- 16.17 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- Terdapat aset properti eks BPPN tidak ditemukan fisiknya dan telah dimanfaatkan oleh pihak lain; dan
  - Terdapat kekurangan penerimaan hasil lelang aset properti Tahun 2009 senilai Rp402,21 juta.

### Penyebab

- 16.18 Permasalahan tersebut disebabkan ketidaktegasan Kementerian Keuangan dalam melakukan pengelolaan sisa aset eks BPPN. Proses inventarisasi, baik dokumen maupun fisik dilakukan pada tahun 2009, padahal masa tugas BPPN berakhir pada tahun 2004 dan belum sepenuhnya melakukan tindakan atas aset properti yang dikuasai/dihuni pihak lain. Selain itu, kasus tersebut juga terjadi karena pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak sepenuhnya memahami ketentuan bahwa hasil penjualan aset properti eks kelolaan PT PPA tidak dikenakan pemotongan PPh dan merupakan lelang aset non eksekusi.

### Rekomendasi

- 16.19 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Kekayaan Negara melakukan penyelesaian dan pengamanan terkait permasalahan aset properti sisa aset eks BPPN serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk segera menyelesaikan kekurangan penerimaan negara dari hasil lelang aset properti.

## BUMN

- 16.20 Lingkup pemeriksaan pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) meliputi penerimaan pendapatan Tahun 2008 dan 2009 yaitu pendapatan yang bersumber dari pengelolaan aset non produksi yang meliputi penerimaan kerjasama operasi dan penyewaan lahan/bangunan, serta pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki PT KAI.



- 16.21 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai keandalan rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern pada aset non produksi perusahaan, kecurangan, dan penyimpangan ketentuan perundang-undangan serta ketidakpatutan aktivitas bisnis perusahaan.
- 16.22 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- PT KAI belum memperoleh pendapatan kompensasi minimal senilai Rp88,36 miliar dari KSO perjanjian pemanfaatan lahan di kawasan emplasemen stasiun selama 20 s.d. 30 tahun untuk pengembangan kawasan bisnis, perhotelan, dan/atau bangunan lain. Dari 13 perjanjian KSO yang ditandatangani, hanya 2 KSO yang sudah operasional, 2 KSO dalam proses pelaksanaan, dan 9 KSO lainnya stagnan.
  - Calon investor telah memanfaatkan lahan PT KAI tanpa dilandasi perjanjian KSO dan/atau persetujuan Dewan Komisaris/Menteri Negara BUMN sehingga PT KAI belum dapat menerima hak kompensasi senilai Rp48,06 miliar.
  - Tanah PT KAI seluas 316.617,68 m<sup>2</sup> dikuasai dan/atau disertifikatkan atas nama instansi pemerintah dan masyarakat/swasta akibatnya PT KAI berpotensi kehilangan hak atas tanah minimal senilai Rp37,69 miliar.

#### **Penyebab**

- 16.23 Kasus-kasus tersebut antara lain disebabkan tidak adanya itikad baik dari mitra KSO untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, PT KAI tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap investor yang tidak mematuhi *memorandum of understanding* (MoU). Selain itu, kasus-kasus tersebut juga terjadi karena Direksi PT KAI lalai mengamankan aset perusahaan.

#### **Rekomendasi**

- 16.24 BPK telah merekomendasikan kepada Direksi dan Komisaris PT KAI agar meninjau ulang KSO yang macet dan kelangsungan kerjasamanya, memperbaiki metode pemilihan mitra KSO untuk menjamin kelangsungan KSO, serta meningkatkan upaya pemilikan tanah yang dikuasai/dimiliki pihak lain melalui koordinasi dengan instansi terkait.

#### **BUMD**

- 16.25 Hasil pemeriksaan atas sepuluh objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan BUMD menunjukkan adanya 99 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp197,65 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

16.26 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Bank Riau Kepri, pembayaran tantiem dan jasa produksi tidak dilakukan sesuai dengan yang dianggarkan dan disahkan RUPS sehingga terdapat kelebihan pembayaran tantiem dan jasa produksi Tahun 2007, 2008, dan 2009 senilai Rp27,13 miliar.
- Di PT Bank Riau Kepri, penyaluran kredit investasi kepada pengusaha kecil di antaranya senilai Rp19,73 miliar diberikan kepada petani/pedagang anggota lima koperasi/asosiasi dengan kategori macet berpotensi merugikan daerah. Hal ini disebabkan Pimpinan dan Bagian Kredit Cabang Pembantu Rumbai kurang cermat dan hati-hati serta tidak mengikuti prosedur dalam menganalisis dan menyetujui kredit.
- Di PD Pasar Jaya, pada pelaksanaan proyek Pembangunan Pasar Mayestik diketahui bahwa PT MP belum membayar kewajiban senilai Rp5,37 miliar yang terdiri atas pembayaran atas kompensasi kerja sama, biaya pengawasan, biaya pengendalian teknis, biaya sewa lahan tempat penampungan, dan biaya pengelolaan pasar yang telah jatuh tempo. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti PT MP dengan penyetoran uang senilai Rp4,75 miliar.
- Di RSUD Dok II Jayapura, penerimaan yang berasal dari ruangan bedah sentral, ruangan rawat inap super VIP, ruangan kebidanan, dan ruangan ICU tidak disetorkan ke kas daerah sehingga terdapat kekurangan penerimaan daerah senilai Rp3,66 miliar.

16.27 Laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

## HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran, maka dalam IHPS dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. Dalam IHPS I Tahun 2011 disajikan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 yang disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BHMN, dan badan lainnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, status tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.

Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah rekomendasi atas temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, rekomendasi untuk menagih kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/pemungutan harus disetor ke kas negara/daerah, maka rekomendasi tersebut dinyatakan "telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi" jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke kas negara/daerah dan BPK telah menerima serta memvalidasi bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut rekomendasi tidak diterima dan/atau baru diterima sebagian oleh BPK, maka rekomendasi yang bersangkutan dinyatakan sebagai "dalam proses ditindaklanjuti".

Sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi ditambahkan satu jenis yaitu status "Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah". Adapun kriteria alasan sah sehingga rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah:

- a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
  1. pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
  2. pejabat menjadi terpidana; dan
  3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis, yaitu:
  1. perubahan struktur organisasi; dan
  2. perubahan regulasi.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dan/atau tindakan administratif. Penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan, dan mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke negara/daerah/perusahaan atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggungjawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011, BPK telah memberikan 191.757 rekomendasi senilai Rp103,19 triliun dengan rincian Rp76,13 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp27,05 triliun). Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan perbaikan SPI, tindakan administratif, dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut menunjukkan sebanyak 106.058 rekomendasi senilai Rp37,87 triliun, dengan rincian Rp25,40 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp12,46 triliun) telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 40.841 rekomendasi senilai Rp40,41 triliun, dengan rincian Rp30,66 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp9,74 triliun) ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 44.858 rekomendasi senilai Rp24,91 triliun, dengan rincian Rp20,06 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp4,84 triliun) belum ditindaklanjuti.

Adapun rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran ke kas negara/daerah sejak Tahun 2005 sampai dengan Semester

I Tahun 2011 adalah senilai Rp25,57 triliun, dengan rincian senilai Rp24,22 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp1,34 triliun). Rincian setoran tersebut adalah dari pemerintah pusat senilai Rp9,22 triliun, dengan rincian senilai Rp8,66 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp564,94 miliar), pemerintah daerah senilai Rp9,00 triliun, dengan rincian senilai Rp8,99 triliun dan USD449.96 ribu (ekuivalen Rp3,86 miliar), serta BUMN (induk dan anak perusahaan) senilai Rp7,34 triliun, dengan rincian senilai Rp6,56 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp38,42 miliar).

## Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 secara keseluruhan dari 86 kementerian/ lembaga terdapat 13.897 temuan pemeriksaan senilai Rp55,43 triliun, dengan rincian senilai Rp50,77 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp4,66 triliun) serta 23.942 rekomendasi senilai Rp31,59 triliun, dengan rincian senilai Rp27,36 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp4,22 triliun). Status pemantauan hasil pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 17.1. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas kementerian/ lembaga disajikan pada Lampiran 37.

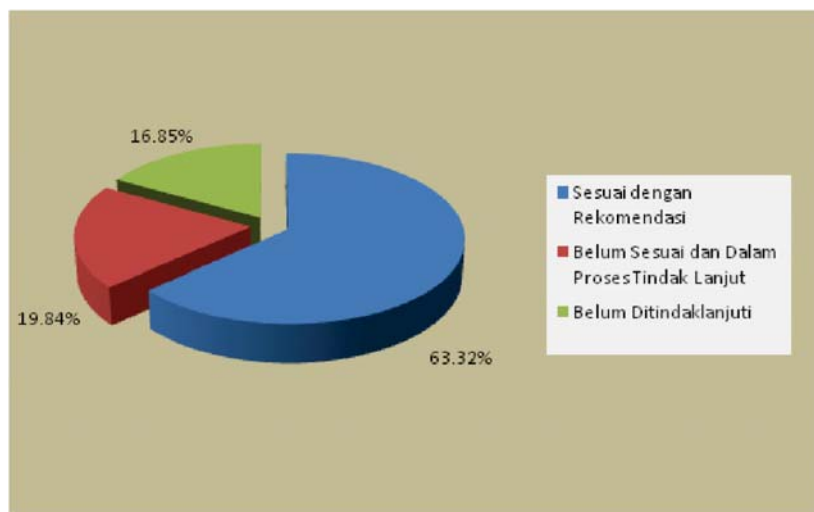
**Tabel 17.1. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011**

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
13.897	50.775.317,33	23.942	27.366.261,90	15.159	7.724.966,78	4.749	9.338.876,56	4.034	10.302.418,54	8.664.740,25
	USD 535,176.90		USD 488,202.13		USD 60,890.52		USD 126,937.36		USD 300,374.24	USD 64,110.44
	EUR 664.63		EUR 628.83		EUR 595.22		EUR 33,61		-	EUR 580.39
	AUD 36.52		AUD 36.52		-		AUD 36.52		-	-
	JPY 266,082.19		JPY 150,835.50		-		-		JPY 150,835.50	-
	SAR 8,059.29		SAR 177.07		SAR 177.07		-		-	SAR 110.41
	-		SGD 349.95		SGD 117.75		SGD 232.20		-	SGD 117.75
	GBP 396.10		GBP 396.10		GBP 396.10		-		-	GBP 396.10

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 disajikan dalam Grafik 17.1. adalah sebagai berikut.

**Grafik 17.1. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 17.1. dan Grafik 17.1. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 15.159 atau 63,32%, sedangkan sebanyak 4.749 rekomendasi atau 19,84% belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 4.034 rekomendasi atau 16,85% belum ditindaklanjuti (termasuk sebanyak 59 rekomendasi di antaranya adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah). Dari 15.159 rekomendasi senilai Rp8,26 triliun, dengan rincian senilai Rp7,72 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp537,60 miliar) yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/penyerahan aset ke negara senilai Rp9,22 triliun, dengan rincian senilai Rp8,66 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp564,94 miliar).

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih dominan (63,32%). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

### **Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa dari Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 secara keseluruhan dari 515 pemerintah daerah terdapat 77.623 temuan pemeriksaan senilai Rp170,27 triliun, dengan rincian senilai Rp170,17 triliun dan USD10.72 juta (ekuivalen Rp92,24 miliar) serta 161.551 rekomendasi senilai Rp37,01 triliun, dengan rincian senilai Rp36,91 triliun dan USD10.72 juta (ekuivalen Rp92,24 miliar). Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 17.2. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 38.

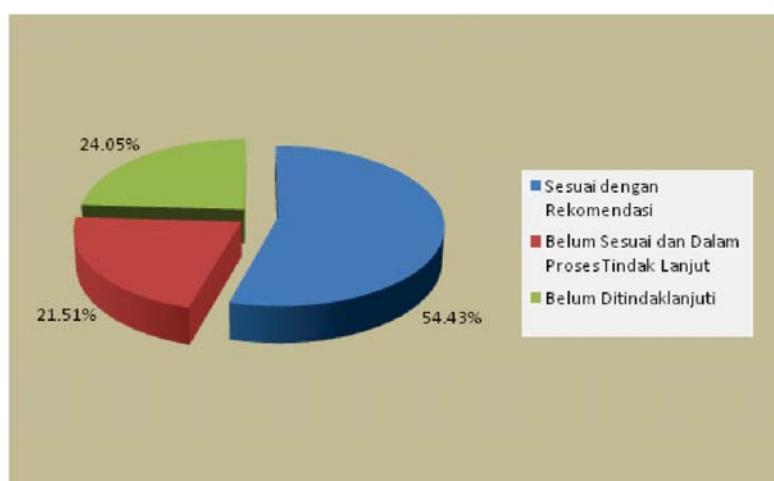
**Tabel 17.2. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011**

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
77.623	170.179.204,86	161.551	36.919.434,02	87.937	11.013.558,95	34.753	17.729.757,69	38.861	8.176.117,38	8.997.151,29
	USD 10,729.50		USD 10,729.50		USD 449.96		USD 9,949.54		USD 329.98	USD 449.96

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 disajikan dalam grafik adalah sebagai berikut.

**Grafik 17.2. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 17.2. dan Grafik 17.2. di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 87.937 atau 54,43%, sedangkan sebanyak 34.753 rekomendasi atau 21,51% belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 38.861 rekomendasi atau 24,06% belum ditindaklanjuti (termasuk sebanyak 56 rekomendasi di antaranya adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah). Dari 87.937 rekomendasi senilai Rp11,01 triliun, dengan rincian senilai Rp11,01 triliun dan USD449.96 ribu (ekuivalen Rp3,86 miliar) yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp9,00 triliun, dengan rincian senilai Rp8,99 triliun dan USD449.96 ribu (ekuivalen Rp3,86 miliar).

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih dominan (54,43%). Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

## Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (Termasuk Anak Perusahaan)

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 secara keseluruhan dari 169 BUMN (termasuk anak perusahaan) terdapat 3.533 temuan pemeriksaan senilai Rp145,89 triliun, dengan rincian senilai Rp130,68 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp15,20 triliun) serta 5.840 rekomendasi senilai Rp19,44 triliun, dengan rincian senilai Rp11,83 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp7,60 triliun). Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 17.3. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas BUMN (termasuk anak perusahaan) disajikan pada Lampiran 39.

**Tabel 17.3. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011**

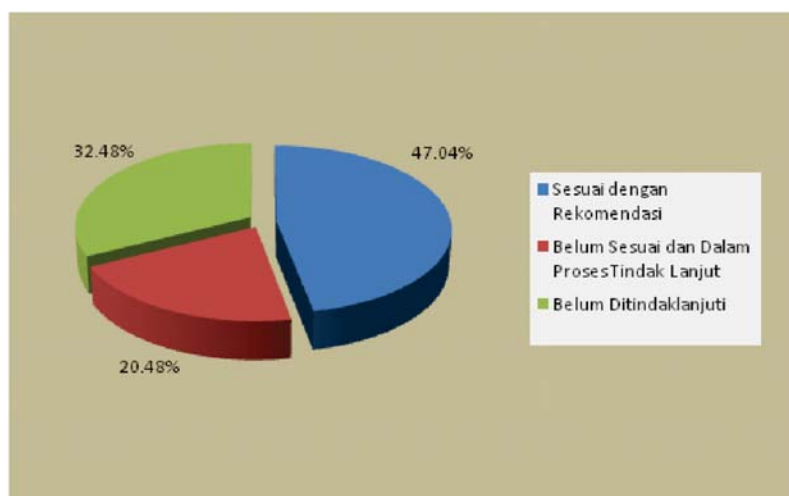
(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	BUMN (Induk perusahaan)	3.178	101.474.754,03	5.288	11.436.338,07	2.373	6.422.765,56	1.099	3.435.534,58	1.816	1.578.037,92	6.335.963,41
			USD 1,697,117.59		USD 874,053.27		USD 201,049.00		USD 486,788.36		USD 186,215.90	USD 82,344.35
			SGD 836.14		SGD 106.30		-		SGD 106.30		-	-
			EUR 221.47		EUR 24.20		EUR 24.20		-		-	EUR 24.20
			GBP 123.00		-		-		-		-	-
			JPY 379,197.34		JPY 274,280.52		JPY 270,977.12		JPY 3,303.40		-	JPY 270,977.12
			CNY 896.89		-		-		-		-	-
2	BUMN (anak perusahaan)	355	29.213.375,53	552	395.770,54	374	228.884,60	97	161.602,04	81	5.283,90	228.884,60
			USD 65,101.44		USD 7.417,92		USD 4.295,29		USD 828,62		USD 2.294,01	USD 4.295,29
			EUR 117,49		-		-		-		-	-
			MYR 525,00		MYR 525,00		MYR 525,00		-		-	MYR 525,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.533</b>	<b>130.688.129,57</b>	<b>5.840</b>	<b>11.832.108,62</b>	<b>2.747</b>	<b>6.651.650,16</b>	<b>1.196</b>	<b>3.597.136,63</b>	<b>1.897</b>	<b>1.583.321,82</b>	<b>6.564.848,01</b>
			USD 1,762,219.04		USD 881,471.20		USD 205,344.30		USD 487,616.98		USD 188,509.91	USD 86,639.64
			SGD 836.14		SGD 106.30		-		SGD 106.30		-	-
			EUR 338.97		EUR 24.20		EUR 24.20		-		-	EUR 24.20
			GBP 123.00		-		-		-		-	-
			JPY 379,197.34		JPY 274,280.52		JPY 270,977.12		JPY 3,303.40		-	JPY 270,977.12
			CNY 896.89		-		-		-		-	-
			MYR 525,00		MYR 525,00		MYR 525,00		-		-	MYR 525,00

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 disajikan dalam grafik adalah sebagai berikut.



**Grafik 17.3. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 17.3. dan Grafik 17.3. tersebut terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.747 atau 47,04%, sedangkan sebanyak 1.196 rekomendasi atau 20,48% ditindaklanjuti belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 1.897 rekomendasi atau 32,48% belum ditindaklanjuti (termasuk sebanyak 10 rekomendasi di antaranya adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah). Dari 2.747 rekomendasi senilai Rp8,44 triliun, dengan rincian senilai Rp6,65 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp1,79 triliun) yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke perusahaan BUMN (termasuk anak perusahaan) senilai Rp7,34 triliun, dengan rincian senilai Rp6,56 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp775,55 miliar).

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih dominan (47,04%). Hal ini menunjukkan BUMN (termasuk anak perusahaan) telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK.

### **Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya**

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas BHMN, KKKS, dan badan usaha lainnya mengungkapkan bahwa dari Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 terdapat 297 temuan pemeriksaan senilai Rp278,70 triliun, dengan rincian senilai Rp30,73 triliun dan sejumlah valas (ekuivalen Rp247,97 triliun) dan 424 rekomendasi senilai Rp15,14 triliun, dengan rincian senilai Rp20,59 miliar dan sejumlah valas (ekuivalen Rp15,12 triliun). Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 disajikan dalam Lampiran 39.

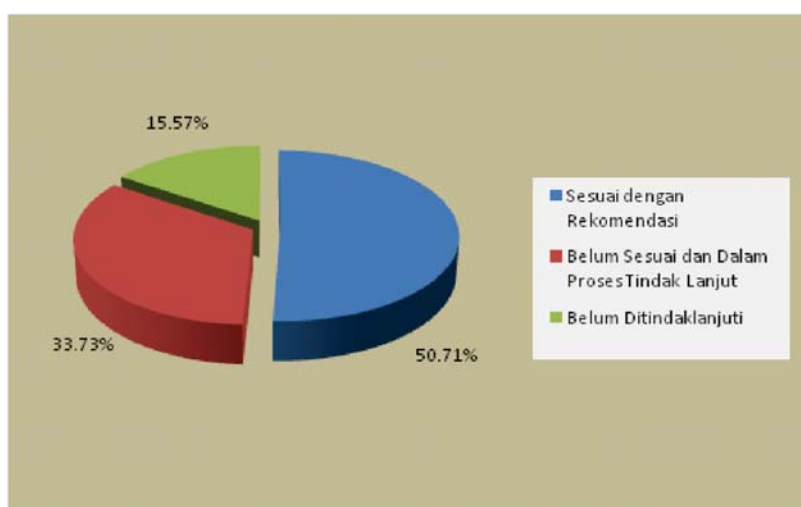
**Tabel 17.4. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011**

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	BHMN	35	30.573.024,40	46	-	14	-	24	-	8	-	-
			USD 23,854,245.42		USD 11,250.02		-		USD 11,250.02		-	-
2	KKKS	231	98.162,33	321	20.595,36	177	17.266,53	86	2.748,23	58	580,59	-
			USD 4,989,618.40		USD 1,748,429.81		USD 1,178,279.06		USD 497,102.23		USD 73,048.51	-
			SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-	-
3	badan usaha lainnya (Lembaga)	31	63.277.22	57	-	24	-	33	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>297</b>	<b>30.734.463,96</b>	<b>424</b>	<b>20.595,36</b>	<b>215</b>	<b>17.266,53</b>	<b>143</b>	<b>2.748,23</b>	<b>66</b>	<b>580,59</b>	<b>-</b>
			USD 28,843,863.82		USD 1,759,679.83		USD 1,178,279.06		USD 508,352.26		USD 73,048.51	-
			SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-	-

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011 disajikan dalam grafik adalah sebagai berikut.

**Grafik 17.4. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 17.4. dan Grafik 17.4. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diatas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 215 rekomendasi atau 50,71%, sedangkan sebanyak 143 rekomendasi atau 33,73% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 66 rekomendasi atau 15,57% belum ditindaklanjuti.

Presentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih dominan (50,71%). Hal ini menunjukkan BHMN, KKKS, dan badan usaha lainnya telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK.

## HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

### Pendahuluan

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk memantau penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.

### Gambaran Umum

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun Anggaran 2011 merupakan kompilasi Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2011 dari setiap unit pelaksana tugas pemeriksaan yang memuat data kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya periode akhir Tahun 2004 sampai dengan Semester I Tahun 2011 dengan status sudah ditetapkan, dalam proses penetapan dan informasi kerugian negara/daerah.

Cakupan entitas yang telah dipantau pada Semester I Tahun 2011 adalah sebanyak 602 entitas dari 2.045 entitas atau sebesar 29,44%.

Nilai kerugian negara/daerah pada Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang berupa valuta asing, telah diekuivalenkan dengan nilai tukar rupiah per 30 Juni 2011 dari data Bank Indonesia.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2004 sampai dengan Semester I Tahun 2011 adalah sebanyak 85.139 kasus senilai Rp12,92 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp5,01 triliun dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18.297 kasus senilai Rp1,72 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp91,57 miliar, pelunasan sebanyak 22.992 kasus senilai Rp1,29 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp3,54 triliun serta penghapusan sebanyak 117 kasus senilai Rp9,50 miliar dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp701,1 juta.

Sisa kerugian negara/daerah sampai dengan Semester I Tahun 2011 adalah sebanyak 62.030 kasus senilai Rp9,89 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp1,37 triliun.

## Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

### Instansi Pusat

Kasus kerugian negara pada pemerintah pusat yang diambil dari saldo akhir Tahun 2004 sampai dengan Semester I Tahun 2011 sebanyak 19.488 kasus senilai Rp2,88 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp4,90 triliun dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 6.008 kasus senilai Rp306,79 miliar dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp90,59 miliar, pelunasan sebanyak 5.046 kasus senilai Rp302,70 miliar dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp3,54 triliun serta penghapusan kerugian negara terhadap 12 kasus senilai Rp2,96 miliar dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp701,12 juta. Sampai dengan Semester I Tahun 2011 sisa kerugian negara yang belum diselesaikan sebanyak 14.430 kasus senilai Rp2,26 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp1,26 triliun.

Data pemantauan penyelesaian kerugian negara instansi pusat diambil periode akhir Tahun 2004 sampai dengan Semester I Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

**Tabel 18.1. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Pusat**

(nilai dalam rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA		226	27.497.929.511,82	63	1.874.431.157,94	120	1.681.342.078,01	4	759.138.829,00	102	23.183.017.446,87
	USD		60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-
	KSHS		2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-
TGR NON BENDAHARA		3.198	208.093.694.098,01	447	63.624.522.646,54	1.619	40.718.346.950,58	3	759.064.702,00	1.576	102.991.759.798,89
	USD		2.308.331,73	-	6.974,44	-	-	-	-	-	2.301.357,29
	AUD		1.111.670,40	-	-	-	-	-	-	-	1.111.670,40
	JPY		755.447.276,13	-	-	-	-	-	-	-	755.447.276,13
	Ffr		37.318.656,92	-	-	-	-	-	-	-	37.318.656,92
	Dfl		3.017.147,52	-	-	-	-	-	-	-	3.017.147,52
	DM		1.708.302,81	-	-	-	-	-	-	-	1.708.302,81
	NLG		182.972,72	-	-	-	-	-	-	-	182.972,72
PIHAK KETIGA		1.424	549.648.528.036,57	203	123.414.782.237,61	1.157	28.179.178.626,85	-	-	267	398.054.567.172,11
	USD		97.232.965,14	-	9.907.118,28	-	48.845.940,22	-	-	-	38.479.906,64
INFORMASI											
BPK		7.644	1.587.392.824.783,37	1.253	30.444.949.100,76	953	124.132.173.988,33	-	-	6.691	1.432.815.701.694,28
	USD		6.603,00	-	-	-	-	-	-	-	6.603,00
APIP		6.996	508.345.097.086,75	4.042	87.439.620.392,39	1.197	107.991.572.907,90	5	1.449.420.104,00	5.794	311.464.483.682,46
	USD		394.406.235,97	-	556.771,64	-	360.204.737,33	-	-	-	33.644.727,00
	EUR		123.836,07	-	10.500,00	-	83.790,56	-	-	-	29.545,51
	CAD		19.031,50	-	-	-	19.031,50	-	-	-	-
	AUD		22.450,24	-	-	-	22.450,24	-	-	-	-
	MYR		121.484,79	-	-	-	121.484,79	-	-	-	-
	HKS		29.878,62	-	-	-	29.878,62	-	-	-	-
	NOK		1.027,72	-	-	-	1.027,72	-	-	-	-
	RUB		48.235,00	-	-	-	48.235,00	-	-	-	-
	SGD		1.221,00	-	-	-	1.221,00	-	-	-	-
	GBP		350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-
TOTAL	IDR	19.488	2.880.978.073.516,52	6.008	306.798.305.535,24	5.046	302.702.614.551,67	12	2.967.623.635,00	14.430	2.268.509.529.794,61
	USD		494.014.135,84	-	10.470.864,36	-	409.050.677,55	-	60.000,00	-	74.432.593,93
	KSHS		2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-
	AUD		1.134.120,64	-	-	-	22.450,24	-	-	-	1.111.670,40
	JPY		755.447.276,13	-	-	-	-	-	-	-	755.447.276,13
	Ffr		37.318.656,92	-	-	-	-	-	-	-	37.318.656,92
	Dfl		3.017.147,52	-	-	-	-	-	-	-	3.017.147,52
	DM		1.708.302,81	-	-	-	-	-	-	-	1.708.302,81
	NLG		182.972,72	-	-	-	-	-	-	-	182.972,72
	EUR		123.836,07	-	10.500,00	-	83.790,56	-	-	-	29.545,51
	CAD		19.031,50	-	-	-	19.031,50	-	-	-	-
	MYR		121.484,79	-	-	-	121.484,79	-	-	-	-
	HKS		29.878,62	-	-	-	29.878,62	-	-	-	-
	NOK		1.027,72	-	-	-	1.027,72	-	-	-	-
	RUB		48.235,00	-	-	-	48.235,00	-	-	-	-
	SGD		1.221,00	-	-	-	1.221,00	-	-	-	-
	GBP		350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-
VALAS EKUIVALEN*)			4.902.452.263.276,01		90.599.775.740,40		3.547.466.145.569,98		701.120.000,00		1.263.685.221.965,63
TOTAL KERUGIAN		19.488	7.783.430.336.792,53	6.008	397.398.081.275,64	5.046	3.850.168.760.121,65	12	3.668.743.635,00	14.430	3.532.194.751.760,25

Nilai kerugian dalam tabel di atas termasuk nilai kerugian dalam valas yang telah dikonversi berdasarkan kurs tengah BI per 30 Juni 2011

Rincian penyelesaian kerugian negara pada instansi pusat berdasarkan proses penyelesaiannya, yaitu sudah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 40 dan dalam proses penetapan pada Lampiran 41. Adapun rincian informasi kerugian negara dapat dilihat pada Lampiran 42.

### Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kasus kerugian negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diambil dari saldo akhir Tahun 2004 sampai dengan Semester I Tahun 2011 sebanyak 695 kasus senilai Rp59,43 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 157 kasus senilai Rp11,45 miliar, pelunasan sebanyak 173 kasus senilai Rp7,14 miliar serta penghapusan kerugian negara pada BUMN terhadap 15 kasus senilai Rp392,04 juta. Total penyelesaian kerugian negara pada BUMN sebesar 49,64% senilai Rp18,99 miliar. Sampai dengan Semester I Tahun 2011 sisa kerugian negara pada BUMN yang belum diselesaikan sebanyak 507 kasus senilai Rp40,44 miliar.

Data hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada BUMN adalah sebagai berikut.

**Tabel 18.2. Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN**

(nilai dalam rupiah)

ENTITAS YANG DIPANTAU	SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA		
					ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN				
			PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 4-(8+10)	13=5-(7+9+11)	
PENGELOLA BUMN													
	TUGAS KEBENDAHARAAN	IDR	34	5.886.664.062	20	981.462.228	10	80.674.260	-	-	-	24	4.824.527.574
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIHAK KETIGA	IDR	340	17.883.207.762	70	5.697.263.992	11	4.805.155.978	-	-	-	329	7.380.787.792
INFORMASI													
	BPK	IDR	2	329.574.000	1	95.000.000	1	156.114.000	-	-	-	1	78.460.000
	APIP	IDR	319	35.334.502.852	66	4.680.284.452	151	2.102.140.487	15	392.042.751	153	28.160.035.162	
	JUMLAH	IDR	695	59.433.948.675,74	157	11.454.010.672,23	173	7.144.084.725,00	15	392.042.750,95	507	40.443.810.527,56	

Rincian penyelesaian kerugian negara pada BUMN berdasarkan proses penyelesaian, yaitu sudah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 43 dan rincian informasi kerugian negara dapat dilihat pada Lampiran 44.

### Pemerintah Daerah

Kasus kerugian daerah yang terjadi diambil dari saldo akhir Tahun 2004 sampai dengan Semester I Tahun 2011 sebanyak 64.956 kasus senilai Rp9,98 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp107,40 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 12.132 kasus senilai Rp1,40 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp979,43 juta, pelunasan sebanyak 17.773 kasus senilai Rp985,36 miliar dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp9,50 juta, serta penghapusan kerugian daerah terhadap 90 kasus senilai Rp6,14 miliar. Sampai dengan Semester I Tahun 2011 sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sebanyak 47.093 kasus senilai Rp7,59 triliun dan sejumlah valuta asing ekuivalen dengan nilai Rp106,41 miliar.

Data hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah diambil dari periode akhir Tahun 2004 sampai dengan pemantauan pada Semester I Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Tabel 18.3 Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam rupiah)

SUBYEK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA / SUMBER INFORMASI	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	1.469	273.226.093.905,70	479	19.934.815.544,65	558	10.113.142.719,04	37	1.178.556.617,00	874	241.999.579.025,01
TGR NON BENDAHARA	IDR	5.220	412.324.719.233,93	1.778	80.253.635.342,45	1.209	22.685.430.677,12	11	3.313.644.000,00	4.000	306.072.009.214,36
PIHAK KETIGA INFORMASI	IDR	2.116	153.448.685.288,43	462	19.221.173.764,95	446	38.796.736.679,21	3	-	1.667	95.430.774.844,27
BPK	IDR	18.140	8.049.676.702.431,04	3.861	1.123.746.727.236,74	4.341	771.287.003.798,44	3	587.583.478,00	13.796	6.154.055.387.917,86
	USD		7.166,94	-	-	-	1.100,00	-	-	-	6.066,94
APIP	IDR	38.009	1.096.919.205.098,08	5.552	160.362.078.931,08	11.219	142.482.996.670,80	36	1.069.056.617,00	26.754	793.005.072.879,20
	USD		12.423.860,45	-	113.360,80	-	-	-	-	2	12.310.499,65
TOTAL	IDR	64.956	9.985.595.405.957,18	12.132	1.403.518.430.819,87	17.773	985.365.310.544,60	90	6.148.840.712,00	47.093	7.590.562.823.880,71
	USD		12.431.027,39	-	113.360,80	-	1.100,00	-	-	2	12.316.566,59
VALAS EKUIVALEN*)			107.404.076.649,60	-	979.437.312,00	-	9.504.000,00	-	-	-	106.415.135.337,60
TOTAL KERUGIAN		64.956	10.092.999.482.606,80	12.132	1.404.497.868.131,87	17.773	985.374.814.544,60	90	6.148.840.712,00	47.093	7.696.977.959.218,31

Nilai kerugian dalam tabel di atas termasuk nilai kerugian dalam valas yang telah dikonversi berdasarkan kurs tengah BI per 30 Juni 2011

Rincian penyelesaian kerugian daerah pada instansi daerah berdasarkan proses penyelesaian, yaitu sudah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 45 dan dalam proses penetapan dapat dilihat pada Lampiran 46. Adapun informasi kerugian daerah dapat dilihat pada Lampiran 47.

### Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pada Semester I Tahun 2011 tidak terdapat data mengenai kerugian daerah dan penyelesaiannya pada BUMD.

### Kerugian pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2011 tidak terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti badan hukum milik negara (BHMN) dan badan layanan umum (BLU).

## PERMASALAHAN DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian kerugian negara/daerah antara lain:

1. Tindak lanjut oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) atas informasi indikasi kerugian negara/daerah baik yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan/pemeriksaan Bawasda, Inspektorat Jenderal, maupun dari BPKP (APIP) belum optimal;
2. Data base/daftar kerugian negara/daerah di masing-masing instansi belum tersusun;
3. Penyelesaian kerugian negara/daerah belum menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan;
4. Penyelesaian kerugian negara/daerah belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan cenderung berlarut-larut;
5. Kelemahan dokumentasi/administrasi data kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya;
6. Dukungan pimpinan instansi atas keberadaan dan kinerja TPKN/D belum optimal;

7. Koordinasi antara inspektorat dan TPKN/D dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan berindikasi kerugian negara/daerah belum maksimal;
8. Proses penyelesaian berlarut-larut karena penanggung jawab kerugian tidak ada, sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, atau pindah pekerjaan;
9. Pelaporan kerugian negara/daerah belum sesuai ketentuan;
10. Ketentuan tentang penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain belum ada sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penyelesaian atau penguasaan kerugian negara/daerah.

## REKOMENDASI

Terhadap permasalahan penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK telah merekomendasikan:

1. Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengatur penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
2. Pimpinan instansi memberikan dukungan terhadap keberadaan dan kinerja TPKN/D;
3. Pimpinan instansi memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang penyelesaian kerugian negara/daerah kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungannya;
4. Pimpinan Instansi menginstruksikan kepada pimpinan unit kerja untuk melaporkan kasus kerugian negara/daerah yang terjadi di unit kerjanya.

## Hasil Pemantauan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana/Kerugian Negara yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kerugian Negara, mewajibkan BPK untuk melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada instansi yang berwenang. Sejak Tahun 2003 BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sampai dengan Semester I Tahun 2011, LHP BPK yang mengungkapkan indikasi tindak pidana dan telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 305 kasus senilai Rp29.51 triliun dan USD 480,88 juta atau ekuivalen dengan nilai Rp4,15 triliun berdasarkan kurs Bank Indonesia per 30 Juni 2011. Dari 305 kasus yang diserahkan tersebut, Instansi yang berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) telah menindaklanjuti 166 kasus melalui proses hukum (54,42%) ke dalam proses peradilan, yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 41 kasus (13.44%), telaahan, gelar perkara dan penelitian sebanyak 21 kasus (6.89%), penyelidikan sebanyak 24 kasus (7.87%), penyidikan sebanyak 10 kasus (3.28%), proses sidang 1 kasus (0.33%) penuntutan sebanyak 11 kasus (3.61%), vonis/banding sebanyak 47 kasus (15.41%) dan SP3/dihentikan sebanyak 11 kasus (3.61%). Sedangkan temuan yang belum ditindaklanjuti atau tidak ada data tindaklanjutnya sebanyak 139 kasus (45.57%). Rincian pemantauan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian/pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18.4 Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Kerugian/Pidana

Instansi Penegak Hukum	Tahun	Temuan	Sudah Ditindaklanjuti								Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket	
			Limpah	Ekspose/ Telaah/ Koordinasi	Lidik	Dik	Proses Sidang	Tut	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3		
Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2004	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	2005	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2007	4	-	-	2	1	-	-	1	-	-	
	2008	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	2011	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	KEPOLISIAN RI	SUB TOTAL	25	-	-	2	4	-	-	2	10	7
	Kejaksaan	2003	17	16	-	-	-	-	-	1	-	-
2004		54	25	-	-	-	-	-	28	-	1	
2005		14	-	-	-	4	-	4	-	-	6	
2006		18	-	-	14	-	-	-	-	-	4	
2007		28	-	-	-	-	-	1	3	-	24	
2008		4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
2009		20	-	-	1	1	1	-	1	1	15	
2010		15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
2011		2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
KEJAKSAAN		SUB TOTAL	172	41	-	15	5	1	5	33	1	71
KPK		2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2006	8	-	3	-	-	-	-	5	-	-	
	2007	5	-	3	-	-	-	-	2	-	-	
	2008	23	-	9	5	-	-	5	4	-	-	
	2009	22	-	6	2	1	-	1	1	-	11	
	2010	46	-	-	-	-	-	-	-	-	46	
	2011	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	KPK	SUB TOTAL	108	-	21	7	1	-	6	12	-	61
	<b>TOTAL</b>		<b>305</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>139</b>



## Daftar Singkatan dan Akronim

### A

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	: Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
APP	: Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Asrena Kasal	: Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut

### B

BA	: Bagian Anggaran
Babek	: Badan Pembekalan
Bansos	: Bantuan Sosial
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Batanta	: Bagian Pembuatan Tinta
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBPOM	: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
BBPPT	: Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
BCG	: <i>Bacille Calmette Guerin</i>
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BHP	: Badan Hukum Pendidikan
BHP Frekuensi	: Biaya Hak Penggunaan Frekuensi
BI	: Bank Indonesia
Binkes	: Pembinaan Kesehatan
Biro Renotala	: Biro Perencanaan Organisasi dan Tatalaksana
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BLBU	: Bantuan Langsung Benih Unggul
BLU	: Badan Layanan Umum
BLU-BPJT	: Badan Layanan Umum – Badan Pengatur Jalan Tol
BMN	: Barang Milik Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOT	: <i>Build, Operate, and Transfer</i>
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKK	: Badan Pengelola Keuangan Kota
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR NAD-Nias	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias
BSBI	:	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSBL	:	Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara

### C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
COSO	:	<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>
CT Scan	:	<i>Computerized Tomography Scan</i>

### D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Daker	:	Daerah Kerja
DC	:	<i>Delivery Center</i>
DCS	:	<i>Distributed Control System</i>
denma	:	Detasemen Markas
Diklat	:	Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Diskesal	:	Dinas Kesehatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Diskesau	:	Dinas Kesehatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
Distamben	:	Dinas Pertambangan dan Energi
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen PMPTK	:	Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Ditjen Postel	:	Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Ditjen Dukcapil	:	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
Ditjen KD	:	Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Ditjen Otda	:	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Ditjen PHU	:	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Ditpalad	:	Direktorat Peralatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Ditstand	:	Direktorat Standardisasi
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak

DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPL	: Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan
DJPU	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DK/TP	: Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPDF PPD	: Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah
DPIPD	: Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
DPIIP	: Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DVD	: <i>Digital Video Disc</i>

### E

EA	: <i>Executing Agency</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
ETESP	: <i>Earthquake and Tsunami Emergency Support Project</i>

### G

GM	: <i>General Manager</i>
GTG	: <i>Gas Turbine Generator</i>
HPP	: Harga Pokok Produksi
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
HPT	: Harga Patokan Tertinggi

### I

IBKK	: Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
ICU	: <i>Intensive Care Unit</i>
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
ILGR	: <i>Initiative Local Government Reform</i>
IP	: inventarisasi dan penilaian
IWPU	: Iuran Wajib Pesawat Udara

### J

Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Japalu	: Jawa Timur, Papua, dan Maluku
JBT	: Jenis BBM Tertentu
Juknis	: Petunjuk Teknis

### K

Kadiskesau	: Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara
KAI	: Kereta Api Indonesia
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
Kalafiau	: Kepala Lembaga Farmasi Angkatan Udara

Kanwil	: Kantor Wilayah
KAP	: Kantor Akuntan Publik
Karumkit	: Kepala Rumah Sakit
Kasad	: Kepala Staf Angkatan Darat
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KC	: Kantor Cabang
Kemendiknas	: Kementerian Pendidikan Nasional
Kementerian PAN dan RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kesdam	: Kesehatan Komando Daerah Militer
KI	: Kepatuhan Internal
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KKA	: Kertas Kerja Audit
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KL	: Kementerian/Lembaga
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kominfo	: Komunikasi dan Informasi
KP	: Kantor Pemasaran
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKN	: Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPBC	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPSMP	: Komite Pengendalian dan Standardisasi Material dan Peralatan
KSO	: Kerjasama Operasi
KVA	: <i>Kilo Volt Ampere</i>

## L

Ladogi	: Laboratorium Kedokteran Gigi
Lafial	: Lembaga Farmasi Angkatan Laut
Lafiau	: Lembaga Farmasi Angkatan Udara
LAK	: Laporan Arus Kas
Lakesgilut	: Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut
Lakespra	: Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LHA	: Laporan Hasil Audit
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan

LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMK	: Laporan Manajemen Keuangan
Loan ID	: <i>Loan Identification</i>
LPG	: <i>Liquified Petroleum Gas</i>
LPP	: Lembaga Penyiaran Publik
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

### M

MA	: Mahkamah Agung
Mabas	: Markas Besar
MAK	: Mata Anggaran Kegiatan
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Mendiknas	: Menteri Pendidikan Nasional
Menkes	: Menteri Kesehatan
Menlu	: Menteri Luar Negeri
MFO	: <i>Marine Fuel Oil</i>
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
MoU	: <i>memorandum of understanding</i>
MP ASI	: Makanan Pengganti Air Susu Ibu
MPC	: <i>Mail Processing Center</i>
MPN	: Modul Penerimaan Negara

### N

NICU	: <i>Neonatal Intensive Care Unit</i>
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>

### O

OECD	: <i>Organization for Economic Development</i>
Otsus	: Otonomi Khusus

### P

P2TPD	: Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah
P3LPBJ	: Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Panja	: Panitia Kerja
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB Migas	: Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas
PD	: Perusahaan Daerah
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	: Pemerintah Daerah

PFDP	: Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
PGRU P3	: <i>Purge Gas Recovery Unit</i> Pupuk Sriwijaya 3
PHAPL	: Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
PIB	: Pemberitahuan Impor Barang
PIBK	: Pemberitahuan Impor Barang Khusus
PICU	: <i>Pediatric Intensive Care Unit</i>
PIH	: Penyelenggaraan Ibadah Haji
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PJT	: Perusahaan Jasa Titipan
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Plt	: Pelaksana tugas
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PMA	: Pengendali Mutu Audit
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PMOADBETESP	: <i>Project Management Office of Asian Development Bank on Earthquake-and Tsunami Emergency Support Project</i>
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNPM Mandiri	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
PO	: <i>Purchase Order</i>
Poltekkes	: Politeknik Kesehatan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPA	: Perusahaan Pengelolaan Aset
PPh	: Pajak Penghasilan
PPIH	: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPK GBK	: Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPKK	: Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPN DTP	: Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT	: Perseroan Terbatas
PTA	: Pengendali Teknis Audit
PTT	: Pegawai Tidak Tetap
PU	: Pekerjaan Umum
Puskes	: Pusat Kesehatan
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat

Puspenerbad : Pusat Penerbangan Angkatan Darat

### R

RAB : Rencana Anggaran dan Biaya  
 RBA : Rencana Bisnis dan Anggaran  
 Reksus : Rekening Khusus  
 Renstra : Rencana strategis  
 RJPP : Rencana Jangka Panjang Perusahaan  
 RKA/KL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga  
 RKAP : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan  
 RKAS : Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah  
 RKS : Rencana Kerja Sekolah  
 RPSA : Rumah Perlindungan Sosial Anak  
 RRI : Radio Republik Indonesia  
 RSAB : Rumah Sakit Anak dan Bunda  
 RSAU : Rumah Sakit Angkatan Udara  
 RSBI : Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional  
 RSCM : Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo  
 RSKD : Rumah Sakit Khusus Daerah  
 RSPAU : Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara  
 RSU : Rumah Sakit Umum  
 RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah  
 RSUP : Rumah Sakit Umum Pemerintah  
 Rumkit : Rumah Sakit  
 Rumkital : Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut  
 Rumkitmun : Rumah Sakit Umum dr. Moch. Salamun  
 RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham

### S

SAI : Sistem Akuntansi Instansi  
 SAL : Saldo Anggaran Lebih  
 SAPK : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  
 Satker : Satuan Kerja  
 SAU : Sistem Akuntansi Umum  
 SD : Sekolah Dasar  
 SDM : Sumber Daya Manusia  
 Setjen : Sekretaris Jenderal  
 Setneg : Sekretariat Negara  
 SFC : *Specific fuel consumption*  
 SIK : Sistem Informasi Kepegawaian  
 SIMAK BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara  
 Simbada : Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Simda	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIUP	: Surat Izin Usaha Pertambangan
SK	: Surat Keputusan
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMAN	: Sekolah Menengah Atas Negeri
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMKN	: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SOI	: <i>Super Orlof Intaglio</i>
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPNIK	: Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
STAN	: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
STP	: Surat Tagihan Pajak
Sultanbatara	: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara
SWOT	: <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>

## T

TA	: Tahun Anggaran
TB	: Tahun Buku
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THR	: Tunjangan Hari Raya
THT	: Tunjangan Hari Tua
TK	: Taman Kanak-Kanak
TKWNAP	: Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TPKN/D	: Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
TPS	: Tempat Penimbunan Sementara



TVRI : Televisi Republik Indonesia  
 TW : Tidak Wajar

### U

UBP : Unit Bisnis Pembangkitan  
 UGD : Unit Gawat Darurat  
 UKE : Unit Kerja Eselon  
 UKM : Usaha Kecil dan Menengah  
 ULP : Uang Lauk Pauk  
 UMH : Unit Manajemen Hutan  
 UMK : Usaha Mikro dan Kecil  
 UNAMID : *African Union/United Nations Hibryd Operation in Darfur*  
 UO : Unit Organisasi  
 UU : Undang-Undang

### V

Valas : Valuta Asing  
 VAR : Vaksin anti Rabies  
 VIP : *Very Important Person*

### W

WA : *Withdrawal Application*  
 Wabku : Pertanggungjawaban Keuangan  
 Wajar : Wajib Belajar  
 WDP : Wajar Dengan Pengecualian  
 WSRS : *Wiping Solution Recovery System*  
 WTP : Wajar Tanpa Pengecualian  
 WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas

### Y

Yanmasum : Pelayanan Masyarakat Umum

**Mata uang**

AUD	:	Australian Dollar
CAD	:	Canadian Dollar
CNY	:	Chinese Yuan
Dfl	:	Dutch Florin
DM	:	Deutsche Mark
EUR	:	Euro
Ffr	:	France Franc
GBP	:	Great Britain Poundsterling
IDR	:	Indonesian Rupiah
JPY	:	Japanese Yen
KSHS	:	Kenyan Shilings
MYR	:	Malaysian Ringgit
NLG	:	Dutch Guilder
NOK	:	Norwegia Krone
RUB	:	Russian Ruble
SAR	:	Saudi Arabian Real
SGD	:	Singapore Dollar
USD	:	United States Dollar

# Lampiran

IHPS I Tahun 2011

**Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya  
Tahun 2006 - 2010**

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
<b>Kementerian/Lembaga</b>						
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
5	Kejaksaan Agung	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
6	Sekretariat Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
7	Kementerian Dalam Negeri	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
8	Kementerian Luar Negeri	TMP	TMP	WDP	TMP	WDP
9	Kementerian Pertahanan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	TMP	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP
11	Kementerian Keuangan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
12	Kementerian Pertanian	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
13	Kementerian Perindustrian	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
15	Kementerian Perhubungan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
16	Kementerian Pendidikan Nasional	TMP	TMP	WDP	WDP	TMP
17	Kementerian Kesehatan	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP
18	Kementerian Agama	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
21	Kementerian Kehutanan	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
27	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	WDP	TMP	TMP	TMP	WDP
31	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
34	Badan Intelijen Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
40	Perpustakaan Nasional	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	TMP	TMP	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
48	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
50	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
58	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	TMP	TMP	WTP	WTP	WDP
59	Badan Standarisasi Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
61	Lembaga Administrasi Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		TMP	TMP	TMP	WDP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia			WTP	WTP	WTP
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo			WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					WTP
75	Badan SAR Nasional					WDP
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha					WTP
77	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	TMP	WTP	WTP	*	*
78	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	TMP	TMP	WTP-DPP	*	*
79	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	TMP	TMP	TMP	*	*
80	APP 70 (Dana Perimbangan)	WDP	TMP	WDP	*	*
81	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	WTP	TMP	WTP	*	*
82	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	TMP	TMP	WTP-DPP	*	*
83	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	TMP	WTP	WTP	*	*
84	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	TMP	TMP	TMP	*	*
85	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	WTP	WTP	WDP	*	*
86	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	**	**	**	WTP	WTP
87	BA 999.02 - Hibah	**	**	TMP	WDP	WDP
88	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	**	**	**	WTP	WTP-DPP
89	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	**	**	**	TMP	WDP
90	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	**	**	**	WTP-DPP	WTP-DPP
91	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	**	**	**	WDP	*
92	BA 999.07 - Belanja Subsidi	**	**	**	**	WDP
93	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	**	**	**	**	WDP
94	Bendahara Umum Negara			***	***	WDP
95	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	TMP	WTP	WDP	****	
<b>Badan Lainnya</b>						
96	Lembaga Penjamin Simpanan		WTP	WTP	TMP	TMP
97	Bank Indonesia		WTP	WTP	WTP	WTP
98	Pusat Investasi Pemerintah			WTP	WTP	WTP
99	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara			Satker Kemenkeu	WDP	WTP
100	Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1431 H/2010 M			TMP	TMP	TMP
101	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada <i>Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project</i> (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta					WTP

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
102	Laporan Keuangan <i>Loan</i> ADB 2575-INO Pada <i>Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project 2</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010					WTP
103	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2008			WTP	*****	*****

Keterangan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)  
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*unqualified opinion with modified wording*)  
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)  
TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)  
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)  
\* : Perubahan nomor BA  
\*\* : BA baru  
\*\*\* : Tidak diberikan opini  
\*\*\*\* : Dibubarkan Tahun 2009  
\*\*\*\*\* : Belum diperiksa

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI**  
**Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>226</b>	<b>43,55</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	113	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	63	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	40	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	7	
6	Lain-lain	1	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>134</b>	<b>25,82</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	63	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	22	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	10	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	6	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	23	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	8	
7	Lain-lain	2	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>159</b>	<b>30,64</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	107	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	43	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	6	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
	<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>519</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan  
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<b><i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>235</b>	<b>32,15</b>	<b>294.196,65</b>	<b>20,92</b>
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	31		70.229,74	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	4		56.589,83	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	41		13.412,67	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	57		17.696,21	
5	Pemahalan Harga ( <i>Mark Up</i> )	10		32.939,88	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	5		2.715,51	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	40		63.850,79	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	12		4.576,21	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	27		24.596,08	
10	Lain-lain	8		7.589,68	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Negara</b>	<b>39</b>	<b>5,34</b>	<b>429.963,21</b>	<b>30,58</b>
				<b>USD11,720.00</b>	
1	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		1,68	
2	Aset dikuasai pihak lain	17		316.547,05	
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	7		96.283,57	
4	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		-	
				USD11,720.00	
5	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	2		2.988,98	
6	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	6		12.151,63	
7	Lain-lain	5		1.990,28	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>118</b>	<b>16,14</b>	<b>420.818,59</b>	<b>29,93</b>
1	Penerimaan Negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	95		143.914,14	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	17		257.811,72	
3	Penerimaan Negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	3		16.631,41	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2		61,31	
5	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1		2.400,00	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>269</b>	<b>36,80</b>	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	52		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	33		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	6		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	87		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	14		-	
7	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	26		-	
8	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	12		-	



No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
9	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	8		-	
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	25		-	
11	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	4		-	
12	Lain-lain	1		-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>25</b>	<b>3,42</b>	<b>11.318,48</b>	<b>0,80</b>
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2		2.877,05	
2	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	23		8.441,42	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>45</b>	<b>6,16</b>	<b>249.726,18</b>	<b>17,76</b>
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	10		16.576,40	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		7.340,60	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	26		127.626,32	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6		98.182,84	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2		-	
	<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>	<b>731</b>	<b>100</b>	<b>1.406.023,14</b>	<b>100</b>
				<b>USD11,720.00</b>	

## Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
 Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	1	-	-	-	2	519,65	-	-	-	-	-	1	-	-	1	519,65	-	-	-	-	-	-	-
2	Dewan Perwakilan Rakyat	2	-	1	1	8	359,27	4	138,08	-	-	3	221,18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mahkamah Agung	4	3	1	-	13	1.048,74	4	84,09	2	964,65	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kejaksanaan Republik Indonesia	17	10	2	2	5	302,00	2	241,41	1	-	1	20,58	6	1	40,00	-	-	-	-	-	-	241,41	-	-
5	Sekretariat Negara	3	2	1	1	19	1.804,12	3	45,04	-	-	3	65,93	9	-	-	4	1.693,14	-	-	-	-	-	-	-
6	Kementerian Dalam Negeri	10	3	3	4	35	38.583,34	12	26.038,24	1	49,99	2	4.464,59	17	2	4.036,06	1	3.994,44	1.696,61	353,61	-	-	-	-	-
7	Kementerian Luar Negeri	4	-	3	1	6	3.466,66	-	-	-	-	2	3.466,66	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kementerian Pertahanan	4	2	1	1	9	51.175,61	-	-	1	2.793,98	4	48.381,63	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	12	8	2	2	5	549,18	-	-	2	549,18	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kementerian Keuangan	12	8	1	1	3	1.260,87	2	534,85	-	-	3	726,02	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kementerian Pertanian	26	10	4	4	12	93.936,00	6	1.276,23	3	85.836,55	9	6.684,16	7	-	-	1	139,04	109,85	1.576,84	-	-	-	-	-
12	Kementerian Perindustrian	3	1	1	1	10	417,60	3	417,60	-	-	-	-	6	-	-	1	-	417,60	-	-	-	-	-	-
13	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	10	3	3	4	11	4.353,28	3	3.343,54	2	-	1	1.009,73	5	-	-	-	-	3.343,54	1.009,73	-	-	-	-	-
							USD11.720,00				USD11.720,00														
14	Kementerian Perhubungan	18	8	5	5	6	112.910,10	1	21.726,09	2	9.403,15	1	81.780,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kementerian Pendidikan Nasional	22	10	7	5	37	325.476,41	10	86.709,01	3	163.721,06	5	39.826,19	12	1	15,75	6	35.204,39	4.594,57	308,29	-	-	-	-	-
16	Kementerian Kesehatan	22	12	7	3	42	267.841,28	12	47.924,18	4	124.953,40	5	21.873,38	15	2	663,02	4	72.427,28	193,20	4,28	-	-	-	-	-
17	Kementerian Agama	14	2	6	6	24	15.701,11	7	6.810,25	-	-	7	5.905,50	8	1	2.054,60	1	930,75	1.659,19	227,59	-	-	-	-	-
18	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	5	3	1	10	15.285,10	4	577,68	1	-	3	14.707,41	2	-	-	-	-	29,22	-	-	-	-	-	-
19	Kementerian Sosial	8	1	5	2	25	4.889,18	2	2.276,16	-	-	4	1.281,24	13	3	1.107,35	3	224,42	-	-	-	-	-	-	-
20	Kementerian Kesehatan	20	10	5	5	25	74.143,83	11	15.429,21	1	178,24	7	58.536,38	6	-	-	-	-	721,43	34,88	-	-	-	-	-
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7	6	1	-	8	2.675,98	4	2.462,20	-	-	1	213,77	3	-	-	-	-	2.111,39	213,77	-	-	-	-	-
22	Kementerian Pekerjaan Umum	11	6	1	4	18	28.183,58	9	6.674,10	-	-	4	21.509,48	5	-	-	-	-	906,20	-	-	-	-	-	-
23	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	2	1	1	1	4	418,54	2	418,54	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Halaman 2 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Nilai Penyerahan Aset atau Penyeroran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan											
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	-	1	1	1	40,91	1	40,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,91	-	-	
25	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	2	1	-	1	3	501,86	2	501,86	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	10	3	4	3	26	6.251,32	9	2.180,03	-	-	4	494,13	10	1	374,90	2	3.202,24	-	-	-	-	
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Kementerian Riset dan Teknologi	5	1	2	2	10	957,57	2	928,30	-	-	-	-	7	1	29,26	-	-	-	7,95	-	-	
29	Kementerian Lingkungan Hidup	2	1	1	-	12	8.986,85	3	2.472,77	3	6.477,04	1	37,02	5	-	-	-	-	-	1.362,69	33,71	-	
30	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5	-	1	4	7	12.664,98	1	1.133,43	4	4.190,93	-	-	1	-	-	1	7.340,60	-	-	-	-	
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	2	2	1	6	959,14	1	224,86	-	-	1	34,47	2	1	108,00	1	591,79	-	-	-	34,47	
32	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	1	-	-	3	448,47	2	443,60	-	-	1	4,87	-	-	-	-	-	-	214,10	-	-	
33	Badan Intelijen Negara	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Lembaga Sandi Negara	6	2	1	3	5	972,75	2	777,75	1	195,00	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Dewan Ketahanan Nasional	4	-	-	4	1	3,52	1	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Badan Pusat Statistik	11	6	1	4	13	471,41	6	469,91	-	-	2	1,50	5	-	-	-	-	-	71,87	-	-	
37	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	5	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Badan Pertahanan Nasional	5	1	1	3	6	733,32	2	583,34	-	-	1	149,98	3	-	-	-	-	-	256,13	149,98	-	
39	Perpustakaan Nasional	3	-	2	1	2	47,61	2	47,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,61	-	-	
40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	11	2	4	5	17	3.400,87	5	855,71	-	-	2	2.265,46	6	3	279,69	1	-	-	-	-	-	
41	Kepolisian Republik Indonesia	16	8	3	5	11	78.304,25	6	24.895,02	-	-	5	53.409,22	-	-	-	-	-	-	388,47	4.201,59	-	
42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	12	7	3	2	7	4.227,28	1	451,49	-	-	2	1.227,57	2	1	1.239,29	1	1.308,90	-	-	-	799,85	
43	Lembaga Ketahanan Nasional	1	-	1	-	5	60,50	1	49,12	-	-	1	11,37	3	-	-	-	-	-	49,12	-	-	
44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	1	-	-	2	34,29	-	-	-	-	1	34,29	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

**Halaman 3 - Lampiran 4**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan			
		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Keugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kekadakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
45	Badan Narkotika Nasional	12	5	3	4	12	2.519,51	4	1.702,09	1	560,69	2	130,52	4	-	-	1	126,20	1.007,18	14,24					
46	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	9	8	1	-	13	104.470,79	4	1.518,07	1	1,68	2	525,19	4	-	-	2	102.425,83	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	10	7	2	1	6	16.907,00	1	665,81	-	-	4	16.241,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	8	3	2	3	1	73,52	1	73,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,52	-
49	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	5	1	3	1	4	8.140,42	1	19,80	-	-	-	-	2	-	-	1	8.120,61	19,80	-	-	-	-	-	-
50	Komisi Pemilihan Umum	8	6	1	1	6	6.691,99	2	2.593,91	2	4.002,24	1	41,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,54	1.340,63
51	Mahkamah Konstitusi	1	1	-	-	2	196,79	1	196,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	5	4	1	-	4	305,10	-	-	-	-	1	305,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	8	2	5	1	14	6.516,98	3	128,77	1	6.388,21	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Badan Tenaga Nuklir Nasional	3	-	2	1	7	36,89	1	24,35	-	-	-	-	5	1	12,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	5	3	1	1	7	380,98	3	268,78	-	-	-	-	3	1	112,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	6	1	3	2	7	9.772,96	1	29,70	1	9.595,15	1	46,80	3	-	-	1	101,30	-	-	-	-	-	-	-
57	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	5	4	1	-	13	5.500,02	7	4.475,45	-	-	1	2,14	3	1	541,32	1	481,10	833,27	-	-	-	-	-	-
58	Badan Standardisasi Nasional	1	-	-	1	6	59,23	3	59,23	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,79	-
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2	1	-	1	7	73,25	5	73,25	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,47	-
60	Lembaga Administrasi Negara	-	-	-	-	6	945,43	2	231,51	1	582,90	1	32,10	1	-	-	1	98,92	131,33	-	-	-	-	-	-
61	Arisip Nasional Republik Indonesia	2	1	-	1	9	8.393,48	3	195,30	-	-	1	4,90	4	-	-	1	8.193,28	-	-	-	-	-	-	-
62	Badan Kepegawaian Negara	1	1	-	-	5	2.503,58	1	204,00	-	-	2	196,94	-	-	-	2	2.102,64	-	-	-	-	-	-	-
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3	1	1	1	5	372,99	2	79,73	-	-	-	-	2	-	-	1	293,25	-	-	-	-	-	-	-
64	Kementerian Perencanaan Pembangunan	5	3	-	2	14	3.500,45	8	3.430,67	-	-	1	16,63	4	-	-	1	53,15	882,33	-	-	-	-	-	-
65	Kementerian Perumahan Rakyat	2	1	1	-	3	403,25	2	403,25	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,51	-
66	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2	-	2	-	9	16.370,77	4	1.418,05	-	-	4	14.952,72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Halaman 4 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaksiptuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/Daerah atas Tindakan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan							
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
67	Komis Pembantasan Korupsi	5	1	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	Dewan Perwakilan Daerah	-	-	-	-	-	10	1.564,54	7	1.537,48	-	2	27,05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,67	-	-	27,05	
69	Komis Yudisial	2	1	1	1	3	19,28	-	-	-	-	1	3,65	1	1	15,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65	
70	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2	1	1	1	7	387,20	3	286,06	-	-	2	101,14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	
71	BNP2TKI	1	-	-	-	1	366,92	5	236,38	-	-	1	28,69	3	1	101,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	Badan SAR Nasional	6	3	3	3	11	20.825,33	5	874,79	1	9.519,10	2	10.332,82	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,61	-	-	1.637,08	
74	Bendahara Umum Negara (BUN)	10	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	3	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	BA 999.02 - Penerimaan Hibah	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	BA 999.04 - Penerimaan Pinjaman	3	2	1	1	1	794,77	-	-	-	-	1	794,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	6	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	BA 999.07 - Belanja Subsidi	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	BA 999.08 - Belanja Lainnya	5	3	1	1	9	22.839,00	4	13.906,58	-	-	2	8.688,17	2	1	244,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,15
82	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	1	1	1	8	720,02	4	377,30	-	-	-	-	2	2	342,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,44
83	Komis Pengawas Persaingan Usaha	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	<b>JUMLAH</b>	519	226	134	159	731	1.406.023,14	235	294.196,65	39	429.963,21	118	420.818,59	269	25	11.318,48	45	249.726,18	24.768,90	10.750,23									
							USD11,720.00				USD11,720.00																		

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asli yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2005 - 2010**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010	
<b>1</b>	<b>Prov. Aceh</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>18</b>		<b>22</b>		<b>22</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>9</b>	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	5	Kab. Aceh Jaya			1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP		
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	10	Kab. Aceh Tenggara			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
11	11	Kab. Aceh Timur	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	17	Kab. Pidie			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
18	18	Kab. Pidie Jaya							1	WTP	1	WDP		
19	19	Kab. Simeulue			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW		
20	20	Kota Banda Aceh	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		
23	23	Kota Sabang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	24	Kota Subulussalam							1	WDP	1	WDP		
<b>2</b>	<b>Prov. Sumatera Utara</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>20</b>		<b>26</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		<b>29</b>		<b>22</b>	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
3	27	Kab. Batubara					1	WDP	1	TMP	1	TMP		
4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	29	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan										**	1	WDP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara										**		
11	35	Kab. Langkat			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	37	Kab. Nias			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	38	Kab. Nias Barat										**		
15	39	Kab. Nias Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
16	40	Kab. Nias Utara										**		
17	41	Kab. Padang Lawas									1	TMP		
18	42	Kab. Padang Lawas Utara									1	TMP		
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	44	Kab. Samosir			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	46	Kab. Simalungun			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW
24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
27	51	Kota Binjai			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW
28	52	Kota Gunung Sitoli										**		
29	53	Kota Medan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
30	54	Kota Padangsidempuan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	<b>3 Prov. Sumatera Barat</b>														
	<b>LKPD</b>			<b>15</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>13</b>	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP		
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	74	Kota Padang Panjang			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	75	Kota Pariaman			1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	78	Kota Solok			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	<b>4 Prov. Riau</b>														
	<b>LKPD</b>			<b>9</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>6</b>	
	1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
	4	82	Kab. Indragiri Hulu			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti										**		
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	10	88	Kab. Rokan Hulu			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	<b>5 Prov. Jambi</b>														
	<b>LKPD</b>			<b>8</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>12</b>		<b>9</b>	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	94	Kab. Bungo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci			1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	10	101	Kab. Tebo			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh									1	WTP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010	
<b>6</b>	<b>Prov. Sumatera Selatan</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>16</b>		<b>16</b>		<b>16</b>	
1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	105	Kab. Banyuasin	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP
3	106	Kab. Empat Lawang							1	WDP	1	TW	1	WDP
4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	110	Kab. Musi Rawas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	117	Kota Pagaralam	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>7</b>	<b>Prov. Bengkulu</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>6</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	
1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	122	Kab. Bengkulu Tengah									1	WDP	1	WTP
4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	124	Kab. Kaur			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
6	125	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
7	126	Kab. Lebong			1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
8	127	Kab. Mukomuko			1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	128	Kab. Rejang Lebong	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	129	Kab. Seluma			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>8</b>	<b>Prov. Lampung</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>12</b>		<b>15</b>	
1	131	Prov. Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
2	132	Kab. Lampung Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	135	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
7	137	Kab. Mesuji										**	1	WDP
8	138	Kab. Pesawaran									1	WDP	1	WDP
9	139	Kab. Pringsewu										**	1	TMP
10	140	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	141	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	142	Kab. Tulang Bawang Barat										**	1	WDP
13	143	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
14	144	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
15	145	Kota Metro	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
<b>9</b>	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>6</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>	
1	146	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	147	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	148	Kab. Bangka Barat			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	149	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	150	Kab. Bangka Tengah			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	151	Kab. Belitung	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP



No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		
	7	152	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	153	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
<b>10</b>	<b>Prov. Kepulauan Riau</b>														
	<b>LKPD</b>		<b>5</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>7</b>		
	1	154	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	155	Kab. Bintan			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	156	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	157	Kab. Kepulauan Anambas									1	TMP	1	WDP
	5	158	Kab. Lingga			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	159	Kab. Natuna	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	160	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	8	161	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>11</b>	<b>Prov. DKI Jakarta</b>														
	<b>LKPD</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
	1	162	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>12</b>	<b>Prov. Jawa Barat</b>														
	<b>LKPD</b>		<b>23</b>		<b>26</b>		<b>26</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		
	1	163	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	164	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	165	Kab. Bandung Barat							1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	166	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	167	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	168	Kab. Ciamis			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	169	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	170	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	171	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	172	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	173	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	174	Kab. Kuningan			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	175	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	176	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	177	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	178	Kab. Sukabumi			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	179	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	180	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	181	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	20	182	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	183	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	22	184	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	185	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	186	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	187	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	188	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	189	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>13</b>	<b>Prov. Jawa Tengah</b>														
	<b>LKPD</b>		<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>		
	1	190	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	191	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	192	Kab. Banyumas	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	193	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	194	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	195	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	196	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	197	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	198	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	10	199	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		
	11	200	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	201	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	202	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	203	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	204	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	205	Kab. Kudus	1	WTP-DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	206	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	207	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	208	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	209	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	210	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	211	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	212	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	213	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	214	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	215	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	216	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	28	217	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	218	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	219	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	220	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	221	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	33	222	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	223	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	224	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	36	225	Kota Tegal	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	<b>14</b>		<b>Prov. D.I. Yogyakarta</b>												
			<b>LKPD</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	
	1	226	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	227	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	228	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	229	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	230	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	231	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	<b>15</b>		<b>Prov. Jawa Timur</b>												
			<b>LKPD</b>	<b>26</b>		<b>39</b>		<b>39</b>		<b>39</b>		<b>39</b>		<b>39</b>	
	1	232	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	233	Kab. Bangkalan			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	234	Kab. Banyuwangi			1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	235	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	236	Kab. Bojonegoro			1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	6	237	Kab. Bondowoso			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	238	Kab. Gresik			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	239	Kab. Jember	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	9	240	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	241	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	242	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	243	Kab. Lumajang	1	WTP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	244	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	245	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	246	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	247	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	248	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	249	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	250	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	251	Kab. Pamekasan			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	252	Kab. Pasuruan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	22	253	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010	
23	254	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	255	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
25	256	Kab. Sidoarjo			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	WDP
26	257	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
27	258	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	259	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
29	260	Kab. Tuban	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	261	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
31	262	Kota Batu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
32	263	Kota Blitar			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
33	264	Kota Kediri			1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
34	265	Kota Madiun			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
35	266	Kota Malang			1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
36	267	Kota Mojokerto			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
37	268	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
38	269	Kota Probolinggo			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
39	270	Kota Surabaya	1	WDP	1	WTP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP
<b>16 Prov. Banten</b>														
<b>LKPD</b>			<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>9</b>		<b>9</b>	
1	271	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	272	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	273	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
4	274	Kab. Serang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	275	Kab. Tangerang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	276	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
7	277	Kota Serang							1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	278	Kota Tangerang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	279	Kota Tangerang Selatan									1	WDP	1	WTP
<b>17 Prov. Bali</b>														
<b>LKPD</b>			<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>	
1	280	Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
2	281	Kab. Badung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	282	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	283	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
5	284	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	285	Kab. Jembrana	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW
7	286	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
8	287	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	288	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	289	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>18 Prov. Nusa Tenggara Barat</b>														
<b>LKPD</b>			<b>7</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	
1	290	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
2	291	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	292	Kab. Dompu	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	293	Kab. Lombok Barat			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	294	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	295	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	296	Kab. Lombok Utara									1	WDP	1	WDP
8	297	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	298	Kab. Sumbawa Barat			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	299	Kota Bima			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
11	300	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>19 Prov. Nusa Tenggara Timur</b>														
<b>LKPD</b>			<b>15</b>		<b>17</b>		<b>17</b>		<b>20</b>		<b>21</b>		<b>12</b>	
1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	302	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2005	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
3	303 Kab. Belu	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
4	304 Kab. Ende	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 TMP
5	305 Kab. Flores Timur	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	
6	306 Kab. Kupang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 TMP	
7	307 Kab. Lembata		1 TW	1 WDP	1 WDP	1 TMP	
8	308 Kab. Manggarai	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	
9	309 Kab. Manggarai Barat	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 TMP	1 TMP
10	310 Kab. Manggarai Timur					1 TMP	
11	311 Kab. Nagekeo				1 WDP	1 TMP	1 TMP
12	312 Kab. Ngada	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 TMP
13	313 Kab. Rote Ndao		1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 TMP	1 TMP
14	314 Kab. Sabu Raijua					**	1 WDP
15	315 Kab. Sikka	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	
16	316 Kab. Sumba Barat	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 TMP
17	317 Kab. Sumba Barat Daya				1 WDP	1 TMP	1 WDP
18	318 Kab. Sumba Tengah				1 WDP	1 TMP	1 WDP
19	319 Kab. Sumba Timur	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	
20	320 Kab. Timor Tengah Selatan	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	
21	321 Kab. Timor Tengah Utara	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	
22	322 Kota Kupang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
<b>20 Prov. Kalimantan Barat</b>							
LKPD		11	13	13	14	15	10
1	323 Prov. Kalimantan Barat	1 TMP	1 TW	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
2	324 Kab. Bengkayang	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TW	1 TMP	
3	325 Kab. Kapuas Hulu	1 WDP	1 WDP	1 TW	1 TW	1 TMP	
4	326 Kab. Kayong Utara				1 TMP	1 TMP	
5	327 Kab. Ketapang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
6	328 Kab. Kubu Raya					1 TW	1 TW
7	329 Kab. Landak	1 TW	1 WDP	1 TW	1 TW	1 TW	
8	330 Kab. Melawi		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TW	1 TW
9	331 Kab. Pontianak	1 WTP	1 WTP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
10	332 Kab. Sambas	1 WDP	1 WTP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
11	333 Kab. Sanggau	1 WTP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
12	334 Kab. Sekadau		1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
13	335 Kab. Sintang	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
14	336 Kota Pontianak	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
15	337 Kota Singkawang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TW	1 WDP
<b>21 Prov. Kalimantan Tengah</b>							
LKPD		15	15	15	15	15	8
1	338 Prov. Kalimantan Tengah	1 WDP	1 TW	1 TW	1 WDP	1 TW	
2	339 Kab. Barito Selatan	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 TW	1 TW	1 TW
3	340 Kab. Barito Timur	1 TMP	1 TW	1 TMP	1 TMP	1 TW	
4	341 Kab. Barito Utara	1 WDP	1 WDP	1 TW	1 TW	1 TW	1 TMP
5	342 Kab. Gunung Mas	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TW	1 TW	
6	343 Kab. Kapuas	1 WDP	1 TMP	1 TW	1 TW	1 WDP	1 WDP
7	344 Kab. Katingan	1 TMP	1 TW	1 TW	1 WDP	1 WDP	
8	345 Kab. Kotawaringin Barat	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TW	1 WDP
9	346 Kab. Kotawaringin Timur	1 WDP	1 TW	1 TW	1 TW	1 TW	1 TW
10	347 Kab. Lamandau	1 WDP	1 WDP	1 TW	1 TW	1 TW	
11	348 Kab. Murung Raya	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TW	1 TW	
12	349 Kab. Pulang Pisau	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TW	1 TW	1 TW
13	350 Kab. Seruyan	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
14	351 Kab. Sukamara	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TW	1 WDP
15	352 Kota Palangkaraya	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TW	
<b>22 Prov. Kalimantan Selatan</b>							
LKPD		13	14	14	14	14	5
1	353 Prov. Kalimantan Selatan	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
2	354 Kab. Balangan		1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010	
3	355	Kab. Banjar	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW		
4	356	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW		
5	357	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	358	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
7	359	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	360	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
9	361	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
10	362	Kab. Tanah Bumbu	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
11	363	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	364	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	365	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
14	366	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
<b>23 Prov. Kalimantan Timur</b>														
<b>LKPD</b>			<b>12</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>15</b>		<b>7</b>	
1	367	Prov. Kalimantan Timur	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
2	368	Kab. Berau	1	TW	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
3	369	Kab. Bulungan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW		
4	370	Kab. Kutai Barat			1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW		
5	371	Kab. Kutai Kartanegara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	372	Kab. Kutai Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	373	Kab. Malinau	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP		
8	374	Kab. Nunukan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	TW	1	TW
9	375	Kab. Paser			1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW
10	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW
11	377	Kab. Tana Tidung									1	TMP		
12	378	Kota Balikpapan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	379	Kota Bontang	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
14	380	Kota Samarinda	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
15	381	Kota Tarakan	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>24 Prov. Sulawesi Utara</b>														
<b>LKPD</b>			<b>8</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>14</b>		<b>16</b>		<b>1</b>	
1	382	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	383	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									1	WDP		
4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur									1	WDP		
5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara							1	WDP	1	WDP		
6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW		
7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro							1	WDP	1	WDP		
8	389	Kab. Kepulauan Talaud			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
9	390	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
10	391	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW		
11	392	Kab. Minahasa Tenggara							1	TMP	1	TMP		
12	393	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
13	394	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
14	395	Kota Kotamobagu							1	WDP	1	WDP		
15	396	Kota Manado	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TW		
16	397	Kota Tomohon			1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW		
<b>25 Prov. Sulawesi Tengah</b>														
<b>LKPD</b>			<b>8</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>12</b>		<b>12</b>	
1	398	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
2	399	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	400	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	401	Kab. Buol			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	402	Kab. Donggala	1	WTP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
6	403	Kab. Morowali	1	WTP-DPP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
7	404	Kab. Parigi Moutong			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
8	405	Kab. Poso	1	WTP-DPP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		
	9	406	Kab. Sigi								1	TMP	1	WDP	
	10	407	Kab. Tojo Una-Una			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
	11	408	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	12	409	Kota Palu	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	<b>26</b>		<b>Prov. Sulawesi Selatan</b>												
			<b>LKPD</b>	<b>20</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>25</b>		<b>14</b>	
	1	410	Prov. Sulawesi Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	2	411	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	3	412	Kab. Barru			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	413	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	414	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	415	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	416	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	417	Kab. Jeneponto			1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP		
	9	418	Kab. Kep. Selayar			1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP		
	10	419	Kab. Luwu	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	11	420	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	421	Kab. Luwu Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	13	422	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	424	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	425	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	426	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	18	427	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	19	428	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	20	429	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	430	Kab. Toraja Utara									1	WDP	1	WDP
	22	431	Kab. Wajo	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	432	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	24	433	Kota Palopo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	25	434	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	<b>27</b>		<b>Prov. Sulawesi Tenggara</b>												
			<b>LKPD</b>	<b>8</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>13</b>		<b>13</b>		<b>6</b>	
	1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	436	Kab. Bombana			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	3	437	Kab. Buton	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	438	Kab. Buton Utara							1	TMP	1	TMP		
	5	439	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
	6	440	Kab. Kolaka Utara			1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP		
	7	441	Kab. Konawe	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	8	442	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	9	443	Kab. Konawe Utara							1	TMP	1	TMP		
	10	444	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	11	445	Kab. Wakatobi			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
	12	446	Kota Bau-Bau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	13	447	Kota Kendari	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	<b>28</b>		<b>Prov. Gorontalo</b>												
			<b>LKPD</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	
	1	448	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	449	Kab. Boalemo	1	WTP-DPP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	450	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	451	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	452	Kab. Gorontalo Utara					1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	453	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	454	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010	
<b>29</b>	<b>Prov. Sulawesi Barat</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>4</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>5</b>	
1	455	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	456	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
3	457	Kab. Mamasa			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	458	Kab. Mamuju	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	459	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
6	460	Kab. Polewali Mandar			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>30</b>	<b>Prov. Maluku</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>4</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>12</b>		<b>3</b>	
1	461	Prov. Maluku	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	462	Kab. Buru	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	463	Kab. Buru Selatan									1	TMP		
4	464	Kab. Kepulauan Aru			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*		
5	465	Kab. Maluku Barat Daya									1	TMP		
6	466	Kab. Maluku Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
7	467	Kab. Maluku Tenggara			1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
9	469	Kab. Seram Bagian Barat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*		
10	470	Kab. Seram Bagian Timur			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*		
11	471	Kota Ambon	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
12	472	Kota Tual									1	TMP		
<b>31</b>	<b>Prov. Maluku Utara</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>1</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>3</b>	
1	473	Prov. Maluku Utara			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
2	474	Kab. Halmahera Barat			1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW		
3	475	Kab. Halmahera Selatan			1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP
4	476	Kab. Halmahera Tengah			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
5	477	Kab. Halmahera Timur			1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW		
6	478	Kab. Halmahera Utara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP
7	479	Kab. Kepulauan Sula			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
8	480	Kab. Pulau Morotai										**		
9	481	Kota Ternate	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP
10	482	Kota Tidore Kepulauan			1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP		
<b>32</b>	<b>Prov. Papua</b>													
	<b>LKPD</b>		<b>6</b>		<b>18</b>		<b>21</b>		<b>22</b>		<b>23</b>		<b>9</b>	
1	483	Prov. Papua	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
2	484	Kab. Asmat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	485	Kab. Biak Numfor	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
4	486	Kab. Boven Digoel			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	487	Kab. Deiyai										**		
6	488	Kab. Dogiyai							1	TMP	1	TMP		
7	489	Kab. Intan Jaya										**		
8	490	Kab. Jayapura	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	491	Kab. Jayawijaya			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	492	Kab. Keerom			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	493	Kab. Kepulauan Yapen					1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
12	494	Kab. Lanny Jaya										**		
13	495	Kab. Mamberamo Raya									1	TMP*		
14	496	Kab. Mamberamo Tengah										**		
15	497	Kab. Mappi					1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
16	498	Kab. Merauke	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
17	499	Kab. Mimika			1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
18	500	Kab. Nabire	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
19	501	Kab. Nduga										**		
20	502	Kab. Paniai			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
21	503	Kab. Pegunungan Bintang			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2005		Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010	
22	504	Kab. Puncak										**		
23	505	Kab. Puncak Jaya			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
24	506	Kab. Sarmi			1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP		
25	507	Kab. Supiori			1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
26	508	Kab. Tolikara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
27	509	Kab. Waropen					1	TMP	1	TMP	1	TMP		
28	510	Kab. Yahukimo			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
29	511	Kab. Yalimo										**		
30	512	Kota Jayapura	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
<b>33 Prov. Papua Barat</b>														
	<b>LKPD</b>		<b>2</b>		<b>9</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>1</b>	
1	513	Prov. Papua Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	514	Kab. Fakfak			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP		
3	515	Kab. Kaimana			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
4	516	Kab. Manokwari			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
5	517	Kab. Maybrat										**		
6	518	Kab. Raja Ampat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	519	Kab. Sorong			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
8	520	Kab. Sorong Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
9	521	Kab. Tambrau										**		
10	522	Kab. Teluk Bintuni			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	523	Kab. Teluk Wondama					1	TMP	1	TMP	1	TMP*		
12	524	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	<b>Jumlah</b>		<b>362</b>		<b>463</b>		<b>469</b>		<b>485</b>		<b>504</b>		<b>358</b>	

## Keterangan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)  
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion With Modified Wording*)  
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*)  
TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)  
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)  
\* : LKPD Tahun 2009 untuk Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Mamberamo Raya, dan Kab. Teluk Wondama baru diperiksa pada Semester I Tahun 2011  
\*\* : Daerah pemekaran baru (belum wajib menyusun dan melaporkan LKPD)



**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI**  
**Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>1.401</b>	<b>41,24</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	784	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	371	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	24	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	204	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	17	
6	Lain-lain	1	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>1.368</b>	<b>40,27</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	499	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	170	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	375	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	63	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	173	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	70	
7	Lain-lain	18	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>628</b>	<b>18,49</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	265	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	326	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	3	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	17	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	17	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>3.397</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan  
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<b><i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Daerah</b>	<b>1.197</b>	<b>26,30</b>	<b>376.965,01</b>	<b>7,14</b>
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	100		31.735,43	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	30		3.699,38	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	340		74.999,50	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	147		30.970,01	
5	Pemahalan harga ( <i>Mark up</i> )	47		7.765,68	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	94		65.839,13	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	131		21.909,44	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	37		8.195,68	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	217		68.909,07	
10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	10		25.439,54	
11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	2		52,50	
12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	4		990,61	
13	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	1		16,06	
14	Lain-lain	37		36.442,94	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Daerah</b>	<b>313</b>	<b>6,88</b>	<b>3.283.343,78</b>	<b>62,17</b>
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	29		20.013,53	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	13		26.187,51	
3	Aset dikuasai pihak lain	63		1.039.248,12	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		93.782,51	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	57		1.624.500,39	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	9		100.967,93	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	3		1.650,53	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	110		330.681,39	
9	Lain-lain	28		46.311,83	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>857</b>	<b>18,83</b>	<b>478.101,00</b>	<b>9,05</b>
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	648		188.300,94	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	179		260.680,54	
3	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	4		4.373,28	
4	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	8		5.160,99	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	15		11.956,06	
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1		69,25	
7	Lain-lain	2		7.559,91	

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>1.774</b>	<b>38,98</b>	-	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	526		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	16		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	69		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	8		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	4		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	317		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	156		-	
8	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	1		-	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-	
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	250		-	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	122		-	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	84		-	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	59		-	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	138		-	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	9		-	
16	Lain-lain	14		-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan</b>	<b>144</b>	<b>3,16</b>	<b>73.215,37</b>	<b>1,39</b>
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	3		182,96	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	7		2.948,66	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	134		70.083,74	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefisienan</b>	<b>2</b>	<b>0,04</b>	<b>1.370,03</b>	<b>0,03</b>
1	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	2		1.370,03	
<b>VII</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>264</b>	<b>5,80</b>	<b>1.068.576,00</b>	<b>20,23</b>
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	153		207.679,38	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	16		20.845,37	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	39		71.793,18	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	6		439,64	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	35		763.913,72	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	6		868,07	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	9		3.036,61	
	<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>	<b>4.551</b>	<b>100,00</b>	<b>5.281.571,22</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern												Kekurangan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Ketidakefektifan						Ketidakefisienan						Kerugian Daerah						Potensi Kerugian Daerah					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Administrasi			Kendakhematan			Ketidakefisienan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan														
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																										
1	Prov. Aceh	54	23	19	12	107	42.662,75	17	12.550,02	1		25	10.178,98	48	6	1.945,79			10	17.987,94	13,39																												
1	Kab. Aceh Besar	7	3	2	2	11	20.511,12	1	7.456,31			5	6.779,23	4					1	6.295,56																													
2	Kab. Aceh Selatan	8	4	3	1	5	437,30					2	437,30	3																																			
3	Kab. Aceh Singkil	5	3	2	1	12	2.936,48	2	2.007,28					8																																			
4	Kab. Aceh Tamiang	5	2	2	1	12	2.299,53	2	1.898,68			3	400,85	7																																			
5	Kab. Aceh Tenggara	4	2	2	2	15	4.565,54	4	3.547,73			4	1.270,40	5					2	3.140,40																													
7	Kab. Gayo Lues	4	3	1	1	15	1.330,22	5	630,70			4	614,54	5																																			
6	Kab. Nagan Raya	5	2	1	2	17	6.132,25	2	404,87			1	94,94	9					1	3.843,19																													
8	Kota Banda Aceh	3	4	4	2	13	3.792,63	1	17,41	1		1	515,43	5					1	3.188,18	13,39																												
9	Kota Sabang	7	2	3	2	7	657,64					2	662,4	2					3	591,40																													
2	Prov. Sumatera Utara	165	63	76	26	302	140.041,48	139	68.189,87	11	10.338,51	62	42.715,32	68	4	2.139,03			18	16.658,72	2.957,93																												
1	Prov. Sumatera Utara	6	2	2	2	14	5.023,03	4	4.178,92			4	746,35	5					1	97,75																													
2	Kab. Asahan	13	6	6	1	11	9.834,68	6	2.075,84			2	5.293,89	1					1	2.337,33																													
3	Kab. Dairi	9	3	4	2	18	3.464,24	11	2.560,55			1	6,97	5					1	896,72	1.76,23																												
4	Kab. Deli Serdang	6	2	4		8	10.020,49	1	106,00	2	3.405,68	2	6.508,81	3																																			
5	Kab. Humbang Hasundutan	9	2	4	3	16	4.327,68	6	645,77			6	2.031,91	2					1	5,20																													
6	Kab. Karo	9	6	2	1	20	4.897,29	9	1.854,90	2	863,26	6	556,01	1					2	1.623,11	3,17																												
7	Kab. Labuhanbatu	8	4	2	2	10	11.042,27	4	5.818,13			2	585,29	3					1	4.638,84																													
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	7	2	5		8	1.932,34	3	1.776,84			2	155,50	3																																			
9	Kab. Langkat	6	4	1	1	14	10.469,51	8	3.149,51	1	563,14	2	6.756,86	3							1.140,70																												
10	Kab. Mandailing Natal	4	1	3		10	1.899,89	8	1.805,13			1	248,21						1	46,55																													
11	Kab. Pakpak Bharat	5	2	1	2	17	1.253,72	10	1.111,73			2	37,59	4					1	104,40	26,99																												
12	Kab. Samosir	12	4	7	1	10	5.703,33	5	2.861,51	1	755,52	3	1.753,29	1					1	50,00																													
13	Kab. Serdang Beergai	12	3	6	3	12	5.387,09	5	2.363,08			2	3.074,00	4					1	327,43																													
14	Kab. Simalungun	7	2	5	2	23	4.877,48	9	2.716,26	1	1.300,74	4	533,04	7					2	132,45																													
15	Kab. Tapanuli Selatan	8	4	3	1	9	22.931,21	4	21.979,91	2	245,31	1	305,98	2																																			
16	Kab. Tapanuli Utara	6	2	3	1	10	2.015,56	6	2.95,11			2	1.720,45																																				
17	Kota Binjai	6	1	3	2	24	11.318,77	9	5.730,96	2	3.204,82	6	189,67	4					2	1.893,30																													
18	Kota Medan	5	3	2	12	2.810,32	5	1.532,22			3	1.211,47							1	66,61																													
19	Kota Pangkajene	7	4	3	3	23	4.578,35	10	998,96			3	45,30	7					3	3.574,09																													
20	Kota Pematangsiantar	11	4	7	24	12.826,45	13	2.607,93			5	9.154,53	5						1	1.063,97	4,57																												
21	Kota Tanjungbalai	6	2	3	1	5	1.800,13					3	1.800,13	2																																			
22	Kota Tebing Tinggi	3	2	2	1	4	2.360,54	3	2.360,54					1							1.473,80																												

(nilai dalam juta rupiah)



## Halaman 3 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatannya terhadap Ketemuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan										Ketidakefektifan				Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan/ Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai				
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
6	Prov. Sumatera Selatan	134	56	54	24	239	286.931,91	54	12.798,72	12	234.580,08	31	8.312,55	110	2.567,07	10	2.567,07	22	28.673,48	22	28.673,48	4.610,96	750,00	198,10					
1	60 Prov. Sumatera Selatan	16	6	6	4	21	23.022,18	8	2.070,92	1	2.070,92	2	2.251,36	7	199,88	2	199,88	1	18.500,00	1	18.500,00	-	-	-	-	-			
2	61 Kab. Banyuasin	8	3	4	1	9	1.868,35	1	307,65	-	-	3	1.405,37	4	-	-	-	1	145,33	1	145,33	-	-	-	-	-			
3	62 Kab. Empat Lawang	2	1	1	-	19	2.443,84	3	1.654,09	1	220,89	1	37,76	9	30,00	1	30,00	4	535,09	4	535,09	80,38	-	-	-	-			
4	63 Kab. Lahat	12	7	5	-	11	465,40	3	250,11	-	-	4	215,29	4	-	-	-	-	-	-	-	5,01	-	-	-	0,78			
5	64 Kab. Muara Enim	6	4	1	1	8	1.426,52	1	28,20	1	220,00	2	25,23	1	-	-	-	3	1.155,09	3	1.155,09	28,20	-	-	-	5,00			
6	65 Kab. Musi Banyuasin	7	4	1	2	17	209.209,56	6	1.451,22	2	206.550,32	1	178,01	6	430,00	1	430,00	-	600,00	1	600,00	80,70	-	-	-	-			
7	66 Kab. Musi Rawas	5	-	5	-	16	3.908,47	7	284,03	-	-	3	188,42	4	-	-	-	2	3.036,03	2	3.036,03	7,31	-	-	-	-			
8	67 Kab. Ogan Ilir	12	2	6	4	18	3.685,32	3	541,77	3	881,36	1	1.900,09	10	362,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	68 Kab. Ogan Komering Ilir	9	2	4	3	10	1.936,71	1	37,45	1	510,00	-	-	6	-	-	-	2	849,26	2	849,26	-	-	-	-	-			
10	69 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	6	1	4	1	20	29.779,70	5	2.768,03	1	25.126,91	3	108,54	8	467,16	-	-	1	1.109,05	1	1.109,05	2.345,49	-	-	-	-			
11	70 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	6	3	3	-	13	524,37	6	488,33	-	-	1	36,04	6	-	-	-	1	165,78	1	165,78	-	-	-	-	-			
12	71 Kab. Ogan Komering Ulu Timur	7	5	1	1	15	1.655,20	1	546,27	-	-	3	54,44	9	260,25	-	-	1	794,23	1	794,23	-	-	-	-	-			
13	72 Kota Lubuklinggau	10	4	3	3	14	2.989,44	3	875,49	-	-	-	-	7	791,23	-	-	3	1.327,71	3	1.327,71	579,73	-	-	-	-			
14	73 Kota Palembang	12	7	5	-	28	3.452,47	5	1.318,32	2	1.070,59	4	669,07	15	26,44	-	-	1	366,04	1	366,04	1.318,32	750,00	192,32	-	-			
15	74 Kota Palembang	7	2	3	2	11	1.988,98	1	176,79	-	-	2	1.222,19	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	75 Kota Prabumulih	9	5	2	2	9	315,31	-	-	-	-	1	54,69	6	-	-	-	2	260,62	2	260,62	-	-	-	-	-			
7	Prov. Bengkulu	53	21	22	10	123	50.872,83	38	8.776,31	5	3.251,63	26	16.468,03	40	81,93	-	-	11	22.294,91	11	22.294,91	562,76	-	-	127,80	-			
1	76 Prov. Bengkulu	8	2	5	1	12	4.401,23	5	1.437,40	-	-	1	372,00	4	18,91	-	-	1	2.572,92	1	2.572,92	36,69	-	-	-	-			
2	77 Kab. Bengkulu Selatan	6	2	3	1	9	2.195,51	-	-	-	-	2	2.062,57	5	15,00	-	-	1	117,93	1	117,93	-	-	-	-	-			
3	78 Kab. Bengkulu Tengah	2	1	1	-	8	9.908,52	2	149,11	-	-	3	9.159,40	3	-	-	-	-	-	-	-	25,71	-	-	-	-			
4	79 Kab. Bengkulu Utara	8	3	4	1	13	6.341,56	3	169,41	1	131,79	6	989,81	2	-	-	-	1	5.050,53	1	5.050,53	-	-	-	-	4,30			
5	80 Kab. Kaur	2	1	1	-	5	1.579,41	-	-	1	1.412,34	1	167,07	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	123,50			
6	81 Kab. Kepahiang	4	2	2	-	14	4.860,56	6	4.136,53	-	-	1	532,52	6	-	-	-	1	191,50	1	191,50	-	-	-	-	-			
7	82 Kab. Lebong	7	4	2	1	10	2.299,08	2	547,71	1	28,01	2	1.418,58	4	-	-	-	1	304,77	1	304,77	-	-	-	-	-			
8	83 Kab. Mukomuko	5	2	2	1	16	2.613,89	6	298,61	1	1.609,48	3	705,80	6	-	-	-	4	7.696,55	4	7.696,55	-	-	-	-	-			
9	84 Kab. Rejang Lebong	2	1	1	-	17	7.951,48	2	54,26	1	69,99	3	130,66	7	-	-	-	4	6.360,68	4	6.360,68	-	-	-	-	-			
10	85 Kab. Seluma	5	2	2	3	9	7.566,24	3	236,15	-	-	3	921,38	1	48,01	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
11	86 Kota Bengkulu	4	1	1	2	10	1.755,28	9	1.747,10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	500,35	-	-	-	-			
8	Prov. Lampung	137	67	50	20	136	176.994,41	23	8.705,27	12	125.935,46	28	11.493,73	53	8	14.418,95	-	-	12	16.440,97	12	16.440,97	2.017,58	-	-	32,40	-		
1	87 Prov. Lampung	12	7	4	1	13	15.336,42	4	4.468,09	1	1.415,00	3	2.169,60	3	2	7.283,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	88 Kab. Lampung Barat	10	3	7	-	6	1.378,08	1	142,53	-	-	3	782,44	1	-	-	-	1	453,10	1	453,10	142,53	-	-	-	17,47			
3	89 Kab. Lampung Selatan	12	5	6	1	7	6.837,31	1	13,31	-	-	1	6.587,67	4	-	-	-	1	6.166,32	1	6.166,32	-	-	-	-	-			



## Halaman 5 - Lampiran 8

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapahtuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Kerugian Daerah				Nilai	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Administrasi			Kendakhematan			Kendakefektifan		Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
12	Prov. Jawa Barat	216	105	78	33	361	1.377.742,14	1.188	23.362,74	28	1.304.415,21	51	29.657,69	136	14.341,28	-	7	5.965,20	2.862,82	-	118,17	-	-	1.935,67	
1	118	Prov. Jawa Barat	10	7	2	1	17	49.374,79	4	207,72	2	39.018,06	5	10.025,25	4	123,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	119	Kab. Bandung	6	2	4	-	16	4.005,66	9	2.146,39	-	-	2	1.601,59	3	60,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	120	Kab. Bandung Barat	12	9	2	1	8	14.883,82	3	378,55	2	14.365,36	2	139,89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	121	Kab. Bekasi	6	3	2	2	1	16	5.086,11	7	366,51	2	4.699,54	1	20,05	5	-	-	-	-	-	-	-	20,05	
5	122	Kab. Bogor	6	2	3	1	16	49.401,96	3	247,35	3	47.626,83	3	1.499,97	6	27,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	123	Kab. Cimahi	7	1	3	3	7	2.218,98	1	2.218,98	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	124	Kab. Cianjur	5	3	1	1	9	1.977,76	3	183,71	1	279,82	3	1.514,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	125	Kab. Cirebon	5	4	1	1	11	4.450,31	5	759,94	1	166,95	1	22,37	1	3.501,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	126	Kab. Garut	10	5	5	-	16	6.610,96	7	1.715,98	2	3.872,55	1	173,69	5	-	-	-	-	-	-	-	65,00	54,80	
10	127	Kab. Indramayu	10	3	5	2	13	5.089,84	1	187,65	2	4.863,02	1	39,15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	128	Kab. Karawang	6	3	1	2	12	102.934,07	3	605,82	1	99.489,01	3	2.839,22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	129	Kab. Kunjungan	6	2	2	2	10	1.148,51	3	858,95	1	195,01	1	94,54	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	130	Kab. Majalengka	5	4	1	-	11	1.916,15	2	539,69	1	181,00	2	1.095,46	6	-	-	-	-	-	-	-	-	62,00	
14	131	Kab. Purwakarta	3	2	1	1	13	3.970,31	7	1.418,58	-	-	2	1.222,26	2	231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	132	Kab. Subang	11	2	6	3	15	14.946,25	3	644,49	1	7.455,88	4	4.427,18	5	273,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	133	Kab. Sukabumi	8	4	2	2	19	24.137,82	8	2.397,25	2	21.166,06	3	374,49	6	-	-	-	-	-	-	-	-	894,63	
17	134	Kab. Sumedang	5	3	2	-	10	599,34	7	491,15	-	-	2	68,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	135	Kab. Tasikmalaya	8	4	2	2	14	7.143,56	6	1.730,24	-	-	1	30,13	5	5.383,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	136	Kota Bandung	13	10	3	-	28	5.664,75	11	1.129,04	-	-	3	3.415,35	8	1.103,55	-	-	-	-	-	-	-	16,80	
20	137	Kota Banjar	8	4	3	1	8	624,59	3	492,92	-	-	1	131,67	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	138	Kota Bekasi	8	4	4	3	20	21.999,71	3	252,27	3	21.344,50	1	59,72	12	43,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	139	Kota Bogor	8	5	1	2	9	8.611,82	4	742,82	1	7.860,69	1	8,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	140	Kota Cimahi	6	2	3	1	12	2.858,93	5	303,25	1	2.001,50	2	55,417	4	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	
24	141	Kota Cirebon	5	4	1	-	10	5.819,62	3	513,67	-	-	2	136,20	3	2.359,44	-	-	-	-	-	-	-	2.810,30	
25	142	Kota Depok	4	2	2	-	3	24,12	1	24,12	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	143	Kota Sukabumi	23	6	12	5	29	10.333,270,39	6	2.941,66	3	1.029.829,34	4	164,50	13	385,16	-	-	-	-	-	-	-	-	349,71
27	144	Kota Tasikmalaya	12	5	4	3	9	63,89	1	63,89	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Prov. Jawa Tengah	284	129	113	42	319	701.194,44	36	4.475,46	21	19.751,34	66	34.498,98	168	2.820,84	9	8.572,80	858,73	-	-	-	-	-	-	689,72
1	145	Prov. Jawa Tengah	8	4	1	3	9	7.055,13	3	346,49	2	2.171,54	1	4.417,14	2	119,94	-	-	-	-	-	-	-	-	349,82
2	146	Kab. Banjarnegara	6	3	3	-	14	4.884,10	1	1.827,59	-	-	5	3.056,50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	147	Kab. Banyumas	4	3	1	-	10	992,05	2	48,46	1	690,78	2	312,80	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	148	Kab. Batang	9	2	6	1	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,46	
5	149	Kab. Blora	8	3	4	1	12	10.835,27	1	19,82	-	-	5	10.815,45	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





Halaman 7 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Kedidapahtuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan		
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Kendakhematan		Kendakefisiensi		Kendakefektifan		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		3	3	3	3	3	3	3	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3	183 Kab. Gunung Kidul	6	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
4	184 Kab. Kulon Progo	4	4	4	4	4	6	6	194,21	1	180,00	1	14,21	4	-	2,07	-	-	-	-	-	1	607,50	-	-	-	
5	185 Kab. Sleman	3	3	3	3	3	5	5	441,24	-	-	-	-	1	9,24	3	-	-	-	-	-	1	482,00	-	-	14,21	
6	186 Kota Yogyakarta	3	6	6	6	6	9	9	1.576,18	2	17,15	-	2	1.425,55	4	-	-	-	-	-	-	1	133,47	-	-	9,24	
15	Prov. Jawa Timur	377	114	187	76	383	208.192,64	82	16.009,15	22	111.521,73	92	46.175,79	196	9	2.510,44	-	-	-	-	-	22	31.975,50	6.085,41	52,79	2.307,77	
1	187 Prov. Jawa Timur	8	1	5	2	9	139,73	1	16,88	1	52,79	1	70,05	6	-	-	-	-	-	-	-	6	16,88	-	-	70,05	
2	188 Kab. Bangkalan	7	1	5	1	5	5.980,92	-	-	1	97,17	1	5.883,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	189 Kab. Banyuwangi	3	7	7	7	7	9.708,72	2	196,69	-	4	363,49	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.146,53	-	-	-	
4	190 Kab. Blitar	3	7	3	3	19	4.248,65	5	3.006,84	1	50,00	3	899,68	8	1	292,12	-	-	-	-	-	1	2.512,14	-	-	52,24	
5	191 Kab. Bojonegara	2	6	6	3	20	5.300,06	8	611,77	1	3.956,62	3	15,74	6	-	-	-	-	-	-	-	2	745,91	103,57	-	3,34	
6	192 Kab. Bondowoso	1	4	4	3	16	1.241,80	1	36,73	2	1.101,40	5	103,66	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,18	-	21,71	
7	193 Kab. Gresik	6	6	6	10	8.441,21	1	4.052,73	-	4	4.388,47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,45	
8	194 Kab. Jember	5	2	2	4	13	5.145,41	2	73,53	2	59,28	3	1.759,91	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3.252,67	4,00	-	-	
9	195 Kab. Jombang	2	4	4	12	30.730,37	4	732,23	4	29.912,96	2	85,17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00	-	-	
10	196 Kab. Kediri	2	2	2	1	2	14,07	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	14,07	-	-	-	
11	197 Kab. Lamongan	2	2	2	1	4	5.191,17	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	198 Kab. Lumajang	3	2	2	2	15	1.297,27	4	327,88	-	2	665,52	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	303,87	-	-	-	
13	199 Kab. Madian	7	7	7	6	3.106,69	1	31,69	1	1.196,99	1	1.638,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	239,64	211,15	-	-	
14	200 Kab. Magetan	3	3	3	2	10	2.875,54	3	124,27	1	275,00	2	424,21	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2.052,05	78,94	-	-	
15	201 Kab. Malang	5	11	11	17	2.820,75	2	114,95	1	2.118,51	6	305,21	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	282,08	114,95	-	62,29	
16	202 Kab. Mojokerto	6	3	3	1	5	1.804,54	-	-	-	-	1	1.423,83	3	-	-	-	-	-	-	-	1	380,70	-	-	-	
17	203 Kab. Nganjuk	4	4	4	2	9	2.955,59	5	125,77	-	1	169,81	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,18	-	-	
18	204 Kab. Ngawi	4	2	2	3	11	6.323,06	3	936,59	-	3	5.386,46	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	205 Kab. Pacitan	4	4	4	2	8	3.117,6	1	50,66	-	2	161,09	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,00	50,66	-	-	
20	206 Kab. Pamekasan	7	-	6	1	4	2.369,8	2	236,98	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,98	-	-	
21	207 Kab. Pasuruan	1	7	7	2	3	115,87	1	106,15	-	-	1	9,71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,71	-	
22	208 Kab. Ponorogo	2	3	3	3	18	2.806,25	6	1.411,92	-	-	6	1.321,82	5	1	72,60	-	-	-	-	-	-	-	389,39	-	797,38	
23	209 Kab. Probolinggo	1	1	6	3	11	11.070,72	2	229,17	-	2	925,34	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9.916,20	229,17	-	351,49	
24	210 Kab. Sampang	4	3	3	1	10	7.576,64	2	107,78	1	6.769,69	5	670,41	1	-	-	-	-	-	-	-	1	28,74	10.778	-	158,56	
25	211 Kab. Sidoarjo	10	7	7	2	10	3.192,17	-	-	-	-	3	2.803,87	6	1	388,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	212 Kab. Situbondo	1	5	2	15	487,22	5	83,12	-	-	5	404,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,17	-	289,29	
27	213 Kab. Sumenep	2	2	2	2	4	40.846,60	-	-	1	40.000,00	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	846,60	-	-	-	
28	214 Kab. Trenggalek	7	6	6	4	10	2.635,95	1	5,89	-	5	2.630,05	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,89	-	37,32	
29	215 Kab. Tuban	3	3	3	1	11	4.772,18	3	419,24	1	2.811,33	4	1.466,18	2	1	75,42	-	-	-	-	-	-	-	-	100,21	-	216,24







**Halaman 11 - Lampiran 8**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Kendala/kegiatan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Kendala/kegiatan				Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Kendakhematan		Kendakefisiensi		Kendakalefektifan		Nilai		Nilai								
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
2	300 Kab. Banggai	8	3	3	3	2	15	7.353,06	2	400,60	1	720,00	3	6.232,46	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	301 Kab. Banggai Kepulauan	11	3	1	1	7	15	27.626,67	7	2.282,31	2	24.777,97	3	702,39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,96					
4	302 Kab. Bupa	6	5	-	-	1	20	21.012,97	2	11.885,59	1	150,00	4	7.852,60	11	72,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.052,75					
5	303 Kab. Donggala	10	3	2	2	5	18	8.707,69	5	1.335,18	2	6.340,94	4	932,82	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,75					
6	304 Kab. Donggala	9	3	2	2	4	13	1.649,97	3	421,62	-	-	4	612,45	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,68					
7	305 Kab. Parigi Moutong	9	3	2	4	23	15.769,66	9	6.306,50	3	5.063,97	3	4.993,18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,49					
8	306 Kab. Poso	11	3	3	3	5	13	844,88	7	545,90	-	-	2	69,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,76					
9	307 Kab. Sigi	13	4	2	7	10	3.760,06	6	1.530,92	-	-	2	60,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,85					
10	308 Kab. Tojo Una-una	14	3	6	5	15	3.252,40	3	1.134,24	2	1.641,37	4	343,87	5	1	132,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.168,43					
11	309 Kab. Tolitoli	11	309	1	5	4	11	3.031,59	2	616,37	-	-	4	2.415,22	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	310 Kota Palu	11	4	-	7	8	741,95	2	165,76	-	-	2	576,18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,13					
<b>26</b>	<b>Prov. Sulawesi Selatan</b>	<b>143</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>19</b>	<b>167</b>	<b>173.602,76</b>	<b>55</b>	<b>12.071,09</b>	<b>14</b>	<b>120.216,02</b>	<b>37</b>	<b>38.634,13</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>1.056,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1.624,56</b>	<b>642,84</b>	<b>155,65</b>		
1	311 Prov. Sulawesi Selatan	6	1	4	1	13	115.866,49	2	691,99	2	114.260,91	5	795,39	3	1	114,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,99	98,16		
2	312 Kab. Bone	9	3	5	1	8	738,75	-	-	1	177,50	2	511,42	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	313 Kab. Bulukumba	11	6	3	2	10	5.957,09	2	5.610,08	1	-	2	347,01	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,51	
4	314 Kab. Enrekang	11	5	6	-	11	713,69	3	320,13	-	-	2	319,72	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,83		
5	315 Kab. Gowa	10	5	4	4	1	12	876,03	3	73,09	1	171,00	3	631,93	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,46	
6	316 Kab. Luwu Timur	15	7	6	2	29	4.824,75	14	1.343,36	1	58,60	5	2.531,52	5	1	116,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,62	
7	317 Kab. Maros	12	4	8	-	12	30.956,49	5	232,57	-	-	4	30.762,91	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00	
8	318 Kab. Pangkajene dan Kepulauan	11	4	3	4	9	3.148,28	4	238,97	1	2.145,64	2	28,97	1	1	734,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	319 Kab. Pinrang	14	7	7	3	15	1.800,06	5	404,98	2	324,33	4	1.120,73	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,75	
10	320 Kab. Sideneng Rappang	11	5	2	1	17	2.289,90	6	365,03	2	465,43	3	992,27	3	1	91,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,00	
11	321 Kab. Tana Toraja	7	4	2	1	5	2.356,66	1	14,11	2	2.378,21	1	143,33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,47	
12	322 Kab. Toraja Utara	9	3	3	3	5	416,01	1	107,60	1	234,37	2	74,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,11	
13	323 Kab. Wajo	10	4	4	2	14	3.208,80	7	2.527,50	1	-	2	269,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,55	
14	324 Kota Palopo	83	20	38	25	132	109.748,12	40	8.530,03	11	81.106,68	24	13.185,77	47	4	5.295,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	
<b>27</b>	<b>Prov. Sulawesi Tenggara</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>20.407,88</b>	<b>9</b>	<b>2.955,14</b>	<b>3</b>	<b>5.486,55</b>	<b>5</b>	<b>7.435,87</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>4.733,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>1.630,02</b>	<b>863,28</b>	<b>125,47</b>	
1	325 Prov. Sulawesi Tenggara	20	5	14	1	37	20.407,88	9	2.955,14	3	5.486,55	5	7.435,87	15	2	4.733,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,95
2	326 Kab. Buton	8	1	1	6	13	3.218,28	3	817,24	2	2.252,94	3	148,08	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,45
3	327 Kab. Kolaka	16	1	11	4	24	77.348,57	2	1.069,52	5	73.367,18	8	2.446,67	8	1	465,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	328 Kab. Konawe Selatan	14	5	2	7	15	2.377,93	4	1.229,69	1	-	4	1.148,23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	329 Kota. Bau-Bau	17	5	3	7	5	2.984,26	15	1.382,65	-	-	1	38,89	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162,72
6	330 Kota Kendari	8	3	3	2	15	3.411,18	7	1.075,77	-	-	3	1.968,00	3	1	97,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,00



Halaman 13 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan terhadap Kerentanan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Ketidakefektifan		Ketidakefisienan		Ketidakhematan		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Potensi Kerugian Daerah		Kerugian Daerah		Ketidakefektifan		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan							
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
8	356 Kab. Pegunungan Bintang	5	2	3	3	17	21.735,58	6	2.186,60	1	3.366,00	2	294,40	6	15	19	2	15.888,57	20	6.191,14	22	23	24						86,29
9	357 Kab. Puncak Jaya	4	3	1	-	9	1.508,54	2	1.071,50	-	-	2	437,04	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>33</b>	<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>11.623,26</b>	<b>8</b>	<b>11.075,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>547,62</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,19</b>	
1	358 Kota Sorong	11	5	5	1	15	11.623,26	8	11.075,63	-	-	3	547,62	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,19	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.397</b>	<b>1.401</b>	<b>1.368</b>	<b>628</b>	<b>4.551</b>	<b>5.281.571,22</b>	<b>1.197</b>	<b>376.585,01</b>	<b>313</b>	<b>3.283.343,78</b>	<b>857</b>	<b>478.101,00</b>	<b>1.774</b>	<b>73.215,37</b>	<b>144</b>	<b>1.370,03</b>	<b>264</b>	<b>1.068.576,00</b>	<b>50.649,63</b>	<b>3.264,60</b>	<b>19.899,79</b>							

Keterangan:  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah



**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<b><i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i></b>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>11</b>	<b>26,83</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>7</b>	<b>17,07</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>23</b>	<b>56,10</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	11	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>41</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan  
Pemeriksaan Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<b><i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>6</b>	<b>14,63</b>	<b>1.430,11</b>	<b>0,01</b>
				<b>USD 200.00</b>	
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1		3,84	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1		4,07	
3	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1		154,51	
				USD 200.00	
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3		1.267,68	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Negara</b>	<b>1</b>	<b>2,44</b>	<b>285,45</b>	<b>-</b>
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1		285,45	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>9</b>	<b>21,95</b>	<b>2.519,47</b>	<b>0,02</b>
				<b>USD 1.05</b>	
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	9		2.519,47	
				USD 1.05	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>16</b>	<b>39,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4		-	
5	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>4</b>	<b>9,76</b>	<b>88.414,43</b>	<b>0,63</b>
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		14.170,03	
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	3		74.244,39	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>5</b>	<b>12,20</b>	<b>13.909.244,23</b>	<b>99,34</b>
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		-	
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2		13.909.244,23	
	<b>Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>14.001.893,70</b>	<b>100</b>
				<b>USD 201.05</b>	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Pemytoran Kas ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan				Administrasi			Ketidakefektifan		
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	BPMIGAS	6	3	-	3	2	1,84	-	-	-	-	1	1,84	1	-	-	-	-	-	-				
2	Bank Indonesia	3	1	1	1	11	20.269,98	3	1.395,39	-	-	1	459,59	5	1	18.415,00	1	-	-	-				
		-	-	-	-	-	USD 200.00	-	USD 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Badan Penyelenggara Ibadah Haji	11	4	1	6	19	72.092,18	3	34,72	-	-	7	2.058,03	6	3	69.999,43	-	-	-	1,89				
		-	-	-	-	-	USD 1.05	-	-	-	-	-	USD 1.05	-	-	-	-	-	-	-				
4	Lembaga Penjamin Simpanan	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Pusat Investasi Pemerintah	2	1	1	-	2	13.909.244,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.909.244,23	-	-				
6	Sekolah Tinggi/Akuntansi Negara	5	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-				
7	PMO ADB ETESP	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Loan ADB 2575-JNO	7	2	1	4	5	285,45	-	-	1	285,45	-	-	2	-	-	2	-	-	-				
	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>14.001.893,70</b>	<b>6</b>	<b>1.430,11</b>	<b>1</b>	<b>285,45</b>	<b>9</b>	<b>2.519,47</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>88.414,43</b>	<b>5</b>	<b>13.909.244,23</b>	<b>-</b>	<b>1,89</b>				
							<b>USD 201.05</b>		<b>USD 200.00</b>				<b>USD 1.05</b>											

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI**  
**Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i><b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b></i>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>6</b>	<b>8,96</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4	
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>40</b>	<b>59,70</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	12	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	11	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>21</b>	<b>31,34</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	14	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>67</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Negara/Daerah</b>	<b>7</b>	<b>10,45</b>	<b>589,92</b>	<b>0,07</b>
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1		97,90	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2		117,26	
3	Pemahalan harga ( <i>Mark up</i> )	2		321,63	
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		53,11	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Negara/Daerah</b>	<b>4</b>	<b>5,97</b>	<b>604.782,84</b>	<b>74,38</b>
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	4		604.782,84	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>36</b>	<b>53,73</b>	<b>202.441,14</b>	<b>24,90</b>
				<b>USD 198.44</b>	
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	27		54.920,07	
				USD 198,44	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	7		146.513,32	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2		1.007,74	
				-	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>11</b>	<b>16,42</b>	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	4		-	
3	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2		-	
5	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	3		-	
				-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>5</b>	<b>7,46</b>	<b>3.713,76</b>	<b>0,46</b>
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		1.424,13	
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	4		2.289,63	
				-	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>4</b>	<b>5,97</b>	<b>1.581,57</b>	<b>0,19</b>
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		294,04	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		1.287,53	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1		-	
				-	
<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>67</b>	<b>100</b>	<b>813.109,25</b>	<b>100</b>
				<b>USD 198.44</b>	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas**  
**Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan				
		Kelemahan sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan			Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	<b>Pemerintah Pusat</b>																							
1	Kementerian Luar Negeri	-	-	-	-	9	6.517,65	-	-	-	-	8	6.517,65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320,92
2	TNI AD	5	-	2	3	16	134.989,64	1	67,62	1	1.393,03	7	131.531,40	3	2	1.727,56	2	270,00	-	-	-	-	-	814,78
3	TNI AL	21	4	13	4	16	4.518,48	5	511,34	-	-	3	709,35	3	3	1.986,20	2	1.311,57	-	-	-	-	-	661,21
4	TNI AU	7	1	6	-	3	15.806,17	-	-	1	188,49	2	15.617,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4	1	2	1	3	642.355,02	-	-	1	603.169,66	2	39.185,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.570,26
6	Kepolisian RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BLU GBK/Setneg	1	-	1	-	4	7.113,37	-	-	-	-	4	7.113,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BLU Kemayoran/Setneg	3	-	3	-	1	109,26	-	-	-	-	1	109,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>811.409,61</b>	<b>6</b>	<b>578,97</b>	<b>3</b>	<b>604.751,20</b>	<b>27</b>	<b>200.784,08</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3.713,76</b>	<b>4</b>	<b>1.581,57</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	<b>9.367,19</b>	<b>9.367,19</b>	<b>9.367,19</b>	<b>9.367,19</b>
	<b>Pemerintah Daerah</b>																							
1	Provinsi Maluku	15	-	9	6	7	1.411,97	1	10,94	1	31,63	5	1.369,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kota Ambon	11	-	4	7	8	287,67	-	-	-	-	4	287,67	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1.699,64</b>	<b>1</b>	<b>10,94</b>	<b>1</b>	<b>31,63</b>	<b>9</b>	<b>1.657,05</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>67</b>	<b>813.109,25</b>	<b>7</b>	<b>589,92</b>	<b>4</b>	<b>604.782,84</b>	<b>36</b>	<b>202.441,14</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3.713,76</b>	<b>4</b>	<b>1.581,57</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>	<b>9.367,19</b>	<b>9.367,19</b>	<b>9.367,19</b>	<b>9.367,19</b>

Keterangan  
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja  
Pemerintah Pusat**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i><b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b></i>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>16</b>	<b>20,51</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	11	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>40</b>	<b>51,28</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	11	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	18	
3	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5	
6	Lain-lain	1	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>22</b>	<b>28,21</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	16	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>78</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan**  
**Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja**  
**Pemerintah Pusat**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>110</b>	<b>35,60</b>	<b>63.055,75</b>	<b>1,97</b>
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	11		1.608,44	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2		44,01	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	25		4.850,26	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	32		17.871,28	
5	Pemahalan harga (Mark up)	3		30.163,02	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		543,16	
7	pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	15		1.772,49	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	10		5.074,95	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	9		1.025,51	
10	Lain-lain	1		102,59	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Daerah</b>	<b>5</b>	<b>1,62</b>	<b>1.105,22</b>	<b>0,03</b>
1	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		-	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		754,20	
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		351,02	
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	1		-	
5	Lain-lain	1		-	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>49</b>	<b>15,86</b>	<b>82.074,92</b>	<b>2,57</b>
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	46		80.911,18	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	2		967,67	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		196,07	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>94</b>	<b>30,42</b>	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	27		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	23		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	4		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	2		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	19		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2		-	
8	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-	
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	4		-	
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
11	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	7		-	
12	Lain-lain	1		-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>18</b>	<b>5,83</b>	<b>34.163,66</b>	<b>1,07</b>
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4		24.743,48	
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	14		9.420,18	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefisienan</b>	<b>2</b>	<b>0,65</b>	<b>2.703,95</b>	<b>0,08</b>
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	2		2.703,95	



No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<b>VII</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>31</b>	<b>10,03</b>	<b>3.014.095,62</b>	<b>94,27</b>
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		22.637,84	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	6		13.058,72	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	17		264.491,25	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4		2.713.313,62	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2		594,16	
	<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>	<b>309</b>	<b>100</b>	<b>3.197.199,16</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas**  
**Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Peertanggungjawaban Belanja Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset Atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan										
		Total	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Keugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Nilai
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	-	-	22	27.743,30	11	14.150,40	-	-	5	9.772,63	2	4	3.820,26	-	-	-	-	-	-	-					
2	Mahkamah Agung	-	-	-	-	16	1.532,49	7	542,17	-	-	5	262,54	1	3	727,77	-	-	-	-	-	-	-					
3	Kementerian Luar Negeri	26	5	15	6	25	281,24	4	281,24	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	Kementerian Pertahanan	5	1	1	3	6	901,43	3	901,43	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	853,57						
5	Mabas TNI	-	-	-	-	9	34.020,85	4	3.101,09	-	-	1	60,96	2	-	-	-	-	2	-	-	2.982,98						
6	TNI/AD	6	-	2	4	15	2.734,61	4	362,17	-	-	3	602,00	5	1	87,50	-	-	2	-	-	14,83						
7	TNI/AL	3	2	1	-	7	6.109,29	-	-	-	-	-	-	-	2	97,23	1	2.213,34	4	-	-	14,83						
8	TNI/AU	6	2	3	1	9	3.305,26	-	-	-	-	1	21,69	2	4	2.792,95	1	490,61	1	-	-	18,29						
9	Kementerian Sekretariat Negara	-	-	-	-	2	461,09	1	61,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	399,95						
10	Kementerian Kesehatan	6	-	4	2	21	341.706,09	5	35.947,60	1	351,02	1	61.043,76	10	2	24.566,69	-	-	2	-	-	219.797,00						
11	Kementerian Agama	2	-	1	1	30	5.080,71	13	1.319,72	-	-	7	1.289,31	6	1	2.057,26	-	-	3	-	-	414,40						
12	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	1	-	1	14	3.546,95	4	247,58	-	-	6	2.950,97	3	-	-	-	-	1	-	-	348,40						
13	Kementerian Sosial	2	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-						
14	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	3	368,70	3	368,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,49						
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	1	-	-	14	1.525,22	9	1.443,17	-	-	1	82,04	3	-	-	-	-	1	-	-	15,41						
16	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17	Kepolisian RI	1	-	1	-	22	4.338,25	15	2.985,81	-	-	3	1.352,43	3	-	-	-	-	1	-	-	718,32						
18	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	-	1	-	10	837,81	3	62,70	1	754,20	1	3,15	4	-	-	-	-	1	-	-	17,76						
19	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	-	-	-	-	14	893,00	5	487,48	-	-	4	296,12	3	1	13,97	-	-	1	-	-	95,42						
20	Badan Tenaga Nuklir Nasional	-	-	-	-	5	170,39	2	91,74	-	-	1	78,65	2	-	-	-	-	-	-	-	45,38						

## Halaman 2 - Lampiran 17

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset Atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
		Total	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Keugian Negara		Potensi Keugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
21	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-	-	-	-	3	19,38	1	19,38	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	-	-	-	-	7	1.305,76	3	134,40	-	-	2	28,82	1	-	-	-	-	1	1.142,53	-	-	-
23	Lembaga Administrasi Negara	-	-	-	-	1	47,50	1	47,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,50	-
24	Badan Kepegawaian Negara	-	-	-	-	1	12,15	1	12,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	-	1	-	7	276,60	4	276,60	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	70,01	-
26	Kementerian Perumahan Rakyat	1	-	-	-	1	2.683,049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.683,049,00	-	-	-
27	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3	2	1	-	5	820,21	1	33,75	-	-	2	786,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	8	1	4	3	19	37,491,50	1	59,26	1	59,26	4	3.288,66	9	-	-	-	-	4	34.143,58	14,56	5,50	-
29	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	-	-	-	-	3	8,39	1	8,39	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PPK Gelora Bung Karno	-	-	-	-	8	38.517,46	2	110,05	2	110,05	1	60,27	1	-	-	-	-	2	38.347,12	-	-	-
31	PPK Kemayoran	3	-	3	-	6	94,40	1	94,40	-	-	1	94,40	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>309</b>	<b>3.197.199,16</b>	<b>110</b>	<b>63.055,75</b>	<b>5</b>	<b>1.105,22</b>	<b>49</b>	<b>82.074,92</b>	<b>94</b>	<b>34.163,66</b>	<b>2</b>	<b>2.703,95</b>	<b>31</b>	<b>3.014.095,62</b>	<b>4.916,79</b>	<b>1.051,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja  
Pemerintah Daerah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<b><i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i></b>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>10</b>	<b>37,04</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	7	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>15</b>	<b>55,56</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	6	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	
3	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>2</b>	<b>7,41</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>27</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja  
Pemerintah Daerah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<b><i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Daerah</b>	<b>155</b>	<b>41,89</b>	<b>52.248,55</b>	<b>27,88</b>
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	10		3.647,30	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3		327,22	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	67		34.403,98	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	41		5.849,76	
5	Pemahalan harga (Mark up)	12		5.215,95	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	7		1.624,28	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	8		394,13	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2		50,96	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4		528,16	
10	Lain-lain	1		206,77	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Daerah</b>	<b>28</b>	<b>7,57</b>	<b>17.398,81</b>	<b>9,28</b>
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	21		9.803,97	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2		95,37	
3	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
4	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		36,58	
5	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1		887,01	
6	Lain-lain	2		6.575,87	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>44</b>	<b>11,89</b>	<b>17.163,86</b>	<b>9,16</b>
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	44		17.163,86	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>87</b>	<b>23,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	57		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	19		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	2		-	
7	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
8	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	1		-	
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3		-	
10	Lain-lain	1		-	

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
				-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>15</b>	<b>4,05</b>	<b>16.885,53</b>	<b>9,01</b>
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	5		898,83	
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	10		15.986,70	
				-	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>41</b>	<b>11,08</b>	<b>83.700,26</b>	<b>44,66</b>
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	19		27.065,64	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	10		9.892,67	
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2		863,31	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2		611,91	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	7		45.266,71	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
	<b>Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>	<b>370</b>	<b>100</b>	<b>187.397,02</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

## Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Kerugian Daerah	Nilai	Nilai	Nilai
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<b>1</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	-	-	-	-	-	<b>12</b>	<b>4.858,30</b>	<b>2</b>	<b>24,83</b>	<b>2</b>	<b>162,08</b>	<b>4</b>	<b>251,91</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26,62</b>	<b>2</b>	<b>4.392,84</b>	-	-	-	
1	Kab. Aceh Jaya	-	-	-	-	-	12	4.858,30	2	24,83	2	162,08	4	251,91	1	1	26,62	2	4.392,84	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	<b>44</b>	<b>11.252,24</b>	<b>24</b>	<b>4.843,36</b>	<b>1</b>	<b>43,13</b>	<b>6</b>	<b>634,75</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2.031,24</b>	<b>4</b>	<b>3.699,73</b>	<b>500,00</b>	-	-	
1	Prov. Sumatera Utara	-	-	-	-	-	24	5.695,59	17	4.081,12	1	43,13	3	459,66	1	2	1.111,66	-	500,00	-	-	-	
2	Kab. Labuhan Batu	-	-	-	-	-	10	2.494,17	3	236,60	-	-	2	90,35	1	2	872,20	2	1.295,01	-	-	-	
3	Kab. Pakpak Barat	2	-	2	-	-	10	3.062,47	4	525,64	-	-	1	84,73	2	1	47,37	2	2.404,72	-	-	-	
<b>3</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>6</b>	-	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>21.779,20</b>	<b>42</b>	<b>7.939,36</b>	<b>8</b>	<b>946,41</b>	<b>11</b>	<b>7.393,46</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4.024,72</b>	<b>9</b>	<b>1.475,23</b>	<b>226,68</b>	<b>278,21</b>	<b>469,40</b>		
1	Prov. Riau	-	-	-	-	-	13	4.368,39	8	3.444,43	3	271,46	2	652,50	-	-	-	-	177,10	271,46	426,50	-	
2	Kab. Bengkalis	1	-	1	-	-	7	9.413,93	2	353,02	1	45,15	1	4.991,02	-	2	4.024,72	1	-	-	-	-	
3	Kab. Kampar	-	-	-	-	-	12	1.527,69	9	781,85	-	-	1	133,92	-	-	-	1	611,91	-	-	19,32	
4	Kab. Kep. Meranti	4	-	2	2	12	285,72	6	260,34	-	-	1	25,37	5	-	-	-	-	49,57	-	-	23,56	
5	Kab. Rokan Hilir	1	-	1	-	21	4.107,26	4	1.023,51	4	629,79	6	1.590,62	-	-	-	-	7	863,31	-	-	6,75	
6	Kota Dumai	-	-	-	-	13	2.076,19	13	2.076,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>12.843,02</b>	<b>9</b>	<b>806,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2.678,78</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>9.309,25</b>	<b>2</b>	<b>48,00</b>	<b>518,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121,16</b>	
1	Badan Penanaman Modal dan Promosi	-	-	-	-	10	545,58	8	497,58	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48,00	497,58	-	-	
2	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	5	12.297,43	1	309,40	-	-	2	2.678,78	-	2	9.309,25	-	-	20,91	-	-	121,16	
<b>5</b>	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>11.070,36</b>	<b>5</b>	<b>10.396,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>673,73</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127,37</b>	
1	Prov. Kalimantan Timur	-	-	-	-	17	11.070,36	5	10.396,63	-	-	1	673,73	9	2	-	-	-	25,80	-	-	127,37	
<b>6</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>76.094,36</b>	<b>12</b>	<b>4.064,10</b>	<b>2</b>	<b>176,18</b>	<b>3</b>	<b>4.333,24</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1.194,49</b>	<b>6</b>	<b>66.326,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	Kab. Maros	6	-	6	-	41	76.094,36	12	4.064,10	2	176,18	3	4.333,24	17	1	1.194,49	6	66.326,33	-	-	-	-	

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapkpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kelemahan Penerimaan			Potensi Kerugian Daerah			Kerugian Penerimaan			Potensi Kerugian Daerah	Kerugian Daerah	Nilai	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>7</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>8</b>	<b>942,49</b>	<b>2</b>	<b>743,33</b>	-	-	<b>2</b>	<b>57,56</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>141,59</b>	-	-	-
1	15 Kab. Maluku Tengah	1	-	1	-	8	942,49	2	743,33	-	-	2	57,56	3	-	-	1	141,59	-	-	-
<b>8</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	-	-	-	-	<b>96</b>	<b>28.306,53</b>	<b>42</b>	<b>8.517,39</b>	<b>13</b>	<b>15.069,99</b>	<b>14</b>	<b>996,00</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>299,18</b>	<b>3</b>	<b>3.423,96</b>	<b>40,49</b>	-	<b>118,40</b>
1	16 Kab. Halmahera Timur	-	-	-	-	24	7.795,81	9	949,16	6	6.505,11	5	165,75	3	1	175,78	-	-	-	-	-
2	17 Kab. Kepulauan Sula	-	-	-	-	44	16.942,89	15	6.169,45	7	8.564,87	8	819,59	12	-	-	2	1.388,96	40,49	-	118,40
3	18 Kota Ternate	-	-	-	-	28	3.567,82	18	1.398,76	-	-	1	10,65	7	1	123,40	1	2.035,00	-	-	-
<b>9</b>	<b>Provinsi Papua</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	<b>34</b>	<b>18.341,66</b>	<b>16</b>	<b>14.908,40</b>	<b>2</b>	<b>1.001,01</b>	<b>1</b>	<b>144,39</b>	<b>10</b>	-	-	<b>5</b>	<b>2.287,84</b>	-	-	-
1	19 Kab. Mamberamo	-	-	-	-	22	13.284,65	11	11.286,64	2	1.001,01	-	-	6	-	-	3	997,00	-	-	-
2	20 Kab. Yalimo	2	-	2	-	12	5.057,01	5	3.621,76	-	-	1	144,39	4	-	-	2	1.290,84	-	-	-
	<b>Bantuan Partai Politik</b>																				
<b>10</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	-	<b>25</b>	<b>1.908,82</b>	<b>1</b>	<b>4,11</b>	-	-	-	-	<b>15</b>	-	-	<b>9</b>	<b>1.904,70</b>	-	-	-
1	21 Prov. Jambi	-	-	-	-	5	564,72	1	4,11	-	-	-	-	3	-	-	1	560,60	-	-	-
2	22 Kab. Batang Hari	-	-	-	-	4	326,80	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	326,80	-	-	-
3	23 Kab. Bungo	1	1	-	-	1	227,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	227,15	-	-	-
4	24 Kab. Kerinci	1	1	-	-	3	248,58	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	248,58	-	-	-
5	25 Kab. Sarolangun	2	2	-	-	3	35,47	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	35,47	-	-	-
6	26 Kab. Tanjung Jabung Barat	2	2	-	-	1	268,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	268,72	-	-	-
7	27 Kab. Tebo	1	1	-	-	4	39,00	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	39,00	-	-	-
8	28 Kota Jambi	3	3	-	-	2	194,52	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	194,52	-	-	-
9	29 Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	2	3,85	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3,85	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>370</b>	<b>187.397,02</b>	<b>155</b>	<b>52.248,55</b>	<b>28</b>	<b>17.398,81</b>	<b>44</b>	<b>17.163,86</b>	<b>87</b>	<b>15</b>	<b>16.885,53</b>	<b>41</b>	<b>83.700,26</b>	<b>1.311,48</b>	<b>278,21</b>	<b>836,34</b>

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah



## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>4</b>	<b>26,67</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
2	Entitas terlambat menyampaikan laporan	3	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>11</b>	<b>73,33</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<b><i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>18</b>	<b>38,30</b>	<b>16.906,59</b>	<b>35,44</b>
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3		4.968,31	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3		961,28	
3	Pemahalan harga (Mark up)	2		69,02	
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		86,35	
5	pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1		1,82	
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		1.234,93	
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5		7.475,37	
8	Lain-lain	1		2.109,48	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Daerah</b>	<b>2</b>	<b>4,26</b>	<b>66,20</b>	<b>0,14</b>
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		22,00	
2	Lain-lain	1		44,20	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>3</b>	<b>6,38</b>	<b>671,27</b>	<b>1,41</b>
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	3		671,27	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>12</b>	<b>25,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	6		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	2		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1		-	
5	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	2		-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>3</b>	<b>6,38</b>	<b>4.945,01</b>	<b>10,37</b>
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	3		4.945,01	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>9</b>	<b>19,15</b>	<b>25.118,75</b>	<b>52,65</b>
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	4		773,16	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		15.013,07	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		9.332,51	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
<b>Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>47</b>	<b>100</b>	<b>47.707,83</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan													
		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan dan 39 Pemerintah Kabupaten/Kota	10	3	7	24	40.019,18	7	9.309,44	1	22,00	1	668,17	5	3	4.945,01	7	25.074,55		
2	Ditjen PMPTK pada Kemendiknas, Direktorat Profesi Pendidik pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan instansiinstansi terkait	2	1	1	8	7.496,25	3	7.407,85	1	44,20	-	-	2	-	-	2	44,20		
3	SMPN 1 Jambi, SMPN 7 Jambi,SMKN 3 Jambi dan SMKN 4 Jambi	3	-	3	15	192,39	8	189,29	-	-	2	3,09	5	-	-	-	-		
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>47.707,83</b>	<b>18</b>	<b>16.906,59</b>	<b>2</b>	<b>66,20</b>	<b>3</b>	<b>671,27</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4.945,01</b>	<b>9</b>	<b>25.118,75</b>		

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>8</b>	<b>10,67</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	5	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>42</b>	<b>56,00</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	32	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	9	
<b>III</b>	<b>Kelompok Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>25</b>	<b>33,33</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	15	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	6	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	4	
	<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>75</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<b><i>Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Daerah</b>	<b>102</b>	<b>46,79</b>	<b>124.191,99</b>	<b>44,18</b>
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	16		25.511,41	
2	Rekaman pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	4		1.654,11	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	49		54.948,76	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	7		264,69	
5	Pemahalan harga ( <i>mark up</i> )	9		20.837,18	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		438,00	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	4		268,23	
8	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	12		20.269,59	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Daerah</b>	<b>5</b>	<b>2,29</b>	<b>5.039,28</b>	<b>1,79</b>
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3		4.002,12	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		60,00	
3	Lain-lain	1		977,15	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>19</b>	<b>8,72</b>	<b>5.350,11</b>	<b>1,90</b>
1	Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	19		5.350,11	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>36</b>	<b>16,51</b>	-	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	21		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	7		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6		-	
5	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>4</b>	<b>1,83</b>	<b>1.258,88</b>	<b>0,45</b>
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	4		1.258,88	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>52</b>	<b>23,85</b>	<b>145.235,12</b>	<b>51,67</b>
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	13		69.047,65	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2		320,00	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	18		35.607,00	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	18		40.260,46	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>218</b>	<b>100,00</b>	<b>281.075,41</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan						Kerugian Daerah	Ketidakefektifan	Kerugian Daerah					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan				Administrasi		Ketidakhormatan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>1</b>	<b>Provinsi Papua</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>116</b>	<b>230.180,32</b>	<b>40</b>	<b>101.596,41</b>	<b>3</b>	<b>4.924,61</b>	<b>11</b>	<b>4.423,54</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>1.053,87</b>	<b>32</b>	<b>118.181,87</b>	<b>104,00</b>		
1	Provinsi Papua TA 2007 - 2009	3	-	2	1	2	47.342,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47.342,91	-		
2	Provinsi Papua TA 2010	1	-	1	-	19	101.872,24	10	94.135,14	1	3.887,46	2	3.849,63	5	-	-	1	-	-		
3	Kabupaten Asmat	1	-	1	-	4	1.025,30	2	123,59	-	-	-	-	1	-	-	1	901,70	-		
4	Kabupaten Biak Numfor TA 2009	-	-	-	-	6	7.563,81	3	484,72	-	-	-	-	1	-	-	2	7.079,08	-		
5	Kabupaten Biak Numfor TA 2010	-	-	-	-	8	6.059,15	3	104,62	-	-	3	74,53	1	-	-	1	5.880,00	-		
6	Kabupaten Boven Digoel	1	-	1	-	10	29.432,52	5	2.106,95	-	-	1	56,66	1	-	-	3	27.268,91	-		
7	Kabupaten Jayapura	3	-	3	-	7	2.347,34	1	1.279,22	-	-	-	-	3	1	741,12	2	327,00	-		
8	Kabupaten Jayawijaya	4	-	4	-	4	323,77	-	-	-	-	1	11,02	1	1	312,75	1	-	-		
9	Kabupaten Merauke	3	1	2	-	6	763,19	3	463,74	-	-	-	-	2	-	-	1	299,45	-		
10	Kabupaten Nabire	3	-	3	-	6	3.482,33	1	176,29	1	60,00	1	198,49	1	-	-	2	3.047,54	-		
11	Kabupaten Paniai	2	-	2	-	4	8.625,39	1	75,56	-	-	-	-	1	-	-	2	8.549,83	-		
12	Kabupaten Pegunungan Bintang	3	-	2	1	2	3.495,81	1	1.104,62	-	-	-	-	-	-	-	1	2.391,18	-		
13	Kabupaten Sarmi	1	-	1	-	14	1.597,83	4	669,16	-	-	1	64,62	5	-	-	4	864,04	104,00		
14	Kabupaten Supiori	-	-	-	-	4	1.194,37	2	696,82	-	-	1	9,95	-	-	-	1	487,60	-		
15	Kabupaten Tolikara	4	-	3	1	7	113,50	1	62,50	-	-	-	-	3	-	-	3	51,00	-		
16	Kabupaten Waropen	10	2	2	6	8	13.624,75	2	62,10	-	-	-	-	2	-	-	4	13.562,65	-		
17	Kota Jayapura TA 2007 - 2008	-	-	-	-	5	1.316,02	1	51,30	1	977,15	1	158,61	1	-	-	1	128,95	-		
18	Kota Jayapura TA 2010	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## Halaman 2- Lampiran 26

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah												Nilai Penyerahan Aset atau Penyeroran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan			Ketidakefektifan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	156,75
<b>2</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>102</b>	<b>50.895,08</b>	<b>62</b>	<b>22.595,58</b>	<b>2</b>	<b>114,66</b>	<b>8</b>	<b>926,57</b>	<b>8</b>	<b>205,01</b>	<b>20</b>	<b>27.053,24</b>	<b>20</b>	<b>156,75</b>	
1	19 Provinsi Papua Barat TA 2009	3	-	1	2	29	8.442,24	19	5.752,72	-	-	4	247,90	-	-	6	2.441,61	-	-	
2	20 Provinsi Papua Barat TA 2010	5	2	1	2	14	15.619,74	9	12.185,57	-	-	1	39,75	-	-	4	3.394,42	-	156,75	
3	21 Kabupaten Fakfak	6	-	4	2	8	2.666,99	5	1.647,75	-	-	1	37,52	-	-	2	983,72	-	-	
4	22 Kabupaten Kaimana	4	1	1	2	9	2.359,57	5	622,26	-	-	-	-	1	133,11	2	1.604,19	-	-	
5	23 Kabupaten Manokwari TA 2004 - 2009	3	-	1	2	10	1.719,80	5	305,26	-	-	1	163,14	2	71,90	1	1.179,50	-	-	
6	24 Kabupaten Manokwari TA 2010	9	2	4	3	15	881,85	9	767,19	2	114,66	-	-	3	-	1	-	-	-	
7	25 Kabupaten Sorong	-	-	-	-	5	14.800,18	3	476,71	-	-	-	-	1	-	1	14.323,46	-	-	
8	26 Kabupaten Sorong Selatan	4	-	2	2	12	4.402,67	7	838,08	-	-	1	438,25	1	-	3	3.126,33	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>75</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>218</b>	<b>281.075,41</b>	<b>102</b>	<b>124.191,99</b>	<b>5</b>	<b>5.039,28</b>	<b>19</b>	<b>5.350,11</b>	<b>36</b>	<b>1.258,88</b>	<b>52</b>	<b>145.235,12</b>			<b>260,75</b>

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<b><i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i></b>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>8</b>	<b>22,86</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>7</b>	<b>20,00</b>
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
3	Lain-lain	2	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>20</b>	<b>57,14</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	19	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>35</b>	<b>100,00</b>



**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>				
<b>I</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>2</b>	<b>384,78</b>	<b>0,04</b>
1	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2	384,78	
<b>II</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>5</b>	<b>822.550,03</b>	<b>90,85</b>
1	Penerimaan Negara/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Perusahaan	1	25.811,97	
2	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	4	796.738,05	
<b>III</b>	<b>Administrasi</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	20		
2	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	9	-	
<b>IV</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>3</b>	<b>82.467,05</b>	<b>9,11</b>
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	81.616,32	
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	850,72	
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-	
<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>39</b>	<b>905.401,86</b>	<b>100,00</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan									
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Subsidi Listrik TA 2010 Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3	-	1	2	4	107.428,30	-	-	1	25.811,97	1	2	81.616,32	
2	Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis Bahan Bakar tertentu (JBT) Dan LPG Tabung 3 Kg TA 2010 Pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo dan PT Petronas Niaga Indonesia	24	4	4	16	2	-	-	-	-	-	2	-	-	
3	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2010 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Jakarta	-	-	-	-	6	11.797,62	-	-	1	11.797,62	5	-	-	
4	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2010 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe dan Jakarta	3	2	-	1	4	47.520,05	-	-	1	47.520,05	3	-	-	
5	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2010 pada PT Petrokimia Gresik di Gresik, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Jakarta	2	1	-	1	4	305.863,98	-	-	1	305.863,98	3	-	-	
6	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2010 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Surabaya, Makasar, Mataram, Denpasar dan Jakarta	3	1	2	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	
7	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2010 pada PT Pupuk Sriwidjaya Palembang di Palembang, Jakarta, Semarang, Bandar Lampung, Padang dan Jambi	-	-	-	-	9	431.556,39	-	-	1	431.556,39	8	-	-	

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan									
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA 2009	-	-	-	-	4	1.235,50	2	384,78	-	-	1	1	850,72	
	<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>905.401,86</b>	<b>2</b>	<b>384,78</b>	<b>5</b>	<b>822.550,03</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>82.467,05</b>	

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Simpulan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu  
Atas Sistem Pengendalian Intern Badan Usaha Milik Negara**

No.	Entitas	Simpulan Atas Kesesuaian Dengan Kriteria Yang Ditetapkan		
		Sesuai	Sesuai Dengan Pengecualian	Tidak Sesuai
1	PT Pertamina (Persero)	1		
2	PT Bukit Asam (Persero)		1	
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	1		
4	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.		1	
5	PT Kereta Api Indonesia (Persero)			1
6	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)		1	
7	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	1		
8	PT Batan Teknologi (Persero)		1	
9	PT Kawasan Industri Medan (Persero)			1
10	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.		1	
11	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	1		
12	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)		1	
13	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)		1	
14	PT Inhutani I (Persero)			1
15	PT Inhutani II (Persero)			1
16	Perum Perhutani		1	
17	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	1		
18	Perum Peruri	1		
19	Perum PNRI			1
20	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1		
21	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	1		
22	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	1		
23	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	1		
24	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1		
25	Perum Pegadaian (Persero)		1	
26	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)			1
27	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)		1	
28	PT Jasa Raharja (Persero)		1	
29	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)			1
30	Perum Bulog			1
31	PT Pos Indonesia (Persero)			1
32	PT Sucofindo (Persero)		1	
33	PT Surveyor Indonesia (Persero)		1	
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>13</b>	<b>9</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<b><i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i></b>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>2</b>	<b>5,56</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>27</b>	<b>75,00</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	7	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya	7	
4	Lain-lain	2	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>7</b>	<b>19,44</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	6	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>36</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
<b>I</b>	<b>Potensi Kerugian Perusahaan</b>	<b>6</b>	<b>15,00</b>	<b>3.890,85</b> <b>EUR 24.20</b>	<b>10,90</b>
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2		720,00 EUR 24.20	
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		1.313,98	
3	Lain-lain	2		1.856,86	
<b>II</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>5</b>	<b>12,50</b>	<b>1.517,21</b>	<b>4,25</b>
1	Penerimaan Negara/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Perusahaan	5		1.517,21	
<b>III</b>	<b>Administrasi</b>	<b>19</b>	<b>47,50</b>	-	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan)	14		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	1		-	
4	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2		-	
<b>IV</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>4</b>	<b>10,00</b>	<b>10.113,34</b> <b>EUR 188.67</b>	<b>28,32</b>
1	Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga	4		10.113,34 EUR 188.67	
<b>V</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>6</b>	<b>15,00</b>	<b>20.188,54</b>	<b>56,53</b>
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3		17.450,18	
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		2.738,36	
<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>40</b>	<b>100</b>	<b>35.709,95</b> <b>EUR 212.87</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan				
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PT Perikanan Nusantara	20	2	17	1	14	5.402,15	3	1.956,91	1	106,89	7	-	-	3	3.338,34	-	-
2	PT Pupuk Sriwijaya	12	-	7	5	9	18.145,62	1	1.213,93	1	81,48	4	-	-	3	16.850,20	-	-
3	Perum Peruri	4	-	3	1	17	12.162,17 EUR 212.87	2	720,00 EUR 24,20	3	1.328,83	8	4	10.113 EUR 188.67	-	-	EUR 24,20	451,76
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>35.709,95 EUR 212.87</b>	<b>6</b>	<b>3.890,85 EUR 24,20</b>	<b>5</b>	<b>1.517,21</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>10.113,34 EUR 188.67</b>	<b>6</b>	<b>20.188,54</b>	<b>EUR 24,20</b>	<b>451,76</b>

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya Pada Pemerintah Pusat**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>2</b>	<b>40,00</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>1</b>	<b>20,00</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>2</b>	<b>40,00</b>
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	
2	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>5</b>	<b>100</b>



**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya Pada BUMN**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>2</b>	<b>20,00</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>4</b>	<b>40,00</b>
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>4</b>	<b>40,00</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>10</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya Pada BUMD**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>11</b>	<b>12,50</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	8	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>30</b>	<b>34,09</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	
3	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	12	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	10	
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>47</b>	<b>53,41</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	8	
2	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	32	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	6	
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>88</b>	<b>100</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya Pada Pemerintah Pusat**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>	<b>14,87</b>	<b>0,11</b>
1	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		14,87	
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Negara</b>	<b>3</b>	<b>30,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>95,99</b>
1	Aset dikuasai pihak lain	1		6.504,73	
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		82,25	
3	Lain-lain	1		6.853,02	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>	<b>402,21</b>	<b>2,87</b>
1	Penerimaan Negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	1		402,21	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>4</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	1		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1		-	
4	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	1		-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>	<b>144,34</b>	<b>1,03</b>
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	1		144,34	
<b>Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>10</b>	<b>100</b>	<b>14.001,43</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya Pada BUMN**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
<b>I</b>	<b>Potensi Kerugian yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara</b>	<b>1</b>	<b>7,69</b>	<b>37.690,97</b>	<b>17,97</b>
1	Aset dikuasai pihak lain	1		37.690,97	
<b>II</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>8</b>	<b>61,54</b>	<b>172.041,11</b>	<b>82,03</b>
1	Penerimaan Negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	8		172.041,11	
<b>III</b>	<b>Administrasi</b>	<b>4</b>	<b>30,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	1		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>13</b>	<b>100</b>	<b>209.732,08</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya Pada BUMD**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<b><i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>					
<b>I</b>	<b>Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah</b>	<b>19</b>	<b>19,19</b>	<b>32.967,73</b>	<b>16,68</b>
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	6		1.198,65	
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4		1.558,85	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1		30,70	
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7		29.843,98	
5	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1			
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah</b>	<b>21</b>	<b>21,21</b>	<b>32.247,42</b>	<b>16,31</b>
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jas tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2		472,60	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	15		30.813,87	
4	Lain-Lain	3		960,95	
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>29</b>	<b>29,29</b>	<b>17.052,50</b>	<b>8,63</b>
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	27		16.797,54	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	1		64,40	
3	Lain-Lain	1		190,55	
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>17</b>	<b>17,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	1		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	11		-	
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>3</b>	<b>3,03</b>	<b>13.823,96</b>	<b>6,99</b>
1	Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga	3		13.823,96	
<b>VI</b>	<b>Ketidakefisienan</b>	<b>2</b>		<b>57.072,34</b>	
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1		29,42	
2	Lain-Lain	1		57.042,92	
<b>VII</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>8</b>	<b>8,08</b>	<b>44.494,41</b>	
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		94,41	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2		-	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4		44.400,00	
4	Lain-lain	1		-	
<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>99</b>	<b>100</b>	<b>197.658,38</b>	<b>100</b>

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaksihonestan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidaksihonestan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidaksihonestan		Ketidakihtifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	<b>Pemerintah Pusat</b>																							
	1	1	-	-	1	6	6.989,19	-	-	2	6.586,98	1	402,21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	1	2	159,22	1	14,87	-	-	-	-	-	1	144,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	2	6.853,02	-	-	1	6.853,02	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>14.001,43</b>	<b>1</b>	<b>14,87</b>	<b>3</b>	<b>13.440,00</b>	<b>1</b>	<b>402,21</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>144,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	<b>BUMN</b>																							
	1	10	2	4	4	13	209.732,08	-	-	1	37.690,97	8	172.041,11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>209.732,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>37.690,97</b>	<b>8</b>	<b>172.041,11</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	<b>BUMD</b>																							
	1	3	-	2	1	4	475,55	1	199,78	1	153,66	2	122,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	6	20	124.998,53	3	29.895,56	8	24.521,63	2	36,42	4	1	13.501,98	1	57.042,92	1	-	354,57	480,04	-	-
	3	10	3	3	4	16	4.222,65	6	1.515,52	2	850,35	4	1.827,36	2	-	-	1	29,42	1	-	-	-	-	-
	4	15	4	5	6	13	3.512,64	1	30,70	5	2.997,66	2	236,25	3	1	248,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	31	3	11	17	12	48.542,48	1	375,37	3	3.251,51	4	441,65	2	1	73,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	2	1	-	1	7	3.868,23	1	40,00	-	-	2	3.733,81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	12	-	7	5	10	9.310,56	1	115,88	-	-	8	9.194,67	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	5	-	1	4	11	1.084,79	4	236,46	1	-	3	848,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Emittas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern											Ketaidpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Kepercayaan											Nilai Peryerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan								
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total		Kelemahan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketaidkefisienan		Ketaidkefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kerugian Negara			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
9	Pendapatan dan Biaya PT Jakarta Tourindo	4	-	1	3	5	1.642,91	1	558,42	1	472,60	2	611,88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611,88
10	Perjanjian kerjasama PD Sarana Pembangunan Muara Enim dalam pengelolaan lapangan Seio dan Betun	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>99</b>	<b>197.658,38</b>	<b>19</b>	<b>32.967,73</b>	<b>21</b>	<b>32.247,42</b>	<b>29</b>	<b>17.052,50</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>13.823,94</b>	<b>2</b>	<b>57.072,34</b>	<b>8</b>	<b>44.494,41</b>	<b>609,78</b>	<b>493,07</b>	<b>7.480,09</b>									

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibuatkan ke bawah

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Jml	Nilai		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Kementerian Pertahanan	2005 - 2008	109	15.957,69	295	11.102,98	179	7.005,46	65	-	-	51	4.097,52	7.005,46
		2009	17	17.381,31	117	4.990,08	60	48,55	20	-	-	37	4.941,52	48,55
		2010	14	3.539,38	128	3.539,38	21	-	45	-	-	62	3.539,38	-
		2011	16	16.263,15	38	16.263,15	4	853,57	4	-	-	30	15.409,58	853,57
		Jumlah	156	53.141,55	578	35.895,60	264	7.907,59	134	-	-	180	27.988,01	7.907,59
2	Mabes TNI	2005 - 2008	79	16.952,81	143	1.870,74	139	1.870,74	4	-	-	-	-	1.855,64
		2009	22	475,51	35	138,91	35	138,91	-	-	-	-	-	138,91
		2010	10	95,94	14	95,94	14	95,94	-	-	-	-	-	95,94
		2011	9	404,51	24	404,51	20	404,51	3	-	-	1	-	404,51
		Jumlah	120	17.928,79	216	2.510,12	208	2.510,12	7	-	-	1	-	2.495,02
3	TNI AD	2005 - 2008	272	52.077,77	532	48.517,36	498	13.090,56	12	-	35.426,79	22	-	10.695,66
		2009	54	2.338,18	97	2.338,18	95	2.270,01	2	-	68,17	-	-	661,08
		2010	27	5.643,49	45	5.643,49	40	5.643,49	5	-	-	-	-	2.386,60
		2011	40	1.829,59	48	1.761,74	36	1.761,74	12	-	-	-	-	1.722,62
		Jumlah	393	61.889,05	722	58.260,78	669	22.765,82	31	-	35.494,96	22	-	15.465,98
4	TNI AL	2005 - 2008	175	49.382,07	351	48.131,79	350	48.056,50	1	-	75,28	-	-	48.056,50
		2009	10	964,23	18	649,84	17	86,09	1	-	563,75	-	-	86,09
		2010	22	18.834,30	49	1.450,78	46	1.450,78	3	-	-	-	-	1.450,78
		2011	38	601,34	47	464,66	44	204,30	3	-	260,36	-	-	204,30
		Jumlah	245	69.781,95	465	50.697,09	457	49.797,69	8	-	899,39	-	-	49.797,69
5	TNI AU	2005 - 2008	119	196.535,43	267	146.246,83	248	74.789,48	17	-	71.457,35	2	-	29.762,23
		2009	20	8.285,34	34	1.515,66	34	1.515,66	-	-	-	-	-	1.382,72
		2010	33	14.339,66	47	1.213,11	46	1.213,11	1	-	-	-	-	1.236,10
		2011	22	3.963,73	45	40,72	45	40,72	-	-	-	-	-	40,72
		Jumlah	194	223.124,18	393	149.016,34	373	77.558,99	18	-	71.457,35	2	-	32.421,79
				USD 1,301,95		USD 151,96		USD 151,96		-	-		-	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Kementerian Luar Negeri	2005 - 2008	549	821.493,63	659	802.985,29	511	778.933,08	98	17.354,42	50	6.697,78	779.038,30
				USD 5,625,04		USD 5,627,64		USD 4,625,67		USD 1,001,97			USD 4,408,98
				SAR 75,66		SAR 75,66		SAR 75,66					SAR 9,00
		2009	146	EUR 598,83	187	649.749,58	156	EUR 565,22	26	EUR 33,61	5	32,15	EUR 550,39
				649.749,58		USD 1,597,42		646.306,79		3.410,64			646.225,09
				EUR 0,40		EUR 0,40		USD 1,597,42					USD 1,549,22
		2010	126	37.175,63	160	37.175,63	37	33.474,01	30	2.010,42	93	1.691,18	EUR 0,40
				USD 73,18		USD 73,18		33.474,01		USD 40,28			33.474,01
		2011	8	3.468,66	17	3.468,66	1	696,39	-	-	16	2.772,27	696,39
		Jumlah	829	1.511.887,52	1.023	1.493.379,17	705	1.459.410,29	154	22.775,49	164	11.193,39	1.459.433,80
				USD 7,298,16		USD 7,298,26		USD 6,223,09		USD 1,042,25			USD 5,958,20
				EUR 599,23		EUR 599,23		EUR 565,62		EUR 33,61			EUR 550,79
				SAR 75,66		SAR 75,66		SAR 75,66					SAR 9,00
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2005 - 2008	112	113.224,86	187	90.104,42	167	87.910,33	20	2.194,08	-	-	87.910,33
		2009	27	4.406,95	39	1.435,64	9	1.435,64	5	-	25	-	1.435,64
		2010	37	65.425,66	89	64.987,89	7	733,20	25	9.774,62	57	54.480,06	744,50
		2011	35	47.236,00	66	44.858,56	-	6.593,89	8	25.277,46	58	12.987,20	6.593,89
		Jumlah	211	230.293,49	381	201.386,51	183	96.673,06	58	37.246,17	140	67.467,27	96.684,37
8	Wantanas	2005 - 2008	24	16,80	40	-	40	-	-	-	-	-	-
		2009	7	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
		2011	5	3,52	5	3,52	-	-	-	-	5	3,52	-
		Jumlah	41	20,32	67	3,52	62	-	-	-	5	3,52	-
9	BIN	2005 - 2008	14	39,20	17	39,20	17	39,20	-	-	-	-	39,20
		2009	14	11,26	21	11,26	21	11,26	-	-	-	-	11,26

Halaman 3 - Lampiran 37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Perubahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	11	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
		2011	4	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-
		Jumlah	43	50,46	61	50,46	53	50,46	-	-	8	-	50,46
10	Lemsaneg	2005 - 2008	34	307.626,25	37	422,34	37	422,34	-	-	-	-	422,34
		2009	17	43.745,28	44	1.047,20	25	870,44	11	176,76	8	-	892,44
		2010	8	395,24	13	-	9	-	4	-	-	-	331,74
		2011	8	972,75	18	40,01	11	-	2	-	5	40,01	-
		Jumlah	67	352.739,54	112	1.509,55	82	1.292,78	17	176,76	13	40,01	1.646,52
11	Lemhanas	2005 - 2008	37	959,77	45	414,04	45	414,04	-	-	-	-	414,04
		2009	8	94,98	11	94,98	11	94,98	-	-	-	-	94,98
		2010	5	24,12	11	24,12	11	24,12	-	-	-	-	24,12
		2011	6	60,50	6	60,50	6	60,50	-	-	-	-	60,50
		Jumlah	56	1.139,39	73	593,65	73	593,65	-	-	-	-	593,65
12	Menko Polhukam	2005 - 2008	27	823,82	38	509,20	38	509,20	-	-	-	-	509,20
		2009	15	243,71	34	243,71	34	243,71	-	-	-	-	243,71
		2010	6	94,65	7	-	7	-	-	-	-	-	-
		2011	6	418,54	12	418,54	0	-	-	-	12	418,54	-
		Jumlah	54	1.580,73	91	1.171,46	79	752,91	-	-	12	418,54	752,91
13	Kementerian Dalam Negeri	2005 - 2008	94	2.229.192,81	124	70.648,25	91	70.125,51	32	522,73	1	-	70.125,51
		2009	38	36.009,68	95	10.449,14	90	9.449,26	5	999,87	-	-	9.449,26
		2010	87	636.739,36	192	14.486,33	136	8.700,77	54	5.096,21	2	689,34	8.700,77
				USD 309,79									
		2011	34	38.583,34	84	28.326,47	1	2.022,45	5	3.104,52	78	23.199,48	2.022,45
		Jumlah	253	2.940.525,19	495	123.910,20	318	90.298,01	96	9.723,35	81	23.888,83	90.298,01
				USD 309,79									

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Peperangan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2005 - 2008	37	665,64	67	665,64	67	6665,64	-	-	-	-	-	-
		2009	6	699,84	13	699,84	7	132,89	6	566,94	-	-	-	-
		2010	7	158,40	10	158,40	8	40,00	2	118,40	-	-	-	-
		2011	3	399,50	4	399,50	-	170,50	1	229,00	3	-	-	-
		Jumlah	53	1.923,38	94	1.923,38	82	1.009,04	9	914,34	3	-	-	-
15	Kementerian Sekretariat Negara	2005 - 2008	247	137.211,12	426	137.211,12	346	128.559,37	70	5.232,58	10	3.419,16	96.522,49	
		2009	24	23.283,05	38	23.283,05	23	4.353,87	15	18.892,43	-	36,75	4.353,87	
		2010	21	-	25	-	17	-	8	-	-	-	-	
		2011	38	3.117,02	53	3.117,02	9	109,26	26	2.932,60	18	75,15	109,26	
		Jumlah	330	163.611,20	542	163.611,20	395	133.022,50	119	27.057,62	28	3.531,06	100.985,63	
16	TMII	2005 - 2008	4	749,90	7	749,90	4	639,31	3	110,58	-	-	1.514.670,52	
		2009	12	138,60	21	138,60	18	126,00	3	12,60	-	-	-	
		2010	9	15.536,08	13	15.536,08	2	9.729,36	5	404,08	6	5.402,64	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	25	16.424,60	41	16.424,60	24	10.494,68	11	527,27	6	5.402,64	1.514.670,52	
17	BKN	2005 - 2008	19	80,40	27	-	24	-	3	-	-	-	-	
		2009	3	313,40	3	313,40	2	7,45	1	305,95	-	-	7,45	
		2010	12	150,92	40	150,92	5	150,92	35	-	-	-	150,92	
		2011	6	400,94	11	400,94	2	-	9	400,94	-	-	-	
		Jumlah	40	945,66	81	865,26	33	158,37	48	706,89	-	-	158,37	
18	BPN	2005 - 2008	57	2.616,79	107	2.616,79	82	2.5976,93	15	19,85	10	-	1.852,47	
		2009	38	1.988,46	75	1.988,46	49	1.968,07	15	8,28	11	12,10	1.968,07	
		2010	42	2.168,82	62	2.168,82	51	2.168,82	11	-	-	-	2.169,13	
		2011	11	733,32	16	733,32	1	465,05	7	268,27	8	-	465,05	
		Jumlah	148	7.507,41	260	7.507,41	183	7.198,89	48	296,41	29	12,10	6.454,74	

Halaman 5 - Lampiran 37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	19 LAN	2005 - 2008	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-	
		2005 - 2008	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	2	226,77	2	226,77	1	220,77	1	6,00	-	-	-	220,77	
		2010	7	315,75	16	315,75	13	315,75	3	-	-	-	-	315,75	
		2011	15	132,27	30	132,27	2	-	5	100,17	23	32,10	-	-	
		Jumlah	29	674,81	53	674,81	21	536,53	9	106,17	23	32,10	-	536,53	
20	Atsip Nasional	2005 - 2008	11	6.595,68	15	-	11	-	4	-	-	-	-	-	
		2009	4	1.779,44	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	7	1.408,55	9	1.005,47	5	68,56	4	936,91	-	-	-	68,56	
		2011	8	4.416,22	12	475,87	-	-	-	-	12	475,87	-	-	
		Jumlah	30	14.199,90	41	1.481,35	21	68,56	8	936,91	12	475,87	-	68,56	
21	KPU	2005 - 2008	32	165.585,14	54	77.722,96	29	2.088,53	20	75.634,43	5	-	-	2.088,59	
		2009	256	863.614,70	529	266.143,72	272	75.712,13	180	165.329,44	77	25.102,14	-	37.241,31	
		2010	9	24.242,50	22	4.592,24	11	1.212,74	11	3.379,50	-	-	-	16,01	
		2011	13	5.422,16	30	5.422,16	3	214,70	27	5.207,45	-	-	-	49,77	
		Jumlah	310	1.058.864,52	635	353.881,10	315	79.228,12	238	249.550,83	82	25.102,14	-	39.395,69	
22	Kementerian Hukum dan HAM	2005 - 2008	268	179.275,17	454	126.636,58	449	15.045,00	4	188,93	1	111.402,64	-	16.142,35	
		2009	77	4.432,38	166	4.100,45	164	4.092,25	2	8,19	-	-	-	2.034,86	
		2010	62	13.148,04	136	3.326,80	126	2.802,93	10	523,86	-	-	-	2.644,62	
		2011	11	549,18	22	549,18	-	-	-	-	22	549,18	-	-	
		Jumlah	418	197.404,77	778	134.613,03	739	21.940,19	16	720,99	23	111.951,83	-	20.821,84	
23	Kejaksaan RI	2005 - 2008	267	1.088.921,59	526	957.072,35	135	27.630,42	130	131.037,51	261	798.404,41	-	26.306,12	
		2009	138	5.467.693,28	270	5.339.507,40	53	9.861,41	25	13.467,54	192	5.316.178,45	-	11.285,91	
		2010	77	61.915,48	158	43.636,64	21	773,08	19	4.652,77	118	38.210,79	-	773,08	
		Jumlah	482	6.568.530,35	954	5.740.216,39	219	38.264,50	274	149.167,82	571	6.132.793,65	-	38.365,11	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	37	2.143.336,90	38	2.143.336,90	2	241,41	-	-	36	2.143.095,49	241,41
		Jumlah	519	8.761.867,26	992	8.483.553,31	211	38.506,33	174	149.157,83	607	8.295.889,14	38.606,53
				USD 293,649,68		USD 293,649,68				USD 47,88		USD 293,601,80	
24	POLRI	2005 - 2008	224	22.360,72	394	22.359,72	376	12.273,42	18	10.086,29	-	-	5.924,79
				USD 1,022,89		USD 1,022,89		USD 1,022,89					USD 1,022,89
		2009	117	4.553,00	171	4.553,00	164	3.767,53	7	785,46	-	-	3.767,53
		2010	86	12.036,52	129	12.097,41	97	8.099,56	19	2.987,01	13	1.010,83	8.099,56
		2011	22	29.275,72	41	29.275,72	7	2.862,59	7	2.221,79	27	24.191,34	2.862,59
		Jumlah	449	68.225,98	735	68.285,87	644	27.003,12	51	16.080,56	40	25.202,18	20.654,49
				USD 1,022,89		USD 1,022,89		USD 1,022,89					USD 1,022,89
25	Komnas HAM	2005 - 2008	20	32,19	27	27,39	27	27,39	-	-	-	-	32,19
		2009	18	1.044,25	30	680,04	22	4,99	7	648,20	1	26,84	4,99
		2010	5	141,43	11	2,74	11	2,74	-	-	-	-	2,74
		2011	6	73,52	11	-	-	-	-	-	11	-	73,52
		Jumlah	49	1.291,41	79	710,19	60	35,14	7	648,20	12	26,84	113,46
26	Mahkamah Konstitusi	2005 - 2008	14	1.319,20	14	754,66	14	754,66	-	-	-	-	754,66
		2009	5	121,85	8	121,85	8	121,85	-	-	-	-	121,85
		2010	6	106,60	13	86,98	13	86,98	-	-	-	-	86,98
		2011	3	196,79	7	196,79	7	196,79	-	-	-	-	196,79
		Jumlah	28	1.744,46	42	1.160,30	42	1.160,30	-	-	-	-	1.160,30
27	MPR	2005 - 2008	41	16.126,43	57	649,94	57	649,94	-	-	-	-	649,94
		2009	6	382,99	9	155,98	8	153,77	1	2,20	-	-	153,77
		2010	5	2.293,08	5	-	5	-	-	-	-	-	-
		2011	3	519,65	3	-	-	-	-	-	3	-	-
		Jumlah	55	19.322,16	74	805,92	70	803,71	1	2,20	3	-	803,71

Halaman 7 - Lampiran 37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Perubahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	DPR	2005 - 2008	45	405.799,85	57	3.078,45	48	1.166,96	9	1.911,48	-	-	760,10
		2009	17	36.912,30	28	32.614,87	25	32.520,55	3	94,31	-	-	3.722,14
		2010	7	1.264,27	13	326,45	13	326,45	-	-	-	-	326,45
		2011	21	35.576,59	30	24.384,26	-	-	30	24.384,26	-	-	-
		Jumlah	90	479.553,03	128	60.404,04	86	34.013,97	42	26.390,07	-	-	4.808,70
29	DPD	2005 - 2008	4	69,88	4	-	4	-	-	-	-	-	69,88
		2009	8	33,19	8	33,19	8	33,19	-	-	-	-	33,19
		2010	4	230,01	4	-	4	-	-	-	-	-	230,01
		2011	7	1.564,54	11	1.358,81	9	-	1	3,02	1	1.355,78	205,72
		Jumlah	23	1.897,63	27	1.392,01	25	33,19	1	3,02	1	1.355,78	538,82
30	Mahkamah Agung	2005 - 2008	68	4.246,74	89	1.467,00	59	897,25	30	569,75	-	-	897,25
		2009	21	11.305,21	40	98,73	19	96,75	21	1,98	-	-	96,75
		2010	44	6.648,31	79	795,85	39	751,51	40	44,34	-	-	751,51
		2011	30	3.248,05	59	903,69	5	478,47	47	410,33	7	14,87	500,80
		Jumlah	163	25.448,32	267	3.265,29	122	2.224,00	138	1.026,41	7	14,87	2.246,32
31	Komisi Yudisial	2005 - 2008	7	59,29	7	59,29	7	59,29	-	-	-	-	59,29
		2009	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
		2010	8	26,81	10	26,81	10	26,81	-	-	-	-	16,10
		2011	4	19,28	5	-	5	-	-	-	-	-	3,65
		Jumlah	22	105,38	25	86,10	25	86,10	-	-	-	-	79,06
32	KPK	2005 - 2008	18	17.788,88	30	9.299,88	27	5.189	1	905,00	2	3.206,00	240,00
		2009	8	160,79	10	160,79	8	107,59	2	-	-	53,19	50,03
		2010	7	47,15	8	47,15	5	47,15	3	-	-	-	4,00
		2011	6	173.812,37	11	173.812,37	-	-	-	-	11	173.812,37	-
		Jumlah	39	191.809,20	59	183.320,19	40	5.343,62	6	905,00	13	177.071,56	294,03

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah			
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	
1	33 PPAIK	2005 - 2008	6	-	6	6.196,19	3	6.196,19	-	-	-	-	12	13	14	-
		2009	3	6.196,19	3	6.196,19	3	6.196,19	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	3.883,67	15	3.883,67	15	3.883,67	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	2.548,81	8	2.548,81	-	-	8	2.548,81	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	32	12.628,69	32	12.628,69	24	10.079,87	8	2.548,81	-	-	-	-	-	-
34	BNN	2005 - 2008	40	9.685,26	47	9.685,26	38	6.833,55	7	1.199,67	2	1.652,03	2	1.652,03	2	2.008,98
		2009	10	1.866,57	17	1.866,57	17	1.866,57	-	-	-	-	-	-	-	1.866,57
		2010	14	397,54	32	397,54	26	355,34	5	42,20	1	-	1	-	1	355,34
		2011	14	1.723,88	26	1.723,88	-	-	2	694,91	24	-	24	-	24	1.028,96
		Jumlah	78	13.673,26	122	13.673,26	81	10.084,44	14	1.936,79	27	1.652,03	27	1.652,03	27	5.259,86
35	Kementerian Pertanian	2005 - 2008	34	187.909,04	64	3.524,33	27	2.561,86	32	962,46	5	-	5	-	5	2.561,86
		2009	33	5.668,97	54	2.064,48	19	1.970,41	35	94,06	-	-	-	-	-	1.897,50
		2010	55	56.371,86	90	50.180,90	49	49.385,37	20	795,52	21	-	21	-	21	49.385,37
		2011	60	18.973,29	91	16.946,30	-	-	1	5.653,90	90	-	90	-	90	5.653,90
		Jumlah	182	268.923,17	299	72.716,02	95	53.917,66	88	7.505,96	116	-	116	-	116	59.498,65
36	Kementerian Kehutanan	2005 - 2008	324	2.435.458,18	524	2.061.175,55	230	566.341,67	239	1.492.649,42	55	2.184,45	55	2.184,45	55	565.657,39
		2009	118	578.988,47	210	494.448,02	34	32.968,19	155	453.508,05	21	7.971,77	21	7.971,77	21	32.968,19
		2010	77	74.545,16	110	74.545,16	28	2.526,35	59	70.871,58	23	1.147,22	23	1.147,22	23	2.526,35
		2011	32	96.470,10	50	85.307,16	-	-	1	7.953,30	49	77.353,86	49	77.353,86	49	-
		Jumlah	551	3.185.461,92	894	2.715.475,90	292	601.836,22	454	2.024.982,36	148	88.657,31	148	88.657,31	148	601.151,94
		Jumlah		USD 94.180,09		USD 93.971,68		USD 2.235,59		USD 91.359,73		USD 376,35		USD 376,35		USD 2.236,07

Halaman 9 - Lampiran 37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan				Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
			Jml		Nilai		Jml		Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3																
37	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2005 - 2008	71	444.298,84	123	68.948,78	84	67.064,09	38	1.884,68	1	-	-	-	67.064,09			
		2009	35	32.609,46	66	1.990,35	25	1.188,93	41	801,41	-	-	-	-	1.188,93			
		2010	36	33.540,20	55	3.024,60	27	2.357,92	26	666,68	2	-	-	-	2.357,92			
		2011	15	4.083,45	23	2.695,98	-	2.695,98	12	-	11	-	-	-	2.695,98			
		Jumlah	157	514.531,97	267	76.659,73	136	73.306,94	117	3.352,79	14	-	-	-	73.306,94			
38	Kementerian Pekerjaan Umum	2005 - 2008	184	2.068.669,86	283	2.029.563,06	250	2.027.498,29	31	2.064,76	2	-	-	-	2.027.498,29			
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58							USD 202,58			
				GBP 396,10		GBP 396,10		GBP 396,10							GBP 396,10			
				EUR 35,79														
		2009	156	300.159,01	362	81.807,16	251	52.323,26	60	27.194,42	51	2.289,47	-	-	52.323,26			
		2010	107	58.303,20	237	26.022,29	64	16.852,28	50	5.155,20	123	4.014,80	-	-	16.852,28			
		2011	31	46.389,08	68	45.495,35	6	923,22	13	23.014,32	49	21.557,81	-	-	923,22			
		Jumlah	478	2.473.521,16	950	2.182.887,88	571	2.097.597,07	154	57.428,72	225	27.862,08	-	-	2.097.597,07			
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58							USD 202,58			
				EUR 35,79														
				GBP 396,10		GBP 396,10		GBP 396,10							GBP 396,10			
39	Kementerian Perhubungan	2005 - 2008	46	73.061,32	77	24.322,77	34	22.849,54	42	1.473,22	1	-	-	-	22.849,54			
		2009	64	87.544,51	77	4.739,52	65	4.731,62	9	7,90	3	-	-	-	4.731,62			
		2010	94	531.268,81	157	25.168,96	106	12.220,64	41	12.341,37	10	606,95	-	-	12.220,64			
		2011	15	249.627,87	26	31.129,24	-	-	-	-	26	31.129,24	-	-	-			
		Jumlah	219	941.502,53	337	85.360,51	205	39.801,81	92	13.822,49	40	31.736,20	-	-	39.801,81			
40	Kementerian Perumahan Rakyat	2005 - 2008	12	5.287,50	15	5.287,50	15	5.287,50	-	-	-	-	-	-	5.287,50			
		2009	3	228,37	3	228,37	1	139,27	2	89,10	-	-	-	-	139,27			
		2010	23	1.197,85	26	1.197,85	8	1.197,85	8	-	10	-	-	-	1.197,85			
		2011	7	403,25	9	403,25	5	403,25	1	-	3	-	-	-	403,25			
		Jumlah	45	7.116,99	53	7.116,99	29	7.027,89	11	89,10	13	-	-	-	7.027,89			



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Bapertarum	2005 - 2008	5	59.200,00	8	59.200,00	5	59.200,00	2	-	1	-	59.200,00
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	41.145,44	7	41.145,44	1	48,20	4	41.097,24	2	-	48,20
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	100.345,44	15	100.345,44	6	59.248,20	6	41.097,24	3	-	59.248,20
42	Kementerian PDT	2005 - 2008	28	1.527,82	46	302,62	46	302,62	-	-	-	-	302,62
		2009	8	15,93	25	-	23	-	2	-	-	-	-
		2010	14	1.336,99	22	1.336,99	20	1.336,99	2	-	-	-	1.336,99
		2011	16	104.470,79	31	2.044,95	-	205,51	1	679,96	30	1.159,47	205,51
		Jumlah	66	107.351,55	124	3.684,57	89	1.845,13	5	679,96	30	1.159,47	1.845,13
43	BMKG	2005 - 2008	48	137.078,24	117	135.720,44	117	135.720,44	-	-	-	-	137.067,45
		2009	12	621,27	21	191,07	21	191,07	-	-	-	-	191,07
		2010	19	3.143,81	39	3.143,81	21	332,61	15	2.811,20	3	-	584,72
		2011	9	8.140,42	16	8.140,42	9	19,80	6	8.120,61	1	-	19,80
		Jumlah	88	148.983,76	193	147.195,76	168	136.263,94	21	10.931,82	4	-	137.863,07
44	Kementerian Perindustrian	2005 - 2008	52	-	71	-	55	-	16	-	-	-	-
		2009	16	1.704,40	20	1.704,40	20	1.704,40	-	-	-	-	1.704,40
		2010	12	222,81	16	222,81	16	222,81	-	-	-	-	222,81
		2011	13	417,60	13	417,60	-	417,60	3	-	10	-	417,60
		Jumlah	93	2.344,82	120	2.344,82	91	2.344,82	19	-	10	-	2.344,82
45	Kementerian Perdagangan	2005 - 2008	38	1.047,09	48	1.047,09	42	1.047,09	6	-	-	-	1.036,41
		2009	21	630,50	28	630,50	22	-	6	630,50	-	-	-
		2010	23	2.256,45	46	2.256,45	39	530,56	7	1.725,88	-	-	118,56
		2011	30	4.884,38	47	4.884,38	5	2.423,22	42	2.460,67	-	0,47	1.769,93
		Jumlah	112	8.818,42	169	8.818,42	108	4.000,87	61	4.817,06	-	0,47	2.924,91
				USD 6.60		USD 6.60		USD 6.60		USD 6.60			

Halaman 11 - Lampiran 37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Pergerakan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	Kementerian Kop. & UKM	2005 - 2008	20	2.414,30	28	2.414,30	19	867,63	7	1.546,67	2	-	867,63
		2009	24	6.084,76	38	6.084,76	7	500,00	30	2.237,95	1	3.346,80	500,00
		2010	16	19.471,60	32	19.471,60	22	17.459,71	10	2.011,89	-	-	17.459,71
		2011	9	5.196,14	11	5.196,14	-	-	-	-	11	5.196,14	-
		Jumlah	69	33.166,83	109	33.166,83	48	18.827,34	47	5.796,52	14	8.542,95	18.827,34
47	BSN	2005 - 2008	7	520,00	7	520,00	7	520,00	-	-	-	-	-
		2009	4	300,78	5	300,78	5	300,78	-	-	-	-	-
		2010	7	11,55	10	11,55	10	11,55	-	-	-	-	-
		2011	6	59,23	11	59,23	4	28,79	1	-	6	30,44	-
		Jumlah	24	891,58	33	891,58	26	861,14	1	-	6	30,44	-
48	BKPM	2005 - 2008	13	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
		2009	2	8,60	2	8,60	2	8,60	-	-	-	-	8,60
		2010	15	-	24	-	4	-	20	-	-	-	-
		2011	3	34,29	3	34,29	2	-	-	-	1	-	34,29
		Jumlah	33	42,89	44	8,60	23	8,60	20	-	1	-	42,89
49	Kementerian ESDM	2005 - 2008	119	257.373,47	148	254.648,21	106	83.127,23	41	171.520,97	1	-	83.127,23
		2009	34	384,46	42	384,46	33	83,12	9	301,34	0	-	83,12
		2010	57	251.503,30	95	251.503,30	52	20.711,77	42	230.791,53	1	-	20.711,77
		2011	15	29,261,54	27	18,753,09	3	-	24	-	-	-	USD 3,854,91
		Jumlah	225	509.261,25	312	506.535,98	194	103.922,13	116	402.613,85	2	-	103.922,13
		2010	16	20.109,49	29	20.109,49	23	884,11	5	4.120,34	1	15.105,04	882,24
50	Kementerian LH	2005 - 2008	43	20,52	56	20,52	50	20,52	4	-	2	-	20,52
		2009	60	43.420,55	125	1.832,00	56	332,00	62	1.500,00	7	-	328,18
		2010	16	20.109,49	29	20.109,49	23	884,11	5	4.120,34	1	15.105,04	882,24

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	11	8.973,26	24	2.901,54	1	1.408,92	22	1.492,61	1	-	1.408,92
		Jumlah	130	72.523,84	234	24.863,56	130	2.645,56	93	7.112,95	11	15.105,04	2.639,88
51	Kementerian BUMN	2005 - 2008	29	6.543,12	37	6.447,00	32	907,42	5	5.539,58	-	-	907,42
				USD 1,164.18		USD 1,164.18				USD 1,164.18			
		2009	8	165,79	8	165,79	7	165,79	1	-	-	-	165,79
		2010	9	1.227,87	9	-	1	-	8	-	-	-	-
		2011	4	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		Jumlah	50	7.936,80	59	6.612,80	40	1.073,21	14	5.539,58	5	-	1.073,21
				USD 1,164.18		USD 1,164.18				USD 1,164.18			
52	Kementerian Ristek	2005 - 2008	17	171.646,36	20	202,82	19	202,82	1	-	-	-	202,82
		2009	7	121.728,67	7	-	5	-	2	-	-	-	-
		2010	11	955,86	14	116,23	12	116,23	2	-	-	-	116,23
		2011	14	4.480,75	32	928,30	2	10,42	3	-	27	917,88	10,42
		Jumlah	49	298.811,66	73	1.247,36	38	329,48	8	-	27	917,88	329,48
53	BPPT	2005 - 2008	43	68.693,98	49	19.578,87	32	6.227,95	17	13.350,92	-	-	6.679,08
				USD 506.73		USD 506.73		USD 506.73					
		2009	9	3.414,68	10	315,65	10	315,65	-	-	-	-	160,75
		2010	23	26.374,98	34	26.160,45	14	26.131,73	20	28,72	-	-	25.078,81
		2011	12	3.994,11	23	3.881,91	-	-	-	-	23	3.881,91	-
		Jumlah	87	102.477,76	116	49.936,90	56	32.675,34	37	13.379,64	23	3.881,91	31.918,65
				USD 506.73		USD 506.73		USD 506.73					
54	LIPI	2005 - 2008	37	98.887,01	43	98.887,01	35	98.859,78	8	27,22	-	-	98.859,78
		2009	8	246,69	8	35,80	6	23,86	2	11,93	-	-	23,86
		2010	17	8.233,65	17	7.204,58	9	856,06	8	6.348,51	-	-	128,61
		2011	28	80.564,60	59	72.185,57	19	482,03	5	331,47	35	71.372,06	482,03
		Jumlah	90	187.931,96	127	178.312,98	69	100.221,75	23	6.719,15	35	71.372,06	99.494,30

Halaman 13 - Lampiran 37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	BATAN	2005 - 2008	21	21.523,55	24	-	22	-	2	-	-	-	-
				USD 36.73		USD 36.73		USD 36.73					USD 36.73
		2009	14	532.732,19	9	-	9	-	-	-	-	-	-
		2010	14	252,46	23	247,56	13	127,45	1	33,27	9	86,84	82,06
		2011	10	24,35	14	24,35	-	-	-	-	14	24,35	-
		Jumlah	59	554.532,56	70	271,91	44	127,45	3	33,27	23	111,19	82,06
				USD 36.73		USD 36.73		USD 36.73					USD 36.73
56	BAPETEN	2005 - 2008	14	262,46	16	145,81	14	97,60	2	48,21	-	-	97,60
		2009	6	17,90	7	17,90	6	17,90	1	-	-	-	17,90
		2010	9	73,22	15	73,22	8	5,00	4	68,22	3	-	5,00
				USD 222.15		USD 222.15							USD 222.15
		2011	9	73,25	14	73,25	9	44,52	2	28,72	3	-	44,52
		Jumlah	38	426,84	52	310,18	37	165,02	9	145,16	6	-	165,02
				USD 222.15		USD 222.15							USD 222.15
57	Bakosurtanal	2005 - 2008	28	6.914,97	33	1.622,18	32	1.622,18	1	-	-	-	1.622,18
		2009	4	4.541,35	6	74,31	6	74,31	-	-	-	-	74,31
		2010	13	594,97	13	370,07	12	306,44	1	63,63	-	-	306,44
		2011	16	7.120,41	24	4.485,99	-	834,02	2	1.312,26	22	2.339,71	832,82
		Jumlah	61	19.171,72	76	6.552,57	50	2.836,97	4	1.375,89	22	2.339,71	2.835,77
58	LAPAN	2005 - 2008	28	14.406,36	48	2.762,82	45	1.921,95	3	840,86	-	-	1.921,95
				USD 145.46									
		2009	6	3.038,21	7	289,69	4	6,61	3	283,08	-	-	6,61
		2010	23	58.281,44	29	409,45	17	243,37	4	41,17	8	124,89	49,79
		2011	17	11.374,13	36	239,74	1	118,65	1	25,14	34	95,94	16,06
		Jumlah	74	87.100,16	120	3.701,70	67	2.290,60	11	1.190,26	42	220,83	1.994,42
				USD 145.46									

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Kementerian Agama	2005 - 2008	345	553.931,72 USD 1,002.26	680	143.417,94	496	45.113,56	99	94.125,02	85	4.179,34	45.113,56
				SAR 7,983.63		SAR 101.41		SAR 101.41					SAR 101.41
		2009	86	96.903,09	183	65.360,83	84	21.821,68	78	43.463,65	21	75,49	22.226,59
		2010	154	200.523,92	340	41.264,85	134	6.457,29	43	3.083,60	163	31.723,96	5.156,88
				USD 270.54		USD 270.54		USD 128.00		USD 134.86		USD 7.66	USD 128.00
				JPY 266,082.19		JPY 150,835.50						JPY 150,835.50	
		2011	65	532.473,87 USD 1.05	123	251.092,87	3	2.604,30	5	9.233,25	115	239.255,31	2.604,30
						USD 1.05						USD 1.05	
		Jumlah	650	1.383.832,62	1.326	501.136,50	717	75.996,85	225	149.905,54	384	275.234,10	75.101,35
				USD 1,273.85		USD 271.59		USD 128.00		USD 134.86		USD 8.71	USD 128.00
				JPY 266,082.19		JPY 150,835.50						JPY 150,835.50	
				SAR 7,983.63		SAR 101.41		SAR 101.41					SAR 101.41
60	Kementerian Sosial	2005 - 2008	123	101.129,52	235	13.990,74	231	11.756,78	4	2.234,96	-	-	11.755,78
		2009	28	176.313,02	45	44.313,65	30	11.787,70	13	29.226,50	2	3.299,45	11.787,70
		2010	42	1.271.753,42	49	132.789,17	24	1.603,85	23	130.086,67	2	1.098,65	1.603,85
		2011	20	5.363,17	30	2.839,95	4	8,89	22	2.831,05	4	-	8,89
		Jumlah	213	1.554,559,14	359	193.933,53	289	25.156,23	62	164.379,19	8	4.398,10	25.156,23
61	BN Penanggulangan Bencana	2005 - 2008	22	397.956,52	30	367.044,40	20	46.080,01	10	320.964,39	-	-	70.973,53
													USD 4,143.03
		2009	11	7.749,04	19	7.749,04	16	7.749,04	2	-	1	-	9.235,36
		2010	15	902,10	27	390,15	18	272,37	7	117,78	2	-	272,37
				USD 2,385.73		USD 0.06		USD 0.06					USD 0.06
		2011	23	53.706,77	30	3.027,45	2	1.658,34	20	981,91	8	387,20	20.907,48
		Jumlah	71	460.314,44	106	378.211,05	56	55.759,76	39	322.064,08	11	387,20	101.388,76
				USD 2,385.73		USD 0.06		USD 0.06					USD 4,143.09

Halaman 15 - Lampiran 37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	Menko Kesra	2005 - 2008	43	326.614,27	52	325.743,13	34	111.145	11	12.006,54	7	202.591,29	111.150,73
		2009	15	65.103,71	31	65.103,71	7	2.942,77	12	14.306,02	12	47.854,91	2.992,05
		2010	8	15.972,29	9	5.041,68	7	3.671,95	2	1.369,73	-	-	188,35
		2011	5	870,56	7	870,56	-	65,24	-	-	7	805,32	40,94
		Jumlah	71	408.560,85	99	396.759,11	48	117.825,28	25	27.682,30	26	251.251,52	114.372,08
63	Kementerian PP dan PA	2005 - 2008	21	324,31	25	94,87	24	94,87	1	-	-	-	94,87
		2009	2	199,06	2	54,54	2	54,54	-	-	-	-	54,54
		2010	12	5.242,71	14	5.002,28	13	5.002,28	1	-	-	-	5.002,28
		2011	10	11.075,47	16	6.775,37	13	6.775,37	3	-	-	-	6.775,37
		Jumlah	45	16.841,56	57	11.927,07	52	11.927,07	5	-	-	-	11.927,07
64	Kementerian Kesehatan	2005 - 2008	612	424.680,14	1.049	111.680,39	701	38.888,61	338	72.764,76	10	27,01	39.022,30
				AUD 36.52		AUD 36.52				AUD 36.52			
				USD 125.88		USD 125.88				USD 125.88			
		2009	72	454.031,97	103	78.730,10	51	1.761,46	38	76.008,38	14	960,25	1.764,94
		2010	53	25.139,24	93	22.107,13	48	20.149,53	40	1.957,60	5	-	20.149,62
		2011	140	779.602,28	296	282.310,07	20	719,77	77	40.519,65	199	241.070,65	719,77
		Jumlah	877	1.683.453,64	1.541	494.827,70	820	61.519,38	493	191.250,39	228	242.057,92	61.656,64
				USD 125.88		USD 125.88				USD 125.88			
				AUD 36.52		AUD 36.52				AUD 36.52			
65	Kementerian Nakertrans	2005 - 2008	467	861.457,59	688	280.317,26	373	126.416,29	158	107.076,94	157	46.824,02	127.029,99
				USD 7.052.72		USD 6.619.39		USD 243.28		USD 509.14		USD 5.866.96	USD 243.28
		2009	29	7.746,69	43	113,90	10	37,26	9	76,64	24	-	37,26
				USD 203.60		USD 203.60						USD 203.60	
		2010	38	23.759,82	56	10.005,42	22	1.146,62	26	8.858,80	8	-	1.146,62
		2011	27	30.242,42	74	7.480,25	10	1.557,56	10	987,00	54	4.935,68	1.557,56
		Jumlah	561	923.206,53	861	297.916,85	415	129.157,74	203	116.999,39	243	51.759,70	129.771,44
				USD 7.256.32		USD 6.822.99		USD 243.28		USD 509.14		USD 6.070.56	USD 243.28

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	BKBN	2005 - 2008	55	444,93	72	444,93	67	395,39	3	49,53	2	-	395,39
		2009	11	392,37	17	392,37	14	112,74	3	279,63	-	-	112,74
		2010	22	30.022,90	22	30.022,90	14	15.209,03	6	8.926,95	2	5.886,91	15.209,03
		2011	26	22.385,11	53	6.319,43	23	159,00	9	6.094,55	21	65,86	159,00
		Jumlah	114	53.245,32	164	37.179,64	118	15.876,17	21	15.350,67	25	5.952,78	15.876,17
67	Badan POM	2005 - 2008	49	3.266,75	70	3.266,75	66	3.266,75	4	-	-	-	3.266,75
				EUR 29.60		EUR 29.60		EUR 29.60					EUR 29.60
		2009	12	4.363,17	21	4.363,17	18	4.363,17	3	-	-	-	4.363,17
		2010	10	1,04	18	1,04	14	1,04	4	-	-	-	1,04
		2011	13	4.227,28	27	1.679,07	-	1.176,41	-	-	27	502,65	1.176,41
		Jumlah	84	11.858,25	136	9.310,04	98	8.807,39	11	-	27	502,65	8.807,39
				EUR 29.60		EUR 29.60		EUR 29.60					EUR 29.60
68	Kementerian Pendidikan Nasional	2005 - 2008	1.032	6.041.726,44	1.965	1.698.948,79	1.644	808.222,89	170	889.491,50	151	1.234,39	564.044,73
				USD 8.69		USD 8.69		USD 8.69					USD 8.69
		2009	166	468.291,54	417	450.792,32	166	161.947,97	97	139.254,57	154	149.589,76	35.894,09
				USD 9.56		USD 9.56		USD 9.56		USD 9.56			
		2010	114	2.217.016,99	285	2.143.535,92	107	305.980,67	73	1.796.619,46	105	40.935,78	274.832,34
		2011	46	390.906,94	106	188.949,27	4	338,43	15	75.967,34	87	112.643,50	338,43
				USD 61.74		USD 61.74						USD 61.74	
		Jumlah	1.358	9.117.941,92	2.773	4.482.226,31	1.921	1.276.489,97	355	2.901.332,89	497	304.403,45	875.109,59
				USD 80.00		USD 80.00		USD 8.69		USD 9.56		USD 61.74	USD 8.69
69	Kementerian Budbar	2005 - 2008	144	2.088.380,77	213	3.542,65	194	2.542,65	13	1.000,00	6	-	2.542,65
		2009	19	1.927.147,67	37	421,19	22	421,19	7	-	8	-	421,19
		2010	27	50.608,67	47	585,09	23	515,51	6	69,58	18	-	515,99
		2011	24	6.059,69	48	2.857,44	-	-	-	-	48	2.857,44	-
		Jumlah	214	4.072.196,81	345	7.406,39	239	3.479,36	26	1.069,58	80	2.857,44	3.479,84

Halaman 17 - Lampiran 37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2005 - 2008	14	1.397,26	16	1.397,26	12	1.397,26	4	-	-	-	1.397,26
		2009	18	1.221,43	22	1.221,43	14	828,09	7	393,33	1	-	828,09
		2010	11	115.883,90	11	115.883,90	1	105,41	5	16.303,68	5	99.474,80	105,41
		2011	13	21.508,19	17	21.508,19	1	3.409,38	2	10.281,10	14	7.817,69	3.409,38
		Jumlah	56	140.010,79	66	140.010,79	28	5.740,16	18	26.978,12	20	107.292,50	5.740,16
71	Perpustakaan Nasional	2005 - 2008	36	160,40	68	160,40	65	160,40	3	-	-	-	160,40
		2009	5	458,08	7	458,08	3	-	1	-	3	458,08	-
		2010	11	1.535,53	21	1.535,53	17	1.535,53	4	-	-	-	1.535,53
		2011	5	47,61	8	47,61	7	47,61	1	-	-	-	47,61
		Jumlah	57	2.201,63	104	2.201,63	92	1.743,55	9	-	3	458,08	1.743,55
72	Kementerian Keuangan	2005 - 2008	99	6.632,68	133	6.632,68	108	7,22	25	6.625,46	-	-	7,22
		2009	54	81.802,76	53	81.802,76	29	23.842,76	24	57.960,00	-	-	-
		2010	41	18.150,79	71	17.374,02	20	-	51	17.374,02	-	-	-
		2011	29	809,42	47	809,42	-	-	47	809,42	-	-	-
		Jumlah	223	107.395,65	304	106.618,88	157	23.849,98	147	82.768,90	-	-	7,22
73	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	2005 - 2008	14	289,05	24	289,05	24	289,05	-	-	-	-	289,05
		2009	2	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-
		2010	15	6.476,87	23	6.476,87	21	4.102,43	1	2.199,43	1	175,00	792,00
		2011	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-
		Jumlah	35	6.765,92	54	6.765,92	46	4.391,48	7	2.199,43	1	175,00	1.081,05
74	BPKP	2005 - 2008	24	46,00	32	46,00	31	46,00	1	-	-	-	-
		2009	9	72,19	12	72,19	11	72,19	1	-	-	-	-
		2010	17	953,57	29	617,39	19	615,26	9	2,12	1	-	-
		2011	16	356,34	19	356,34	1	70,01	1	13,30	17	273,02	-
		Jumlah	66	1.428,11	92	1.091,93	62	803,47	12	15,43	18	273,02	-



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75	BPS	2005 - 2008	85	2.194.757,30	135	6.511,34	103	1.913,90	10	3.952,58	22	644,85	865,15	
		2009	16	747,44	22	747,44	16	180,39	6	565,74	-	1,30	47,53	
		2010	9	103,47	15	103,47	14	103,47	1	-	-	-	103,47	
		2011	17	2.663,97	34	399,52	25	-	9	399,52	-	-	-	
		Jumlah	127	2.198.272,20	206	7.761,78	158	2.197,77	26	4.917,85	22	646,15	1.016,16	
76	Menko Perekonomian	2005 - 2008	13	3.387,10	13	958,80	13	958,80	-	-	-	-	644,21	
		2009	2	41,25	2	41,25	2	41,25	-	-	-	-	41,25	
		2010	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		2011	4	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	20	3.428,35	22	1.000,05	22	1.000,05	-	-	-	-	685,46	
77	BPK	2005 - 2008	64	96,18	51	58,38	49	58,38	2	-	-	-	54,77	
		2009	24	-	25	-	19	-	6	-	-	-	-	
		2010	20	1.604,80	28	71,30	17	71,30	8	-	3	-	71,32	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	108	1.700,98	104	129,68	85	129,68	16	-	3	-	126,09	
78	Bank Indonesia	2005 - 2008	27	118.452,27	41	118.452,27	25	1.595,28	16	116.856,99	-	-	1.595,28	
		2009	12	2.847,94	21	2.847,94	13	14,00	8	2.833,94	-	-	14,00	
		2010	13	599.941,27	21	599.941,27	5	69.220,60	16	530.720,67	-	-	95.845,48	
		2011	13	1.130.851,72	30	1.131.047,25	-	-	29	1.130.851,72	1	195,53	-	
		Jumlah	65	1.852.093,21	113	1.852.288,74	43	70.829,88	69	1.781.263,32	1	195,53	97.454,76	
79	LPS	2005 - 2008	22	-	31	-	31	-	-	-	-	-	-	
		2009	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	
		2010	4	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	
		2011	6	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	
		Jumlah	43	-	53	-	46	-	7	-	-	-	-	

Halaman 19 - Lampiran 37

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	80 BNP2TKI	2005	4	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2009	21	USD 2,325,24	32	-	8	-	12	-	12	-	-
		2010	11	593,44	17	336,84	7	260,69	2	76,14	8	-	260,69
		2011	10	676,88	13	575,03	-	3,53	1	130,88	12	440,61	3,53
		Jumlah	53	9.324,31	82	911,87	24	264,23	22	207,02	36	440,61	264,23
				USD 2,325,24									
		2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	BPPLS	2009	11	266,89	19	266,89	19	266,89	-	-	-	-	266,89
		2010	5	128,68	9	128,68	8	128,68	1	-	-	-	126,62
		2011	4	-	6	-	2	-	1	-	3	-	-
		Jumlah	20	395,57	34	395,57	29	395,57	2	-	3	-	393,51
		2005 - 2008	30	228.390,85	46	228.390,85	33	79.080,78	13	149.310,06	-	-	79.080,78
82	LPP TVRI	2009	10	56.570,38	12	53.598,30	3	17.710,41	9	35.887,88	-	-	17.710,41
		2010	15	326,04	20	326,04	5	53,34	11	144,14	4	128,54	53,34
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	55	285.287,27	78	282.315,20	41	96.844,55	33	185.342,10	4	128,54	96.844,55
		2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	LPP RRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	589,74	32	486,92	18	46,95	14	439,97	-	-	21,66
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	589,74	32	486,92	18	46,95	14	439,97	-	-	21,66
		2005 - 2008	45	308.352,92	89	267.288,11	74	184.805,24	6	81.462,18	9	1.020,68	166.259,02
84	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam)			USD 88,30		USD 259,45		USD 221,66		USD 37,78			USD 221,66
						SGD 349,95		SGD 117,75		SGD 232,20			SGD 117,75

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2009	13	10.534,34	18	17.670,18	14	9.435,21	4	8.234,96	-	-	4.638,82
		2010	37	4.220,15	67	3.917,36	57	3.027,41	4	889,95	6	-	3.024,35
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	95	323.107,43	174	288.875,66	145	197.267,87	14	90.587,10	15	1.020,68	173.922,20
				USD 88.30		USD 259.45		USD 221.66		USD 37.78			USD 221.66
						SGD 349.95		SGD 117.75		SGD 232.20			SGD 117.75
85	BASARNAS	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	20.726,72	18	20.726,72	1	1.637,08	2	8.055,93	15	11.033,70	1.637,08
		Jumlah	11	20.726,72	18	20.726,72	1	1.637,08	2	8.055,93	15	11.033,70	1.637,08
86	KPPU	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	2	11,70	2	11,70	2	11,70	-	-	-	-	11,70
		2011	5	163,48	7	163,48	6	-	1	163,48	-	-	3,39
		Jumlah	7	175,18	9	175,18	8	11,70	1	163,48	-	-	15,09
		TOTAL	13.897	50.775.317,33	23.942	27.366.261,90	15.159	7.724.966,78	4.749	9.338.876,56	4.034	10.302.418,54	8.664.740,25
				USD 535,176.90		USD 488,202.13		USD 60,890.52		USD 126,937.36		USD 300,374.24	USD 64,110.44
				EUR 664.63		EUR 628.83		EUR 595.22		EUR 33.61		-	EUR 580.39
				AUD 36.52		AUD 36.52		-		AUD 36.52		-	-
				JPY 266,082.19		JPY 150,835.50		-		-		JPY 150,835.50	-
				SAR 8,059.29		SAR 177.07		SAR 177.07		-		-	SAR 110.41
				GBP 396.10		GBP 396.10		GBP 396.10		SGD 232.20		-	SGD 117.75
													GBP 396.10

Keterangan :

1. Untuk Tahun 2011 hanya menyajikan tindak lanjut Semester I
2. Perbedaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan ms. excel
3. Angka pada kolom 12 dan 13 sudah termasuk rincian tindak lanjut yang tidak dapat ditindaklanjuti secara sah sejumlah 59 kasus senilai Rp137,22 miliar dan USD255.07 ribu

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011  
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prov. Aceh	2005-2008	215	52.244,89	461	49.584,08	375	20.485,19	48	28.035,02	38	1.063,86	17.610,68
		2009	37	580.825,36	111	32.157,18	77	22.014,30	34	10.142,88	-	-	2.044,30
		2010	70	2.057.827,05	176	165.651,88	28	889,69	32	9.996,96	116	154.765,22	889,69
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	322	2.690.897,30	748	247.393,15	480	43.389,19	114	48.174,87	154	155.829,08	20.544,67
2	Kab. Aceh Barat	2005-2008	86	28.200,49	200	23.976,15	130	5.493,87	55	18.058,06	15	424,21	5.145,87
		2009	15	40.183,25	35	24.687,65	4	-	4	23.704,98	27	982,67	-
		2010	10	8.300,69	30	6.721,14	-	-	11	6.721,14	19	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	111	76.684,44	265	55.384,95	134	5.493,87	70	48.484,18	61	1.406,89	5.145,87
3	Kab. Aceh Barat Daya	2005-2008	76	10.035,87	160	10.035,81	77	4.005,62	80	6.030,18	3	-	3.290,99
		2009	14	11.310,27	42	5.620,16	-	-	1	11,20	41	5.608,96	-
		2010	23	9.374,16	82	7.792,85	-	-	-	-	82	7.792,85	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	113	30.720,31	284	23.448,83	77	4.005,62	81	6.041,38	126	13.401,82	3.290,99
4	Kab. Aceh Besar	2005-2008	109	21.577,46	265	14.961,34	216	5.871,69	23	9.045,62	26	44,01	4.303,68
		2009	18	40.546,32	45	20.879,72	40	18.368,26	4	2.511,45	1	-	20.623,22
		2010	11	3.769,99	25	3.769,99	15	348,32	10	3.421,66	-	-	348,32
		2011	14	20.511,12	31	20.511,12	-	-	-	-	31	20.511,12	-
		Jumlah	152	86.404,90	366	60.122,18	271	24.588,29	37	14.978,75	58	20.555,14	25.275,23
5	Kab. Aceh Jaya	2005-2008	39	4.057,18	91	4.057,18	55	-	19	3.692,45	17	364,72	-
		2009	21	125.402,30	48	13.127,48	24	720,45	19	12.407,03	5	-	74,07
		2010	24	9.144,65	48	2.028,74	-	-	-	-	48	2.028,74	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	84	138.604,13	187	19.213,40	79	720,45	38	16.099,48	70	2.393,47	74,07

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Kab. Aceh Selatan	2005-2008	61	55.298,72	176	54.377,45	154	44.153,45	21	10.224,00	1	-	43.973,33
		2009	19	42.354,47	44	30.108,17	23	11.527,97	14	18.466,35	7	113,85	11.527,97
		2010	20	4.988,92	53	4.042,39	35	1.056,83	17	2.985,55	1	-	1.056,83
		2011	11	18.644,54	29	505,28	-	-	-	-	29	505,28	-
		Jumlah	111	121.286,67	302	89.033,31	212	56.738,26	52	31.675,90	38	619,13	56.558,14
7	Kab. Aceh Singkil	2005-2008	68	7.466,69	155	7.369,40	140	3.874,26	8	1.735,92	7	1.759,21	3.874,26
		2009	13	3.148,16	34	2.532,61	19	2.065,41	5	443,42	10	23,78	180,39
		2010	17	27.499,60	63	8.078,41	12	216,54	25	7.817,57	26	44,29	209,22
		2011	14	19.095,55	38	3.011,57	-	-	-	-	38	3.011,57	-
		Jumlah	112	57.210,02	290	20.992,02	171	6.156,22	38	9.996,92	81	4.838,87	4.263,89
8	Kab. Aceh Tamiang	2005-2008	60	18.171,36	147	18.110,36	122	9.027,47	18	6.686,17	7	2.396,71	8.619,10
		2009	25	22.776,84	72	9.097,29	55	509,92	14	8.471,95	3	115,41	310,66
		2010	14	83.385,72	55	2.250,40	34	185,80	12	1.779,39	9	285,20	95,80
		2011	11	9.456,90	33	2.165,18	-	-	-	-	33	2.165,18	-
		Jumlah	110	133.790,83	307	31.623,24	211	9.723,20	44	16.937,52	52	4.962,51	9.025,58
9	Kab. Aceh Tengah	2005-2008	68	8.730,80	140	8.666,60	125	6.714,15	14	1.937,45	1	15,00	5.842,52
		2009	14	8.762,26	34	8.536,26	30	5.910,80	4	2.625,46	-	-	82,43
		2010	22	28.863,21	52	1.766,27	11	29,63	19	959,18	22	777,45	107,35
		2011	16	41.647,01	37	9.649,71	-	-	-	-	37	9.649,71	-
		Jumlah	120	88.003,30	263	28.618,86	166	12.654,58	37	5.522,11	60	10.442,17	6.032,31
10	Kab. Aceh Tenggara	2005-2008	97	25.485,26	198	19.103,94	129	11.424,31	60	7.454,92	9	224,70	864,52
		2009	15	1.483.118,89	32	35.325,51	11	17.533,29	7	4.681,86	14	13.110,36	9.028,26
		2010	15	35.832,92	33	20.882,50	2	9.174,87	2	3.222,17	29	8.485,45	196,67
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	127	1.544.437,08	263	75.311,97	142	38.132,48	69	15.358,95	52	21.820,52	10.089,46

**Halaman 3 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Kab. Aceh Timur	2005-2008	92	18.091,56	184	17.257,15	152	9.891,83	17	6.948,30	15	417,02	8.395,77
		2009	18	71.196,83	50	2.431,18	30	79,59	13	2.234,38	7	117,20	79,59
		2010	25	750.455,15	59	6.361,92	-	-	-	-	59	6.361,92	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	135	839.743,55	293	26.050,26	182	9.971,42	30	9.182,68	81	6.896,15	8.475,36
12	Kab. Aceh Utara	2005-2008	70	1.946,12	147	1.946,12	126	838,64	19	1.035,02	2	72,45	810,28
		2009	23	670.466,51	56	225.656,07	32	-	14	225.422,70	10	233,37	-
		2010	59	1.348.992,46	115	24.604,07	41	-	28	14.242,75	46	10.361,32	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	152	2.021.405,11	318	252.206,27	199	838,64	61	240.700,48	58	10.667,14	810,28
13	Kab. Bener Meriah	2005-2008	58	3.148,47	112	3.148,47	87	2.236,67	11	447,32	14	464,47	2.236,67
		2009	20	64.610,51	54	2.329,47	27	-	20	174,31	7	2.155,15	-
		2010	15	24.983,87	36	2.734,73	-	-	-	-	36	2.734,73	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	93	92.742,86	202	8.212,68	114	2.236,67	31	621,64	57	5.354,37	2.236,67
14	Kab. Bireuen	2005-2008	80	16.822,65	187	14.215,73	160	1.450,55	22	12.765,17	5	-	74,55
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	80	16.822,65	187	14.215,73	160	1.450,55	22	12.765,17	5	-	74,55
15	Kab. Gayo Lues	2005-2008	86	24.135,01	160	19.995,41	135	16.079,91	15	2.882,10	10	1.033,39	11.416,77
		2009	18	85.582,31	48	2.870,32	40	2.391,43	4	478,88	4	-	33,28
		2010	21	660.663,09	46	20.841,41	28	16.128,18	7	2.446,94	11	2.266,28	215,81
		2011	17	11.261,75	41	6.855,22	-	-	-	-	41	6.855,22	-
		Jumlah	142	781.642,17	295	50.562,37	203	34.599,53	26	5.807,94	66	10.154,89	11.665,86

**Halaman 4 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Kab. Nagan Raya	2005-2008	75	34.423,23	145	31.201,34	138	21.846,73	5	9.354,60	2	-	21.846,73
		2009	11	47.935,55	25	40.888,29	24	40.756,25	1	132,04	-	-	40.756,25
		2010	13	42.082,77	34	518,66	28	349,34	4	150,32	2	18,99	349,34
		2011	14	2.551,33	42	651,77	-	-	-	-	42	651,77	-
		Jumlah	113	126.992,90	246	73.260,08	190	62.952,34	10	9.636,97	46	670,77	62.952,34
17	Kab. Pidie	2005-2008	79	8.685,83	144	8.685,75	98	674,00	40	7.925,89	6	85,86	2.035,74
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	79	8.685,83	144	8.685,75	98	674,00	40	7.925,89	6	85,86	2.035,74
18	Kab. Pidie Jaya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	41	2.589,48	103	2.589,48	37	310,17	17	1.461,76	49	817,55	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	41	2.589,48	103	2.589,48	37	310,17	17	1.461,76	49	817,55	-
19	Kab. Simeulue	2005-2008	50	51.077,06	127	50.798,05	99	49.526,96	20	1.271,09	8	-	49.526,96
		2009	21	31.943,88	63	8.518,67	21	10,20	18	8.316,38	24	192,08	10,20
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	71	83.020,94	190	59.316,73	120	49.537,16	38	9.587,48	32	192,08	49.537,16
20	Kota Banda Aceh	2005-2008	109	13.313,01	252	8.546,68	201	2.114,30	27	6.290,08	24	142,29	2.099,30
		2009	10	4.565,34	21	4.565,34	18	85,39	2	38,97	1	4.440,96	85,39
		2010	36	1.859,14	74	1.635,99	58	429,31	16	1.206,68	-	-	382,40
		2011	20	6.688,65	51	532,84	-	-	-	-	51	532,84	-
		Jumlah	175	26.426,15	398	15.280,86	277	2.629,01	45	7.535,74	76	5.116,11	2.567,10

Halaman 5 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Kota Langsa	2005-2008	78	3.824,23	174	3.474,23	147	2.993,16	4	453,92	23	27,13	3.042,98
		2009	11	4.336,82	19	2.510,69	12	381,26	4	2.097,39	3	32,04	381,26
		2010	11	6.634,04	33	569,25	-	-	-	-	33	569,25	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	100	14.795,09	226	6.554,18	159	3.374,42	8	2.551,32	59	628,43	3.424,24
22	Kota Lhokseumawe	2005-2008	88	3.309,78	188	3.309,78	154	1.328,59	34	1.981,18	-	-	1.476,39
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	88	3.309,78	188	3.309,78	154	1.328,59	34	1.981,18	-	-	1.476,39
23	Kota Sabang	2005-2008	73	13.107,57	153	6.414,47	137	2.600,55	16	3.813,92	-	-	2.011,86
		2009	10	4.317,51	21	1.354,40	18	1.354,40	2	-	1	-	1.354,40
		2010	13	28.324,31	23	1.485,43	18	1.344,64	4	140,78	1	-	40,54
		2011	13	66,24	28	66,24	-	-	-	-	28	66,24	-
		Jumlah	109	45.815,65	225	9.320,56	173	5.299,60	22	3.954,71	30	66,24	3.406,82
24	Kota Subulussalam	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	24	19.801,73	74	10.573,93	25	-	15	8.866,98	34	1.706,95	-
		2010	17	10.308,90	51	3.828,21	-	-	-	-	51	3.828,21	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	41	30.110,64	125	14.402,15	25	-	15	8.866,98	85	5.535,17	-
25	Prov. Sumatera Utara	2005-2008	110	139.164,49	255	129.737,63	92	8.368,69	119	77.902,30	44	43.466,63	8.362,83
		2009	35	44.689,60	84	34.742,93	9	899,58	56	25.959,59	19	7.883,74	899,58
		2010	33	357.747,35	97	326.703,55	11	5.294,16	33	148.035,62	53	173.373,76	5.294,16
		2011	18	9.413,05	41	8.275,82	-	-	-	-	41	8.275,82	-
		Jumlah	196	551.014,51	477	499.459,94	112	14.562,44	208	251.897,51	157	232.999,97	14.556,58



Halaman 6 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Kab. Asahan	2005-2008	64	13.661,57	153	13.487,69	110	4.705,22	39	8.782,46	4	-	4.705,22
		2009	20	601,06	52	419,55	41	309,44	9	110,11	2	-	309,44
		2010	22	5.046,12	54	5.046,12	33	539,16	17	3.927,98	4	578,97	539,16
		2011	16	2.109,55	36	2.109,55	-	-	-	-	36	2.109,55	-
		Jumlah	122	21.418,31	295	21.062,92	184	5.553,82	65	12.820,57	46	2.688,52	5.553,82
27	Kab. Batubara	2005-2008	7	96,22	18	96,22	4	56,89	2	15,94	12	23,38	-
		2009	20	42.049,32	55	42.016,32	35	206,34	20	41.809,97	-	-	206,34
		2010	17	24.028,77	52	24.028,77	17	-	33	24.028,77	2	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	44	66.174,32	125	66.141,32	56	263,23	55	65.854,70	14	23,38	206,34
28	Kab. Dairi	2005-2008	70	25.965,52	152	17.155,77	112	15.011,52	15	1.761,49	25	382,75	16.102,07
		2009	14	23.231,32	40	22.470,84	27	7.393,86	12	14.681,98	1	395,00	7.393,86
		2010	15	2.520,02	33	606,61	2	337,18	23	269,43	8	-	337,18
		2011	16	7.070,40	36	1.914,57	-	-	-	-	36	1.914,57	-
		Jumlah	115	58.787,28	261	42.147,81	141	22.742,57	50	16.712,90	70	2.692,33	23.833,12
29	Kab. Deli Serdang	2005-2008	77	30.859,69	170	12.087,02	96	195,43	31	10.428,06	43	1.463,52	1.251,37
		2009	18	155.215,06	39	3.468,59	24	616,08	13	2.852,51	2	-	-
		2010	15	79.075,19	41	934,75	25	206,39	12	421,45	4	306,90	-
		2011	21	1.144.363,57	44	1.906,96	13	254,20	7	1.542,19	24	110,56	-
		Jumlah	131	1.409.513,52	294	18.397,34	158	1.272,12	63	15.244,22	73	1.880,99	1.251,37
30	Kab. Humbang Hasundutan	2005-2008	67	32.248,52	150	30.052,52	127	28.792,68	22	1.259,84	1	-	-
		2009	6	6.598,88	15	6.598,88	9	2.356,66	2	28,67	4	4.213,54	-
		2010	15	11.728,24	30	11.754,53	5	143,44	-	-	25	11.611,09	-
		2011	15	824,94	41	824,94	-	-	-	-	41	824,94	-
		Jumlah	103	51.400,60	236	49.230,89	141	31.292,79	24	1.288,51	71	16.649,58	-

**Halaman 7 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Kab. Karo	2005-2008	59	46.706,14	136	1.685,04	85	799,67	44	885,36	7	-	799,67
		2009	12	1.284,23	32	1.217,25	4	1.012,50	25	204,74	3	-	1.012,50
		2010	16	5.607,00	29	4.320,50	6	228,30	16	4.092,20	7	-	-
		2011	19	3.424,27	65	3.354,49	37	1.138,69	25	2.215,79	3	-	1.228,54
		Jumlah	106	57.021,66	262	10.577,29	132	3.179,17	110	7.398,11	20	-	3.040,71
32	Kab. Labuhanbatu	2005-2008	111	64.311,71	226	33.767,32	200	9.896,65	23	14.286,62	3	9.584,04	2.049,55
		2009	26	23.791,90	68	7.315,76	55	287,88	13	7.027,88	-	-	-
		2010	12	8.901,51	27	1.083,65	-	-	-	-	27	1.083,65	-
		2011	13	6.552,53	36	5.942,20	-	-	-	-	36	5.942,20	-
		Jumlah	162	103.557,67	357	48.108,94	255	10.184,53	36	21.314,50	66	16.609,89	2.049,55
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	2.540,16	23	2.540,16	-	-	-	-	23	2.540,16	-
		Jumlah	8	2.540,16	23	2.540,16	-	-	-	-	23	2.540,16	-
34	Kab. Langkat	2005-2008	70	762.594,85	159	291.422,59	92	5.505,48	61	285.917,11	6	-	5.505,48
		2009	20	113.794,59	54	109.569,34	35	44.314,08	19	65.255,26	-	-	43.814,12
		2010	23	13.532,86	56	6.990,57	13	1.050,91	38	5.939,66	5	-	1.050,91
		2011	15	4.205,73	39	2.922,82	-	-	-	-	39	2.922,82	-
		Jumlah	128	894.128,04	308	410.905,33	140	50.870,47	118	357.112,04	50	2.922,82	50.370,52
35	Kab. Mandailing Natal	2005-2008	54	15.612,52	92	15.612,45	15	6.294,41	61	9.164,13	16	153,90	5.687,05
		2009	16	2.104,67	37	2.104,67	3	293,44	7	1.094,81	27	716,41	293,44
		2010	19	1.242,53	50	946,89	-	-	-	-	50	946,89	-
		2011	25	1.340,42	73	1.340,42	-	-	-	-	73	1.340,42	-
		Jumlah	114	20.300,15	252	20.004,44	18	6.587,85	68	10.258,95	166	3.157,63	5.980,49

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Kab. Nias	2005-2008	39	152.341,56	88	60.911,59	60	53.232,78	25	7.678,80	3	-	60.911,59
		2009	20	1.087.094,13	67	14.401,41	22	1.943,86	41	12.457,54	4	-	14.401,41
		2010	13	32.471,20	34	4.304,95	-	-	-	-	34	4.304,95	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	72	1.271.906,91	189	79.617,95	82	55.176,65	66	20.136,35	41	4.304,95	75.313,00
37	Kab. Nias Selatan	2005-2008	38	57.233,61	74	5.207,00	11	3.302,83	16	46,98	47	1.857,19	-
		2009	17	349.474,48	49	3.227,16	-	-	-	-	49	3.227,16	-
		2010	15	1.313,97	46	621,17	2	148,27	1	53,36	43	419,53	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	70	408.022,07	169	9.055,35	13	3.451,11	17	100,35	139	5.503,88	-
38	Kab. Padang Lawas	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	270,78	20	270,78	13	16,00	6	254,78	1	-	16,00
		2010	20	6.231,29	53	1.831,53	-	-	-	-	53	1.831,53	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	6.502,08	73	2.102,31	13	16,00	6	254,78	54	1.831,53	16,00
39	Kab. Padang Lawas Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	24.259,16	19	24.259,16	9	11.681,07	6	12.519,74	4	58,35	187,88
		2010	20	12.364,13	52	12.364,13	-	-	-	-	52	12.364,13	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	36.623,30	71	36.623,30	9	11.681,07	6	12.519,74	56	12.422,48	187,88
40	Kab. Pakpak Bharat	2005-2008	46	20.068,55	113	14.798,01	93	3.317,17	18	11.480,84	2	-	3.317,17
		2009	13	10.197,40	26	844,03	19	171,50	4	672,52	3	-	171,50
		2010	38	571.189,61	47	1.208,08	2	112,85	4	131,09	41	964,13	112,85
		2011	12	1.439,22	33	1.217,70	-	-	-	-	33	1.217,70	-
		Jumlah	109	602.894,79	219	18.067,83	114	3.601,53	26	12.284,45	79	2.181,84	3.601,53

Halaman 9 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Kab. Samosir	2005-2008	32	7.881,08	61	5.437,20	26	560,91	24	4.245,79	11	630,48	560,91
		2009	15	4.694,39	38	2.396,81	-	63,65	22	518,15	16	1.815,00	63,65
		2010	29	5.297,82	69	4.238,24	1	456,23	30	3.645,39	38	136,62	456,23
		2011	11	1.416,54	47	674,33	-	-	-	-	47	674,33	-
		Jumlah	87	19.289,84	215	12.746,60	27	1.080,80	76	8.409,34	112	3.256,44	1.080,80
42	Kab. Serdang Bedagai	2005-2008	63	7.399,39	151	3.683,74	95	695,76	47	2.987,98	9	-	695,76
		2009	30	28.979,77	76	970,52	30	13,37	45	957,14	1	-	13,37
		2010	17	783.908,75	38	3.768,99	19	169,27	19	3.599,71	-	-	169,27
		2011	18	984.117,87	47	2.263,08	-	-	-	-	47	2.263,08	-
		Jumlah	128	1.804.405,81	312	10.686,34	144	878,41	111	7.544,84	57	2.263,08	878,41
43	Kab. Simalungun	2005-2008	114	240.061,18	234	134.754,11	33	892,68	75	117.892,07	126	15.969,35	-
		2009	17	12.015,11	41	3.178,10	1	9,09	2	13,01	38	3.156,00	-
		2010	28	58.606,70	60	544,26	-	-	-	-	60	544,26	-
		2011	19	29.857,14	58	27.553,10	-	-	-	-	58	27.553,10	-
		Jumlah	178	340.540,14	393	166.029,59	34	901,77	77	117.905,08	282	47.222,73	-
44	Kab. Tapanuli Selatan	2005-2008	38	38.149,54	64	34.001,34	29	8.227,06	26	11.506,76	9	14.267,50	1.903,68
		2009	19	1.581.827,85	46	886,24	15	356,77	20	111,23	11	418,24	-
		2010	34	1.421.344,84	62	5.058,51	19	-	38	4.852,45	5	206,05	-
		2011	11	1.319,63	34	1.080,04	-	-	-	-	34	1.080,04	-
		Jumlah	102	3.042.641,87	206	41.026,15	63	8.583,83	84	16.470,45	59	15.971,85	1.903,68
45	Kab. Tapanuli Tengah	2005-2008	50	14.277,37	90	4.094,92	20	84,25	2	121,77	68	3.888,88	170,43
		2009	23	2.663,19	37	355,79	-	-	-	-	37	355,79	-
		2010	20	1.194,90	54	1.194,90	-	-	-	-	54	1.194,90	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	93	18.135,47	181	5.645,61	20	84,25	2	121,77	159	5.439,58	170,43

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	Kab. Tapanuli Utara	2005-2008	66	78.499,26	146	54.414,41	24	2.274,31	50	1.183,90	72	50.956,19	2.372,71
		2009	42	800.434,25	65	371,20	30	98,39	30	272,80	5	-	-
		2010	16	543.523,34	39	285,60	-	-	-	-	39	285,60	-
		2011	13	149.338,16	33	371,73	-	-	-	-	33	371,73	-
		Jumlah	137	1.571.795,03	283	55.442,95	54	2.372,71	80	1.456,70	149	51.613,53	2.372,71
47	Kab. Toba Samosir	2005-2008	60	70.140,89	136	3.491,07	77	1.625,46	38	932,91	21	932,70	1.625,46
		2009	13	3.613,25	31	64,23	19	41,45	6	-	6	22,78	-
		2010	10	14.172,81	25	8.435,45	11	121,31	6	1.354,06	8	6.960,07	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	83	87.926,96	192	11.990,76	107	1.788,22	50	2.286,97	35	7.915,55	1.625,46
48	Kota Binjai	2005-2008	76	24.874,83	179	16.488,61	142	3.933,09	34	12.555,52	3	-	3.668,43
		2009	18	4.052,06	34	4.052,06	19	955,39	15	3.096,67	-	-	317,91
		2010	15	16.842,98	40	4.738,83	14	890,32	23	3.848,51	3	-	162,15
		2011	16	11.628,17	46	5.897,00	-	-	-	2,24	46	5.894,76	-
		Jumlah	125	57.398,06	299	31.176,52	175	5.778,81	72	19.502,95	52	5.894,76	4.148,50
49	Kota Medan	2005-2008	78	79.776,28	209	73.203,22	104	36.970,24	101	35.932,98	4	300,00	36.392,21
		2009	49	33.032,80	112	35.755,24	36	10.760,37	62	24.994,86	14	-	10.760,37
		2010	27	35.215,68	92	35.215,68	-	-	-	-	92	35.215,68	-
		2011	20	3.337.825,48	58	3.337.825,48	-	-	-	-	58	3.337.825,48	-
		Jumlah	174	3.485.850,26	471	3.481.999,63	140	47.730,61	163	60.927,84	168	3.373.341,17	47.152,59
			-	USD 41,78	-	USD 41,78	-	USD 35,71	-	USD 6,06	-	-	USD 35,71
50	Kota Padangsimpuan	2005-2008	63	97.790,29	137	67.236,49	98	32.323,17	27	30.635,65	12	4.277,66	-
		2009	16	13.685,47	41	640,67	21	76,07	20	564,59	-	-	-
		2010	20	7.527,28	55	3.125,05	16	165,44	8	2.959,61	31	-	-
		2011	18	5.059,36	47	1.187,02	-	-	-	-	47	1.187,02	-
		Jumlah	117	124.062,42	280	72.189,24	135	32.564,68	55	34.159,86	90	5.464,69	-

**Halaman 11 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Kota Pematangsiantar	2005-2008	97	89.122,35	219	20.116,18	91	231,41	112	19.783,47	16	101,28	231,41
		2009	18	26.754,10	61	891,78	9	118,81	12	0,00	40	772,97	118,81
		2010	26	32.919,32	94	15.547,17	48	-	43	15.547,17	3	-	-
		2011	22	16.718,38	67	2.766,02	-	-	-	-	67	2.766,02	-
		Jumlah	163	165.514,16	441	39.321,17	148	350,23	167	35.330,65	126	3.640,29	350,23
52	Kota Sibolga	2005-2008	86	6.608,12	169	3.573,97	132	1.188,46	26	1.957,93	11	427,57	1.188,46
		2009	18	2.794,03	45	226,33	-	-	-	-	45	226,33	-
		2010	11	1.855,52	25	144,09	-	-	-	-	25	144,09	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	11.257,67	239	3.944,40	132	1.188,46	26	1.957,93	81	798,00	1.188,46
53	Kota Tanjungbalai	2005-2008	78	10.788,90	168	2.399,69	132	888,79	22	1.208,81	14	302,08	888,79
		2009	22	4.682,48	55	4.550,56	26	739,12	11	1.767,05	18	2.044,37	739,12
		2010	12	2.466,80	29	1.893,78	21	32,70	2	837,25	6	1.023,83	32,70
		2011	10	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-
		Jumlah	122	17.938,20	270	8.844,04	179	1.660,62	35	3.813,12	56	3.370,30	1.660,62
54	Kota Tebing Tinggi	2005-2008	70	44.636,45	158	1.994,20	34	489,11	26	756,26	98	748,81	436,99
		2009	17	10.904,38	38	260,20	10	10,27	20	159,93	8	90,00	-
		2010	16	9.897,32	48	3.809,42	-	-	5	2.506,03	43	1.303,39	-
		2011	5	2.360,54	16	886,74	-	-	-	-	16	886,74	-
		Jumlah	108	67.798,71	260	6.950,57	44	499,38	51	3.422,23	165	3.028,95	436,99
55	Prov. Sumatera Barat	2005-2008	168	349.663,96	375	24.161,47	273	5.868,16	90	17.004,95	12	1.288,36	5.868,16
		2009	22	32.203,55	73	31.452,50	50	31.430,42	22	22,07	1	-	31.430,42
		2010	109	9.494,65	266	5.128,43	215	2.853,69	49	2.274,74	2	-	2.853,69
		2011	32	22.763,48	96	7.517,06	1	35,69	4	6.469,96	91	1.011,39	35,69
		Jumlah	331	414.125,66	810	68.259,47	539	40.187,98	165	25.771,73	106	2.299,75	40.187,98

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	Kab. Agam	2005-2008	70	5.157,78	157	941,40	55	69,00	32	593,64	70	278,75	69,00
		2009	28	9.151,29	62	3.670,23	43	2.787,30	17	882,93	2	-	2.787,30
		2010	34	2.041,09	73	580,62	-	-	51	580,62	22	-	-
		2011	16	1.117,92	43	147,52	1	-	34	107,11	8	40,41	-
		Jumlah	148	17.468,10	335	5.339,78	99	2.856,30	134	2.164,30	102	319,17	2.856,30
57	Kab. Dharmasraya	2005-2008	68	5.132,21	155	3.659,93	17	255,07	88	2.881,22	50	523,63	255,07
		2009	43	12.811,15	129	4.686,77	30	226,67	63	3.812,33	36	647,75	226,67
		2010	38	697,21	110	777,65	9	223,68	10	486,97	91	66,99	223,68
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	149	18.640,58	394	9.124,36	56	705,43	161	7.180,53	177	1.238,38	705,43
58	Kab. Kepulauan Mentawai	2005-2008	50	2.416,88	119	822,10	64	284,63	23	133,10	32	404,36	284,63
		2009	27	9.428,61	81	4.121,60	49	211,63	16	1.307,64	16	2.602,32	211,63
		2010	27	3.264,17	64	2.825,77	2	40,00	58	2.785,77	4	-	40,00
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	104	15.109,67	264	7.769,48	115	536,26	97	4.226,52	52	3.006,68	536,26
59	Kab. Lima Puluh Kota	2005-2008	79	12.426,21	176	5.409,31	114	694,10	48	4.697,55	14	17,65	694,10
		2009	18	5.642,54	48	1.380,63	29	1.371,43	14	9,20	5	-	1.371,43
		2010	43	7.704,13	135	3.738,90	75	1.416,47	56	2.322,43	4	-	1.416,47
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	140	25.772,89	359	10.528,84	218	3.482,00	118	7.029,18	23	17,65	3.482,00
60	Kab. Padang Pariaman	2005-2008	63	104.872,12	116	44.241,86	87	30.885,45	25	13.356,40	4	-	30.885,45
		2009	35	1.486.208,35	74	4.033,55	48	93,59	21	3.587,00	5	352,96	93,59
		2010	20	12.328,32	60	508,93	8	151,14	42	357,78	10	-	151,14
		2011	21	10.587,60	58	4.455,10	-	-	-	-	58	4.455,10	-
		Jumlah	139	1.613.996,40	308	53.239,46	143	31.130,19	88	17.301,19	77	4.808,06	31.130,19

**Halaman 13 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	Kab. Pasaman	2005-2008	64	16.170,49	127	5.517,63	76	142,77	46	5.374,86	5	-	142,77
		2009	28	4.891,43	86	1.883,76	38	-	47	1.883,76	1	-	-
		2010	52	15.080,88	130	6.452,96	23	-	99	4.729,36	8	1.723,60	-
		2011	15	1.541,04	41	683,28	14	-	26	683,28	1	-	-
		Jumlah	159	37.683,86	384	14.537,66	151	142,77	218	12.671,28	15	1.723,60	142,77
62	Kab. Pasaman Barat	2005-2008	85	48.102,01	207	14.472,60	134	879,04	66	13.205,05	7	388,50	879,04
		2009	32	9.029,56	86	667,66	57	43,95	15	517,20	14	106,50	43,95
		2010	34	6.870,18	118	5.566,69	19	989,67	74	3.293,24	25	1.283,77	989,67
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	151	64.001,76	411	20.706,96	210	1.912,67	155	17.015,50	46	1.778,78	1.912,67
63	Kab. Pesisir Selatan	2005-2008	84	11.612,87	193	8.699,28	95	5.640,72	18	2.841,83	80	216,72	5.640,72
		2009	20	3.360,82	51	779,79	43	687,99	7	91,80	1	-	687,99
		2010	25	12.496,08	72	2.852,42	33	1.752,42	38	1.100,00	1	-	1.752,42
		2011	22	14.536,61	69	423,88	1	252,11	-	-	68	171,77	252,11
		Jumlah	151	42.006,40	385	12.755,39	172	8.333,25	63	4.033,64	150	388,49	8.333,25
64	Kab. Sijunjung	2005-2008	65	4.904,64	129	714,40	66	259,42	25	346,76	38	108,21	259,42
		2009	20	13.790,45	52	68,95	5	-	1	44,64	46	24,30	-
		2010	26	13.623,62	56	361,59	35	101,22	16	260,37	5	-	101,22
		2011	-	USD 924,18	-	USD 924,18	-	-	-	USD 924,18	-	-	-
		Jumlah	22	397,24	60	5,94	10	-	47	-	3	5,94	-
				USD 924,18		USD 924,18				USD 924,18			
		Jumlah	133	32.715,97	297	1.150,89	116	360,64	89	651,78	92	138,46	360,64
				USD 924,18		USD 924,18				USD 924,18			
65	Kab. Solok	2005-2008	44	5.341,16	111	2.918,71	93	1.364,95	18	1.553,76	-	-	1.364,95
		2009	16	12.519,33	42	9.973,01	29	5.417,34	13	4.555,66	-	-	5.417,34
		2010	32	10.399,52	102	4.615,11	69	608,13	32	4.006,98	1	-	608,13



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	24	4.517,19	61	1.531,81	6	1,80	54	1.530,01	1	-	1,80
		Jumlah	116	32.777,22	316	19.038,66	197	7.392,23	117	11.646,42	2	-	7.392,23
66	Kab. Solok Selatan	2005-2008	56	2.182,23	131	1.051,85	74	214,88	48	815,01	9	21,95	214,88
		2009	25	12.197,54	75	11.464,07	42	-	31	11.464,07	2	-	-
		2010	53	45.078,47	168	34.088,51	3	-	156	34.088,51	9	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	134	59.458,25	374	46.604,43	119	214,88	235	46.367,60	20	21,95	214,88
67	Kab. Tanah Datar	2005-2008	28	3.311,70	85	372,63	81	306,13	4	66,50	-	-	306,13
		2009	39	16.317,05	94	971,05	88	114,35	5	856,70	1	-	114,35
		2010	24	970,92	65	259,84	52	73,50	13	186,33	-	-	73,50
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	91	20.599,68	244	1.603,53	221	493,99	22	1.109,54	1	-	493,99
68	Kota Bukittinggi	2005-2008	59	12.773,01	116	589,78	85	110,26	26	479,51	5	-	110,26
		2009	24	717,28	66	-	35	-	27	-	4	-	-
		2010	60	8.597,65	164	7.527,65	85	26,10	77	7.501,54	2	-	26,10
		2011	15	980,43	27	-	1	-	23	-	3	-	-
		Jumlah	158	23.068,40	373	8.117,43	206	136,37	153	7.981,06	14	-	136,37
69	Kota Padang	2005-2008	97	16.011,13	251	9.199,51	210	4.045,37	27	5.108,90	14	45,23	4.045,37
		2009	47	75.535,57	123	6.288,12	104	6.149,58	19	138,53	-	-	6.149,58
		2010	39	392,09	123	392,09	106	223,70	16	168,39	1	-	223,70
		2011	19	53.525,51	61	768,25	-	-	-	-	61	768,25	-
		Jumlah	202	145.464,30	558	16.647,98	420	10.418,66	62	5.415,83	76	813,48	10.418,66
70	Kota Padang Panjang	2005-2008	21	1.316,61	59	850,36	59	850,36	-	-	-	-	850,36
		2009	20	5.403,57	46	231,98	45	231,98	1	-	-	-	231,98
		2010	44	6.137,53	112	1.586,72	69	353,34	35	1.233,38	8	-	353,34

Halaman 15 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	21	2.758,61	58	553,38	2	248,29	50	305,08	6	-	248,29
		Jumlah	106	15.616,34	275	3.222,45	175	1.683,99	86	1.538,46	14	-	1.683,99
71	Kota Pariaman	2005-2008	70	66.382,48	145	558,63	99	38,35	40	520,28	6	-	38,35
		2009	28	888,10	73	493,91	44	9,02	29	484,88	-	-	9,02
		2010	21	3.909,01	55	70,27	43	-	6	70,27	6	-	-
		2011	12	6.300,54	40	687,50	9	-	28	687,50	3	-	-
		Jumlah	131	77.480,13	313	1.810,33	195	47,37	103	1.762,95	15	-	47,37
72	Kota Payakumbuh	2005-2008	76	94.670,41	131	3.809,82	105	231,56	23	3.524,49	3	53,77	231,56
		2009	35	7.386,98	98	1.150,89	81	449,73	16	701,16	1	-	449,73
		2010	36	1.708,35	92	-	58	-	34	-	-	-	-
		2011	21	4.073,46	49	4.073,46	-	-	-	-	49	4.073,46	-
		Jumlah	168	107.839,22	370	9.034,18	244	681,29	73	4.225,65	53	4.127,23	681,29
73	Kota Sawahlunto	2005-2008	78	5.981,11	148	3.542,53	75	2.745,24	28	774,78	45	22,50	2.745,24
		2009	37	6.080,40	103	2.239,80	56	1.700,53	27	539,26	20	-	1.700,53
		2010	29	26.674,62	87	24.286,22	45	2.248,72	35	22.037,50	7	-	2.248,72
		2011	22	4.062,79	58	3.746,62	-	-	-	-	58	3.746,62	-
		Jumlah	166	42.798,94	396	33.815,18	176	6.694,50	90	23.351,55	130	3.769,12	6.694,50
74	Kota Solok	2005-2008	45	3.468,15	102	1.715,65	84	1.266,35	16	449,30	2	-	1.266,35
		2009	39	13.543,99	100	2.786,54	81	1.364,02	15	1.422,52	4	-	1.364,02
		2010	32	3.404,50	67	516,76	28	322,58	38	194,18	1	-	322,58
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	116	20.416,66	269	5.018,97	193	2.952,96	69	2.066,01	7	-	2.952,96
75	Prov. Riau	2005-2008	255	702.755,04	527	515.676,97	378	483.915,02	112	30.323,92	37	1.438,02	480.009,17
		2009	85	99.161,80	323	99.175,38	215	53.902,04	106	45.273,34	2	-	53.902,04
		2010	80	198.170,60	185	110.303,61	56	61.370,27	41	43.024,13	88	5.909,19	61.370,27

Halaman 16 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	35	33.050,32	69	21.097,07	27	2.480,98	41	18.616,08	1	-	2.480,98
		Jumlah	455	1.033.137,77	1.104	746.253,04	676	601.668,33	300	137.237,48	128	7.347,22	597.762,48
76	Kab. Bengkalis	2005-2008	129	112.074,27	317	79.664,32	161	14.617,54	98	29.639,39	58	35.407,38	14.617,54
		2009	77	51.962,28	214	60.850,10	67	756,62	140	60.093,48	7	-	756,62
		2010	52	30.880,52	134	26.338,76	43	-	44	13.039,83	47	13.298,93	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	258	194.917,07	665	166.853,18	271	15.374,16	282	102.772,70	112	48.706,31	15.374,16
77	Kab. Indragiri Hilir	2005-2008	105	36.357,76	203	21.511,01	126	5.341,94	43	16.003,73	34	165,34	5.496,11
		2009	37	2.663,53	97	20.071,26	56	6.689,82	41	13.381,43	-	-	6.689,82
		2010	40	11.102,98	86	20.813,10	29	2.605,00	24	11.540,75	33	6.667,35	2.605,00
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	182	50.124,28	386	62.395,37	211	14.636,76	108	40.925,91	67	6.832,69	14.790,94
78	Kab. Indragiri Hulu	2005-2008	66	74.624,97	190	65.750,80	145	39.872,91	18	23.183,28	27	2.694,60	39.801,41
		2009	41	177.693,82	116	5.761,43	89	1.859,69	18	3.901,73	9	-	1.859,69
		2010	31	183.144,95	82	182.687,96	47	-	9	181.814	26	873,66	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	138	435.463,74	388	254.200,20	281	41.732,61	45	208.899,32	62	3.568,26	41.661,11
79	Kab. Kampar	2005-2008	79	33.254,65	196	7.049,81	146	3.175,29	24	3.491,89	26	382,62	3.175,29
		2009	46	13.263,82	140	9.455,10	93	4.004,09	38	4.173,32	9	1.277,69	4.004,09
		2010	21	7.713,82	57	6.509,73	-	475,69	2	900,05	55	5.133,99	475,69
		2011	32	3.291,10	102	3.374,05	3	647,82	3	655,56	96	2.070,66	647,82
		Jumlah	178	57.523,40	495	26.388,71	242	8.302,90	67	9.220,84	186	8.864,96	8.302,90
80	Kab. Kuantan Singingi	2005-2008	102	27.589,43	215	10.448,10	185	6.139,26	26	3.019,36	4	1.289,47	6.139,26
		2009	32	13.007,76	90	11.497,05	71	8.704,18	18	2.792,87	1	-	8.704,18
		2010	32	2.566,00	83	3.787,65	55	2.151,69	22	1.635,96	6	-	2.151,69

**Halaman 17 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	41	53.643,56	92	8.095,99	4	72,60	5	4.728,45	83	3.294,93	72,60
		Jumlah	207	96.806,76	480	33.828,80	315	17.067,73	71	12.176,66	94	4.584,40	-
				USD 41,67		USD 41,67		USD 41,67		USD 41,67			17.067,73
				USD 41,67		USD 41,67		USD 41,67		USD 41,67			
81	Kab. Kepulauan Meranti	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	3.641,32	32	242,93	23	30,35	4	185,67	5	26,90	30,35
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	3.641,32	32	242,93	23	30,35	4	185,67	5	26,90	30,35
82	Kab. Pelalawan	2005-2008	94	15.869,53	234	12.037,17	178	1.694,86	42	10.307,99	14	34,31	1.694,86
		2009	47	31.597,28	194	37.980,25	71	155,69	101	35.650,09	22	2.174,47	155,69
		2010	23	6.472,02	69	3.676,09	28	649,45	21	3.026,64	20	-	615,99
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	164	53.938,84	497	53.693,53	277	2.500,01	164	48.984,73	56	2.208,78	2.466,55
83	Kab. Rokan Hilir	2005-2008	87	42.086,95	201	19.970,42	117	3.205,55	46	16.754,66	38	10,20	3.205,55
		2009	40	32.911,48	127	20.346,14	44	939,89	52	285,42	31	19.120,82	939,89
		2010	24	5.664,68	63	4.105,39	17	927,16	23	475,38	23	2.702,85	927,16
		2011	10	3.207,36	35	3.207,36	-	-	-	-	35	3.207,36	-
		Jumlah	161	83.870,48	426	47.629,32	178	5.072,61	121	17.515,47	127	25.041,23	5.072,61
84	Kab. Rokan Hulu	2005-2008	96	27.667,95	194	20.488,87	131	14.171,79	39	4.627,06	24	1.690,01	14.171,79
		2009	35	9.687,10	103	9.687,10	74	450,61	15	8.061,76	14	1.174,72	450,61
		2010	16	8.930,46	43	8.930,46	20	299,12	23	8.631,33	-	-	299,12
		2011	14	3.012,82	23	1.891,76	1	315,00	-	-	22	1.576,76	315,00
		Jumlah	161	49.298,34	363	40.998,20	226	15.236,54	77	21.320,16	60	4.441,49	15.236,54

**Halaman 18 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	Kab. Siak	2005-2008	72	37.006,05	162	26.464,56	145	24.331,37	14	2.133,18	3	-	24.331,37
		2009	69	73.415,97	194	30.893,13	151	20.537,35	36	10.355,78	7	-	20.537,35
		2010	42	57.028,43	120	14.780,74	66	4.797,45	43	9.983,28	11	-	4.797,45
		2011	22	858.694,19	41	2.617	-	-	-	-	41	2.616,92	-
		Jumlah	205	1.026.144,66	517	74.755,37	362	49.666,18	93	22.472,26	62	2.616,92	49.666,18
86	Kota Dumai	2005-2008	104	23.751,95	218	10.715,57	187	5.100,17	29	5.500,38	2	115,01	5.100,17
		2009	38	30.312,84	98	28.611,42	46	740,87	36	13.820,80	16	14.049,74	740,87
		2010	36	4.094,83	96	4.634,61	27	729,53	27	739,79	42	3.165,28	729,53
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	178	58.159,63	412	43.961,61	260	6.570,58	92	20.060,98	60	17.330,04	6.570,58
87	Kota Pekanbaru	2005-2008	80	9.623,36	171	6.164,62	129	4.016,87	38	1.931,82	4	215,92	4.016,87
		2009	51	22.483,88	109	8.852,31	74	1.123,09	31	6.672,96	4	1.056,24	1.123,09
		2010	27	15.413,94	61	5.958,29	30	1.886,01	18	4.072,27	13	-	1.886,01
		2011	23	12.346,74	46	2.832,72	4	-	8	-	34	2.832,72	-
		Jumlah	181	59.867,93	387	23.807,96	237	7.025,99	95	12.677,07	55	4.104,89	7.025,99
88	Prov. Jambi	2005-2008	220	108.855,84	492	47.554,45	452	44.346,73	40	3.207,72	-	-	47.554,45
		2009	40	7.627,40	101	7.627,40	98	6.250,22	3	1.377,18	-	-	7.627,40
		2010	55	55.955,33	127	4.366,78	103	3.152,23	19	1.172,59	5	41,96	4.324,82
		2011	25	7.093,08	62	3.727,30	-	-	-	-	62	3.727,30	-
		Jumlah	340	179.531,66	782	63.275,95	653	53.749,18	62	5.757,49	67	3.769,26	59.506,68
89	Kab. Batang Hari	2005-2008	106	63.958,62	203	30.998,02	166	26.006,19	34	4.951,82	3	-	30.998,02
		2009	30	32.756,52	96	5.452,14	64	705,25	31	4.701,40	1	45,48	5.406,65
		2010	31	7.871,84	78	6.883,84	43	275,16	30	2.465,26	5	4.143,41	2.740,42
		2011	19	119,53	36	119,53	-	-	-	-	36	119,53	-
		Jumlah	186	104.706,52	413	43.453,54	273	26.986,61	95	12.158,49	45	4.308,43	39.145,11

**Halaman 19 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	Kab. Bungo	2005-2008	103	19.449,31	250	10.804,02	209	5.505,00	41	5.299,01	-	-	10.804,02
		2009	58	34.523,00	139	33.374,30	95	1.474,78	44	31.899,52	-	-	33.374,30
		2010	48	16.037,12	102	20.599,12	39	410,82	44	11.635,19	19	8.553,10	12.046,02
		2011	17	72.972,42	33	3.675,14	-	-	-	-	33	3.675,14	-
		Jumlah	226	142.981,86	524	68.452,59	343	7.390,60	129	48.833,73	52	12.228,25	56.224,34
91	Kab. Kerinci	2005-2008	65	15.650,62	145	12.763,41	111	8.383,09	30	4.380,32	4	-	12.763,41
		2009	45	96.504,91	102	19.361,02	67	9.315,16	35	10.045,86	-	-	19.361,02
		2010	44	876.415,40	85	9.357,48	28	3.959,69	12	4.701,30	45	696,48	8.661,00
		2011	22	29.449,24	58	1.753,99	-	-	-	-	58	1.753,99	-
		Jumlah	176	1.018.020,19	390	43.235,92	206	21.657,96	77	19.127,48	107	2.450,47	40.785,45
92	Kab. Merangin	2005-2008	75	19.986,04	179	15.701,29	134	6.829,76	44	8.871,53	1	-	15.701,29
		2009	33	97.614,74	98	97.614,74	47	4.457,22	49	93.140,75	2	16,76	97.597,97
		2010	21	949.907,96	45	949.907,96	12	1.890,82	22	898.034,00	11	49.983,13	899.924,83
		2011	22	-	58	1.666,08	-	-	-	-	58	1.666,08	-
		Jumlah	151	1.067.508,75	380	1.064.890,09	193	13.177,81	115	1.000.046,29	72	51.665,98	1.013.224,10
93	Kab. Muaro Jambi	2005-2008	166	67.407,97	348	50.545,31	248	6.164,20	98	44.381,10	2	-	50.545,31
		2009	42	4.194,15	113	3.792,58	75	228,96	38	3.563,62	-	-	3.792,58
		2010	25	1.352,10	60	820,41	18	124,85	32	695,56	10	-	820,41
		2011	22	-	47	6.439,04	-	-	-	-	47	6.439,04	-
		Jumlah	255	72.954,24	568	61.597,36	341	6.518,02	168	48.640,29	59	6.439,04	55.158,31
94	Kab. Sarolangun	2005-2008	89	25.570,18	203	22.038,20	135	11.597,94	58	6.431,99	10	4.008,25	18.029,94
		2009	38	700.427,29	100	700.427,29	62	666.995,64	33	28.142,44	5	5.289,21	695.138,08
		2010	39	132.782,97	67	123.192,68	12	4.030,00	40	117.725,79	15	1.436,89	121.755,79
		2011	19	-	39	1.789,42	-	-	-	-	39	1.789,42	-
		Jumlah	185	858.780,46	409	847.447,61	209	682.623,58	131	152.300,23	69	12.523,79	834.923,82

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	2005-2008	84	23.119,45	188	16.119,99	135	9.773,35	45	6.346,64	8	-	16.119,99
		2009	31	47.360,83	113	47.360,83	63	2.094,51	47	9.042,64	3	36.223,66	11.137,16
		2010	30	1.777,90	66	36.793,03	33	491,88	11	1.250,22	22	35.050,92	1.742,10
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	72.258,18	367	100.273,86	231	12.359,74	103	16.639,51	33	71.274,59	28.999,26
96	Kab. Tanjung Jabung Barat	2005-2008	79	26.242,60	197	26.242,62	160	11.808,88	37	14.433,73	-	-	26.242,62
		2009	29	3.951,20	85	3.951,20	67	976,31	18	2.974,88	-	-	3.951,20
		2010	33	949,72	58	949,72	33	579,51	25	370,21	-	-	949,72
		2011	15	-	14	280,87	-	-	-	-	14	280,87	-
		Jumlah	156	31.143,53	354	31.424,43	260	13.364,72	80	17.778,83	14	280,87	31.143,55
97	Kab. Tebo	2005-2008	81	49.476,97	202	19.242,03	137	8.708,65	58	10.533,38	7	-	19.242,03
		2009	43	143.065,43	108	143.065,43	64	6.785,55	40	124.832,36	4	11.447,51	131.617,91
		2010	33	167.057,81	69	167.057,81	-	77,28	35	164.099,91	34	2.880,62	164.177,19
		2011	20	-	51	2.443,76	-	-	-	-	51	2.443,76	-
		Jumlah	177	359.600,22	430	331.809,05	201	15.571,48	133	299.465,66	96	16.771,90	315.037,15
98	Kota Jambi	2005-2008	115	16.061,33	223	9.940,95	212	9.621,35	11	319,60	-	-	9.940,95
		2009	56	8.304,05	125	7.628,75	112	3.260,26	13	490,38	-	-	3.750,64
		2010	57	6.490,63	131	6.490,63	79	28,47	36	1.157,12	16	5.305,04	1.185,59
		2011	17	-	44	126,37	-	-	-	-	44	126,37	-
		Jumlah	245	30.856,03	523	24.186,72	403	12.910,08	60	1.967,11	60	9.309,52	14.877,20
99	Kota Sungai Penuh	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	4.361,75	27	4.361,75	21	1.200,82	6	3.160,93	-	-	4.361,75
		2011	12	2.526,30	42	1.396,29	-	-	-	-	42	1.396,29	-
		Jumlah	27	6.888,06	69	5.758,04	21	1.200,82	6	3.160,93	42	1.396,29	4.361,75

Halaman 21 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan				
			Temuan			Rekomendasi							
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Prov. Sumatera Selatan	2005-2008	194	427.986,77	398	354.222,99	297	317.613,26	85	36.193,25	16	416,48	16.893,81
		2009	40	36.777,34	92	9.399,26	62	55,62	29	9.343,64	1	-	55,62
		2010	35	10.232,41	81	10.202,72	54	753,71	27	9.449,01	-	-	753,71
		2011	30	5.208,10	81	5.208,10	33	-	47	5.208,10	1	-	-
		Jumlah	299	480.204,64	652	379.033,08	446	318.422,59	188	60.194,01	18	416,48	17.703,14
101	Kab. Banyuasin	2005-2008	105	23.063,82	228	24.072,77	198	16.041,84	26	8.030,92	4	-	5.184,76
		2009	29	5.365,21	74	5.365,21	63	1.307,17	11	4.058,04	-	-	1.307,17
		2010	23	3.300,06	60	758,01	56	520,45	4	237,56	-	-	3.062,46
		2011	17	1.033,39	46	1.033,39	30	-	15	1.033,39	1	-	-
		Jumlah	174	32.762,50	408	31.229,40	347	17.869,47	56	13.359,93	5	-	9.554,41
102	Kab. Empat Lawang	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	28	4.536,20	76	4.142,80	63	742,36	13	3.400,43	-	-	780,60
		2010	25	7.653,03	69	3.629,55	35	398,22	32	3.231,32	2	-	398,22
		2011	16	3.829,79	43	2.963,42	9	-	24	2.963,42	10	-	80,38
		Jumlah	69	16.019,03	188	10.735,77	107	1.140,59	69	9.595,18	12	-	1.259,21
103	Kab. Lahat	2005-2008	80	20.551,67	155	13.703,76	118	2.943,39	33	10.760,36	4	-	2.943,39
		2009	31	4.612,18	76	1.438,57	58	550,40	18	888,17	-	-	550,40
		2010	34	3.652,63	90	3.353,62	53	133,03	37	3.220,58	-	-	152,53
		2011	23	531,28	54	406,73	29	138,87	22	267,85	3	-	144,67
		Jumlah	168	29.347,78	375	18.902,70	258	3.765,71	110	15.136,99	7	-	3.791,00
104	Kab. Muara Enim	2005-2008	77	39.891,27	142	13.477,31	88	2.622,12	29	9.149,96	25	1.705,22	2.622,12
		2009	47	9.641,07	82	9.677,04	55	418,81	27	9.258,22	-	-	418,81
		2010	38	4.472,90	88	1.088,76	53	736,18	34	310,59	1	41,98	1.534,65
		2011	14	-	34	-	26	-	3	-	5	-	-
		Jumlah	176	54.005,25	346	24.243,11	222	3.777,13	93	18.718,77	31	1.747,20	4.575,59
				USD 2,83		USD 2,83		USD 2,83		USD 2,83		-	-



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	Kab. Musi Banyuasin	2005-2008	135	87.897,10	282	31.957,88	228	12.092,16	53	19.865,71	1	-	4.804,91
		2009	42	5.107,48	99	26.152,70	83	10.160,47	16	15.992,22	-	-	10.160,47
		2010	35	433,85	60	433,97	35	163,03	6	270,93	19	-	163,03
		2011	23	208.067,78	61	1.300,67	38	11,65	23	1.289,02	-	-	67,44
		Jumlah	235	301.506,22	502	59.845,24	384	22.427,33	98	37.417,90	20	-	15.195,87
106	Kab. Musi Rawas	2005-2008	124	177.811,23	257	25.178,57	243	20.893,76	14	4.284,80	-	-	15.695,41
		2009	33	2.990,54	69	1.659,14	66	1.510,19	3	148,95	-	-	1.374,66
		2010	24	16.722,61	44	1.039,22	44	1.039,22	-	-	-	-	-
		2011	21	3.926,39	52	868,16	-	-	-	-	52	868,16	22,20
		Jumlah	202	201.450,78	422	28.745,10	353	23.443,18	17	4.433,75	52	868,16	17.092,27
107	Kab. Ogan Ilir	2005-2008	65	7.078,76	118	2.962,52	110	2.092,35	8	870,17	-	-	1.585,95
		2009	32	220,78	32	220,78	26	65,56	5	103,77	1	51,44	65,56
		2010	23	33.557,34	58	3.700,50	44	1.061,77	14	2.638,73	-	-	1.061,77
		2011	38	3.400,57	83	3.400,57	22	-	32	3.323,23	29	77,34	-
		Jumlah	158	44.257,47	291	10.284,39	202	3.219,68	59	6.935,92	30	128,78	2.713,29
108	Kab. Ogan Komering Ilir	2005-2008	48	11.857,47	101	9.353,69	88	5.591,09	13	3.762,60	-	-	5.591,09
		2009	17	159,75	38	159,75	38	159,75	-	-	-	-	159,75
		2010	20	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-
		2011	17	1.338,91	44	1.338,91	22	-	22	-	-	-	1.338,91
		Jumlah	102	13.356,14	231	10.852,36	196	5.750,84	35	3.762,60	-	-	5.750,84
109	Kab. Ogan Komering Ulu	2005-2008	76	26.210,80	137	14.351,38	122	13.085,12	15	1.266,26	-	-	770,33
		2009	60	9.175,03	136	2.631,75	100	1.400,85	35	1.230,89	1	-	1.400,85
		2010	41	7.474,41	94	7.474,41	60	840,84	33	6.633,57	1	-	840,84
		2011	20	452,48	55	470,17	34	-	19	461,79	2	8,38	2.345,49
		Jumlah	197	43.312,73	422	24.927,72	316	15.326,82	102	9.592,52	4	8,38	5.357,53

**Halaman 23 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
110	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2005-2008	99	21.111,76	223	10.069,61	158	5.512,38	60	4.557,22	5	-	7.057,67		
		2009	30	24.433,66	72	3.432,13	48	2.097,43	17	1.230,97	7	103,72	2.018,93		
		2010	19	1.037,74	56	496,04	32	24,59	4	195,92	20	275,52	24,59		
		2011	16	575,83	39	322,55	-	-	-	-	39	322,55	-		
		Jumlah	164	47.159,00	390	14.320,34	238	7.634,41	81	5.984,12	71	701,80	9.101,20		
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2005-2008	84	31.375,40	179	10.340,54	176	10.265,68	3	74,85	-	-	6.706,91		
		2009	15	468,06	40	468,06	38	468,06	2	-	-	-	468,06		
		2010	26	93.778,37	70	2.042,05	68	1.991,72	2	50,33	-	-	1.744,53		
		2011	19	1.430,63	47	593,15	42	576,48	5	16,67	-	-	576,48		
		Jumlah	144	127.052,49	336	13.443,82	324	13.301,96	12	141,85	-	-	9.496,00		
112	Kota Lubuklinggau	2005-2008	72	57.194,90	138	15.643,66	108	13.712,60	21	1.922,50	9	8,56	12.970,44		
		2009	28	23.133,25	57	139,93	53	69,65	4	70,27	-	-	69,65		
		2010	18	299,69	49	296,73	47	296,73	2	-	-	-	296,73		
		2011	18	875,49	42	302,02	-	-	-	-	42	302,02	-		
		Jumlah	136	81.503,35	286	16.382,37	208	14.078,99	27	1.992,78	51	310,58	13.336,84		
113	Kota Pagar Alam	2005-2008	78	589.098,59	142	572.031,77	122	564.856,25	18	7.175,52	2	-	3.001,85		
		2009	36	15.867,30	73	14.124,80	64	12.317,83	9	1.806,97	-	-	205,31		
		2010	17	1.931,45	40	2.027,41	24	7,85	15	2.019,55	1	-	14,57		
		2011	34	2.748,77	86	101,43	-	-	-	-	86	101,43	2.260,64		
		Jumlah	165	609.646,12	341	588.285,42	210	577.181,93	42	11.002,05	89	101,43	5.482,39		
114	Kota Palembang	2005-2008	132	97.973,38	302	42.776,50	210	27.021,02	80	15.755,48	12	-	4.700,79		
		2009	52	78.307,49	102	8.845,64	59	83,00	33	8.762,64	10	-	83,00		
		2010	26	108.601,73	51	26,97	34	5,00	17	21,97	-	-	5,00		
		2011	18	14.156,61	47	1.398,98	-	7,51	1	73,64	46	1.317,82	7,51		
		Jumlah	228	299.039,24	502	53.048,11	303	27.116,54	131	24.613,75	68	1.317,82	4.796,31		

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		14
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	Kota Prabumulih	2005-2008	84	57.438,77	172	21.013,80	134	11.041,25	33	9.827,46	5	145,08	4.717,99
		2009	26	10.441,94	73	2.314,10	64	456,59	9	1.857,51	-	-	456,59
		2010	23	4.782,12	55	4.211,48	42	3.412,91	12	798,56	1	-	3.412,91
		2011	16	254,08	38	76,81	-	-	-	-	38	76,81	54,69
		Jumlah	149	72.916,93	338	27.616,21	240	14.910,76	54	12.483,54	44	221,89	8.642,20
116	Prov. Bengkulu	2005-2008	192	93.815,24	382	71.714,64	345	39.108,91	32	31.065,18	5	1.540,54	39.064,38
		2009	73	52.585,25	139	30.863,85	81	20.757,57	56	10.004,68	2	101,60	7.380,99
		2010	50	112.720,13	87	90.170,24	32	18.588,22	39	71.390,81	16	191,20	1.012,91
		2011	15	5.218,43	27	4.408,69	2	36,69	-	-	25	4.372,00	36,69
		Jumlah	330	264.339,05	635	197.157,44	460	78.491,41	127	112.460,67	48	6.205,35	47.494,99
117	Kab. Bengkulu Selatan	2005-2008	65	11.956,16	148	5.102,31	137	3.640,29	11	1.462,01	-	-	3.640,29
		2009	45	2.353,18	77	1.826,89	45	745,69	15	1.081,19	17	-	745,69
		2010	20	4.301,27	36	2.162,44	14	1.476,43	9	308,18	13	377,82	657,31
		2011	10	66,65	21	66,65	-	-	-	-	21	66,65	-
		Jumlah	140	18.677,28	282	9.158,31	196	5.862,43	35	2.851,39	51	444,48	5.043,31
118	Kab. Bengkulu Tengah	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	36,10	21	36,10	11	36,10	7	-	3	36,10	36,10
		2011	9	196,44	13	170,73	-	-	-	-	13	170,73	-
		Jumlah	21	232,55	34	206,83	11	36,10	7	-	16	170,73	36,10
119	Kab. Bengkulu Utara	2005-2008	96	33.265,87	215	8.694,42	197	8.441,91	11	252,51	7	-	8.441,91
		2009	27	146.621,89	50	3.413,77	25	548,19	21	2.389,84	4	475,72	548,19
		2010	39	7.080,96	91	1.995,65	6	29,20	72	29,20	13	1.966,45	623,91
		2011	19	11.384,46	29	6.176,89	-	-	-	-	29	6.176,89	-
		Jumlah	181	198.353,19	385	20.280,74	228	8.990,11	104	2.671,56	53	8.619,07	9.614,02

Halaman 25 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	Kab. Kaur	2005-2008	47	4.079,89	91	2.434,04	84	1.734,32	7	699,72	-	-	1.734,32
		2009	13	879,51	25	879,51	20	374,52	5	504,98	-	-	374,52
		2010	8	1.122,97	17	1.122,97	6	471,86	11	651,11	-	-	471,86
		2011	7	43,57	10	43,57	-	-	-	-	10	43,57	-
		Jumlah	75	6.125,95	143	4.480,11	110	2.580,71	23	1.855,82	10	43,57	2.580,71
121	Kab. Kepahiang	2005-2008	72	4.010,16	149	1.201,58	137	863,83	7	170,05	5	167,70	863,83
		2009	23	13.832,84	49	3.443,82	35	3.132,43	13	311,39	1	-	3.132,43
		2010	21	6.055,04	38	6.003,30	18	1.821,57	20	4.181,72	-	-	400,78
		2011	13	6.753,03	27	6.753,03	-	-	-	-	27	6.753,03	-
		Jumlah	129	30.651,08	263	17.401,74	190	5.817,83	40	4.663,17	33	6.920,73	4.397,04
122	Kab. Lebong	2005-2008	57	16.285,06	142	7.082,62	108	2.012,89	33	5.047,51	1	22,22	2.012,89
		2009	18	17.333,33	26	14.041,61	4	133,44	15	13.621,94	7	286,22	133,44
		2010	21	9.337,92	36	1.868,93	9	277,52	27	1.591,41	-	-	277,52
		2011	14	1.025,77	32	1.025,77	-	-	-	-	32	1.025,77	-
		Jumlah	110	43.982,10	236	24.018,94	121	2.423,85	75	20.260,86	40	1.334,21	2.423,85
123	Kab. Mukomuko	2005-2008	51	11.317,83	115	6.882,03	103	796,08	6	3.106,68	6	2.979,27	796,08
		2009	30	2.014,50	57	685,13	10	367,71	2	317,41	45	-	49,26
		2010	13	702,35	25	702,35	11	317,97	14	384,37	-	-	313,02
		2011	15	723,84	32	723,84	-	-	-	-	32	723,84	-
		Jumlah	109	14.758,52	229	8.993,35	124	1.481,77	22	3.808,47	83	3.703,11	1.158,37
124	Kab. Rejang Lebong	2005-2008	85	37.483,88	165	6.882,41	142	2.674,06	18	4.065,74	5	142,60	2.674,06
		2009	39	204.353,90	70	1.367,67	27	16,00	39	568,32	4	783,35	3,25
		2010	29	522.953,59	56	557,33	20	349,26	13	208,07	23	-	349,26
		2011	16	2.621,74	28	254,93	-	-	-	-	28	254,93	-
		Jumlah	169	767.413,13	319	9.062,35	189	3.039,33	70	4.842,13	60	1.180,88	3.026,58

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	Kab. Seluma	2005-2008	41	26.247,44	86	13.734,78	75	6.322,06	6	4.371,97	5	3.040,74	6.322,06
		2009	20	6.711,08	35	2.317,62	19	921,98	16	1.395,63	-	-	536,87
		2010	13	6.555,14	23	172,13	-	-	-	-	23	172,13	-
		2011	12	7.646,35	19	273,91	-	-	-	-	19	273,91	-
		Jumlah	86	47.160,04	163	16.498,46	94	7.244,05	22	5.767,60	47	3.486,80	6.858,93
126	Kota Bengkulu	2005-2008	89	51.865,56	176	26.194,46	156	22.581,30	11	2.191,10	9	1.422,05	22.581,30
		2009	103	3.681,14	185	2.931,14	74	2.856,18	33	13,73	78	61,22	2.856,18
		2010	15	1.881,06	31	1.239,85	8	939,85	16	-	7	300,00	-
		2011	13	1.755,28	21	1.256,23	-	-	-	-	21	1.256,23	-
		Jumlah	220	59.183,05	413	31.621,71	238	26.377,35	60	2.204,84	115	3.039,51	25.437,49
127	Prov. Lampung	2005-2008	98	31.227,73	162	24.981,98	74	2.149,47	17	5.127,41	71	17.705,10	2.149,47
		2009	44	225.287,99	103	52.326,27	50	485,42	28	42.239,16	25	9.601,68	485,42
		2010	43	10.656,66	114	6.033,33	-	-	-	-	114	6.033,33	-
		2011	21	7.319,44	43	4.507,97	-	-	-	-	43	4.507,97	-
		Jumlah	206	274.491,84	422	87.849,58	124	2.634,89	45	47.366,58	253	37.848,10	2.634,89
128	Kab. Lampung Barat	2005-2008	77	26.089,26	163	9.175,94	120	3.786,10	19	3.960,64	24	1.429,20	3.786,10
		2009	17	29.582,22	35	29.582,22	-	-	-	-	35	29.582,22	-
		2010	16	1.086,33	38	261,77	-	-	-	-	38	261,77	-
		2011	13	18.473,59	35	142,53	1	142,53	-	-	34	-	142,53
		Jumlah	123	75.231,41	271	39.162,48	121	3.928,63	19	3.960,64	131	31.273,19	3.928,63
129	Kab. Lampung Selatan	2005-2008	72	33.618,95	155	9.140,09	123	6.483,65	20	1.155,01	12	1.501,42	6.483,65
		2009	18	3.181,44	45	697,42	-	274,68	-	-	45	422,74	274,68
		2010	24	2.969,75	56	2.628,75	44	1.888,04	10	740,70	2	-	1.888,04
		2011	15	8.455,52	47	671,99	-	-	-	-	47	671,99	-
		Jumlah	129	48.225,68	303	13.138,25	167	8.646,38	30	1.895,72	106	2.596,15	8.646,38

**Halaman 27 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	Kab. Lampung Tengah	2005-2008	91	145.735,23	194	4.990,62	122	2.946,02	10	1.704,35	62	340,24	2.946,02
		2009	21	7.442,31	60	6.436,42	50	1.363,26	9	5.051,54	1	21,62	1.363,26
		2010	20	2.311,37	69	954,66	37	89,07	6	473,24	26	392,34	89,07
		2011	13	29.981,32	44	28.803,40	-	-	-	-	44	28.803,40	-
		Jumlah	145	185.470,24	367	41.185,13	209	4.398,35	25	7.229,14	133	29.557,62	4.398,35
131	Kab. Lampung Timur	2005-2008	85	34.756,65	151	14.406,49	83	10.505,55	32	3.630,68	36	270,26	10.505,55
		2009	23	5.241,40	53	5.241,40	29	-	20	5.227,66	4	13,74	-
		2010	22	3.207,71	60	2.058,48	17	137,87	3	615,02	40	1.305,59	137,87
		2011	15	134.720,65	52	112.418,73	-	-	-	-	52	112.418,73	-
		Jumlah	145	177.926,44	316	134.125,12	129	10.643,42	55	9.473,36	132	114.008,33	10.643,42
132	Kab. Lampung Utara	2005-2008	78	51.120,30	162	17.197,29	105	11.816,07	28	4.440,02	29	941,20	11.816,07
		2009	24	10.381,12	51	5.204,10	-	394,99	-	-	51	4.809,10	394,99
		2010	38	6.740,65	101	4.468,06	-	-	-	-	101	4.468,06	-
		2011	18	1.925,86	53	1.267,36	-	-	-	-	53	1.267,36	-
		Jumlah	158	70.167,95	367	28.136,82	105	12.211,06	28	4.440,02	234	11.485,73	12.211,06
133	Kab. Mesuji	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	1.354,83	42	578,96	-	-	-	-	42	578,96	-
		Jumlah	16	1.354,83	42	578,96	-	-	-	-	42	578,96	-
134	Kab. Pesawaran	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	4	623,96	11	623,96	7	68,06	2	444,64	2	111,26	68,06
		2010	20	1.707,86	58	688,03	-	7,04	1	32,19	57	648,79	7,04
		2011	16	11.211,65	42	322,12	-	-	-	-	42	322,12	-
		Jumlah	40	13.543,47	111	1.634,12	7	75,10	3	476,83	101	1.082,18	75,10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	Kab. Pringsewu	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	14	1.141,08	48	388,97	-	-	-	-	48	388,97	-
		Jumlah	14	1.141,08	48	388,97	-	-	-	-	48	388,97	-
136	Kab. Tanggamus	2005-2008	54	338.373,28	117	11.144,75	36	1.127,97	16	1.505,90	65	8.510,87	1.127,97
		2009	23	9.831,90	60	7.687,63	22	6.829,54	6	532,93	32	325,15	6.829,54
		2010	21	5.369,06	69	2.424,86	41	343,04	7	2.065,10	21	16,71	343,04
		2011	3	164,81	29	164,81	-	-	-	-	29	164,81	-
		Jumlah	101	353.739,06	275	21.422,06	99	8.300,56	29	4.103,95	147	9.017,55	8.300,56
137	Kab. Tulang Bawang	2005-2008	80	64.369,10	155	18.087,92	100	6.812,45	31	10.192,51	24	1.082,95	5.057,45
		2009	26	47.628,49	56	2.819,47	25	14,95	20	2.631,47	11	173,05	1.071,62
		2010	31	5.974,91	95	5.902,81	1	-	27	501,13	67	5.401,67	-
		2011	9	57,05	22	57,05	-	-	-	-	22	57,05	-
		Jumlah	146	118.029,57	328	26.867,27	126	6.827,40	78	13.325,12	124	6.714,74	6.129,07
138	Kab. Tulang Bawang Barat	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	7.462,30	41	7.462,30	-	-	-	-	41	7.462,30	-
		Jumlah	13	7.462,30	41	7.462,30	-	-	-	-	41	7.462,30	-
139	Kab. Way Kanan	2005-2008	65	20.665,25	136	9.422,83	49	2.030,95	29	2.485,33	58	4.906,54	2.704,92
		2009	22	4.244,32	68	2.939,90	-	-	-	-	68	2.939,90	-
		2010	21	1.276,65	57	1.276,65	-	-	-	-	57	1.276,65	-
		2011	16	9.447,09	43	3.178,61	-	-	-	-	43	3.178,61	-
		Jumlah	124	35.633,32	304	16.817,99	49	2.030,95	29	2.485,33	226	12.301,71	2.704,92

Halaman 29 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		14		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
140	Kota Bandar Lampung	2005-2008	106	25.772,37	209	16.851,42	115	9.291,10	32	5.399,96	62	2.160,36	9.291,10		
		2009	16	14.083,97	41	1.091,74	20	1.091,05	1	0,69	20	-	1.091,05		
		2010	37	21.296,59	104	5.480,57	37	1.285,85	6	1.849,13	61	2.345,57	1.285,85		
		2011	15	16.476,76	41	20,93	-	-	-	-	41	20,93	20,93		
		Jumlah	174	77.629,70	395	23.444,67	172	11.668,00	39	7.249,78	184	4.526,88	11.688,94		
141	Kota Metro	2005-2008	84	13.781,85	161	4.872,70	73	1.155,00	24	1.797,34	64	1.920,35	1.155,00		
		2009	13	2.927,82	27	291,54	-	-	-	-	27	291,54	-		
		2010	22	2.367,08	62	666,31	34	92,73	13	537,47	15	36,09	92,73		
		2011	9	4.706,89	25	-	-	-	-	-	25	-	-		
		Jumlah	128	23.783,66	275	5.830,56	107	1.247,74	37	2.334,82	131	2.247,99	1.247,74		
142	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	2005-2008	108	75.032,41	196	34.010,78	180	33.153,19	16	857,59	-	-	33.153,19		
		2009	26	23.909,16	56	54.602,81	44	24.791,07	12	29.811,74	-	-	24.791,07		
		2010	26	1.156,98	43	972,97	33	331,01	10	641,95	-	-	331,01		
		2011	17	70,77	24	70,77	-	-	-	-	24	70,77	-		
		Jumlah	177	100.169,34	319	89.657,35	257	58.275,28	38	31.311,29	24	70,77	58.275,28		
143	Kab. Bangka	2005-2008	71	3.273,78	148	1.118,25	147	967,42	1	150,82	-	-	967,42		
		2009	61	13.625,07	106	13.672,32	100	13.028,47	6	643,85	-	-	13.028,47		
		2010	33	12.342,86	57	11.338,94	35	2.371,07	7	8.730,17	15	237,69	2.371,07		
		2011	16	2.986,32	26	552,69	-	-	-	-	26	552,69	-		
		Jumlah	181	32.228,05	337	26.682,21	282	16.366,97	14	9.524,85	41	790,39	16.366,97		
144	Kab. Bangka Barat	2005-2008	41	2.226,38	86	2.161,52	86	2.161,52	-	-	-	-	2.161,52		
		2009	32	1.183,40	59	524,94	55	524,94	4	-	-	-	524,94		
		2010	10	185,33	19	7,89	12	-	5	7,89	2	-	-		
		2011	16	180.397,49	24	-	2	-	-	-	22	-	-		
		Jumlah	99	183.992,61	188	2.694,36	155	2.686,46	9	7,89	24	-	2.686,46		



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	Kab. Bangka Selatan	2005-2008	50	16.171,78	95	5.250,84	93	5.243,25	2	7,58	-	-	5.243,25
		2009	35	19.160,69	85	2.658,84	74	2.576,99	10	81,85	1	-	2.576,99
		2010	32	46.520,03	68	1.770,23	39	718,13	5	125,52	24	926,58	718,13
		2011	16	1.730,02	26	406,91	-	0,88	1	17,18	25	388,84	0,88
		Jumlah	133	83.582,52	274	10.086,83	206	8.539,25	18	232,14	50	1.315,42	8.539,25
146	Kab. Bangka Tengah	2005-2008	63	7.627,15	119	6.054,63	94	5.452,67	22	128,12	3	473,84	5.452,67
		2009	20	13.025,29	42	197,41	34	197,41	8	-	-	-	197,41
		2010	15	907,02	30	513,24	12	-	6	301,85	12	211,38	-
		2011	15	181,47	21	103,39	-	-	-	-	21	103,39	-
		Jumlah	113	21.740,94	212	6.868,68	140	5.650,08	36	429,98	36	788,61	5.650,08
147	Kab. Belitung	2005-2008	63	7.873,71	138	3.801,27	121	3.340,35	11	181,32	6	279,59	3.340,35
		2009	27	6.590,74	59	2.030,27	31	1.208,09	21	822,17	7	-	1.208,09
		2010	27	747,13	72	375,64	34	39,05	36	336,58	2	-	39,05
		2011	15	5.112,93	22	153,31	-	-	-	-	22	153,31	-
		Jumlah	132	20.324,52	291	6.360,51	186	4.587,50	68	1.340,08	37	432,91	4.587,50
148	Kab. Belitung Timur	2005-2008	55	47.007,58	119	44.206,41	107	43.653,04	10	553,37	2	-	43.653,04
		2009	21	1.433,95	39	7.695,93	33	193,97	6	7.501,95	-	-	193,97
		2010	21	1.046,60	41	1.026,60	22	138,09	13	294,91	6	593,59	138,09
		2011	15	1.322,83	20	744,86	-	-	-	-	20	744,86	-
		Jumlah	112	50.810,96	219	53.673,81	162	43.985,10	29	8.350,25	28	1.338,45	43.985,10
149	Kota Pangkalpinang	2005-2008	82	17.911,55	164	6.523,29	145	5.770,45	13	752,83	6	-	5.770,45
		2009	76	9.921,48	123	1.278,05	79	603,98	24	674,07	20	-	603,98
		2010	64	11.121,50	136	3.142,26	101	321,65	30	2.820,60	5	-	321,65
		2011	22	488,63	27	75,71	-	-	-	-	27	75,71	-
		Jumlah	244	39.443,18	450	11.019,32	325	6.696,08	67	4.247,52	58	75,71	6.696,08

**Halaman 31 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	Prov. Kepulauan Riau	2005-2008	71	56.538,75	158	54.501,33	98	47.268,43	39	6.643,52	21	589,37	11.140,87
		2009	45	50.173,18	90	8.872,58	52	2.152,26	18	6.671,93	20	48,38	2.152,26
		2010	53	5.845,32	101	2.940,59	78	657,42	22	2.283,17	1	-	657,42
		2011	28	751.864,94	40	62,24	35	53,61	3	8,62	2	-	53,61
		Jumlah	197	864.422,21	389	66.376,76	263	50.131,75	82	15.607,24	44	637,76	14.004,19
151	Kab. Bintan	2005-2008	38	47.399,59	73	223,57	71	198,80	2	24,77	-	-	198,80
		2009	30	15.921,11	45	15.866,51	22	32,46	23	15.834,04	-	-	32,46
		2010	20	8.930,27	42	8.930,27	35	8.820,08	7	110,18	-	-	8.634,60
		2011	21	284,11	47	284,11	-	-	-	-	47	284,11	-
		Jumlah	109	72.535,09	207	25.304,47	128	9.051,35	32	15.969,00	47	284,11	8.865,88
152	Kab. Karimun	2005-2008	59	21.261,14	116	15.791,17	70	2.315,38	44	13.102,01	2	373,77	2.315,38
		2009	60	18.277,26	91	22.999,43	79	7.072,52	7	15.887,84	5	39,06	7.072,52
		2010	62	15.922,98	127	25.963,97	70	10.901,97	25	13.009,74	32	2.052,25	10.901,97
		2011	26	48.861,06	60	239,35	37	-	20	239,35	3	-	-
		Jumlah	207	104.322,45	394	64.993,93	256	20.289,88	96	42.238,96	42	2.465,09	20.289,88
153	Kab. Kepulauan Anambas	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	1.048,66	61	1.098,71	45	940,12	16	158,58	-	-	-
		2011	23	341,82	53	350,41	14	-	30	308,07	9	42,33	-
		Jumlah	48	1.390,49	114	1.449,12	59	940,12	46	466,66	9	42,33	-
154	Kab. Lingga	2005-2008	46	189.651,53	89	44.351,02	81	40.879,45	8	3.471,57	-	-	40.879,45
		2009	36	25.301,38	64	2.991,47	44	1.340,63	13	1.650,83	7	-	1.340,63
		2010	37	41.668,36	89	10.438,96	38	8.384,86	20	1.893,26	31	160,82	8.384,86
		2011	26	193,33	64	181,82	-	-	-	-	64	181,82	-
		Jumlah	145	256.814,62	306	57.963,28	163	50.604,95	41	7.015,67	102	342,65	50.604,95

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	Kab. Natuna	2005-2008	69	77.836,28	143	43.263,67	91	24.593,66	20	13.668,09	32	5.001,91	24.593,66
		2009	43	652,41	61	652,41	47	591,05	13	61,35	1	-	591,05
		2010	50	12.804,46	101	12.804,46	40	49,70	15	9.425,08	46	3.329,67	49,70
		2011	29	8.205,75	52	6.985,53	7	279,62	3	43,83	42	6.662,07	279,62
		Jumlah	191	99.498,91	357	63.706,07	185	25.514,04	51	23.198,37	121	14.993,66	25.514,04
156	Kota Batam	2005-2008	96	60.115,28	186	37.658,42	161	35.383,31	23	2.244,72	2	30,38	35.425,29
		2009	54	13.687,45	98	10.444,25	75	849,73	13	9.586,41	10	8,10	849,73
		2010	54	7.343,83	102	7.320,55	62	6.600,57	35	700,52	5	19,45	6.600,57
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	204	81.146,58	386	55.423,24	298	42.833,62	71	12.531,66	17	57,94	42.875,60
157	Kota Tanjungpinang	2005-2008	84	59.696,24	169	20.710,40	138	3.213,83	26	16.580,37	5	916,19	3.213,83
		2009	50	8.429,87	61	306,93	45	286,60	8	20,32	8	-	229,29
		2010	54	6.695,66	106	425,28	89	328,96	12	96,31	5	-	328,96
		2011	32	1.551,82	77	1.551,82	33	-	32	449,27	12	1.102,54	-
		Jumlah	220	76.373,60	413	22.994,43	305	3.829,40	78	17.146,29	30	2.018,73	3.772,09
158	Prov. DKI Jakarta	2005-2008	1.090	994.580,78	2.277	833.748,44	1.893	271.508,72	270	496.057,54	114	66.182,17	263.369,23
				USD 6,684.08		USD 6,684.08				USD 6,684.08			
		2009	337	520.319,24	735	228.142,45	498	110.883,58	171	111.634,11	66	5.624,76	113.909,57
		2010	215	79.924,20	449	24.863,36	315	24.225,75	121	584,83	13	52,77	28.501,34
		2011	144	41.326,73	281	31.875,93	88	15.008,81	28	7.618,45	165	9.248,66	15.056,53
		Jumlah	1.786	1.636.150,96	3.742	1.118.630,20	2.794	421.626,87	590	615.894,94	358	81.108,38	420.836,69
				USD 6,684.08		USD 6,684.08				USD 6,684.08			
159	Prov. Jawa Barat	2005-2008	289	814.514,35	449	260.121,51	312	237.060,80	47	20.915,37	90	2.145,32	221.628,82
				USD 1,10		USD 1,10		USD 1,10					USD 1,10
		2009	104	7.212,28	159	4.422,83	119	1.078,54	37	3.335,82	3	8,45	2.775,14
		2010	73	16.480,40	183	9.192,88	159	5.454,58	16	565,48	8	3.172,81	4.673,78

Halaman 33 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	22	49.374,79	45	3.254,63	-	-	-	-	45	3.254,63	-
		Jumlah	488	887.581,83	836	276.991,86	590	243.593,93	100	24.816,69	146	8.581,23	229.077,75
				USD 1.10		USD 1.10		USD 1.10					USD 1,10
160	Kab. Bandung	2005-2008	101	39.188,95	169	35.596,12	160	31.722,33	8	3.713,78	1	160,00	29.043,83
		2009	42	5.811,10	88	1.189,06	77	815,85	9	172,35	2	200,84	815,80
		2010	32	3.629,48	92	1.850,88	26	253,41	37	269,97	29	1.327,49	224,58
		2011	16	4.007,87	34	2.160,10	-	-	-	-	34	2.160,10	-
		Jumlah	191	52.637,41	383	40.796,17	263	32.791,60	54	4.156,12	66	3.848,44	30.084,23
161	Kab. Bandung Barat	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	38	4.060,89	73	4.060,89	69	339,69	4	3.721,19	-	-	339,69
		2010	31	1.967,48	84	1.967,48	66	931,76	18	1.035,71	-	-	931,76
		2011	16	14.883,82	44	338,10	-	-	-	-	44	338,10	-
		Jumlah	85	20.912,19	201	6.366,48	135	1.271,46	22	4.756,91	44	338,10	1.271,46
162	Kab. Bekasi	2005-2008	78	27.494,18	123	7.881,77	111	2.967,60	11	4.914,16	1	-	3.009,01
		2009	31	16.658,32	61	15.023,31	34	6.844,76	22	8.178,55	5	-	8.575,98
		2010	23	13.331,26	41	5.404,62	3	1.042,12	3	719,74	35	3.642,75	2.284,94
		2011	15	5.086,11	31	19.678,91	-	-	-	-	31	19.678,91	-
		Jumlah	147	62.569,88	256	47.988,63	148	10.854,49	36	13.812,46	72	23.321,67	13.869,95
163	Kab. Bogor	2005-2008	84	31.237,28	142	28.087,64	129	25.367,14	13	2.720,50	-	-	26.187,73
		2009	22	25.003,19	52	22.526,06	31	2.639,81	14	19.812,56	7	73,69	2.639,81
		2010	11	1.245,95	15	652,94	5	268,78	10	384,15	-	-	268,78
		2011	15	49.401,96	40	247,35	-	-	-	-	40	247,35	-
		Jumlah	132	106.888,38	249	51.514,01	165	28.275,74	37	22.917,22	47	321,05	29.096,33
164	Kab. Ciamis	2005-2008	56	14.339,60	80	5.240,72	41	1.211,48	23	1.827,62	16	2.201,60	1.239,20
		2009	15	3.474,26	24	750,47	23	750,47	1	-	-	-	907,32
		2010	31	45.999,53	57	982,13	27	956,11	7	-	23	26,02	928,57

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	13	2.297,14	26	2.297,14	1	78,16	-	-	25	2.218,98	78,16
		Jumlah	115	66.110,54	187	9.270,47	92	2.996,23	31	1.827,62	64	4.446,61	3.153,26
165	Kab. Cianjur	2005-2008	138	24.166,97	225	14.453,31	78	1.322,85	83	2.873,96	64	10.256,49	1.467,43
		2009	37	7.280,78	73	5.875,61	5	171,86	11	2.441,12	57	3.262,63	171,86
		2010	38	12.655,22	75	7.984,03	25	8,90	34	7.975,13	16	-	568,90
		2011	13	1.977,76	28	657,45	-	-	-	-	28	657,45	-
		Jumlah	226	46.080,74	401	28.970,42	108	1.503,61	128	13.290,22	165	14.176,58	2.208,19
166	Kab. Cirebon	2005-2008	66	63.172,23	85	5.904,41	78	4.150,35	7	1.754,05	-	-	4.922,01
		2009	38	4.984,33	53	1.679,76	35	1.389,78	16	289,97	2	-	1.524,75
		2010	17	3.399,26	31	2.114,40	15	203,02	16	1.911,38	-	-	-
		2011	13	4.450,31	33	782,31	-	-	-	-	33	782,31	-
		Jumlah	134	76.006,16	202	10.480,90	128	5.743,16	39	3.955,41	35	782,31	6.446,77
167	Kab. Garut	2005-2008	60	37.082,08	107	34.121,77	49	5.209,59	31	21.856,20	27	7.055,97	5.222,89
		2009	24	2.129,01	57	2.112,66	27	976,09	3	193,80	27	942,75	976,09
		2010	44	7.569,32	71	7.066,91	10	-	10	3.805,50	51	3.261,41	8,14
		2011	19	6.610,96	38	2.161,73	-	-	-	-	38	2.161,73	54,80
		Jumlah	147	53.391,37	273	45.463,08	86	6.185,68	44	25.855,52	143	13.421,87	6.261,94
168	Kab. Indramayu	2005-2008	61	16.159,64	84	4.116,85	71	2.310,66	10	1.773,72	3	32,47	2.322,27
		2009	23	344.021,14	50	1.284,37	44	1.198,58	4	85,79	2	-	1.324,66
		2010	12	201,88	22	-	11	-	11	-	-	-	201,88
		2011	14	5.089,84	28	3.110,46	-	-	-	-	28	3.110,46	-
		Jumlah	110	365.472,51	184	8.511,70	126	3.509,24	25	1.859,52	33	3.142,93	3.848,83
169	Kab. Karawang	2005-2008	104	31.306,13	162	22.969,34	114	12.738,04	31	8.844,38	17	1.386,92	12.797,76
		2009	48	10.480,15	109	2.433,85	69	542,81	18	661,58	22	1.229,46	552,81
		2010	15	10.697,41	30	438,19	8	6,96	17	120,52	5	310,70	198,05

Halaman 35 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	15	102.934,07	24	3.174,02	-	-	-	-	24	3.174,02	-
		Jumlah	182	155.417,78	325	29.015,42	191	13.287,81	66	9.626,49	68	6.101,11	13.548,63
			-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	-	-	-	USD 4,00
170	Kab. Kuningan	2005-2008	55	7.508,23	74	6.586,23	65	4.885,64	8	1.700,58	1	-	4.886,14
		2009	18	6.403,45	39	185,95	38	185,95	1	-	-	-	268,58
		2010	16	1.053,41	29	327,67	17	147,20	11	180,47	1	-	200,10
		2011	14	1.148,51	31	10.373,58	-	-	-	-	31	10.373,58	-
		Jumlah	103	16.113,62	173	17.473,45	120	5.218,81	20	1.881,05	33	10.373,58	5.354,84
171	Kab. Majalengka	2005-2008	43	2.326,80	63	1.057,44	63	1.057,44	-	-	-	-	1.049,53
		2009	21	357,74	49	1.144,80	40	842,18	9	302,61	-	-	853,39
		2010	21	772,52	38	119,69	16	119,69	22	-	-	-	119,69
		2011	15	30.904,92	31	1.754,15	-	-	-	-	31	1.754,15	-
		Jumlah	100	34.362,00	181	4.076,10	119	2.019,32	31	302,61	31	1.754,15	2.022,61
172	Kab. Purwakarta	2005-2008	87	35.139,20	147	20.337,96	92	5.703,72	32	14.632,02	23	2,20	5.804,10
		2009	38	8.737,87	81	6.592,26	21	183,80	20	3.639,68	40	2.768,76	238,47
		2010	24	7.852,47	61	7.705,30	-	-	-	-	61	7.705,30	-
		2011	14	28.244,95	24	27.146,43	1	-	1	53,63	22	27.092,80	-
		Jumlah	163	79.974,50	313	61.781,96	114	5.887,53	53	18.325,35	146	37.569,07	6.042,58
173	Kab. Subang	2005-2008	67	29.908,35	96	26.839,41	68	20.065,16	13	1.836,69	15	4.937,55	20.492,02
		2009	21	7.997,44	44	2.938,93	34	1.669,85	8	1.229,19	2	39,88	1.693,38
		2010	13	1.051,29	22	1.051,29	14	146,35	5	904,93	3	-	146,36
		2011	21	14.294,25	27	4.527,30	-	-	-	-	27	4.527,30	-
		Jumlah	122	53.251,34	189	35.356,95	116	21.881,37	26	3.970,82	47	9.504,75	22.331,77
174	Kab. Sukabumi	2005-2008	99	48.264,41	142	27.370,54	84	24.092,12	30	3.246,52	28	31,88	5.369,00
		2009	39	7.140,23	84	4.995,27	42	1.156,17	31	3.614,13	11	224,97	990,67
		2010	14	563,41	19	203,50	10	153,42	3	50,07	6	-	153,42

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	19	24.137,82	54	2.430,72	-	-	-	-	54	2.430,72	904,91
		Jumlah	171	80.105,88	299	35.000,05	136	25.401,72	64	6.910,73	99	2.687,58	7.418,02
175	Kab. Sumedang	2005-2008	73	17.819,37	101	7.674,14	66	4.621,77	19	2.984,87	16	67,50	4.621,77
		2009	35	2.016,44	64	1.316,35	9	154,88	50	1.161,47	5	-	154,88
		2010	11	2.702,08	18	717,37	-	-	13	553,08	5	164,29	-
		2011	14	559,34	50	522,90	-	-	-	-	50	522,90	-
		Jumlah	133	23.097,25	233	10.230,78	75	4.776,65	82	4.699,42	76	754,69	4.776,65
176	Kab. Tasikmalaya	2005-2008	62	10.536,55	94	7.672,67	82	7.416,58	12	256,08	-	-	8.366,66
		2009	8	37,02	13	37,02	11	37,02	2	-	-	-	37,02
		2010	19	1.248,26	37	771,80	-	-	15	771,80	22	-	-
		2011	17	7.143,56	43	1.760,38	-	-	-	-	43	1.760,38	-
		Jumlah	106	18.965,40	187	10.241,88	93	7.453,61	29	1.027,88	65	1.760,38	8.403,69
177	Kota Bandung	2005-2008	127	126.956,63	167	74.195,77	102	26.419,13	62	47.588,10	3	188,53	17.124,64
		2009	74	7.863,78	165	3.861,76	81	3.201,54	43	616,61	41	43,61	3.217,01
		2010	21	793,02	41	771,81	24	674,55	14	89,15	3	8,10	676,33
		2011	55	59.737,09	154	38.638,01	1	-	5	472,14	148	38.165,87	-
		Jumlah	277	195.350,54	527	117.467,37	208	30.295,23	124	48.766,01	195	38.406,12	21.017,99
178	Kota Banjar	2005-2008	63	26.238,07	88	4.412,54	79	3.981,37	6	431,17	3	-	4.049,53
		2009	21	1.026,98	33	411,91	16	292,17	1	80,06	16	39,67	276,42
		2010	21	595,37	38	389,39	28	197,43	10	191,96	-	-	197,43
		2011	12	625	28	492,92	-	-	-	-	28	492,92	-
		Jumlah	117	28.485,03	187	5.706,77	123	4.470,98	17	703,19	47	532,59	4.523,39
179	Kota Bekasi	2005-2008	91	63.063,64	134	32.640,86	109	17.518,91	22	15.107,55	3	14,40	17.829,60
		2009	46	3.278,80	70	356,01	40	262,39	17	93,62	13	-	262,39
		2010	20	6.844,04	34	6.317,54	5	4.668,38	19	833,46	10	815,70	1.649,16

**Halaman 37 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	28	21.700	58	285,73	-	-	-	-	58	285,73	-
		Jumlah	185	94.886,20	296	39.600,16	154	22.449,68	58	16.034,64	84	1.115,83	19.741,16
180	Kota Bogor	2005-2008	70	26.721,86	101	11.186,66	86	8.963,42	7	1.077,43	8	1.145,80	9.151,21
		2009	9	933,56	22	842,78	21	842,78	1	-	-	-	293,23
		2010	33	4.023,55	58	1.137,34	21	278,12	12	859,22	25	-	333,48
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	112	31.678,97	181	13.166,79	128	10.084,33	20	1.936,66	33	1.145,80	9.777,93
181	Kota Cimahi	2005-2008	69	16.226,90	114	9.725,11	95	8.234,23	15	1.475,87	4	15,00	8.234,23
		2009	40	4.080,76	87	2.758,67	25	518,30	11	1.219,69	51	1.020,67	472,83
		2010	24	3.974,19	49	885,45	29	433,75	14	451,69	6	-	433,75
		2011	16	2.858,93	31	527,39	-	-	-	-	31	527,39	-
		Jumlah	149	27.140,80	281	13.896,64	149	9.186,29	40	3.147,27	92	1.563,06	9.140,83
182	Kota Cirebon	2005-2008	89	24.913,22	129	5.849,25	118	3.771,38	10	1.827,86	1	250,00	2.927,66
		2009	24	228,27	51	211,87	36	191,54	15	20,33	-	-	191,54
		2010	15	221,59	39	206,97	30	206,97	9	-	-	-	206,97
		2011	14	5.820	32	617,38	-	-	-	-	32	617,38	-
		Jumlah	142	31.182,72	251	6.885,48	184	4.169,90	34	1.848,19	33	867,38	3.326,18
183	Kota Depok	2005-2008	88	23.610,37	151	17.951,23	151	17.951,23	-	-	-	-	2.985,97
		2009	37	14.701,74	74	10.980,90	71	10.817,82	3	163	-	-	1.650,51
		2010	12	3.385,69	23	419,92	13	417,29	7	2,62	3	-	282,47
		2011	7	24,12	11	24,12	6	24,12	5	-	-	-	24,12
		Jumlah	144	41.721,94	259	29.376,18	241	29.210,48	15	165,70	3	-	4.943,08
184	Kota Sukabumi	2005-2008	70	19.778,31	105	4.260,50	93	3.692,08	10	568,42	2	-	3.066,22
		2009	22	3.300,22	51	1.232,84	28	348,88	22	883,95	1	-	168,24
		2010	25	1.014,73	57	950,41	23	-	31	950,41	3	-	-



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	32	1.033,270	79	2.325,26	-	-	-	-	79	2.325,26	-
		Jumlah	149	1.057,363,67	292	8.769,02	144	4.040,96	63	2.402,79	85	2.325,26	3.234,47
185	Kota Tasikmalaya	2005-2008	72	9.509,26	140	5.298,24	124	3.202,87	3	17,08	13	2.078,28	3.031,93
		2009	23	3.924,36	47	1.555,19	25	551,64	11	273,51	11	730,03	556,61
		2010	7	951,72	14	940,91	-	-	-	-	14	940,91	-
		2011	16	63,89	39	63,89	-	-	-	-	39	63,89	-
		Jumlah	118	14.449,26	240	7.858,25	149	3.754,52	14	290,60	77	3.813,13	3.588,54
186	Prov. Jawa Tengah	2005-2008	153	40.144,06	272	29.392,27	221	27.718,50	8	1.612,43	43	61,33	27.718,50
		2009	24	1.356,70	48	1.258,44	37	273,00	10	933,23	1	52,20	174,80
		2010	52	17.717,07	92	8.140,51	32	141,22	11	1.092,32	49	6.906,96	141,22
		2011	12	4.526,79	26	-	-	-	-	-	26	-	-
		Jumlah	241	63.744,64	438	38.791,23	290	28.132,73	29	3.637,99	119	7.020,49	28.034,53
187	Kab. Banjarnegara	2005-2008	118	9.150,77	219	8.799,55	205	6.111,49	14	2.688,05	-	-	6.111,49
		2009	13	1.931,96	23	1.931,96	23	1.931,96	-	-	-	-	1.931,96
		2010	18	2.935,31	24	405,26	4	296,46	20	108,80	-	-	296,46
		2011	18	3.048,50	31	3.048,50	-	-	-	-	31	3.048,50	-
		Jumlah	167	17.066,55	297	14.185,28	232	8.339,91	34	2.796,85	31	3.048,50	8.339,91
188	Kab. Banyumas	2005-2008	86	22.265,954,73	179	7.706,54	162	2.511,65	13	5.170,52	4	24,36	2.511,65
		2009	15	2.506.809,38	38	673,25	35	658,25	3	15,00	-	-	658,25
		2010	20	36.402,00	36	184,81	31	10,50	5	174,31	-	-	10,50
		2011	10	2.775,86	16	2.145,08	-	-	-	-	16	2.145,08	-
		Jumlah	131	24.811,941,99	269	10.709,69	228	3.180,41	21	5.359,84	20	2.169,44	3.180,41
189	Kab. Batang	2005-2008	64	3.273,46	107	1.250,04	82	483,57	25	766,46	-	-	432,11
		2009	15	14.559,10	29	241,57	19	76,37	8	165,20	2	-	76,37
		2010	13	-	25	8,36	4	8,36	19	-	2	-	8,36

Halaman 39 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	9	208,99	18	-	8	-	10	-	-	-	-
		Jumlah	101	18.041,55	179	1.499,98	113	568,31	62	931,66	4	-	516,85
190	Kab. Blora	2005-2008	85	12.228,13	170	7.095,13	159	2.215,33	11	4.879,79	-	-	2.220,11
		2009	14	368,86	35	333,22	10	251,50	25	81,72	-	-	251,50
		2010	29	987,88	66	306,48	27	164,19	38	20,21	1	122,07	164,19
		2011	17	35,77	32	-	-	-	-	-	32	-	-
		Jumlah	145	13.620,65	303	7.734,84	196	2.631,02	74	4.981,73	33	122,07	2.635,81
191	Kab. Boyolali	2005-2008	97	5.986,58	150	3.361,43	122	1.335,86	21	2.025,57	7	-	1.342,55
		2009	12	18.540,13	19	40,13	15	32,21	4	7,92	-	-	32,21
		2010	10	4.918,88	25	-	15	-	10	-	-	-	-
		2011	9	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-
		Jumlah	128	29.445,60	211	3.401,56	152	1.368,07	35	2.033,49	24	-	1.374,76
192	Kab. Brebes	2005-2008	85	4.191,90	177	4.191,90	149	3.224,78	25	967,12	3	-	3.224,78
		2009	12	307,86	31	307,86	25	10,00	6	297,86	-	-	10,00
		2010	15	3,50	28	3,50	2	-	16	3,50	10	-	-
		2011	9	46,36	26	46,36	-	-	-	-	26	46,36	-
		Jumlah	121	4.549,64	262	4.549,64	176	3.234,78	47	1.268,49	39	46,36	3.234,78
193	Kab. Cilacap	2005-2008	69	29.772,64	123	29.772,64	115	25.098,32	8	4.674,31	-	-	25.264,27
		2009	44	854,06	99	854,06	96	745,56	3	108,50	-	-	745,56
		2010	20	7.731,65	36	7.731,65	32	121,22	4	7.610,42	-	-	121,22
		2011	21	441,80	53	441,80	-	-	-	-	53	441,80	-
		Jumlah	154	38.800,16	311	38.800,16	243	25.965,11	15	12.393,24	53	441,80	26.131,06
194	Kab. Demak	2005-2008	66	27.536,14	107	1.492,68	98	1.232,55	9	260,12	-	-	1.232,55
		2009	14	341,79	42	320,21	27	10,91	14	309,29	1	-	10,91
		2010	24	933,73	35	10,41	-	-	24	0,17	11	10,23	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	11	134,38	30	134,38	-	-	-	-	30	134,38	-
		Jumlah	115	28.946,06	214	1.957,69	125	1.243,47	47	569,59	42	144,62	1.243,47
195	Kab. Grobogan	2005-2008	82	13.644,95	152	8.560,22	116	3.456,78	30	5.103,43	6	-	3.456,78
		2009	26	12.727,18	53	4.348,48	20	1.676,41	18	2.361,17	15	310,88	1.676,41
		2010	14	405,26	41	137,91	-	-	11	-	30	137,91	-
		2011	16	1.070,19	34	537,88	-	-	-	-	34	537,88	-
		Jumlah	138	27.847,59	280	13.584,50	136	5.133,20	59	7.464,61	85	986,69	5.133,20
196	Kab. Jepara	2005-2008	75	6.136,22	107	4.470,36	106	2.761,65	1	1.708,70	-	-	2.761,65
		2009	11	9.918,95	22	1.347,70	18	1.347,70	4	-	-	-	1.347,70
		2010	12	7.781,60	25	361,20	19	23,30	6	337,89	-	-	23,30
		2011	6	10.913,10	16	-	-	-	-	-	16	-	-
		Jumlah	104	34.749,90	170	6.179,27	143	4.132,67	11	2.046,60	16	-	4.132,67
197	Kab. Karanganyar	2005-2008	76	3.461,55	125	2.572,31	116	1.918,77	5	653,53	4	-	1.918,81
		2009	9	1.592,08	18	1.915,10	14	379,31	3	1.535,78	1	-	379,31
		2010	31	3.022,54	65	2.663,83	2	306,08	32	202,09	31	2.155,64	277,52
		2011	16	17,38	31	17,38	-	-	-	-	31	17,38	-
		Jumlah	132	8.093,57	239	7.168,62	132	2.604,17	40	2.391,42	67	2.173,03	2.575,65
198	Kab. Kebumen	2005-2008	69	13.273,16	126	5.294,92	97	3.287,33	29	2.007,59	-	-	3.287,33
		2009	10	11.554,62	14	11.554,62	11	11.450,00	3	104,62	-	-	11.450,00
		2010	26	9.538,85	43	146,17	31	48,85	12	97,32	-	-	48,85
		2011	15	9.342,18	32	12,06	-	-	-	-	32	12,06	-
		Jumlah	120	43.708,83	215	17.007,79	139	14.786,18	44	2.209,54	32	12,06	14.786,18
199	Kab. Kendal	2005-2008	80	17.305,93	150	16.213,54	70	327,14	38	10.849,07	42	5.037,31	327,14
		2009	23	186.975,84	45	3.329,01	30	89,43	14	3.239,58	1	-	89,43
		2010	16	6.569,37	40	3.972,72	3	2,64	16	12,88	21	3.957,19	2,64

**Halaman 41 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	9	1.574,29	19	1.540,79	-	-	-	-	19	1.540,79	-
		Jumlah	128	212.425,44	254	25.056,07	103	419,23	68	14.101,54	83	10.535,29	419,23
200	Kab. Klaten	2005-2008	87	105.885,22	189	5.679,48	176	3.740,28	9	1.486,70	4	452,49	3.740,28
		2009	8	13.699,96	22	-	11	-	11	-	-	-	-
		2010	32	12.862,43	65	22,04	3	-	37	22,04	25	-	-
		2011	13	2.017,34	31	-	-	-	-	-	31	-	-
		Jumlah	140	134.464,96	307	5.701,53	190	3.740,28	57	1.508,75	60	452,49	3.740,28
201	Kab. Kudus	2005-2008	104	30.479,64	191	7.385,77	174	4.499,19	15	2.886,57	2	-	4.499,19
		2009	15	480,63	27	-	23	-	4	-	-	-	-
		2010	25	895,24	27	895,24	-	-	-	-	27	895,24	-
		2011	13	184,17	39	184,17	-	-	-	-	39	184,17	-
		Jumlah	157	32.039,70	284	8.465,19	197	4.499,19	19	2.886,57	68	1.079,41	4.499,19
202	Kab. Magelang	2005-2008	98	5.483,62	167	5.326,12	109	4.500,45	13	825,67	45	-	4.500,45
		2009	12	166,61	32	166,61	26	139,59	6	27,02	-	-	139,59
		2010	21	991,87	41	991,87	13	17,23	6	417,36	22	557,27	17,23
		2011	12	866,04	22	866,04	-	-	-	-	22	866,04	-
		Jumlah	143	7.508,16	262	7.350,66	148	4.657,27	25	1.270,06	89	1.423,31	4.657,27
203	Kab. Pati	2005-2008	93	16.178,75	196	7.165,76	165	1.835,92	30	5.329,83	1	-	1.538,40
		2009	24	19.591,40	51	241,77	39	172,61	12	69,16	-	-	172,61
		2010	12	84.605,22	28	1.137,31	1	1.137,31	27	-	-	-	1.137,31
		2011	14	44,94	34	-	-	-	-	-	34	-	-
		Jumlah	143	120.420,32	309	8.544,85	205	3.145,85	69	5.398,99	35	-	2.848,33
204	Kab. Pekalongan	2005-2008	62	4.666,48	125	1.548,11	99	1.046,43	26	501,67	-	-	1.046,43
		2009	10	180,88	28	136,09	21	65,12	7	70,96	-	-	65,12
		2010	12	9.366,64	26	3.931,60	12	1.069,94	14	2.861,66	-	-	1.069,94

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	14	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-
		Jumlah	98	14.214,01	207	5.615,81	132	2.181,50	47	3.434,30	28	-	2.181,50
205	Kab. Pemalang	2005-2008	101	6.979,20	179	6.897,16	157	6.253,91	13	643,25	9	-	5.992,03
		2009	14	75,88	26	75,88	14	32,86	11	43,01	1	-	32,86
		2010	52	8,86	82	8,86	27	8,86	52	-	3	-	8,86
		2011	15	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-
		Jumlah	182	7.063,94	312	6.981,91	198	6.295,65	76	686,26	38	-	6.033,77
206	Kab. Purbalingga	2005-2008	60	7.281,07	111	6.296,83	106	6.145,94	4	150,89	1	-	2.786,15
		2009	10	1.476,07	16	1.476,07	8	1.032,67	4	443,39	4	-	2.242,80
		2010	44	480,86	75	510,41	28	29,55	24	295,44	23	185,41	-
		2011	16	587,50	35	587,50	-	-	-	-	35	587,50	-
		Jumlah	130	9.825,51	237	8.870,83	142	7.208,16	32	889,74	63	772,92	5.028,96
207	Kab. Purworejo	2005-2008	102	45.483,54	220	37.499,63	87	5.503,08	63	11.956,05	70	20.040,50	5.503,08
		2009	12	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
		2010	24	194,78	44	18,72	9	-	8	-	27	18,72	176,05
		2011	26	612,86	54	77,71	-	-	-	-	54	77,71	535,15
		Jumlah	164	46.291,19	338	37.596,07	116	5.503,08	71	11.956,05	151	20.136,93	6.214,29
208	Kab. Rembang	2005-2008	80	42.461,06	156	35.606,41	119	3.996,02	35	31.610,38	2	-	3.996,02
		2009	12	1.963,34	31	661,34	12	26,00	19	635,34	-	-	26,00
		2010	24	511,33	60	274,23	6	-	26	-	28	274,23	-
		2011	7	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-
		Jumlah	123	44.935,74	261	36.541,98	137	4.022,02	80	32.245,73	44	274,23	4.022,02
209	Kab. Semarang	2005-2008	81	11.910,31	137	11.910,31	125	4.498,13	11	7.412,18	1	-	4.498,13
		2009	11	722,28	24	474,28	16	109,78	7	364,50	1	-	109,78
		2010	33	-	70	-	14	-	8	-	48	-	-

**Halaman 43 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	13	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	138	12.632,59	252	12.384,59	176	4.607,91	26	7.776,68	50	-	4.607,91
210	Kab. Sragen	2005-2008	85	8.564,39	134	5.580,13	130	2.947,66	4	2.632,47	-	-	2.947,66
		2009	10	2.070,53	26	950,93	26	950,93	-	-	-	-	950,93
		2010	19	289,46	38	-	18	-	19	-	1	-	-
		2011	14	952,15	43	67,71	-	59,85	-	-	43	7,86	59,85
		Jumlah	128	11.876,54	241	6.598,79	174	3.958,45	23	2.632,47	44	7,86	3.958,45
211	Kab. Sukoharjo	2005-2008	79	22.552,96	167	6.654,90	126	3.553,19	34	3.101,70	7	-	3.553,19
		2009	12	816,85	31	518,11	18	435,54	13	82,56	-	-	435,54
		2010	5	124,55	12	103,68	7	18,72	5	84,95	-	-	18,72
		2011	11	626,15	19	27,56	-	-	-	-	19	27,56	-
		Jumlah	107	24.120,53	229	7.304,25	151	4.007,46	52	3.269,22	26	27,56	4.007,46
212	Kab. Tegal	2005-2008	61	6.709,04	107	5.190,67	48	2.619,09	48	587,80	11	1.983,77	2.527,53
		2009	26	12.915,11	77	12.891,08	13	-	35	12.121,52	29	769,56	-
		2010	12	1.273,84	31	1.273,84	-	-	2	227,69	29	1.046,15	-
		2011	11	3.440,17	22	3.140,47	-	-	-	-	22	3.140,47	-
		Jumlah	110	24.338,19	237	22.496,09	61	2.619,09	85	12.937,01	91	6.939,98	2.527,53
213	Kab. Temanggung	2005-2008	64	38.590,94	92	154,82	71	97,12	20	57,70	1	-	97,12
		2009	11	720,24	22	-	9	-	13	-	-	-	-
		2010	27	1.944,93	49	1.090,85	1	-	25	-	23	1.090,85	-
		2011	20	3.032,53	30	-	-	-	-	-	30	-	-
		Jumlah	122	44.288,65	193	1.245,67	81	97,12	58	57,70	54	1.090,85	97,12
214	Kab. Wonogiri	2005-2008	76	8.745,23	130	6.705,57	109	5.482,11	20	1.223,46	1	-	5.482,11
		2009	14	10.376,44	36	94,97	26	80,60	10	14,36	-	-	80,60
		2010	13	267,01	22	-	12	-	10	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	10	-	17	-	-	-	17	-	-	-	-
		Jumlah	113	19.388,69	205	6.800,55	147	5.562,71	40	1.237,83	18	-	5.562,71
215	Kab. Wonosobo	2005-2008	74	15.236,52	133	12.179,26	65	5.774,29	56	5.962,86	12	442,10	5.774,29
		2009	19	5.478,93	30	18,62	4	3,30	26	15,32	-	-	3,30
		2010	31	136.227,51	71	2.245,26	27	1.213,29	35	1.030,93	9	1,02	1.213,29
		2011	19	63,20	30	63,20	-	-	-	-	30	63,20	-
		Jumlah	143	157.006,18	264	14.506,36	96	6.990,89	117	7.009,13	51	506,33	6.990,89
216	Kota Magelang	2005-2008	66	6.781,46	111	4.027,67	82	3.518,32	21	509,34	8	-	3.518,33
		2009	10	2.420,42	10	2.420,42	5	60,00	5	2.360,42	-	-	60,00
		2010	54	11.166,83	102	9.071,96	6	2.352,63	16	6.719,32	80	-	2.352,63
		2011	13	9,90	30	9,90	-	-	-	-	30	9,90	-
		Jumlah	143	20.378,62	253	15.529,97	93	5.930,96	42	9.589,09	118	9,90	5.930,97
217	Kota Pekalongan	2005-2008	57	10.051,24	103	319,41	89	319,41	14	-	-	-	319,41
		2009	8	2.166,57	20	882,48	15	246,48	5	635,99	-	-	246,48
		2010	14	25.407,31	26	12.004,76	11	-	15	12.004,76	-	-	-
		2011	19	2.519,86	45	1.952,64	-	-	-	-	45	1.952,64	-
		Jumlah	98	40.145,00	194	15.159,30	115	565,89	34	12.640,75	45	1.952,64	565,89
218	Kota Salatiga	2005-2008	77	4.620,52	111	4.150,38	93	1.683,60	13	2.466,78	5	-	1.683,60
		2009	14	1.155,76	25	354,68	20	175,00	5	179,68	-	-	175,00
		2010	30	615,72	55	615,72	-	-	26	406,54	29	209,18	-
		2011	12	412,59	37	412,59	1	5,11	-	-	36	407,48	5,11
		Jumlah	133	6.804,61	228	5.533,39	114	1.863,72	44	3.053,01	70	616,66	1.863,72
219	Kota Semarang	2005-2008	87	15.245,92	187	12.432,48	164	4.075,29	20	5.346,79	3	3.010,40	4.075,29
		2009	39	1.920,55	66	1.920,55	12	-	29	1.897,13	25	23,42	-
		2010	24	2.338,96	46	1.290,54	-	-	10	46,85	36	1.243,68	-

**Halaman 45 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	18	477,90	41	477,90	-	-	-	-	41	477,90	-
		Jumlah	168	19.983,35	340	16.121,49	176	4.075,29	59	7.290,78	105	4.755,41	4.075,29
220	Kota Surakarta	2005-2008	87	19.778,21	132	5.994,47	102	1.338,09	29	4.656,37	1	-	1.338,09
		2009	13	168,19	24	145,55	22	145,55	1	-	1	-	145,55
		2010	15	881,87	26	499,02	-	-	-	-	26	499,02	-
		2011	10	1.058,53	17	-	-	-	-	-	17	-	-
		Jumlah	125	21.886,81	199	6.639,05	124	1.483,65	30	4.656,37	45	499,02	1.483,65
221	Kota Tegal	2005-2008	72	5.391,99	139	5.128,61	117	3.309,55	20	1.819,06	2	-	3.309,55
		2009	22	4.306,75	48	1.690,59	31	1.288,73	16	401,86	1	-	1.288,73
		2010	21	540,42	33	225,94	14	17,20	17	185,32	2	23,41	17,20
		2011	11	748,11	22	748,11	-	-	-	-	22	748,11	-
		Jumlah	126	10.987,28	242	7.793,27	162	4.615,49	53	2.406,25	27	771,52	4.615,49
222	Prov. D.I. Yogyakarta	2005-2008	107	22.727,27	173	22.727,27	168	20.695,35	5	2.031,91	-	-	21.321,11
		2009	39	18.576,10	52	18.576,10	49	18.571,47	3	4,62	-	-	18.550,35
		2010	34	3.360,24	69	3.360,24	63	2.016,09	6	1.344,14	-	-	2.016,09
		2011	11	27,07	18	27,07	5	-	5	-	8	27,07	-
		Jumlah	191	44.690,69	312	44.690,69	285	41.282,93	19	3.380,68	8	27,07	41.887,56
223	Kab. Bantul	2005-2008	103	2.535,74	168	2.535,74	155	1.290,12	10	1.245,62	3	-	1.290,12
		2009	19	3.634,40	24	3.634,40	16	2.040,73	6	1.593,66	2	-	2.040,73
		2010	34	3.213,74	47	3.213,74	39	2.398,74	6	-	2	815,00	2.398,74
		2011	23	18,00	47	18,00	-	-	-	-	47	18,00	-
		Jumlah	179	9.401,89	286	9.401,89	210	5.729,60	22	2.839,28	54	833,00	5.729,60
224	Kab. Gunung Kidul	2005-2008	86	3.985,91	170	3.361,56	152	2.468,01	18	893,55	-	-	2.468,01
		2009	10	49,78	19	49,78	13	49,78	5	-	1	-	49,78
		2010	22	1.463,42	44	1.463,42	30	632,26	14	831,16	-	-	176,97



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	10	651,93	20	651,93	-	-	-	-	20	651,93	-
		Jumlah	128	6.151,05	253	5.526,70	195	3.150,06	37	1.724,71	21	651,93	2.694,77
225	Kab. Kulon Progo	2005-2008	85	4.864,55	156	6.803,18	142	3.994,80	14	2.808,37	-	-	1.730,38
		2009	6	884.817,96	16	712,03	16	712,03	-	-	-	-	-
		2010	10	4.772,86	21	802,63	17	773,58	4	29,05	-	-	773,58
		2011	17	439,54	42	434,88	11	-	5	-	26	434,88	-
		Jumlah	118	894.894,92	235	8.752,73	186	5.480,43	23	2.837,42	26	434,88	2.503,97
226	Kab. Sleman	2005-2008	108	51.295,90	200	52.022,79	192	48.031,74	8	3.991,04	-	-	45.813,83
		2009	36	22.602,85	53	22.602,85	50	18.969,08	3	3.633,76	-	-	18.969,08
		2010	41	172,92	72	172,92	61	37,07	11	135,85	-	-	37,07
		2011	9	230,00	14	230,00	-	-	-	-	14	230,00	-
		Jumlah	194	74.301,67	339	75.028,57	303	67.037,90	22	7.760,66	14	230,00	64.819,99
227	Kota Yogyakarta	2005-2008	56	11.065,91	91	11.065,91	83	6.535,76	8	4.530,14	-	-	4.990,07
		2009	33	41.460,43	45	41.460,43	38	14.889,34	6	26.571,09	1	-	-
		2010	40	1.048,68	85	1.048,68	73	27,68	12	1.021,00	-	-	23,93
		2011	13	179,43	21	179,43	-	-	-	-	21	179,43	-
		Jumlah	142	53.754,47	242	53.754,47	194	21.452,79	26	32.122,24	22	179,43	5.014,01
228	Prov. Jawa Timur	2005-2008	154	114.684,29	233	12.398,62	208	1.997,92	25	10.400,69	-	-	1.997,92
		2009	44	2.802,55	67	651,50	55	651,50	12	-	-	-	651,50
		2010	47	28.917,84	77	17.287,79	34	8.779,90	19	-	24	8.507,89	8.626,32
		2011	17	139,73	30	139,73	3	122,85	1	16,88	26	-	122,85
		Jumlah	262	146.544,43	407	30.477,66	300	11.552,19	57	10.417,57	50	8.507,89	11.398,61
229	Kab. Bangkalan	2005-2008	99	10.819,75	168	6.571,91	162	3.715,04	6	2.856,87	-	-	3.829,56
		2009	20	112,50	49	112,50	49	112,50	-	-	-	-	112,50
		2010	23	734,18	39	179,16	39	179,16	-	-	-	-	582,61

**Halaman 47 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	10	5.980,92	21	97,17	-	-	-	-	21	97,17	-
		Jumlah	152	17.647,37	277	6.960,75	250	4.006,71	6	2.856,87	21	97,17	4.524,68
230	Kab. Banyuwangi	2005-2008	165	14.181,32	314	7.733,12	250	3.117,38	39	4.604,44	25	11,29	5.186,48
		2009	22	4.719,64	28	17,59	27	17,59	1	-	-	-	17,59
		2010	50	14.976,68	110	527,67	78	210,39	21	317,27	11	-	210,39
		2011	19	9.708,72	52	212,38	-	-	-	-	52	212,38	-
		Jumlah	256	43.586,39	504	8.490,77	355	3.345,38	61	4.921,71	88	223,67	5.414,47
231	Kab. Blitar	2005-2008	116	55.811,67	167	50.430,49	143	2.690,46	23	47.740,03	1	-	3.121,43
		2009	35	11.135,17	52	2.275,55	41	728,60	11	1.546,94	-	-	728,60
		2010	41	10.791,11	89	584,08	22	33,93	21	399,31	46	150,83	33,93
		2011	23	4.248,65	48	3.061,57	2	2.564,38	1	494,70	45	2,48	2.564,38
		Jumlah	215	81.986,62	356	56.351,70	208	6.017,39	56	50.180,99	92	153,31	6.448,36
232	Kab. Bojonegoro	2005-2008	108	12.100,42	155	7.693,95	153	1.683,57	2	6.010,38	-	-	1.683,57
		2009	38	6.033,85	54	5.733,85	46	1.877,58	7	3.321,17	1	535,09	1.877,58
		2010	31	11.290,03	67	1.616,95	55	558,01	11	1.058,93	1	-	1.271,43
		2011	21	5.330,06	52	2.030,37	26	101,44	26	1.928,93	-	-	118,04
		Jumlah	198	34.754,37	328	17.075,14	280	4.220,62	46	12.319,43	2	535,09	4.950,63
233	Kab. Bontowoso	2005-2008	74	44.790,36	117	4.994,70	111	1.164,83	5	3.829,86	1	-	942,40
		2009	70	30.085,98	98	1.170,12	91	106	7	1.065	-	-	105,59
		2010	28	2.211,42	54	-	46	-	8	-	-	-	-
		2011	21	1.241,80	50	1.216,41	-	-	-	-	50	1.216,41	-
		Jumlah	193	78.329,58	319	7.381,24	248	1.270,43	20	4.894,39	51	1.216,41	1.048,00
234	Kab. Gresik	2005-2008	99	18.773,88	159	11.027,43	140	5.529,71	18	5.497,72	1	-	5.785,11
		2009	18	-	38	-	17	-	14	-	7	-	-
		2010	20	151,57	43	151,57	25	53,37	18	98,20	-	-	53,37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	11	8.447,33	23	316,12	2	6,11	5	-	16	310,00	6,11
		Jumlah	148	27.372,79	263	11.495,13	184	5.589,20	55	5.595,93	24	310,00	5.844,60
235	Kab. Jember	2005-2008	155	88.850,43	299	49.569,94	249	6.102,48	35	25.573,96	15	17.893,49	5.300,76
		2009	39	8.467,62	107	7.649,51	58	415,13	48	7.234,37	1	-	7.649,51
		2010	46	4.264,74	107	446,57	66	119,83	39	188,03	2	138,71	336,71
		2011	18	5.145,41	45	141,76	-	-	-	-	45	141,76	-
		Jumlah	258	106.728,22	558	57.807,81	373	6.637,45	122	32.996,37	63	18.173,97	13.287,00
236	Kab. Jombang	2005-2008	118	4.903,04	167	1.700,25	164	1.572,07	3	128,17	-	-	1.520,29
		2009	35	518,21	55	288,78	52	221,25	3	67,52	-	-	234,60
		2010	23	50,17	35	10,73	30	10,73	5	-	-	-	10,73
		2011	11	30.730,37	31	3.007,89	9	30,00	22	2.977,89	-	-	30,00
		Jumlah	187	36.201,81	288	5.007,67	255	1.834,07	33	3.173,60	-	-	1.795,62
237	Kab. Kediri	2005-2008	140	5.747,18	203	1.916,14	203	1.916,14	-	-	-	-	3.462,85
		2009	44	3.195,53	66	96,54	66	96,54	-	-	-	-	1.941,07
		2010	40	3.973,81	57	1.909,36	48	634,95	9	1.274,40	-	-	634,95
		2011	8	14,07	18	-	-	-	-	-	18	-	-
		Jumlah	232	12.930,60	344	3.922,05	317	2.647,64	9	1.274,40	18	-	6.038,88
238	Kab. Lamongan	2005-2008	104	16.969,71	163	9.635,93	157	8.606,35	6	1.029,58	-	-	8.606,35
		2009	17	155,18	33	155,17	29	155,17	4	-	-	-	155,17
		2010	9	-	17	-	13	-	3	-	1	-	-
		2011	7	519,17	13	517,10	-	-	-	-	13	517,10	-
		Jumlah	137	17.644,07	226	10.308,21	199	8.761,53	13	1.029,58	14	517,10	8.761,53
239	Kab. Lumajang	2005-2008	140	11.732,54	201	2.137,62	198	1.859,57	2	278,05	1	-	1.859,57
		2009	41	1.767,55	97	1.674,51	90	90,80	7	1.583,71	-	-	90,80
		2010	35	1.126,78	89	729,20	83	220,19	6	509,01	-	-	605,29

Halaman 49 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	18	1.297,27	48	993,40	-	-	-	-	48	993,40	-
		Jumlah	234	15.924,16	435	5.534,74	371	2.170,56	15	2.370,77	49	993,40	2.555,67
240	Kab. Madiun	2005-2008	112	12.113,42	204	2.318,53	202	2.192,12	2	126,41	-	-	2.192,12
		2009	29	253,36	48	253,36	46	253,36	2	-	-	-	253,36
		2010	36	4.421,08	65	1.77,91	63	100,72	2	77,18	-	-	405,07
		2011	12	3.106,69	27	1.648,89	10	1.648,89	17	-	-	-	1.648,89
		Jumlah	189	19.894,57	344	4.398,70	321	4.195,11	23	203,59	-	-	4.499,46
241	Kab. Magetan	2005-2008	141	143.736,14	229	12.901,15	217	6.408,31	12	6.492,83	-	-	6.408,31
		2009	34	2.515,43	54	1.448,14	37	1.400,71	17	47,42	-	-	1.400,71
		2010	22	2.208,78	47	989,84	19	183,99	23	805,85	5	-	90,45
		2011	12	2.875,54	25	320,33	5	-	10	45,33	10	275,00	-
		Jumlah	209	151.335,91	355	15.659,47	278	7.993,03	62	7.391,44	15	275,00	7.899,49
242	Kab. Malang	2005-2008	161	12.224,46	235	7.271,17	221	5.668,49	14	1.602,67	-	-	6.336,83
		2009	41	88,60	83	88,60	73	88,60	8	-	2	-	88,60
		2010	28	1.869,49	46	163,09	35	88,52	11	74,57	-	-	1.033,72
		2011	26	2.820,75	64	228,62	4	177,24	2	30,18	58	21,19	177,24
		Jumlah	256	17.003,32	428	7.751,50	333	6.022,87	35	1.707,43	60	21,19	7.636,41
243	Kab. Mojokerto	2005-2008	106	30.574,20	193	6.469,92	186	5.446,82	7	1.023,09	-	-	5.440,35
		2009	49	1.464,29	92	308,36	90	149,56	2	158,80	-	-	157,23
		2010	27	3.580,22	50	171,20	40	158,70	9	12,50	1	-	319,43
		2011	12	1.804,54	33	-	17	-	15	-	1	-	-
		Jumlah	194	37.423,26	368	6.949,49	333	5.755,08	33	1.194,40	2	-	5.917,02
244	Kab. Nganjuk	2005-2008	68	3.303,06	108	2.480,26	105	1.402,21	3	1.078,05	-	-	1.402,21
		2009	42	881,58	67	881,58	58	654,17	9	227,41	-	-	654,17

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	30	1.289,88	57	1.197,75	35	632,40	22	565,34	-	-	632,40
		2011	15	295,59	31	295,59	2	52,18	3	52,08	26	191,32	52,18
		Jumlah	155	5.770,13	263	4.855,20	200	2.740,98	37	1.922,89	26	191,32	2.740,98
245	Kab. Ngawi	2005-2008	117	26.062,10	163	8.155,62	119	2.997,48	42	5.158,13	2	-	3.020,77
		2009	18	3.318,28	29	588,91	25	588,91	4	-	-	-	588,91
		2010	16	1.046,93	38	1.040,68	10	64,35	8	139,68	20	836,64	70,61
		2011	14	6.323,06	39	976,38	19	-	15	269,44	5	706,94	-
		Jumlah	165	36.750,39	269	10.761,59	173	3.650,75	69	5.567,26	27	1.543,58	3.680,29
246	Kab. Pacitan	2005-2008	85	11.105,37	134	1.240,17	130	534,69	4	705,47	-	-	833,37
		2009	18	428,44	23	428,44	23	428,44	-	-	-	-	428,44
		2010	34	1.842,32	47	1.840,42	46	1.766,56	1	73,85	-	-	1.766,56
		2011	15	311,76	32	62,62	-	-	-	-	32	62,62	-
		Jumlah	152	13.687,90	236	3.571,66	199	2.729,70	5	779,33	32	62,62	3.028,38
247	Kab. Pamekasan	2005-2008	75	7.402,68	115	2.902,31	94	2.516,71	9	385,59	12	-	2.418,65
		2009	34	4.014,76	64	3.259,47	50	1.384,87	13	1.648,89	1	225,70	1.384,87
		2010	15	3.369,52	32	3.024,52	23	349,41	9	2.675,11	-	-	349,41
		2011	9	236,98	18	236,98	-	-	-	-	18	236,98	-
		Jumlah	133	15.023,96	229	9.423,30	167	4.251,00	31	4.709,59	31	462,69	4.152,94
248	Kab. Pasuruan	2005-2008	175	66.707,01	319	41.617,56	303	12.281,04	16	29.336,52	-	-	12.700,29
		2009	28	1.534,22	62	736,21	61	736,21	1	-	-	-	736,21
		2010	31	322,74	61	48,13	58	48,13	3	-	-	-	305,14
		2011	13	115,87	29	115,87	1	9,71	-	-	28	106,15	9,71
		Jumlah	247	68.679,86	471	42.517,79	423	13.075,10	20	29.336,52	28	106,15	13.751,36
249	Kab. Ponorogo	2005-2008	135	8.180,63	209	4.301,83	204	3.892,25	5	409,57	-	-	3.892,25
		2009	29	826,12	55	814,18	54	751,28	1	62,90	-	-	751,28
		2010	42	12.005,46	87	6.767,19	49	6.767,19	38	-	-	-	6.767,19

Halaman 51 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	19	2.806,25	41	1.381,60	1	383,04	-	-	40	998,55	383,04
		Jumlah	225	23.818,48	392	13.264,81	308	11.793,78	44	472,47	40	998,55	11.793,78
250	Kab. Probolinggo	2005-2008	106	7.715,54	169	2.410,81	144	2.200,44	21	205,86	4	4,50	2.275,03
		2009	25	144,55	36	130,54	25	92,64	11	37,90	-	-	100,54
		2010	25	1.105,91	50	3,75	34	-	14	3,75	2	-	870,01
		2011	19	11.070,72	49	229,18	2	229,18	-	-	47	-	229,18
		Jumlah	175	20.036,73	304	2.774,29	205	2.522,27	46	247,52	53	4,50	3.474,77
251	Kab. Sampang	2005-2008	86	14.613,05	145	5.530,52	139	3.463,74	6	2.066,78	-	-	3.463,74
		2009	17	2.635,83	41	2.591,55	39	2.591,55	2	-	-	-	2.647,80
		2010	29	965,09	48	419,94	40	235,53	8	184,41	-	-	448,47
		2011	15	7.576,64	36	596,51	3	149,02	-	-	33	447,48	149,02
		Jumlah	147	25.790,63	270	9.138,54	221	6.439,85	16	2.251,19	33	447,48	6.709,04
252	Kab. Sidoarjo	2005-2008	137	6.136,15	209	4.675,28	194	3.774,85	11	900,42	4	-	4.636,47
		2009	31	18.173,78	52	7.726,03	44	5.359,03	8	2.367,00	-	-	5.359,03
		2010	35	18.763,87	83	2.974,01	53	2.792,60	30	181,41	-	-	2.792,60
		2011	21	3.192,17	51	-	-	-	-	-	51	-	-
		Jumlah	224	46.265,99	395	15.375,33	291	11.926,49	49	3.448,84	55	-	12.788,11
253	Kab. Situbondo	2005-2008	127	63.129,85	190	49.862,52	183	4.553,66	7	45.308,85	-	-	4.266,94
		2009	38	2.551,90	74	1.039,32	57	153,84	17	885,47	-	-	152,60
		2010	30	6.418,33	82	52,71	77	52,71	5	-	-	-	-
		2011	19	497,79	48	497,79	-	310,46	4	24,47	44	162,85	-
		Jumlah	214	72.597,89	394	51.452,34	317	5.070,68	33	46.218,80	44	162,85	4.419,54
254	Kab. Sumenep	2005-2008	81	12.479,61	128	6.835,55	63	2.701,42	46	2.724,95	19	1.409,17	2.701,42
		2009	14	231,82	24	231,82	20	126,13	4	105,68	-	-	126,13
		2010	25	484,81	45	188,98	28	141,99	10	16,21	7	30,77	192,79

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	9	40.846,60	22	-	-	-	-	-	22	-	-
		Jumlah	129	54.042,85	219	7.256,36	111	2.969,55	60	2.846,86	48	1.439,95	3.020,35
255	Kab. Trenggalek	2005-2008	112	25.375,13	188	2.221,61	185	1.180,58	3	1.041,02	-	-	1.180,58
		2009	21	180,33	34	180,33	29	37,24	5	143,08	-	-	37,24
		2010	50	1.810,81	90	1.684,28	48	295,17	27	1.389,10	15	-	292,15
		2011	21	2.635,95	51	107,47	14	59,84	37	47,63	-	-	59,84
		Jumlah	204	30.002,24	363	4.193,70	276	1.572,85	72	2.620,85	15	-	1.569,82
256	Kab. Tuban	2005-2008	110	198.765,51	182	3.319,85	174	1.833,60	8	1.486,24	-	-	2.968,94
		2009	28	213,36	39	101,34	38	42,43	1	58,91	-	-	-
		2010	12	5.950,84	25	3.124,16	23	1.556,11	2	1.568,04	-	-	1.556,11
		2011	13	11.656,68	34	11.273,82	18	757,72	15	10.491,65	1	24,44	678,55
		Jumlah	163	216.586,41	280	17.819,18	253	4.189,87	26	13.604,85	1	24,44	5.203,61
257	Kab. Tulungagung	2005-2008	138	5.786,70	223	4.806,26	218	4.564,97	3	241,28	2	-	4.904,05
		2009	26	1.822,44	42	1.710,31	42	1.710,31	-	-	-	-	1.710,31
		2010	38	3.314,27	71	1.018,84	69	1.018,84	2	-	-	-	1.018,84
		2011	14	4.447,26	32	4.351,25	2	242,75	-	-	30	4.108,50	-
		Jumlah	216	15.370,69	368	11.886,67	331	7.536,88	5	241,28	32	4.108,50	7.633,21
258	Kota Batu	2005-2008	149	20.331,06	239	19.130,85	186	3.351,19	32	15.760,73	21	18,92	3.421,04
		2009	32	1.519,09	56	375,59	39	220,00	14	155,59	3	-	246,31
		2010	40	3.836,75	84	420,57	42	35,73	31	316,37	11	68,46	403,78
		2011	21	20.695,52	58	10.606,86	-	-	-	-	58	10.606,86	-
		Jumlah	242	46.382,43	437	30.533,88	267	3.606,93	77	16.232,69	93	10.694,25	4.071,13
259	Kota Blitar	2005-2008	117	30.256,75	186	2.087,34	186	2.087,34	-	-	-	-	2.118,54
		2009	14	26.161,62	22	-	22	-	-	-	-	-	-
		2010	36	300,22	52	39,09	43	39,09	9	-	-	-	39,09

Halaman 53 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	16	3.668,81	25	165,99	19	148,15	6	17,84	-	-	148,15
		Jumlah	183	60.387,42	285	2.292,43	270	2.274,59	15	17,84	-	-	2.305,79
260	Kota Kediri	2005-2008	116	7.088,69	167	4.324,29	166	4.320,01	1	4,28	-	-	4.740,91
		2009	33	3.774,69	50	2.674,61	44	1.172,78	6	1.501,82	-	-	1.172,78
		2010	24	3.514,79	48	3.483,38	39	2.670,64	9	812,74	-	-	2.670,64
		2011	19	1.497,24	41	245,40	1	73,50	-	-	40	171,90	73,50
		Jumlah	192	15.875,43	306	10.727,70	250	8.236,93	16	2.318,85	40	171,90	8.657,84
261	Kota Madiun	2005-2008	108	8.132,92	178	3.512,53	172	3.261,14	5	79,69	1	171,69	2.685,30
		2009	34	1.747,93	59	738,13	57	599,37	2	138,76	-	-	599,37
		2010	19	1.829,99	39	1.829,99	33	708,78	6	1.121,20	-	-	708,78
		2011	14	370,54	27	-	-	-	-	-	27	-	-
		Jumlah	175	12.081,40	303	6.080,66	262	4.569,30	13	1.339,67	28	171,69	3.993,46
262	Kota Malang	2005-2008	123	29.534,64	149	25.234,82	147	22.535,67	2	2.699,15	-	-	19.439,58
		2009	20	1,44	24	1,44	24	1,44	-	-	-	-	1,44
		2010	31	2.657,92	46	6,97	43	6,97	3	-	-	-	1.057,18
		2011	21	1.013,78	40	891,54	-	-	-	-	40	891,54	-
		Jumlah	195	33.207,81	259	26.134,79	214	22.544,09	5	2.699,15	40	891,54	20.498,21
263	Kota Mojokerto	2005-2008	101	49.231,87	167	8.116,88	144	3.600,75	13	4.516,13	10	-	4.531,19
		2009	41	1.040,08	69	319,64	63	68,93	6	250,70	-	-	2,40
		2010	29	705,90	59	820,70	51	263,06	6	309,17	2	248,47	263,06
		2011	12	37,00	22	-	-	-	-	-	22	-	-
		Jumlah	183	51.014,86	317	9.257,23	258	3.932,75	25	5.076,01	34	248,47	4.796,66
264	Kota Pasuruan	2005-2008	172	15.910,35	313	10.401,31	237	6.202,09	58	4.153,34	18	45,87	6.202,09
		2009	45	7.443,93	100	6.062,41	73	4.047,49	27	2.014,91	-	-	4.047,49
		2010	31	390,91	65	261,01	48	34,93	17	226,07	-	-	34,93



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	19	12.209,72	45	612,44	28	118,16	17	494,28	-	-	118,16
		Jumlah	267	35.954,92	523	17.337,19	386	10.402,69	119	6.888,62	18	45,87	10.402,69
265	Kota Probolinggo	2005-2008	98	14.733,97	147	9.254,11	144	8.368,86	3	885,25	-	-	8.622,84
		2009	18	2.888,25	36	2.739,04	34	2.739,04	2	-	-	-	2.739,04
		2010	28	583,59	76	425,31	60	372,34	16	52,97	-	-	372,34
		2011	14	108,33	36	108,33	11	45,83	24	62,50	1	-	45,83
		Jumlah	158	18.314,16	295	12.526,80	249	11.526,07	45	1.000,73	1	-	11.780,05
266	Kota Surabaya	2005-2008	142	51.881,00	247	4.154,36	179	1.228,47	59	2.871,98	9	53,91	2.355,35
		2009	24	4.690,42	39	507,09	23	-	16	507,09	-	-	-
		2010	81	39.203,81	173	3.581,83	69	1.137,42	100	2.444,40	4	-	1.297,59
		2011	11	1.465,37	25	1.446,72	3	1.446,72	-	-	22	-	1.446,72
		Jumlah	258	97.240,62	484	9.690,01	274	3.812,61	175	5.823,48	35	53,91	5.099,66
267	Prov. Banten	2005-2008	172	28.105,78	312	26.583,08	211	14.749,74	51	3.409,60	50	8.423,73	16.400,82
		2009	61	17.040,45	140	16.199,61	61	7.538,61	63	8.661,00	16	-	8.379,45
		2010	23	6.579,92	46	6.579,92	29	6.551,44	5	-	12	28,48	6.551,44
		2011	31	4.654,72	55	3.643,83	-	-	-	-	55	3.643,83	983,25
		Jumlah	287	56.380,89	553	53.006,46	301	28.839,79	119	12.070,60	133	12.096,05	32.314,98
268	Kab. Lebak	2005-2008	107	14.724,01	197	13.202,16	124	2.343,19	61	7.165,28	12	3.693,68	2.416,51
		2009	16	1.048,41	45	1.159,26	38	878,40	6	280,85	1	-	878,40
		2010	27	1.968,96	56	1.865,11	46	898,08	9	898,78	1	68,24	957,97
		2011	21	1.452,33	28	1.452,33	-	-	-	-	28	1.452,33	-
		Jumlah	171	19.193,73	326	17.678,87	208	4.119,69	76	8.344,92	42	5.214,26	4.252,90
269	Kab. Pandeglang	2005-2008	169	22.626,25	310	22.651,75	242	15.331,76	67	7.137,04	1	182,95	10.589,60
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 55 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	169	22.626,25	310	22.651,75	242	15.331,76	67	7.137,04	1	182,95	10.589,60
270	Kab. Serang	2005-2008	154	46.661,43	286	41.533,12	211	8.358,60	70	31.884,74	5	1.289,76	9.252,36
		2009	31	96.095,05	68	2.209,00	28	473,50	37	329,22	3	1.406,26	473,50
		2010	43	66.097,88	94	848,14	31	28,01	24	820,13	39	-	28,01
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	228	208.854,37	448	44.590,26	270	8.860,12	131	33.034,10	47	2.696,03	9.753,88
271	Kab. Tangerang	2005-2008	258	129.521,26	444	30.745,60	393	15.059,14	31	15.357,06	20	329,38	17.551,10
		2009	53	7.226,53	108	5.732,68	79	2.697,32	21	3.035,36	8	-	3.832,36
		2010	15	49,71	28	49,71	24	48,91	4	0,80	-	-	48,91
		2011	29	2.855,92	49	2.442,32	-	-	-	-	49	2.442,32	-
		Jumlah	355	139.653,43	629	38.970,32	496	17.805,38	56	18.393,22	77	2.771,71	21.432,38
272	Kota Cilegon	2005-2008	158	43.265,06	306	33.627,20	257	23.157,11	48	9.388,39	1	1.081,69	21.157,05
		2009	22	1.277,64	38	1.233,34	32	1.232,71	6	USD 40,35	-	-	USD 409,14
		2010	22	4.455,05	62	4.455,05	29	1.395,30	33	3.059,74	-	-	92,64
		2011	24	618,55	35	618,55	6	390,37	29	228,17	-	-	2.727,04
		Jumlah	226	49.616,32	441	39.934,15	324	26.175,51	116	12.676,95	1	1.081,69	24.367,11
			-	USD 449,50	-	USD 449,50	-	USD 409,14	-	USD 40,35	-	-	USD 409,14
273	Kota Serang	2005-2008	1	1.360,00	2	1.360,00	1	750,00	1	610,00	-	-	750,00
		2009	24	89,03	55	78,30	51	78,30	3	-	1	-	89,03
		2010	21	261,79	47	248,33	31	171,34	15	76,98	1	-	183,88
		2011	26	514,61	39	492,77	4	366,27	-	-	35	126,50	366,27
		Jumlah	72	2.225,44	143	2.179,41	87	1.365,92	19	686,98	37	126,50	1.389,19
274	Kota Tangerang	2005-2008	117	5.958,94	176	3.584,89	169	2.849,05	5	735,83	2	-	5.097,05
		2009	50	3.172,33	89	2.091,50	62	1.730,28	16	361,21	11	-	2.754,29

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	13	2.504,92	35	1.319,66	26	530,79	7	769,51	2	19,35	948,47
		2011	20	1.163,89	22	264,88	-	-	-	-	22	264,88	899,01
		Jumlah	200	12.800,10	322	7.260,94	257	5.110,13	28	1.866,57	37	284,23	9.698,83
275	Kota Tangerang Selatan	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	19	3.038,50	35	554,10	33	554,10	2	-	-	-	554,10
		2011	26	1.396,37	48	1.338,82	-	-	-	-	48	1.338,82	-
		Jumlah	45	4.434,88	83	1.892,92	33	554,10	2	-	48	1.338,82	554,10
276	Prov. Bali	2005-2008	122	39.058,86	288	38.919,24	269	36.126,35	16	2.792,88	3	-	36.126,35
		2009	63	16.718,89	142	16.212,90	137	16.212,90	5	-	-	-	15.207,10
		2010	33	4.793,02	79	4.725,73	76	121,73	3	4.604,00	-	-	56,73
		2011	22	4.374,35	54	1.195,94	33	-	9	1.148,69	12	47,25	-
		Jumlah	240	64.945,15	563	61.053,82	515	52.460,99	33	8.545,57	15	47,25	51.390,19
277	Kab. Badung	2005-2008	107	125.489,55	192	121.723,30	176	50.807,23	16	70.916,07	-	-	51.585,10
		2009	28	29.823,75	78	20.318,17	68	8.853,04	10	11.465,13	-	-	8.853,04
		2010	36	1.551,16	85	990,41	84	990,41	1	-	-	-	990,41
		2011	19	-	36	-	32	-	4	-	-	-	-
		Jumlah	190	156.864,48	391	143.031,89	360	60.650,69	31	82.381,20	-	-	61.428,56
278	Kab. Bangli	2005-2008	77	34.650,55	137	11.522,44	118	9.930,97	16	1.591,46	3	-	1.042,92
		2009	55	46.542,88	108	1.137,53	77	716,17	25	421,35	6	-	716,17
		2010	12	15.100,78	34	280,55	21	33,12	5	247,42	8	-	33,12
		2011	19	381,50	55	72,64	32	-	23	72,64	-	-	-
		Jumlah	163	96.675,73	334	13.013,18	248	10.680,28	69	2.332,89	17	-	1.792,23
279	Kab. Buleleng	2005-2008	90	11.462,49	158	10.525,63	147	10.123,98	11	401,65	-	-	10.123,98
		2009	20	3.531,03	80	153,01	69	118,12	10	34,88	1	-	118,12
		2010	102	2.496,02	247	608,63	183	320,13	53	288,50	11	-	320,13

Halaman 57 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	30	29.609,34	122	316,55	57	-	65	316,55	-	-	-
		Jumlah	242	47.098,89	607	11.603,84	456	10.562,24	139	1.041,59	12	-	10.562,24
280	Kab. Gianyar	2005-2008	106	23.248,88	207	16.111,39	194	8.905,88	13	7.205,50	-	-	8.910,31
		2009	16	53,44	34	53,44	34	53,44	-	-	-	-	53,44
		2010	36	3.456,42	98	2.758,45	61	817,72	23	1.940,72	14	-	817,72
		2011	18	403,37	53	381,50	-	-	-	-	53	381,50	-
		Jumlah	176	27.162,12	392	19.304,79	289	9.777,05	36	9.146,23	67	381,50	9.781,49
281	Kab. Jembrana	2005-2008	75	18.998,36	133	6.858,62	119	5.471,12	13	1.387,49	1	-	3.880,95
		2009	21	16.572,37	37	15.634,00	26	1.749,37	10	13.884,63	1	-	1.749,37
		2010	44	4.276,80	112	2.251,91	66	564,56	29	1.687,34	17	-	556,53
		2011	21	1.753,05	48	1.091,82	25	-	13	1.091,82	10	-	-
		Jumlah	161	41.600,59	330	25.836,37	236	7.785,06	65	18.051,30	29	-	6.186,86
282	Kab. Karangasem	2005-2008	58	5.498,13	103	4.733,27	90	1.951,76	13	2.781,50	-	-	1.951,76
		2009	33	2.18,35	70	214,70	57	165,58	13	49,11	-	-	165,58
		2010	54	2.437,55	168	1.924,14	106	379,00	14	1.545,14	48	-	718,77
		2011	24	984,28	73	63,39	1	36,22	-	-	72	27,17	62,91
		Jumlah	169	9.138,33	414	6.935,52	254	2.532,58	40	4.375,76	120	27,17	2.899,04
283	Kab. Klungkung	2005-2008	58	3.755,02	98	3.708,07	85	869,34	12	2.838,73	1	-	869,34
		2009	16	255,83	37	205,85	35	194,40	2	11,45	-	-	244,38
		2010	22	894,84	57	768,33	43	520,02	13	248,30	1	-	646,54
		2011	17	1.108,09	50	574,24	35	146,00	14	428,24	1	-	269,08
		Jumlah	113	6.013,80	242	5.256,50	198	1.729,77	41	3.526,72	3	-	2.029,35
284	Kab. Tabanan	2005-2008	115	14.985,61	209	12.695,12	203	3.704,14	6	8.990,98	-	-	3.704,14
		2009	20	1.348,33	36	890,24	35	754,17	1	136,06	-	-	754,17
		2010	59	17.518,30	131	2.823,97	92	1.338,49	2	24,06	37	1.461,41	1.338,49

Halaman 58 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	21	3.250,11	52	33,27	41	5,07	11	28,19	-	-	5,07
		Jumlah	215	37.102,38	428	16.442,62	371	5.801,89	20	9.179,31	37	1.461,41	5.801,89
285	Kota Denpasar	2005-2008	131	137.875,79	254	33.361,10	238	19.294,24	15	14.066,86	1	-	19.290,18
		2009	57	14.055,60	113	10.469,60	99	9.200,68	14	1.268,92	-	-	9.218,69
		2010	39	11.015,07	82	10.010,91	77	9.403,84	5	607,07	-	-	103,99
		2011	22	3.715,17	68	1.114,92	49	-	19	1.114,92	-	-	-
		Jumlah	249	166.661,65	517	54.956,55	463	37.898,76	53	17.057,78	1	-	28.612,87
286	Prov. Nusa Tenggara Barat	2005-2008	161	57.945,38	303	57.696,41	96	15.560,97	39	27.880,58	168	14.254,85	15.560,97
		2009	23	3.878,71	52	3.878,71	18	211,42	11	3.667,29	23	-	211,42
		2010	56	8.695,99	123	7.661,28	16	1.303,75	13	1.496,04	94	4.861,48	1.303,75
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	240	70.520,10	478	69.236,41	130	17.076,15	63	33.043,92	285	19.116,33	17.076,15
287	Kab. Bima	2005-2008	42	577,45	58	577,45	47	219,65	8	142,71	3	215,07	149,82
		2009	14	247,54	23	247,54	13	66,50	9	181,03	1	-	66,50
		2010	15	126,68	27	126,68	-	-	-	-	27	126,68	-
		2011	14	9,43	20	9,43	-	-	-	-	20	9,43	-
		Jumlah	85	961,11	128	961,11	60	286,15	17	323,75	51	351,20	216,32
288	Kab. Dompu	2005-2008	54	4.120,41	89	4.120,41	14	1.096,78	20	2.588,67	55	434,96	1.096,78
		2009	34	2.152,15	85	2.152,15	38	220,96	6	1.780,06	41	151,12	220,96
		2010	15	227,66	25	227,66	9	15,26	7	134,39	9	78,00	15,26
		2011	15	190,31	27	190,31	-	-	-	-	27	190,31	15,26
		Jumlah	118	6.690,55	226	6.690,55	61	1.333,01	33	4.503,13	132	854,40	1.348,27
289	Kab. Lombok Barat	2005-2008	63	4.356,20	116	4.303,84	63	286,43	21	3.843,30	32	174,11	174,74
		2009	14	1.542,12	31	755,07	15	58,70	13	694,95	3	1,42	20,83
		2010	61	1.641,45	113	1.641,45	1	-	11	755,94	101	885,50	-

Halaman 59 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	16	9.804,20	35	211,94	-	-	-	-	35	211,94	-
		Jumlah	154	17.343,99	295	6.912,32	79	345,13	45	5.294,20	171	1.272,98	195,58
290	Kab. Lombok Tengah	2005-2008	74	7.282,69	131	7.282,69	37	3.601,26	11	917,89	83	2.763,53	3.601,26
		2009	40	26.617,78	81	21.931,54	29	21.586,85	25	70,49	27	274,19	21.586,85
		2010	39	3.610,92	89	3.610,92	32	43,31	3	225,55	54	3.342,05	43,31
		2011	14	127,54	27	127,54	-	-	-	-	27	127,54	-
		Jumlah	167	37.638,94	328	32.952,70	98	25.231,43	39	1.213,94	191	6.507,33	25.231,43
291	Kab. Lombok Timur	2005-2008	67	2.122,70	128	2.122,70	58	1.241,31	37	837,40	33	43,97	1.241,31
		2009	21	673,94	47	673,94	3	12,50	3	114,35	41	547,09	12,50
		2010	40	69,44	94	69,44	2	-	5	-	87	69,44	-
		2011	14	920,73	28	920,67	-	1,55	1	316,50	27	602,61	1,55
		Jumlah	142	3.786,83	297	3.786,77	63	1.255,37	46	1.268,25	188	1.263,14	1.255,37
292	Kab. Sumbawa	2005-2008	49	1.509,94	82	1.086,61	47	774,29	24	312,32	11	-	774,29
		2009	19	1.413,00	39	1.131,43	30	25,90	9	1.105,53	-	-	25,90
		2010	13	626,72	22	201,66	7	65,00	13	136,66	2	-	65,00
		2011	17	1.415,55	21	1.415,55	-	33,34	1	9,40	20	1.372,81	33,34
		Jumlah	98	4.965,23	164	3.835,27	84	898,54	47	1.563,91	33	1.372,81	898,54
293	Kab. Sumbawa Barat	2005-2008	36	392,48	66	369,99	42	183,68	20	186,30	4	-	142,98
		2009	36	1.614,06	96	1.254,46	63	657,89	27	596,57	6	-	657,89
		2010	32	359,46	62	287,46	19	-	41	287,46	2	-	-
		2011	14	24.913,80	22	24.820,40	-	-	-	-	22	24.820,40	-
		Jumlah	118	27.279,82	246	26.732,33	124	841,57	88	1.070,34	34	24.820,40	800,87
294	Kab. Lombok Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	234,79	32	163,78	14	135,62	13	28,16	5	-	135,62

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	234,79	32	163,78	14	135,62	13	28,16	5	-	135,62
295	Kota Bima	2005-2008	78	38.683,69	153	38.237,89	24	1.255,90	42	12.868,65	87	24.113,34	1.255,90
		2009	16	2.638,43	34	2.638,43	19	-	15	2.638,43	-	-	-
		2010	24	1.225,50	46	1.225,50	-	-	-	-	46	1.225,50	-
		2011	18	2.303,11	35	2.253,29	1	13,40	1	1,30	33	2.238,59	13,40
		Jumlah	136	44.850,74	268	44.355,12	44	1.269,30	58	15.508,38	166	27.577,43	1.269,30
296	Kota Mataram	2005-2008	70	1.405,49	108	710,54	81	349,57	17	360,97	10	-	349,57
		2009	16	219,74	31	219,74	20	110,02	4	109,72	7	-	110,02
		2010	69	1.274,18	158	888,61	49	156,42	12	414,01	97	318,17	156,42
		2011	16	7.765,20	33	459,42	-	-	-	-	33	459,42	-
		Jumlah	171	10.664,63	330	2.278,34	150	616,01	33	884,71	147	777,60	616,01
297	Prov. Nusa Tenggara Timur	2005-2008	132	59.084,22	248	36.572,93	139	2.901,95	44	5.858,40	65	27.812,57	2.901,95
		2009	43	2.009,42	76	1.476,90	51	36,96	11	1.169,42	14	270,51	36,96
		2010	81	9.021,14	154	8.166,86	77	-	12	1.077,62	65	7.089,23	-
		2011	9	1.572,61	30	1.572,61	-	-	-	-	30	1.572,61	-
		Jumlah	265	71.687,41	508	47.789,31	267	2.938,91	67	8.105,46	174	36.744,93	2.938,91
298	Kab. Alor	2005-2008	55	16.612,86	114	12.412,33	93	8.021,01	17	4.391,32	4	-	8.021,01
		2009	27	10.324,03	55	19.057,11	28	1.148,60	22	17.908,50	5	-	1.096,66
		2010	35	1.054,60	79	558,40	39	-	9	438,46	31	119,94	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	117	27.991,50	248	32.027,85	160	9.169,62	48	22.738,28	40	119,94	9.117,67
299	Kab. Belu	2005-2008	48	3.974,12	92	6.283,31	70	5.113,77	10	840,97	12	328,56	5.113,77
		2009	29	1.063,30	62	1.063,30	25	63,40	34	999,89	3	-	63,40
		2010	56	2.130,84	149	1.986,78	60	66,19	31	1.299,59	58	620,99	66,19

**Halaman 61 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2011	20	28,16	49	14,41	-	-	-	-	49	14,41	-		
		Jumlah	153	7.196,43	352	9.347,81	155	5.243,36	75	3.140,47	122	963,97	5.243,36		
300	Kab. Ende	2005-2008	63	6.092,17	128	1.858,88	88	402,78	19	1.357,96	21	98,13	565,78		
		2009	15	4.646,86	23	4.575,86	-	10,00	1	2.013,05	22	2.552,80	10,00		
		2010	36	1.404,49	81	1.004,49	19	-	9	805,76	53	198,72	-		
		2011	24	5.384,00	84	4.568,50	-	-	-	-	84	4.568,50	-		
		Jumlah	138	17.527,53	316	12.007,75	107	412,78	29	4.176,79	180	7.418,17	575,78		
301	Kab. Flores Timur	2005-2008	70	28.555,14	128	26.775,07	25	1.320,68	13	1.311,61	90	24.142,78	1.320,68		
		2009	21	44.977,79	49	1.095,34	15	36,94	15	159,98	19	898,40	36,94		
		2010	23	50.266,75	56	1.205,13	19	67,37	31	1.137,75	6	-	67,37		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	114	123.799,69	233	29.075,55	59	1.425,00	59	2.609,35	115	25.041,19	1.425,00		
302	Kab. Kupang	2005-2008	91	6.607,78	181	1.117,76	109	531,12	23	322,36	49	264,27	531,12		
		2009	47	792,18	114	792,18	17	29,07	27	730,99	70	32,11	29,07		
		2010	36	565,80	75	565,80	25	5,37	14	285,56	36	274,86	14,77		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	174	7.965,77	370	2.475,75	151	565,57	64	1.338,91	155	571,25	574,97		
303	Kab. Lembata	2005-2008	75	7.793,38	145	6.888,13	104	929,34	24	5.747,51	17	211,28	929,34		
		2009	14	1.807,91	23	1.340,31	17	-	6	1.340,31	-	-	-		
		2010	40	7.835,27	113	4.104,85	48	42,84	58	4.062,00	7	-	42,84		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	129	17.436,58	281	12.333,31	169	972,19	88	11.149,83	24	211,28	972,19		
304	Kab. Manggarai	2005-2008	65	5.177,85	116	2.349,34	72	1.935,38	18	413,95	26	-	1.939,27		
		2009	33	1.088,75	83	1.088,75	50	146,38	26	552,36	7	390,00	146,38		
		2010	18	2.689,82	42	2.374,04	11	239,82	14	-	17	2.134,21	239,82		



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	116	8.956,43	241	5.812,13	133	2.321,60	58	966,32	50	2.524,21	2.325,49
305	Kab. Manggarai Barat	2005-2008	90	9.196,58	172	8.728,54	33	3.370,63	27	2.969,51	112	2.388,39	3.370,63
		2009	28	1.033,08	53	1.033,08	49	399,70	3	633,38	1	-	399,70
		2010	27	1.937,21	49	1.937,21	13	94,91	6	971,79	30	870,50	94,91
		2011	21	669,96	53	669,96	-	-	-	-	53	669,96	-
		Jumlah	166	12.836,85	327	12.368,81	95	3.865,24	36	4.574,69	196	3.928,86	3.865,24
306	Kab. Manggarai Timur	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	4.612,18	93	4.564,86	29	33,18	26	2.937,01	38	1.594,66	41,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	30	4.612,18	93	4.564,86	29	33,18	26	2.937,01	38	1.594,66	41,84
307	Kab. Sabu Raijua	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	250,33	39	250,33	-	-	-	-	39	250,33	-
		Jumlah	18	250,33	39	250,33	-	-	-	-	39	250,33	-
308	Kab. Nagekeo	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	17	1.845,71	30	1.087,57	23	47,16	6	1.040,41	1	47,16	47,16
		2010	26	4.709,42	47	2.053,58	14	13,00	20	32,97	13	2.007,61	13,00
		2011	14	1.919,99	59	1.651,58	-	-	-	-	59	1.651,58	-
		Jumlah	57	8.475,13	136	4.792,75	37	60,16	26	1.073,38	73	3.659,20	60,16
309	Kab. Ngada	2005-2008	71	4.919,14	132	3.671,43	109	2.800,32	19	857,87	4	13,23	1.793,48
		2009	14	136,22	28	136,22	26	120,61	2	15,61	-	-	120,61
		2010	21	7.403,19	59	7.403,19	27	6.409,19	16	994,00	16	-	263,97

**Halaman 63 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	11	2.543,78	38	2.328,12	-	-	-	-	38	2.328,12	-
		Jumlah	117	15.002,33	257	13.538,96	162	9.330,12	37	1.867,48	58	2.341,35	2.178,07
310	Kab. Rote Ndao	2005-2008	50	3.708,07	85	2.938,73	33	813,62	16	1.261,85	36	863,25	813,62
		2009	16	5.098,88	28	1.617,94	14	531,85	4	158,86	10	927,22	531,85
		2010	25	28.888,29	54	487,92	16	-	6	344,75	32	143,17	-
		2011	28	2.348,07	83	2.348,07	-	-	-	-	83	2.348,07	-
		Jumlah	119	40.043,33	250	7.392,68	63	1.345,47	26	1.765,47	161	4.281,72	1.345,47
311	Kab. Sikka	2005-2008	59	7.946,74	113	7.426,30	19	544,97	7	1.005,66	87	5.875,66	544,97
		2009	25	7.768,93	46	7.768,93	13	-	15	7.169,29	18	599,63	7.820,43
		2010	41	521,88	90	521,88	27	21,40	13	68,70	50	431,77	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	125	16.237,55	249	15.717,11	59	566,38	35	8.243,66	155	6.907,07	8.365,41
312	Kab. Sumba Barat	2005-2008	57	3.556,83	110	1.731,03	92	674,55	16	1.056,48	2	-	674,55
		2009	37	1.286,05	85	1.282,58	63	1.029,80	22	252,78	-	-	1.029,80
		2010	36	3.206,09	72	783,93	42	518,03	27	265,89	3	-	518,03
		2011	22	141,49	46	141,49	-	-	-	-	46	141,49	-
		Jumlah	152	8.190,49	313	3.939,05	197	2.222,39	65	1.575,16	51	141,49	2.222,39
313	Kab. Sumba Barat Daya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	62,35	24	36,98	9	36,98	4	-	11	-	21,68
		2010	22	626,93	45	600,57	36	334,59	4	265,97	5	-	504,59
		2011	17	1.994,46	34	1.974,96	-	-	-	-	34	1.974,96	-
		Jumlah	53	2.683,75	103	2.612,51	45	371,58	8	265,97	50	1.974,96	526,27
314	Kab. Sumba Tengah	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	23	5.754,56	46	680,90	23	0,78	19	680,12	4	-	0,78
		2010	26	7.044,42	62	6.206,24	21	2,46	17	231,22	24	5.972,55	2,46

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	18	644,72	50	73,91	-	-	-	-	50	73,91	-
		Jumlah	67	13.443,72	158	6.961,06	44	3,24	36	911,35	78	6.046,46	3,24
315	Kab. Sumba Timur	2005-2008	71	9.336,84	125	4.223,15	119	2.319,68	6	1.896,47	-	7,00	4.691,48
		2009	66	2.397,94	143	1.559,28	88	1.084,06	31	475,21	24	-	1.930,82
		2010	38	2.080,86	88	2.080,86	34	4,05	7	69,33	47	2.007,46	161,35
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	175	13.815,64	356	7.863,29	241	3.407,80	44	2.441,02	71	2.014,46	6.783,66
316	Kab. Timor Tengah Selatan	2005-2008	102	415.951,47	192	18.528,27	75	1.313,47	28	2.777,44	89	14.437,36	1.313,47
		2009	42	94.952,39	73	4.763,77	13	185,02	9	570,48	51	4.008,25	185,02
		2010	27	20.860,58	54	2.859,79	19	15,71	11	2.626,69	24	217,37	15,71
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	171	531.764,45	319	26.151,84	107	1.514,22	48	5.974,62	164	18.662,99	1.514,22
317	Kab. Timor Tengah Utara	2005-2008	67	5.171,82	110	3.798,21	16	922,51	21	1.557,78	73	1.317,91	922,51
		2009	15	908,07	31	908,07	1	174,98	3	553,38	27	179,70	174,98
		2010	32	2.708,39	81	2.132,18	-	5,22	1	84,71	80	2.042,24	5,22
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	114	8.788,29	222	6.838,47	17	1.102,72	25	2.195,89	180	3.539,85	1.102,72
318	Kota Kupang	2005-2008	85	13.642,66	152	12.517,74	118	2.765,21	18	9.008,32	16	744,20	2.818,94
		2009	26	320,23	39	247,33	33	-	5	247,33	1	-	-
		2010	35	3.606,98	71	1.915,01	13	-	7	827,90	51	1.087,10	-
		2011	11	568,14	33	568,14	-	-	-	-	33	568,14	-
		Jumlah	157	18.138,02	295	15.248,23	164	2.765,21	30	10.083,56	101	2.399,45	2.818,94
319	Prov. Kalimantan Barat	2005-2008	201	112.971,11	427	65.066,62	276	13.083,89	111	48.123,89	40	3.858,83	13.083,89
		2009	84	142.826,59	217	90.037,23	60	3.903,06	93	30.909,21	64	55.224,95	3.903,06
		2010	77	595.100,86	147	163.801,97	33	1.281,91	40	161.988,33	74	531,72	1.281,91

Halaman 65 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	20	48.972,16	34	318,30	-	-	-	-	34	318,30	-
		Jumlah	382	899.870,74	825	319.224,14	369	18.268,87	244	241.021,43	212	59.933,82	18.268,87
320	Kab. Bengkayang	2005-2008	100	460.188,26	219	220.604,07	144	137.056,57	69	72.815,28	6	10.732,21	3.041,09
		2009	29	1.905.291,85	62	4.537,60	31	2.123,27	26	2.414,32	5	-	137,14
		2010	12	1.210.026,39	30	6.608,87	16	2.476,61	13	4.132,26	1	-	546,30
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	141	3.575.506,52	311	231.750,54	191	141.656,46	108	79.361,87	12	10.732,21	3.724,54
321	Kab. Kapuas Hulu	2005-2008	80	1.267.533,93	152	6.816,22	124	4.687,39	28	2.128,83	-	-	4.687,39
		2009	70	1.453.683,67	120	6.915,97	89	6.133,26	31	782,70	-	-	6.133,26
		2010	18	3.052.133,47	35	1.099,61	22	402,22	13	697,39	-	-	402,22
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	168	5.773.351,08	307	14.831,81	235	11.222,87	72	3.608,93	-	-	11.222,87
322	Kab. Kayong Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	43	89.039,89	115	21.443,33	67	653,32	44	20.790,01	4	-	450,05
		2010	32	85.505,33	78	73.974,13	53	525,96	25	73.448,16	-	-	2.646,33
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	75	174.545,23	193	95.417,46	120	1.179,28	69	94.238,17	4	-	3.096,39
323	Kab. Ketapang	2005-2008	67	2.185.825,38	119	46.440,62	68	18.686,58	41	17.485,53	10	10.268,50	7.386,13
		2009	59	2.830.161,91	122	6.901,86	32	961,94	45	2.688,13	45	3.251,77	481,88
		2010	37	433.260,31	100	1.383,25	23	367,81	31	732,75	46	282,69	641,78
		2011	11	628,25	30	-	-	-	-	-	30	-	-
		Jumlah	174	5.449.875,88	371	54.725,74	123	20.016,34	117	20.906,43	131	13.802,97	8.509,80
324	Kab. Kubu Raya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	27	36.023,18	56	889,76	55	889,76	1	-	-	-	889,76

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	17	38,86	28	38,86	14	38,86	14	-	-	-	38,86
		Jumlah	44	36.062,05	84	928,63	69	928,63	15	-	-	-	928,63
325	Kab. Landak	2005-2008	84	79.695,65	173	5.561,36	146	2.654,39	26	2.906,97	1	-	912,48
		2009	33	1.887,28	72	1.887,28	48	1.407,43	16	479,85	8	-	1.703,40
		2010	20	1.561.804,74	42	5.251,59	22	366,04	20	4.885,55	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	137	1.643.387,68	287	12.700,24	216	4.427,87	62	8.272,37	9	-	2.615,89
326	Kab. Melawi	2005-2008	99	27.808,00	188	26.887,38	70	4.655,68	70	17.087,52	48	5.144,17	4.655,68
		2009	29	2.699,31	56	1.109,39	21	30,66	12	998,70	23	80,02	30,66
		2010	29	2.258,57	60	2.258,57	4	29,27	1	42,41	55	2.186,89	29,27
		2011	22	4.622,79	44	4.622,79	-	-	-	-	44	4.622,79	-
		Jumlah	179	37.388,69	348	34.878,15	95	4.715,61	83	18.128,64	170	12.033,89	4.715,61
327	Kab. Pontianak	2005-2008	38	7.121,06	82	7.121,06	62	42,03	19	7.079,03	1	-	42,03
		2009	36	1.552,08	78	859,02	60	105,66	13	753,35	5	-	105,66
		2010	23	1.946,18	51	1.946,18	35	126,12	11	1.820,06	5	-	126,12
		2011	14	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-
		Jumlah	111	10.619,34	236	9.926,27	157	273,82	43	9.652,45	36	-	273,82
328	Kab. Sambas	2005-2008	68	18.716,80	120	1.359,85	108	851,72	12	508,13	-	-	826,30
		2009	29	7.110,09	61	46,54	58	46,54	3	-	-	-	-
		2010	16	2.851,78	33	107,00	25	27,00	8	80,00	-	-	27,00
		2011	20	1.721,35	34	359,26	25	359,26	5	-	4	-	359,26
		Jumlah	133	30.400,04	248	1.872,67	216	1.284,54	28	588,13	4	-	1.212,57
329	Kab. Sanggau	2005-2008	60	6.780,01	110	6.383,55	66	3.621,02	37	2.762,53	7	-	3.627,56
		2009	45	726,20	81	726,20	25	77,30	50	648,90	6	-	77,30
		2010	37	6.053,20	100	4.217,23	55	205,60	43	3.174,55	2	837,07	205,60

Halaman 67 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	18	1.022,47	38	1.022,47	-	-	-	-	38	1.022,47	-
		Jumlah	160	14.581,89	329	12.349,47	146	3.903,92	130	6.585,99	53	1.859,55	3.910,47
330	Kab. Sekadau	2005-2008	56	439.133,57	108	5.797,41	77	1.306,17	26	4.491,24	5	-	1.306,17
		2009	63	727.562,61	161	4.821,42	136	3.181,07	23	1.535,47	2	104,88	3.181,07
		2010	30	805.118,69	60	3.533,61	38	584,57	16	1.346,48	6	1.602,55	584,57
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	149	1.971.814,88	329	14.152,45	251	5.071,82	65	7.373,20	13	1.707,43	5.071,82
331	Kab. Sintang	2005-2008	117	802.449,39	218	50.857,34	150	17.342,82	65	33.514,52	3	-	2.430,21
		2009	28	1.257.525,31	59	3.676,73	35	289,56	23	3.387,16	1	-	-
		2010	25	1.395.446,24	46	7.948,14	32	4.923,14	14	3.024,99	-	-	79,52
		2011	14	13.935,92	36	7.837,43	1	24,67	-	-	35	7.812,76	-
		Jumlah	184	3.469.356,88	359	70.319,65	218	22.580,20	102	39.926,68	39	7.812,76	2.509,73
332	Kota Pontianak	2005-2008	104	37.506,24	181	9.064,95	85	2.283,41	89	6.781,54	7	-	2.283,41
		2009	70	61.414,89	136	40.586,34	66	257,83	54	39.578,36	16	750,14	257,83
		2010	25	2.211.786,73	44	3.899,83	16	389,68	21	3.510,14	7	-	389,68
		2011	9	68.117,56	20	11.984,56	8	173,00	12	11.811,55	-	-	173,00
		Jumlah	208	2.378.825,43	381	65.535,70	175	3.103,94	176	61.681,62	30	750,14	3.103,94
333	Kota Singkawang	2005-2008	62	165.193,57	100	17.918,29	89	9.999,95	7	7.904,70	4	13,63	2.557,10
		2009	50	960.046,03	96	4.283,63	67	402,00	11	2.665,81	18	1.215,82	1.010,31
		2010	40	992.986,26	45	2.038,12	33	565,69	9	1.258,55	3	213,87	295,70
		2011	12	4.203,49	32	4.203,49	-	-	-	-	32	4.203,49	252,49
		Jumlah	164	2.122.429,37	273	28.443,55	189	10.967,65	27	11.829,07	57	5.646,82	4.115,62
334	Prov. Kalimantan Tengah	2005-2008	160	330.651,01	313	35.560,46	232	19.730,27	75	15.830,19	6	-	19.680,98
		2009	64	344.681,79	112	11.935,61	70	10.446,24	42	1.489,37	-	-	10.819,87
		2010	64	555.315,44	154	7.580,50	111	6.631,34	32	916,63	11	32,51	6.631,34

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	28	6.796,30	79	6.796,30	-	-	-	-	79	6.796,30	-
		Jumlah	316	1.237.444,55	658	61.872,88	413	36.807,86	149	18.236,19	96	6.828,82	37.132,21
335	Kab. Barito Selatan	2005-2008	111	74.062,65	203	12.902,52	96	1.728,65	31	5.042,82	76	6.131,05	1.670,43
		2009	55	29.004,35	114	29.004,35	90	22.015,51	24	6.988,84	-	-	-
		2010	33	372.042,45	81	372.042,45	66	61.935,47	15	310.106,98	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	199	475.109,47	398	413.949,34	252	85.679,63	70	322.138,65	76	6.131,05	1.670,43
336	Kab. Barito Timur	2005-2008	85	329.324,52	190	9.774,43	102	5.125,04	34	4.226,56	54	422,83	5.125,04
		2009	55	54.259,27	63	54.259,27	42	44.980,58	8	4.768,81	13	4.509,87	-
		2010	29	17.818,91	77	17.818,91	31	8.262,43	25	7.474,68	21	2.081,79	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	169	401.402,71	330	81.852,63	175	58.368,05	67	16.470,07	88	7.014,50	5.125,04
337	Kab. Barito Utara	2005-2008	134	174.178,44	199	25.479,94	148	3.898,70	33	21.554,99	18	26,25	3.898,70
		2009	55	61.622,25	117	61.622,25	77	17.379,65	24	30.450,13	16	13.792,46	-
		2010	25	30.035,44	73	30.035,44	59	28.690,10	8	1.345,34	6	-	-
		2011	21	26.669,02	59	1.195,97	-	-	-	-	59	1.195,97	-
		Jumlah	235	292.505,17	448	118.333,62	284	49.968,45	65	53.350,48	99	15.014,68	3.898,70
338	Kab. Gunung Mas	2005-2008	91	118.595,26	141	5.983,63	117	4.462,88	24	1.520,74	-	-	4.462,88
		2009	42	145.534,31	93	145.534,31	78	141.328,95	11	991,95	4	3.213,40	-
		2010	43	33.512,97	114	28.512,07	43	25.981,38	12	1.851,13	59	679,55	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	176	297.642,55	348	180.030,01	238	171.773,22	47	4.363,83	63	3.892,96	4.462,88
339	Kab. Kapuas	2005-2008	108	70.340,44	192	5.776,13	176	2.002,68	15	3.773,44	1	-	2.002,68
		2009	65	2.959,77	141	725,74	131	494,94	10	230,80	-	-	-
		2010	31	11.421,74	80	49,46	37	12,94	-	-	43	36,51	-

**Halaman 69 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	12	9.947,14	31	-	-	-	-	-	31	-	-
		Jumlah	216	94.669,10	444	6.551,34	344	2.510,57	25	4.004,25	75	36,51	2.002,68
340	Kab. Katingan	2005-2008	94	1.065.021,31	174	79.916,80	118	3.290,11	50	76.583,43	6	43,25	3.293,70
		2009	36	43.390,25	86	43.390,25	36	3.574,17	29	23.047,53	21	16.768,54	-
		2010	32	38.308,72	82	38.308,72	49	32.322,80	26	5.975,19	7	10,72	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	162	1.146.720,28	342	161.615,78	203	39.187,09	105	105.606,17	34	16.822,52	3.293,70
341	Kab. Kotawaringin Barat	2005-2008	158	271.768,06	229	24.804,88	220	18.406,95	6	6.397,93	3	-	17.471,19
		2009	69	115.742,05	140	29.049,03	131	15.240,55	7	13.808,47	2	-	15.240,55
		2010	56	173.966,44	137	1.116,15	119	375,05	17	555,91	1	185,18	375,05
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	283	561.476,56	506	54.970,07	470	34.022,56	30	20.762,32	6	185,18	33.086,81
342	Kab. Kotawaringin Timur	2005-2008	116	268.290,29	219	23.505,71	159	2.534,79	53	20.970,92	7	-	2.649,04
		2009	36	170.422,34	91	5.784,46	66	758,07	25	5.026,39	-	-	758,07
		2010	65	14.304,69	149	12.177,43	49	4.593,99	72	7.065,87	28	517,55	4.593,99
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	217	453.017,32	459	41.467,61	274	7.886,85	150	33.063,19	35	517,55	8.001,11
343	Kab. Lamandau	2005-2008	103	241.958,42	200	48.831,21	149	1.570,82	29	42.733,41	22	4.526,97	1.607,45
		2009	30	28.124,93	76	574,34	75	574,34	1	-	-	-	574,34
		2010	22	11.239,33	45	960,81	30	940,81	15	20,00	-	-	1.454,72
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	155	281.322,69	321	50.366,38	254	3.085,98	45	42.753,41	22	4.526,97	3.636,52
344	Kab. Murung Raya	2005-2008	98	122.231,77	181	9.399,68	137	5.556,87	29	3.842,80	15	-	5.035,52
		2009	35	29.822,47	109	29.822,47	67	7.093,98	19	10.199,96	23	12.528,52	-
		2010	31	36.154,58	101	36.154,58	74	22.185,68	22	5.335,50	5	8.633,39	-



Halaman 70 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	164	188.208,83	391	75.376,74	278	34.836,54	70	19.378,28	43	21.161,92	5.035,52
345	Kab. Pulang Pisau	2005-2008	93	127.755,04	149	5.070,30	109	168,75	29	4.415,49	11	486,05	168,75
		2009	58	19.350,28	114	19.350,28	68	13.872,15	34	3.993,00	12	1.485,11	-
		2010	38	18.821,50	82	18.821,50	32	14.183,17	19	4.235,16	31	403,16	-
		2011	13	10.290,33	30	302,79	-	-	-	-	30	302,79	65,63
		Jumlah	202	176.217,17	375	43.544,88	209	28.224,08	82	12.643,67	84	2.677,12	234,38
346	Kab. Seruyan	2005-2008	113	585.622,32	209	4.463,42	147	2.942,98	41	1.517,83	21	2,60	3.056,52
		2009	40	111.655,02	102	5.579,07	28	1.391,51	67	3.990	7	197,79	7.062,32
		2010	37	69.642,70	127	14.885,05	5	4.111,96	6	238,16	116	10.534,93	9.160,05
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	190	766.920,05	438	24.927,55	180	8.446,45	114	5.745,77	144	10.735,32	19.278,91
347	Kab. Sukamara	2005-2008	83	150.559,41	166	2.599,87	113	1.822,42	31	777,44	22	-	1.997,82
		2009	35	77.520,91	61	3.402,11	34	1.115,15	17	2.286,96	10	-	1.115,15
		2010	24	28.465,05	62	5.326,38	6	104,64	48	5.007,39	8	214,35	104,64
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	142	256.545,38	289	11.328,37	153	3.042,21	96	8.071,80	40	214,35	3.217,61
348	Kota Palangkaraya	2005-2008	144	108.219,00	270	11.628,81	145	9.675,81	67	1.779,65	58	173,34	9.746,13
		2009	31	11.968,76	64	-	23	-	8	-	33	-	-
		2010	36	91.095,94	108	13.605,32	25	397,80	58	13.207,52	25	-	397,80
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	211	211.283,70	442	25.234,14	193	10.073,62	133	14.987,17	116	173,34	10.143,93
349	Prov. Kalimantan Selatan	2005-2008	208	15.656,36	358	15.656,56	240	6.441,27	89	9.025,29	29	190,00	6.441,27
		2009	44	6.171,11	70	6.178,01	47	5.988,71	23	189,30	-	-	5.988,71
		2010	57	9.010,06	113	9.010,06	45	7.236,15	44	630,02	24	1.143,88	7.236,15
		2011	25	4.624,95	55	4.624,95	-	216,53	-	-	55	4.408,42	216,53
		Jumlah	334	35.462,49	596	35.469,59	332	19.882,67	156	9.844,61	108	5.742,30	19.882,67

## Halaman 71 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
350	Kab. Balangan	2005-2008	94	2.650,14	154	2.750,14	138	2.688,10	15	62,04	1	-	2.688,10
		2009	42	18.468,96	77	18.468,96	68	41,24	9	10.050,31	-	-	8.377,39
		2010	15	73.147,91	35	73.147,91	20	256,67	15	72.891,23	-	-	256,67
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	151	94.267,02	266	94.367,02	226	2.986,02	39	83.003,59	1	8.377,39	2.986,02
351	Kab. Banjar	2005-2008	136	12.484,20	249	12.484,20	175	6.431,60	47	4.136,10	27	1.916,50	6.431,60
		2009	24	8.842,17	32	8.842,17	25	1.930,52	6	1.015,01	1	5.896,63	1.930,52
		2010	36	19.849,65	68	19.849,65	37	28,00	19	19.778,38	12	43,26	28,00
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	196	41.176,03	349	41.176,03	237	8.390,12	72	24.929,50	40	7.856,40	8.390,12
352	Kab. Barito Kuala	2005-2008	74	9.615,62	134	9.615,62	115	7.571,56	19	2.044,05	-	-	7.571,56
		2009	13	1.709,72	21	1.709,72	17	-	4	205,98	-	-	1.503,74
		2010	29	4.059,35	61	4.059,35	34	103,69	23	1.531,36	4	2.424,30	103,69
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	116	15.384,71	216	15.384,71	166	7.675,26	46	3.781,39	4	3.928,04	7.675,26
353	Kab. Hulu Sungai Selatan	2005-2008	86	1.256,81	129	1.256,81	101	545,99	28	710,81	-	-	545,99
		2009	11	3.847,89	22	3.847,89	17	105,46	4	2.629,69	1	1.112,74	105,46
		2010	20	422,67	29	422,67	2	-	1	96,81	26	325,86	-
		2011	13	113,87	30	113,87	-	113,87	-	-	30	-	113,87
		Jumlah	130	5.641,26	210	5.641,26	120	765,33	33	3.437,32	57	1.438,60	765,33
354	Kab. Hulu Sungai Tengah	2005-2008	110	2.340,08	171	2.340,08	142	845,12	29	1.494,95	-	-	845,12
		2009	12	1.865,89	18	1.865,89	16	1.528,75	2	276,83	-	-	1.528,75
		2010	23	236,49	35	236,49	17	75,36	5	-	13	161,13	75,36
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	4.442,47	224	4.442,47	175	2.449,24	36	1.771,79	13	221,43	2.449,24

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
355	Kab. Hulu Sungai Utara	2005-2008	93	3.359,76	164	3.359,76	143	3.133,62	20	226,14	1	-	3.133,62
		2009	19	754,13	35	754,13	33	254,13	2	500,00	-	-	254,13
		2010	8	277,47	11	277,47	7	119,79	4	16,75	-	140,93	119,79
		2011	14	1.123,35	40	1.123,35	-	-	-	-	40	1.123,35	-
		Jumlah	134	5.514,73	250	5.514,73	183	3.507,55	26	742,89	41	1.264,28	3.507,55
356	Kab. Kotabaru	2005-2008	98	12.213,70	152	6.953,96	79	913,09	42	5.236,03	31	804,84	913,09
		2009	22	992,64	39	992,64	25	173,58	8	267,10	6	551,94	173,58
		2010	44	1.315,59	93	1.315,59	19	146,97	30	730,59	44	438,02	146,97
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	164	14.521,94	284	9.262,20	123	1.233,65	80	6.233,73	81	1.794,81	1.233,65
357	Kab. Tabalong	2005-2008	101	2.554,21	186	2.539,02	138	203,84	48	2.335,18	-	-	203,84
		2009	16	690,95	39	690,95	34	25,71	5	104,38	-	560,85	25,71
		2010	31	3.129,48	53	3.129,48	2	-	2	200,00	49	2.929,48	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	148	6.374,65	278	6.359,46	174	229,55	55	2.639,56	49	3.490,34	229,55
358	Kab. Tanah Bumbu	2005-2008	109	17.290,36	237	7.332,89	219	6.678,86	16	654,03	2	-	6.678,86
		2009	29	408,95	38	408,95	30	242,67	7	114,67	1	51,60	242,67
		2010	24	331,42	42	331,42	16	-	12	17,56	14	313,85	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	162	18.030,73	317	8.073,27	265	6.921,54	35	786,27	17	365,45	6.921,54
359	Kab. Tanah Laut	2005-2008	107	20.719,96	189	11.928,17	78	1.492,99	86	10.423,48	25	11,70	1.492,99
		2009	14	2.674,59	27	2.674,59	20	122,84	7	1.451,50	-	1.100,25	122,84
		2010	20	377,42	39	377,42	3	37,12	-	-	36	340,30	37,12
		2011	12	106,15	21	106,15	-	-	-	-	21	106,15	-
		Jumlah	153	23.878,13	276	15.086,34	101	1.652,95	93	11.874,98	82	1.558,40	1.652,95

**Halaman 73 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
360	Kab. Tapin	2005-2008	108	9.611,25	174	9.569,25	85	5.449,90	34	3.901,30	55	218,03	5.449,90		
		2009	13	4.646,74	17	4.646,74	15	346,37	1	420,91	1	3.879,46	346,37		
		2010	13	219,33	20	219,33	12	186,90	8	32,42	-	-	186,90		
		2011	13	199,64	24	199,64	-	4,40	-	-	24	195,24	4,40		
		Jumlah	147	14.676,97	235	14.634,97	112	5.987,58	43	4.354,64	80	4.292,74	5.987,58		
361	Kota Banjarbaru	2005-2008	92	1.908,46	134	1.908,46	100	1.552,97	22	228,49	12	127,00	1.552,97		
		2009	14	67,00	24	67,00	22	67,00	2	-	-	-	67,00		
		2010	34	1.168,56	60	1.168,56	24	-	8	84,25	28	1.084,30	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	140	3.144,03	218	3.144,03	146	1.619,97	32	312,74	40	1.211,30	1.619,97		
362	Kota Banjarmasin	2005-2008	163	14.365,43	250	14.365,43	200	10.254,57	50	4.110,86	-	-	10.254,57		
		2009	40	962,43	36	962,43	29	950,79	7	11,64	-	-	950,79		
		2010	36	190,39	72	190,39	22	44,43	10	46,70	40	99,25	44,43		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	239	15.518,26	358	15.518,26	251	11.249,81	67	4.169,20	40	99,25	11.249,81		
363	Prov. Kalimantan Timur	2005-2008	151	180.307,46	292	180.307,46	198	154.128,03	80	26.163,36	14	16,06	154.128,03		
		2009	13	241,76	42	241,76	22	241,76	20	-	-	-	241,76		
		2010	46	45.815,17	111	45.815,17	19	2.787,17	62	42.638,84	30	389,15	4.045,19		
		2011	28	21.908,05	63	21.908,05	-	25,80	-	-	63	21.882,24	130.382,20		
		Jumlah	238	248.272,46	508	248.272,46	239	157.182,78	162	68.802,21	107	22.287,47	288.797,19		
364	Kab. Berau	2005-2008	93	25.770,99	171	25.770,99	97	8.129,55	55	17.572,83	19	68,60	8.129,55		
		2009	32	19.567,71	60	19.567,71	43	15.584,69	17	3.983,01	-	-	15.584,69		
		2010	19	3.468,23	45	3.468,23	8	1.734,78	33	1.733,45	4	-	1.734,78		
		2011	16	1.826,98	34	1.826,98	-	300,00	34	1.526,98	-	-	300,00		
		Jumlah	160	50.633,93	310	50.633,93	148	25.749,03	139	24.816,29	23	68,60	25.749,03		

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
365	Kab. Bulungan	2005-2008	74	16.922,54	134	16.922,54	79	8.573,97	24	7.684,85	31	663,70	7.718,21
		2009	26	113.740,04	75	105.227,42	55	65.490,33	18	39.195,28	2	541,79	1.834,47
		2010	22	180.812,18	63	147.135,87	47	94.396,74	4	22.398,28	12	30.340,84	450,83
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	122	311.474,77	272	269.285,83	181	168.461,05	46	69.278,43	45	31.546,34	10.003,51
366	Kab. Kutai Barat	2005-2008	90	30.124,82	160	30.124,82	102	5.706,04	33	15.822,05	25	8.596,73	5.706,04
		2009	14	23.086,27	33	23.086,27	19	154,91	10	14.367,88	4	8.563,47	154,91
		2010	15	12.505,21	45	12.505,21	-	24,43	1	46,46	44	12.434,31	24,43
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	119	65.716,31	238	65.716,31	121	5.885,39	44	30.236,40	73	29.594,51	5.885,39
367	Kab. Kutai Kartanegara	2005-2008	137	807.797,01	294	807.797,01	81	155.998,40	207	641.498,61	6	10.300,00	155.998,40
		2009	20	79.897,81	45	79.897,81	11	-	33	79.897,81	1	-	-
		2010	21	17.642,37	68	17.642,37	15	1.381,37	53	16.261,00	-	-	556,95
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	178	905.337,21	407	905.337,21	107	157.379,78	293	737.657,43	7	10.300,00	156.555,36
				USD 2.250,34		USD 2.250,34		-		USD 2.250,34		-	
368	Kab. Kutai Timur	2005-2008	178	80.591,06	383	80.591,06	222	9.310,58	147	58.232,93	14	13.047,53	8.580,77
		2009	24	21.263,44	64	21.263,44	29	220,75	33	21.042,69	2	-	174,19
		2010	22	6.411,43	68	6.411,43	7	3.139,63	61	3.271,80	-	-	3.139,63
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	224	108.265,94	515	108.265,94	258	12.670,97	241	82.547,43	16	13.047,53	11.894,60
369	Kab. Malinau	2005-2008	70	8.270,54	121	8.270,54	110	7.833,31	11	437,22	-	-	7.833,31
		2009	21	1.055,80	51	1.055,80	38	25,00	12	1.030,80	1	-	25,00
		2010	23	3.433,52	59	3.433,52	43	1.543,21	15	1.487,15	1	403,15	1.543,21
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	114	12.759,87	231	12.759,87	191	9.401,53	38	2.955,18	2	403,15	9.401,53

**Halaman 75 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml		Nilai	Jml		Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
370	Kab. Nunukan	2005-2008	120	5.633,77	248	5.633,77	158	2.355,87	52	2.838,31	38	439,57	2.355,87		
		2009	21	856,92	44	856,92	35	429,47	5	427,45	4	-	429,47		
		2010	43	30.258,78	102	30.258,78	40	1.050,29	16	17.572,21	46	11.636,27	1.050,29		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	184	36.749,48	394	36.749,48	233	3.835,64	73	20.837,99	88	12.075,85	3.835,64		
371	Kab. Paser	2005-2008	91	88.870,79	142	23.486,28	115	14.934,64	25	8.551,64	2	-	15.872,57		
		2009	39	17.747,52	138	16.631,11	75	5.223,91	49	11.407,19	14	-	5.225,78		
		2010	10	459,04	27	459,04	-	-	-	-	27	459,04	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	140	107.077,37	307	40.576,44	190	20.158,56	74	19.958,83	43	459,04	21.098,35		
372	Kab. Penajam Paser Utara	2005-2008	79	96.445,77	147	14.463,90	133	11.398,75	14	3.065,15	-	-	11.398,75		
		2009	18	5.925,45	43	182,45	23	182,45	20	-	-	-	182,45		
		2010	33	11.298,67	72	11.298,67	28	40,91	41	11.257,75	3	-	40,91		
		2011	21	12.630,06	64	727,74	27	-	36	727,74	1	-	-		
		Jumlah	151	126.299,96	326	26.672,78	211	11.622,12	111	15.050,66	4	-	11.622,12		
373	Kab. Tana Tidung	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	25	36.994,90	55	36.994,90	15	506,76	16	2.215,70	24	34.272,43	506,76		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	25	36.994,90	55	36.994,90	15	506,76	16	2.215,70	24	34.272,43	506,76		
374	Kota Balikpapan	2005-2008	88	8.496,31	138	8.496,31	130	7.702,56	8	793,74	-	-	2.586,90		
		2009	41	3.524,66	67	4.394,06	31	4.157,30	31	236,76	5	-	-		
		2010	26	-	52	-	15	-	17	-	20	-	-		
		2011	18	-	34	-	-	-	-	-	34	-	-		
		Jumlah	173	12.020,98	291	12.890,38	176	11.859,87	56	1.030,51	59	-	2.586,90		

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	Kota Bontang	2005-2008	95	71.255,40	150	71.255,40	134	38.640,32	16	32.615,07	-	-	38.640,32
		2009	58	8.374,39	140	8.374,39	76	3.147,05	62	5.227,33	2	-	3.147,05
		2010	10	4.517,48	22	4.517,48	4	2.286,47	18	2.231,00	-	-	2.286,47
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	163	84.147,28	312	84.147,28	214	44.073,86	96	40.073,41	2	-	44.073,86
376	Kota Samarinda	2005-2008	125	100.187,96	221	100.161,56	65	20.247,87	68	76.466,51	88	3.447,18	20.143,11
				USD 329,98		USD 329,98						USD 329,98	
		2009	73	115.813,95	145	115.813,95	20	1.430,40	95	84.314,51	30	30.069,03	1.430,40
		2010	23	18.439,06	62	18.439,06	4	2.623,50	56	15.815,56	2	-	2.623,50
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	221	234.440,98	428	234.414,58	89	24.301,77	219	176.596,58	120	33.516,22	24.197,01
				USD 329,98		USD 329,98						USD 329,98	
377	Kota Tarakan	2005-2008	102	125.788,43	194	72.512,54	151	66.859,73	26	2.860,94	17	2.791,87	57.180,35
		2009	20	38.979,36	52	38.979,38	21	11.887,66	30	27.091,71	1	-	729,31
		2010	17	778,96	41	778,96	14	778,96	27	-	-	-	334,15
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	139	165.546,76	287	112.270,89	186	79.526,36	83	29.952,65	18	2.791,87	58.243,82
378	Prov. Sulawesi Utara	2005-2008	179	136.022,54	270	17.375,75	129	3.704,24	54	10.109,13	87	3.562,38	3.689,33
		2009	18	3.140,29	45	2.343,48	3	419,60	8	39,14	34	1.884,74	419,60
		2010	20	6.664,75	49	3.313,34	34	1.754,10	8	1.338,85	7	220,37	1.754,10
		2011	13	808,02	27	409,51	-	-	-	-	27	409,51	-
		Jumlah	230	146.635,62	391	23.442,10	166	5.877,95	70	11.487,12	155	6.077,02	5.863,05
379	Kab. Bolaang Mongondow	2005-2008	82	36.114,56	162	4.584,76	104	3.148,65	31	1.371,10	27	65,00	3.148,65
		2009	35	762,34	57	687,81	45	426,67	6	261,14	6	-	426,67
		2010	26	2.867,55	51	2.867,55	12	411,92	8	747,34	31	1.708,28	411,92
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	143	39.744,46	270	8.140,13	161	3.987,25	45	2.379,59	64	1.773,28	3.987,25

**Halaman 77 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
380	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	8	553,24	22	197,82	5	-	17	197,82	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	553,24	22	197,82	5	-	17	197,82	-	-	-
381	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	400,09	9	400,09	-	-	-	-	9	400,09	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	400,09	9	400,09	-	-	-	-	9	400,09	-
382	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	5.993,20	23	5.728,02	8	663,43	10	5.064,58	5	-	663,43
		2010	14	1.021,89	26	1.926,78	9	71,45	17	1.855,33	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	7.015,10	49	7.654,80	17	734,88	27	6.919,91	5	-	663,43
383	Kab. Minahasa	2005-2008	117	13.602,33	218	1.917,59	123	1.665,49	11	237,10	84	15,00	1.665,49
		2009	12	1.639,51	21	1.103,51	7	381,27	7	704,14	7	18,09	381,27
		2010	22	1.442,89	43	428,01	23	272,38	7	155,62	13	-	272,38
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	151	16.684,74	282	3.449,11	153	2.319,15	25	1.096,87	104	33,09	2.319,15
384	Kab. Minahasa Selatan	2005-2008	55	33.721,20	88	4.437,00	18	347,78	13	2.619,36	57	1.469,84	347,78
		2009	11	3.428,68	21	3.428,68	2	-	2	51,89	17	3.376,79	-
		2010	10	361,74	22	409,57	9	-	-	-	13	409,57	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	76	37.517,63	131	8.275,26	29	347,78	15	2.671,26	87	5.256,21	347,78



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
385	Kab. Minahasa Tenggara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	18	4.395,33	38	2.713,13	-	-	12	2.713,13	26	-	-
		2010	11	13.679,30	36	12.306,00	-	-	-	-	36	12.306,00	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	18.074,63	74	15.019,14	-	-	12	2.713,13	62	12.306,00	-
386	Kab. Minahasa Utara	2005-2008	84	9.305,59	174	6.121,18	56	2.579,72	77	2.686,48	41	854,97	2.579,72
		2009	12	2.255,66	25	2.255,66	10	442,89	8	520,64	7	1.292,12	388,38
		2010	18	354,91	39	354,91	1	13,96	2	276,46	36	64,48	13,96
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	114	11.916,17	238	8.731,76	67	3.036,59	87	3.483,58	84	2.211,58	2.982,08
387	Kab. Kepulauan Sangihe	2005-2008	76	6.989,06	153	2.928,86	114	1.424,63	14	635,10	25	869,12	1.424,63
		2009	13	15.439,36	24	12.324,52	22	2.645,82	2	9.678,70	-	-	2.530,76
		2010	25	1.187,31	49	1.187,31	18	397	6	791	25	-	396,70
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	114	23.615,74	226	16.440,71	154	4.467,16	22	11.104,42	50	869,12	4.352,10
388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	6.849,53	23	6.840,92	13	2.025,17	10	4.815,74	-	-	1.782,72
		2010	11	1.248,62	29	1.248,77	20	350,88	6	846,43	3	51,46	350,88
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	8.098,15	52	8.089,69	33	2.376,06	16	5.662,17	3	51,46	2.133,60
389	Kab. Kepulauan Talaud	2005-2008	81	21.234,86	145	14.409,23	29	7.664,55	32	3.550,24	84	3.194,42	7.664,55
		2009	23	64.078,74	44	25.322,48	13	24.665,19	18	657,28	13	-	-
		2010	18	5.324,37	60	4.267,16	8	-	2	-	50	4.267,16	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	122	90.637,97	249	43.998,87	50	32.329,75	52	4.207,53	147	7.461,59	7.664,55

Halaman 79 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
390	Kota Bitung	2005-2008	105	61.751,40	138	18.254,34	111	12.412,57	21	5.593,77	6	248,00	12.412,57
		2009	29	1.360,96	49	1.360,96	30	124,19	17	1.236,76	2	-	124,19
		2010	17	1.095,31	51	681,33	33	593,29	18	88,03	-	-	593,29
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	151	64.207,68	238	20.296,65	174	13.130,06	56	6.918,58	8	248,00	13.130,06
391	Kota Kotamobagu	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	333,84	21	333,84	4	78,17	3	247,56	14	8,10	78,17
		2010	18	3.286,89	44	3.286,89	14	413,06	25	2.873,82	5	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	3.620,73	65	3.620,73	18	491,24	28	3.121,38	19	8,10	78,17
392	Kota Manado	2005-2008	106	115.718,52	192	71.204,41	55	56.750,43	23	11.312,79	114	3.141,18	56.750,43
		2009	8	5.661,98	14	5.661,98	1	77,16	1	-	12	5.584,82	77,16
		2010	20	13.318,84	56	9.989,91	16	13,03	1	1.026,60	39	8.950,28	13,03
		2011	16	795,44	36	795,44	-	-	-	-	36	795,44	-
		Jumlah	150	135.494,79	298	87.651,76	72	56.840,62	25	12.339,39	201	18.471,73	56.840,62
393	Kota Tomohon	2005-2008	94	40.935,88	166	7.460,52	125	5.363,32	20	2.097,19	21	-	5.363,32
		2009	3	21.812,70	7	20.312,70	2	-	3	17.147,62	2	3.165,07	-
		2010	17	40.406,26	41	39.901,03	4	-	5	39.115,90	32	785,12	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	114	103.154,85	214	67.674,25	131	5.363,32	28	58.360,72	55	3.950,20	5.363,32
394	Prov. Sulawesi Tengah	2005-2008	113	94.641,96	235	80.045,75	103	3.182,48	84	76.688,35	48	174,91	3.182,48
		2009	38	112.798,88	98	20.599,62	9	1.858,02	82	18.741,60	7	-	1.858,02
		2010	55	6.348,21	161	6.004,30	49	935,04	102	5.058,17	10	11,08	935,04
		2011	19	8.284,88	21	8.284,88	-	-	-	-	21	8.284,88	-
		Jumlah	225	222.073,96	515	114.934,58	161	5.975,55	268	100.488,14	86	8.470,88	5.975,55

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
395	Kab. Banggai	2005-2008	58	2.830,92	118	1.322,72	110	1.308,99	6	13,73	2	-	1.308,99
		2009	14	7.565,67	33	1.274,26	18	1.168,95	15	105,31	-	-	1.168,95
		2010	40	2.861,38	136	1.544,20	44	1.118,46	59	332,42	33	93,30	1.118,46
		2011	18	7.353,06	19	6.350,60	-	-	-	-	19	6.350,60	-
		Jumlah	130	20.611,04	306	10.491,79	172	3.596,41	80	451,47	54	6.443,90	3.596,41
396	Kab. Banggai Kepulauan	2005-2008	76	11.730,07	159	8.716,11	113	5.621,34	34	2.647,22	12	447,54	5.621,34
		2009	16	12.887,63	50	3.233,28	5	2.111,94	43	1.121,34	2	-	2.111,94
		2010	34	7.513,70	121	4.804,99	42	3.038,84	77	1.766,15	2	-	3.038,84
		2011	20	27.762,67	25	2.591,34	-	-	-	-	25	2.591,34	-
		Jumlah	146	59.894,09	355	19.345,73	160	10.772,12	154	5.534,72	41	3.038,88	10.772,12
397	Kab. Buol	2005-2008	62	49.489,05	126	49.058,21	69	25.407,72	52	23.616,19	5	34,28	25.407,72
		2009	38	12.287,28	114	10.403,10	88	4.751,18	23	5.651,91	3	-	4.751,18
		2010	34	45.915,64	95	41.638,56	68	37.227,53	5	4.411,03	22	-	37.227,53
		2011	20	21.012,97	24	10.718,48	-	-	-	-	24	10.718,48	-
		Jumlah	154	128.704,96	359	111.818,36	225	67.386,45	80	33.679,14	54	10.752,76	67.386,45
398	Kab. Donggala	2005-2008	70	85.273,11	144	85.273,11	50	9.905,13	79	64.480,28	15	10.887,69	9.905,13
		2009	29	28.077,84	75	23.666,47	4	19.489,24	43	4.110,58	28	66,64	19.489,24
		2010	42	7.558,17	118	6.700,36	12	4.437,49	60	1.620,91	46	641,94	4.437,49
		2011	21	8.707,69	24	7.536,53	-	-	-	-	24	7.536,53	-
		Jumlah	162	129.616,83	361	123.176,48	66	33.831,87	182	70.211,78	113	19.132,81	33.831,87
399	Kab. Morowali	2005-2008	87	26.578,05	172	26.091,86	24	788,08	83	12.921,66	65	12.382,12	788,08
		2009	28	5.884,63	78	5.884,63	2	1.127,17	54	4.757,46	22	-	1.127,17
		2010	49	8.234,57	124	2.377,97	5	130,92	41	1.669,53	78	577,50	130,92
		2011	20	1.649,97	20	783,05	-	-	-	-	20	783,05	-
		Jumlah	184	42.347,24	394	35.137,53	31	2.046,18	178	19.348,66	185	13.742,68	2.046,18

**Halaman 81 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
400	Kab. Parigi Moutong	2005-2008	58	10.143,43	120	9.260,26	53	7.435,38	49	1.556,51	18	268,35	7.435,38	
		2009	34	9.038,52	86	4.209,23	6	2.785,92	33	935,66	47	487,63	2.785,92	
		2010	41	6.329,19	125	1.288,46	9	757,86	36	261,72	80	268,87	757,86	
		2011	21	15.769,66	24	15.703,45	-	-	-	-	24	15.703,45	-	
		Jumlah	154	41.280,82	355	30.461,41	68	10.979,16	118	2.753,91	169	16.728,32	10.979,16	
401	Kab. Poso	2005-2008	54	10.078,78	109	7.528,23	62	2.391,08	34	4.865,09	13	272,06	2.391,08	
		2009	30	3.358,14	75	1.266,77	19	261,07	36	916,03	20	89,66	261,07	
		2010	24	2.952,51	83	2.605,41	4	189,88	33	1.866,47	46	549,05	189,88	
		2011	19	844,88	21	229,72	-	-	-	-	21	229,72	-	
		Jumlah	127	17.234,33	288	11.630,15	85	2.842,03	103	7.647,60	100	1.140,50	2.842,03	
402	Kab. Sigi	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	37	3.414,48	121	1.259,38	18	84,94	103	1.174,44	-	-	84,94	
		2011	18	3.760,06	18	1.529,03	-	-	-	-	18	1.529,03	-	
		Jumlah	55	7.174,54	139	2.788,41	18	84,94	103	1.174,44	18	1.529,03	84,94	
403	Kab. Tojo Una-Una	2005-2008	69	6.018,94	130	1.411,11	111	1.378,80	17	32,30	2	-	1.378,80	
		2009	34	5.795,77	87	3.181,48	9	810,78	45	2.098,84	33	271,85	810,78	
		2010	30	5.417,55	84	5.075,22	11	199,68	39	4.875,53	34	-	199,68	
		2011	22	3.252,40	22	2.110,94	-	-	-	-	22	2.110,94	-	
		Jumlah	155	20.484,67	323	11.778,76	131	2.389,28	101	7.006,68	91	2.382,79	2.389,28	
404	Kab. Tolitoli	2005-2008	60	10.806,38	119	8.525,52	24	1.295,18	83	7.230,34	12	-	1.295,18	
		2009	61	3.392,88	159	3.087,59	1	888,40	34	491,23	124	1.707,94	888,40	
		2010	24	1.855,85	65	663,75	-	405,00	8	121,00	57	137,75	405,00	
		2011	21	3.031,59	21	2.982,70	-	-	-	-	21	2.982,70	-	
		Jumlah	166	19.086,72	364	15.259,57	25	2.588,59	125	7.842,58	214	4.828,39	2.588,59	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405	Kota Palu	2005-2008	106	10.783,89	203	9.032,17	98	5.944,00	62	2.938,72	43	149,44	5.944,00
		2009	44	4.175,40	116	1.838,81	18	729,18	94	1.109,63	4	-	729,18
		2010	24	4.180,45	90	686,92	8	486,12	77	200,79	5	-	486,12
		2011	15	741,95	15	356,95	-	-	-	-	15	356,95	-
		Jumlah	189	19.881,70	424	11.914,87	124	7.159,30	233	4.249,16	67	506,40	7.159,30
406	Prov. Sulawesi Selatan	2005-2008	201	171.621,49	396	88.999,44	115	4.724,51	73	41.849,21	208	42.425,71	4.724,51
		2009	30	58.269,91	93	49.908,60	1	16.958,82	2	10.145,17	90	22.804,59	469,50
		2010	70	172.384,44	161	18.882,49	4	131,55	26	2.031,13	131	16.719,81	131,55
		2011	17	22.083,97	29	21.747,52	-	-	-	-	29	21.747,52	-
		Jumlah	318	424.359,83	679	179.538,06	120	21.814,89	101	54.025,52	458	103.697,64	5.325,57
407	Kab. Bantaeng	2005-2008	55	13.019,04	93	6.463,72	26	2.213,80	15	1.214,68	52	3.035,22	2.117,15
		2009	18	8.401,31	49	5.306,75	15	200,14	8	626,62	26	4.479,99	200,14
		2010	22	4.690,75	55	3.074,92	-	-	-	-	55	3.074,92	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	95	26.111,11	197	14.845,40	41	2.413,95	23	1.841,31	133	10.590,13	2.317,30
408	Kab. Barru	2005-2008	71	50.747,36	113	3.226,49	85	2.847,18	25	379,30	3	-	2.847,18
		2009	18	4.108,08	35	3.577,01	18	969,84	16	2.607,17	1	-	969,84
		2010	17	3.817,69	31	3.420,83	6	2.469,56	8	951,26	17	-	2.469,56
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	106	58.673,14	179	10.224,34	109	6.286,59	49	3.937,74	21	-	6.286,59
409	Kab. Bone	2005-2008	77	67.585,56	141	3.273,78	49	1.691,07	16	875,79	76	706,92	1.691,07
		2009	17	553,70	37	483,85	10	260,22	12	223,62	15	-	260,22
		2010	30	67.137,37	100	313,91	25	98,16	35	173,13	40	42,61	98,16
		2011	16	5.402,43	33	731,27	-	-	-	-	33	731,27	-
		Jumlah	140	140.679,08	311	4.802,83	84	2.049,46	63	1.272,55	164	1.480,81	2.049,46

**Halaman 83 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410	Kab. Bulukumba	2005-2008	97	50.578,29	212	49.470,78	74	2.516,05	63	8.300,87	75	38.653,85	2.345,83
		2009	21	7.616,78	43	7.068,78	13	206,29	30	6.862,48	-	-	206,29
		2010	14	4.972,69	26	966,08	3	-	21	966,08	2	-	-
		2011	15	5.957,09	35	347,01	-	-	-	-	35	347,01	-
		Jumlah	147	69.124,87	316	57.852,66	90	2.722,34	114	16.129,44	112	39.000,87	2.552,12
411	Kab. Enrekang	2005-2008	57	4.769,15	102	2.750,16	62	2.222,13	30	528,03	10	-	2.051,24
		2009	15	965.631,96	29	695,08	10	380,75	9	314,32	10	-	380,75
		2010	19	898,09	38	636,52	16	497,05	22	139,47	-	-	497,05
		2011	17	410,40	37	410,40	-	-	-	-	37	410,40	-
		Jumlah	108	971.709,61	206	4.492,17	88	3.099,94	61	981,83	57	410,40	2.929,05
412	Kab. Gowa	2005-2008	67	20.042,25	136	14.704,98	52	3.167,98	46	7.291,70	38	4.245,29	3.167,98
		2009	21	1.300,97	60	1.066,54	29	352,05	30	714,48	1	-	352,05
		2010	27	6.102,48	50	2.943,56	-	-	-	-	50	2.943,56	-
		2011	15	2.928,37	24	614,92	-	-	-	-	24	614,92	-
		Jumlah	130	30.374,09	270	19.330,01	81	3.520,04	76	8.006,18	113	7.803,78	3.520,04
413	Kab. Jeneponto	2005-2008	102	69.706,00	213	18.150,14	61	5.605,33	41	6.029,52	111	6.515,27	605,33
		2009	27	48.656,66	79	16.066,77	52	281,92	25	10.784,85	2	5.000,00	281,92
		2010	21	10.363,55	60	9.486,57	-	-	-	-	60	9.486,57	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	150	128.726,22	352	43.703,48	113	5.887,26	66	16.814,37	173	21.001,85	887,26
414	Kab. Luwu	2005-2008	82	20.288,87	159	13.698,82	53	975,90	90	12.357,75	16	365,15	975,90
		2009	17	119.895,05	31	3.754,68	3	294,05	20	3.453,32	8	7,30	294,05
		2010	26	7.632,60	80	1.661,96	-	-	-	-	80	1.661,96	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	125	147.816,53	270	19.115,46	56	1.269,96	110	15.811,08	104	2.034,42	1.269,96

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415	Kab. Luwu Timur	2005-2008	78	341.836,37	168	21.670,21	88	18.698,41	21	524,51	59	2.447,27	18.698,41
		2009	18	4.543,24	52	4.482,61	33	1.076,49	18	3.406,11	1	-	1.076,49
		2010	12	2.014,50	39	1.067,72	7	3,59	17	891,04	15	173,08	3,59
		2011	12	2.905,89	32	242,71	-	-	-	-	32	242,71	-
		Jumlah	120	351.300,01	291	27.463,27	128	19.778,51	56	4.821,67	107	2.863,08	19.778,51
416	Kab. Luwu Utara	2005-2008	78	544.343,75	157	16.664,04	7	1.702,28	51	13.595,26	99	1.366,48	1.702,28
		2009	16	6.613,89	32	2.415,63	3	-	19	107,82	10	2.307,80	-
		2010	22	104.249,64	68	3.260,08	-	-	-	-	68	3.260,08	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	116	655.207,29	257	22.339,75	10	1.702,28	70	13.703,09	177	6.934,37	1.702,28
417	Kab. Maros	2005-2008	106	39.703,26	196	39.703,26	80	4.076,57	109	35.433,47	7	193,22	4.076,57
		2009	43	36.686,68	99	36.686,68	36	393,22	40	35.747,22	23	546,23	218,22
		2010	53	15.556,39	136	15.556,39	26	2.965	51	10.512	59	2.079,60	95,49
		2011	63	89.761,80	183	89.761,80	22	9.098	60	76.269	101	4.394,40	1,50
		Jumlah	265	181.708,15	614	181.708,15	164	16.533,09	260	157.961,60	190	7.213,46	4.394,79
418	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2005-2008	69	100.593,67	118	5.432,60	28	982,36	28	2.318,71	62	2.131,52	931,54
		2009	16	859.401,08	28	827,09	2	150,79	12	676,30	14	-	150,79
		2010	14	21.964,30	36	1.226,10	2	92,44	3	909,04	31	224,61	92,44
		2011	22	30.921,82	53	30.921,82	-	-	-	-	53	30.921,82	-
		Jumlah	121	1.012.880,88	235	38.407,62	32	1.225,60	43	3.904,06	160	33.277,95	1.174,78
419	Kab. Pinrang	2005-2008	60	18.310,34	84	8.358,33	31	295,20	45	7.708,12	8	354,99	295,20
		2009	19	5.803,02	46	1.379,26	37	979,52	8	399,74	1	-	-
		2010	17	5.132,13	40	1.035,86	11	565,14	23	470,72	6	-	-
		2011	17	12.489,89	45	11.877,84	20	17,61	23	11.860,22	2	-	-
		Jumlah	113	41.735,39	215	22.651,30	99	1.857,49	99	20.438,81	17	354,99	295,20

**Halaman 85 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
420	Kab. Selayar	2005-2008	72	35.089,55	140	31.110,29	79	2.307,31	28	15.859,94	33	12.943,03	2.132,31
		2009	28	29.701,42	84	16.792,81	45	4.663,31	38	12.129,50	1	-	1.075,65
		2010	32	5.254,30	76	5.002,29	-	-	-	-	76	5.002,29	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	132	70.045,27	300	52.905,41	124	6.970,62	66	27.989,45	110	17.945,33	3.207,96
421	Kab. Sidenreng Rappang	2005-2008	61	15.975,05	115	9.977,79	67	3.600,84	41	6.000,49	7	376,45	3.056,52
		2009	20	10.708,87	38	2.768,77	21	157,67	17	2.611,09	-	-	-
		2010	28	6.383,29	56	1.974,24	-	-	-	-	56	1.974,24	-
		2011	22	1.899,78	63	1.769,03	-	-	-	-	63	1.769,03	-
		Jumlah	131	34.967,01	272	16.489,85	88	3.758,52	58	8.611,59	126	4.119,73	3.056,52
422	Kab. Sinjai	2005-2008	59	33.879,75	127	6.245,79	11	4.269,16	50	1.423,56	66	553,06	4.269,16
		2009	17	21.150,54	47	151,82	1	-	31	151,82	15	-	-
		2010	25	5.725,86	75	1.041,73	-	-	-	-	75	1.041,73	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	101	60.756,16	249	7.439,36	12	4.269,16	81	1.575,39	156	1.594,80	4.269,16
423	Kab. Soppeng	2005-2008	57	19.659,07	116	2.856,41	36	648,50	41	972,08	39	1.235,81	648,50
		2009	17	28.082,90	47	2.919,10	13	502,81	22	2.155,59	12	260,69	502,81
		2010	15	5.114,12	45	5.790,01	16	-	27	5.790,01	2	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	89	52.856,10	208	11.565,53	65	1.151,32	90	8.917,70	53	1.496,51	1.151,32
424	Kab. Takalar	2005-2008	74	24.318,91	146	18.839,14	37	3.992,45	61	4.775,06	48	10.071,63	2.973,36
		2009	15	8.382,45	39	8.281,86	10	6.644,93	2	807,61	27	829,31	6.281,16
		2010	32	2.159,41	67	2.020,03	-	103,57	2	103,57	65	1.812,89	103,57
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	121	34.860,79	252	29.141,05	47	10.740,96	65	5.686,24	140	12.713,84	9.358,09



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
425	Kab. Tana Toraja	2005-2008	77	19.947,73	181	9.420,40	40	2.099,23	46	5.425,22	95	1.895,94	2.099,23
		2009	18	835.719,37	45	917,22	11	255,34	15	661,88	19	-	255,34
		2010	27	978.797,69	74	256,07	12	15,00	34	241,07	28	-	-
		2011	22	1.375,92	78	1.375,92	-	-	-	-	78	1.375,92	-
		Jumlah	144	1.835.840,72	378	11.969,63	63	2.369,58	95	6.328,17	220	3.271,87	2.354,57
426	Kab Tana Toraja Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	2.004,51	31	1.344,27	11	279,23	12	1.035,45	8	29,59	279,23
		2011	10	2.158,00	20	1.422,06	-	-	-	-	20	1.422,06	-
		Jumlah	27	4.162,52	51	2.766,33	11	279,23	12	1.035,45	28	1.451,65	279,23
427	Kab. Wajo	2005-2008	63	35.186,78	93	8.559,33	22	190,79	26	7.846,46	45	522,07	190,79
		2009	12	85.869,11	18	559,63	1	112,71	16	446,92	1	-	112,71
		2010	44	13.405,78	129	5.303,27	30	1.738,88	37	2.982,82	62	581,56	1.738,88
		2011	12	2.935,20	39	416,01	-	-	-	-	39	416,01	-
		Jumlah	131	137.396,88	279	14.838,26	53	2.042,39	79	11.276,21	147	1.519,65	2.042,39
428	Kota Makassar	2005-2008	120	81.906,97	267	40.512,13	68	5.124,00	85	28.561,99	114	6.826,13	3.945,05
		2009	39	19.061,36	81	6.732,38	11	-	45	6.732,38	25	-	-
		2010	63	71.084,80	162	30.328,94	-	-	33	3.435,59	129	26.893,35	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	222	172.053,14	510	77.573,46	79	5.124,00	163	38.729,97	268	33.719,48	3.945,05
429	Kota Palopo	2005-2008	70	539.448,81	156	14.070,78	13	3.879,15	35	5.515,95	108	4.675,67	3.879,15
		2009	15	439.862,92	46	4.831,19	18	-	22	937,46	6	3.893,72	-
		2010	19	563.363,68	62	7.893,31	37	71,96	23	7.821,35	2	-	71,96
		2011	20	7.222,74	64	3.216,98	-	-	-	-	64	3.216,98	-
		Jumlah	124	1.549.898,16	328	30.012,27	68	3.951,11	80	14.274,77	180	11.786,38	3.951,11

Halaman 87 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
430	Kota Parepare	2005-2008	60	18.915,84	92	7.083,43	84	5.171,62	8	1.814,01	-	97,80	4.833,97
		2009	18	9.023,62	24	3.812,95	20	3.730,10	4	82,85	-	-	562,41
		2010	32	1.317.675,97	72	2.854,28	52	1.142,72	17	1.711,55	3	-	557,65
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	110	1.345.615,44	188	13.750,67	156	10.044,45	29	3.608,42	3	97,80	5.954,03
431	Prov. Sulawesi Tenggara	2005-2008	205	106.812,73	494	48.122,45	271	11.951,34	110	30.150,42	113	6.020,68	11.951,34
		2009	91	2.063.417,22	243	71.738,08	33	40.707,25	54	17.498,28	156	13.532,54	38.337,18
		2010	69	1.878.717,94	200	65.092,16	46	11.310,14	50	23.889,53	104	29.892,48	11.310,16
		2011	30	20.746,26	86	1.634,11	-	-	-	-	86	1.634,11	-
		Jumlah	395	4.069.694,16	1.023	186.586,82	350	63.968,74	214	71.538,24	459	51.079,83	61.598,69
432	Kab. Bombana	2005-2008	93	62.602,62	203	47.237,43	121	23.152,31	76	24.085,11	6	-	23.152,31
		2009	58	102.550,16	183	78.639,94	-	3.910,48	2	39.789,95	181	34.939,51	3.910,48
		2010	25	140.565,65	80	86.980,93	1	11.304,58	8	30.101,51	71	45.574,83	4.455,35
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	176	305.718,44	466	212.858,31	122	38.367,38	86	93.976,58	258	80.514,34	31.518,15
433	Kab. Buton	2005-2008	110	16.738,83	231	6.086,98	168	4.330,38	49	1.741,73	14	14,87	4.330,38
		2009	17	640,45	47	164,20	32	99,22	15	64,97	-	-	99,22
		2010	22	2.655,39	50	2.398,88	25	387,00	21	2.011,87	4	-	387,00
		2011	15	3.220,53	32	3.086,88	-	-	-	-	32	3.086,88	-
		Jumlah	164	23.255,22	360	11.736,95	225	4.816,61	85	3.818,57	50	3.101,76	4.816,61
434	Kab. Buton Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	26	15.891,05	72	6.807,06	29	241,91	7	1.468,03	36	5.097,12	241,91
		2010	29	29.963,21	92	27.905,81	69	21.918,13	9	1.076,08	14	4.911,59	21.918,13
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	55	45.854,26	164	34.712,88	98	22.160,05	16	2.544,11	50	10.008,71	22.160,05

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
435	Kab. Kolaka	2005-2008	133	94.888,09	336	17.750,38	215	8.197,95	78	7.179,52	43	2.372,90	8.059,36
		2009	39	4.521,38	76	1.736,63	45	263,08	21	989,65	10	483,88	263,08
		2010	29	20.829,31	73	5.211,29	18	447,13	51	4.415,37	4	348,78	447,13
		2011	21	64.118,25	83	7.899,47	-	-	-	-	83	7.899,47	-
		Jumlah	222	184.357,04	568	32.597,78	278	8.908,18	150	12.584,55	140	11.105,04	8.769,58
436	Kab. Kolaka Utara	2005-2008	84	24.945,54	218	21.004,98	140	3.486,51	65	13.314,54	13	4.203,91	3.486,51
		2009	49	20.044,24	152	19.721,07	72	1.448,39	30	5.275,30	50	12.997,37	1.448,39
		2010	21	1.551,67	54	1.551,67	27	41,56	25	1.510,10	2	-	41,56
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	154	46.541,46	424	42.277,72	239	4.976,47	120	20.099,96	65	17.201,29	4.976,47
437	Kab. Konawe	2005-2008	115	66.408,98	303	61.510,46	193	6.610,94	83	47.381,47	27	7.518,03	6.610,94
		2009	54	139.424,19	126	106.711,75	11	450,82	21	42.329,69	94	63.931,23	450,82
		2010	34	91.801,55	95	64.630,58	3	3.047,12	81	60.061,10	11	1.522,35	3.047,12
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	203	297.634,73	524	232.852,80	207	10.108,89	185	149.772,27	132	72.971,63	10.108,89
438	Kab. Konawe Selatan	2005-2008	78	30.239,91	167	25.212,67	74	5.931,25	45	15.822,74	48	3.458,67	5.931,25
		2009	52	10.956,74	150	10.217,97	67	8.032,67	29	2.163,39	54	21,90	8.032,67
		2010	34	37.702,83	97	14.013,94	33	3.894,73	20	9.518,64	44	600,56	3.844,73
		2011	26	3.579,04	56	1.071,16	-	-	-	-	56	1.071,16	-
		Jumlah	190	82.478,53	470	50.515,75	174	17.858,66	94	27.504,78	202	5.152,30	17.808,67
439	Kab. Konawe Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	27	11.807,73	93	10.161,73	5	321,23	26	9.272,02	62	568,47	321,23
		2010	36	24.806,87	123	24.977,53	15	171,73	50	24.805,80	58	-	171,73
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	63	36.614,60	216	35.139,26	20	492,96	76	34.077,82	120	568,47	492,96

**Halaman 89 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan	
			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Nilai			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	440 Kab. Muna	2005-2008	4	34.741,28	6	28.212,94	8	12.064,44	10	11.152,26	12	4.996,24	13	10.728,21	14	800,52
		2009	22	917.710,69	63	4.897,06	26	800,52	34	4.096,53	3	-	-	-	-	-
		2010	45	376.804,10	131	55.744,74	-	-	2	278,72	129	55.466,01	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	178	1.329.256,08	441	88.854,74	143	12.864,96	127	15.527,52	171	60.462,25	-	-	-	-
441	Kab. Wakatobi	2005-2008	56	174.536,43	105	31.293,28	80	23.899,19	16	7.013,51	9	380,58	-	-	-	-
		2009	15	3.686,73	38	3.474,87	27	2.735,45	11	739,41	-	-	-	-	-	-
		2010	44	10.515,08	103	3.312,74	40	460,31	16	762,71	47	2.089,71	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	188.738,25	246	38.080,90	147	27.094,96	43	8.515,64	56	2.470,29	-	-	-	-
442	Kota Bau-Bau	2005-2008	107	31.070,22	205	15.493,13	117	11.669,59	41	2.681,34	47	1.142,19	-	-	-	-
		2009	23	12.848,89	50	12.848,89	22	8.224,87	12	3.444,50	16	1.179,51	-	-	-	-
		2010	21	19.523,05	50	7.724,97	20	189,62	21	7.535,34	9	-	-	-	-	-
		2011	28	3.439,59	81	2.200,72	-	-	-	-	81	2.200,72	-	-	-	-
		Jumlah	179	66.881,78	386	38.267,73	159	20.084,09	74	13.661,20	153	4.522,44	-	-	-	-
443	Kota Kendari	2005-2008	143	37.040,13	330	33.229,46	229	24.488,65	61	6.827,18	40	1.913,62	-	-	-	-
		2009	40	4.655,65	59	1.586,64	57	1.505,52	1	81,11	1	-	-	-	-	-
		2010	39	105.949,24	91	5.215,28	18	778,33	15	2.217,17	58	2.219,77	-	-	-	-
		2011	15	3.411,18	37	2.225,65	-	-	-	-	37	2.225,65	-	-	-	-
		Jumlah	237	151.056,22	517	42.257,05	304	26.772,52	77	9.125,47	136	6.359,05	-	-	-	-
444	Prov. Gorontalo	2005-2008	130	38.745,85	245	38.745,85	111	8.228,79	43	7.250,18	91	23.266,87	-	-	-	-
		2009	28	27.688,08	86	27.688,08	46	677,68	8	5.567,57	32	21.442,82	-	-	-	-
		2010	12	3.496,84	34	3.496,84	6	675,71	4	1.648,17	24	1.172,95	-	-	-	-
		2011	19	12.822,90	43	12.822,90	-	-	-	-	43	12.822,90	-	-	-	-
		Jumlah	189	82.753,67	408	82.753,67	163	9.582,19	55	14.465,93	190	58.705,54	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
445	Kab. Boalemo	2005-2008	84	7.715,42	162	7.715,42	123	1.932,60	17	4.417,64	22	1.365,17	1.932,60
		2009	34	163,60	92	163,60	3	107,49	2	56,10	87	-	107,49
		2010	37	1.557,96	108	1.557,96	17	16,49	67	71,41	24	1.470,05	16,52
		2011	10	4.851,49	26	4.851,49	12	-	9	4.699,57	5	151,91	-
		Jumlah	165	14.288,49	388	14.288,49	155	2.056,60	95	9.244,74	138	2.987,14	2.056,62
446	Kab. Bone Bolango	2005-2008	70	3.283,19	160	3.283,19	126	2.628,61	25	621,64	9	32,93	2.629,95
		2009	70	9.393,01	189	9.393,01	108	3.708,29	21	4.498,80	60	1.185,91	3.708,29
		2010	29	10.467,99	76	10.467,99	-	-	1	120,00	75	10.347,99	-
		2011	11	1.496,15	25	1.496,15	-	-	-	-	25	1.496,15	-
		Jumlah	180	24.640,35	450	24.640,35	234	6.336,90	47	5.240,45	169	13.062,99	6.338,24
447	Kab. Gorontalo	2005-2008	111	12.708,38	193	12.708,38	164	7.313,71	22	3.582,09	7	1.812,57	7.313,71
		2009	73	4.299,51	179	4.299,51	33	811,11	38	3.244,51	108	243,88	811,11
		2010	23	13.259,36	67	13.259,36	-	246,81	1	418,31	66	12.594,23	246,81
		2011	41	2.198,90	96	2.198,90	-	-	-	-	96	2.198,90	-
		Jumlah	248	32.466,17	535	32.466,17	197	8.371,63	61	7.244,92	277	16.849,60	8.371,63
448	Kab. Gorontalo Utara	2005-2008	8	68,50	24	68,50	5	15,00	19	53,50	-	-	15,00
		2009	22	3.032,59	73	3.032,59	44	459,11	24	1.980,63	5	592,84	459,11
		2010	26	2.320,85	56	2.320,85	8	173,07	32	1.856,00	16	291,77	173,07
		2011	13	127,36	29	127,36	-	-	-	-	29	127,36	-
		Jumlah	69	5.549,31	182	5.549,31	57	647,19	75	3.890,13	50	1.011,98	647,19
449	Kab. Pohuwato	2005-2008	94	35.612,79	171	35.612,79	122	27.018,26	32	7.571,90	17	1.022,62	27.018,26
		2009	35	8.414,00	98	8.414,00	70	6.614,73	9	1.186,59	19	612,68	6.614,73
		2010	19	629,01	53	629,01	41	200,44	10	428,57	2	-	200,44
		2011	11	94,39	30	94,39	1	76,32	1	18,06	28	-	76,32
		Jumlah	159	44.750,21	352	44.750,21	234	33.909,77	52	9.205,13	66	1.635,30	33.909,77

Halaman 91 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Nilai		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
450	Kota Gorontalo	2005-2008	99	26.070,38	188	26.070,34	118	3.459,26	30	17.020,65	40	5.590,43	3.459,26		
		2009	64	2.533,91	130	2.533,91	42	201,39	38	776,98	50	1.555,52	201,39		
		2010	30	2.919,56	136	2.919,56	30	46,49	10	-	96	2.873,06	46,49		
		2011	14	29,89	45	29,89	-	-	-	-	45	29,89	-		
		Jumlah	207	31.553,75	499	31.553,72	190	3.707,15	78	17.797,63	231	10.048,92	3.707,15		
451	Prov. Sulawesi Barat	2005-2008	120	75.773,87	232	41.677,91	111	18.245,45	40	19.863,93	81	3.568,53	18.245,45		
		2009	39	12.847,00	92	10.216,52	7	943,48	52	5.588,31	33	3.684,73	943,48		
		2010	45	16.616,44	97	15.772,67	11	2.722,28	82	13.050,38	4	-	2.722,28		
		2011	29	16.320,42	62	13.304,70	-	-	-	-	62	13.304,70	-		
		Jumlah	233	121.557,74	483	80.971,81	129	21.911,22	174	38.502,62	180	20.557,96	21.911,22		
452	Kab. Majene	2005-2008	75	25.543,44	182	8.047,49	21	691,90	115	4.250,61	46	3.104,97	691,90		
		2009	35	2.113,67	73	1.509,13	28	33,20	40	1.475,93	5	-	33,20		
		2010	30	3.860,04	65	3.749,85	9	47,00	38	1.825,60	18	1.877,25	47,00		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	140	31.517,16	320	13.306,49	58	772,10	193	7.552,15	69	4.982,23	772,10		
453	Kab. Mamasa	2005-2008	93	245.949,14	227	29.436,47	80	2.922,92	116	18.892,06	31	7.621,49	2.922,92		
		2009	20	8.904,18	50	2.995,50	33	607,14	17	2.388,36	-	-	607,14		
		2010	25	9.635,68	58	3.930,84	34	1.336,90	23	2.593,94	1	-	1.336,90		
		2011	26	6.817,91	56	5.976,51	-	-	-	-	56	5.976,51	-		
		Jumlah	164	271.306,92	391	42.339,33	147	4.866,96	156	23.874,37	88	13.598,00	4.866,96		
454	Kab. Mamuju	2005-2008	106	30.872,10	201	22.476,07	89	9.612,21	98	12.537,79	14	326,07	9.612,65		
		2009	44	10.277,81	85	2.632,21	25	687,37	52	1.944,83	8	-	687,37		
		2010	37	11.148,35	93	10.402,30	11	6.569,69	65	3.821,05	17	11,55	6.569,69		
		2011	19	3.144,30	39	2.958,19	-	-	-	-	39	2.958,19	-		
		Jumlah	206	55.442,57	418	38.468,80	125	16.869,28	215	18.303,68	78	3.295,82	16.869,73		

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
455	Kab. Mamuju Utara	2005-2008	81	336.583,84	163	16.632,15	95	9.385,06	64	7.147,09	4	100,00	9.385,06
		2009	39	7.243,21	90	7.013,72	30	2.209,28	57	4.680,88	3	123,55	2.209,28
		2010	31	4.969,76	72	4.457,18	-	-	-	-	72	4.457,18	-
		2011	25	11.117,47	55	11.117,47	-	-	-	-	55	11.117,47	-
		Jumlah	176	359.914,29	380	39.220,52	125	11.594,34	121	11.827,97	134	15.798,21	11.594,34
456	Kab. Polewali Mandar	2005-2008	93	82.617,17	188	18.662,02	88	5.867,42	74	11.454,72	26	1.339,86	5.880,99
		2009	40	8.275,17	86	8.020,44	28	1.140,85	53	6.879,58	5	-	1.140,85
		2010	46	13.578,80	98	13.578,80	16	1.521,09	56	11.794,61	26	263,09	1.521,09
		2011	23	5.711,48	54	5.711,48	-	-	-	-	54	5.711,48	-
		Jumlah	202	110.182,63	426	45.972,75	132	8.529,37	183	30.128,92	111	7.314,45	8.542,94
457	Prov. Maluku	2005-2008	80	30.241,26	184	28.725,86	60	505,09	97	21.336,65	27	6.884,12	473,55
		2009	27	8.952,23	67	8.952,23	11	2.059,40	53	6.892,83	3	-	2.059,40
		2010	19	9.029,56	57	9.029,56	16	-	40	9.029,56	1	-	-
		2011	12	6.955,31	53	1.348,44	2	-	44	347,57	7	1.000,86	-
		Jumlah	138	55.178,37	361	48.056,11	89	2.564,49	234	37.606,62	38	7.884,98	2.532,96
458	Kab. Buru	2005-2008	50	18.936,97	97	18.936,97	45	11.111,92	27	4.848,35	25	2.976,70	748,46
		2009	29	776,13	75	776,13	38	18,82	21	621,74	16	135,57	8,58
		2010	26	1.485,83	74	1.485,83	19	-	52	1.485,83	3	-	-
		2011	16	572,20	50	572,20	-	-	-	-	50	572,20	-
		Jumlah	121	21.771,15	296	21.771,15	102	11.130,74	100	6.955,92	94	3.684,48	757,04
459	Kab. Buru Selatan	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	19.685,67	78	19.685,67	-	-	-	-	78	19.685,67	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	19.685,67	78	19.685,67	-	-	-	-	78	19.685,67	-

Halaman 93 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vallas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
460	Kab. Kepulauan Aru	2005-2008	31	8.512,49	63	9.818,12	33	205,10	23	8.376,48	7	1.236,53	205,10		
		2009	53	50.308,96	131	50.308,96	75	3,29	42	49.741,76	14	563,90	3,29		
		2010	27	14.533,13	75	14.533,13	-	-	-	-	75	14.533,13	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	111	73.354,59	269	74.660,22	108	208,39	65	58.118,25	96	16.333,58	208,39		
461	Kab. Maluku Tengah	2005-2008	73	6.859,49	178	7.211,89	70	153,66	81	4.307,18	27	2.751,04	153,66		
		2009	40	72,57	95	72,57	63	26,30	26	46,27	6	-	26,30		
		2010	30	1.193,97	87	841,44	45	63,00	37	35,10	5	743,33	12,30		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	143	8.126,04	360	8.125,90	178	242,96	144	4.388,56	38	3.494,38	192,26		
462	Kab. Maluku Tenggara	2005-2008	73	11.015,58	145	12.955,79	90	7.002,68	41	3.466,02	14	2.487,08	7.002,68		
		2009	32	5.057,83	99	5.057,83	54	393,72	40	4.664,10	5	-	393,72		
		2010	49	7.026,64	135	9.126,08	72	478,39	49	8.647,68	14	-	475,33		
		2011	21	2.361,91	88	2.361,91	-	-	-	-	88	2.361,91	-		
		Jumlah	175	25.461,97	467	29.501,62	216	7.874,80	130	16.777,81	121	4.848,99	7.871,74		
463	Kab. Maluku Tenggara Barat	2005-2008	61	13.059,92	122	9.563,96	54	521,20	48	6.293,74	20	2.749,01	585,46		
		2009	23	6.114,24	63	5.488,74	21	1.227,90	36	1.784,10	6	2.476,73	1.227,90		
		2010	17	1.298,42	37	1.298,42	19	140,00	18	1.158,42	-	-	140,00		
		2011	28	648,23	83	625,07	-	-	-	-	83	625,07	-		
		Jumlah	129	21.120,83	305	16.976,21	94	1.889,11	102	9.236,27	109	5.850,82	1.953,37		
464	Kab. Maluku Barat Daya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	25	12.452,47	64	12.452,47	3	-	57	12.452,47	4	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	25	12.452,47	64	12.452,47	3	-	57	12.452,47	4	-	-		



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
465	Kab. Seram Bagian Barat	2005-2008	51	3.870,24	89	3.420,57	25	94,28	20	395,47	44	2.930,81	94,28
		2009	40	7.310,50	97	7.310,50	22	-	38	5.517,87	37	1.792,62	-
		2010	24	287,81	81	287,81	-	-	-	-	81	287,81	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	11.468,57	267	11.018,90	47	94,28	58	5.913,35	162	5.011,26	94,28
466	Kab. Seram Bagian Timur	2005-2008	42	5.546,41	88	4.241,05	34	12,65	50	4.093,03	4	135,36	12,65
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	16.279,05	77	16.279,05	16	-	43	9.319,39	18	6.959,65	-
		2011	21	20.947,73	80	-	28	-	17	-	35	-	-
		Jumlah	91	42.773,20	245	20.520,10	78	12,65	110	13.412,43	57	7.095,02	12,65
467	Kota Ambon	2005-2008	53	3.633,94	102	3.252,64	56	1.532,65	31	1.431,69	15	288,28	1.532,65
		2009	14	346,21	34	346,21	2	-	-	-	32	346,21	-
		2010	42	446,68	89	446,68	10	-	4	78,99	75	367,69	-
		2011	25	1.274,90	92	443,90	-	-	-	-	92	443,90	-
		Jumlah	134	5.701,74	317	4.489,44	68	1.532,65	35	1.510,69	214	1.446,09	1.532,65
468	Kota Tual	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	1.838,82	59	1.838,82	1	15,75	1	617,98	57	1.205,08	15,75
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	1.838,82	59	1.838,82	1	15,75	1	617,98	57	1.205,08	15,75
469	Prov. Maluku Utara	2005-2008	145	128.661,41	277	79.455,63	63	1.416,05	67	70.564,61	147	7.474,95	1.416,05
		2009	66	11.263,90	113	2.486,94	9	91,80	34	1.604,54	70	790,58	91,80
		2010	69	8.519,38	154	6.552,17	11	-	26	1.295,52	117	5.256,65	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	280	148.444,70	544	88.494,74	83	1.507,86	127	73.464,68	334	13.522,19	1.507,86

**Halaman 95 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
470	Kab. Halmahera Barat	2005-2008	81	23.445,24	169	7.657,59	127	1.454,56	38	6.184,03	4	18,99	1.454,56
		2009	49	26.602,38	80	16.625,38	34	947,97	31	14.746,51	15	930,89	947,97
		2010	41	18.028,55	122	17.343,90	6	46,68	116	17.297,21	-	-	46,68
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	171	68.076,18	371	41.626,87	167	2.449,22	185	38.227,76	19	949,88	2.449,22
471	Kab. Halmahera Selatan	2005-2008	86	39.164,11	180	30.582,39	103	2.832,97	22	4.177,04	55	23.572,37	2.832,97
		2009	43	12.820,75	103	10.153,53	52	51,75	22	7.159,48	29	2.942,29	51,75
		2010	45	22.531,06	80	19.310,27	29	-	32	19.174,11	19	136,15	-
		2011	18	15.887,89	30	11.015,39	-	-	-	-	30	11.015,39	-
		Jumlah	192	90.403,83	393	71.061,59	184	2.884,72	76	30.510,64	133	37.666,22	2.884,72
472	Kab. Halmahera Tengah	2005-2008	71	19.781,59	140	10.602,62	103	2.529,18	35	7.964,61	2	108,83	2.529,18
		2009	50	32.449,40	122	26.941,17	44	95,70	20	16.396,62	58	10.448,84	95,70
		2010	30	29.074,35	82	27.045,17	27	4.468,38	43	22.549,78	12	27,00	4.468,38
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	151	81.305,35	344	64.588,97	174	7.093,26	98	46.911,01	72	10.584,68	7.093,26
473	Kab. Halmahera Timur	2005-2008	71	18.511,54	147	18.511,54	113	9.706,78	31	8.804,76	3	-	9.706,78
		2009	51	17.982,03	108	15.615,53	18	1.490,16	19	10.547,11	71	3.578,25	1.490,16
		2010	48	19.758,07	116	14.969,96	8	259,74	3	171,22	105	14.538,99	259,74
		2011	14	7.795,81	56	7.620,03	1	1.739,73	3	726,16	52	5.154,13	1.739,73
		Jumlah	184	64.047,46	427	56.717,07	140	13.196,42	56	20.249,26	231	23.271,38	13.196,42
474	Kab. Halmahera Utara	2005-2008	101	26.214,22	222	16.454,50	83	2.521,85	61	8.911,19	78	5.021,45	2.521,85
		2009	39	11.751,22	76	10.280,12	15	325,52	23	9.357,82	38	596,77	325,52
		2010	50	8.641,45	103	8.366,06	6	513,19	10	2.349,62	87	5.503,25	513,19
		2011	20	799,62	41	501,42	-	-	-	-	41	501,42	-
		Jumlah	210	47.406,51	442	35.602,12	104	3.360,57	94	20.618,64	244	11.622,90	3.360,57

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
475	Kab. Kepulauan Sula	2005-2008	83	94.793,68	147	36.068,59	64	7.843,68	53	23.779,03	30	4.445,87	7.843,68
		2009	45	25.854,76	99	22.851,66	10	347,35	19	11.186,61	70	11.317,68	347,35
		2010	21	4.927,97	75	4.927,97	19	48,07	46	4.879,89	10	-	48,07
		2011	29	16.942,89	96	15.553,93	-	-	1	15,40	95	15.538,53	-
		Jumlah	178	142.519,32	417	79.402,16	93	8.239,12	119	39.860,94	205	31.302,08	8.239,12
476	Kab. Pulau Morotai	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	968,56	31	968,56	-	-	-	-	31	968,56	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	968,56	31	968,56	-	-	-	-	31	968,56	-
477	Kota Ternate	2005-2008	103	21.521,97	165	11.287,39	100	2.272,87	44	8.287,51	21	726,99	2.272,87
		2009	64	2.336,22	122	1.750,89	78	232,18	40	1.518,71	4	-	232,18
		2010	41	9.095,93	64	9.058,17	25	155,68	24	8.902,48	15	-	155,68
		2011	42	36.103,93	125	32.378,90	7	206,67	50	1.202,75	68	30.969,48	206,67
		Jumlah	250	69.058,05	476	54.475,36	210	2.867,41	158	19.911,47	108	31.696,47	2.867,41
478	Kota Tidore Kepulauan	2005-2008	82	14.877,07	156	13.293,68	125	12.786,77	18	443,61	13	63,29	12.786,77
		2009	56	12.595,91	104	6.487,42	84	1.789,51	16	4.697,91	4	-	1.789,51
		2010	50	25.869,85	115	10.480,42	84	125,07	25	10.355,35	6	-	125,07
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	188	53.342,83	375	30.261,53	293	14.701,35	59	15.496,88	23	63,29	14.701,35
479	Prov. Papua	2005-2008	103	165.087,24	147	110.094,25	69	6.070,06	60	84.703,60	18	19.320,59	6.031,76
		2009	44	26.807,84	73	26.807,84	31	4.503,20	42	22.304,64	-	-	4.503,20
		2010	55	378.546,14	105	193.487,20	46	11.025,98	56	182.461,22	3	-	11.025,98
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	202	570.441,23	325	330.389,30	146	21.599,24	158	289.469,46	21	19.320,59	21.560,94

Halaman 97 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
480	Kab. Asmat	2005-2008	49	679.392,01	66	124.503,07	40	37.305,80	26	87.197,27	-	-	6.000,80
		2009	12	367.468,71	29	16.113,11	22	14.650,70	7	1.462,40	-	-	795,05
		2010	20	27.917,28	39	14.744,31	18	7.575,21	12	4.039,27	9	3.129,82	659,50
		2011	9	13.499,88	15	13.499,88	-	-	-	-	15	13.499,88	-
		Jumlah	90	1.088.277,90	149	168.860,38	80	59.531,73	45	92.698,94	24	16.629,71	7.455,37
481	Kab. Biak Numfor	2005-2008	25	2.145.745,05	38	142.528,66	27	139.682,37	11	2.846,28	-	-	7.158,48
		2009	24	66.160,70	50	8.699,95	29	7.940,43	21	759,51	-	-	717,10
		2010	11	142.384,55	24	128.897,32	10	22.609,12	11	106.288,19	3	-	433,76
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	60	2.354.290,31	112	280.125,94	66	170.231,94	43	109.893,99	3	-	8.309,34
482	Kab. Boven Digoel	2005-2008	47	882.007,94	76	398.058,37	42	76.703,52	27	321.037,27	7	317,58	76.703,52
		2009	21	78.848,50	44	65.956,03	32	56.634,28	11	9.321,75	1	-	-
		2010	12	263.201,85	26	66.768,40	11	17.085,64	13	44.156,01	2	5.526,73	-
		2011	12	86.149,47	22	85.311,69	-	-	-	-	22	85.311,69	-
		Jumlah	92	1.310.207,77	168	616.094,51	85	150.423,44	51	374.515,05	32	91.156,01	76.703,52
483	Kab. Dogiyai	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	12.927,69	36	12.128,10	14	3.214,54	17	8.913,55	5	-	5.053,16
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	12.927,69	36	12.128,10	14	3.214,54	17	8.913,55	5	-	5.053,16
484	Kab. Jayapura	2005-2008	70	801.178,22	121	18.578,44	92	9.651,54	29	8.926,89	-	-	9.651,54
		2009	20	24.204,97	23	24.204,97	16	6.680,91	7	17.524,05	-	-	24.204,97
		2010	20	75.468,09	37	33.869,93	9	7.506,38	9	24.557,31	19	1.806,22	33.869,93
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	110	900.851,29	181	76.653,35	117	23.838,85	45	51.008,27	19	1.806,22	67.726,46

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
485	Kab. Jayawijaya	2005-2008	40	350.402,24	53	179.648,73	21	7.039,24	32	172.609,48	-	-	7.039,24
		2009	29	195.691,73	50	188.615,63	29	2.447,89	21	186.167,74	-	-	2.447,89
		2010	54	130.168,90	102	11.658,61	67	1.090,51	34	10.568,09	1	-	490,51
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	123	676.262,88	205	379.922,98	117	10.577,65	87	369.345,33	1	-	9.977,65
486	Kab. Keerom	2005-2008	34	42.681,02	62	41.525,68	29	13.766,09	33	27.759,58	-	-	13.766,09
		2009	21	144.572,28	42	125.191,17	24	97.061,15	18	28.130,02	-	-	97.061,15
		2010	25	192.592,86	50	151.418,72	21	1.080,19	29	150.338,53	-	-	1.080,19
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	80	379.846,18	154	318.135,58	74	111.907,44	80	206.228,14	-	-	111.907,44
487	Kab. Mappi	2005-2008	36	1.521.359,45	73	524.230,04	39	357.392,20	30	161.938,18	4	4.899,65	-
		2009	22	902.351,72	41	885.404,60	14	375.527,54	27	509.877,05	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	58	2.423.711,17	114	1.409.634,64	53	732.919,75	57	671.815,24	4	4.899,65	-
488	Kab. Merauke	2005-2008	45	7.613.484,82	74	87.490,71	36	20.108,75	30	67.346,04	8	35,91	-
		2009	51	581.618,49	91	97.033,14	46	4.960,04	44	88.461,51	1	3.611,59	-
		2010	10	555.333,12	20	28.429,85	6	645,00	14	27.784,85	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	106	8.750.436,45	185	212.953,72	88	25.713,79	88	183.592,42	9	3.647,50	-
489	Kab. Mimika	2005-2008	30	1.749.108,86	56	22.264,87	38	19.359,33	18	2.905,54	-	-	15.156,98
		2009	21	1.108.818,27	43	237.195,23	23	201.202,00	14	35.993,23	6	-	-
		2010	7	113.979,29	13	113.979,29	1	113.566,39	6	412,90	6	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	58	2.971.906,43	112	373.439,40	62	334.127,72	38	39.311,67	12	-	15.156,98

Halaman 99 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
490	Kab. Nabire	2005-2008	53	799.238,44	56	38.932,80	9	13.608,43	19	11.767,09	28	13.557,27	-
		2009	24	632.556,33	46	135.782,67	26	93.827,01	19	40.955,65	1	1.000,00	-
		2010	35	658.455,14	52	632.956,32	20	1.888,56	21	619.727,92	11	11.339,83	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	112	2.090.249,92	154	807.671,80	55	109.324,01	59	672.450,67	40	25.897,11	-
491	Kab. Paniai	2005-2008	41	423.514,54	58	49.124,30	28	21.307,84	14	22.316,02	16	5.500,43	21.307,84
		2009	11	409.051,83	22	325.425,66	8	57.287,95	14	268.137,71	-	-	57.287,95
		2010	27	90.087,12	51	89.717,12	18	51.149,87	20	38.491,68	13	75,56	51.149,87
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	79	922.653,50	131	464.267,10	54	129.745,68	48	328.945,42	29	5.575,99	129.745,68
492	Kab. Pegunungan Bintang	2005-2008	38	628.406,99	63	221.052,90	37	32.541,08	26	188.511,82	-	-	32.541,08
		2009	8	31.437,09	15	13.669,66	10	-	5	13.669,66	-	-	-
		2010	20	61.969,56	43	29.439,28	8	27.125,23	1	42,43	34	2.271,61	-
		2011	17	218.361,35	49	198.449,65	-	-	-	-	49	198.449,65	-
		Jumlah	83	940.175,01	170	462.611,51	55	59.666,31	32	202.223,92	83	200.721,27	32.541,08
493	Kab. Puncak Jaya	2005-2008	37	1.119.889,77	52	384.747,81	15	3.268,90	20	370.186,01	17	11.292,89	3.268,90
		2009	24	507.808,17	55	246.611,45	34	169.633,63	15	75.559,56	6	1.418,26	169.633,63
		2010	26	92.638,38	62	10.363,54	33	1.765,68	29	8.597,86	-	-	2.134,00
		2011	8	6.781,22	23	-	-	-	-	-	23	-	-
		Jumlah	95	1.727.117,56	192	641.722,81	82	174.668,21	64	454.343,44	46	12.711,15	175.036,53
494	Kab. Sarmi	2005-2008	48	39.262,75	83	25.680,09	52	3.819,69	31	21.860,39	-	-	3.819,69
		2009	16	39.357,05	32	25.532,51	17	1.956,05	15	23.576,45	-	-	-
		2010	11	1.348,24	22	1.348,24	-	-	-	-	22	1.348,24	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	75	79.968,05	137	52.560,85	69	5.775,75	46	45.436,85	22	1.348,24	3.819,69

**Halaman 100 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
495	Kab. Supiori	2005-2008	32	251.205,83	46	126.976,37	13	13.555,77	20	112.969,37	13	451,22	5.013,46
		2009	22	328.073,77	106	262.137,97	53	131.068,98	27	1.623,50	26	129.445,48	25,00
		2010	23	212.096,36	55	24.963,19	19	138,84	31	24.824,35	5	-	138,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	77	791.375,98	207	414.077,54	85	144.763,59	78	139.417,23	44	129.896,70	5.177,30
496	Kab. Tolikara	2005-2008	31	203.070,53	52	186.633,66	26	14.599,91	26	172.033,74	-	-	14.150,00
		2009	36	152.969,57	67	141.084,97	33	190,76	34	140.894,20	-	-	-
		2010	10	6.148,80	21	4.648,80	-	-	-	-	21	4.648,80	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	77	362.188,90	140	332.367,43	59	14.790,68	60	312.927,95	21	4.648,80	14.150,00
497	Kab. Waropen	2005-2008	34	72.644,34	45	67.389,66	2	4.482,51	12	17.199,77	31	45.707,38	3.529,21
		2009	33	697.075,36	74	680.440,35	15	865,64	31	628.590,68	28	50.984,03	865,64
		2010	14	241.195,26	53	73.624,28	11	-	42	73.624,28	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	81	1.010.914,98	172	821.454,31	28	5.348,15	85	719.414,73	59	96.691,41	4.394,85
498	Kab. Yahukimo	2005-2008	15	545.394,71	18	213.321,99	6	-	4	212.961,99	8	360,00	-
		2009	45	705.485,57	88	163.145,08	40	14.829,03	48	148.316,04	-	-	14.829,03
		2010	25	491.911,18	21	22.151,05	13	22.151,05	8	-	-	-	4.080,64
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	85	1.742.791,47	127	398.618,13	59	36.980,09	60	361.278,04	8	360,00	18.909,68
499	Kab. Kepulauan Yapen	2005-2008	31	97.250,83	49	91.464,19	-	-	-	-	49	91.464,19	-
		2009	23	365.470,75	46	309.392,59	12	2.259,95	22	295.662,58	12	11.470,05	2.259,95
		2010	17	341.246,78	53	25.863,00	28	1.599,44	23	24.263,56	2	-	1.599,44
		2011	12	13.780,10	-	5.603,69	-	-	-	-	-	5.603,69	-
		Jumlah	83	817.748,48	148	432.323,49	40	3.859,40	45	319.926,14	63	108.537,94	3.859,40

**Halaman 101 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	Kab. Mamberamo Raya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	18	46.200,30	34	46.200,30	24	32.307,49	10	13.892,80	-	-	32.307,49
		2010	25	213.557,46	53	127.847,98	14	-	33	127.847,98	6	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	43	259.757,76	87	174.048,28	38	32.307,49	43	141.740,79	6	-	32.307,49
501	Kab. Mamberamo Tengah	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	34.260,07	54	34.200,04	-	-	-	-	54	34.200,04	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	34.260,07	54	34.200,04	-	-	-	-	54	34.200,04	-
502	Kab. Nduga	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	39.447,41	35	33.221,78	11	8.569,29	18	24.246,25	6	406,22	870,71
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	39.447,41	35	33.221,78	11	8.569,29	18	24.246,25	6	406,22	870,71
503	Kab. Lany Jaya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	6.782,58	20	11.021,43	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	6.782,58	20	11.021,43	-	-	-	-	20	11.021,43	-
504	Kab. Yalimo	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	19.057,90	38	19.057,90	-	-	11	17.458,76	27	1.599,14	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	19.057,90	38	19.057,90	-	-	11	17.458,76	27	1.599,14	-



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
505	Kota Jayapura	2005-2008	83	57.377,61	116	24.980,58	62	597,01	39	19.188,78	15	5.194,78	597,01
		2009	16	66.783,02	29	29.746,83	18	2.823,50	11	26.923,33	-	-	2.823,50
		2010	62	73.945,77	94	60.489,16	31	12.695,52	62	47.793,64	1	-	12.695,52
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	161	198.106,40	239	115.216,59	111	16.116,04	112	93.905,76	16	5.194,78	16.116,04
506	Prov. Papua Barat	2005-2008	91	26.250,30	204	25.813,35	80	-	33	5.426,09	91	20.387,25	-
		2009	60	38.972,23	155	38.972,23	44	145,00	8	7.585,41	103	31.241,80	145,00
		2010	43	67.693,14	131	61.013,36	11	23,00	8	262,85	112	60.727,51	23,00
		2011	32	8.442,24	88	6.000,62	-	-	-	-	88	6.000,62	-
		Jumlah	226	141.357,91	578	131.799,57	135	168,00	49	13.274,36	394	118.357,21	168,00
507	Kab. Fakfak	2005-2008	83	15.057,04	179	12.890,83	116	1.082,75	35	9.529,06	28	2.279,01	1.082,75
		2009	50	11.669,54	134	8.322,31	82	806,85	18	6.451,78	34	1.063,68	806,85
		2010	28	7.907,45	63	4.376,18	15	63,14	3	140,49	45	4.172,54	63,14
		2011	14	2.668,99	27	1.685,27	-	-	-	-	27	1.685,27	-
		Jumlah	175	37.303,04	403	27.274,61	213	1.952,74	56	16.121,34	134	9.200,51	1.952,74
508	Kab. Kaimana	2005-2008	85	15.769,54	204	12.040,65	64	3.702,83	24	6.766,02	116	1.571,79	3.702,83
		2009	32	5.495,76	75	5.336,70	28	1.626,91	7	2.343,10	40	1.366,68	1.626,91
		2010	24	5.343,23	57	5.038,11	42	1.397,46	3	1.558,49	12	2.082,15	1.397,46
		2011	11	2.359,57	31	622,26	-	-	-	-	31	622,26	622,26
		Jumlah	152	28.968,12	367	23.037,74	134	6.727,20	34	10.667,63	199	5.642,90	7.349,47
509	Kab. Manokwari	2005-2008	88	51.776,32	169	23.423,38	27	10.978,43	45	564,00	97	11.880,94	10.978,43
		2009	29	34.849,11	78	8.515,79	-	-	-	-	78	8.515,79	-
		2010	62	21.336,16	82	20.972,03	6	13.163,82	-	-	76	7.808,20	13.163,82
		2011	11	1.719,80	42	468,40	-	-	-	-	42	468,40	-
		Jumlah	190	109.681,42	371	53.379,61	33	24.142,26	45	564,00	293	28.673,34	24.142,26

**Halaman 103 - Lampiran 38**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
510	Kab. Raja Ampat	2005-2008	56	38.736,57	114	38.736,57	29	3.791,77	28	19.411,30	57	15.533,49	3.791,77
		2009	29	8.023,62	101	8.023,62	25	3.703,16	44	2.135,86	32	2.184,59	3.703,16
		2010	20	14.836,39	62	14.836,39	20	1.514,53	34	13.321,85	8	-	1.514,53
		2011	17	1.974,74	44	661,04	-	-	-	-	44	661,04	-
		Jumlah	122	63.571,33	321	62.257,64	74	9.009,47	106	34.869,02	141	18.379,14	9.009,47
511	Kab. Sorong	2005-2008	66	126.416,40	126	22.445,42	64	3.450,28	9	4.346,20	53	14.648,93	3.450,28
		2009	46	4.758,87	114	4.758,84	50	1.215,42	28	2.709,62	36	833,79	1.215,42
		2010	33	4.472,21	94	4.472,21	61	2.638,12	11	1.834,09	22	-	2.638,12
		2011	5	14.800,18	16	476,71	-	-	-	-	16	476,71	-
		Jumlah	150	150.447,68	350	32.153,21	175	7.303,84	48	8.889,92	127	15.959,44	7.303,84
512	Kab. Sorong Selatan	2005-2008	73	29.698,31	149	29.698,31	78	8.020,60	28	11.303,69	43	10.374,02	8.020,60
		2009	31	2.666,75	81	2.546,75	54	328,60	20	2.218,15	7	-	328,60
		2010	23	3.962,45	54	3.531,25	-	414,02	4	527,90	50	2.589,32	414,02
		2011	8	2.331,57	33	1.379,44	-	-	-	-	33	1.379,44	-
		Jumlah	135	38.659,09	317	37.155,77	132	8.763,23	52	14.049,74	133	14.342,79	8.763,23
513	Kab. Teluk Bintuni	2005-2008	72	72.397,82	186	31.871,79	65	2.975,39	10	5.832,88	111	23.063,52	2.975,39
		2009	51	11.050,56	163	10.142,47	30	916,77	10	3.455,19	123	5.770,50	916,77
		2010	25	11.795,92	66	7.259,52	10	180,21	1	1.570,00	55	5.509,31	180,21
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	148	95.244,31	415	49.273,80	105	4.072,37	21	10.858,07	289	34.343,34	4.072,37
514	Kab. Teluk Wondama	2005-2008	54	19.434,23	103	19.434,23	17	1.227,14	20	6.477,46	66	11.729,62	1.227,14
		2009	58	22.680,34	179	22.680,34	3	122,85	1	-	175	22.557,49	122,85
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	631,43	50	631,43	-	-	-	-	50	631,43	-
		Jumlah	130	42.746,01	332	42.746,01	20	1.349,99	21	6.477,46	291	34.918,55	1.349,99

## Halaman 104 - Lampiran 38

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
515	Kota Sorong	2005-2008	57	25.431,56	81	25.119,66	49	3.830,01	6	15.018,46	26	6.271,18	3.830,01
		2009	23	6.355,71	66	6.355,71	24	-	7	869,32	35	5.486,39	-
		2010	34	18.152,61	96	18.152,61	50	-	13	12.168,67	33	5.983,94	-
		2011	25	11.623,26	71	11.623,26	1	210,23	4	8.980,57	66	2.432,45	210,23
		Jumlah	139	61.563,25	314	61.251,25	124	4.040,24	30	37.037,03	160	20.173,97	4.040,24
		<b>Total</b>	<b>77.623</b>	<b>170.179.204,86</b>	<b>161.551</b>	<b>36.919.434,02</b>	<b>87.937</b>	<b>11.013.558,95</b>	<b>34.753</b>	<b>17.729.757,69</b>	<b>38.861</b>	<b>8.176.117,38</b>	<b>8.997.151,29</b>
				<b>USD 10.729,50</b>		<b>USD 10.729,50</b>		<b>USD 449,96</b>		<b>USD 9.949,54</b>		<b>USD 329,98</b>	<b>USD 449,96</b>

Keterangan:

1. Untuk Tahun 2011 hanya menyajikan Tindak Lanjut Semester I.
2. Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms Excel.
3. Angka pada kolom 12 dan 13 sudah termasuk rincian Tindak Lanjut yang tidak dapat ditindaklanjuti secara sah sejumlah 56 kasus senilai 52,92 miliar

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN, BHMN, KKKK, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, dan Otorita Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>BUMN (Induk Perusahaan)</b>													
1	PT PLN (Persero)	2005-2008	101	12.523.981,26	130	482.044,61	45	94.180,85	45	358.955,70	40	28.908,05	94.180,85	
		2009	12	JPY 274,280,52	20	JPY 274,280,52	8	JPY 270,977,12	11	JPY 3.303,40	1	-	JPY 270,977,12	
		2010	20	2.791.122,28	20	1.844.357,89	7	1.828.695,34	19	15.662,55	-	-	1.828.976,06	
				11.382.154,37	26	19.701,47	7	16.701,47	19	3.000,00	-	-	16.701,47	
		2011	4	USD 37,07	4	USD 37,07	-	USD 37,07	-	-	4	25.811,97	USD 37,07	
		Jumlah	137	107.428,30	180	25.811,97	60	1.939.577,67	75	377.618,25	45	54.720,03	1.939.858,39	
				26.804.686,22	180	2.371.915,96	60	USD 37,07	-	-	-	-	USD 37,07	
				JPY 274,280,52		JPY 274,280,52		JPY 270,977,12		JPY 3.303,40			JPY 270,977,12	
2	PT Bukit Asam (Persero)	2005-2008	17	10.265,72	28	1.365,01	24	1.315,73	4	49,27	-	-	1.315,73	
		2009	16	176.878,82	22	64.392,82	18	64.392,82	4	-	-	-	72.474,58	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79	
		2011	6	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	
		Jumlah	39	187.144,55	57	65.757,84	42	65.708,56	8	49,27	7	-	73.790,32	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79	
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	2005-2008	11	84.673,85	18	16.940,23	11	12.851,06	7	4.089,16	-	-	12.851,06	
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	
		Jumlah	13	84.673,85	20	16.940,23	11	12.851,06	7	4.089,16	2	-	12.851,06	
4	PT Sarana Karya (Persero)	2005-2008	7	1.980,00	7	1.980,00	5	1.877,39	2	102,60	-	-	1.877,39	
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	7	1.980,00	7	1.980,00	5	1.877,39	2	102,60	-	-	1.877,39	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	825.373,58	6	-	-	-	5	-	1	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	3	825.373,58	6	-	-	-	5	-	1	-	-
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2005-2008	11	52.790,84	18	52.790,84	7	17.751,09	11	35.039,74	-	-	17.751,09
				USD 19,403.30		USD 19,403.30		USD 4,828.68		USD 14,574.62			USD 4,828.68
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	52.790,84	18	52.790,84	7	17.751,09	11	35.039,74	-	-	17.751,09
				USD 19,403.30		USD 19,403.30		USD 4,828.68		USD 14,574.62			USD 4,828.68
8	PT Pertamina (Persero)	2005-2008	300	-	329	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	77	187.404,70	177	8.705,40	59	-	10	-	108	8.705,40	-
				USD 345,572.34		USD 32,489.22		-		USD 1,394.00		USD 31,095.22	-
		2010	83	105.291,13	138	12.146,81	26	-	-	-	112	12.146,81	-
		2011	61	6.472,82	88	6.472,82	22	6.472,82	50	-	16	-	-
		Jumlah	521	299.168,66	732	27.325,04	436	6.472,82	60	-	236	20.852,21	-
				USD 345,572.34		USD 32,489.22		-		USD 1,394.00		USD 31,095.22	-
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2005-2008	17	459.431,54	31	2.358,82	8	-	20	2.358,82	3	-	-
				USD 735.42		USD 557.73		-		USD 557.73		-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	-	19	-	-	-	-	-	19	-	-
		2011	12	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-
		Jumlah	43	459.431,54	74	2.358,82	8	-	20	2.358,82	46	-	-
				USD 735.42		USD 557.73		-		USD 557.73		-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2005-2008	14	61.292,65	22	-	1	-	21	-	-	-	-
		2009-2011	-	USD 4,683,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	61.292,65	22	-	1	-	21	-	-	-	-
				USD 4,683,99									
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2005-2008	8	1.767,48	10	-	2	-	8	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	1.767,48	10	-	2	-	8	-	-	-	-
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2005-2008	6	37.441,25	14	-	11	-	3	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	138.228,98	42	91,84	-	-	-	-	42	91,84	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	175.670,23	56	91,84	11	-	3	-	42	91,84	-
13	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2005-2008	28	228.902,26	51	477,61	-	-	-	-	51	477,61	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	144.187,43	43	1.735,97	-	-	-	-	43	1.735,97	-
		2011	26	351.885,40	65	36.822,90	-	-	-	-	65	36.822,90	-
		Jumlah	70	724.975,11	159	39.036,49	-	-	-	-	159	39.036,49	-
14	Perum Damri	2005-2008	19	24.140,05	26	43,64	2	-	-	-	24	43,64	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	19	24.140,05	26	43,64	2	-	-	-	24	43,64	-
15	Perum PPD	2005-2008	13	20.657,93	26	8.835,14	-	-	-	-	26	8.835,14	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2009-2011 Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	20.657,93	26	8.835,14	-	-	-	-	26	8.835,14	-
16	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2005-2008	8	53.783,63	12	-	-	-	-	-	12	-	-
				USD 206,50									
		2009-2011 Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8	53.783,63	12	-	-	-	-	-	12	-	-
				USD 206,50									
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2005-2008	6	54.269,40	10	65,08	9	-	1	65,08	-	-	-
		2009-2011 Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6	54.269,40	10	65,08	9	-	1	65,08	-	-	-
18	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2005-2008	6	263,06	10	-	-	-	-	-	10	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	97.244,79	31	3.413,27	-	-	-	-	31	3.413,27	-
		2011 Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			21	97.507,85	41	3.413,27	-	-	-	-	41	3.413,27	-
19	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2005-2008	12	106.455,48	17	9.515,21	-	-	-	-	17	9.515,21	-
		2009-2011 Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12	106.455,48	17	9.515,21	-	-	-	-	17	9.515,21	-
20	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2005-2008	9	13.683,82	17	-	-	-	-	-	17	-	-
		2009-2011 Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9	13.683,82	17	-	-	-	-	-	17	-	-
				USD 1,629,52									
			9	13.683,82	17	-	-	-	-	-	17	-	-
				USD 1,629,52									

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2005-2008	7	12.941,40	7	1.516,82	6	1.516,82	1	-	-	-	1.516,82
		2009	21	416.073,26	33	123.254,65	4	-	-	-	29	123.254,65	-
		2010	16	82.196,12	27	66,00	2	-	-	-	25	66,00	-
				USD 1.21		USD 1.21		-	-	-		USD 1.21	-
		2011	7	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-
		Jumlah	51	511.210,79	87	124.837,48	12	1.516,82	1	-	74	123.320,65	1.516,82
				USD 1.21		USD 1.21		-	-	-		USD 1.21	-
22	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2005-2008	14	15.094,87	22	698,35	-	-	-	-	22	698,35	-
				USD 51.32		USD 6.65		-	-	-		USD 6.65	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	15.094,87	22	698,35	-	-	-	-	22	698,35	-
				USD 51.32		USD 6.65		-	-	-		USD 6.65	-
23	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	2005-2008	9	16.280,58	16	539,92	-	-	-	-	16	539,92	-
				USD 43.86		-		-	-	-		-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	16.280,58	16	539,92	-	-	-	-	16	539,92	-
				USD 43.86		-		-	-	-		-	-
24	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	13.319,03	21	2.500,00	-	-	-	-	21	2.500,00	-
				USD 8.83		USD 8.83		-	-	-		USD 8.83	-
				CNY 896.89		-		-	-	-		-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	13.319,03	21	2.500,00	-	-	-	-	21	2.500,00	-
				USD 8.83		USD 8.83		-	-	-		USD 8.83	-
				CNY 896.89		-		-	-	-		-	-



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	PT Bina Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Indah Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT Yodya Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT Indra Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT Virama Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT Amarta Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	361.570,57	30	130.432,50	-	-	-	-	30	130.432,50	-
				USD 29,327,09			-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	361.570,57	30	130.432,50	-	-	-	-	30	130.432,50	-
				USD 29,327,09			-	-	-	-	-	-	-
32	PT Istaka Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2005-2008	13	486.469,41	15	330.883,30	3	200,00	12	330.683,30	-	-	200,00
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	486.469,41	15	330.883,30	3	200,00	12	330.683,30	-	-	200,00
34	PT Nindya Karya (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	142.585,00	22	144.220,93	-	-	-	-	22	144.220,93	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	142.585,00	22	144.220,93	-	-	-	-	22	144.220,93	-
35	PT Hutama Karya (Persero)	2005-2008	21	387.471,64	26	302.408,76	11	1.760,62	15	300.648,14	-	-	1.760,62
				USD 17,022.50		USD 940.00				USD 940.00			
				SGD 836.14		SGD 106.30				SGD 106.30			
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	387.471,64	26	302.408,76	11	1.760,62	15	300.648,14	-	-	1.760,62
				USD 17,022.50		USD 940.00				USD 940.00			
				SGD 836.14		SGD 106.30				SGD 106.30			
36	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	211.647,70	26	129.073,04	-	-	-	-	26	129.073,04	-
				USD 11,502.93		USD 11,498.63						USD 11,498.63	
		2011	6	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-
		Jumlah	16	211.647,70	34	129.073,04	-	-	-	-	34	129.073,04	-
				USD 11,502.93		USD 11,498.63						USD 11,498.63	
37	Perum Perumnas	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	15	44.059,62	27	12.671,11	7	-	16	5.424,62	4	7.246,48	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	44.059,62	27	12.671,11	7	-	16	5.424,62	4	7.246,48	-
38	PT Brantas Abipraya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT Waskita Karya (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	71.387,59	24	37.692,71	-	-	-	-	24	37.692,71	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Jml	Nilai	Belum Ditindaklanjuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	71.387,59	24	37.692,71	-	-	-	-	24	37.692,71	-
40	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	618.980,55	18	605.439,69	-	-	-	-	18	605.439,69	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	14	-	23	-	-	-	-	-	23	-	-
		Jumlah	25	618.980,55	41	605.439,69	-	-	-	-	41	605.439,69	-
41	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2005-2008	11	20.832,13	11	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	2	-	8.818,20
				USD 130,879.53		USD 130,879.53		USD 618.78				USD 130,260.75	USD 618.78
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
		Jumlah	13	20.832,13	14	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	5	-	8.818,20
				USD 130,879.53		USD 130,879.53		USD 618.78				USD 130,260.75	USD 618.78
42	Perum LKBN Antara	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Perum Produksi Film Negara	2005-2008	15	1.436,85	17	2.475,99	-	-	-	-	17	2.475,99	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	1.436,85	17	2.475,99	-	-	-	-	17	2.475,99	-
44	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2005-2008	9	44.623,56	9	44.623,56	6	3.268,19	3	41.355,37	-	-	3.268,19
				USD 86.73		USD 86.73		USD 86.73					USD 86.73
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	44.623,56	9	44.623,56	6	3.268,19	3	41.355,37	-	-	3.268,19
				USD 86.73		USD 86.73		USD 86.73					USD 86.73
45	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
46	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2005-2008 2009-2010 2011 Jumlah	9 - 5 14	7.367,86 - - 7.367,86	9 - 8 17	6.045,91 - - 6.045,91	5 - - 5	2.546,96 - - 2.546,96	4 - - 4	3.498,95 - - 3.498,95	- - 8 8	- - - -	2.546,96 - - 2.546,96	
47	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	PT Hotel Indonesia Natour	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2005-2008 2009 2010 2011 Jumlah	- - 5 - 5	- - 26.646,73 - 26.646,73 USD 412.07	- - 12 - 12	- - 5,60 USD 412.79 5,60 USD 412.79	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - 12 - 12	- - 5,60 USD 412.79 5,60 USD 412.79	- - - - -
52	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2005-2008 2009 2010 2011 Jumlah	- - 15 - 15	- - 6.455.806,56 - 6.455.806,56	- - 23 - 23	- - 9.649,00 - 9.649,00	- - 4 - 4	- - - - -	- - 7 - 7	- - - - -	- - - - -	- - 12 - 12	- - 9.649,00 - 9.649,00	- - - - -

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	PT PAL Indonesia (Persero)	2005-2008	34	309.276,14	49	73.202,63	26	71.651,01	17	1.082,89	6	468,72	71.651,01
				USD 1,454.09		USD 1,365.58		USD 767,33		USD 598.24			USD 767,33
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	34	309.276,14	49	73.202,63	26	71.651,01	17	1.082,89	6	468,72	71.651,01
				USD 1,454.09		USD 1,365.58		USD 767,33		USD 598.24			USD 767,33
54	PT Pindad (Persero)	2005-2008	11	51.421,17	17	42.036,33	8	35.857,88	9	6.178,45	-	-	35.857,88
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	51.421,17	17	42.036,33	8	35.857,88	9	6.178,45	-	-	35.857,88
55	PT Dahana (Persero)	2005-2008	35	446.771,08	51	77,27	32	77,27	7	-	12	-	77,27
		2009-2011	-	-	-	USD 309.80	-	-	-	USD 309.80	-	-	-
		Jumlah	35	446.771,08	51	77,27	32	77,27	7	-	12	-	77,27
				USD 2,953.23		USD 309.80		USD 309.80		USD 309.80			-
56	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2005-2008	33	174.988,90	38	28.261,44	35	24.261,44	3	4.000,00	-	-	24.261,44
		2009-2011	-	-	-	USD 61.27	-	-	-	USD 61.27	-	-	-
		Jumlah	33	174.988,90	38	28.261,44	35	24.261,44	3	4.000,00	-	-	24.261,44
				USD 61.27		USD 61.27		USD 61.27		USD 61.27			-
				GBP 123.00		-		-		-			-
57	PT Industri Kereta Api (Persero)	2005-2008	14	269.848,12	19	418,12	11	418,12	7	-	1	-	418,12
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	269.848,12	19	418,12	11	418,12	7	-	1	-	418,12
				USD 13,800.54		-		-		-			-
				JPY 0.94		-		-		-			-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah	14	269.848,12 USD 13.800,54 JPY 0,94	19	418,12	11	418,12	7	-	1	-	418,12
58	PT Barata Indonesia (Persero)	2005-2008 2009-2011 Jumlah	11	57.687,95	22	9.912,37	20	9.662,37	2	250,00	-	-	9.662,37
59	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2005-2008 2009-2011 Jumlah	10	11.994,08	17	4.760,09	5	2.187,19	7	2.572,90	5	-	2.187,19
61	PT LEN Industri (Persero)	2005-2008 2009-2011 Jumlah	8	11.089,99	13	35,26	11	35,26	2	-	-	-	35,26
62	PT Batan Teknologi (Persero)	2005-2008 2009-2010 2011 Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT Bio Farma (Persero)	2005-2008 2009 2010 2011 Jumlah	9	3.792,67	15	253,28	11	253,28	4	-	-	-	253,28
			13	11.639,37	21	1.995,57	12	295,57	4	1.700,00	5	-	295,57
			22	15.432,04	36	2.248,86	23	548,86	8	1.700,00	5	-	548,86

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2005-2008	17	16.580,90 USD 607,01	40	-	29	-	11	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	111.155,69	34	7.939,23	-	-	-	-	34	7.939,23	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	127.736,60 USD 607,01	74	7.939,23	29	-	11	-	34	7.939,23	-
65	PT Indo Farma (Persero), Tbk.	2005-2008	18	65.567,51	25	3.637,69	10	1.117,34	15	2.520,34	-	-	1.117,34
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	11	107.568,92	29	2.631,79	-	-	-	-	29	2.631,79	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	173.136,44	54	6.269,48	10	1.117,34	15	2.520,34	29	2.631,79	1.117,34
66	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT Semen Baturaja (Persero)	2005-2008	9	18.413,06	17	7.866,52	15	6.356,07	1	1.510,45	1	-	6.356,07
		2009	9	17.059,73	19	7.446,14	7	-	6	1.605,82	6	5.840,31	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	35.472,80	36	15.312,67	22	6.356,07	7	3.116,27	7	5.840,31	6.356,07
68	PT Semen Kupang (Persero)	2005-2008	9	5.260,55	16	1.305,16	-	-	-	-	16	1.305,16	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	5.260,55	16	1.305,16	-	-	-	-	16	1.305,16	-
69	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2005-2008	16	1.326.976,40	21	25.398,73	12	2.585,78	9	22.812,94	-	-	59,45
		2009	10	14.473,98	25	10.043,51	10	2.430,94	9	4.981,11	6	2.631,45	2.430,94
		Jumlah	26	1.341.450,38	46	35.442,24	22	5.016,72	18	27.794,05	16	5.266,56	64,40

Halaman 13 - Lampiran 39

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	1.341.450,38 USD 788,28	46	35.442,24 USD 788,28	22	5.016,72	18	27.794,05	6	2.631,45 USD 788,28	2.490,39
70	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2005-2008	19	41.778,69	30	6.023,15	8	12,00	8	354,31	14	5.656,83	12,00
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	19	41.778,69	30	6.023,15	8	12,00	8	354,31	14	5.656,83	12,00
71	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	15.722,54 USD 212,229,81	21	4.851,24 USD 12,229,81	3	65,00	15	4.786,24	3	USD 12,070,68	65,00
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	15.722,54 USD 212,229,81	21	4.851,24 USD 12,229,81	3	65,00	15	4.786,24	3	USD 12,070,68	65,00
72	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2005-2008	13	27.620,27 USD 624,31	31	11.065,54 USD 58,17	16	7.503,03	13	3.562,50	2	-	7.503,03
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	27.620,27 USD 624,31	31	11.065,54 USD 58,17	16	7.503,03	13	3.562,50	2	-	7.503,03
73	PT Cambriks Primmissima (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT Industri Gelas (Persero)	2005-2008	11	27.690,70	22	15.506,34	12	-	3	-	7	15.506,34	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	27.690,70	22	15.506,34	12	-	3	-	7	15.506,34	-
75	PT Garam (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2005-2008	13	373.619,35	19	115.364,52	-	-	-	-	19	115.364,52	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	20	1.660,38	30	-	-	-	-	-	30	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	33	375.279,74	49	115.364,52	-	-	-	-	49	115.364,52	-
78	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2005-2008	5	1.228,80	6	67,58	4	67,58	2	-	-	-	67,58
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	1.228,80	6	67,58	4	67,58	2	-	-	-	67,58
79	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2005-2008	8	535,43	14	-	-	-	-	-	14	-	-
		2009-2011	-	-	-	USD 72,84	-	-	-	-	-	USD 72,84	-
		Jumlah	8	535,43	14	-	-	-	-	-	14	-	-
				USD 72,84		USD 72,84						USD 72,84	
80	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2005-2008	6	7.992,38	14	7.992,38	12	7.992,38	-	-	2	-	7.992,38
		2009	9	119.850,94	9	73.621,55	-	-	7	71.483,09	2	2.138,45	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	127.843,32	23	81.613,93	12	7.992,38	7	71.483,09	4	2.138,45	7.992,38
81	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2005-2008	8	908,86	13	908,86	-	-	-	-	13	908,86	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	908,86	13	908,86	-	-	-	-	13	908,86	-
82	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	9	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-
		Jumlah	9	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-
83	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2005-2008	9	1.327,00	16	1.327,00	6	787,50	10	539,50	-	-	852,62
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-
		Jumlah	24	1.327,00	34	1.327,00	6	787,50	10	539,50	18	-	852,62
84	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2005-2008	11	94.007,37	18	4.018,35	9	2.292,90	9	1.725,45	-	-	2.320,53
				USD 225.13		USD 225.13		USD 32.19		USD 192.93			USD 32.19
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	94.007,37	18	4.018,35	9	2.292,90	9	1.725,45	-	-	2.320,53
				USD 225.13		USD 225.13		USD 32.19		USD 192.93			USD 32.19
85	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2005-2008	10	17.851,99	15	3.867,34	-	-	-	-	15	3.867,34	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	17.851,99	15	3.867,34	-	-	-	-	15	3.867,34	-
86	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	66.938,27	34	66.938,27	21	65.354,29	11	1.583,97	2	-	65.354,29
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	66.938,27	34	66.938,27	21	65.354,29	11	1.583,97	2	-	65.354,29
88	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	2005-2008	8	309.019,53	15	272,45	9	135,00	4	137,45	2	-	86,90
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	133.353,19	31	46.273,03	4	-	9	46.273,03	18	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	442.372,72	46	46.545,48	13	135,00	13	46.410,48	20	-	86,90
90	Perum Perhutani	2005-2008	16	14.514,78	32	13.789,64	7	17,25	13	13.772,38	12	-	17,25
				USD 661.29		USD 661.29		-		USD 661.29		-	-
		2009	22	118.524,10	41	25.282,95	8	1.879,14	22	23.403,80	11	-	1.879,14
				USD 758.61		USD 758.61		-		USD 758.61		-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-
		Jumlah	55	133.038,89	91	39.072,59	15	1.896,39	35	37.176,19	41	-	1.896,39
				USD 1.419.91		USD 1.419.91		-		USD 1.419.91		-	-
91	PT Inhutani I (Persero)	2005-2008	6	223.112,57	9	44.024,86	3	31.899,91	4	-	2	12.124,95	31.899,91
				USD 1.913.05		USD 1.913.05		USD 1.913.05		-		-	USD 1.913.05
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-
		Jumlah	21	223.112,57	24	44.024,86	3	31.899,91	4	-	17	12.124,95	31.899,91
				USD 1.913.05		USD 1.913.05		USD 1.913.05		-		-	USD 1.913.05
92	PT Inhutani II (Persero)	2005-2008	10	46.864,24	12	3.820,27	5	114,21	5	3.706,05	2	-	178,66
				USD 1.217.66		USD 1.217.66		USD 849.46		USD 368.20		-	USD 849.46
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	26	-	-	-	-	-	26	-	-
		Jumlah	28	46.864,24	38	3.820,27	5	114,21	5	3.706,05	28	-	178,66
				USD 1.217.66		USD 1.217.66		USD 849.46		USD 368.20		-	USD 849.46

Halaman 17 - Lampiran 39

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	PT Inhutani III (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT Inhutani IV (Persero)	2005-2008	6	32.340,70	8	3.180,73	4	-	3	3.180,73	1	-	800,26
				USD 401,52		USD 401,52				USD 401,52			USD 254,46
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	32.340,70	8	3.180,73	4	-	3	3.180,73	1	-	800,26
				USD 401,52		USD 401,52				USD 401,52			USD 254,46
95	PT Inhutani V (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2005-2008	12	527,63	16	527,63	1	185,24	-	-	-	15	342,39
		2009	11	15.458,31	25	6.520,19	-	-	-	-	-	25	6.520,19
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	15.985,94	41	7.047,82	1	185,24	-	-	-	40	6.862,58
													185,24
97	PT Pertamina (Persero)	2005-2008	9	9.269,79	18	1.531,07	16	1.531,07	2	-	-	-	1.531,07
		2009	4	7.209,86	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	1.976,30
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	16.479,66	26	3.507,38	24	3.507,38	2	-	-	-	3.507,38
98	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	20	4.071,01	37	569,52	-	-	-	-	-	37	569,52
		Jumlah	20	4.071,01	37	569,52	-	-	-	-	-	37	569,52
99	Perum Prasarana Perikanan Samudra	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2005-2008	25	1.358.056,38	55	1.114.690,61	13	6.061,59	42	1.108.629,02	-	-	6.061,59
				USD 9.206,63		USD 3.837,04				USD 3.837,04			

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2009	14	309.661,75	19	3.698,09	-	-	-	-	19	3.698,09	-
				USD 4,010,68		-		-					-
				EUR 8.60		-		-					-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	39	1.667.718,14	74	1.118.388,71	13	6.061,59	42	1.108.629,02	19	3.698,09	6.061,59
				USD 13,217,31		USD 3,837,04				USD 3,837,04			
				EUR 8.60		-		-					-
101	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	406.914,14	12	2.251,22	1	-	10	2.251,22	1	-	-
				USD 440,67		-		-					-
				JPY 104,915,87		-		-					-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	406.914,14	12	2.251,22	1	-	10	2.251,22	1	-	-
				USD 440,67		-		-					-
				JPY 104,915,87		-		-					-
103	PT Kertas Leces (Persero)	2005-2008	14	265.374,77	16	16.831,85	8	11.106,71	8	5.725,13	-	-	11.106,71
				USD 13,933,71		USD 13,933,71				USD 13,933,71			
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	265.374,77	16	16.831,85	8	11.106,71	8	5.725,13	-	-	11.106,71
				USD 13,933,71		USD 13,933,71				USD 13,933,71			
104	Perum PNRI	2005-2008	12	9.081,79	16	697,01	2	286,70	3	110,31	11	300,00	286,70
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	29	3.820,97	40	-	1	-	-	-	39	-	-
		Jumlah	41	12.902,76	56	697,01	3	286,70	3	110,31	50	300,00	286,70

Halaman 19 - Lampiran 39

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	Perum Peruri	2005-2008	37	173.006,17 USD 368.01	50	8.244,31	30	6.045,09	20	2.199,22	-	-	6.045,09
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	12.162,17 EUR 212.87	32	1.328,83	1	451,76	1	528,32	30	348,74	451,76
		Jumlah	62	185.168,35 USD 368.01 EUR 212.87	82	9.573,15	31	6.496,86	21	2.727,54	30	348,74	6.496,86
106	PT Balai Pustaka (Persero)	2005-2008	8	120.864,49	13	91.070,16	2	18.114,91	4	24.361,95	7	48.593,30	18.114,91
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	120.864,49	13	91.070,16	2	18.114,91	4	24.361,95	7	48.593,30	18.114,91
107	PT Pradnya Paramitha (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2005-2008	107	3.264.228,19 USD 150.103.00	189	2.034.799,92	168	2.034.799,92	21	-	-	-	2.034.799,92
		2009	17	-	41	-	10	USD 24.513.79	27	USD 4.000.00	4	-	USD 24.513.79
		2010	4	-	8	-	1	-	7	-	-	-	-
		2011	22	870.495,72	53	-	-	-	53	-	-	-	-
		Jumlah	150	4.134.723,91 USD 150.103.00	291	2.034.799,92	179	2.034.799,92	108	-	4	-	2.034.799,92
109	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	2005-2008	63	1.225,56	172	18.819,00	145	18.819,00	27	-	-	-	18.819,00
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	14	-	-	-	14	-	-	-	-
		2011	18	-	30	-	-	-	30	-	-	-	-
		Jumlah	86	1.225,56	216	18.819,00	145	18.819,00	71	-	-	-	18.819,00

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2005-2008	30	1.012.302,00	76	371.855,48 USD 13,125,00	62	371.855,48 USD 13,125,00	14	-	-	-	562.885,48 USD 13,125,00
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	18	-	13	-	5	-	-	-	-
		Jumlah	39	1.012.302,00	94	371.855,48 USD 13,125,00	75	371.855,48 USD 13,125,00	19	-	-	-	562.885,48 USD 13,125,00
111	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	2005-2008	62	-	120	-	115	-	5	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	28	-	49	-	14	-	35	-	-	-	-
		Jumlah	90	-	169	-	129	-	40	-	-	-	-
112	PT Jamsostek (Persero)	2005-2008	70	1.767.090,41	141	57.665,32	141	57.665,32	-	-	-	-	57.665,32
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	70	1.767.090,41	141	57.665,32	141	57.665,32	-	-	-	-	57.665,32
113	PT Taspren (Persero)	2005-2008	60	26.716.180,25	135	20.371,26	132	20.371,26	3	-	-	-	20.371,26
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	148.233,47	51	9.126,94	32	5.794,01	18	3.332,93	1	-	5.794,01
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	88	26.864.413,73	186	29.498,20	164	26.165,27	21	3.332,93	1	-	26.165,27
114	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2005-2008	15	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
		2009	8	222.159,34	20	1.795,75	8	-	12	1.795,75	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	222.159,34	35	1.795,75	23	-	12	1.795,75	-	-	-
115	PT Jasarharja (Persero)	2005-2008	13	193.989,60	15	7.457,68	14	1.542,78	1	5.914,90	-	-	1.277,97
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	17	104.289,83	36	-	-	-	-	-	36	-	-
		Jumlah	30	298.279,43	51	7.457,68	14	1.542,78	1	5.914,90	36	-	1.277,97
116	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2005-2008	54	574.882,68	87	115.539,40	65	25.046,49	22	90.492,90	-	-	25.046,49
						USD 6.19				USD 6.19			
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-
		Jumlah	63	574.882,68	103	115.539,40	65	25.046,49	22	90.492,90	16	-	25.046,49
						USD 6.19				USD 6.19			
117	PT Jasindo (Persero)	2005-2008	23	348.953,54	32	22.280,76	30	17.520,91	2	4.759,85	-	-	17.383,45
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	348.953,54	32	22.280,76	30	17.520,91	2	4.759,85	-	-	17.383,45
118	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2005-2008	18	517.483,17	26	319.913,07	18	309.902,48	8	10.010,58	-	-	309.902,48
				USD 11.820,83									
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-
		Jumlah	27	517.483,17	38	319.913,07	18	309.902,48	8	10.010,58	12	-	309.902,48
				USD 11.820,83									
119	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	2005-2008	8	9.793,72	9	9.541,22	8	9.541,22	1	-	-	-	5.920,92
				USD 337,50		USD 337,50		USD 234,68		USD 102,81			USD 234,68
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	9.793,72	9	9.541,22	8	9.541,22	1	-	-	-	5.920,92
				USD 337,50		USD 337,50		USD 234,68		USD 102,81			USD 234,68
120	PT ASABRI (Persero)	2005-2008	6	191,29	6	28,23	6	28,23	-	-	-	-	28,23
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	191,29	6	28,23	6	28,23	-	-	-	-	28,23



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT Bahana PUJ (Persero)	2005-2008	16	1.834.595,76 USD 58,588.39	18	281.880,25 USD 58,588.39	7	44.044,36 USD 19,025.50	11	237.835,89 USD 39,562.89	-	-	13.248,75
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	1.834.595,76 USD 58,588.39	18	281.880,25 USD 58,588.39	7	44.044,36 USD 19,025.50	11	237.835,89 USD 39,562.89	-	-	13.248,75
123	PT Danareksa (Persero)	2005-2008	4	438.247,26 USD 48,464.81	5	- USD 51,605.94	3	- USD 23,493.68	2	- USD 28,112.25	-	-	238.590,20 USD 20,352,55
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	438.247,26 USD 48,464.81	5	- USD 51,605.94	3	- USD 23,493.68	2	- USD 28,112.25	-	-	238.590,20 USD 20,352,55
124	Perum Pegadaian (Persero)	2005-2008	5	85.395,54	5	54.931,51	-	-	5	54.931,51	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-
		Jumlah	16	85.395,54	17	54.931,51	-	-	5	54.931,51	12	-	-
125	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2005-2008	21	82.763,04	47	156.048,74	39	142.639,73	7	8.504,55	1	4.904,46	78.760,06
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	82.763,04	47	156.048,74	39	142.639,73	7	8.504,55	1	4.904,46	78.760,06
126	PT PANN Multi Finance (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	16	158.497,09	21	158.497,09	9	97.465,80	12	61.031,29	-	-	86.196,29
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	158.497,09	21	158.497,09	9	97.465,80	12	61.031,29	-	-	86.196,29

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
127	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	2005-2008 2009-2010 2011 Jumlah	- - 5 5	- - - -	- - 9 9	- - - -	- - 3 3	- - - -	- - 6 6	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
128	PT Kilring Berjangka Indonesia (Persero)	2005-2008 2009 2010 2011 Jumlah	- - 10 -	- - 36.388,60 -	- - 10 -	- - 9.879,50 -	- - 7 -	- - - -	- - 3 -	- - 9.879,50 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
129	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Perum Bulog	2005-2008 2009 2010 2011 Jumlah	90 48 - 5	14.449.335,26 USD 17,620,48 509.497,70 -	129 77 - 12	986.051,14 USD 15,452.72 204.543,91 -	78 32 - -	875.717,83 USD 15,452.72 688,39 -	45 37 - -	110.333,30 - 202.324,18 -	6 8 - 12	- - 1.531,32 -	472.021,38 USD 14,722.72 688,39 -	
133	PT Survey Udara Panas (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT Pos Indonesia (Persero)	2005-2008	4	20.528,49	6	3.031,25	6	3.031,25	-	-	-	-	-
		2009	14	548.580,88	43	-	37	-	6	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	22	8.560,75	49	-	-	-	-	-	49	-	-
		Jumlah	40	577.670,14	98	3.031,25	43	3.031,25	6	-	49	-	-
136	PT Sarinah (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	6.552,35	15	4.933,51	4	796,82	9	1.403,98	2	2.732,70	796,82
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	6.552,35	15	4.933,51	4	796,82	9	1.403,98	2	2.732,70	796,82
137	PT Sucofindo (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	35	-	-	-	-	-	35	-	-
		Jumlah	11	-	35	-	-	-	-	-	35	-	-
138	PT Berdikari (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2005-2008	17	209.230,25	15	154.916,53	5	505,00	7	152.507,41	3	1.904,12	505,00
				USD 12.772,58		USD 12.704,20				USD 12.704,20			
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	209.230,25	15	154.916,53	5	505,00	7	152.507,41	3	1.904,12	505,00
				USD 12.772,58		USD 12.704,20				USD 12.704,20			
140	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	8	-	21	-	5	-	15	-	1	-	-
		Jumlah	8	-	21	-	5	-	15	-	1	-	-
141	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT Bhandha Ghara Rekxa (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Perum Jasa Tirta I	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Perum Jasa Tirta I	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT PPA (Persero)	2005-2008	9	444.924,05	9	1.570,56	6	1.570,56	1	-	2	-	1.570,56
						USD 25,000.00				USD 25,000.00			
		2009	22	-	24	-	17	-	7	-	-	-	-
		2010	5	406,22	5	406,22	-	-	-	-	5	406,22	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	445.330,27	38	1.976,78	23	1.570,56	8	-	7	406,22	1.570,56
						USD 25,000.00				USD 25,000.00			
	<b>Total BUMIIN Induk</b>		<b>3.178</b>	<b>101.474.754,03</b>	<b>5.288</b>	<b>11.436.338,07</b>	<b>2.373</b>	<b>6.422.765,56</b>	<b>1.099</b>	<b>3.435.534,58</b>	<b>1.816</b>	<b>1.578.037,92</b>	<b>6.335.963,41</b>
				USD 1,697,117.59		USD 874,053.27		USD 201,049.00		USD 486,788.36		USD 186,215.90	USD 82,344.35
				SGD 896.14		SGD 106.30				SGD 106.30			
				EUR 221.47		EUR 24.20		EUR 24.20					EUR 24.20
				GBP 123.00									
				JPY 379,197.34		JPY 274,280.52		JPY 270,977.12		JPY 3,303.40			JPY 270,977.12
				CNY 896.89									
	<b>ANAK PERUSAHAAN</b>												
146	PT Indonesia Power	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	4	28.019.115,68	7	-	-	-	7	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	28.019.115,68	7	-	-	-	7	-	-	-	-
147	PT Pembangunan Jawa Bali	2005-2008	11	12.980,73	17	12.223,41	16	12.223,41	1	-	-	-	12.223,41
				USD 243.60		USD 243.60		USD 243.60					USD 243.60
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	79.904,01	17	9.682,35	13	-	4	9.682,35	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	92.884,75	34	21.905,76	29	12.223,41	5	9.682,35	-	-	12.223,41
				USD 243.60		USD 243.60		USD 243.60					USD 243.60
148	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2005-2008	12	106.085,59	13	91.966,39	5	39.230,31	8	52.736,07	-	-	39.230,31
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	106.085,59	13	91.966,39	5	39.230,31	8	52.736,07	-	-	39.230,31
149	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2005-2008	5	18.983,42	12	1.291,93	12	1.291,93	-	-	-	-	1.291,93
		2009	2	1.000,00	4	1.000,00	3	-	1	1.000,00	-	-	-
				USD 886.71		USD 886.71		USD 78.34		USD 808.36			USD 78.34
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	19.983,42	16	2.291,93	15	1.291,93	1	1.000,00	-	-	1.291,93
				USD 886.71		USD 886.71		USD 78.34		USD 808.36			USD 78.34
150	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	2005-2008	7	1.075,99	15	1.075,99	8	-	7	1.075,99	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	1.075,99	15	1.075,99	8	-	7	1.075,99	-	-	-
151	PT ICON+	2005-2008	9	79.135,33	16	79.135,33	7	40,54	9	79.094,78	-	-	40,54
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	79.135,33	16	79.135,33	7	40,54	9	79.094,78	-	-	40,54

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	PT PelitaAir Service	2005-2008	24	69.088,47	57	11.345,26	52	36,97	5	11.308,28	-	-	36,97
		2009-2011	-	USD 5,939.00	-	USD 1,548.78	-	USD 1,548.78	-	-	-	-	USD 1,548.78
		Jumlah	24	69.088,47	57	11.345,26	52	36,97	5	11.308,28	-	-	36,97
				USD 5,939.00		USD 1,548.78		USD 1,548.78		-			USD 1,548.78
153	PT Pelat Timah Nusantara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	10.188,86	15	6.870,73	9	241,53	4	5.173,86	2	1.455,32	241,53
		2010-2011	-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	-	-	USD 20.25	-	-	-
		Jumlah	8	10.188,86	15	6.870,73	9	241,53	4	5.173,86	2	1.455,32	241,53
				USD 20.25		USD 20.25		-		USD 20.25		-	-
154	Dana Pensiun Perkebunan	2005-2008	7	207.314,63	7	3.423,51	-	-	-	-	7	3.423,51	-
		2009-2011	-	USD 2,064.98	-	USD 2,064.98	-	-	-	-	-	USD 2,064.98	-
		Jumlah	7	207.314,63	7	3.423,51	-	-	-	-	7	3.423,51	-
				USD 2,064.98		USD 2,064.98		-		-		USD 2,064.98	-
155	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	2005-2008	6	253,77	7	-	7	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	23.748,90	38	-	-	-	-	-	38	-	-
		Jumlah	37	24.002,68	45	-	7	-	-	-	38	-	-
156	PT Pupuk Kujang	2005-2008	9	392,25	12	392,25	10	42,00	2	350,25	-	-	42,00
		2009	-	USD 1,456.14	-	USD 1,099.83	-	USD 1,099.83	-	-	-	-	USD 1,099.83
		2010	3	-	4	-	2	-	2	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-
		Jumlah	16	392,25 USD 1,456.14	20	392,25 USD 1,099.83	12	42,00 USD 1,099.83	4	350,25	4	-	42,00 USD 1,099.83
157	PT Petrokimia Gresik	2005-2008	12	25.236,32 USD 1,520.20	13	2.500,76 USD 1,520.20	11	1.287,84 USD 1,291.17	2	807,85	-	405,05 USD 229.03	1.287,84 USD 1,291.17
		2009	4	17.076,15 USD 2,465.54	4	-	4	-	-	-	-	-	-
		2010	1	-	2	USD 11.62	1	USD 11.62	1	-	-	-	USD 11.62
		2011	3	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		Jumlah	20	42.312,48 USD 3,985.75	24	2.500,76 USD 1,531.82	16	1.287,84 USD 1,302.79	3	807,85	5	405,05 USD 229.03	1.287,84 USD 1,302.79
158	PT Pupuk Kaltim	2005-2008	7	12.055,57	7	-	6	-	1	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	17.069,00 USD 39,202.66 EUR 56.42	23	-	4	-	9	-	10	-	-
		2011	6	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-
		Jumlah	29	29.124,57 USD 39,202.66 EUR 56.42	41	-	10	-	10	-	21	-	-
159	PT PIM	2005-2008	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	6	-	4	-	2	-	-	-	-
		2011	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-
		Jumlah	11	-	12	-	6	-	2	-	4	-	-

Halaman 29 - Lampiran 39

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	Dapensri	2005-2008 2009 2010-2011 Jumlah	- 7 - 7	- 227.814,91 - 227.814,91	- 11 - 11	- 107.690,81 - 107.690,81	- 4 - 4	- 107.690,81 - 107.690,81	- 7 - 7	- - - -	- - - -	- - - -	- 107.690,81 - 107.690,81
161	PT Rekayasa Industri	2005-2008 2009 2010-2011 Jumlah	9 - 9 -	904,13 USD 176,41 MYR 525,00 143.775,66 USD 11,125,91 EUR 61,06 144.679,80 USD 11,302,32 EUR 61,06 MYR 525,00	9 - 15 -	544,92 USD 9,32 MYR 525,00 744,58 USD 12,61 -	9 - 7 -	544,92 USD 9,32 MYR 525,00 744,58 USD 12,61 -	- - - 8 -	- - - - -	- - - -	- - - -	544,92 USD 9,32 MYR 525,00 744,58 USD 12,61 -
162	Dana Pensiun BRI	2005-2008 2009-2011 Jumlah	10 - 10	470,46 -	14 -	470,46 -	12 -	470,46 -	2 -	- -	- -	- -	470,46 -
163	PT BNI Cabang London	2005-2008 2009-2011 Jumlah	20 - 20	- -	2 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
164	DP BNI	2005-2008 2009-2011 Jumlah	10 - 10	3.392,47 -	10 -	- -	2 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	PT BNI Multifinance	2005-2008 2009-2011 Jumlah	12 - 12	- - -	39,09 - 39,09	23 - 23	22 - 22	39,09 - 39,09	1 - 1	- - -	- - -	- - -	39,09 - 39,09
166	PT BNI Securities	2005-2008 2009-2011 Jumlah	12 - 12	18.458,11 - 18.458,11	18 - 18	18.458,11 - 18.458,11	15 - 15	18.085,54 - 18.085,54	3 - 3	372,56 - 372,56	- - -	- - -	18.085,54 - 18.085,54
167	PT Bank Syariah Mandiri	2005-2008 2009-2011 Jumlah	33 - 33	117.855,01 - 117.855,01	99 - 99	46.914,60 - 46.914,60	98 - 98	46.914,60 - 46.914,60	1 - 1	- - -	- - -	- - -	46.914,60 - 46.914,60
168	PT Mandiri Sekuritas	2005-2008 2009-2011 Jumlah	12 - 12	- - -	15 - 15	- - -	15 - 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
169	DP Mandiri	2005-2008 2009-2011 Jumlah	10 - 10	- - -	14 - 14	- - -	14 - 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total BUMN (Anak Perusahaan)</b>		<b>355</b>	<b>29.213.375,53</b> USD 65.101,44 EUR 117,49 MYR 525,00	<b>552</b>	<b>395.770,54</b> USD 7.417,92 MYR 525,00	<b>374</b>	<b>228.884,60</b> USD 4.295,29 MYR 525,00	<b>97</b>	<b>161.602,04</b> USD 828,62	<b>81</b>	<b>5.283,90</b> USD 2.294,01	<b>228.884,60</b> USD 4.295,29 MYR 525,00
	<b>Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)</b>		<b>3.533</b>	<b>130.688.129,57</b> USD 1.762.219,04	<b>5.840</b>	<b>11.832.108,62</b> USD 881.471,20	<b>2.747</b>	<b>6.651.650,16</b> USD 205.344,30	<b>1.196</b>	<b>3.597.136,63</b> USD 487.616,98	<b>1.897</b>	<b>1.583.321,82</b> USD 188.509,91	<b>6.564.848,01</b> USD 86.639,64

Halaman 31 - Lampiran 39

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				SGD 836.14		SGD 106.30				SGD 106.30			
				EUR 338.97		EUR 24.20		EUR 24.20					EUR 24.20
				GBP 123.00		-		-					-
				JPY 379,197.34		JPY 274,280.52		JPY 270,977.12		JPY 3,303.40			JPY 270,977.12
				CNY 896.89		-		-					-
				MYR 525.00		MYR 525.00		MYR 525.00					MYR 525.00
	BHMN												
170	BP Migas	2005-2008	24	30.573.024,40	33	-	13	-	16	-	4	-	-
				USD 23,842,995.39		-		-		-			-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	-	9	-	1	-	8	-	-	-	-
				USD 11,250.02		USD 11,250.02		-		USD 11,250.02			-
		2011	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-
		Jumlah	35	30.573.024,40	46	-	14	-	24	-	8	-	-
				USD 23,854,245.42		USD 11,250.02		-		USD 11,250.02			-
	<b>Total BHMN</b>		<b>35</b>	<b>30.573.024,40</b>	<b>46</b>	<b>USD 11,250.02</b>		<b>-</b>	<b>24</b>	<b>USD 11,250.02</b>		<b>8</b>	<b>-</b>
				<b>USD 23,854,245,42</b>		<b>USD 11,250.02</b>		<b>-</b>		<b>USD 11,250.02</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	KKKS												
171	BOB PT BSP - Pertamina Hulu	2005-2008	4	10.332,46	7	-	5	-	2	-	-	-	-
				USD 22,726.60		USD 972.18		USD 972.18		-			-
		2009	8	USD 436.03	8	USD 436.03	7	USD 436.03	1	-	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	10.332,46	15	-	12	-	3	-	-	-	-
				USD 23,162.63		USD 1,408.22		USD 1,408.22		-			-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	Chevron Pacific Indonesia Wilayah Kerja (WK) MFK - PSC	2005-2008	22	USD 1,638,332.85	31	USD 2,828.70	20	USD 2,828.70	11	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	USD 1,638,332.85	31	USD 2,828.70	20	USD 2,828.70	11	-	-	-	-
173	Chevron Pacific Indonesia & ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd.	2005-2008	1	USD 45,474.12	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	USD 45,474.12	1	-	-	-	1	-	-	-	-
174	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2005-2008	11	USD 422,796.70	18	USD 291,894.68	18	USD 291,894.68	-	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	USD 422,796.70	18	USD 291,894.68	18	USD 291,894.68	-	-	-	-	-
177	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2005-2008	14	USD 74,685.45	17	USD 4,088.42	10	USD 4,088.42	7	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	USD 74,685.45	17	USD 4,088.42	10	USD 4,088.42	7	-	-	-	-
179	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Kallia (Korinci Baru) WK Korinci	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	580,59	10	580,59	2	-	4	-	4	580,59	-
		2010-2011	-	USD 1,434.53	-	USD 1,434.53	-	-	-	-	-	USD 1,434.53	-
		Jumlah	10	580,59	10	580,59	2	-	4	-	4	580,59	-
				USD 1,434.53		USD 1,434.53		-		-		USD 1,434.53	
182	Medco E&P Malaca WK Area "A" North Sumatera	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Pearl Oil WK Tungkal	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2005-2008	16	USD 48,038.56	20	USD 27,458.71	15	USD 27,458.71	3	-	2	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	USD 48,038.56	20	USD 27,458.71	15	USD 27,458.71	3	-	2	-	-
185	Petrosehat Ltd. WK Selat Panjang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Premier Oil WK Natuna Sea A	2005-2008	13	USD 16,152.60	23	USD 16,152.60	18	USD 5,506.54	5	USD 10,646.06	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	USD 16,152.60	23	USD 16,152.60	18	USD 5,506.54	5	USD 10,646.06	-	-	-
187	Star Energy Ltd. WK Kakap	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	6.315,78	12	-	-	-	-	-	12	-	-
		2011	-	USD 5,787.65	-	USD 2,309.65	-	-	-	-	-	USD 2,309.65	-
		Jumlah	9	6.315,78	12	-	-	-	-	-	12	-	-
				USD 5,787.65		USD 2,309.65		-		-		USD 2,309.65	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	Job (PSC) Costa Igi WK Gebang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	BP West Java Ltd. WK ONWJ	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Camar Resource Canada WK Bawean	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2005-2008	10	14.943,81	13	14.496,83	13	14.496,83	-	-	-	-	-
		2009	5	USD 3,584.33	5	USD 3,559.33	4	USD 3,559.33	1	USD 910.33	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	14,943,81	18	14,496,83	17	14,496,83	1	14,496,83	-	-	-
				USD 4,494.66		USD 4,469.66		USD 4,469.66		USD 4,469.66			
196	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2005-2008	11	USD 1,061,481.35	15	-	8	-	7	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	USD 1,061,481.35	15	-	8	-	7	-	-	-	-
197	Kangean Energy Indonesia WK Kangean	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2005-2008	9	USD 62,386.11	9	-	7	-	2	-	-	-	-
		2009	7	USD 150.17	7	USD 150.17	2	-	5	USD 150.17	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	USD 62,536.28	16	USD 150.17	9	-	7	USD 150.17	-	-	-
202	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Petrochina Ltd. WK Bangko	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6	USD 10,456.76	10	USD 7,455.81	-	-	-	-	10	USD 7,455.81	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	USD 10,456.76	10	USD 7,455.81	-	-	-	-	10	USD 7,455.81	-
211	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Seleraya - Merangin Dua	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2005-2008	18	651,22	38	651,22	7	651,22	13	651,22	18	-	-
				USD 86,367.47		USD 43.98		USD 43.98					
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	651,22	38	651,22	7	651,22	13	651,22	18	-	-
				USD 86,367.47		USD 43.98		USD 43.98					
219	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Energy Equity WK Sengkang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Impex WK East Kalimantan	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2005-2008	15	10.902,52 USD 97,265.00	19	1.441,95 USD 383.48	15	1.441,95 USD 383.48	4	-	-	-	-
		2009	10	3.424,75 USD 235.53	10	3.424,75 USD 235.53	8	676,52 USD 235.53	2	2.748,23	-	-	-
		2010-2011	-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	14.327,28 USD 97,500.54	29	4.866,71 USD 619.02	23	2.118,47 USD 619.02	6	2.748,23	-	-	-
				SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-	-	-	-
227	VICO WK Sanga-sanga	2005-2008	10	10.919,93	19	-	12	-	7	-	-	-	-
		2009-2011	-	USD 3,101.38	-	USD 300.80	-	USD 300.80	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	10.919,93 USD 3,101.38	19	-	12	-	7	-	-	-	-
						USD 300.80		USD 300.80		-	-	-	-



(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Toili, Sulawesi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Toili, Sulawesi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	PT Pertamina EP	2005-2008 2009 2010 2011 Jumlah	7 - 10 - 17	USD 1,325,966.29 - 40,091,22 USD 61,848.51 40,091,22 USD 1,387,814.80	8 - 12 - 20	USD 1,325,966.29 - - USD 61,848.51 USD 1,387,814.80	5 - - - 5	USD 839,660.29 - - - USD 839,660.29	3 - - - 3	USD 486,306.00 - - - USD 486,306.00	- - 12 - 12	- - - USD 61,848.51 - USD 61,848.51	- - - - -
235	Benuo Taka WK Wallawi Block	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Tangguh - BP Berau	2005-2008 2009 2010-2011 Jumlah	- 5 - 5	- - - -	- - - - 9	- - - - -	- - - - 1	- - - - -	- - - - 8	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	BP Muturi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	BP Wiriyagar	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total KKKS</b>		<b>231</b>	<b>98.162,33 USD 4,989,618.40 SGD 5.30</b>	<b>321</b>	<b>20,595,36 USD 1,748,429.81 SGD 5.30</b>	<b>177</b>	<b>17,266,53 USD 1,178,279.06 SGD 5.30</b>	<b>86</b>	<b>2,748,23 USD 497,102.23</b>	<b>58</b>	<b>580,59 USD 73,048.51</b>	-
	<b>LEMBAGA</b>												
239	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	2005-2008 2009-2010 2011 Jumlah	15	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-
			16	63.277,22	39	-	6	-	33	-	-	-	-
			31	63.277,22	57	-	24	-	33	-	-	-	-
	<b>Total Lembaga</b>		<b>31</b>	<b>63.277,22</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SAHAM PEMERINTAH 50 %</b>												
240	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Saham Pemerintah 50%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>OTORITA</b>												
242	Otorita Asahan	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Otorita</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			297	30.734.463,96	424	20.595,36	215	17.266,53	143	2.748,23	66	580,59	-		
				USD 28,843,863.82		USD 1,759,679.83		USD 1,178,279.06		USD 508,352.26		USD 73,048.51	-		
				SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-	-		

Keterangan:

1. Untuk Tahun 2011 hanya menyajikan Tindak Lanjut Semester I
2. Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan MS. Excel
3. Angka pada kolom 12 dan 13 sudah termasuk rincian Tindak Lanjut yang tidak dapat ditindaklanjuti secara sah sejumlah 10 kasus senilai Rp6,99 miliar dan USD229,03 ribu

Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan pada Instansi Pusat

Tahun Kejadian	Subyek	Mata Uang	Kerugian		Angsuran			Pembayaran Lumas			Penghapusan		Sisa	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4-(8+10)	13=5-(7+9+11)		
2004	TGR Bendahara	IDR	43	9.530.793.552	23	1.009.818.414	5	155.715.672	3	749.488.829	35	7.615.770.637		
		USD		60.000,00						60.000,00				
		KSHS		2.000.000,00						2.000.000,00				
	TGR Non Bendahara	IDR	606	38.701.409.915,89	96	1.321.838.936,97	53	905.625.916,71	1	737.419.902,00	552	35.736.525.160,21		
		USD		1.683.784,78		6.974,44						1.676.810,34		
		AUD		385.900,22								385.900,22		
		JPY		469.108.910,10								469.108.910,10		
		Fr		35.103.263,50								35.103.263,50		
		Dfl		2.507.723,00								2.507.723,00		
		DM		1.571.946,81								1.571.946,81		
2005	Phak. III	NLG		182.972,72								182.972,72		
		IDR	5	1.535.628.857,59			1	1.091.986.057,86			4	443.642.799,73		
	TGR Bendahara	IDR	1	610.358.362,00	1	26.272.500,00					1	584.085.862,00		
	TGR Non Bendahara	IDR	40	4.569.415.791,00	5	1.29.710.181,00	3	28.729.000,00			37	4.410.976.610,00		
	Phak. III	IDR	3	175.793.055,00	1		1				2	175.793.055,00		
	TGR Bendahara	IDR	6	955.339.600,00	3	189.543.050,00	2	113.525.900,00			4	652.270.650,00		
	TGR Non Bendahara	USD	28	1.549.633.991,03	5	84.181.725,00	14	909.412.554,00			14	556.039.712,03		
	Phak. III	IDR	15	1.791.994.373,27	1		12	1.791.994.373,27			3			
		USD		13.828.759,21		211.321,08						13.617.438,13		
	TGR Bendahara	IDR	4	9.259.874.624,00	1	14.000.000,00	2	162.371.050,00			2	9.083.503.574,00		
TGR Non Bendahara	USD	28	1.598.285.260	11	138.207.914	8	70.582.207			20	1.389.495.139			
Phak. III	IDR	13	4.583.524.365	2	346.255.766	9	453.141.850			4	3.784.126.749			
	USD		1.260.530,79		1.215.198,81						45.331,98			
2006	TGR Bendahara	IDR	2	1.013.871.460,00	2	41.100.000,00					2	972.771.460,00		
	TGR Non Bendahara	USD	140	22.082.474.277,66	18	202.319.541,00	69	4.165.267.868,00			71	17.714.886.868,66		
	Phak. III	IDR	38	250.255.930.655,00	1	79.683.904.001,98	36	2.658.038.209,80			2	167.913.988.443,22		
		USD		44.872.574,47		1.023.117,02		39.930.495,49				3.918.961,96		
	TGR Bendahara	IDR	2	111.323.000,00			1	101.673.000,00			1	9.650.000,00		
	TGR Non Bendahara	IDR	78	3.645.826.939,04	22	263.161.303,00	17	617.089.313,33			1	9.809.800,00		
		USD		624.546,95								624.546,95		
		JPY		286.338.366,03								286.338.366,03		
		AUD		725.770,18								725.770,18		
		Dfl		509.424,52								509.424,52		
2009	Phak. III	Fr		2.215.393,42								2.215.393,42		
		DM		136.356,00								136.356,00		
	TGR Bendahara	IDR	27	3.019.063.167,02	9	249.473.410,84	8	2.453.665.185,98			19	315.924.570,20		
	TGR Non Bendahara	USD		9.551,02			9.551,02							

Tahun Kejadian	Subyek	Mata Uang	Kerugian			Angsuran			Pembayaran Lumas			Penghapusan			Sisa	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4-(8+10)	13=5-(7+9+11)				
2010	TGR Bendahara	IDR	1	108.769.207,00	-	-	1	108.769.207,00	-	-	-	-	-			
	TGR Non Bendahara	IDR	50	3.311.681.565,00	17	470.110.977,00	18	1.127.193.645,00	1	11.835.000,00	31	1.702.541.943,00				
	Pihak III	IDR	26	176.888.867.631,06	4	609.531.029,91	13	2.245.709.024,56	-	-	13	174.033.627.576,59				
				37.261.549,65	-	7.457.481,37	-	8.905.893,71	-	-	-	20.898.174,57				
2011	TGR Bendahara	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TGR Non Bendahara	IDR	12	527.385.250,00	5	44.440.000,00	5	141.865.000,00	-	-	7	341.080.250,00				
	Pihak III	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<b>SUB TOTAL</b>															
	<b>TGR BENDAHARA</b>	IDR	59	21.590.329.805	30	1.280.733.964	11	642.054.829	4	759.138.829	44	18.908.402.183				
		USD	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		KSHS	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<b>TGR NON BENDAHARA</b>	IDR	982	75.986.112.990	179	2.653.970.578	187	7.965.765.504	3	759.064.702	792	64.607.312.206				
		USD	-	2.308.331,73	-	6.974,44	-	-	-	-	-	2.301.357,29				
		AUD	-	1.111.670,40	-	-	-	-	-	-	-	1.111.670,40				
		JPY	-	755.447.276,13	-	-	-	-	-	-	-	755.447.276,13				
		Ffr	-	37.318.656,92	-	-	-	-	-	-	-	37.318.656,92				
		Dfl	-	3.017.147,52	-	-	-	-	-	-	-	3.017.147,52				
		DM	-	1.708.302,81	-	-	-	-	-	-	-	1.708.302,81				
		NLG	-	182.972,72	-	-	-	-	-	-	-	182.972,72				
	<b>PIHAK KETIGA</b>	IDR	127	438.250.802.104	18	80.889.164.209	80	10.694.534.701	-	-	47	346.667.103.194				
		USD	-	97.232.965,14	-	9.907.118,28	-	48.845.940,22	-	-	-	38.479.906,64				
	<b>TOTAL</b>	IDR	1.168	535.827.244.898,72	227	84.823.868.750,54	278	19.302.355.034,31	7	1.518.203.531,00	883	430.182.817.582,87				
		USD	-	99.601.296,87	-	9.914.092,72	-	48.845.940,22	-	-	-	40.781.263,93				
		KSHS	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		AUD	-	1.111.670,40	-	-	-	-	-	-	-	1.111.670,40				
		JPY	-	755.447.276,13	-	-	-	-	-	-	-	755.447.276,13				
		Ffr	-	37.318.656,92	-	-	-	-	-	-	-	37.318.656,92				
		Dfl	-	3.017.147,52	-	-	-	-	-	-	-	3.017.147,52				
		DM	-	1.708.302,81	-	-	-	-	-	-	-	1.708.302,81				
		NLG	-	182.972,72	-	-	-	-	-	-	-	182.972,72				
	<b>VALAS EKUIVALEN*)</b>		1168	1.480.955.491.445,42	227	85.657.761.100,80	278	422.028.923.500,80	7	701.120.000,00	883	972.567.686.843,82				
	<b>TOTAL KERUGIAN</b>		1168	2.016.782.736.344,14	227	170.481.629.851,34	278	441.331.278.535,11	7	2.219.323.531,00	883	1.402.750.304.436,69				

\*) Nilai kerugian valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs Bank Indonesia per 30 Juni 2010

**Kerugian Negara dengan Status dalam Proses Penetapan pada Instansi Pusat**

Tahun Kejadian	Subyek Penanggung Jawab Kerugian Negara	Mata Uang	Kerugian		Angsuran			Pembayaran Lunas			Penghapusan		Sisa	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4-(8+10)	13=5-(7+9+11)		
2004	TGR Bendahara	IDR	66	3.403.065.196,80	27	355.323.933,10	21	85.855.664,95	-	-	45	2.961.885.598,75		
	TGR Non Bendahara	IDR	673	28.799.321.751,34	110	2.362.923.399,07	138	2.830.005.349,58	-	-	535	23.606.393.002,69		
	Phak III	IDR	179	28.402.779.583,80	69	11.689.123.711,20	102	3.060.178.910,47	-	-	77	13.653.476.962,13		
2005	TGR Bendahara	IDR	5	54.836.347,00	1	1.408.371,00	4	53.064.340,00	-	-	1	363.636,00		
	TGR Non Bendahara	IDR	87	3.078.582.779,61	16	99.204.705,00	64	945.314.638,16	-	-	23	2.034.063.436,45		
	Phak III	IDR	43	1.958.588.411,16	9	814.122.503,00	34	328.924.702,38	-	-	9	815.511.205,78		
2006	TGR Bendahara	IDR	8	522.533.724,00	1	5.141.240,00	5	67.453.787,00	-	-	3	449.938.697,00		
	TGR Non Bendahara	IDR	292	35.284.427.366,95	39	24.723.792.584,92	242	4.968.689.928,26	-	-	50	5.591.944.853,77		
	Phak III	IDR	93	1.263.319.589,40	26	252.586.748,32	66	474.499.056,93	-	-	27	536.233.784,15		
2007	TGR Bendahara	IDR	25	422.608.757,00	1	-	23	159.230.013,00	-	-	2	263.378.744,00		
	TGR Non Bendahara	IDR	390	4.917.120.647,05	23	314.191.411,56	370	3.929.080.609,81	-	-	20	673.848.625,68		
	Phak III	IDR	365	20.008.887.438,83	30	5.731.470.073,36	327	7.469.522.443,83	-	-	38	6.807.894.921,64		
2008	TGR Bendahara	IDR	30	797.251.507,26	2	227.342.500,00	27	135.236.007,26	-	-	3	434.673.000,00		
	TGR Non Bendahara	IDR	475	50.400.947.837,56	46	31.685.162.710,00	399	15.444.057.276,59	-	-	76	3.271.727.850,97		
	Phak III	IDR	365	6.817.917.988,21	29	806.302.916,00	323	2.890.171.629,99	-	-	42	3.121.443.442,22		
2009	TGR Bendahara	IDR	19	575.017.696,00	1	4.481.150,00	18	444.485.746,00	-	-	1	126.050.800,00		
	TGR Non Bendahara	IDR	161	5.450.359.063,62	29	1.609.903.604,59	119	1.846.171.980,32	-	-	42	1.994.283.478,71		
	Phak III	IDR	147	51.144.788.651,25	16	23.144.853.638,00	127	2.058.300.008,22	-	-	20	25.941.635.005,03		
2010	TGR Bendahara	IDR	14	132.286.479,00	-	-	11	93.961.691,00	-	-	3	38.324.788,00		
	TGR Non Bendahara	IDR	129	3.989.610.617,26	5	175.373.653,43	100	2.789.261.663,82	-	-	29	1.024.975.300,01		
	Phak III	IDR	105	1.801.474.269,58	6	87.158.439,00	98	1.203.047.173,56	-	-	7	511.268.657,02		
2011	TGR Bendahara	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TGR Non Bendahara	IDR	9	187.211.045,00	-	-	-	-	-	-	9	187.211.045,00		
	Phak III	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>SUB TOTAL</b>													
	<b>TGR BENDAHARA</b>	IDR	167	5.907.599.707,06	33	593.697.194,10	109	1.039.287.249,21	-	-	58	4.274.615.263,75		
	<b>TGR NON BENDAHARA</b>	IDR	2.216	132.107.581.108,39	268	60.970.552.068,57	1.432	32.792.581.446,54	-	-	784	38.384.447.593,28		
	<b>PIHAK KETIGA</b>	IDR	1.297	111.397.725.932,23	185	42.525.618.028,88	1.077	17.484.643.925,38	-	-	220	51.387.463.977,97		
	<b>TOTAL</b>	IDR	3680	249.412.906.747,68	486	104.089.867.291,55	2618	51.276.512.621,13	-	-	1062	94.046.526.835,00		

Indikasi Kerugian Negara pada Instansi Pusat

Tahun Kejadian	Sumber Informasi		Mata Uang		Kerugian		Angsuran			Pembayaran Lunas			Penghapusan		Sisa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4-(8+10)	13=5-(7+9+11)				
2004	BPK	IDR	237	31.266.182.931,55	2	157.401.700,00	57	3.122.907.868,43	-	-	180	27.985.873.363,12				
	APIP	IDR	288	56.494.420.047,24	115	3.175.981.618,52	71	2.304.797.226,09	5	1.449.420.104,00	212	49.564.221.098,63				
		USD	-	359.795.367,95	-	-	-	359.795.367,95	-	-	-	-				
		EUR	-	23.437,43	-	-	-	23.437,43	-	-	-	-				
2005	BPK	IDR	455	36.356.899.813,36	9	265.327.740,00	55	8.151.252.403,92	-	-	400	27.940.319.669,44				
	APIP	IDR	68	5.978.968.830,16	35	189.703.910,00	33	2.111.380.146,00	-	-	35	3.677.884.774,16				
		USD	-	137.757,07	-	71.136,05	-	45.490,25	-	-	-	21.130,77				
		CAD	-	12.429,00	-	-	-	12.429,00	-	-	-	-				
		AUD	-	12.103,83	-	-	-	12.103,83	-	-	-	-				
2006	BPK	IDR	394	237.636.758.370,91	16	188.423.923,30	64	4.573.678.028,06	-	-	330	232.874.656.369,55				
	APIP	IDR	150	6.233.389.207,68	4	105.242.331,00	89	3.298.135.798,17	-	-	61	2.830.007.078,51				
		USD	-	231.998,31	-	228.212,84	-	-	-	-	-	3.785,47				
		AUD	-	5.474,22	-	-	-	5.474,22	-	-	-	-				
		MYR	-	64.525,49	-	-	-	64.525,49	-	-	-	-				
		EUR	-	42.087,80	-	-	-	42.087,80	-	-	-	-				
2007	BPK	IDR	3.102	248.635.350.229,75	1110	5.393.419.046,53	53	10.823.002.851,11	-	-	3049	232.418.928.332,11				
	APIP	IDR	296	15.866.927.071,19	15	1.940.193.061,00	190	11.030.426.406,63	-	-	106	2.896.307.603,56				
		USD	-	275.583,39	-	-	-	275.583,39	-	-	-	-				
		HKS	-	16.360,07	-	-	-	16.360,07	-	-	-	-				
		EUR	-	8.767,53	-	-	-	8.767,53	-	-	-	-				
2008	BPK	IDR	125	309.309.874.989,06	11	1.929.455.275,79	37	45.330.935.066,12	-	-	88	262.049.484.647,15				
	APIP	IDR	500	65.477.385.321,82	25	11.022.483.599,44	233	40.553.235.259,04	-	-	267	13.901.666.463,34				
		USD	-	33.831.379,41	-	245.879,41	-	-	-	-	-	33.585.500,00				
		CAD	-	6.602,50	-	-	-	6.602,50	-	-	-	-				
		MYR	-	56.959,30	-	-	-	56.959,30	-	-	-	-				
		EUR	-	6.760,00	-	-	-	6.760,00	-	-	-	-				
2009	BPK	IDR	1.803	585.052.901.387,83	72	16.402.741.878,84	470	36.322.862.859,31	-	-	1333	532.327.496.649,68				
	APIP	IDR	645	107.051.050.428,76	49	7.020.191.156,57	251	27.412.078.568,85	-	-	394	72.618.780.703,34				
		USD	-	46.564,56	-	11.117,34	-	21.607,50	-	-	-	13.859,72				
		NOK	-	1.027,72	-	-	-	1.027,72	-	-	-	-				
		EUR	-	1.370,18	-	-	-	1.370,18	-	-	-	-				
	AUD	-	1.991,97	-	-	-	1.991,97	-	-	-	-					

Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan pada BUMN

Tahun Kejadian	Sumber Informasi	Mata Uang		Kerugian		Angsuran			Pembayaran Lunas			Penghapusan			Sisa		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4-(8+10)	13=5-(7+9+11)					
2010	BPK	IDR	1.457	99.099.907.829,97	30	4.673.587.746,30	204	15.574.426.045,68	-	-	-	1253	78.851.894.037,99				
		USD	-	6.603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.603,00				
	APIP	IDR	4.954	247.499.224.751,96	3797	63.910.791.906,86	300	20.984.774.109,45	-	-	-	4654	162.603.658.735,65				
		USD	-	87.377,28	-	426,00	-	66.430,24	-	-	-	-	20.471,04				
		EUR	-	40.483,13	-	10.500,00	-	437,62	-	-	-	-	29.545,51				
		RUB	-	48.235,00	-	-	-	48.235,00	-	-	-	-	-				
2011		SGD	-	1.221,00	-	-	-	1.221,00	-	-	-	-	-				
	BPK	IDR	71	40.034.949.280,94	3	1.434.591.790,00	13	233.308.865,70	-	-	-	58	38.367.048.625,24				
	APIP	IDR	95	3.743.731.427,94	2	75.032.809,00	30	296.741.393,67	-	-	-	65	3.371.957.225,27				
		EUR	-	930,00	-	-	-	930,00	-	-	-	-	-				
		GBP	-	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-				
		USD	-	258,00	-	-	-	258,00	-	-	-	-	-				
<b>SUB TOTAL</b>																	
	BPK	IDR	7.644	1.587.392.824.783,37	1253	30.444.949.100,76	953	124.132.173.988,33	-	-	-	6691	1.432.815.701.694,28				
		USD	-	6.603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.603,00				
	APIP	IDR	6.996	508.345.097.086,75	4042	87.439.620.392,39	1197	107.991.572.907,90	5	1.449.420.104,00	5794	311.464.483.682,46					
		USD	-	394.406.235,97	-	556.771,64	-	360.204.737,33	-	-	-	33.644.727,00					
		EUR	-	123.836,07	-	10.500,00	-	83.790,56	-	-	-	29.545,51					
		AUD	-	22.450,24	-	-	-	22.450,24	-	-	-	-					
		CAD	-	19.031,50	-	-	-	19.031,50	-	-	-	-					
		GBP	-	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-					
		HKS	-	29.878,62	-	-	-	29.878,62	-	-	-	-					
		SGD	-	1.221,00	-	-	-	1.221,00	-	-	-	-					
		RUB	-	48.235,00	-	-	-	48.235,00	-	-	-	-					
		NOK	-	1.027,72	-	-	-	1.027,72	-	-	-	-					
		MYR	-	121.484,79	-	-	-	121.484,79	-	-	-	-					
<b>TOTAL</b>				14.640	2.095.737.921.870,12	5295	117.884.569.493,15	2150	232.123.746.896,23	5	1.449.420.104,00	12485	1.744.280.185.376,74				
		USD	-	394.412.838,97	-	556.771,64	-	360.204.737,33	-	-	-	33.651.330,00					
		EUR	-	123.836,07	-	10.500,00	-	83.790,56	-	-	-	29.545,51					
		AUD	-	22.450,24	-	-	-	22.450,24	-	-	-	-					
		CAD	-	19.031,50	-	-	-	19.031,50	-	-	-	-					
		GBP	-	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-					
		HKS	-	29.878,62	-	-	-	29.878,62	-	-	-	-					
		SGD	-	1.221,00	-	-	-	1.221,00	-	-	-	-					
		RUB	-	48.235,00	-	-	-	48.235,00	-	-	-	-					
		NOK	-	1.027,72	-	-	-	1.027,72	-	-	-	-					
		MYR	-	121.484,79	-	-	-	121.484,79	-	-	-	-					
<b>VALAS EKVIVALEN *)</b>				14.640	3.421.496.771.830,59	5295	4.942.023.910,32	2150	3.125.437.222.069,18	5	1.449.420.104,00	12485	291.117.544.392,54				
<b>TOTAL KERUGIAN</b>				14.640	5.517.234.693.700,71	5295	122.826.593.403,47	2150	3.357.560.968.965,41	5	1.449.420.104,00	12485	2.035.397.729.769,28				

\*) Nilai kerugian valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs Bank Indonesia per 30 Juni 2010



## Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan pada BUMN

Tahun Kejadian	Subyek Penanggung Jawab Kerugian Negara	Mata Uang	Kerugian		Angsuran				Pembayaran				Sisa	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4-(8+10)	13=5-(7+9+11)		
SISA TAHUN 2004	TUGAS KEBENDAHARAAN		34	5.886.664.062,39	20	981.462.228,23	10	80.674.260,00	-	-	24	4.824.527.574,16		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK III		340	17.883.207.761,71	70	5.697.263.992,00	11	4.805.155.978,00	-	-	329	7.380.787.791,71		
2005	TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2006	TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2007	TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2008	TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2009	TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2010	TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2011	TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>SUB TOTAL</b>													
	TUGAS KEBENDAHARAAN		34	5.886.664.062,39	20	981.462.228,23	10	80.674.260,00	-	-	24	4.824.527.574,16		
	BUKAN TUGAS KEBENDAHARAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIHAK KETIGA		340	17.883.207.761,71	70	5.697.263.992,00	11	4.805.155.978,00	-	-	329	7.380.787.791,71		
	<b>TOTAL</b>		374	23.769.871.824,10	90	6.678.726.220,23	21	4.885.830.238,00	-	-	353	12.205.315.365,87		

## Indikasi Kerugian Negara pada BUMN

Tahun Kejadian	Sumber Informasi	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
			Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4-(8+10)	13=5-(7+9+11)
2004	BPK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APIP		236	14.740.363.390,00	44	4.041.901.419,00	149	1.968.803.321,00	15	392.042.750,95	72	8.337.615.899,05
2005	BPK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APIP		2	1.418.371.190,00	2	207.400.000,00	-	-	-	-	2	1.210.971.190,00
2006	BPK		1	156.114.000,00	-	-	1	156.114.000,00	-	-	-	-
	APIP		1	77.174.368,00	1	75.323.719,00	-	-	-	-	1	1.850.649,00
2007	BPK		1	173.460.000,00	1	95.000.000,00	-	-	-	-	1	78.460.000,00
	APIP		4	588.308.180,00	1	127.445.402,00	2	133.337.166,00	-	-	2	327.525.612,00
2008	BPK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APIP		4	3.486.851.492,00	-	-	-	-	-	-	4	3.486.851.492,00
2009	BPK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APIP		11	8.228.088.196,64	9	211.268.912,00	-	-	-	-	11	8.016.819.284,64
2010	BPK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APIP		61	6.795.346.035,00	9	16.945.000,00	-	-	-	-	61	6.778.401.035,00
2011	BPK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APIP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>												
	BPK		2	329.574.000,00	1	95.000.000,00	1	156.114.000,00	-	-	1	78.460.000,00
	APIP		319	35.334.502.851,64	66	4.680.284.452,00	151	2.102.140.487,00	15	392.042.750,95	153	28.160.035.161,69
	<b>TOTAL</b>		<b>321</b>	<b>35.664.076.851,64</b>	<b>67</b>	<b>4.775.284.452,00</b>	<b>152</b>	<b>2.258.254.487,00</b>	<b>15</b>	<b>392.042.750,95</b>	<b>154</b>	<b>28.238.495.161,69</b>

Kerugian Daerah dengan Status telah Ditetapkan pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam rupiah)

Tahun Kejadian	Subyek Penanggung Jawab Kerugian Negara	Mata Uang	Kerugian		Angsuran			Pembayaran Lunas			Penghapusan		Sisa	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2004	TGR Bendahara	IDR	90	36.197.229.418,31	49	1.336.255.246,00	14	699.661.070,50	-	-	-	76	34.161.313.101,81	
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	862	81.467.892.749,30	415	13.019.103.790,35	152	3.032.316.130,16	8	305.782.600,00	702	65.110.690.228,79		
	TGR Bendahara	IDR	1.037	129.269.599.871,72	494	16.298.128.913,35	174	4.337.369.791,24	8	305.782.600,00	855	108.328.318.567,13		
2005	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	112	103.993.745.781,02	19	4.373.685.857,00	70	2.060.699.366,00	1	109.500.000,00	41	97.449.860.558,02		
	TGR Bendahara	IDR	196	24.548.537.928,60	85	5.502.161.818,95	37	1.280.945.371,00	-	-	159	17.765.430.738,65		
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	75	3.006.081.696,45	18	1.008.667.784,83	12	139.749.253,00	-	-	63	1.857.664.658,62		
2006	TGR Bendahara	IDR	383	131.548.365.406,07	122	10.884.515.460,78	119	3.481.393.990,00	1	109.500.000,00	263	117.072.955.955,29		
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	105	21.333.176.306,23	48	4.180.604.156,53	10	813.380.995,22	18	626.917.683,00	77	15.712.273.471,48		
	TGR Bendahara	IDR	282	16.616.948.872,80	120	2.158.145.520,00	56	721.152.098,00	-	-	226	13.737.651.254,80		
2007	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	88	11.321.444.874,12	41	1.240.501.109,02	11	101.966.384,28	-	-	77	9.978.977.380,82		
	TGR Bendahara	IDR	475	49.271.570.053,15	209	7.579.250.785,55	77	1.636.499.477,50	18	626.917.683,00	380	39.428.902.107,10		
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	143	21.695.326.241,29	70	722.485.752,54	24	754.188.754,44	17	439.951.434,00	102	19.778.700.300,31		
2008	TGR Bendahara	IDR	260	20.071.042.793,29	104	1.821.882.112,14	41	2.349.840.231,05	1	2.983.061.400,00	218	12.916.259.050,10		
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	172	6.709.948.619,32	51	1.277.783.819,51	4	65.544.604,92	-	-	168	5.366.620.194,89		
	TGR Bendahara	IDR	575	48.476.317.653,90	225	3.822.151.684,19	69	3.169.573.590,41	18	3.423.012.834,00	488	38.061.579.545,30		
2009	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	169	16.067.198.377,14	69	1.283.413.688,00	17	421.500.104,83	1	2.187.500,00	151	14.360.097.084,31		
	TGR Bendahara	IDR	661	51.920.503.808,50	200	10.424.294.089,00	175	1.568.232.542,75	1	12.400.000,00	485	39.915.577.176,75		
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	264	8.567.649.168,08	52	1.880.706.408,32	76	1.211.073.174,08	-	-	188	5.475.869.585,68		
2010	TGR Bendahara	IDR	1.094	76.555.351.353,72	321	13.588.414.185,32	268	3.200.805.821,66	2	14.587.500,00	824	59.751.543.846,74		
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	163	5.211.859.759,90	34	976.116.267,04	88	711.878.311,37	-	-	75	3.523.865.181,49		
	TGR Bendahara	IDR	463	23.271.989.569,75	183	4.237.967.588,38	88	4.167.607.575,19	-	-	375	14.866.414.406,18		
2010	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	269	8.314.452.385,96	62	1.595.149.454,30	45	1.260.473.659,84	3	-	221	5.458.829.271,82		
	TGR Bendahara	IDR	895	36.798.301.715,61	279	6.809.233.309,72	221	6.139.959.546,40	3	-	671	23.849.108.859,49		
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	95	4.714.731.001,07	13	252.221.719,00	68	464.714.964,75	-	-	27	3.997.794.317,32		
2010	TGR Bendahara	IDR	230	6.071.646.957,74	81	2.328.652.207,00	54	602.598.406,00	1	12.400.000,00	175	3.127.996.344,74		
	TGR Non Bendahara Pihak III	IDR	64	3.449.465.209,55	26	1.359.676.249,99	11	241.243.879,91	-	-	53	1.848.545.079,65		
	TGR Bendahara	IDR	389	14.235.843.168,36	120	3.940.550.175,99	133	1.308.557.250,66	1	12.400.000,00	255	8.974.335.741,71		

Halaman 2 - Lampiran 45

(nilai dalam rupiah)

Tahun Kejadian	Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran				Sisa			
			Jml Kasus	Nilai	Angsuran	Lunas		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2011	TGR Bendahara	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TGR Non Bendahara	IDR	2	28.450.000,00	-	-	-	-	-	-	2	28.450.000,00
	Pihak III	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IDR	2	28.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2
	<b>SUB TOTAL</b>											
	<b>TGR BENDAHARA</b>	<b>IDR</b>	<b>877</b>	<b>209.213.266.884,96</b>	<b>302</b>	<b>13.124.782.686,11</b>	<b>291</b>	<b>5.926.023.567,11</b>	<b>37</b>	<b>1.178.556.617,00</b>	<b>549</b>	<b>188.983.904.014,74</b>
	<b>TGR NON BENDAHARA</b>	<b>IDR</b>	<b>2.956</b>	<b>223.997.012.679,98</b>	<b>1.188</b>	<b>39.492.207.125,82</b>	<b>603</b>	<b>13.722.692.354,15</b>	<b>11</b>	<b>3.313.644.000,00</b>	<b>2.342</b>	<b>167.468.469.200,01</b>
	<b>PIHAK KETIGA</b>	<b>IDR</b>	<b>1.017</b>	<b>52.973.519.657,59</b>	<b>280</b>	<b>10.305.254.702,97</b>	<b>167</b>	<b>3.625.443.546,61</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>847</b>	<b>39.042.821.408,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>IDR</b>	<b>4.850</b>	<b>486.183.799.222,53</b>	<b>1.770</b>	<b>62.922.244.514,90</b>	<b>1.061</b>	<b>23.274.159.467,87</b>	<b>51</b>	<b>4.492.200.617,00</b>	<b>3.738</b>	<b>395.495.194.622,76</b>



Halaman 2 - Lampiran 46

(nilai dalam rupiah)

Tahun Kejadian	Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran				Sisa			
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TGR Bendahara	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	TGR Non Bendahara	IDR	10	56.172.299,00	-	-	-	-	-	-	10	56.172.299,00
	Pihak III	IDR	5	132.430.749,00	2	13.455.300,00	-	-	-	-	5	118.975.449,00
		IDR	15	188.603.048,00	2	13.455.300,00	-	-	-	-	15	175.147.748,00
	<b>SUB TOTAL</b>											
	<b>TGR BENDAHARA</b>	<b>IDR</b>	<b>592</b>	<b>64.012.827.020,74</b>	<b>177</b>	<b>6.810.032.858,54</b>	<b>267</b>	<b>4.187.119.151,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>325</b>	<b>53.015.675.010,27</b>
	<b>TGR NON BENDAHARA</b>	<b>IDR</b>	<b>2.264</b>	<b>188.327.706.553,95</b>	<b>590</b>	<b>40.761.428.216,63</b>	<b>606</b>	<b>8.962.738.322,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.658</b>	<b>138.603.540.014,35</b>
	<b>PIHAK KETIGA</b>	<b>IDR</b>	<b>1.099</b>	<b>100.475.165.630,84</b>	<b>182</b>	<b>8.915.919.061,98</b>	<b>279</b>	<b>35.171.293.132,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>820</b>	<b>56.387.953.436,26</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>IDR</b>	<b>3.955</b>	<b>352.815.699.205,53</b>	<b>949</b>	<b>56.487.380.137,15</b>	<b>1.152</b>	<b>48.321.150.607,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.803</b>	<b>248.007.168.460,88</b>

Indikasi Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam rupiah)

Tahun Kejadian	Sumber Informasi	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
			Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai
					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2004	BPK	IDR	914	831.718.307.500,27	331	117.597.286.023,79	107	44.983.753.042,42	-	-	807	669.137.268.434,06
	APIP	IDR	3.058	117.641.300.870,31	571	23.738.492.417,47	1.012	16.266.805.786,46	-	-	2.046	77.636.002.666,38
		IDR	3.972	949.359.608.370,58	902	141.335.778.441,26	1.119	61.250.558.828,88	-	-	2.853	746.773.271.100,44
2005		USD	1	6.087.523,56	-	-	-	-	-	-	1	-
	BPK	IDR	1.425	675.725.922.956,69	358	144.265.619.046,62	492	57.521.069.199,82	-	-	933	473.939.234.710,25
	APIP	IDR	1.668	89.018.778.449,91	218	8.700.299.592,81	631	10.321.471.555,97	-	-	1.037	69.997.007.301,13
2006		IDR	3.093	764.744.701.406,60	576	152.965.918.639,43	1.123	67.842.540.755,79	-	-	1.970	543.936.242.011,38
		USD	1	6.336.336,89	-	113.360,80	-	-	-	-	1	6.222.976,09
	BPK	IDR	1.547	737.305.433.537,11	355	142.309.850.326,87	544	112.260.487.461,79	1	72.000.000,00	1.002	482.663.095.748,45
2007	APIP	IDR	3.789	129.620.218.237,09	440	31.718.005.862,83	1.223	27.017.494.414,27	18	626.917.683,00	2.548	70.257.800.276,99
		IDR	5.336	866.925.651.774,20	795	174.027.856.189,70	1.767	139.277.981.876,06	19	698.917.683,00	3.550	552.920.896.025,44
		USD	-	990,15	-	-	-	-	-	-	-	990,15
2008	BPK	IDR	2.662	1.353.718.768.052,43	565	215.880.030.538,32	604	169.052.365.134,57	1	177.324.728,00	2.057	968.609.047.651,54
	APIP	IDR	4.670	166.478.377.162,61	711	16.204.515.234,64	1.415	22.274.660.768,52	17	439.951.434,00	3.238	127.559.249.725,45
		IDR	7.332	1.520.197.145.215,04	1.276	232.084.545.772,96	2.019	191.327.025.903,09	18	617.276.162,00	5.295	1.096.168.297.376,99
2009		USD	-	6.176,79	-	-	-	1.100,00	-	-	-	5.076,79
	BPK	IDR	3.619	1.542.181.840.088,63	792	167.697.142.644,72	859	146.788.249.979,31	-	-	2.760	1.227.696.447.464,60
	APIP	IDR	6.692	178.075.343.295,49	693	22.759.161.414,79	2.019	29.713.434.612,66	1	2.187.500,00	4.672	125.600.559.768,04
2010		IDR	10.311	1.720.257.183.384,12	1.485	190.456.304.059,51	2.878	176.501.684.591,97	1	2.187.500,00	7.432	1.353.297.007.232,64
	BPK	IDR	5.926	2.145.894.077.865,59	1.065	202.801.732.572,81	1.289	187.913.901.144,39	1	338.258.750,00	4.636	1.754.840.185.398,39
	APIP	IDR	10.287	279.285.683.600,95	1.728	46.834.057.240,35	2.794	25.934.277.255,53	-	-	7.493	206.517.349.105,07
2010		IDR	16.213	2.425.179.761.466,54	2.793	249.635.789.813,16	4.083	213.848.178.399,92	1	338.258.750,00	12.129	1.961.357.534.503,46
	BPK	IDR	1.748	735.112.106.285,63	381	131.511.128.318,74	386	52.355.754.736,71	-	-	1.362	551.245.223.230,18
	APIP	IDR	7.806	136.654.071.601,35	1.190	10.407.547.168,19	2.120	10.945.994.777,39	-	-	5.686	115.300.529.655,77
	IDR	9.554	871.766.177.886,97	1.571	141.918.675.486,93	2.506	63.301.749.514,10	-	-	7.048	666.545.752.885,95	

Halaman 2 - Lampiran 47

(nilai dalam rupiah)

Tahun Kejadian	Sumber Informasi	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
			Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai
					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											12=4+(8+10)	13=5-(7+9+11)
2011	BPK	IDR	299	28.020.246.144,69	14	1.683.937.764,87	60	411.423.099,43	-	-	239	25.924.885.280,39
	APIP	IDR	39	145.431.880,37	1	-	5	8.857.500,00	-	-	34	136.574.380,37
		IDR	338	28.165.678.025,06	15	1.683.937.764,87	65	420.280.599,43	-	-	273	26.061.459.660,76
	SUB TOTAL											
	BPK	IDR	18.140	8.049.676.702.431,04	3.861	1.123.746.727.236,74	4.341	771.287.003.798,44	3	587.583.478,00	13.796	6.154.055.387.917,86
	(VALAS - BPK) USD	USD	-	7.166,94	-	-	-	1.100,00	-	-	-	6.066,94
	APIP	IDR	38.009	1.096.919.205.098,08	5.552	160.362.078.931,08	11.219	142.482.996.670,80	36	1.069.056.617,00	26.754	793.005.072.879,20
	(VALAS - APIP) USD	USD	2	12.423.860,45	-	113.360,80	-	-	-	-	2	6.222.976,09
	TOTAL	IDR	56.149	9.146.595.907.529,12	9.413	1.284.108.806.167,82	15.560	913.770.000.469,24	39	1.656.640.095,00	40.550	6.947.060.460.797,06
		USD	2	12.431.027,39	-	113.360,80	-	1.100,00	-	-	2	6.229.043,03
	VALAS EKVIVALEN *)		2	107.404.076.649,60	-	979.437.312,00	-	9.504.000,00	-	-	2	106.415.135.337,60
	TOTAL KERUGIAN		56.153	9.254.012.415.206,11	9.413	1.285.088.356.840,62	15.560	913.779.505.569,24	39	1.656.640.095,00	40.554	7.053.475.596.134,66

\*) Nilai kerugian valuta asing, dikonversi berdasarkan nilai kurs Bank Indonesia per 30 Juni 2010.







## Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Mata Uang	Ketidaksiptahuan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan											Nilai Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjut dalam Proses Pemeriksaan							
			Total Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/ Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/ Tidak Ditetapkan atau Dipungut/Diterima/ Disetor ke Kas Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Penggunaan Langsung Penerimaan Negara/ Daerah		Dana Perimbangan yang Telah Ditetapkan Belum Masuk ke Kas Daerah		Penerimaan Negara/ Daerah Diterima atau Digunakan oleh Instansi yang Tidak Berhak		Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan		Kelebihan Pembayaran Subsidi oleh Pemerintah		Lain-Lain				
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	Rp	118	420.818,59	95	143.914,14	17	257.811,72	-	-	3	16.631,41	2	61,31	1	2.400,00	-	-	33	10.750,23	
2	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	857	478.101,00	648	188.300,94	179	260.680,54	4	4.373,28	8	5.160,99	15	11.956,06	1	69,25	2	7.559,91	127	19.899,79	
3	Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya	Rp	9	2.519,47	9	2.519,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,89	
		USD		1.05		1.05															
	<b>Total Pemeriksaan Laporan Keuangan</b>	Rp	984	901.439,07	752	334.734,56	196	518.492,26	4	4.373,28	11	21.792,41	17	12.017,37	2	2.469,25	2	7.559,91	161	30.651,92	
		USD		1.05		1.05															
		Rp (Total)		901.448,13		334.743,62		518.492,26		4.373,28		21.792,41		12.017,37		2.469,25		7.559,91		30.651,92	
4	Pengelolaan Pendapatan	Rp	36	202.441,14	27	54.920,07	7	146.513,32	-	-	-	-	2	1.007,74	-	-	-	-	10	9.367,19	
		USD		198,44		198,44															
5	Pelaksanaan Belanja	Rp	93	99.238,79	90	98.075,04	2	967,67	-	-	-	-	1	196,07	-	-	-	-	17	1.888,08	
6	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan	Rp	3	671,27	3	671,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus	Rp	19	5.350,11	19	5.350,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	Rp	5	822.550,03	1	25.811,97	-	-	-	-	-	-	-	-	4	796.738,05	-	-	-	-	
9	Sistem Pengendalian Intern BUMN	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Operasional BUMN	Rp	5	1.517,21	5	1.517,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	451,76	
11	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	Rp	38	189.495,82	36	189.240,87	1	64,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	190,55	7	7.480,09
		Rp		1.321.264,40		375.586,57		147.545,40						1.203,81		796.738,05		190,55		19.187,14	
	<b>Total Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu</b>	USD	199	198,44	181	198,44	10	147.545,40	-	-	-	-	3	1.203,81	4	796.738,05	1	190,55	35	19.187,14	
		Rp (Total)		1.322.970,43		377.292,59		147.545,40						13.221,19		799.207,31		7.750,46		49.839,06	
	<b>Jumlah</b>	Rp	1.183	2.222.703,48	933	710.321,13	206	666.037,66	4	4.373,28	11	21.792,41	20	13.221,19	6	799.207,31	3	7.750,46	196	49.839,06	
		USD		199,49		199,49		666.037,66						20		799.207,31		7.750,46		49.839,06	
		Rp (Total)		2.224.418,56		712.036,22		666.037,66		4.373,28		21.792,41		13.221,19		799.207,31		7.750,46		49.839,06	

Keterangan  
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2011

No.	Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
<b>PEMERIKSAAN KEUANGAN</b>					
<b>I Laporan Keuangan Pemerintah Pusat</b>					
	1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010
				1	
<b>II Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga</b>					
	1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2010
	2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2010
	3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2010
	4	5	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2010
	5	6	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010
	6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010
	7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2010
	8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2010
	9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010
	10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2010
	11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2010
	12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2010
	13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010
	14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2010
	15	16	Kementerian Pendidikan Nasional	1	LK Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010
	16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2010
	17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2010
	18	19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010
	19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2010
	20	21	Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2010
	21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010
	22	23	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010
	23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Tahun 2010
	24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010
	25	26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010
	26	27	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1	LK Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010
	27	28	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Negara BUMN Tahun 2010
	28	29	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2010
	29	30	Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010
	30	31	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010
	31	32	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1	LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010
	32	33	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1	LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2010
	33	34	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2010
	34	35	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2010
	35	36	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010
	36	37	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2010
	37	38	Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	1	LK Bappenas Tahun 2010
	38	39	Badan Pertanahan Nasional	1	LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2010
	39	40	Perpustakaan Nasional	1	LK Perpustakaan Nasional Tahun 2010
	40	41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010
	41	42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010
	42	43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010
	43	44	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2010
	44	45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010
	45	46	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2010
	46	47	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010
	47	48	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
48	49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional HAM Tahun 2010
	49	50	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2010
	50	51	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010
	51	52	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2010
	52	53	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010
	53	54	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2010
	54	55	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010
	55	56	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2010
	56	57	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2010
	57	58	1	LK Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Tahun 2010
	58	59	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010
	59	60	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010
	60	61	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010
	61	62	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010
	62	63	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010
	63	64	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010
	64	65	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2010
	65	66	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010
	66	67	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010
	67	68	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010
	68	69	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2010
	69	70	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2010
	70	71	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010
	71	72	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010
	72	73	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2010
	73	74	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010
	74	75	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2010
	75	76	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2010
	76	77	1	LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2010
	77	78	1	LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2010
	78	79	1	LK BA 999.02 - Hibah Tahun 2010
	79	80	1	LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2010
	80	81	1	LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2010
	81	82	1	LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2010
	82	83	1	LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2010
	83	84	1	LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2010
	84	85	1	LK BA 999.07 Kementerian Pertanian Tahun 2010
	85	86	1	LK BA 999.08 Kementerian Pertanian Tahun 2010
	86	87	1	LK BA 999.08 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010
	87	88	1	LK BA 999.08 Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010
	88	89	1	LK BA 999.08 Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010
			<b>88</b>	
<b>III</b>	<b>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</b>			
	1	90	1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010
		91	1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010
		92	1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010
		93	1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010
		94	1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010
		95	1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010
		96	1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010
		97	1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2010
		98	1	LKPD Kota Sabang Tahun 2010
	2	99	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
		100	1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2010
		101	1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2010

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	102	1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010
	103	1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
	104	1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2010
	105	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010
	106	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010
	107	1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2010
	108	1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010
	109	1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010
	110	1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2010
	111	1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010
	112	1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2010
	113	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010
	114	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010
	115	1	LKPD Kota Binjai Tahun 2010
	116	1	LKPD Kota Medan Tahun 2010
	117	1	LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2010
	118	1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2010
	119	1	LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2010
	120	1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2010
3	121 Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010
	122	1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2010
	123	1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010
	124	1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2010
	125	1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010
	126	1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010
	127	1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2010
	128	1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2010
	129	1	LKPD Kota Padang Tahun 2010
	130	1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2010
	131	1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2010
	132	1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2010
	133	1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2010
4	134 Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2010
	135	1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010
	136	1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010
	137	1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010
	138	1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2010
	139	1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2010
5	140 Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2010
	141	1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2010
	142	1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2010
	143	1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2010
	144	1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2010
	145	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010
	146	1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2010
	147	1	LKPD Kota Jambi Tahun 2010
	148	1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2010
6	149 Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010
	150	1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2010
	151	1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010
	152	1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2010
	153	1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2010
	154	1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010
	155	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010
	156	1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
	157	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010
	158	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010
	159	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010
	160	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010
	161	1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2010
	162	1	LKPD Kota Palembang Tahun 2010
	163	1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2010
	164	1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2010
7	165 Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2010
	166	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
		167	1 LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2010
		168	1 LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010
		169	1 LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2010
		170	1 LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2010
		171	1 LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2010
		172	1 LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2010
		173	1 LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010
		174	1 LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2010
		175	1 LKPD Kota Bengkulu Tahun 2010
8	Provinsi Lampung	176	1 LKPD Provinsi Lampung Tahun 2010
		177	1 LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010
		178	1 LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010
		179	1 LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010
		180	1 LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010
		181	1 LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010
		182	1 LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2010
		183	1 LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2010
		184	1 LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
		185	1 LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2010
		186	1 LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010
		187	1 LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010
		188	1 LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2010
		189	1 LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2010
		190	1 LKPD Kota Metro Tahun 2010
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	191	1 LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
		192	1 LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2010
		193	1 LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010
		194	1 LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010
		195	1 LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010
		196	1 LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2010
		197	1 LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010
		198	1 LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2010
10	Provinsi Kepulauan Riau	199	1 LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
		200	1 LKPD Kabupaten Anambas Tahun 2010
		201	1 LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2010
		202	1 LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2010
		203	1 LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2010
		204	1 LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2010
		205	1 LKPD Kota Tanjung Pinang Tahun 2010
11	Provinsi DKI Jakarta	206	1 LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
12	Provinsi Jawa Barat	207	1 LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
		208	1 LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2010
		209	1 LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010
		210	1 LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2010
		211	1 LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2010
		212	1 LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2010
		213	1 LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2010
		214	1 LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2010
		215	1 LKPD Kabupaten Garut Tahun 2010
		216	1 LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2010
		217	1 LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2010
		218	1 LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2010
		219	1 LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2010
		220	1 LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2010
		221	1 LKPD Kabupaten Subang Tahun 2010
		222	1 LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010
		223	1 LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2010
		224	1 LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010
		225	1 LKPD Kota Bandung Tahun 2010
		226	1 LKPD Kota Banjar Tahun 2010
		227	1 LKPD Kota Bekasi Tahun 2010
		228	1 LKPD Kota Bogor Tahun 2010
		229	1 LKPD Kota Cimahi Tahun 2010
		230	1 LKPD Kota Cirebon Tahun 2010
		231	1 LKPD Kota Depok Tahun 2010

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	232	1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2010
	233	1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2010
13	234 Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
	235	1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010
	236	1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2010
	237	1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2010
	238	1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2010
	239	1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2010
	240	1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2010
	241	1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2010
	242	1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2010
	243	1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2010
	244	1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2010
	245	1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2010
	246	1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2010
	247	1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2010
	248	1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2010
	249	1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2010
	250	1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2010
	251	1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2010
	252	1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2010
	253	1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2010
	254	1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010
	255	1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2010
	256	1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2010
	257	1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2010
	258	1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2010
	259	1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
	260	1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2010
	261	1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2010
	262	1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010
	263	1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
	264	1	LKPD Kota Magelang Tahun 2010
	265	1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2010
	266	1	LKPD Kota Semarang Tahun 2010
	267	1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2010
	268	1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2010
	269	1	LKPD Kota Tegal Tahun 2010
14	270 Provinsi D I Yogyakarta	1	LKPD Provinsi DIY Tahun 2010
	271	1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2010
	272	1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010
	273	1	LKPD Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010
	274	1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2010
	275	1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2010
15	276 Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
	277	1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2010
	278	1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010
	279	1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2010
	280	1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010
	281	1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2010
	282	1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2010
	283	1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2010
	284	1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010
	285	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2010
	286	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2010
	287	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2010
	288	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2010
	289	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2010
	290	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2010
	291	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
	292	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2010
	293	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2010
	294	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2010
	295	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2010
	296	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2010



No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	297	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010
	298	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2010
	299	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2010
	300	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010
	301	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2010
	302	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2010
	303	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010
	304	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2010
	305	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2010
	306	1	LKPD Kota Batu Tahun 2010
	307	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2010
	308	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2010
	309	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2010
	310	1	LKPD Kota Malang Tahun 2010
	311	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2010
	312	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2010
	313	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2010
	314	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2010
16	315 Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2010
	316	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2010
	317	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
	318	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2010
	319	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2010
	320	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2010
	321	1	LKPD Kota Serang Tahun 2010
	322	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2010
	323	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
17	324 Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2010
	325	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2010
	326	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2010
	327	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2010
	328	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2010
	329	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2010
	330	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2010
	331	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2010
	332	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2010
	333	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2010
18	334 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010
	335	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2010
	336	1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2010
	337	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010
	338	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010
	339	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010
	340	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010
	341	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2010
	342	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010
	343	1	LKPD Kota Bima Tahun 2010
	344	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2010
19	345 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi NTT Tahun 2010
	346	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2010
	347	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2010
	348	1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010
	349	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2010
	350	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2010
	351	1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010
	352	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010
	353	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2010
	354	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2010
	355	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010
	356	1	LKPD Kota Kupang Tahun 2010
20	357 Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010
	358	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2010
	359	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010
	360	1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2010
	361	1	LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2010

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	362	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2010
	363	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2010
	364	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2010
	365	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2010
	366	1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2010
21	367 Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010
	368	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2010
	369	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2010
	370	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010
	371	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010
	372	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010
	373	1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2010
	374	1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2010
22	375 Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010
	376	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010
	377	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010
	378	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010
	379	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2010
23	380 Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010
	381	1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2010
	382	1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010
	383	1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2010
	384	1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010
	385	1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2010
	386	1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2010
24	387 Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010
25	388 Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010
	389	1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2010
	390	1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010
	391	1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2010
	392	1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2010
	393	1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2010
	394	1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010
	395	1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2010
	396	1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2010
	397	1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010
	398	1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2010
	399	1	LKPD Kota Palu Tahun 2010
26	400 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010
	401	1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2010
	402	1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
	403	1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2010
	404	1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2010
	405	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010
	406	1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2010
	407	1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010
	408	1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2010
	409	1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010
	410	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010
	411	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
	412	1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2010
	413	1	LKPD Kota Palopo Tahun 2010
27	414 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010
	415	1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2010
	416	1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2010
	417	1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010
	418	1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2010
	419	1	LKPD Kota Kendari Tahun 2010
28	420 Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2010
	421	1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2010
	422	1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010
	423	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2010
	424	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010
	425	1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2010
	426	1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2010
29	427 Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	428		1 LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2010
	429		1 LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2010
	430		1 LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010
	431		1 LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010
30	432 Provinsi Maluku		1 LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010
	433		1 LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010
	434		1 LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2010
	435		1 LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2009
	436		1 LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2009
	437		1 LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2009
31	438 Provinsi Maluku Utara		1 LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010
	439		1 LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010
	440		1 LKPD Kota Ternate Tahun 2010
32	441 Provinsi Papua		1 LKPD Provinsi Papua Tahun 2010
	442		1 LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2010
	443		1 LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2010
	444		1 LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010
	445		1 LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2010
	446		1 LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2010
	447		1 LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010
	448		1 LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010
	449		1 LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2010
	450		1 LKPD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2009
33	451 Provinsi Papua Barat		1 LKPD Kota Sorong Tahun 2010
	452		1 LKPD Kabupaten Teluk Wondama TA 2009
			<b>363</b>
<b>IV Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya</b>			
	1	453 Badan Pengelola Minyak dan Gas	1 LK BP Migas TB 2008
	2	454 Bank Indonesia	1 LK Bank Indonesia Tahun 2010
	3	455 Pusat Investasi Pemerintah	1 LK Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2010
	4	456 Lembaga Penjamin Simpanan	1 LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2010
	5	457 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	1 LK Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2010
	6	458 Kementerian Agama	1 LK Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M
	7	459 Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1 LK Konsolidasi PMO ADB ETESP Tahun 2010
	8	460 Rural Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum	1 LK LOAN ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010
			<b>8</b>
<b>PEMERIKSAAN KINERJA</b>			
<b>V Penyelenggaraan Ibadah Haji</b>			
	1	461 Kementerian Agama	1 Kinerja Atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M
			<b>1</b>
<b>VI Kinerja Bea dan Cukai</b>			
	1	462 Kementerian Keuangan	1 Kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta di Jakarta
		463	1 Kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I di Surabaya
		464	1 Pelayanan dan Penatausahaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Penitipan dan Kantor Tukar Pos Udara Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta di Tangerang
		465	1 Pelayanan dan Penatausahaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan di Medan
			<b>4</b>

No.	Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
<b>VII Kinerja Rumah Sakit</b>					
	1	466	Kementerian Kesehatan	1	Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RSAB Harapan Kita TA 2009 dan Semester I 2010 di Jakarta
	2	467	Provinsi Aceh	1	Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, dan Satuan Kerja Lainnya Yang Menangani Bidang Kesehatan Kabupaten Aceh Barat TA 2009 dan 2010 di Meulaboh
		468		1	Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Langsa di Kota Langsa
	3	469	Provinsi Maluku	1	Pelayanan Kesehatan TA 2009-2010 pada RSUD Kabupaten Buru di Namlea
				<b>4</b>	
<b>VIII Kinerja Lainnya</b>					
	1	470	Bappenas	1	Kegiatan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM dan Deputi Bidang Ekonomi Pada Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2009
	2	471	Lembaga Administrasi Negara	1	Efektivitas Pengelolaan Kajian Pada Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada LAN di Jakarta, Bandung, dan Makassar
	3	472	PT Jasa Raharja (Persero)	1	Kinerja PT Jasa Raharja (Persero) TB 2009 s.d. semester I 2010 di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palangkaraya dan Kupang
	4	473	PT Pos Indonesia (Persero)	1	Kegiatan Transportasi dan Antar-an Kiriman Pos PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) di Bandung dan Jakarta
	5	474	Provinsi Maluku	1	Pelayanan Pendidikan pada Pemerintah Kota Ambon dan Instansi terkait TA 2008,2009 dan 2010
				<b>5</b>	
<b>PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>					
<b>IX Pelaksanaan Belanja dan Pendapatan</b>					
	1	475	Dewan Perwakilan Rakyat	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Negara Dewan Perwakilan Rakyat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 di Jakarta
	2	476	Mahkamah Agung	1	Belanja Negara Pada Badan Urusan Administrasi Dan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2009 (Semester II) Dan Tahun 2010 Di Jakarta Dan Bogor
	3	477	Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta
	4	478	Kementerian Luar Negeri	1	Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KBRI Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam
		479		1	Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KJRI Kota Kinabalu di Malaysia
		480		1	Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KJRI Kuching di Malaysia
		481		1	Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KJRI Sydney di Australia
		482		1	Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KRI Darwin di Australia
		483		1	Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KJRI Chicago di Amerika Serikat
		484		1	Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada PTRI New York di Amerika Serikat
	5	485	Kementerian Pertahanan	1	Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain Tahun 2009 dan Semester I 2010 pada Kementerian Pertahanan
	6	486	Mabes TNI	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Badan Pembekalan (BABEK) TNI beserta jajarannya Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Aceh
	7	487	TNI AD	1	Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Kesda Rumah Sakit di Lingkungan Kodam III/Siliwangi dan Kodam VI/ Mulawarman di Bandung dan Balikpapan

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	488	1	Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Kodam IV/ Diponegoro dan Kodam VII/Wirabuana di Semarang dan Makassar
	489	1	Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembekalan Angkatan Darat (Ditbekangad) Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Ditbekangad, Kodam Jaya, Kodam I/ Bukit Barisan, Kodam V/Diponegoro dan Kodam XVII/ Cenderawasih di Jakarta, Medan, Semarang, dan Jayapura
	490	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad) di Jakarta, Bandung dan Pontianak
8	491 TNI AL	1	Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AL TA 2009 dan 2010 pada Rumkit Dr Mintohardjo, Lembaga Kedokteran Gigi R.E Martadinata dan instansi terkait di Jakarta
	492	1	Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AL TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan TNI AL, Lembaga Farmasi TNI AL Drs. Mochamad Kamal, Rumah Sakit Dr. Ramelan dan Instansi terkait di Jakarta dan Surabaya
9	493 TNI AU	1	Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AU TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (DISKESAU), Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (Lakespra), Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut (Lakesgilut) dan Rumah Sakit dr. Salamun serta Instansi Terkait di Jakarta dan Bandung
	494	1	Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AU TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau), Lembaga Farmasi Angkatan Udara (Lafiau), Rumah Sakit DR. Esnawan Antariksa dan Rumah Sakit Hardjolukito serta Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta
10	495 Kementerian Kesehatan	1	Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Tahun 2007-2010 (semester I) pada Kementerian Kesehatan di Jakarta
11	496 Kementerian Agama	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d 31 Oktober 2010)
	497	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d 15 Desember 2010)
12	498 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan 2010 s.d Triwulan III pada UPTP Kemenakertrans di Bekasi, Serang, Yogyakarta, Medan, Ternate dan Sorong
13	499 Kementerian Sosial	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Sosial di Jakarta
14	500 Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Kementerian PAN & RB di Jakarta
	501 Kementerian Komunikasi dan Informasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Kementerian Komunikasi dan Informasi
	502	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan Tahun 2010 pada Kemenkominfo di Jakarta
	503	1	Pengelolaan PNBPNP TA 2009 dan Semester I Tahun 2010 pada Ditjen Postel di Jakarta
15	504 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
16	505 Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Belanja Barang, Modal dan PNBPNP TA 2009 dan 2010 pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat
	506	1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan 2010 pada Korbrimob Kepolisian Republik Indonesia
17	507 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan 2010 s.d Triwulan III pada BKKBN Provinsi Riau, Kaltim, NTB dan NTT

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
18	508	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan semester I 2010 pada LIPI di Jakarta, Serpong, Cibinong dan Bandung
19	509	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2009 dan Tahun 2010 (s.d Triwulan III) pada BATAN di Jakarta, Serpong dan Bandung
20	510	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jakarta
	511	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2009 (s.d Triwulan III) dan Tahun 2010 pada LAPAN di Jakarta, Bandung, Serpong dan Bogor
21	512	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional di Jakarta
22	513	Lembaga Administrasi Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Lembaga Administrasi Negara di Jakarta
23	514	Badan Kepegawaian Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
24	515	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	516		1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (Triwulan III) di Jakarta, Bogor, Palembang, Lampung, Banjarmasin dan Jayapura
25	517	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) dan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2010 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta
26	518	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Jakarta
27	519	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
	520		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Pasca Bencana TA 2009 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
28	521	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Periode 22 Agustus 2008 s.d 30 Juni 2010 pada BLU PPKGBK di Jakarta
29	522	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Periode 22 Agustus 2008 s.d 30 Juni 2010 di Jakarta
30	523	Provinsi Aceh	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian Dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya di Calang
31	524	Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	525		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Parapat
	526		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di Salak
32	527	Provinsi Riau	1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
	528		1	Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Pengadaan Daya Listrik pada Dinas Pertambangan dan Energi Serta Instansi Terkait Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009-2010 di Bengkalis
	529		1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota dan Dinas Kesehatan Kota Dumai di Dumai

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		530		1	Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 - 2010 di Bangkinang
		531		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d. September) Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Panjang
		532		1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi
33	533	Provinsi Jambi		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Provinsi Jambi
		534		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari
		535		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Bungo
		536		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2010
		537		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun
		538		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		539		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Tebo
		540		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kota Jambi
		541		1	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kota Sungai Penuh
34	542	Provinsi DKI Jakarta		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		543		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
35	544	Provinsi Kalimantan Timur		1	Belanja Bidang Infrastruktur TA 2009 & 2010 (per 31 Oktober 2010) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
36	545	Provinsi Sulawesi Selatan		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros TA 2009 dan 2010 (s.d. September 2010) di Maros
37	546	Provinsi Maluku		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah TA 2009 dan 2010 di Masohi
		547		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Maluku TA 2009 dan 2010 di Ambon
		548		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon TA 2009 dan 2010 di Ambon
38	549	Provinsi Maluku Utara		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur TA 2009 (Semester II) Dan TA 2010 Di Maba
		550		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 (Semester II) dan TA 2010 Di Sanana
		551		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Ternate Semester II 2009 Dan Tahun 2010 Di Ternate
39	552	Provinsi Papua		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2008, 2009 dan 2010 di Kobakma
		553		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Yalimo Tengah TA 2008 dan 2009 di Elelim
				<b>79</b>	
<b>X</b>	<b>Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan</b>				
	1	554	Kementerian Pendidikan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (Dana Alokasi Khusus (DAK)) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III)
		555		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2009 dan 2010 pada Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi dan Bogor
		556		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Sumber Dana APBN TA 2008, 2009 dan 2010 yang Terkait Dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMPN 1 Jambi, SMPN 7 Jambi, SMKN 3 Jambi, SMKN 4 Jambi

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
2	557	Provinsi Aceh	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Aceh Besar
	558		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Sabang
3	559	Provinsi Sumatera Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Deli Serdang
	560		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Langkat
4	561	Provinsi Sumatera Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tanah Datar
5	562	Provinsi Riau	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kuantan Singingi
6	563	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7	564	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ogan Ilir
8	565	Provinsi Bengkulu	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Rejang Lebong
9	566	Provinsi Lampung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lampung Utara
10	567	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Bangka Selatan
11	568	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lingga
12	569	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ciamis
	570		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tasikmalaya
13	571	Provinsi Jawa Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Batang
	572		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Boyolali
14	573	Provinsi D I Yogyakarta	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kulon Progo
15	574	Provinsi Jawa Timur	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Blitar
	575		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Pasuruan
16	576	Provinsi Banten	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Pandeglang
17	577	Provinsi Bali	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tabanan
18	578	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lombok Barat
19	579	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ende



No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	580		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Sikka
20	581 Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Melawi
21	582 Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kapuas
22	583 Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tabalong
23	584 Provinsi Kalimantan Timur	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Nunukan
24	585 Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Manado
25	586 Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Banggai Kepulauan
26	587 Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Bone
	588	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Wajo
27	589 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Wakatobi
28	590 Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Gorontalo
29	591 Provinsi Sulawesi Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Mamasa
30	592 Provinsi Maluku	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Maluku Tenggara
31	593 Provinsi Maluku Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Halmahera Utara
32	594 Provinsi Papua	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Jayapura
33	595 Provinsi Papua Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Raja Ampat
		<b>42</b>	
<b>XI</b>	<b>Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil</b>		
1	596 Kementerian Kesehatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2002-2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat
	597	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2002-2010 pada Provinsi Papua serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
	598	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2002-2010 pada Kabupaten Biak Numfor
	599	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2002-2010 pada Kota Jayapura
	600	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2010 pada Provinsi Papua Barat
	601	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2010 pada Kabupaten Manokwari di Manokwari
2	602 Provinsi Papua	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2007-2009 pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura
	603	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Asmat
	604	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2010

No.		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	605		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007 - 2009 pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
	606		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
	607		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
	608		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2007-2009 di Merauke
	609		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Nabire
	610		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Paniai
	611		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
	612		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi
	613		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2008 pada Pemerintah Kabupaten Supiori
	614		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Tolikara
	615		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Waropen di Botawa
	616		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2008 pada Pemerintah Kota Jayapura
3	617	Provinsi Papua Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2009 pada Provinsi Papua Barat
	618		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Fakfak
	619		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Kaimana
	620		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2004-2009 pada Kabupaten Manokwari
	621		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Sorong
	622		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 Kabupaten Sorong Selatan
			<b>27</b>	
<b>XII</b>	<b>Subsidi Pemerintah</b>			
	1	623 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2010 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	2	624 PT Pertamina (Persero)	1	Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Tabung 3 Kg TA 2010 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, dan PT Petronas Niaga Indonesia
	3	625 PT Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Petrokimia Gresik
	4	626 PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Iskandar Muda
	5	627 PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Kalimantan Timur
	6	628 PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Kujang
	7	629 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
	8	630 Kementerian Pertanian, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero)	1	Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2009 pada Kementerian Pertanian, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta dan Makassar
			<b>8</b>	

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
<b>XIII</b>	<b>Reviu Sistem Pengendalian Intern</b>		
1	631 PT Pertamina (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pertamina (Persero) Tahun 2010 di Jakarta, Cilacap, Balikpapan, Surabaya dan Medan
2	632 PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Garuda Indonesia (Persero),Tbk Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I Tahun 2010 di Cengkareng - Tangerang
3	633 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I Tahun 2010 di Jakarta
4	634 PT Batan Teknologi (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Batan Teknologi (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (Triwulan I) di Serpong
5	635 PT Wijaya Karya (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Wijaya Karya (Persero) tbk periode tahun 2009 dan 2010 (smt I)
6	636 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Periode Tahun 2009 dan 2010 (Semester I) di Bandung dan Jakarta
7	637 PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I 2010 di Bandung
8	638 PT Jasa Marga (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Jasa Marga (Persero), Tbk. Periode Tahun 2009 Dan 2010 (Semester I) Di Kantor Pusat Dan Cabang Jagorawi
9	639 PT Kawasan Industri Medan (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Kawasan Industri Medan (Persero) Periode Tahun 2009 Dan 2010 (Semester I) Di Medan
10	640 PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Perkebunan Nusantara VII TB 2009 dan 2010 (semester I) di Lampung
11	641 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Perkebunan Nusantara VIII TB 2009 dan 2010 (semester I) di Bandung
12	642 PT Inhutani I (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Inhutani I TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Balikpapan dan Jakarta
13	643 PT Inhutani II (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Inhutani II TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Kalimantan Selatan
14	644 Perum Perhutani	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Perhutani TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Semarang
15	645 Perum Percetakan Uang RI	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Percetakan Uang Negara Republik Indonesia TA 2008, 2009 dan 2010 (semester I) di Jakarta
16	646 Perum Percetakan Negara RI	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia TB 2010 (semester I) di Jakarta
17	647 PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) TA 2009 dan 2010 (semester I) di Palembang
18	648 PT Pos Indonesia (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pos Indonesia (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) di Bandung dan Jakarta
19	649 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta dan Purwakarta
20	650 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 di Jakarta dan Denpasar
21	651 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta dan Surabaya
22	652 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 di Jakarta
23	653 Perum Bulog	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Bulog Periode Tahun 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta, Yogyakarta dan Bali
24	654 PT Surveyor Indonesia (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 s.d. Triwulan I Tahun 2010 di Jakarta dan Surabaya

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
25	655	PT Jasa Raharja (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Jasa Raharja (Persero) Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta
26	656	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) di Jakarta
27	657	PT Sucofindo (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Sucofindo (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Balikpapan
28	658	Perum Jamkrindo	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta
29	659	Perum Pegadaian	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Pegadaian Tahun Buku 2009 di Jakarta
30	660	PT Askrindo (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Askrindo (Persero) Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta
31	661	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun buku 2009 s.d semester I tahun 2010 di Jakarta
32	662	PT Bukit Asam (Persero)	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2010 di Tanjung Enim, Tarahan, Jakarta
33	663	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	1	Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Antam (Persero) Tbk Tahun 2010 di Jakarta dan Pomalaa
			33	
<b>XIV Operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</b>				
1	664	PT Perikanan Nusantara	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Aktivitas Investasi pada PT Perikanan Nusantara TB 2008 dan 2009 di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Makasar
2	665	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Non Bersubsidi dan Investasi TB 2009 dan 2010 (Semester I) pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) di Palembang, Riau dan Jakarta
3	666	Perum Peruri	1	Kegiatan Pengadaan TB 2009 dan 2010 (semester I) pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia di Jakarta
			3	
<b>XV Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya</b>				
1	667	Mahkamah Agung	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tahun 2009 dan 2010 pada Mahkamah Agung (MA)
2	668	Kementerian Keuangan, Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)	1	Pengelolaan Sisa Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada PT Perusahaan Pengelola Aset dan Kementerian Keuangan di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Bandung dan Surabaya
3	669	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier Block-C (paket 13: LCB 7) Muncak Kabau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Tahun 2008 s.d 2010 pada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta dan Palembang
5	670	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Juni 2010) pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Pontianak, dan Aceh.
6	671	Badan Kepegawaian Negara	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2009 dan 2010 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN)
7	672	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Aset Non Produksi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2008 dan 2009 di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Jember, Medan, dan Aceh
7	673	Provinsi Sumatera Utara	1	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan Untuk TB 2009 dan 2010 Pada PD Pasar Kota Medan
8	674	Provinsi Riau	1	Kegiatan Operasional PT Bumi Laksamana Jaya TB 2007, 2008, 2009, dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
	675		1	Kegiatan Operasional PT Permodalan Ekonomi Rakyat TB 2009 dan 2010 di Pekanbaru
	676		1	Operasional PT Bank Riau Kepri Tahun 2008, 2009 dan 2010 di Pekanbaru

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	9	677	Provinsi Sumatera Selatan	1	Perjanjian Kerjasama PD Sarana Pembangunan Muara Enim dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pengelolaan Lapangan Selo dan Betun pada Kabupaten Muara Enim
	10	678	Provinsi DKI Jakarta	1	Pendapatan dan Biaya pada PD Pasar Jaya TB 2009 dan 2010
		679		1	Pendapatan dan Biaya pada PT Food Station Tjipinang Jaya TB 2009 dan 2010
		680		1	Pendapatan dan Biaya pada PT Jakarta Tourisindo TB 2009 dan 2010
	11	681	Provinsi Papua	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD Dok II Jayapura Tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai dengan November di Jayapura
		682		1	Pengelolaan Operasional PT Bank Papua Tahun 2009 dan 2010 (semester I) di Jayapura
				16	
			<b>Total LHP</b>	<b>682</b>	



Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia  
Jl. Gatot Subroto No. 31  
Jakarta Pusat 10210  
Telp : (021) 5704395  
Fax : (021) 5705376  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2011

No	Entitas	Jml	Daftar LHP Objek Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN KEUANGAN</b>			
<b>I Laporan Keuangan Pemerintah Pusat</b>			
1	1	1	<a href="#">Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010</a>
<b>II Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga</b>			
1	2	1	<a href="#">LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2010</a>
2	3	1	<a href="#">LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2010</a>
3	4	1	<a href="#">LK Mahkamah Agung Tahun 2010</a>
4	5	1	<a href="#">LK Kejaksaan Republik Indonesia 2010</a>
5	6	1	<a href="#">LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010</a>
6	7	1	<a href="#">LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010</a>
7	8	1	<a href="#">LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2010</a>
8	9	1	<a href="#">LK Kementerian Pertahanan Tahun 2010</a>
9	10	1	<a href="#">LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010</a>
10	11	1	<a href="#">LK Kementerian Keuangan Tahun 2010</a>
11	12	1	<a href="#">LK Kementerian Pertanian Tahun 2010</a>
12	13	1	<a href="#">LK Kementerian Perindustrian Tahun 2010</a>
13	14	1	<a href="#">LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010</a>
14	15	1	<a href="#">LK Kementerian Perhubungan Tahun 2010</a>
15	16	1	<a href="#">LK Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010</a>
16	17	1	<a href="#">LK Kementerian Kesehatan Tahun 2010</a>
17	18	1	<a href="#">LK Kementerian Agama Tahun 2010</a>
18	19	1	<a href="#">LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010</a>
19	20	1	<a href="#">LK Kementerian Sosial Tahun 2010</a>
20	21	1	<a href="#">LK Kementerian Kehutanan Tahun 2010</a>
21	22	1	<a href="#">LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010</a>
22	23	1	<a href="#">LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010</a>
23	24	1	<a href="#">LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2010</a>
24	25	1	<a href="#">LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010</a>
25	26	1	<a href="#">LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010</a>
26	27	1	<a href="#">LK Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010</a>
27	28	1	<a href="#">LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2010</a>
28	29	1	<a href="#">LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2010</a>
29	30	1	<a href="#">LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010</a>
30	31	1	<a href="#">LK Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010</a>
31	32	1	<a href="#">LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010</a>
32	33	1	<a href="#">LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010</a>
33	34	1	<a href="#">LK Badan Intelijen Negara Tahun 2010</a>
34	35	1	<a href="#">LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2010</a>
35	36	1	<a href="#">LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010</a>
36	37	1	<a href="#">LK Badan Pusat Statistik Tahun 2010</a>
37	38	1	<a href="#">LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Tahun 2010</a>

	Nasional/Bappenas		<a href="#">Nasional/Bappenas Tahun 2010</a>
38	39	Badan Pertanahan Nasional	1 <a href="#">LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2010</a>
39	40	Perpustakaan Nasional	1 <a href="#">LK Perpustakaan Nasional Tahun 2010</a>
40	41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 <a href="#">LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010</a>
41	42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 <a href="#">LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010</a>
42	43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1 <a href="#">LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010</a>
43	44	Lembaga Ketahanan Nasional	1 <a href="#">LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2010</a>
44	45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1 <a href="#">LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010</a>
45	46	Badan Narkotika Nasional	1 <a href="#">LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2010</a>
46	47	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1 <a href="#">LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010</a>
47	48	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1 <a href="#">LK Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010</a>
48	49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1 <a href="#">LK Komisi Nasional HAM Tahun 2010</a>
49	50	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1 <a href="#">LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2010</a>
50	51	Komisi Pemilihan Umum	1 <a href="#">LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010</a>
51	52	Mahkamah Konstitusi	1 <a href="#">LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2010</a>
52	53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1 <a href="#">LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010</a>
53	54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1 <a href="#">LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2010</a>
54	55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1 <a href="#">LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010</a>
55	56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1 <a href="#">LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2010</a>
56	57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1 <a href="#">LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2010</a>
57	58	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1 <a href="#">LK Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Tahun 2010</a>
58	59	Badan Standardisasi Nasional	1 <a href="#">LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010</a>
59	60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1 <a href="#">LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010</a>
60	61	Lembaga Administrasi Negara	1 <a href="#">LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010</a>
61	62	Arsip Nasional Republik Indonesia	1 <a href="#">LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010</a>
62	63	Badan Kepegawaian Negara	1 <a href="#">LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010</a>
63	64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1 <a href="#">LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010</a>
64	65	Kementerian Perdagangan	1 <a href="#">LK Kementerian Perdagangan Tahun 2010</a>
65	66	Kementerian Perumahan Rakyat	1 <a href="#">LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010</a>
66	67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1 <a href="#">LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010</a>
67	68	Komisi Pemberantasan Korupsi	1 <a href="#">LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010</a>
68	69	Dewan Perwakilan Daerah	1 <a href="#">LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2010</a>
69	70	Komisi Yudisial	1 <a href="#">LK Komisi Yudisial Tahun 2010</a>
70	71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1 <a href="#">LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010</a>
71	72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1 <a href="#">LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010</a>
72	73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1 <a href="#">LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2010</a>
73	74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 <a href="#">LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010</a>
74	75	Badan SAR Nasional	1 <a href="#">LK Badan SAR Nasional Tahun 2010</a>
75	76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1 <a href="#">LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2010</a>
76	77	Bendahara Umum Negara (BUN)	1 <a href="#">LK Bendahara Umum Negara Tahun 2010</a>
77	78	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	1 <a href="#">LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2010</a>
78	79	BA 999.02 - Hibah	1 <a href="#">LK BA 999.02 - Hibah Tahun 2010</a>
79	80	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	1 <a href="#">LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2010</a>
80	81	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	1 <a href="#">LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2010</a>



81	82	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	1	<a href="#">LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2010</a>
82	83	BA 999.07 - Belanja Subsidi	1	<a href="#">LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2010</a>
83	84	BA 999.08 - Belanja Lainnya	1	<a href="#">LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2010</a>
84	85	Kementerian Pertanian	1	<a href="#">LK BA 999.07 Kementerian Pertanian 2010</a>
88	86		1	<a href="#">LK BA 999.08 Departemen Pertanian Tahun 2010</a>
86	87	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	<a href="#">LK BA 999.08 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010</a>
87	88	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	<a href="#">LK BA 999.08 Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2010</a>
85	89	Kementerian Pekerjaan Umum	1	<a href="#">LK BA 999.08 Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010</a>

#### IV Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

1	453	Badan Pengelola Minyak dan Gas	1	<a href="#">LK BP Migas TB 2008</a>
2	454	Bank Indonesia	1	<a href="#">LK Bank Indonesia Tahun 2010</a>
3	455	Pusat Investasi Pemerintah	1	<a href="#">LK Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2010</a>
4	456	Lembaga Penjamin Simpanan	1	<a href="#">LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2010</a>
5	457	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	1	<a href="#">LK Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2010</a>
6	458	Kementerian Agama	1	<a href="#">LK Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M</a>
7	459	Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1	<a href="#">LK Konsolidasi PMO ADB ETESP Tahun 2010</a>
8	460	RURAL Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum	1	<a href="#">LK LOAN ADB 2575-INO pada RURAL Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010</a>

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2011

No	Entitas	Jml	Daftar LHP Objek Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN KEUANGAN</b>			
<b>III Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</b>			
1	90 Provinsi Aceh	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010</a>
	91	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010</a>
	92	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010</a>
	93	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010</a>
	94	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010</a>
	95	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010</a>
	96	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010</a>
	97	1	<a href="#">LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2010</a>
	98	1	<a href="#">LKPD Kota Sabang Tahun 2010</a>
2	99 Provinsi Sumatera Utara	1	<a href="#">LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010</a>
	100	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2010</a>
	101	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2010</a>
	102	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010</a>
	103	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010</a>
	104	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Karo Tahun 2010</a>
	105	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010</a>
	106	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010</a>
	107	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2010</a>
	108	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010</a>
	109	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010</a>
	110	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2010</a>
	111	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010</a>
	112	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2010</a>
	113	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010</a>
	114	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010</a>
	115	1	<a href="#">LKPD Kota Binjai Tahun 2010</a>
	116	1	<a href="#">LKPD Kota Medan Tahun 2010</a>
	117	1	<a href="#">LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2010</a>
	118	1	<a href="#">LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2010</a>
	119	1	<a href="#">LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2010</a>
	120	1	<a href="#">LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2010</a>
3	121 Provinsi Sumatera Barat	1	<a href="#">LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010</a>
	122	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Agam Tahun 2010</a>
	123	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010</a>
	124	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2010</a>
	125	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010</a>
	126	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010</a>

127	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Solok Tahun 2010</a>
128	1	<a href="#">LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2010</a>
129	1	<a href="#">LKPD Kota Padang Tahun 2010</a>
130	1	<a href="#">LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2010</a>
131	1	<a href="#">LKPD Kota Pariaman Tahun 2010</a>
132	1	<a href="#">LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2010</a>
133	1	<a href="#">LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2010</a>
<b>4</b>	<b>134</b>	<b>Provinsi Riau</b>
135	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010</a>
136	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010</a>
137	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010</a>
138	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Siak Tahun 2010</a>
139	1	<a href="#">LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2010</a>
<b>5</b>	<b>140</b>	<b>Provinsi Jambi</b>
141	1	<a href="#">LKPD Provinsi Jambi Tahun 2010</a>
142	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2010</a>
143	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2010</a>
144	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2010</a>
145	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2010</a>
146	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010</a>
147	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2010</a>
148	1	<a href="#">LKPD Kota Jambi Tahun 2010</a>
<b>6</b>	<b>149</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>
150	1	<a href="#">LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010</a>
151	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2010</a>
152	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010</a>
153	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2010</a>
154	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2010</a>
155	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010</a>
156	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010</a>
157	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010</a>
158	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010</a>
159	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010</a>
160	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010</a>
161	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010</a>
162	1	<a href="#">LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2010</a>
163	1	<a href="#">LKPD Kota Palembang Tahun 2010</a>
164	1	<a href="#">LKPD Kota Prabumulih Tahun 2010</a>
165	1	<a href="#">LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2010</a>
<b>7</b>	<b>165</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>
166	1	<a href="#">LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2010</a>
167	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010</a>
	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2010</a>

168		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010</a>
169		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2010</a>
170		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2010</a>
171		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2010</a>
172		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2010</a>
173		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010</a>
174		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2010</a>
175		1	<a href="#">LKPD Kota Bengkulu Tahun 2010</a>
<b>8</b>	<b>176 Provinsi Lampung</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Lampung Tahun 2010</a>
177		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010</a>
178		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010</a>
179		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010</a>
180		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010</a>
181		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010</a>
182		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2010</a>
183		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2010</a>
184		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2010</a>
185		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2010</a>
186		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010</a>
187		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010</a>
188		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2010</a>
189		1	<a href="#">LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2010</a>
190		1	<a href="#">LKPD Kota Metro Tahun 2010</a>
<b>9</b>	<b>191 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010</a>
192		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2010</a>
193		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010</a>
194		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010</a>
195		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010</a>
196		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2010</a>
197		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010</a>
198		1	<a href="#">LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2010</a>
<b>10</b>	<b>199 Provinsi Kepulauan Riau</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010</a>
200		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Anambas Tahun 2010</a>
201		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2010</a>
202		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2010</a>
203		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2010</a>
204		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2010</a>
205		1	<a href="#">LKPD Kota Tanjung Pinang Tahun 2010</a>
<b>11</b>	<b>206 Provinsi DKI Jakarta</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010</a>
<b>12</b>	<b>207 Provinsi Jawa Barat</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010</a>
208		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2010</a>
209		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010</a>
210		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2010</a>

211	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2010</a>
212	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2010</a>
213	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2010</a>
214	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2010</a>
215	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Garut Tahun 2010</a>
216	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2010</a>
217	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2010</a>
218	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2010</a>
219	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2010</a>
220	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2010</a>
221	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Subang Tahun 2010</a>
222	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010</a>
223	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2010</a>
224	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010</a>
225	1	<a href="#">LKPD Kota Bandung Tahun 2010</a>
226	1	<a href="#">LKPD Kota Banjar Tahun 2010</a>
227	1	<a href="#">LKPD Kota Bekasi Tahun 2010</a>
228	1	<a href="#">LKPD Kota Bogor Tahun 2010</a>
229	1	<a href="#">LKPD Kota Cimahi Tahun 2010</a>
230	1	<a href="#">LKPD Kota Cirebon Tahun 2010</a>
231	1	<a href="#">LKPD Kota Depok Tahun 2010</a>
232	1	<a href="#">LKPD Kota Sukabumi Tahun 2010</a>
233	1	<a href="#">LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2010</a>
13 234	1	<b>Provinsi Jawa Tengah</b> <a href="#">LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010</a>
235	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010</a>
236	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2010</a>
237	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Batang Tahun 2010</a>
238	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Blora Tahun 2010</a>
239	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2010</a>
240	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2010</a>
241	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2010</a>
242	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Demak Tahun 2010</a>
243	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2010</a>
244	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2010</a>
245	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2010</a>
246	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2010</a>
247	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2010</a>
248	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2010</a>
249	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2010</a>
250	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2010</a>
251	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pati Tahun 2010</a>
252	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2010</a>

253	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2010</a>
254	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010</a>
255	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2010</a>
256	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2010</a>
257	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2010</a>
258	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2010</a>
259	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010</a>
260	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2010</a>
261	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2010</a>
262	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010</a>
263	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010</a>
264	1	<a href="#">LKPD Kota Magelang Tahun 2010</a>
265	1	<a href="#">LKPD Kota Salatiga Tahun 2010</a>
266	1	<a href="#">LKPD Kota Semarang Tahun 2010</a>
267	1	<a href="#">LKPD Kota Surakarta Tahun 2010</a>
268	1	<a href="#">LKPD Kota Pekalongan Tahun 2010</a>
269	1	<a href="#">LKPD Kota Tegal Tahun 2010</a>
14 270	1	<b>Provinsi D I Yogyakarta</b> <a href="#">LKPD Provinsi DIY Tahun 2010</a>
271	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2010</a>
272	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010</a>
273	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010</a>
274	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2010</a>
275	1	<a href="#">LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2010</a>
15 276	1	<b>Provinsi Jawa Timur</b> <a href="#">LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010</a>
277	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2010</a>
278	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010</a>
279	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2010</a>
280	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010</a>
281	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2010</a>
282	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2010</a>
283	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Jember Tahun 2010</a>
284	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010</a>
285	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2010</a>
286	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2010</a>
287	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2010</a>
288	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2010</a>
289	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2010</a>
290	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Malang Tahun 2010</a>
291	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2010</a>
292	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2010</a>
293	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2010</a>
294	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2010</a>

295	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2010</a>
296	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2010</a>
297	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010</a>
298	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2010</a>
299	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2010</a>
300	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010</a>
301	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2010</a>
302	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2010</a>
303	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010</a>
304	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2010</a>
305	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2010</a>
306	1	<a href="#">LKPD Kota Batu Tahun 2010</a>
307	1	<a href="#">LKPD Kota Blitar Tahun 2010</a>
308	1	<a href="#">LKPD Kota Kediri Tahun 2010</a>
309	1	<a href="#">LKPD Kota Madiun Tahun 2010</a>
310	1	<a href="#">LKPD Kota Malang Tahun 2010</a>
311	1	<a href="#">LKPD Kota Mojokerto Tahun 2010</a>
312	1	<a href="#">LKPD Kota Pasuruan Tahun 2010</a>
313	1	<a href="#">LKPD Kota Probolinggo Tahun 2010</a>
314	1	<a href="#">LKPD Kota Surabaya Tahun 2010</a>
<b>16</b>	<b>315</b>	<b>Provinsi Banten</b>
	316	<a href="#">LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2010</a>
	317	<a href="#">LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2010</a>
	318	<a href="#">LKPD Kabupaten Serang Tahun 2010</a>
	319	<a href="#">LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2010</a>
	320	<a href="#">LKPD Kota Cilegon Tahun 2010</a>
	321	<a href="#">LKPD Kota Serang Tahun 2010</a>
	322	<a href="#">LKPD Kota Tangerang Tahun 2010</a>
	323	<a href="#">LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2010</a>
<b>17</b>	<b>324</b>	<b>Provinsi Bali</b>
	325	<a href="#">LKPD Kabupaten Badung Tahun 2010</a>
	326	<a href="#">LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2010</a>
	327	<a href="#">LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2010</a>
	328	<a href="#">LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2010</a>
	329	<a href="#">LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2010</a>
	330	<a href="#">LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2010</a>
	331	<a href="#">LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2010</a>
	332	<a href="#">LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2010</a>
	333	<a href="#">LKPD Kota Denpasar Tahun 2010</a>
<b>18</b>	<b>334</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>
	335	<a href="#">LKPD Kabupaten Bima Tahun 2010</a>
	336	<a href="#">LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2010</a>
	337	<a href="#">LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010</a>

338		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010</a>
339		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010</a>
340		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010</a>
341		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2010</a>
342		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010</a>
343		1	<a href="#">LKPD Kota Bima Tahun 2010</a>
344		1	<a href="#">LKPD Kota Mataram Tahun 2010</a>
<b>19</b>	<b>345 Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi NTT Tahun 2010</a>
346		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Belu Tahun 2010</a>
347		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ende Tahun 2010</a>
348		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010</a>
349		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2010</a>
350		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2010</a>
351		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010</a>
352		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010</a>
353		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2010</a>
354		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2010</a>
355		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010</a>
356		1	<a href="#">LKPD Kota Kupang Tahun 2010</a>
<b>20</b>	<b>357 Provinsi Kalimantan Barat</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010</a>
358		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2010</a>
359		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010</a>
360		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2010</a>
361		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2010</a>
362		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2010</a>
363		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2010</a>
364		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2010</a>
365		1	<a href="#">LKPD Kota Pontianak Tahun 2010</a>
366		1	<a href="#">LKPD Kota Singkawang Tahun 2010</a>
<b>21</b>	<b>367 Provinsi Kalimantan Tengah</b>	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010</a>
368		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2010</a>
369		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2010</a>
370		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010</a>
371		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010</a>
372		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010</a>
373		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2010</a>
374		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2010</a>
<b>22</b>	<b>375 Provinsi Kalimantan Selatan</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010</a>
376		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010</a>
377		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010</a>
378		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010</a>
379		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2010</a>
<b>23</b>	<b>380 Provinsi Kalimantan Timur</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010</a>
381		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Berau Tahun 2010</a>
382		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010</a>



	383		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Paser Tahun 2010</a>
	384		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010</a>
	385		1	<a href="#">LKPD Kota Balikpapan Tahun 2010</a>
	386		1	<a href="#">LKPD Kota Tarakan Tahun 2010</a>
<b>24</b>	387	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010</a>
<b>25</b>	388	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010</a>
	389		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2010</a>
	390		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010</a>
	391		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Buol Tahun 2010</a>
	392		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2010</a>
	393		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2010</a>
	394		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010</a>
	395		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Poso Tahun 2010</a>
	396		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2010</a>
	397		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010</a>
	398		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2010</a>
	399		1	<a href="#">LKPD Kota Palu Tahun 2010</a>
<b>26</b>	400	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010</a>
	401		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bone Tahun 2010</a>
	402		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2010</a>
	403		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2010</a>
	404		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2010</a>
	405		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010</a>
	406		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Maros Tahun 2010</a>
	407		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010</a>
	408		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2010</a>
	409		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010</a>
	410		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010</a>
	411		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010</a>
	412		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2010</a>
	413		1	<a href="#">LKPD Kota Palopo Tahun 2010</a>
<b>27</b>	414	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010</a>
	415		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Buton Tahun 2010</a>
	416		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2010</a>
	417		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010</a>
	418		1	<a href="#">LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2010</a>
	419		1	<a href="#">LKPD Kota Kendari Tahun 2010</a>
<b>28</b>	420	<b>Provinsi Gorontalo</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2010</a>
	421		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2010</a>
	422		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010</a>
	423		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2010</a>
	424		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010</a>
	425		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2010</a>
	426		1	<a href="#">LKPD Kota Gorontalo Tahun 2010</a>

<b>29</b>	<b>427</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010</a>
	428		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2010</a>
	429		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2010</a>
	430		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010</a>
	431		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010</a>
<b>30</b>	<b>432</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010</a>
	433		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010</a>
	434		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2010</a>
	435		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2009</a>
	436		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2009</a>
	437		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2009</a>
<b>31</b>	<b>438</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	1	<a href="#">LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010</a>
	439		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010</a>
	440		1	<a href="#">LKPD Kota Ternate Tahun 2010</a>
<b>32</b>	<b>441</b>	<b>Provinsi Papua</b>	1	<a href="#">LKPD Provinsi Papua Tahun 2010</a>
	442		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2010</a>
	443		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2010</a>
	444		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010</a>
	445		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2010</a>
	446		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2010</a>
	447		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010</a>
	448		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010</a>
	449		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2010</a>
	450		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2009</a>
<b>33</b>	<b>451</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	1	<a href="#">LKPD Kota Sorong Tahun 2010</a>
	452		1	<a href="#">LKPD Kabupaten Teluk Wondama TA 2009</a>

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2011

No	Entitas	Jml	Daftar LHP Objek Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN KINERJA</b>			
<b>V Penyelenggaraan Ibadah Haji</b>			
1	461 Kementerian Agama	1	<a href="#">Kinerja Atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M</a>
		1	
<b>VI Kinerja Bea dan Cukai</b>			
1	462 Kementerian Keuangan	1	<a href="#">Kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta di Jakarta</a>
	463	1	<a href="#">Kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I di Surabaya</a>
	464	1	<a href="#">Pelayanan dan Penatausahaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Penitipan dan Kantor Tukar Pos Udara Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta di Tangerang</a>
	465	1	<a href="#">Pelayanan dan Penatausahaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan di Medan</a>
		4	
<b>VII Kinerja Rumah Sakit</b>			
	466 Kementerian Kesehatan	1	<a href="#">Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RSAB Harapan Kita TA 2009 dan Semester I 2010 di Jakarta</a>
	467 Provinsi Aceh	1	<a href="#">Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, dan Satuan Kerja Lainnya Yang Menangani Bidang Kesehatan Kabupaten Aceh Barat TA 2009 dan 2010 di Meulaboh</a>
	468	1	<a href="#">Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Langsa di Kota Langsa</a>
	469 Provinsi Maluku	1	<a href="#">Pelayanan Kesehatan TA 2009-2010 pada RSUD Kabupaten Buru di Namlea</a>
		4	
<b>VIII Kinerja Lainnya</b>			
	470 Bappenas	1	<a href="#">Kegiatan Deputi Bidang Kemiskinan , Ketenagakerjaan dan UKM dan Deputi Bidang Ekonomi Pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009</a>
	471 Lembaga Administrasi Negara	1	<a href="#">Efektivitas Pengelolaan Kajian Pada Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada LAN di Jakarta, Bandung, dan Makassar</a>
	472 PT Jasa Raharja (Persero)	1	<a href="#">Kinerja PT Jasa Raharja (Persero) TB 2009 s.d. semester I 2010 di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palangkaraya dan Kupang</a>
	473 PT Pos Indonesia (Persero)	1	<a href="#">Kegiatan Transportasi dan Antar-an Kiriman Pos PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) di Bandung dan Jakarta</a>



## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2011

No	Entitas	Jml	Daftar LHP Objek Pemeriksaan
<b>PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>			
<b>IX Pelaksanaan Belanja dan Pendapatan</b>			
1	475 Dewan Perwakilan Rakyat	1	<a href="#">Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Negara Dewan Perwakilan Rakyat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 di Jakarta</a>
2	476 Mahkamah Agung	1	<a href="#">Belanja Negara Pada Badan Urusan Administrasi Dan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2009 (Semester II) Dan Tahun 2010 Di Jakarta Dan Bogor</a>
3	477 Kementerian Sekretariat Negara	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta</a>
4	478 Kementerian Luar Negeri	1	<a href="#">Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KBRI Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam</a>
	479	1	<a href="#">Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KJRI Kota Kinabalu di Malaysia</a>
	480	1	<a href="#">Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KJRI Kuching di Malaysia</a>
	481	1	<a href="#">Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KJRI Sydney di Australia</a>
	482	1	<a href="#">Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KRI Darwin di Australia</a>
	483	1	<a href="#">Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KJRI Chicago di Amerika Serikat</a>
	484	1	<a href="#">Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada PTRI New York di Amerika Serikat</a>
5	485 Kementerian Pertahanan	1	<a href="#">Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain Tahun 2009 dan Semester I 2010 pada Kementerian Pertahanan</a>
6	486 Mabes TNI	1	<a href="#">Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Badan Pembekalan (BABEK) TNI beserta jajarannya Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Aceh</a>
7	487 TNI AD	1	<a href="#">Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Kesdam Rumah Sakit di Lingkungan Kodam III/Siliwangi dan Kodam VI/Mulawarman di Bandung dan Balikpapan</a>
	488	1	<a href="#">Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Kodam IV/Diponegoro dan Kodam VII/Wirabuana di Semarang dan Makassar</a>
	489	1	<a href="#">Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembekalan Angkatan Darat (Ditbekangad) Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Ditbekangad, Kodam Jaya, Kodam I/Bukit Barisan, Kodam V/Diponegoro dan Kodam XVII/Cenderawasih di Jakarta, Medan, Semarang, dan Jayapura</a>
	490	1	<a href="#">Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad) di Jakarta, Bandung dan Pontianak</a>
8	491 TNI AL	1	<a href="#">Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit</a>

			<a href="#">Organisasi TNI AL TA 2009 dan 2010 pada Rumkit Dr Mintohardjo, Lembaga Kedokteran Gigi R.E Martadinata dan instansi terkait di Jakarta</a>
	492		1 <a href="#">Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AL TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan TNI AL, Lembaga Farmasi TNI AL Drs. Mochamad Kamal, Rumah Sakit Dr. Ramelan dan Instansi terkait di Jakarta dan Surabaya</a>
9	493	<b>TNI AU</b>	1 <a href="#">Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AU TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (DISKESAU), Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (Lakespra), Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut (Lakesgilut) dan Rumah Sakit d</a>
	494		1 <a href="#">Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AU TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau), Lembaga Farmasi Angkatan Udara (Lafiau), Rumah Sakit DR. Esnawan Antariksa dan Rumah Sakit Hardjolukito serta Instansi Terkait</a>
10	495	<b>Kementerian Kesehatan</b>	1 <a href="#">Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Tahun 2007-2010 (semester I) pada Kementerian Kesehatan di Jakarta</a>
11	496	<b>Kementerian Agama</b>	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d 31 Oktober 2010)</a>
	497		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d 15 Desember 2010)</a>
12	498	<b>Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan 2010 s.d Triwulan III pada UPTP Kemenakertrans di Bekasi, Serang, Yogyakarta, Medan, Ternate dan Sorong</a>
13	499	<b>Kementerian Sosial</b>	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Sosial di Jakarta</a>
14	500	<b>Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara</b>	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Kementerian PAN &amp; RB di Jakarta</a>
	501	<b>Kementerian Komunikasi dan Informasi</b>	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Kementerian Komunikasi dan Informasi</a>
	502		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan Tahun 2010 pada Kemenkominfo di Jakarta</a>
	503		1 <a href="#">Pengelolaan PNBP TA 2009 dan Semester I Tahun 2010 pada Ditjen Postel di Jakarta</a>
15	504	<b>Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta</a>
16	505	<b>Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	1 <a href="#">Belanja Barang, Modal dan PNBP TA 2009 dan 2010 pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat</a>
	506		1 <a href="#">Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan 2010 pada Korbrimob Kepolisian Republik Indonesia</a>
22	507	<b>Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional</b>	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan 2010 s.d Triwulan III pada BKKBN Provinsi</a>

23	508	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	<a href="#">Riau, Kaltim, NTB dan NTT</a>
			1	<a href="#">Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan semester I 2010 pada LIPI di Jakarta, Serpong, Cibinong dan Bandung</a>
24	509	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2009 dan Tahun 2010 (s.d Triwulan III) pada BATAN di Jakarta, Serpong dan Bandung</a>
25	510	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jakarta</a>
	511	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2009 (s.d Triwulan III) dan Tahun 2010 pada LAPAN di Jakarta, Bandung, Serpong dan Bogor</a>
26	512	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional di Jakarta</a>
27	513	Lembaga Administrasi Negara	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Lembaga Administrasi Negara di Jakarta</a>
28	514	Badan Kepegawaian Negara	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta</a>
29	515	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</a>
	516		1	<a href="#">Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (Triwulan III) di Jakarta, Bogor, Palembang, Lampung, Banjarmasin dan Jayapura</a>
30	517	Kementerian Perumahan Rakyat	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) dan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2010 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta</a>
31	518	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Jakarta</a>
32	519	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta</a>
	520		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Pasca Bencana TA 2009 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.</a>
33	521	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Periode 22 Agustus 2008 s.d 30 Juni 2010 pada BLU PPKGBK di Jakarta</a>
34	522	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Periode 22 Agustus 2008 s.d 30 Juni 2010 di Jakarta</a>
35	523	Provinsi Aceh	1	<a href="#">Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian Dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya di Calang</a>
36	524	Provinsi Sumatera Utara	1	<a href="#">Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah</a>

			<a href="#">Provinsi Sumatera Utara di Medan</a>
525		1	<a href="#">Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Parapat</a>
526		1	<a href="#">Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di Salak</a>
37	527	Provinsi Riau	1 <a href="#">Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru</a>
528		1	<a href="#">Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Pengadaan Daya Listrik pada Dinas Pertambangan dan Energi Serta Instansi Terkait Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009-2010 di Bengkalis</a>
529		1	<a href="#">Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota dan Dinas Kesehatan Kota Dumai di Dumai</a>
530		1	<a href="#">Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 - 2010 di Bangkinang</a>
531		1	<a href="#">Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d. September) Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Panjang</a>
532		1	<a href="#">Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi</a>
38	533	Provinsi Jambi	1 <a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Provinsi Jambi</a>
534		1	<a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari</a>
535		1	<a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Bungo</a>
536		1	<a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2010</a>
537		1	<a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun</a>
538		1	<a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat</a>
539		1	<a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Tebo</a>
540		1	<a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kota Jambi</a>
541		1	<a href="#">Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemerintah Kota Sungai Penuh</a>
39	542	Provinsi DKI Jakarta	1 <a href="#">Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta</a>
543		1	<a href="#">Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta</a>
40	544	Provinsi Kalimantan Timur	1 <a href="#">Belanja Bidang Infrastruktur TA 2009 &amp; 2010 (per 31 Oktober 2010) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda</a>
41	545	Provinsi Sulawesi Selatan	1 <a href="#">Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros TA 2009 dan 2010 (s.d. September 2010) di Maros</a>
42	546	Provinsi Maluku	1 <a href="#">Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah TA 2009 dan 2010 di Masohi</a>
547		1	<a href="#">Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Maluku TA 2009 dan 2010 di Ambon</a>



	548		1	<a href="#">Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon TA 2009 dan 2010 di Ambon</a>
43	549	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	1	<a href="#">Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur TA 2009 (Semester II) Dan TA 2010 Di Maba</a>
	550		1	<a href="#">Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 (Semester II ) dan TA 2010 Di Sanana</a>
	551		1	<a href="#">Belanja Daerah Pemerintah Kota Ternate Semester II 2009 Dan Tahun 2010 Di Ternate</a>
44	552	<b>Provinsi Papua</b>	1	<a href="#">Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2008, 2009 dan 2010 di Kobakma</a>
	553		1	<a href="#">Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Yalimo Tengah TA 2008 dan 2009 di Elelim</a>
			79	
<b>X</b>		<b>Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan</b>		
1	554	<b>Kementerian Pendidikan Nasional</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (Dana Alokasi Khusus (DAK)) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III)</a>
	555		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2009 dan 2010 pada Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Instansi Ter</a>
	556		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Sumber Dana APBN TA 2008, 2009 dan 2010 yang Terkait Dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMPN 1 Jambi, SMPN 7 Jambi, SMKN 3 Jambi, SMKN 4 Jambi</a>
2	557	<b>Provinsi Aceh</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Aceh Besar</a>
	558		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Sabang</a>
3	559	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Deli Serdang</a>
	560		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Langkat</a>
4	561	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tanah Datar</a>
5	562	<b>Provinsi Riau</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kuantan Singingi</a>
6	563	<b>Provinsi Jambi</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur</a>
7	564	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ogan Ilir</a>
8	565	<b>Provinsi Bengkulu</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Rejang Lebong</a>
9	566	<b>Provinsi Lampung</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi</a>

10	567	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	<a href="#">Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lampung Utara</a>
			1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Bangka Selatan</a>
11	568	Provinsi Kepulauan Riau	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lingga</a>
12	569	Provinsi Jawa Barat	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ciamis</a>
	570		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tasikmalaya</a>
13	571	Provinsi Jawa Tengah	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Batang</a>
	572		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Boyolali</a>
14	573	Provinsi D I Yogyakarta	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kulon Progo</a>
15	574	Provinsi Jawa Timur	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Blitar</a>
	575		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Pasuruan</a>
16	576	Provinsi Banten	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Pandeglang</a>
17	577	Provinsi Bali	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tabanan</a>
18	578	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lombok Barat</a>
19	579	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ende</a>
	580		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Sikka</a>
20	581	Provinsi Kalimantan Barat	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Melawi</a>
21	582	Provinsi Kalimantan Tengah	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kapuas</a>
22	583	Provinsi Kalimantan Selatan	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tabalong</a>
23	584	Provinsi Kalimantan Timur	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Nunukan</a>
24	585	Provinsi Sulawesi Utara	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi</a>

			<a href="#">Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Manado</a>
25	586	Provinsi Sulawesi Tengah	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Banggai Kepulauan</a>
26	587	Provinsi Sulawesi Selatan	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Bone</a>
	588		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Wajo</a>
27	589	Provinsi Sulawesi Tenggara	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Wakatobi</a>
28	590	Provinsi Gorontalo	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Gorontalo</a>
29	591	Provinsi Sulawesi Barat	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Mamasa</a>
30	592	Provinsi Maluku	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Maluku Tenggara</a>
31	593	Provinsi Maluku Utara	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Halmahera Utara</a>
32	594	Provinsi Papua	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Jayapura</a>
33	595	Provinsi Papua Barat	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Raja Ampat</a>

42

**XI Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil**

1	596	Departemen Kesehatan	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2002-2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat</a>
	597		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2010 pada Provinsi Papua serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya</a>
	598		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2010 pada Kabupaten Biak Numfor</a>
	599		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2010 pada Kota Jayapura</a>
	600		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2010 pada Provinsi Papua Barat</a>
	601		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2010 pada Kabupaten Manokwari di Manokwari</a>
2	602	Provinsi Papua	1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2007-2009 pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura</a>
	603		1 <a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Asmat</a>

604		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2010</a>
605		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007 - 2009 pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel</a>
606		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura</a>
607		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya</a>
608		1	<a href="#">Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2007-2009 di Merauke</a>
609		1	<a href="#">Pengelolaan Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Nabire</a>
610		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Paniai</a>
611		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang</a>
612		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi</a>
613		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2008 pada Pemerintah Kabupaten Supiori</a>
614		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Tolikara</a>
615		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Waropen di Botawa</a>
616		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2008 pada Pemerintah Kota Jayapura</a>
<b>3</b>	<b>617 Provinsi Papua Barat</b>	1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2009 pada Provinsi Papua Barat</a>
618		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Fakfak</a>
619		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Kaimana</a>
620		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2004-2009 pada Kabupaten Manokwari</a>
621		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Sorong</a>
622		1	<a href="#">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 Kabupaten Sorong Selatan</a>
		<b>27</b>	
<b>XII Subsidi Pemerintah</b>			
<b>1</b>	<b>623 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</b>	1	<a href="#">Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2010 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</a>
<b>2</b>	<b>624 PT Pertamina</b>	1	<a href="#">Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Tabung 3 Kg TA 2010 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, dan PT Petronas Niaga Indonesia</a>
<b>3</b>	<b>625 PT Petrokimia Gresik</b>	1	<a href="#">Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk</a>

		<a href="#">Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Petrokimia Gresik</a>
4	626	PT Pupuk Iskandar Muda
	1	<a href="#">Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Iskandar Muda</a>
5	627	PT Pupuk Kalimantan Timur
	1	<a href="#">Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Kalimantan Timur</a>
6	628	PT Pupuk Kujang
	1	<a href="#">Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Kujang</a>
7	629	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)
	1	<a href="#">Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Sriwidjaja</a>
8	630	Kementerian Pertanian, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero)
	1	<a href="#">Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2009 pada Kementerian Pertanian, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta dan Makassar</a>

8

### XIII Reviu Sistem Pengendalian Intern

1	631	PT Pertamina	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pertamina tahun 2010 di Jakarta, Cilacap, Balikpapan, Surabaya dan Medan</a>
2	632	PT Garuda Indonesia (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I Tahun 2010 di Cengkareng - Tangerang</a>
3	633	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I Tahun 2010 di Jakarta</a>
4	634	PT Batan Teknologi (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Batan Teknologi (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (Triwulan I) di Serpong</a>
5	635	PT Wijaya Karya (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Wijaya Karya (Persero) tbk periode tahun 2009 dan 2010 (smt I)</a>
6	636	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Periode Tahun 2009 dan 2010 (Semester I) di Bandung dan Jakarta</a>
7	637	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I 2010 di Bandung</a>
8	638	PT Jasa Marga (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Jasa Marga (Persero), Tbk. Periode Tahun 2009 Dan 2010 (Semester I) Di Kantor Pusat Dan Cabang Jagorawi</a>
9	639	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Kawasan Industri Medan (Persero) Periode Tahun 2009 Dan 2010 (Semester I) Di Medan</a>
10	640	PT Perkebunan Nusantara VII	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Perkebunan Nusantara VII TB 2009 dan 2010 (semester I) di Lampung</a>
11	641	PT Perkebunan Nusantara VIII	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Perkebunan Nusantara VIII TB 2009 dan 2010 (semester I) di Bandung</a>
12	642	PT Inhutani I	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Inhutani I TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Balikpapan dan Jakarta</a>

13	643	PT Inhutani II	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Inhutani II TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Kalimantan Selatan</a>
14	644	Perum Perhutani	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Perhutani TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Semarang</a>
15	645	Perum Peruri	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Peruri TA 2008, 2009 dan 2010 (semester I) di Jakarta</a>
16	646	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia TB 2010 (semester I) di Jakarta</a>
17	647	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) TA 2009 dan 2010 (semester I) di Palembang</a>
18	648	PT Pos Indonesia (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pos Indonesia (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) di Bandung dan Jakarta</a>
19	649	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta dan Purwakarta</a>
20	650	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 di Jakarta dan Denpasar</a>
21	651	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta dan Surabaya</a>
22	652	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 di Jakarta</a>
23	653	Perum Bulog	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Bulog Periode Tahun 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta, Yogyakarta dan Bali</a>
24	654	PT Surveyor Indonesia (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 s.d. Triwulan I Tahun 2010 di Jakarta dan Surabaya</a>
25	655	PT Jasa Raharja (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Jasa Raharja (Persero) Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta</a>
26	656	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) di Jakarta</a>
27	657	PT Sucofindo (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Sucofindo (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Balikpapan</a>
28	658	Perum Jamkrindo	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta</a>
29	659	Perum Pegadaian	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Pegadaian Tahun Buku 2009 di Jakarta</a>
30	660	PT Askrindo (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Askrindo (Persero) Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta</a>
31	661	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun buku 2009 s.d. semester I tahun 2010 di Jakarta</a>
32	662	PT Bukit Asam (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2010 di Tanjung Enim, Tarahan, Jakarta</a>

33	663	PT Antam (Persero)	1	<a href="#">Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Antam (Persero) Tbk Tahun 2010 di Jakarta dan Pomalaa</a>
			33	
<b>XIV Operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</b>				
1	664	PT Perikanan Nusantara	1	<a href="#">Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Aktivitas Investasi pada PT Perikanan Nusantara TB 2008 dan 2009 di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Makasar</a>
2	665	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	1	<a href="#">Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Non Bersubsidi dan Investasi TB 2009 dan 2010 (Semester I) pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) di Palembang, Riau dan Jakarta</a>
3	666	Perum Peruri	1	<a href="#">Kegiatan Pengadaan TB 2009 dan 2010 (semester I) pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia di Jakarta</a>
			3	
<b>XV Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya</b>				
1	667	Mahkamah Agung	1	<a href="#">Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tahun 2009 dan 2010 pada Mahkamah Agung (MA)</a>
2	668	Kementerian Keuangan, Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)	1	<a href="#">Pengelolaan Sisa Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada PT Perusahaan Pengelola Aset dan Kementerian Keuangan di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Bandung dan Surabaya</a>
3	669	Kementerian Pekerjaan Umum	1	<a href="#">Pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier Block-C (paket 13: LCB 7) Muncak Kabau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Tahun 2008 s.d 2010 pada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakart</a>
5	670	Badan Pertanahan Nasional	1	<a href="#">Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Juni 2010) pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Pontianak, dan Aceh.</a>
6	671	Badan Kepegawaian Negara	1	<a href="#">Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2009 dan 2010 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN)</a>
7	672	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	<a href="#">Pengelolaan Aset Non Produksi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2008 dan 2009 di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Jember, Medan, dan Aceh</a>
7	673	Provinsi Sumatera Utara	1	<a href="#">Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan Untuk TB 2009 dan 2010 Pada PD Pasar Kota Medan</a>
8	674	Provinsi Riau	1	<a href="#">Kegiatan Operasional PT Bumi Laksamana Jaya TB 2007, 2008, 2009, dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis</a>
	675		1	<a href="#">Kegiatan Operasional PT Permodalan Ekonomi Rakyat TB 2009 dan 2010 di Pekanbaru</a>
	676		1	<a href="#">Operasional PT Bank Riau Kepri Tahun 2008, 2009 dan 2010 di Pekanbaru</a>
9	677	Provinsi Sumatera Selatan	1	<a href="#">Perjanjian Kerjasama PD Sarana Pembangunan Muara Enim dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pengelolaan Lapangan Selo dan Betun pada Kabupaten Muara Enim</a>
10	678	Provinsi DKI Jakarta	1	<a href="#">Pendapatan dan Biaya pada PD Pasar Jaya TB 2009 dan 2010</a>
	679		1	<a href="#">Pendapatan dan Biaya pada PT Food Station Tjipinang Jaya TB 2009 dan 2010</a>

680		1	<a href="#">Pendapatan dan Biaya pada PT Jakarta Tourisindo TB 2009 dan 2010</a>	
11	681	Provinsi Papua	1	<a href="#">Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD Dok II Jayapura Tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai dengan November di Jayapura</a>
682		1	<a href="#">Pengelolaan Operasional PT Bank Papua Tahun 2009 dan 2010 (semester I) di Jayapura</a>	